PROFIL KESEHATAN



DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Website :
www.dinkes.riau.go.id

Email :
dinaskesehatan@riau.go.id

Telephone :
(0761) 23810-26032

Tahun 2019

PROFIL KESEHATAN PROVINSI RIAU 2019

Buku ini diterbitkan oleh

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Dien III, Pekanbaru
Fax No : 0761-47968
E-mail : dinaskesehatan@riau.go.id
Web Site : http://dinkes.riau.go.id

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau)

KETUA

Ninno Wastikasari, SE, M.SI (Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau)

EDITOR

Achmad Jajuli, SKM, MKM (Kepala Sub Bagian Perencanaan Program)

ANGGOTA

Dwi Sri Rahayu, SKM
Rina Susanti, Amd
Ali Napia, S.Kom
Florida, SKM
Saryan, Amd
Julhelman, S. Kom
Parlaungan Siregar, ST

KONTRIBUTOR

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Seksi Pengendalian, Pemberantasan Penyakit
- Seksi Penyehatan Lingkungan
- Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra

Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga
- Seksi Promosi Kesehatan dan PSM
- Seksi Jamkesmas
- Seksi Gizi dan Kesga

Bidang Pelayanan Kesehatan
- Seksi Kesehatan Dasar
- Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus
- Seksi Farmamin dan Alkes

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
- Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Alkes
- Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan

Subbag Bina Program
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
Rumah Sakit se Provinsi Riau
Badan Pusat Statistisk (BPS) Provinsi Riau

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada akhirnya berhasil menyusun produk publikasi **"Profil Kesehatan Provinsi Riau 2019"**. Saya menyambut gembira hadirnya Profil Kesehatan yang terbit ini untuk merespon tingginya kebutuhan akan data dan informasi sebagai landasan pengambilan keputusan yang *evidence-based* yang penuh dengan tantangan.

Saya menyadari bukan hal mudah untuk dapat menyajikan data yang berkualitas sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Pemenuhan kelengkapan data baik dari segi cakupan wilayah maupun indikator merupakan masalah utama yang ditemui dalam rangka penyusunan profil yang tepat waktu. Kendala ini dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi baik di tingkat Puskesmas, Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Selain itu dalam menyusun Profil Kesehatan diperlukan komitmen bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penyediaan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Dinas Provinsi Riau telah melakukan banyak upaya agar data dan informasi yang disajikan pada Profil Kesehatan Provinsi Riau dapat hadir lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya sangat berharap dengan hadirnya Profil Kesehatan Provinsi Riau 2019 ini, kebutuhan terhadap data dan informasi kesehatan di semua lini, baik institusi Pemerintah, institusi swasta, organisasi profesi, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Profil Kesehatan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dalam mengukur kinerja program pembangunan kesehatan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang berguna bagi perencanaan program pembangunan kesehatan berikutnya.

Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, dalam hal ini pengelola data dan program, serta lintas sektor yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan. Semoga dimasa mendatang dapat menyajikan data yang lebih berkualitas dan dapat terbit lebih cepat.

Pekanbaru, 03 Agustus 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU

Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
NIP. 19660717 199102 2 001

Daftar Isi Halaman

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Lampiran vii
BAB 1 DEMOGRAFI 1
A. Kondisi Geografi dan Administrasi 1
1. Luas Wilayah 2
2. Jumlah Desa/Kelurahan 2
B. Kependudukan 3
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur. 3
2. Kepadatan Penduduk/ Km^2 3
3. Rasio Beban Tanggungan 5
4. Rasio Jenis Kelamin 6
5. Pendidikan 7
BAB II SARANA KESEHATAN 10
A. Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan/ Pengelola 10
1. Rumah Sakit 10
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 16
B. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 23
1. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan 23
2. Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan 24
3. Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit 25
4. Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit 26
5. Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Vaksin 30
C. Upaya Kesehatan Bersumbedaya Masyarakat 30
1. Posyandu 31
2. Cakupan Posyandu Menurut Strata 32
3. Posyandu PTM (Penyakit Tidak Menular) 35

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 37
A. Jumlah dan Rasio Tenaga Medis 39
1. Rasio Dokter Spesialis 39
2. Rasio Dokter Umum 40
3. Rasio Dokter Gigi 42
B. Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan 44
1. Rasio Tenaga Perawat 44
2. Rasio Tenaga Bidan 45
C. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat 47
1. Tenaga Kesehatan Masyarakat 47
2. Tenaga Kesehatan Lingkungan 49
3. Tenaga Gizi 50
D. Jumlah dan Rasio Tenaga Keterapian Fisik dan Keteknisan Medik 52
1. Tenaga Keterapian Fisik 52
2. Tenaga Keteknisan Medik 53
E. Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian 55
1. Apoteker 55
2. Tenaga Teknis Kefarmasian 57
F. Jumlah dan Rasio Tenaga Penunjang/ Pendukung Kesehatan 58
BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN 60
A. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 60
B. Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan 62
C. Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten/ Kota 63
D. Anggaran Kesehatan Perkapita 66
BAB V KESEHATAN KELUARGA 68
A. Kesehatan Ibu 68
1. Jumlah dan Angka Kematian Ibu 68
2. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil 71
3. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan 73
4. Cakupan Pelayanan Nifas 75
5. Ibu Nifas Mendapat Vitamin A 75
6. Cakupan Imunisasi Td Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur 76
7. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah 79
8. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan 80

9. Peserta Aktif KB 82
10. Peserta KB Pasca Persalinan 84
B. Kesehatan Anak 85
1. Kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup 87
2. Kematian Bayi dan Balita per-1.000 Kelahiran Hidup 88
3. Penanganan Komplikasi Pada Neonatal 89
4. Cakupan Kunjungan Neonatal 90
5. Bayi Diberi ASI Eksklusif 93
6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 95
7. Persentase Desa/ Kelurahan UCI 96
8. Anak Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 98
9. Imunsisasi BCG pada Bayi 99
10. Pemberian Vitamin A pada Bayi dan Balita 100
11. Pelayanan Kesehatan Balita 102
12. Balita Ditimbang 104
C. Status Gizi Pada Balita 105
1. Balita Gizi Kurang, Pendek dan Kurus 105
2. Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1, 7 dan 10 109
D. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut 110
1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 110
2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 111
BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT 112
A. Penyakit Menular Langsung 112
1. Tuberkulosis 112
2. HIV dan AIDS 118
3. Pneumonia 121
4. Diare 122
5. Kusta/ Lepra 125
6. Kejadian Luar Biasa (KLB) 128
7. Hepatitis (HbsAg) 129
B. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) 131
1. Campak Mesles Rubella (MR) 131
2. Acute Flaccid Paralysis (AFP) 132

C. Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
1. Demam Berdarah Dengue (DBD) 133
2. Malaria 135
3. Filariasis 137
4. Rabies (Anjing Gila) 138
D. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 144
1. Hipertensi 144
2. Diabetes Militus 145
3. Tumor/ Kanker 146
4. ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) 147
E. Pelayanan Kesehatan Haji 148
BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN 151
A. Air Minum 152
B. Jamban Sehat 154
C. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 156
D. Tempat – Tempat Umum 157
E. Tempat Pengelolaan Makanan 158
F. Program Pengembangan Kawasan dan Pemukiman Sehat 160
G. Program Pengawasan Limbah Fasyankes 162

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten /Kota Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 3 : Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 4 : Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Provinsi Riau Tahun 208

Tabel 5 : Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 .

Tabel 6 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1 di Provinsi Riau Tahun 2019.

Tabel 7 : Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit di Provinsi Riau 2019

Tabel 8 : Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit di Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 9 : Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Dan Vaksin Esensial menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 10 : Jumlah Posyandu Dan Posbindu PTM* menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 11 : Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019.

Tabel 12 : Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019.

Tabel 13 : Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 14 : Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, Dan Keteknisan Medik di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 15 : Jumlah Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019.

Tabel 16 : Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 17 : Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 18: Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 19 : Anggaran Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 20 : Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 21 : Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 22 : Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 23 : Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tahun 24 : Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019.
Tahun 25 : Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Yang Tidak Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tahun 26 : Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur (Hamil Dan Tidak Hamil) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 27 : Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Ttd) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 28 : Peserta Kb Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 29 : Cakupan Dan Proporsi Peserta Kb Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 30 : Jumlah Dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan Dan Komplikasi Neonatal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 31 : Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2019
Tabel 32 : Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Penyebab Utama di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 33 : Bayi Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Menurut Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2019
Tabel 34 : Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 35 : Bayi Baru Lahir Mendapat IMD* dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 36 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 37 : Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 38 : Cakupan Imunisasi Hepatitis B0 (0 -7 Hari) dan BCG pada Bayi menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 39 : Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib 3, Polio 4*, Campak/MR, Dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 40 : Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib 4 Dan Campak/MR2 Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun (Baduta) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 41 : Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 42 : Cakupan Pelayanan Anak Balita Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 43 : Jumlah Balita Ditimbang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 44 : Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, Dan BB/TB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 45 : Cakupan Pelayanan Kesehatan (Penjaringan) Peserta Didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 46 : Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 47 : Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak SD dan setingkat menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.

Tabel 48 : Pelayanan Kesehatan Usia Produktif menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 49 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 50 : Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 51 : Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, Case Notification Rate (Cnr) Per 100.000 Penduduk Dan Case Detection Rate (Cdr) menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 52 : Angka Kesembuhan Dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 53 : Penemuan Kasus Pneumonia Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 54 : Jumlah Kasus HIV Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.
Tabel 55 : Jumlah Kasus Dan Kematian Akibat Aids Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 56 : Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 57 : Kasus Baru Kusta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 58 : Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, Cacat Tingkat 2, Penderita Kusta Anak<15 Tahun, Penderita Kusta Anak<15 Tahun Dengan Cacat Tingkat 2 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 59 : Jumlah Kasus Terdaftar Dan Angka Prevalensi Penyakit Kusta Menurut Tipe/Jenis di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 60 : Penderita Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/RFT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 61 : Jumlah Kasus AFP (Non Polio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 62 : Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 63 : Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 64 : Jumlah Penderita Dan Kematian Pada KLB Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa (Klb) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 65 : Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 66 : Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 67 : Penderita Kronis Filariasis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 68 : Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 69 : Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 70 : Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (SADANIS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 71 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 72 : Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 73 : Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 74 : Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 75 : Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019
Tabel 76 : Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019

DEMOGRAFI

BAB I DEMOGRAFI

A. Kondisi Geografis dan Administrasi

Provinsi Riau secara geografis terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional. Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 87.023,66 km^2. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01^{o}05'00'' Lintang Selatan sampai 02^{o}25'00'' Lintang Utara atau antara 100^{o}00'00'' Bujur Timur-105^{o}05'00'' Bujur Timur.

Batas-batas daerah Riau adalah :

Sebelah Utara	:	Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Selatan	:	Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
Sebelah Timur	:	Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
Sebelah Barat	:	Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara



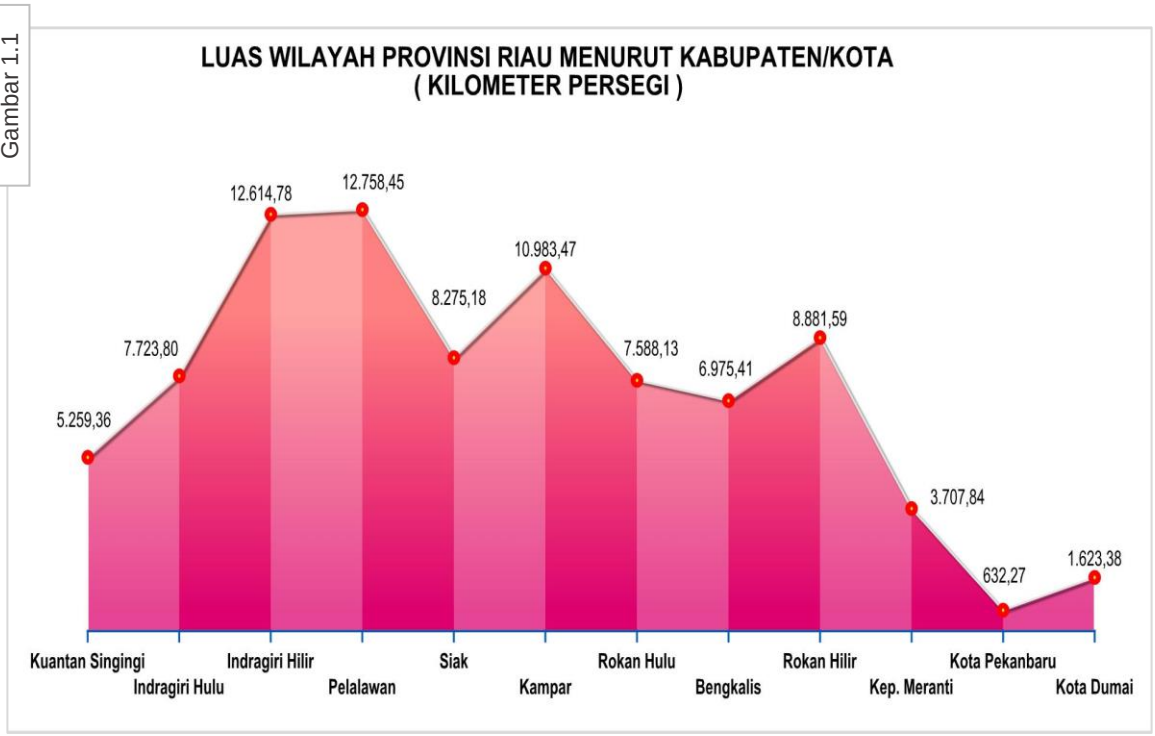
Dari posisi ini kelihatan bahwa Provinsi Riau berbatasan langsung dengan 4 (empat) Provinsi lainnya, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Riau. Disamping itu juga berhadapan langsung dengan 2 (dua) negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini secara ekonomi justru akan

memberikan keuntungan bagi Provinsi Riau apabila bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada.

1. Luas Wilayah

Provinsi Riau merupakan daerah kepulauan yang dengan luas wilayah 87.023,7 km^2, dan merupakan Provinsi yang memiliki luas wilayah ke dua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan. Dan Kabupaten Pelalawan merupakan Kabupaten yang terluas 12.758,4 km^2 diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir seluas 12.614,8 km^2 dan Kabupaten Kampar 10.983,5. Dan Kabupaten/Kota yang luas wilayahnya terkecil adalah Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,27 km^2. dikuti Kota Dumai 1.623,38 km^2. dan Kabupaten Kepulauan Meranti 3.707,84 km^2. Gambaran luas wilayah Provinsi Riau berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.1



2. Jumlah Desa/Kelurahan

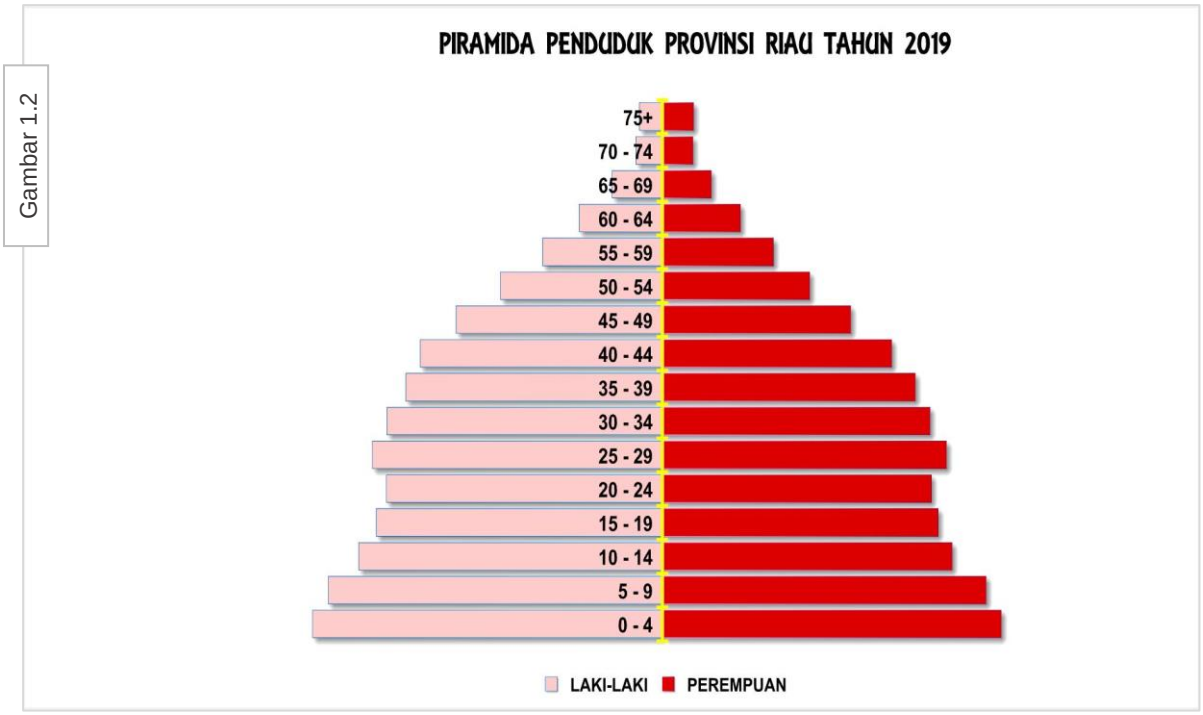
Secara administratif Provinsi Riau terbagi menjadi 10 Kabupaten dan 2 Kota dengan Kecamatan 169 Kecamatan meliputi Desa / Kelurahan 1.876 Desa/Kelurahan dimana Kabupaten Kampar dengan kecamatan terbanyak (21 kecamatan) dan Kabupaten Kampar dengan Kelurahan / Desa terbanyak (250 kelurahan/Desa). Sedangkan Kota Dumai dengan kecamatan paling sedikit (7 kecamatan) dengan Kelurahan/Desa (33 kelurahan).

B. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Hasil proyeksi penduduk tahun 2019 juga memperlihatkan perbedaan komposisi penduduk berdasarkan gender yaitu terdiri dari 3.574.942 laki-laki dan 3.396.803 perempuan. Berdasarkan Gambar dibawah ini dapat dilihat bentuk piramida penduduk Provinsi Riau tahun 2019 masih bertipe ekspansif, di mana penduduk muda menunjukkan proporsi yang besar dan kecilnya proporsi penduduk tua, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi (bagian tengah cembung). Sedangkan badan piramida yang besar, menunjukkan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif yang besar.

Gambar 1.2



2. Kepadatan Penduduk/KM2

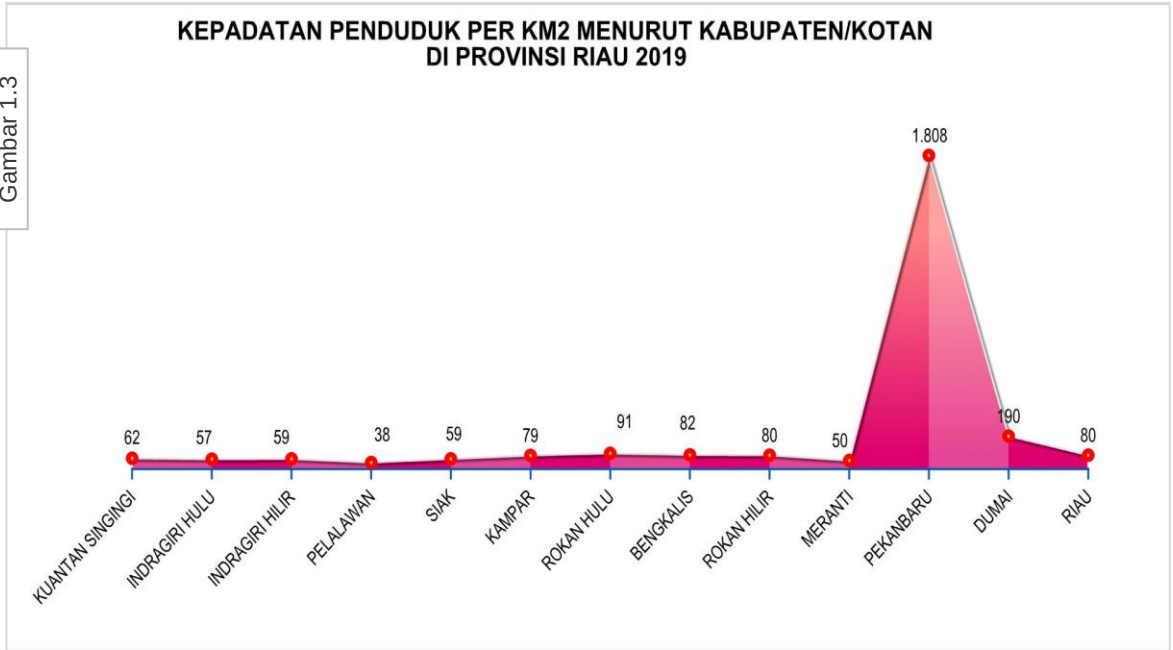
Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu wilayah, tetapi di sisi lain penduduk juga dapat menjadi suatu beban bagi wilayah itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan berbagai masalah yang dapat menghambat pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan dapat menimbulkan masalah-masalah terutama yang menyangkut tentang penyediaan berbagai kebutuhan, termasuk juga di dalamnya pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk selain merupakan obyek juga merupakan subyek pembangunan. Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan proyeksi BPS tahun 2019 adalah 6.971.745 jiwa, Bila dibandingkan dengan sensus maupun survei penduduk sebelumnya, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu 19 tahun yaitu dari tahun 2000 hingga 2019.

Wilayah Provinsi Riau semakin padat penduduk, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 kepadatan penduduk Provinsi Riau sebesar 43 jiwa per kilometer persegi dan angka ini meningkat terus hingga mencapai 80 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2019.

Sedangkan Penyebaran penduduk di Provinsi Riau tidak merata, sebagian besar penduduk Provinsi Riau bertempat tinggal di kota Pekanbaru 1.808 jiwa/km^2 mengingat Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, kota ke dua yang memiliki penduduk yang padat adalah Kota Dumai 190 jiwa/km^2 sebagai kota pelabuhan dan penghasil minyak bumi dan selanjut kabupaten Rokan Hulu 91 jiwa/km^2 yang berbatasan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan daerah yang penduduknya sangat jarang adalah Kabupaten Pelalawan 38 jiwa/km^2 dan Kabupaten Kep. Meranti 50 jiwa/km^2 dan Kabupaten Indragiri Hulu 57 jiwa/km^2 . Untuk melihat gambaran kepadatan penduduk di Provinsi lihat dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Gambar 1.3

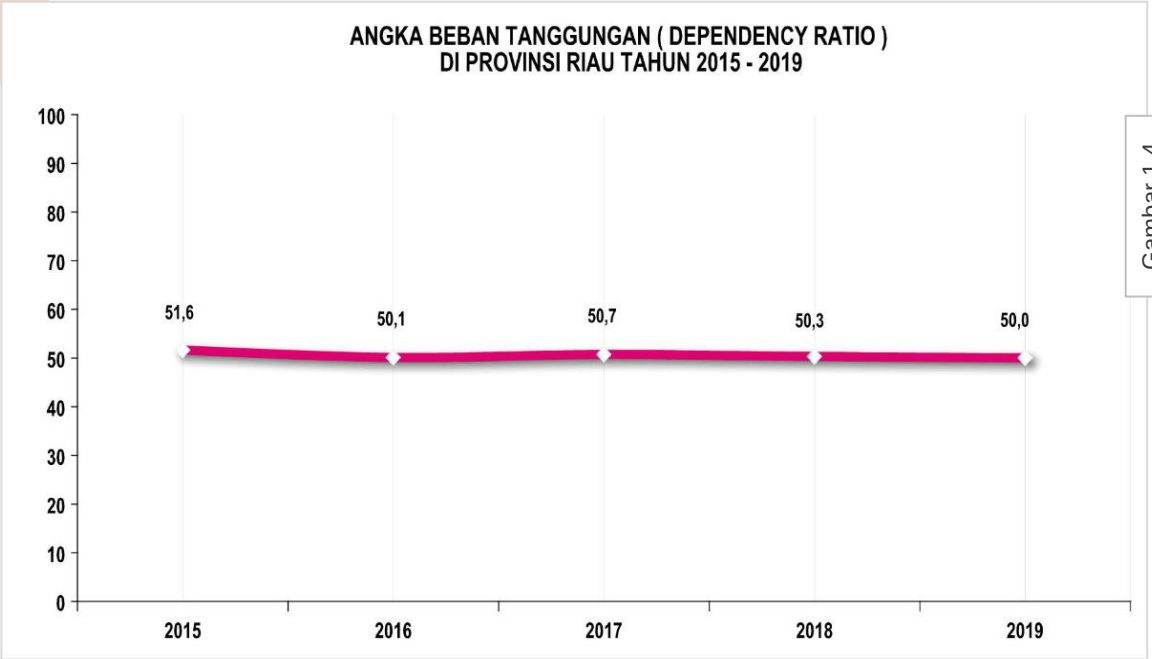


Masalah kependudukan lainnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan oleh berbagai hal antara lain letak geografis, iklim/cuaca, tingkat kesuburan tanah, pusat kegiatan penduduk dan faktor sosial budaya atau adat istiadat wilayah setempat. Tidak meratanya persebaran penduduk akan menyebabkan berbagai masalah seperti meningkatnya jumlah pengangguran, munculnya permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai serta masalah-masalah sosial lainnya.

3. Rasio Beban Tanggungan

Pengelompokkan penduduk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan. Usia produktif itu sendiri adalah penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun (disebut juga penduduk usia kerja) yang dapat masuk ke pasar kerja dan memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan penduduk tidak produktif yaitu penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan penduduk usia kerja) yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tingginya persentase penduduk usia produktif merupakan potensi sumber daya manusia bagi Provinsi Riau. Perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif ini menunjukkan rasio beban tanggungan.

Struktur umur penduduk Provinsi Riau masih didominasi oleh penduduk usia produktif dan Struktur penduduk tersebut mempengaruhi angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) Provinsi Riau. Pada periode 2015-2019, angka beban tanggungan (dependency ratio) di Provinsi Riau terus mengalami penurunan dimana tahun 2014 (51,9) turun menjadi 2019 (50,00). ini artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 50 penduduk usia tidak produktif. Hal ini menunjukkan Provinsi Riau belum mengalami era bonus demografi. Bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif atau angka beban ketergantungan di bawah 50.

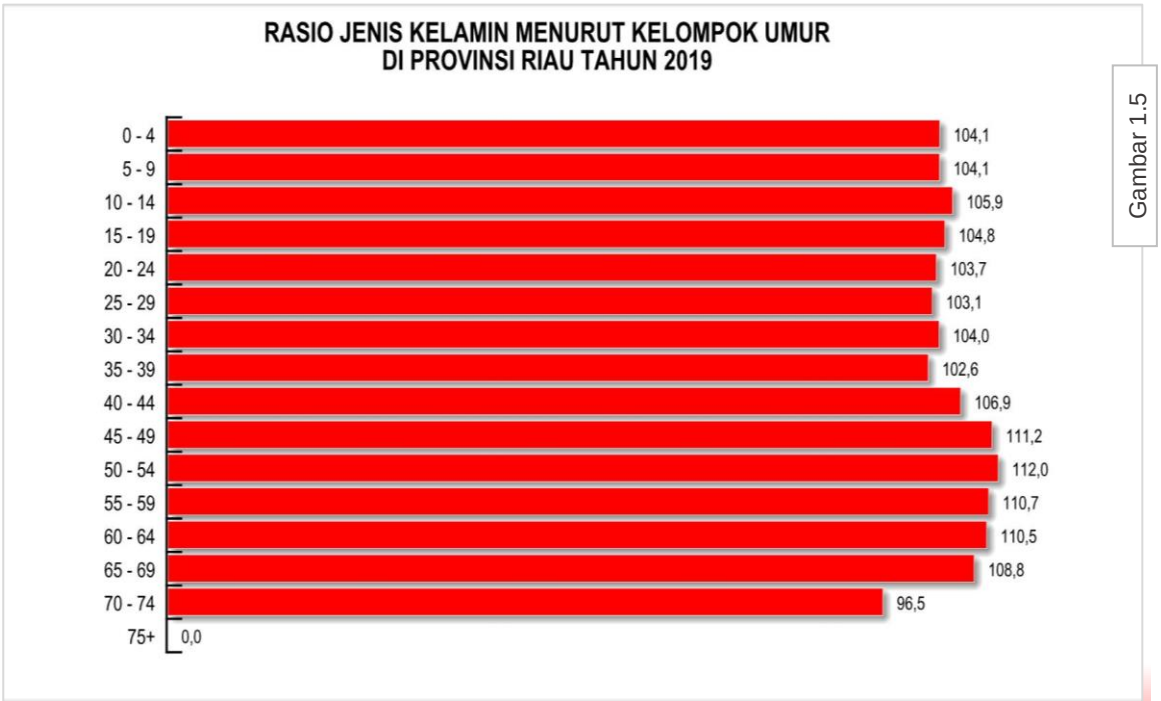


Gambar 1.4

4. Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin didasarkan atas penduduk laki-laki dan perempuan disebut rasio jenis kelamin (sex ratio). Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Riau tahun 2019 sebesar 105,24. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 106 penduduk laki-laki atau dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Riau lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Berikut adalah gambaran rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur di tahun 2019.

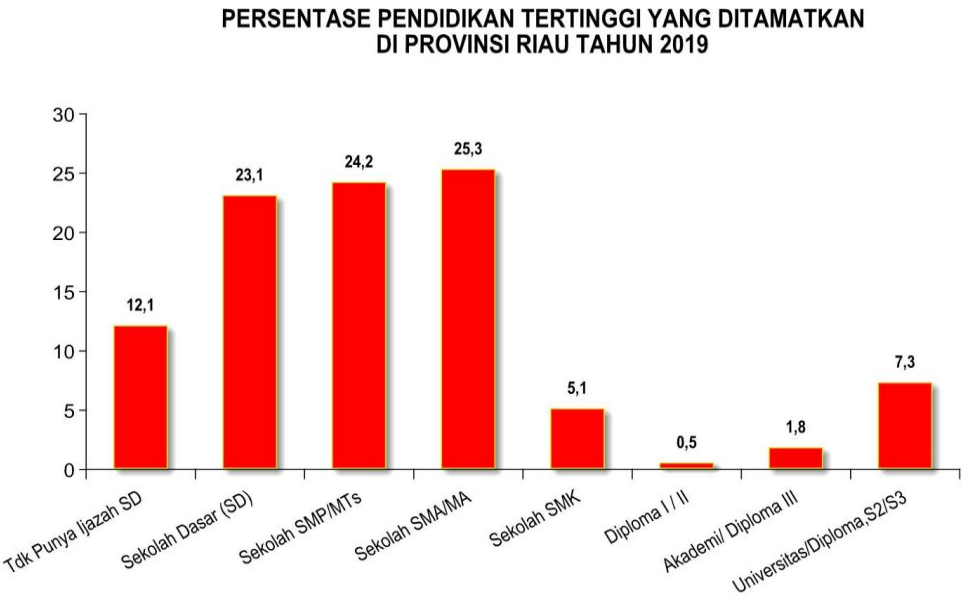


Gambar 1.5

5. Pendidikan

Pada tahun 2019 ini penduduk Provinsi Riau memiliki ijazah tertinggi pada tingkat SMA/MA sebesar 25,92 dan tahun 2018 sebesar 25,8. Sedangkan pada tahun 2017 penduduk yang memiliki ijazah tertinggi adalah tamat Sekolah Dasar sebesar 27,05. Ini artinya penduduk Provinsi Riau yang berpendidikan Sekolah dasar semakin tahun berkurang dan hal sangat baik untuk pembangunan Provinsi Riau. Sedangkan penduduk yang memiliki ijazah tertinggi Diploma atau lulusan Universitas tahun 2019 sebesar 9,62 dan tahun 2018 sebesar 9,6 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 7.19%. Sedangkan untuk persentase tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Riau bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.6

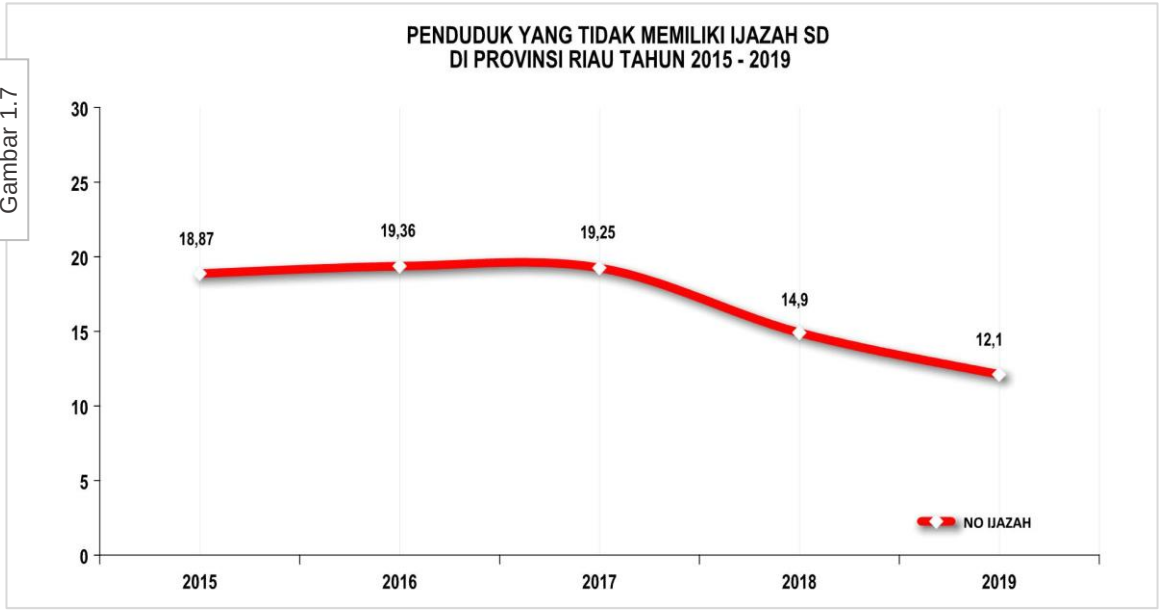


Angka Harapan Lama Sekolah (*Expexted Years of Schooling - EYS)* didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Riau berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yaitu 13,20 tahun dan rata-rata lama sekolah 9,03. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Ini artinya anak-anak sekolah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Akan tetapi, masih ada sebagian penduduk yang belum merasakan lamanya sekolah sesuai angka Harapan Lama Sekolah tersebut yang ditandai dengan tidak memiliki ijazah SD sebanyak 12.10 % penduduk. Bila dilihat dalam 5 (lima) tahun dari tahun 2015 – 2019 diketahui bahwa di Provinsi Riau penduduk yang tidak memiliki

ijazah mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 penduduk yang tidak memiliki ijazah sebesar 18,87 dan menurun pada tahun 2019 sebesar 12,1. Untuk jelasnya gambaran penduduk Riau dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.7



Sedangkan untuk penduduk yang memiliki ijazah sarjana di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 9,62. Penduduk yang memiliki ijazah sarjana di Provinsi Riau sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 7,1 dan pada tahun 2019 sebesar 9,62. Ini artinya penduduk Provinsi Riau sudah memahami bahwa pendidikan itu penting, ditandai dengan adanya peningkatan penduduk yang telah menamatkan Pendidikan Universitas. Gambaran penduduk yang memiliki ijazah sarjana selama 5 (lima) tahun 2015-2019 di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.8



Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidik an berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan di berbagai bidang kehidupan.

Pendidikan memperluas peluang seseorang. Pendidikan meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar bisa hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

*

SARANA KESEHATAN

BAB II SARANA KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang diulas pada pada bagian ini berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari : puskesmas, Rumah Sakit, dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

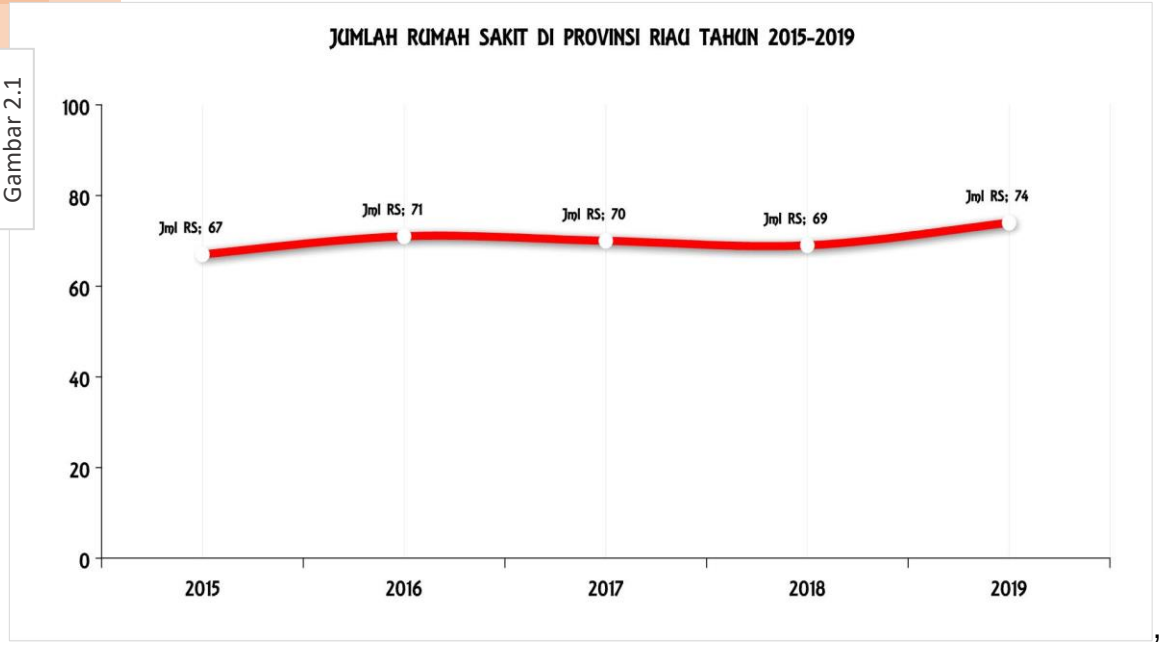
A. SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN/PENGELOLA

1. Rumah Sakit

Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif. Rumah Sakit (RS) merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang utamanya menyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Rumah Sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Tugas Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan paripurna, diklat, dapat juga melakukan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

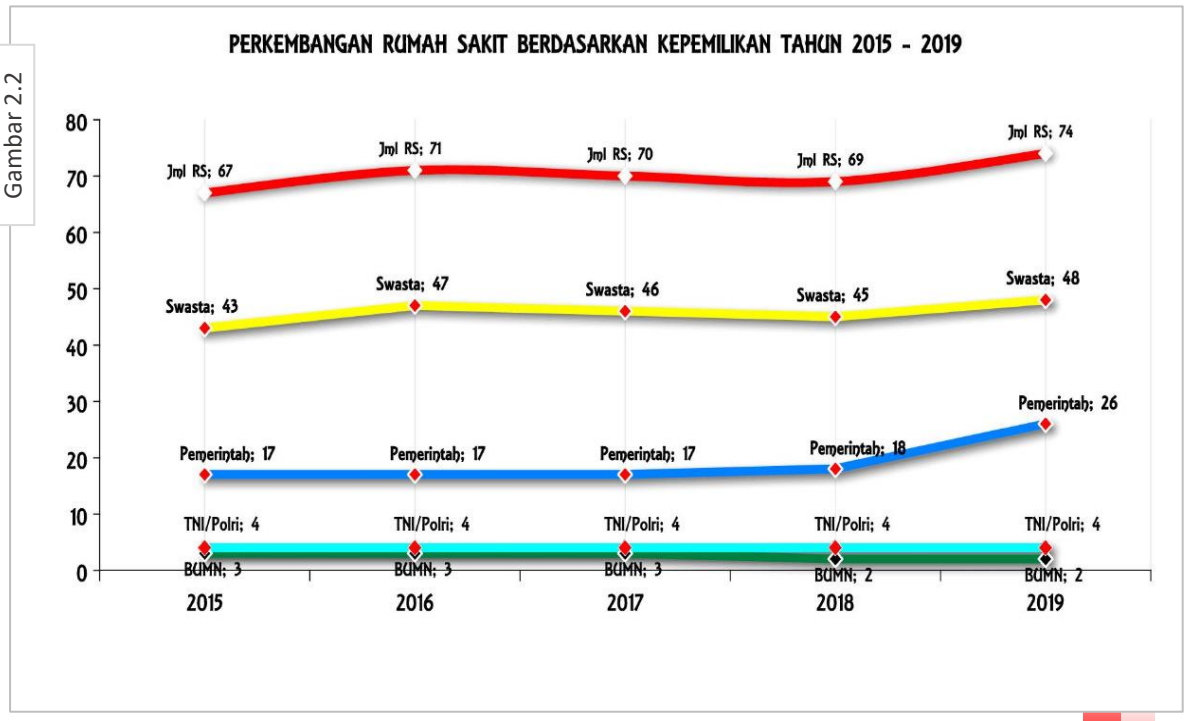
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) jumlah Rumah Sakit baik yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta mengalami peningkatan, dimana tahun 2015 terdapat 67 Rumah Sakit bertambah menjadi 74 Rumah Sakit pada tahun 2019. Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun (2015 -2019) cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2017 dan tahun 2018 yang mengalami pengurangan 1 Rumah Sakit Swasta dibandingkan tahun 2016. Untuk Rumah Sakit Swasta di Provinsi Riau terus mengalami perkembangan terutama Kota Pekanbaru, hal ini seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru. Jumlah Rumah Sakit di Kota Pekanbaru sangat jauh perbandingannya dengan jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 2.1



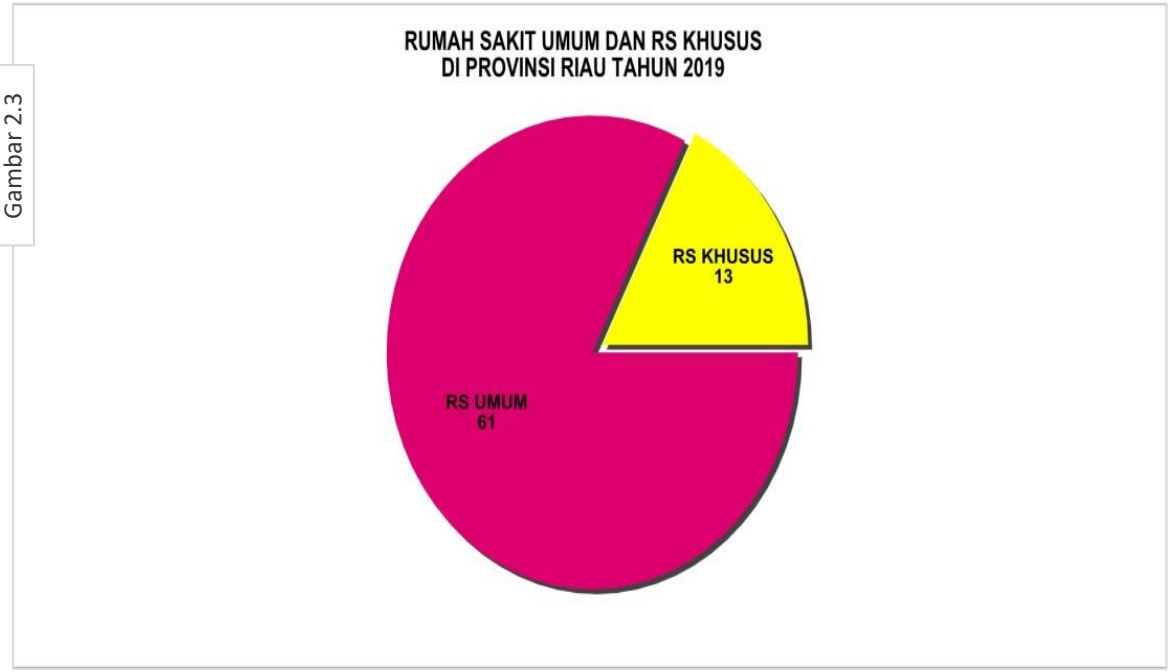
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, Kementerian lain serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah Rumah Sakit Publik di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2019 sebanyak 24unit. Berbeda dengan Rumah Sakit publik, Rumah Sakit privat dikelola oleh BUMN dan swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya). Pada tahun 2019 terdapat 50 unit Rumah Sakit privat di Provinsi Riau. Rumah Sakit publik maupun privat menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, namun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.2



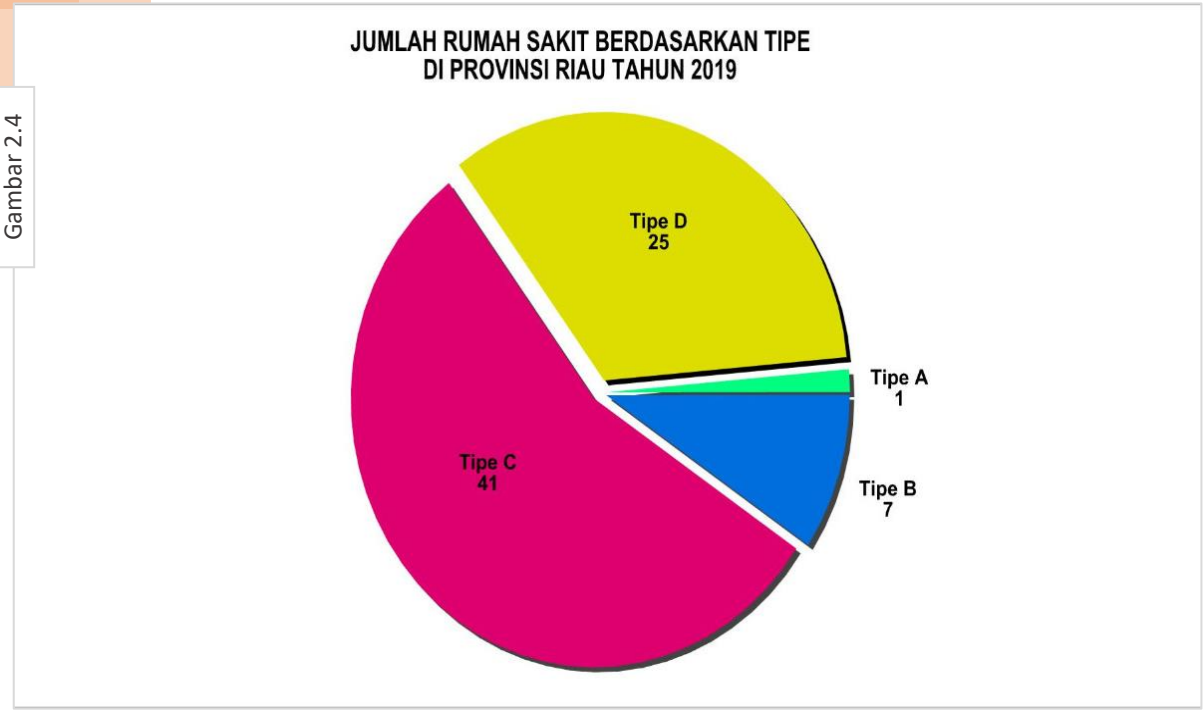
Bila Rumah Sakit dikelompokan berdasarkan dua kategori maka di tahun 2019 Rumah Sakit umum ada sebanyak 82% (61) sedangkan untuk Rumah Sakit khusus sebanyak 18% (13) yang tersebar diseluruh Provinsi Riau. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Perbandingan antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Provinsi Riau tahun 2019 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

Gambar 2.3



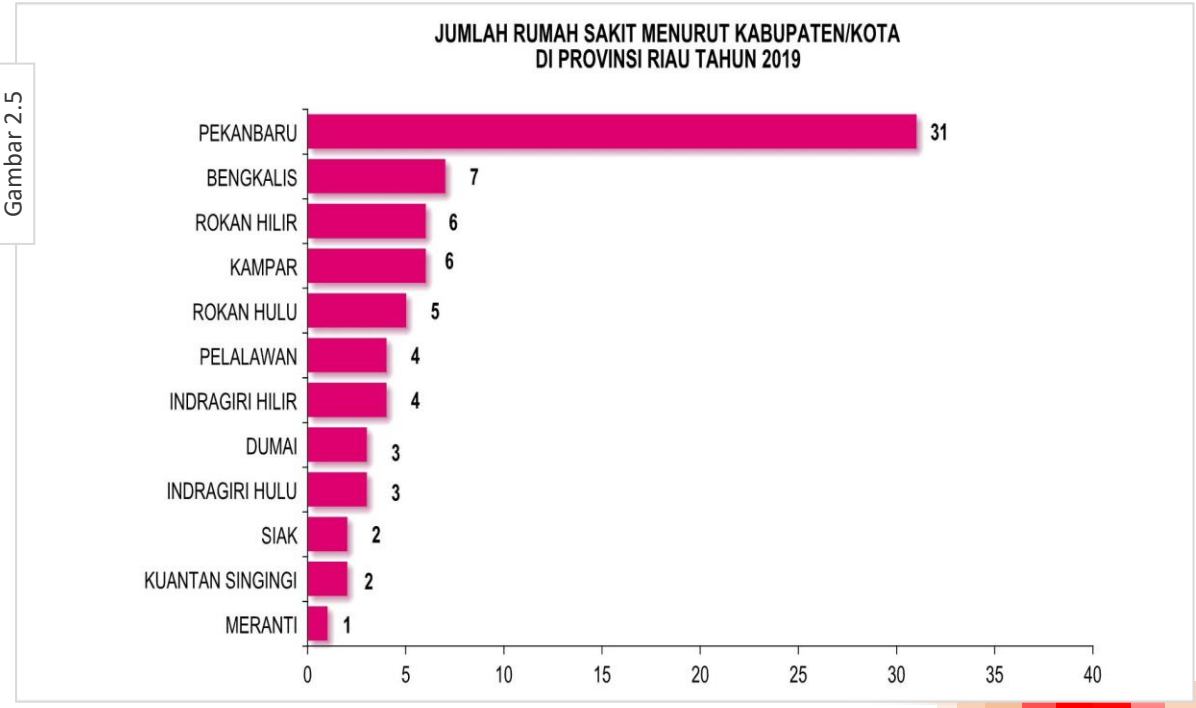
Kemuadian bila dilihat Rumah sakit berdasarkan type, Diagram dibawah ini menyajikan tentang tipe Rumah Sakit berdasarkan fasilitas kesehatan dan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membuat rumah sakit terbagi menjadi 4 tipe yakni tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Tahun 2019 dari seluruh jumlah Rumah Sakit yang ada di Provinsi Riau yang berjumlah 74 rumah sakit, terdapat 25 Rumah Sakit tipe D, 41 Rumah Sakit tipe C, 7 Rumah Sakit tipe B dan 1 Rumah Sakit tipe A.

Gambar 2.4



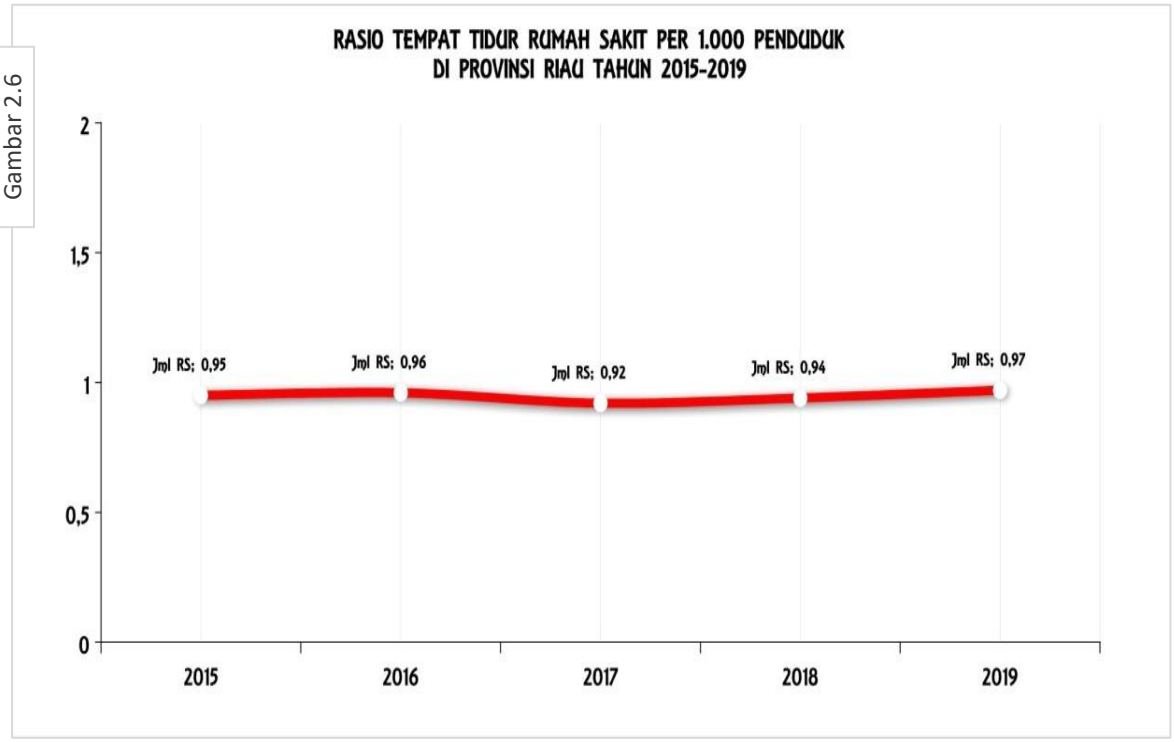
Penyebaran Rumah Sakit di Provinsi Riau pada tahun 2019 terbanyak berada di Kota Pekanbaru sebanyak 31 unit kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebanyak 7 Rumah Sakit dan kabupaten Rokan Hilir sebanyak 6 Rumah Sakit sedangkan Kabupaten yang paling sedikit Rumah Sakitnya adalah Kabupaten Siak, Kuantan Singingi masing-masing 2 Rumah Sakit, dan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang paling sedikit memiliki masing 1 Rumah Sakit. Penyebaran Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.5



Sedangkan untuk jumlah dan rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk dapat menggambarkan kemampuan Rumah Sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam hal daya tampung pasien rawat inap yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Gambaran Rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk tahun 2019 sebesar 0,97 per 1.000 penduduk mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya tahun 2018 sebesar 0,94 per 1.000 penduduk. Grafik dibawah ini menyajikan rasio tempat tidur per 1.000 penduduk di Rumah Sakit Provinsi Riau kurun waktu lima tahun yakni pada tahun 2015 - 2019.

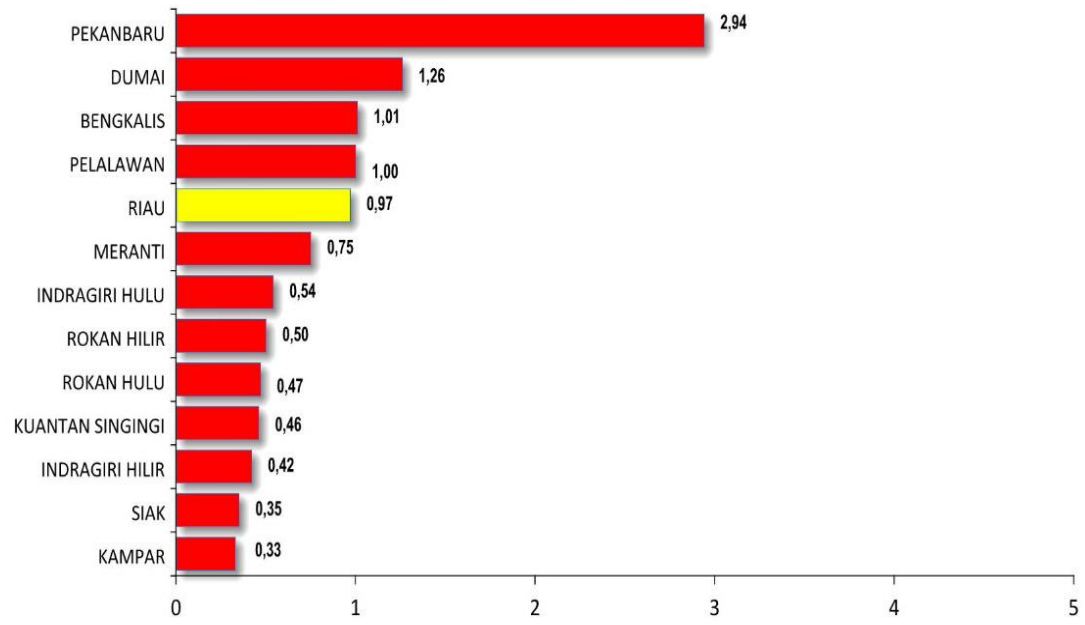
Gambar 2.6



Meskipun rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk tahun 2019 sebesar 0,97 per 1.000 penduduk mengalami sedikit peningkatan, namun dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau hanya 4 kabupaten/kota yang rasio tempat tidurnya mencapai 1 yakni Kota pekanbaru 2, 94, Kota dumai 1,26, Kabupaten Bengkalis 1,01 dan Kabuapten pelalawan 1,00. Tingginya rasio diKota pekanbaru disebabkan jumlah Rumah Sakit yang sebagian besar berada di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya gambaran rasio tempat tidur di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.7

RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019



Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat merupakan sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan pelayanan gawat darurat yang dimaksud adalah upaya cepat dan tepat untuk segera mengatasi puncak kegawatan yaitu henti jantung dengan Resusitasi Jantung Paru Otak (*Cardio–Pulmonary–Cebral–Resucitation*) agar kerusakan organ yang terjadi dapat dihindarkan atau ditekan sampai minimal dengan menggunakan Bantuan Hidup Dasar (*Basic Life Support*/BLS) dan Bantuan Hidup Lanjut (ALS).

Sarana kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah bersalin, puskesmas, dan Rumah Sakit baik Rumah Sakit umum, jiwa maupun khusus. Puskesmas dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat. Untuk Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I Rumah Sakit (RS) di Provinsi Riau Tahun 2018 telah mencapai 100% baik Rumah Sakit khusus maupun Rumah Sakit umum.

2. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

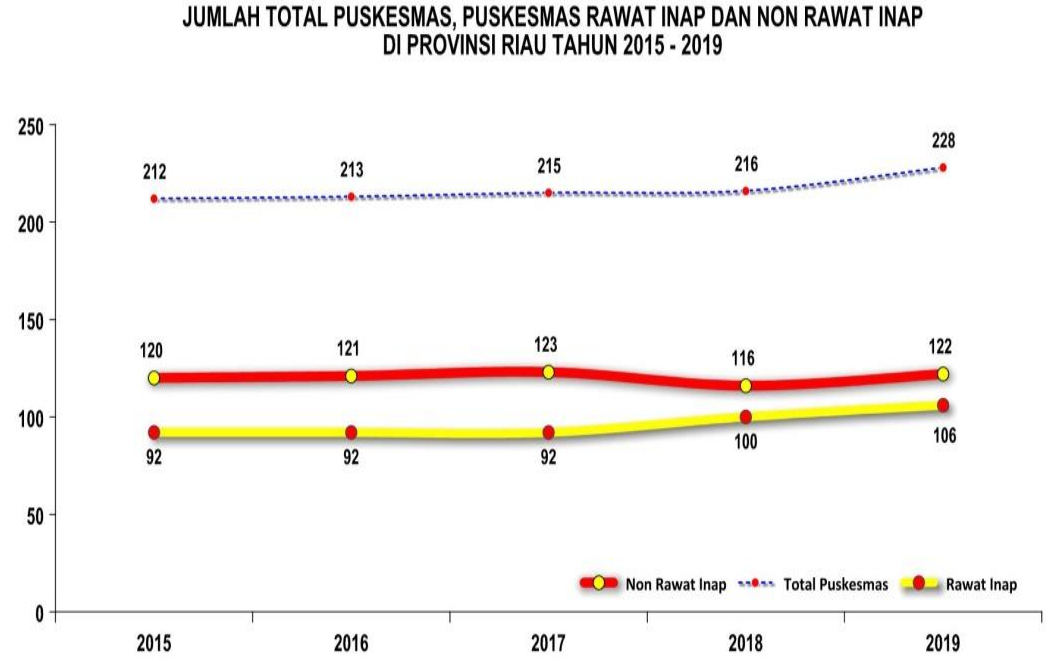
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut, puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib terdiri dari : (1) Upaya promosi kesehatan; (2) Upaya kesehatan lingkungan; (3) Upaya kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana; (4) Upaya perbaikan gizi; (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (6) Upaya pengobatan.

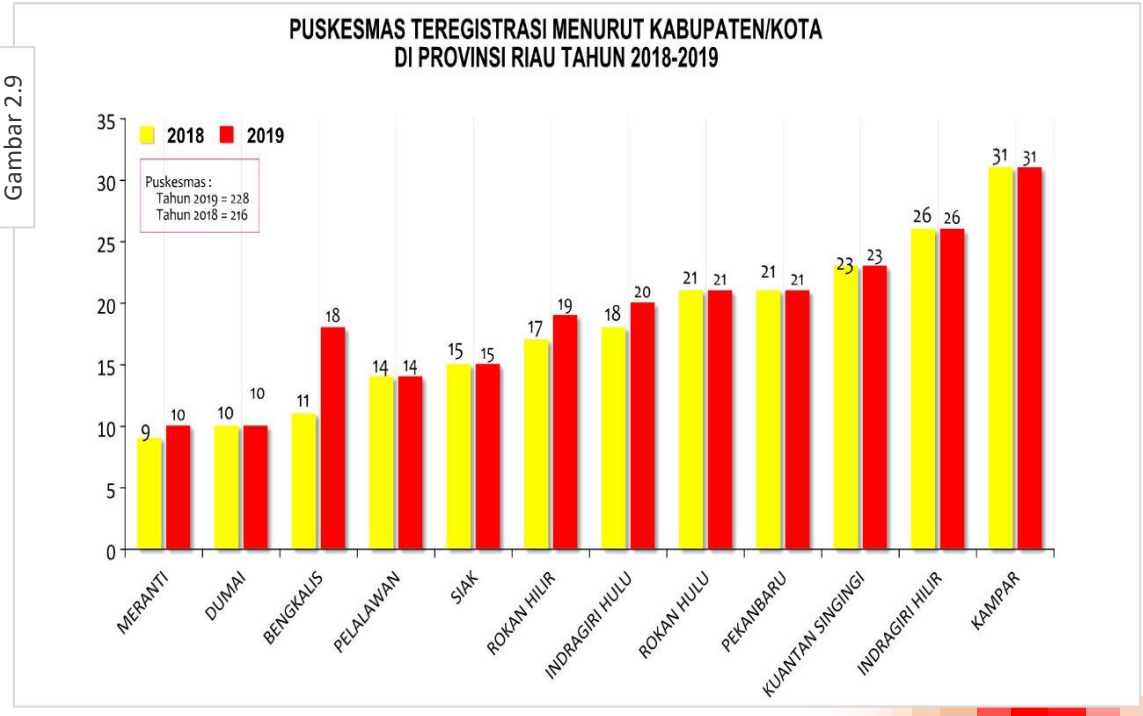
Jumlah Puskesmas di Provinsi Riau sampai dengan Bulan Desember 2019 sebanyak 228 unit yang sudah teregistrasi. Jumlah tersebut terdiri dari 106 unit puskesmas rawat inap dan 122 unit puskesmas non rawat inap dapat dilihat pada gambar berikut .

Gambar 2.8



Gambar grafik diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada jumlah Puskesmas di Provinsi Riau dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, walaupun peningkatan yang terjadi hanya sedikit. Peningkatan jumlah Puskesmas ini tidak mengindikasikan secara langsung seberapa baik keberadaan Puskesmas mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Perkembangan Puskesmas di Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2015 – 2019 memperlihatkan bahwa jumlah Puskesmas non rawat inap lebih besar dari jumlah Puskesmas rawat inap.

Gambar 2.9

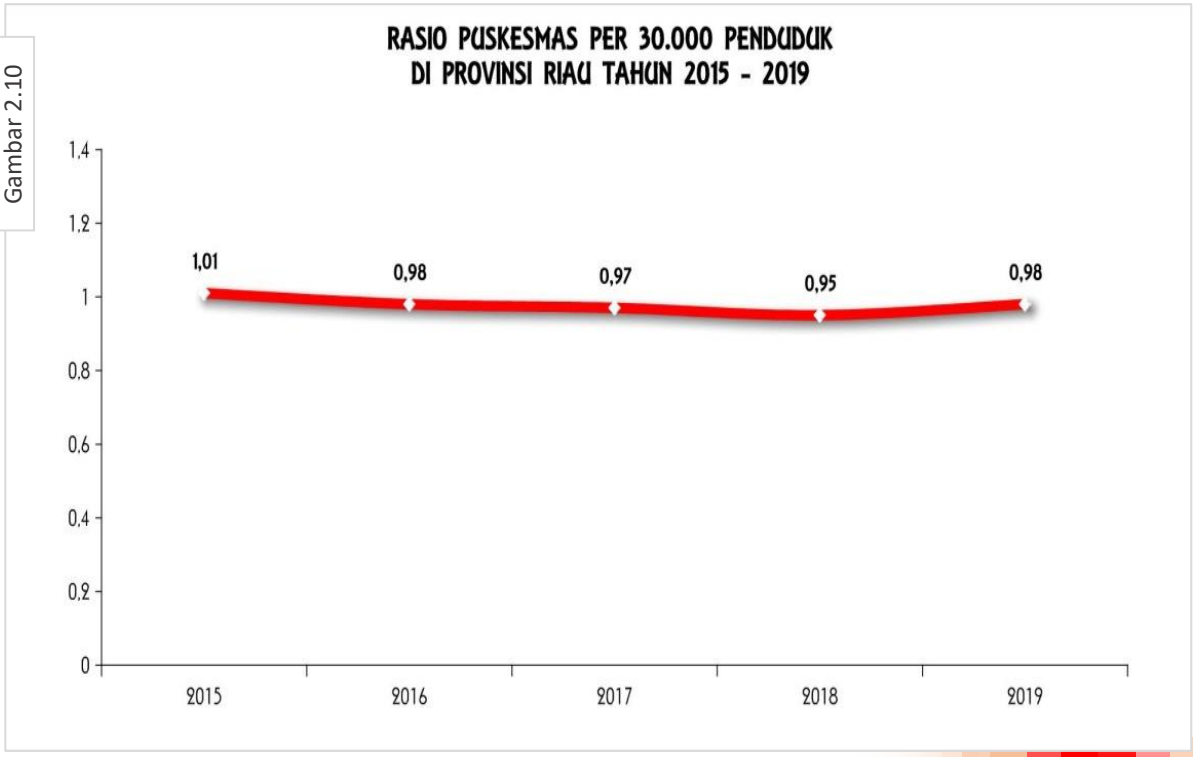


Bila dilihat dari gambar diatas, untuk penyebaran Puskesmas di kabupaten/kota Provinsi Riau pada tahun 2019 maka Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang memiliki jumlah paling banyak Puskesmasnya sebanyak 31 unit, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 26 unit dan Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 23 unit. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah paling sedikit Puskesmasnya adalah Kabupaten Kep. Meranti dan kota Dumai masing-masing memiliki 10 unit. Jumlah Puskesmas di Provinsi Riau tahun 2019 bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan Puskesmas ini terletak di kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 1 unit, kabupaten Bengkalis sebanyak 7 unit, kabupaten Rokan Hilir dan kabupaten Indragiri Hulu masing-masing sebanyak 2 unit.

Indikator yang mampu menggambarkan secara kasar kemampuan Puskesmas dalam mencukupkan kebutuhan pelayanan kesehatan primer terhadap masyarakat adalah rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Bila diperhatikan rasio Puskesmas per 30.000 penduduk pada tahun 2019 masih kurang dari 1 dan angka ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya dimana dari 0,95 di tahun 2018 menjadi 0,98.

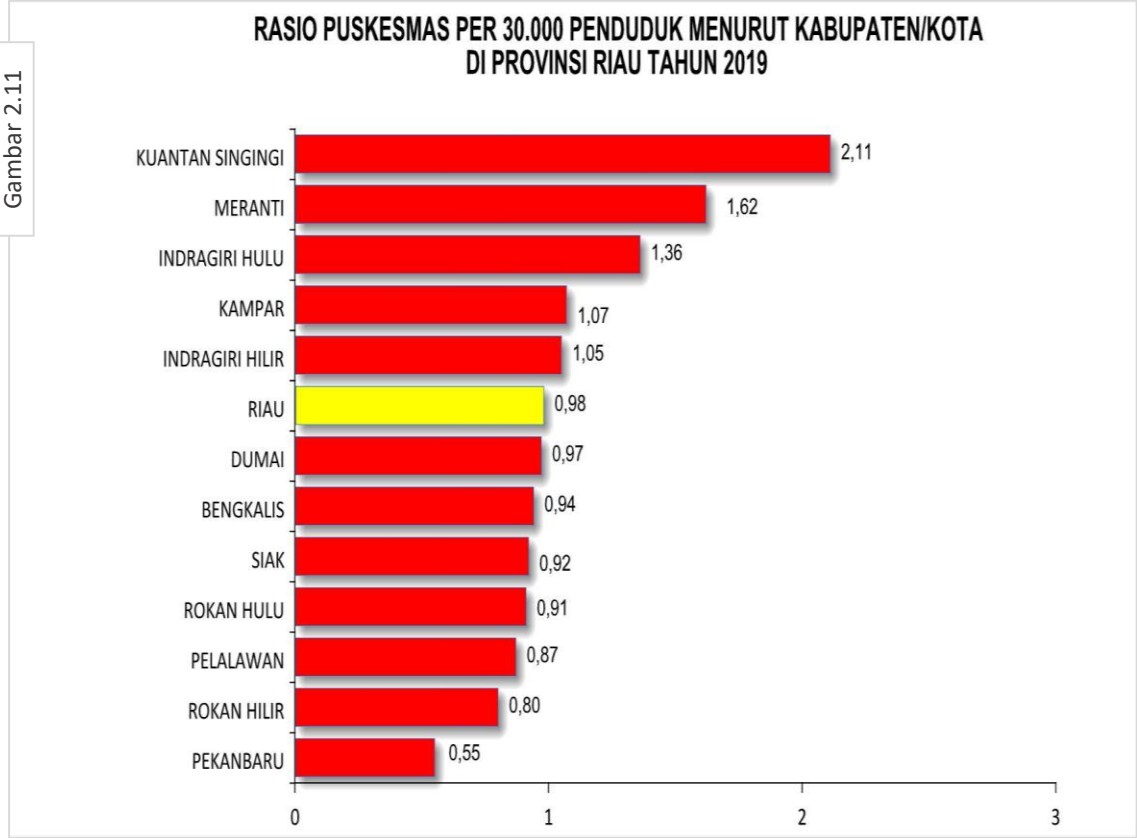
Penurunan rasio Puskesmas ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan pertumbuhan penduduk ini belum seiring sejalan dengan jumlah pembangunan Puskesmas yang baru. Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.10



Meskipun rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Provinsi Riau belum mencapai 1, namun untuk melihat rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.11



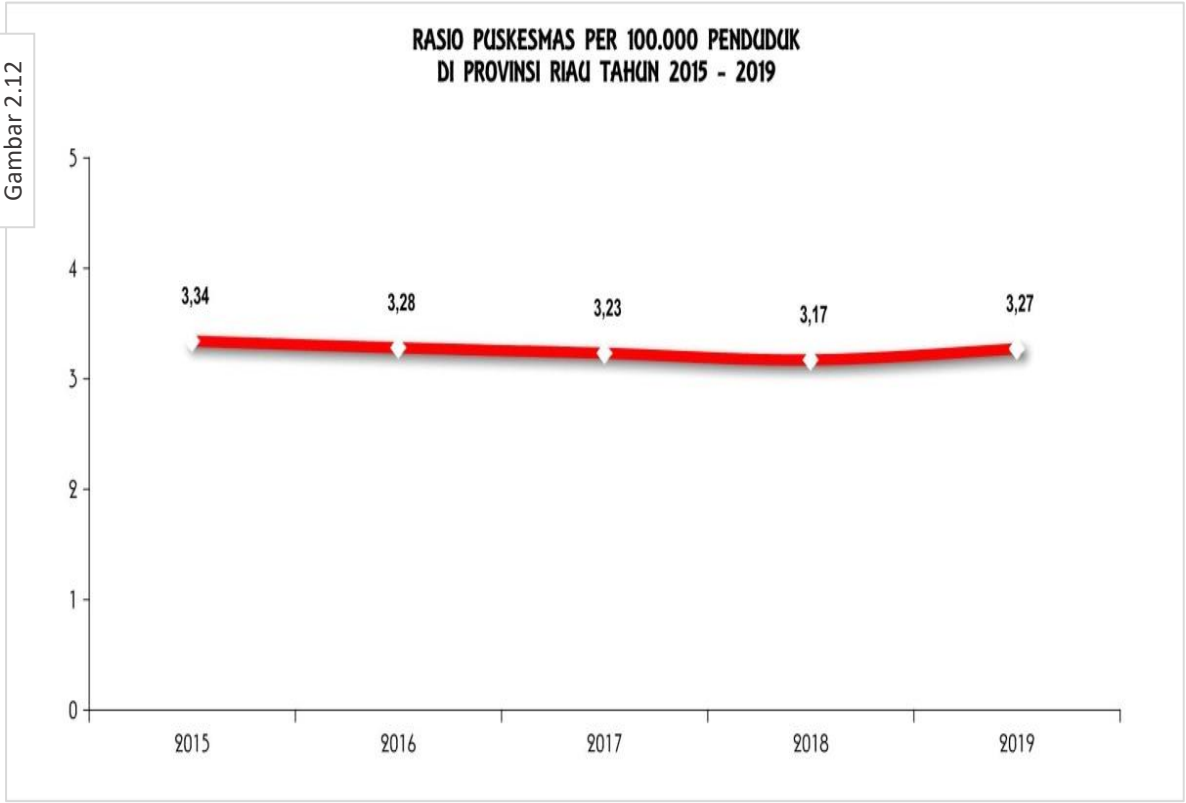
Dalam grafik dapat terlihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memiliki angka rasio Puskesmas tertinggi terletak di kabupaten Kuantan Singingi sebesar 2,11 per 30.000 penduduk, diikuti oleh Kabupaten Kep. Meranti 1,62 per 30.000 penduduk dan Kabupaten Indragiri Hulu 1,36 per 30.000 penduduk. Sedangkan Kota Pekanbaru memiliki rasio terendah sebesar 0,55 per 30.000 penduduk, diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir 0,80 per 30.000 penduduk dan Kabupaten Pelalawan 0,87 per 30.000 penduduk. Rasio puskesmas per 30.000 penduduk ini masih belum bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya tentang aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas.

Angka rasio pada grafik diatas menunjukkan bahwa satu Puskesmas rata-rata memberikan pelayanan kesehatan kepada 30.000 penduduk. Dan saat ini masih ada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melayani lebih dari 30.000 penduduk karena rasio Puskesmasnya masih kurang dari 1. Untuk mengatasi hal tersebut dimungkinkan untuk diadakan penambahan Puskesmas, meskipun di tujuh Kabupaten/Kota tersebut

banyak fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, namun yang perlu mendapat perhatian adalah fungsi Puskesmas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Sedangkan untuk rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau maka rasio Puskesmas di Provinsi Riau ini adalah sebesar 3,27. Ini artinya untuk 100.000 penduduk di Provinsi Riau dilayani sekitar 3 puskesmas. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau terus mengalami penurunan selama 4 tahun dimana sejak tahun 2014 (3,41 per 100.000 penduduk) sampai tahun 2018 (3,17 per 100.000 penduduk) mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2019 rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 0,10 menjadi 3,27 per 100.000 penduduk. Walaupun rasio Puskesmas secara Provinsi Riau terus mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir namun rasio tersebut sudah mencapai rasio yang idealm tetapi rasio ini tidak memberikan gambaran untuk rasio Puskesmas di Kabupaten/Kota.

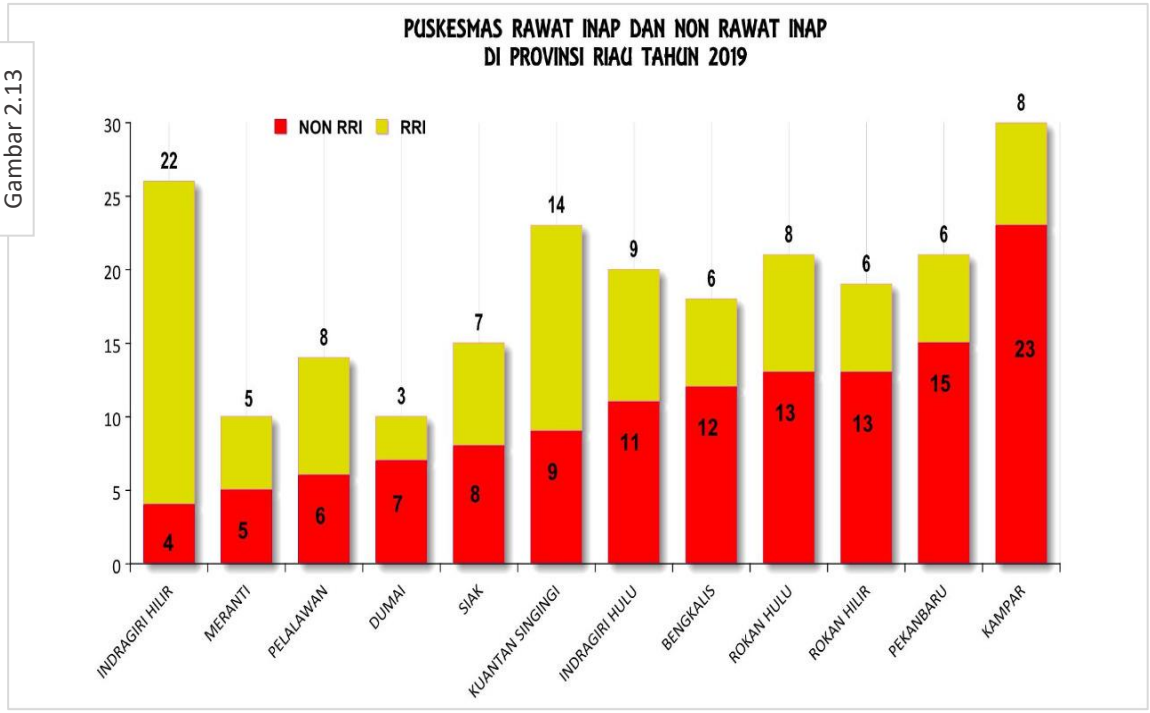
Gambar 2.12



Dalam meningkatkan upaya mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, sudah ada beberapa Puskesmas yang telah ditingkatkan statusnya dimana awalnya Puskesmas tersebut non perawatan menjadi Puskesmas perawatan. Peningkatan jumlah Puskesmas perawatan tidak hanya mengutamakan upaya kuratif tetapi juga tetap menyelenggarakan upaya promotif, preventif, dan rehabilatif yang

telah terbukti mempunyai daya ungkit yang lebih besar terhadap derajat kesehatan masyarakat, bila diselenggarakan secara baik, melibatkan secara aktif masyarakat, konsisten, dan berkesinambungan. Perkembangan jumlah Puskesmas perawatan dan non perawatan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019 dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.13



Pada grafik diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang memiliki jumlah terbanyak Puskesmas Rawat Inap tahun 2019 ada di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 22 unit Puskesmas dan jumlah terendah di Kota Dumai sebanyak 3 unit Puskesmas. Sedangkan Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang memiliki jumlah terbanyak Puskesmas Non Rawat Inap tahun 2019 ada di Kabupaten Kampar sebanyak 23 unit Puskesmas dan jumlah terendahnya di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 4 unit Puskesmas.

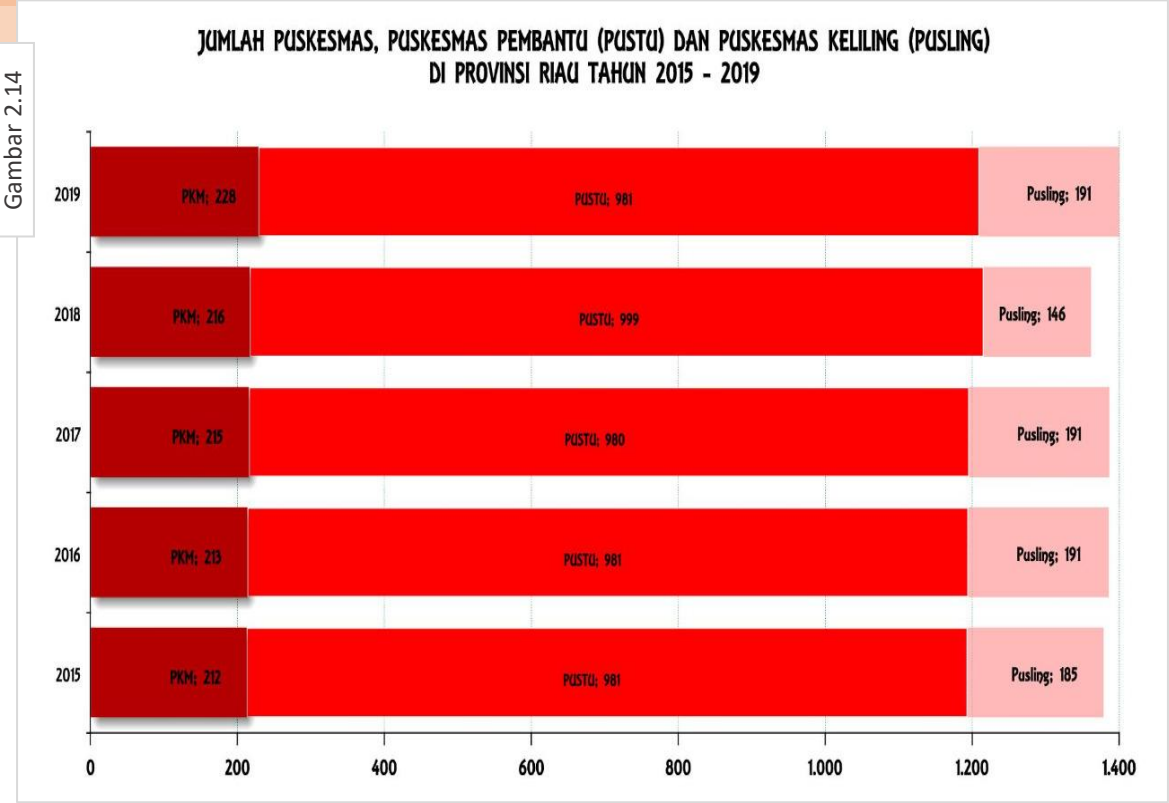
Dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan secara merata dan bermutu, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Untuk itu Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas juga dibantu oleh satu atau beberapa Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi untuk menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Jenis dan kualitas upaya pelayanan kesehatan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia di Pustu.

Puskesmas keliling adalah Puskesmas yang melayani masyarakat dengan mendatangi daerah tertentu untuk membantu penderita yang tidak dapat mengunjungi puskesmas induk atau puskesmas pembantu. Kegiatan puskesmas keliling bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan promotif dan preventif. Selain itu puskesmas keliling juga bertujuan untuk melakukan monitoring pelayanan petugas puskesmas pembantu sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Adapun agenda kegiatan saat pelaksanaan puskesmas keliling antara lain Penyuluhan-penyuluhan, pelatihan kader posyandu baik posyandu balita maupun posyandu lansia, Kemitraan bidan dan dukun, Kelas ibu hamil, UKS, desa Siaga dan kegiatan-kegiatan lain sesuai kebutuhan kampung yang akan dikunjungi. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling sangat berperan penting dalam meningkatkan akses peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, seperti pusat pembangunan berwawasan kesehatan,pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi: pelayanan kesehatan perorangan (private goods) dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public goods*). Perkembangan jumlah Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling di Provinsi Riau pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2.14



Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa jumlah Puskesmas dan Puskesmas Keliling meningkat di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2108, kecuali jumlah Puskesmas Pembantu yang mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah Puskesmas ada sebanyak 216 unit meningkat jumlahnya di tahun 2019 menjadi 228 unit dan untuk jumlah Puskesmas Keliling di tahun 2018 ada sebanyak 146 unit meningkat menjadi 191 unit. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu pada tahun 2018 ada sebanyak 999 unit menurun jumlahnya menjadi 981 unit di tahun 2019.

B. Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Di Sarana Pelayanan Kesehatan

Cakupan rawat jalan adalah cakupan kunjungan rawat jalan baru di sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan rawat jalan ini meliputi kunjungan rawat jalan di Puskesmas, kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit. Cakupan kunjungan rawat jalan di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 85,3% menurun dibandingkan tahun 2018 (99,8%) .

Sedangkan Cakupan rawat inap adalah cakupan kunjungan rawat inap baru di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan rawat inap ini meliputi kunjungan rawat inap di

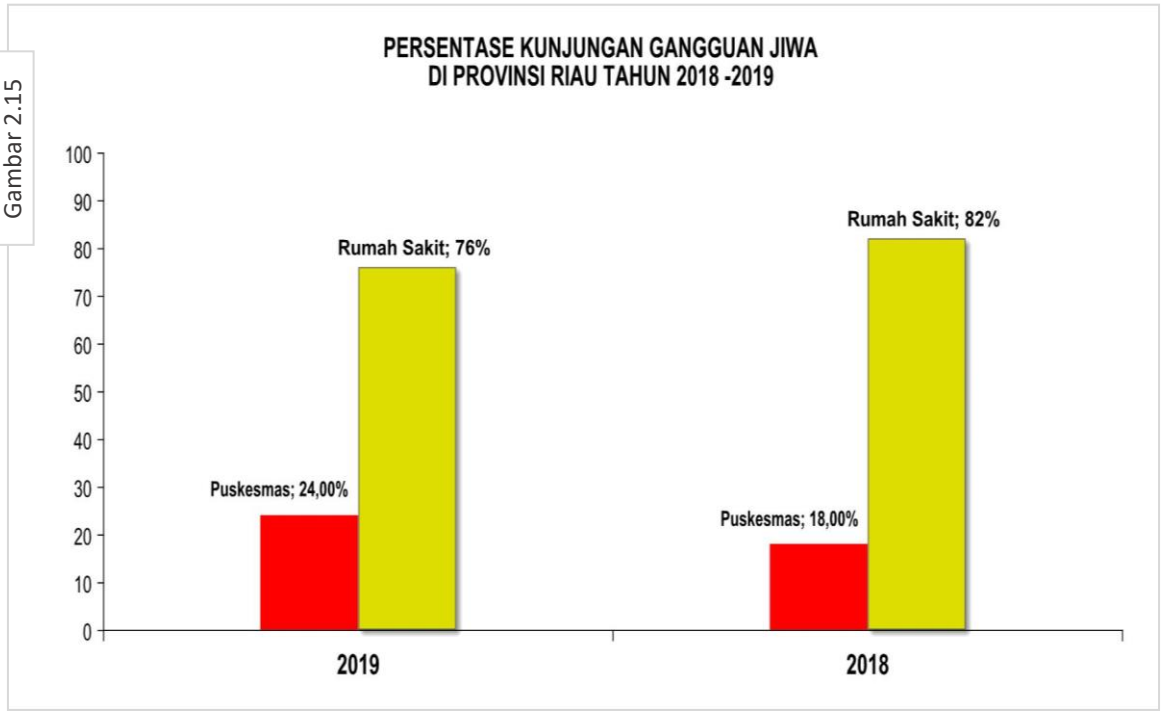
Puskesmas, kunjungan rawat inap di Rumah Sakit, dan kunjungan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan lain. Cakupan rawat inap di sarana kesehatan di Provinsi Riau tahun 2019 sebesar 5,5% meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 4,2%

2. Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelayanan gangguan jiwa adalah pelayanan pada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. Data yang masuk untuk pelayanan kesehatan jiwa di RS berasal dari Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum yang mempunyai klinik jiwa. Permasalahan yang ada saat ini adalah tidak semua Rumah Sakit Umum mempunyai pelayanan klinik jiwa karena belum tersedia tenaga medis jiwa dan tidak banyak kasus jiwa di masyarakat yang berobat di sarana pelayanan kesehatan.

Dari permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan pembinaan program kesehatan jiwa di sarana kesehatan Pemerintah dan swasta, pelatihan/refreshing bagi dokter dan paramedis Puskesmas terutama upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program kesehatan jiwa.

Gambar 2.15



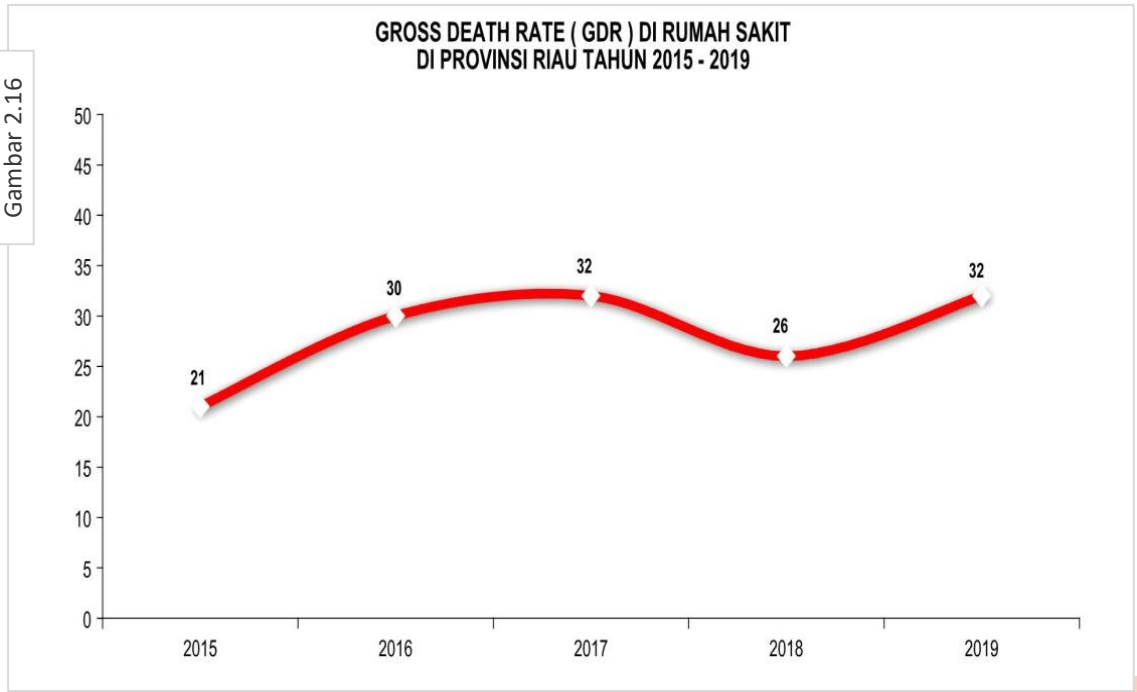
Jumlah kunjungan gangguan jiwa di Provinsi Riau baik pada tahun 2017, 2018 dan 2019, terbanyak pada kunjungandi Rumah Sakit dibandingkan dengan Puskesmas. Kunjungan gangguan jiwa tahun 2019 di Rumah Sakit 76% dan Puskesmas 24%. Kunjungan di Rumah Sakit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit

Angka kematian adalah indikator hasil kinerja dari sebuah proses pela yanan kesehatan di Rumah Sakit, dimana ada kematian di bawah 48 jam dan kematian di atas 48 jam. *Gross Death Rate* (GDR) yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Pada GDR, tidak dilihat berapa lama pasien berada di Rumah Sakit dari masuk sampai meninggal. Nilai GDR yang baik yaitu tidak lebih dari 45 per 1.000 penderita keluar. Untuk Rumah Sakit di Provinsi Riau pada tahun 2019, *Gross Death Rate* (GDR) adalah sebesar 32 per 1.000 penderita. GDR ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 *Gross Death Rate* (GDR) adalah sebesar 26 per 1.000 penderita.

Dalam 5 (lima) tahun angka GDR Rumah Sakit di Provinsi Riau masih berada pada kisaran nilai yang dianggap baik yaitu kurang dari 45 per 1.000 penderita keluar, GDR terendah di Provinsi Riau berada pada tahun 2018 sebesar 26 per 1.000 penderita dan GDR tertingginya pada tahun 2019 sebesar 32 per 1.000 penderita . Dan gambaran *Gross Death Rate* (GDR) Rumah Sakit (RS) di Provinsi Riau Tahun 2015-2019 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

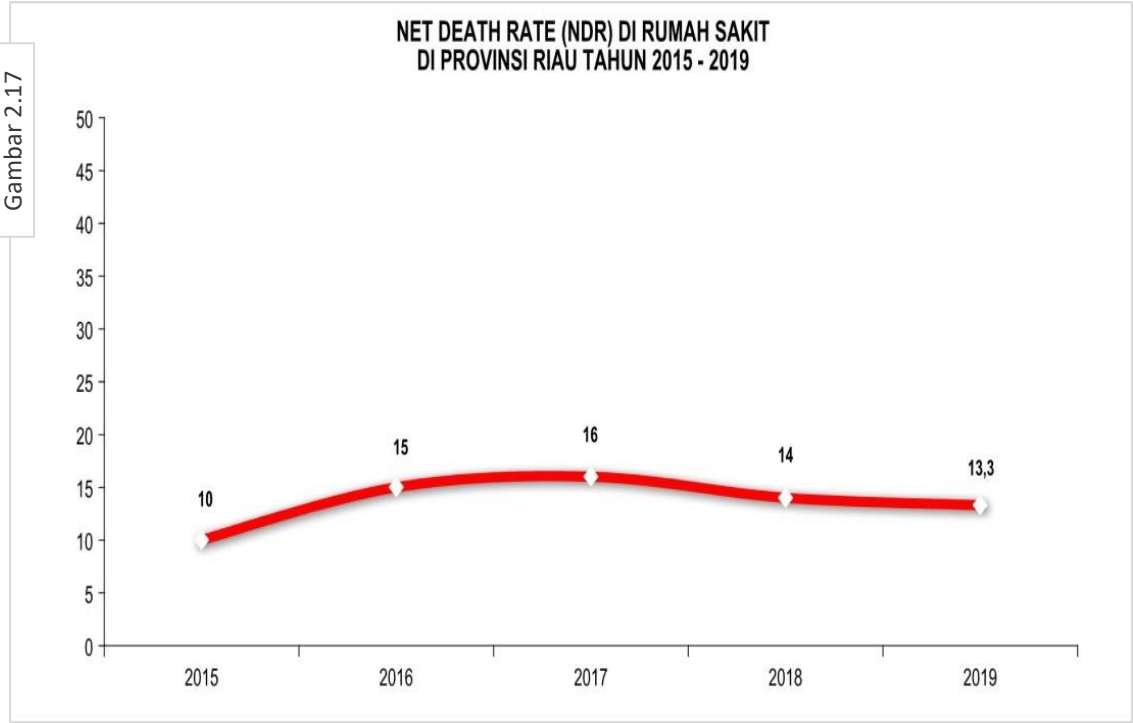
Gambar 2.16



Angka Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Angka NDR ini dapat dijadikan sebagai indikator dalam memberikan gambaran mutu pelayanan di Rumah Sakit. Asumsinya jika pasien meninggal setelah mendapat perawatan 48 jam berarti ada faktor pelayanan rumah sakit yang terlibat dengan kondisi meninggalnya pasien, namun jika pasien meninggal kurang dari 48 jam masa perawatan, dianggap faktor keterlambatan pasien datang ke Rumah Sakit yang menjadi penyebab utama pasien meninggal. Nilai NDR yang masih dianggap dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar.

Untuk Provinsi Riau angka NDR Rumah Sakit tahun 2015-2019 berada pada angka 13,3 per 1000 penderita keluar, angka ini masih dinilai dan dianggap baik karena kurang dari 25 per 1000 penderita keluar. Angka NDR ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana angka NDR tahun 2018 mencapai angka 14 per 1000 penderita keluar menjadi 13,3 per 1000 penderita keluar di tahun 2019. Gambaran NDR Rumah Sakit di Provinsi Riau tahun 2015-2019 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2.17



4. Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit

Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit biasanya dilihat dari berbagai segi seperti pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. Beberapa indikator standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (*Bed Occupation Rate* /BOR), rata-rata lama rawat

seorang pasien yang secara umum/*Average Length of Stay* (ALOS), rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati/*Turn Of Interval* (TOI).

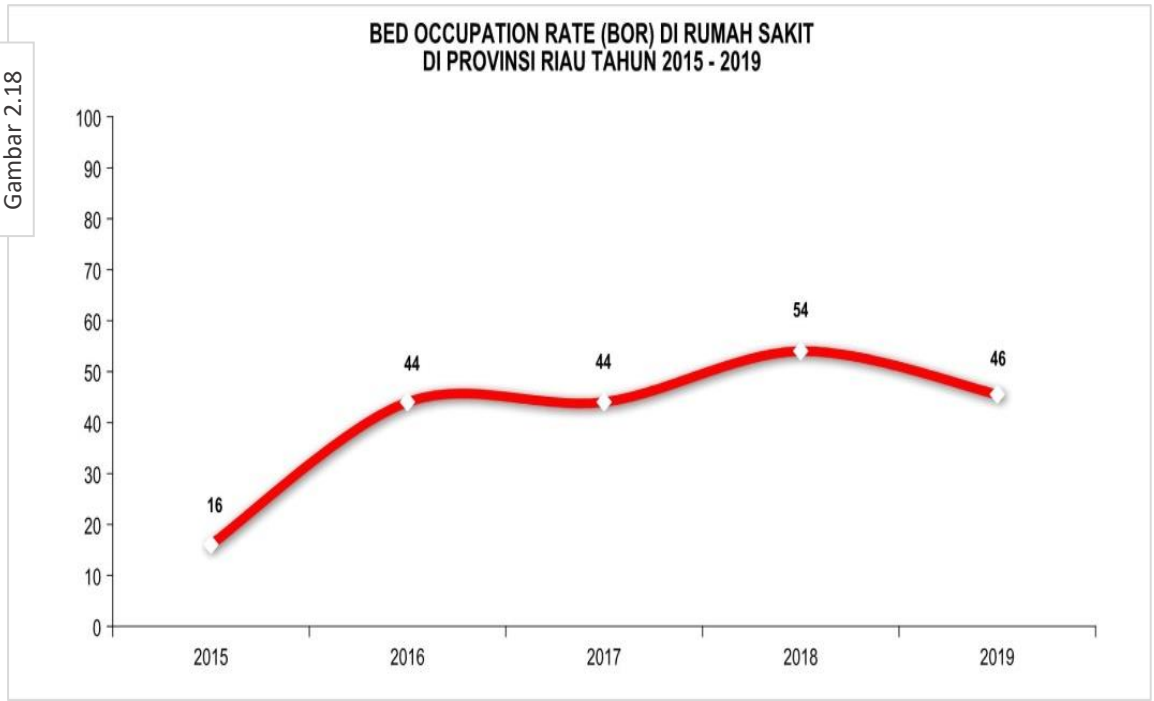
a. Pemanfaatan Tempat Tidur (Bed Occupation Rate /BOR)

BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai kinerja Rumah Sakit pada suatu waktu tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai kinerja Rumah Sakit dengan melihat persentase pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit atau Bed Occupation Rate (BOR).

BOR yang ideal untuk suatu Rumah Sakit adalah antara 60% sampai dengan 80%. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan Rumah Sakit oleh masyarakat, sedangkan bila angka BOR >85% berarti Rumah sakit perlu melakukan pengembangan untuk penambahan tempat tidur di Rumah sakit.

Besarnya BOR di Provinsi Riau sejak tahun 2015-2019 bila dibandingkan dengan ketentuan BOR yang ideal maka BOR Provinsi Riau yang kurang dari 60%, hal ini menunjukan bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit oleh masyarakat di Provinsi Riau masih kurang. Untuk BOR Rumah Sakit di Provinsi Riau sejak tahun 2015-2019 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

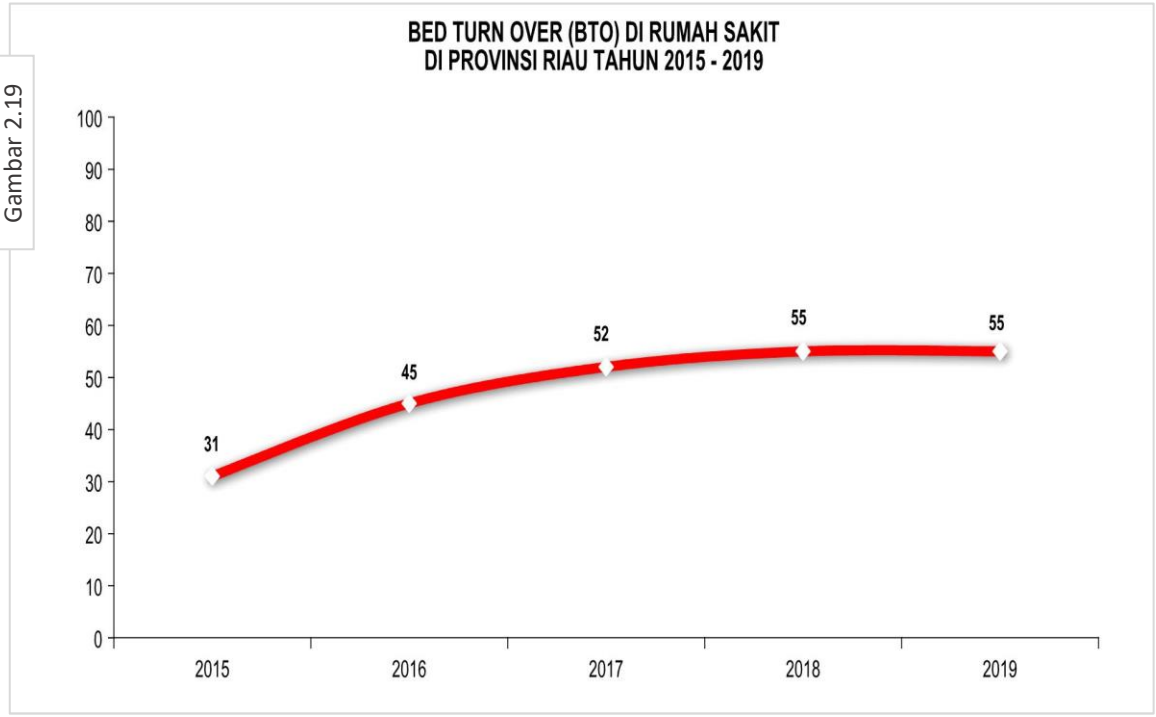
Gambar 2.18



b. Angka Perputaran Tempat Tidur (Bed Turn Over/BTO)

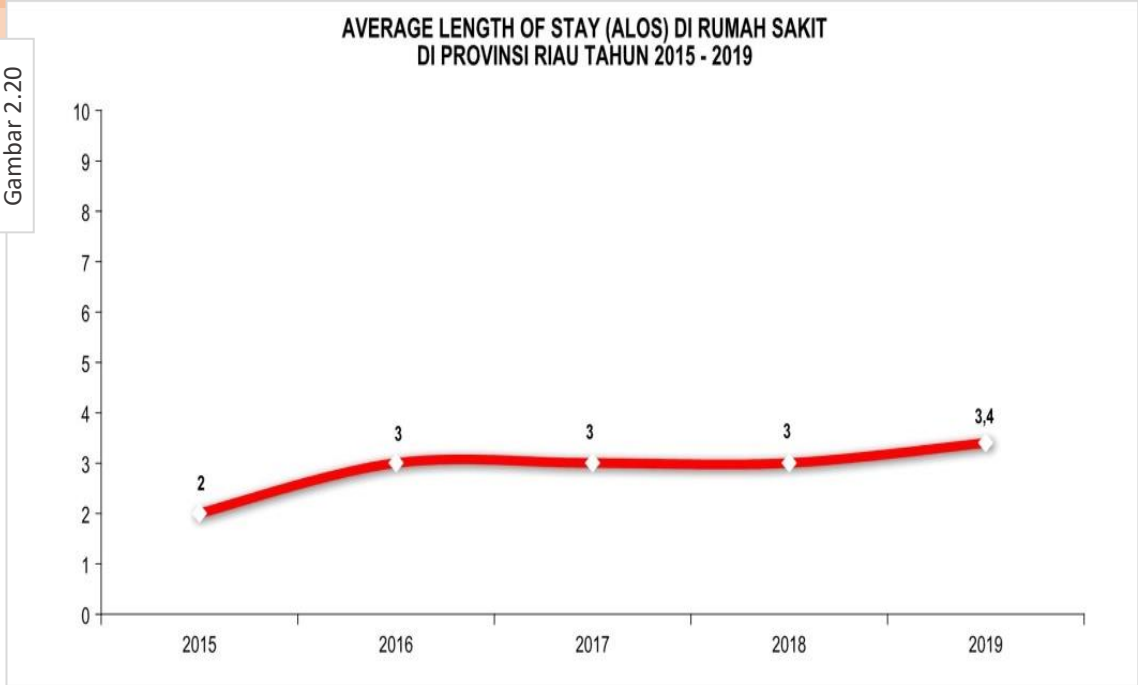
BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, beberapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Persentase BTO Rumah Sakit di Provinsi Riau tahun 2015-2019 terus meningkat per tahunnya dimulai dari angka 31 di tahun 2015 sampai menjadi angka 55 pada tahun 2019, angka ini sudah melampaui rata-rata idealnya 40-50 kali. Untuk BTO Rumah Sakit di Provinsi Riau sejak tahun 2015-2019 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2.19

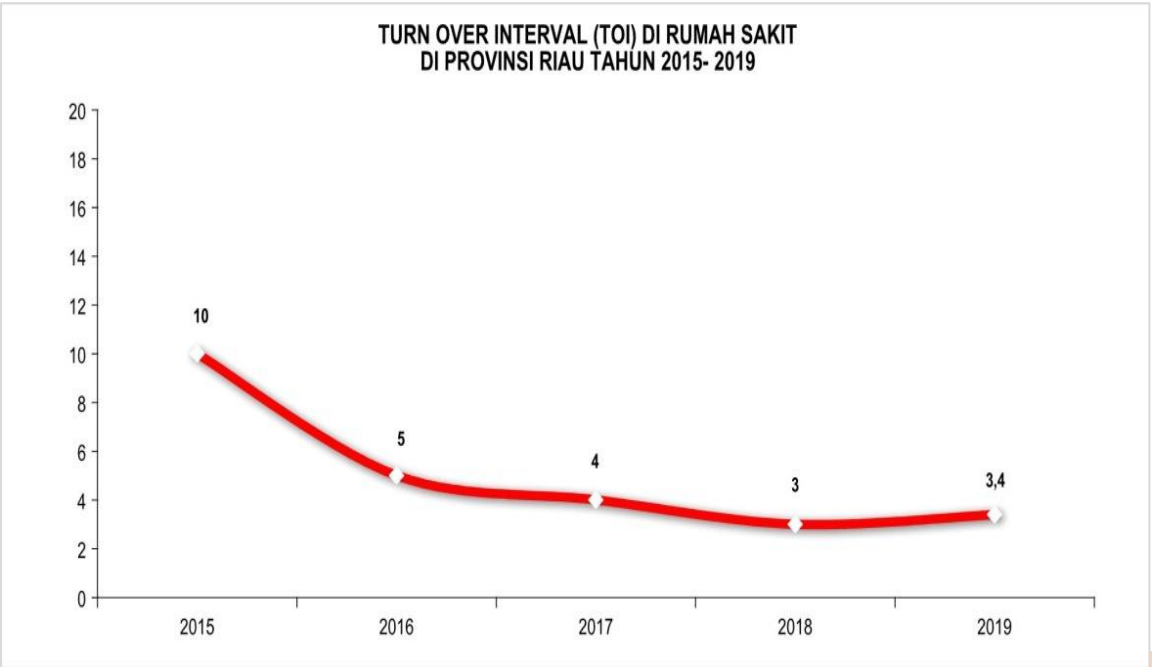


Indikator ALOS mencerminkan rata-rata lama hari perawatan yang diperoleh dari perbandingan jumlah hari perawatan pasien keluar terhadap jumlah pasien keluar baik hidup maupun mati. Rata-rata lama rawat seorang pasien yang secara umum/*Average Length of Stay* (ALOS) yang ideal adalah antara 6–9 hari. Rata-rata lama rawat pasien di RS Provinsi Riau di tahun 2015 - 2019 adalah 3 hari dan angka ini lebih rendah dari ALOS ideal.

Gambar 2.20



Rata-rata selang waktu untuk pemakaian tempat tidur di rumah sakit diukur melalui indikator TOI. TOI digunakan untuk menentukan lamanya rata-rata tempat tidur kosong atau rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tertentu yang tidak terisi antara pasien keluar atau mati dengan pasien masuk. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Angka ideal untuk TOI adalah 1 – 3 hari. Rata-rata TOI di Provinsi Riau dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan tetapi untuk rata-rata TOI di tahun 2019 masih sama dengan tahun yang lalu yakni 3 hari. Hal ini menggambarkan bahwa interval pemakaian tempat tidur di Provinsi Riau cukup baik walaupun belum mencapai efisiensi angka ideal yakni 1 – 3 hari.



5. Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Vaksin

Gambar 2.21



Keberhasilan program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Dari 228 Puskesmas yang ada di Provinsi Riau, 226 Puskesmas (99,1%) memiliki ketersediaan obat vaksin > 80%. Dan 2 Puskesmas (0,9%) memiliki ketersediaan obat dan vaksin < 80% seperti yang dapat dilihat pada gambar diatas.

C . UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

Dalam mewujudkan masyarakat sehat, diperlukan kesadaran setiap anggota masyarakat akan pentingnya perilaku sehat, berkeinginan, serta berdaya untuk hidup sehat. Masyarakat bersinergi membangun kondisi lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di desa dan kelurahan, seperti adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

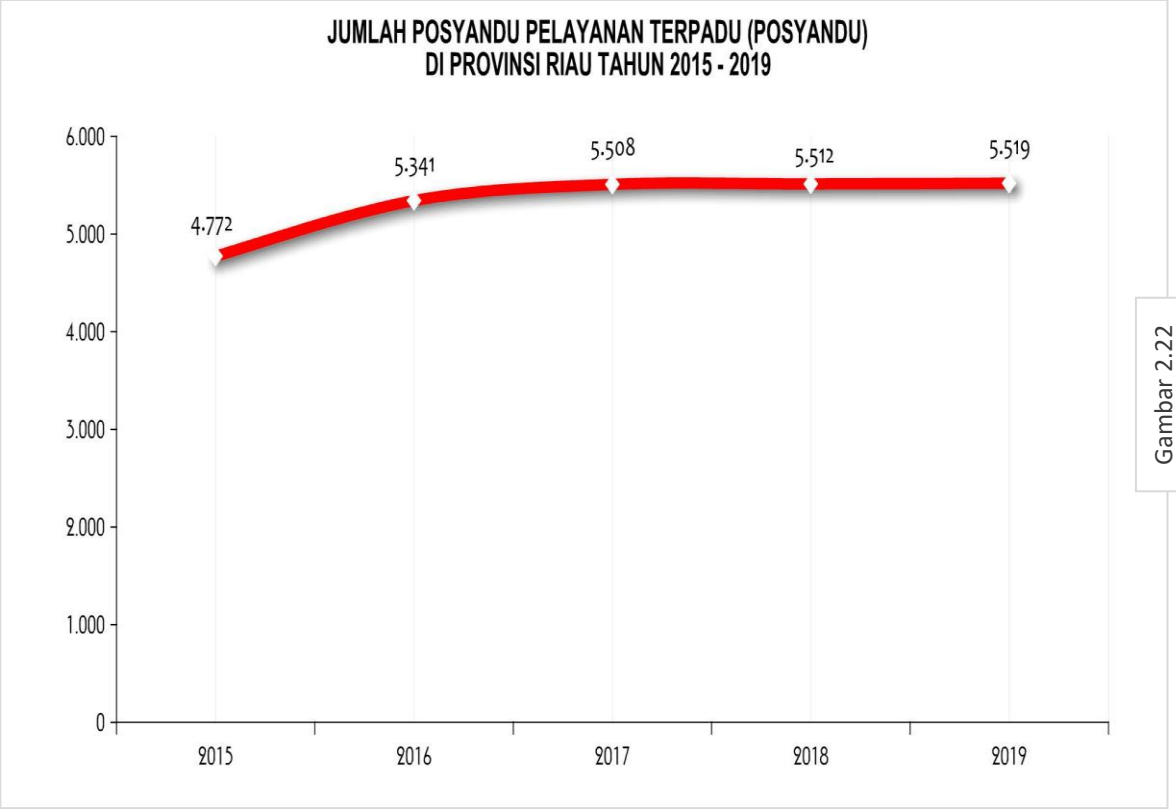
UKBM yang ada di desa dan kelurahan menjadi ciri khas bahwa desa dan kelurahan tersebut telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dinyatakan demikian karena penduduk di desa dan kelurahan tersebut dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan survailans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi,

lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

1. Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat terutama ibu, bayi dan anak balita. Dalam menjalankan fungsinya, Posyandu diharapkan dapat melaksanakan 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota, jumlah Posyandu dalam 5 (lima) tahun 2015 – 2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah posyandu sebanyak 4.772 unit meningkat menjadi 5.519 unit pada tahun 2019. Peningkatan jumlah posyandu ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah balita yang ada sehingga dibutuhkan penambahan posyandu, diharapkan nantinya semua balita mendapat pelayanan kesehatan. Berikut gambaran jumlah Posyandu dari tahun 2015 – 2019 dapat dilihat di bawah ini.



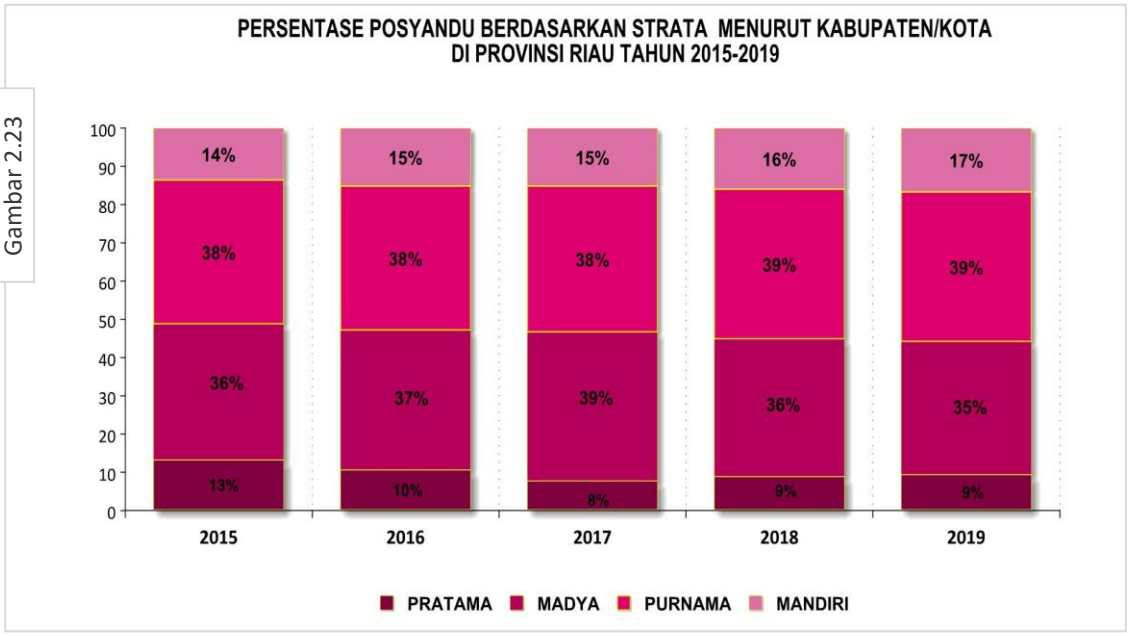
Gambar 2.22

a. Cakupan Posyandu Menurut Strata

Jumlah seluruh Posyandu di Provinsi Riau untuk tahun 2019 ada sebanyak 5.519 unit puskesmas, dari seluruh jumlah Posyandu tersebut terbagi atas 4 jenis Posyandu yakni Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri. Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau persentase Posyandu Pratama dan Madya untuk tahun 2015-2019 mengalami penurunan persentase, sedangkan Posyandu Purnama dan Mandiri mengalami peningkatan persentase.

Tahun 2015 persentase posyandu Pratama mencapai 13% menurun menjadi 9% di tahun 2019, begitu juga yang terjadi pada posyandu madya dimana tahun 2015 mencapai 36% dan menurun tahun 2019 menjadi 35%. Untuk persentase posyandu Purnama tahun 2015 mencapai 38% dan meningkat di tahun 2019 menjadi 39%, sementara capaian posyandu mandiri tahun 2015 mencapai 14% dan meningkat menjadi 17% di tahun 2019. Dengan meningkatnya strata posyandu purnama dan posyandu mandiri, ini artinya terjadi peningkatan peran serta masyarakat dalam menggerakkan hidup sehat. Jumlah persentase posyandu berdasarkan starata di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2015-2019 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.23



Pada grafik di atas juga dapat dilihat diketahui bahwa proporsi terbesar ada di posyandu purnama diikuti oleh Posyandu madya, dan proporsi terendah adalah posyandu pratama dan mandiri. Dengan demikian diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan jumlah posyandu mandiri. Namun bila Posyandu tersebut dilihat dari segi kualitatif (strata purnama dan strata mandiri) maka yang dikatakan dengan

Posyandu purnama merupakan Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.

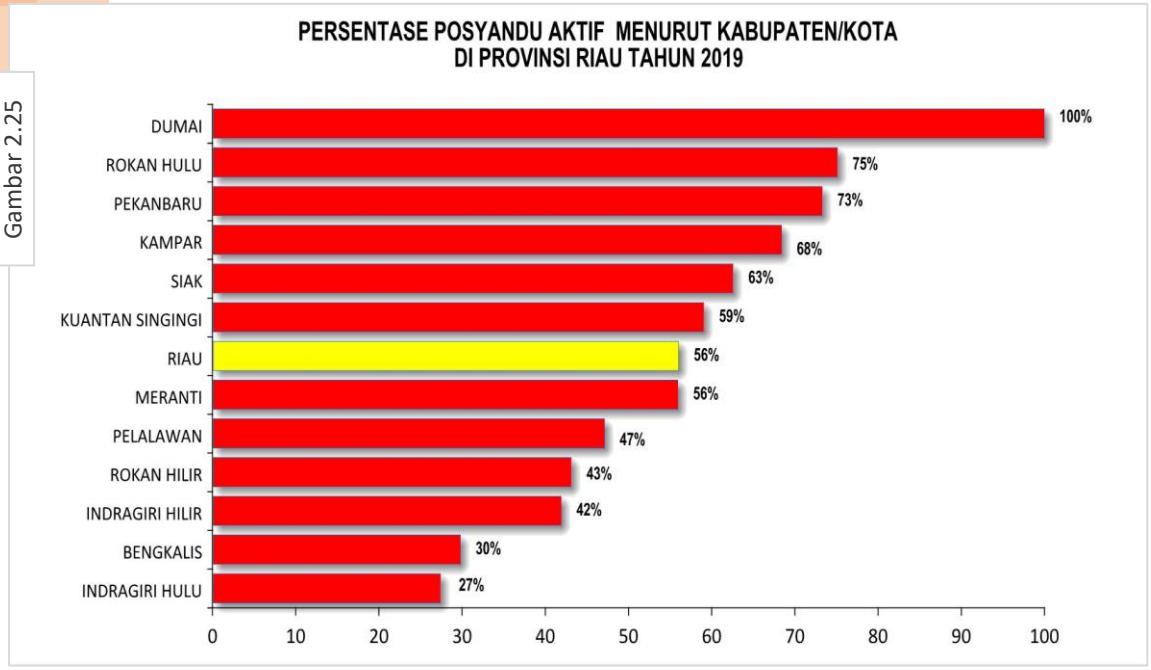
Untuk menilai keaktifan posyandu yang ada pada suatu daerah dapat dilihat dari jumlah posyandu purnama dan mandiri yang ada diwilayah tersebut. Gambaran Posyandu aktif yang dimiliki oleh Provinsi Riau selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2015- 2019 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2.24



Posyandu aktif di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir cendrung mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi dimulai tahun 2017-2019, dimana tahun 2017 persentase Posyandu aktif mencapai 53,5% dan tahun 2019 mencapai 55,99%. Sementara tahun 2015 mencapai 62,76% menurun menjadi 53,02% di tahun 2016. Meskipun demikian revitalisasi posyandu tetap mendapat perhatian dari semua sektor/pihak terkait, termasuk didalamnya adalah dengan mengoptimalkan fungsi Posyandu maupun Pokjanal Posyandu yang sudah terbentuk baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan serta Pokja Posyandu ditingkat Desa/Kelurahan. Hal ini sejalan dengan kegiatan revitalisasi Posyandu yang terus dilaksanakan oleh semua sektor/pihak terkait.

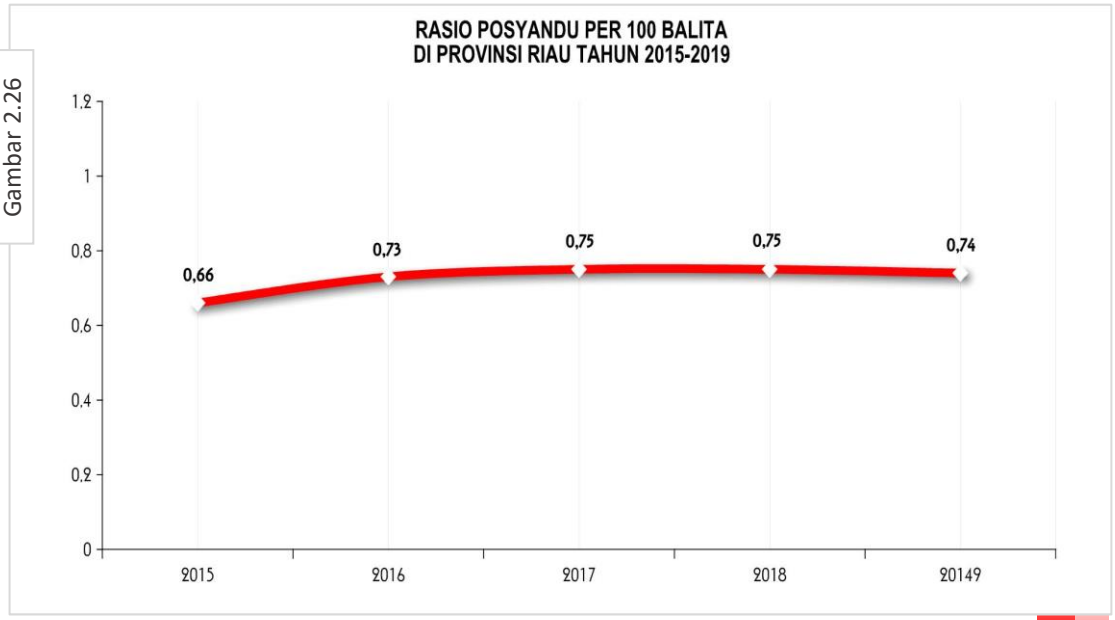
Gambar 2.25



Sedangkan untuk posyandu aktif di Kabupaten/Kota maka posyandu di Kota Dumai merupakan satu-satunya daerah yang memiliki posyandu aktif dengan capaian 100%. Dan selanjutnya Kabupaten Rokan Hulu 75% dan Kota Pekanbaru 73% posyandu aktif. Sedangkan Posyandu aktif yang paling sedikit berada di Kabupaten Indragiri Hulu (27%) diikuti Kabupaten Bengkalis 30% dan Kabupaten Indragiri Hilir 42%. Gambaran persentase Posyandu aktif di Provinsi Riau pada tahun 2019 bisa dilihat dari gambar diatas. Untuk Kabupaten/Kota yang memiliki posyandu aktifnya masih sangat rendah maka perlu adanya upaya menggerakkan pemberdayaan masyarakat agar menyadari penting perilaku hidup bersih dan sehat.

2. **Rasio Posyandu Per 100 Balita**

Gambar 2.26



Dalam menjalankan fungsi posyandu, perlu diketahui rasio kecukupan posyandu terhadap masyarakat yang ada. Rasio posyandu per100 balita di Provinsi Riau cendrung mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, rasio posyandu di Provinsi Riau masih mencapai 0,74 dan dibawah 1 (satu). Artinya 1 posyandu melayani untuk 100 orang balita, dengan demikian kegiatan Posyandu dapat lebih optimal kepada masyarakat. Untuk melihat gambaran rasio posyandu per 100 balita selama 5 (lima) tahun terakhir 2015 – 2019 dapat dilihat dari gambar diatas.

3. Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular)

Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.

Tujuan utama kegiatan Posbindu PTM adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Oleh karena itu sasaran Posbindu PTM cukup luas mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke atas baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masyarakat dengan kasus PTM.

Posbindu PTM bertujuan untuk :

a. Memberikan penyuluhan dan upaya agar tidak sampai menjadi masyarakat yang beresiko terkena penyakit PTM. Bagi masyarakat beresiko
b. Mengenali faktor resiko PTM yang ada dan upaya mengurangi jumlah maupun intensitas faktor resiko tersebut agar tidak menjadi penyakit PTM.
c. Mengontrol dan menjaga kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan Posbindu PTM ke Puskesmas.

Dengan adanya Posbindu warga dapat mengetahui dan menanggulangi agar tidak menjadi parah. Pelaksanaan Posbindu di Provinsi Riau tahun 2019 berjumlah 1.026 unit yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Posbindu yang terbanyak adalah di Kabupaten Kampar 172 unit, diikuti Kabupaten Indragiri Hulu 166 unit dan Kabupaten Rokan Hulu 145 unit. Sedangkan Kabupaten Bengkalis merupakan posbindu yang paling sedikit 27 unit, diikuti Kota Dumai 30 unit dan Kabupaten Rokan Hilir 37 unit.

Sedangkan gambaran pelaksanaan Posbindu tahun 2019 di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2.27



**

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

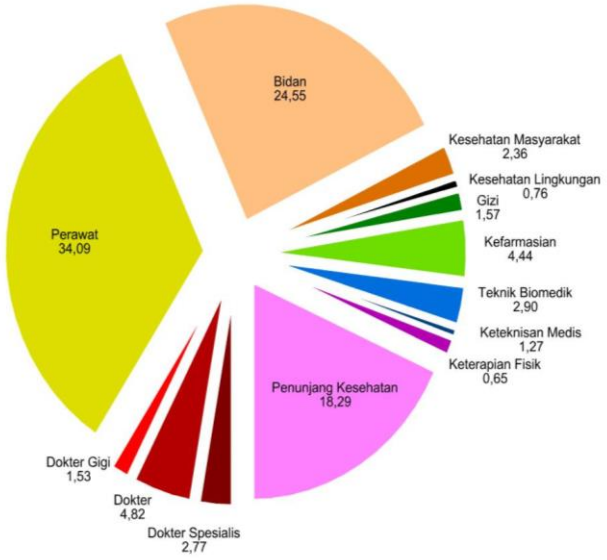
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pada bab ini sumber daya kesehatan menyajikan gambaran keadaan tenaga kesehatan di Puskemas dan Rumah Sakit wilayah Provinsi Riau.

Gambar 3.1

PERSENTASE TENAGA KESEHATAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019



Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan yang disajikan pada bab ini lebih diutamakan pada kelompok tenaga kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan tenaga keteknisian medis.

Data jumlah tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui ketersediaan dan kekurangan tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan di Provinsi Riau tahun 2019 berjumlah 31.628 orang, jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 23.491 orang. Sebahagain besar tenaga kesehatan di Provinsi Riau adalah tenaga keperawatan sebanyak 34,09. tenaga bidan sebanyak 24,55 dan Selanjutnya tenaga penunjang kesehatan sebanyak 18,29. Sedangkan untuk tenaga medis yang terdiri dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis gigi sebesar 9,12. Tenaga Kefarmasian sebanyak 4,44 diikuti tenaga kesehatan masyarakat 2,36. Tenaga teknik Biomedika sebanyak 2,90. Dan untuk tenaga gizi sebesar 1,57. Diikuti tenagaketeknisan medis sebesar 1,27 . Tenaga kesehatan lingkungan itu sebesar 0,76. Ketersediaan tenaga keterapian fisik 0,65.

Berdasarkan data jumlah tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun rasio tenaga kesehatan di Provinsi Riau. Jumlah tenaga kesehatan yang digunakan adalah jumlah tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan fungsinya.

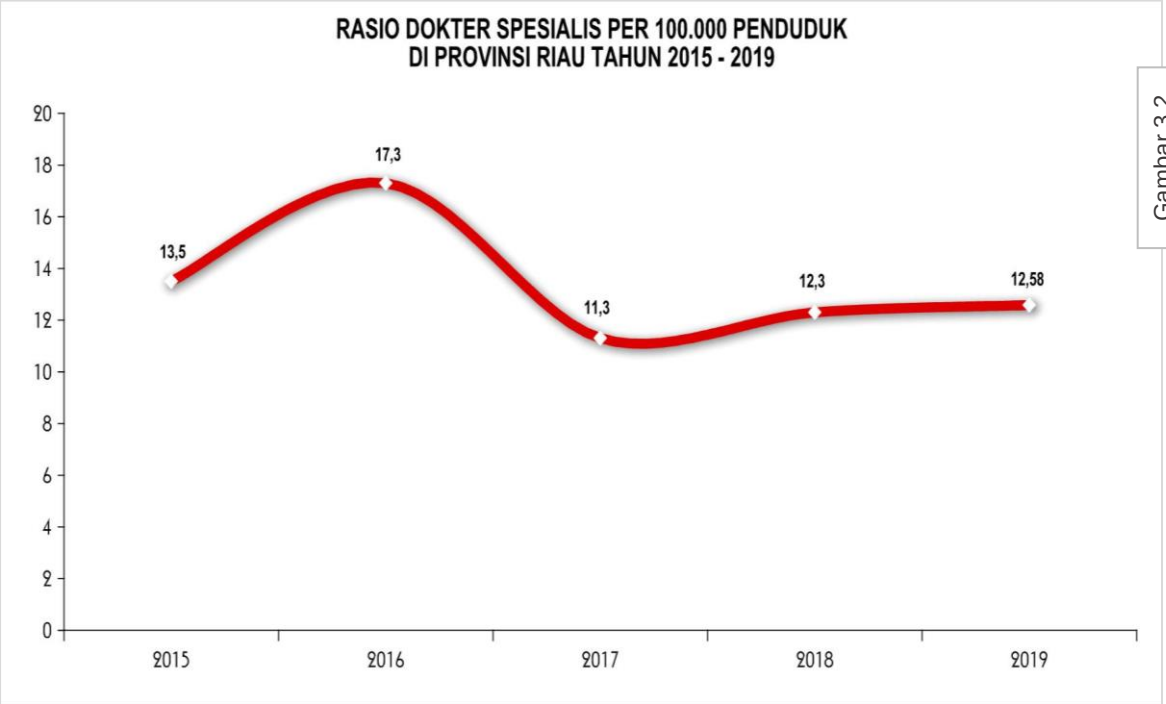
Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan guna mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Untuk target rasio tenaga kesehatan di Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025.

A. Jumlah Dan Rasio Tenaga Medis (Dokter Umum, Spesialis, Dokter Gigi) Di Sarana Kesehatan

1. Rasio Dokter Spesialis

Rasio tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau pada tahun 2019 adalah 12,58 per 100.000 penduduk artinya pada tahun 2019 ini di Provinsi Riau untuk 100.000 penduduk dilayani oleh 12 orang dokter spesialis. Rasio ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 (12,3). Rasio ini sudah mencapai target ketersediaan dokter spesialis di Provinsi Riau (11 per 100.000 penduduk)

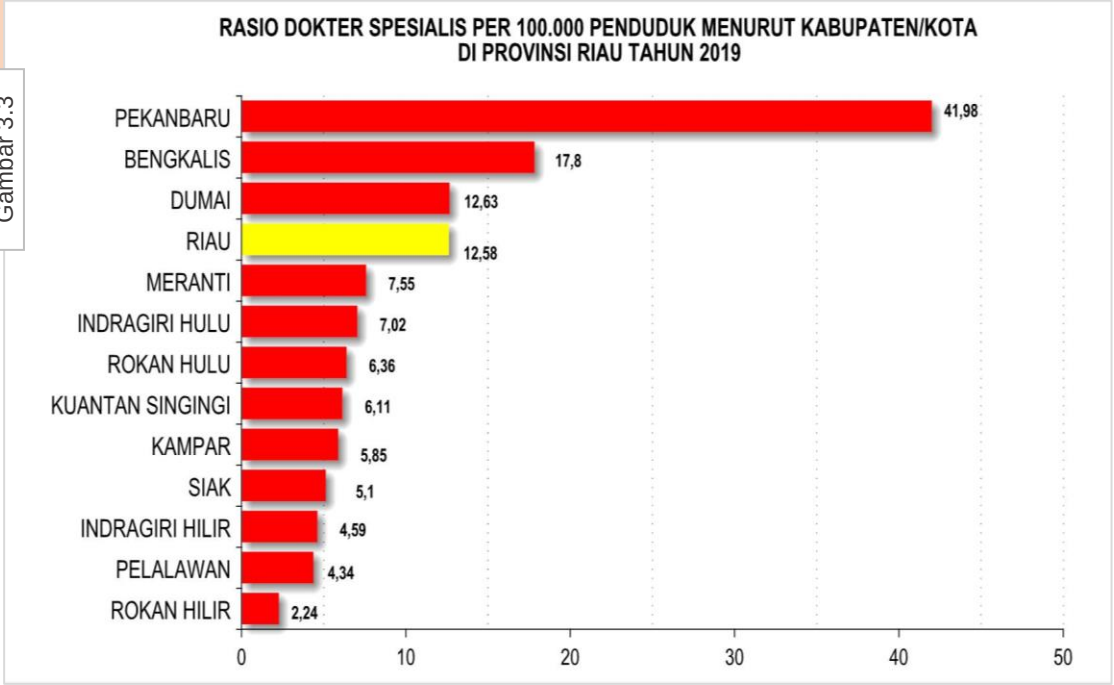
Untuk melihat gambaran rasio dokter spesialis di Provinsi Riau tahun dalam lima tahun terakhir (2015-2019) dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.2

Sedangkan pada tahun 2019 ini di Provinsi Riau sudah ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang telah mencapai target rasio dokter spesialis tahun 2019 (11 per 100.000 penduduk) yakni Kota Pekanbaru (41,98 per100.000 penduduk), Kabupaten Bengkalis (17,8 per100.000 penduduk), Kota Dumai (12,63 per100.000 penduduk). Gambaran tersebut dapat dilihat berdasarkan gambar grafik dibawah ini.

Gambar 3.3



Meskipun rasio dokter spesialis ini secara Provinsi telah melampaui target, namun penyebarannya di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau belum merata. Penempatan dokter spesialis masih terfokus di ibu Kota Provinsi saja yakni di Kota Pekanbaru denga rasio yang sangat tinggi sebesar 41,98 per100.000 penduduk meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 35,6 per 100.000 penduduk, rasionya dokter spesilais di Kota Pekanbaru ini sudah sangat jauh dibandingkan dengan rasio dokter spesialis di Kabupaten lainnya . Diikuti dengan Kabupaten Bengkalis sebesar 17,8 per100.000 penduduk da Kota Dumai sebesar 12,63 per100.000 penduduk. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya memiliki rasio yang sangat rendah, seperti Rokan Hilir dengan rasio dokter spesialis 2,24 diikuti dengan rasio dokter spesialis Kabupaten Pelalawan sebesar 4,34 dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan rasio 4,59.

Dengan penempatan yang tidak merata ini maka untuk masa yang akan datang perlu pemerataan penempatan dan penambahan dokter spesialis khususnya untuk penanganan kedaruratan dan perluasan pemerataan pelayanan kesehatan, mengingat lokasi dan geografis Provinsi Riau yang terdiri dari pulau-pulau dan daerah-daerah sulit.

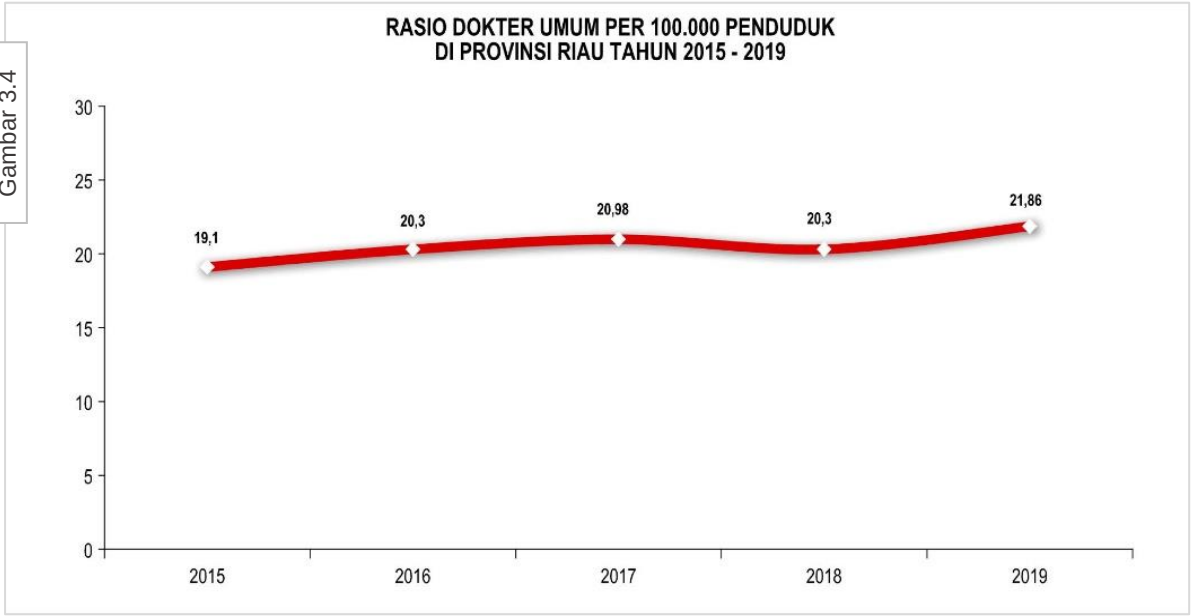
2. Rasio Dokter umum

Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Rasio dokter umum di Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun terakhir (2015 - 2019) rasio dokter umum terus mengalami peningkatan, hanya

pada tahun 2019 ini rasio dokter umum per 100.000 penduduk sebesar 21,86 terjadi penurunan sedikit dibandingkan tahun 2018 rasio dokter umum per 100.000 penduduk sebesar 20,3 per100.000 penduduk. Rasio dokter umum Provinsi Riau pada tahun 2019 ini masih sangat jauh dari target tahun 2019 sebesar 45 per100.000 penduduk. Masih rendahnya rasio dokter umum ini menjadi kendala dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Gambaran ketersediaan dokter umum di Provinsi Riau pada tahun 2019 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (untuk 100.000 penduduk) dilayani sekitar 22 orang tenaga dokter umum. Namun bila dilihat dari penempatan dokter umum di Kabupaten/Kota maka diketahui bahwa belum ada 1 (satu) Kabupaten/Kota yang telah mencapai target rasio dokter umum tahun 2019 (45 per100.000 penduduk). Gambaran lebih jelasnya rasio dokter umum di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

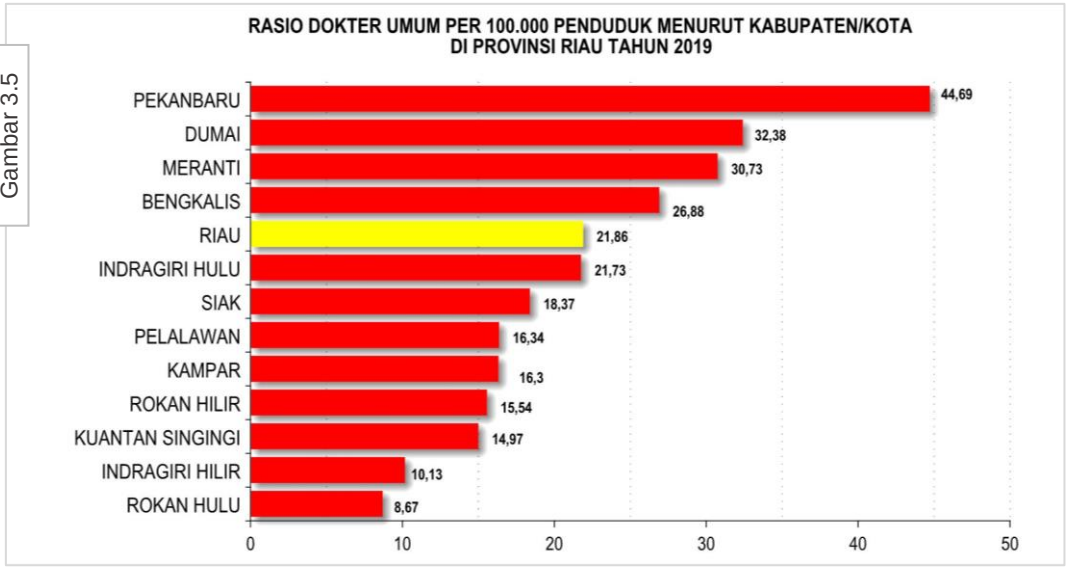
Gambar 3.4



Meskipun ketersediaan dokter belum umum memenuhi target, namun rasio tertinggi ada pada Kota Pekanbaru dengan rasio 41,98 per100.000 penduduk yang diikuti dengan Kabupaten Bengkalis 17,8 per100.000 penduduk dan Kota Dumai dengan rasio 12,63 per100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter umum terendah yaitu Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8,7 per100.000 penduduk, diikuti Kabupaten Indragiri Hilir dengan rasio doktr umum 10,13 per100.000 penduduk dan Kabupaten Kuantan Sengingi dengan rasio 14,97 per 100.000 penduduk. Kondisi ketersedia dokter umum harus menjadi perhatian dari Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah karena sangat jauh dari target yang direncanakan. Karena nanti kondisi ini

terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gambaran dapat dilihat seperti dibawah ini.

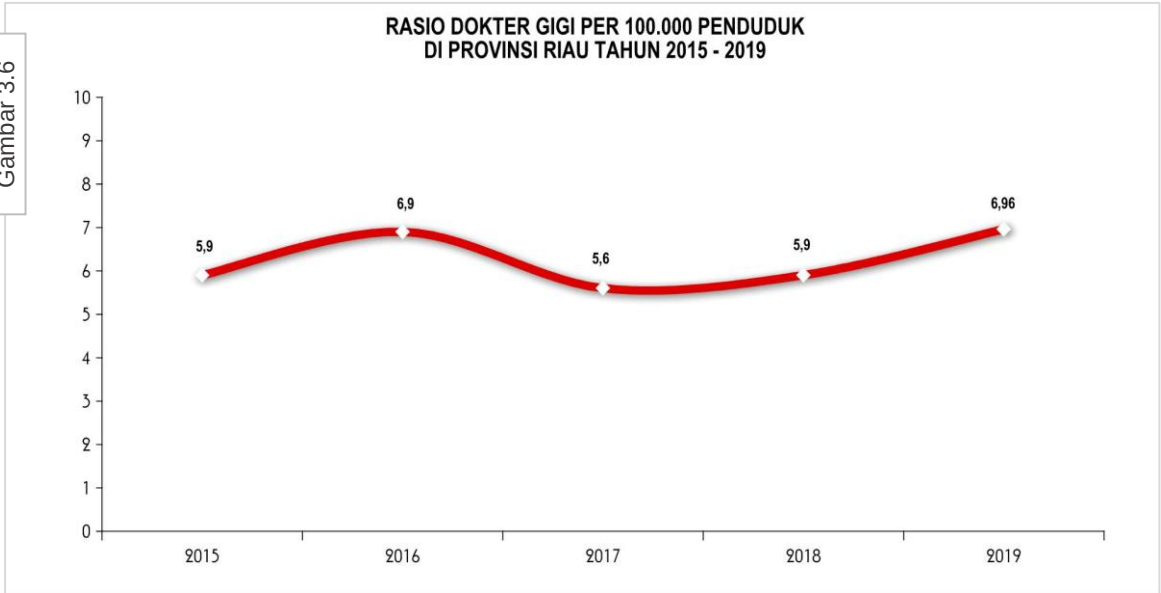
Gambar 3.5



3. Rasio Dokter Gigi

Provinsi Riau pada tahun 2019 rasio dokter gigi sebesar 6,96 per100.000 penduduk, artinya untuk tahun 2019 ini dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi masyarakat diberikan oleh 7 dokter gigi kepada 100.000 penduduk. Rasio ini mengalami peningkatan ,bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun bila diperhatikan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rasio dokter gigi masih sangat jauh dari rasio yang ditargetkan pada tahun 2019 dimana rasio dokter gigi sebesar 13 per100.000 penduduk. Ini artinya kekurangan tenaga dokter gigi ini sekitar 50% yang harus dipenuhi. Gambaran rasio dokter gigi per 100.000 penduduk di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.6

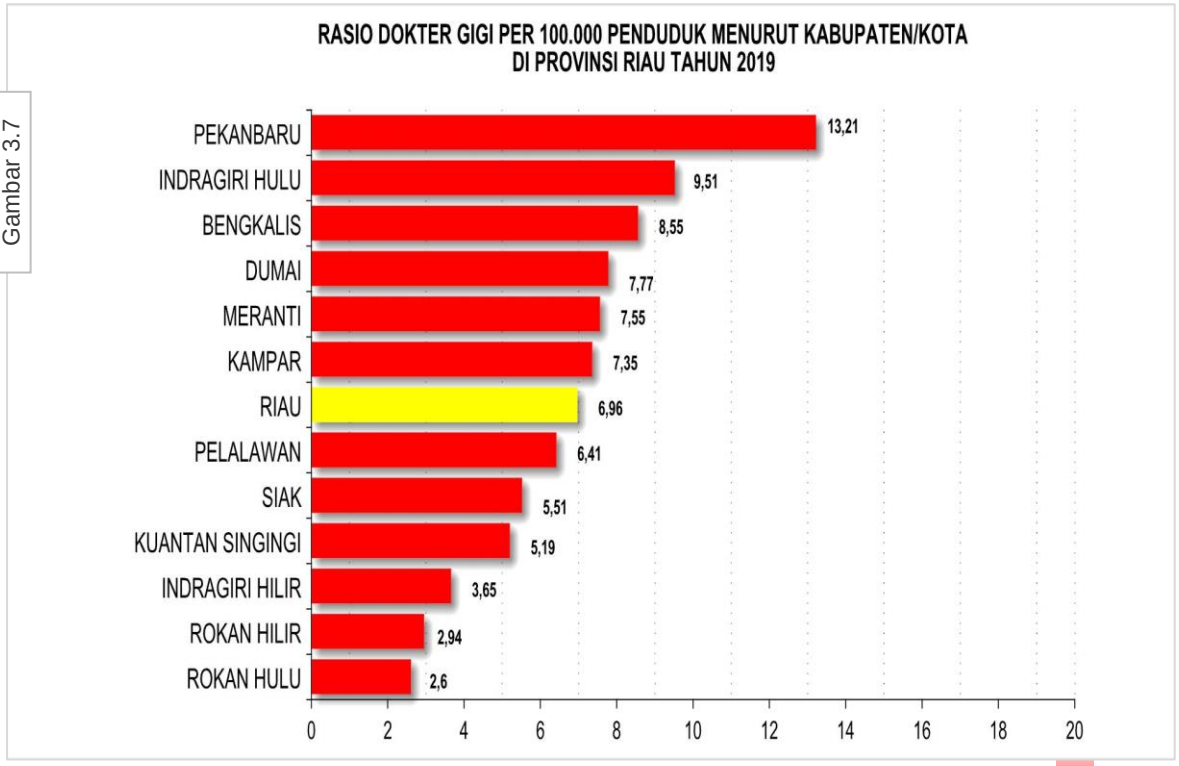


Rasio dokter gigi di Provinsi Riau sebesar 7 per 100.000 penduduk, masih sangat jauh bila dibandingkan dengan target kebutuhan tenaga dokter gigi pada tahun 2019 yakni 13 orang per 100.000 penduduk.

Dan secara penempatan tenaga dokter gigi di Provinsi Riau tahun 2019 ini pun belum merata, hal ini dapat dilihat rasio dokter gigi di Kabupaten/Kota, untuk rasio tertinggi dari Kota Pekanbaru 13,21 per 100.000 penduduk, diikuti Kabupaten Indragiri Hulu dengan rasio sebesar 9,51 per100.000 penduduk dan Kabupaten Bengkalis dengan rasio sebesar 8,55 per100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter gigi terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 2,6 per100.000 penduduk diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir sebesar 2,94 per100.000 penduduk dan Kabupaten Indragiri Hilir 3,65 per100.000 penduduk.

Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota hanya ada Kota Pekanbaru yang telah mencapai target rasio tenaga dokter gigi tahun 2019 sebesar 13 per100.000 penduduk. Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah mengingat kekurangan tenaga dokter gigi di Kabupaten/Kota. Hal ini terkait dengan pelayanan kesehatan gigi pada masyarakat. Untuk rasio dokter gigi terhadap per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019 terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.7

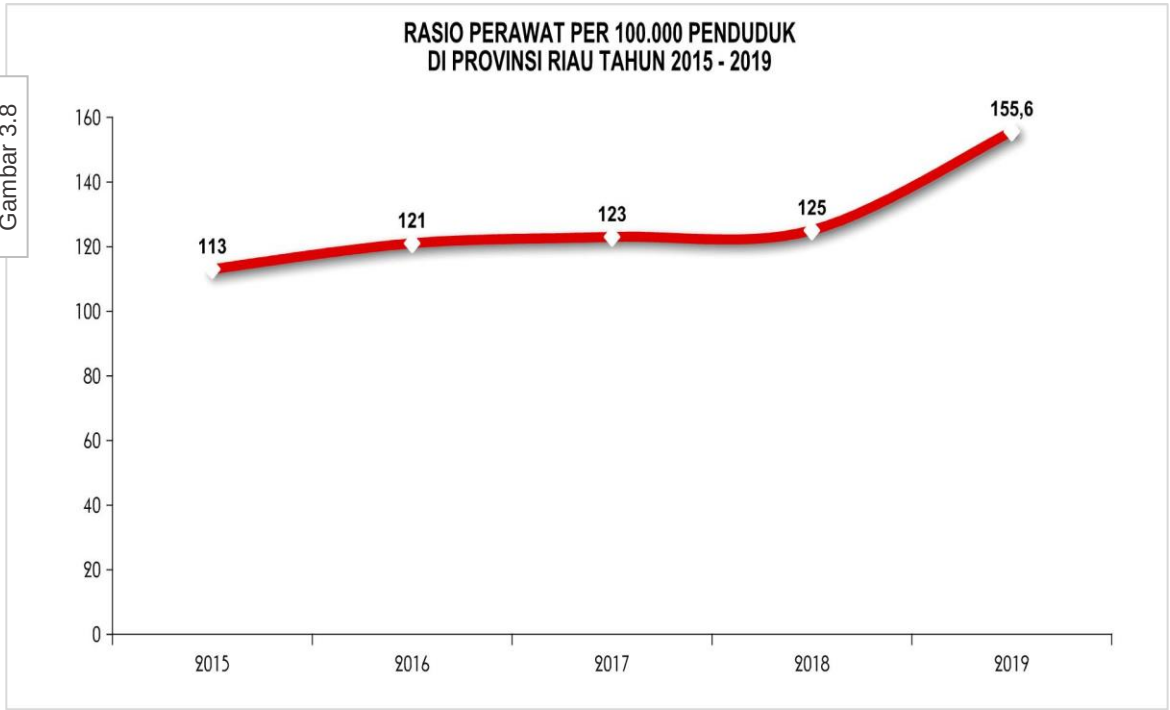


B. Jumlah Dan Rasio Tenaga Keperawatan (Bidan Dan Perawat) Di Sarana Kesehatan

1. Rasio Tenaga Perawat

Ketersediaan tenaga perawat di Provinsi Riau dapat dilihat dari rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk. Dan rasio tenaga perawat di Provinsi Riau pada tahun 2019 adalah 155,6 per 100.000 penduduk dan rasio ini meningkat bila dibandingkan dengan rasio tahun-tahun sebelumnya, dimana untuk tahun 2018 saja yakni sebesar 125 per 100.000 penduduk. Rasio perawat di Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 113 per100.000 penduduk dan tahun 2019 sebesar 155,6 per100.000 penduduk. Meskipun dalam lima tahun terakhir ini rasio tenaga perawat cenderung mengalami peningkatan, namun rasio tenaga perawat ini masih sangat jauh dari target rasio tenaga perawat pada tahun 2019 (180 per 100.000 penduduk). Untuk melihat gambaran rasio perawat 100.000 penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2015 - 2019 dapat dilihat dari gambar berikut ini.

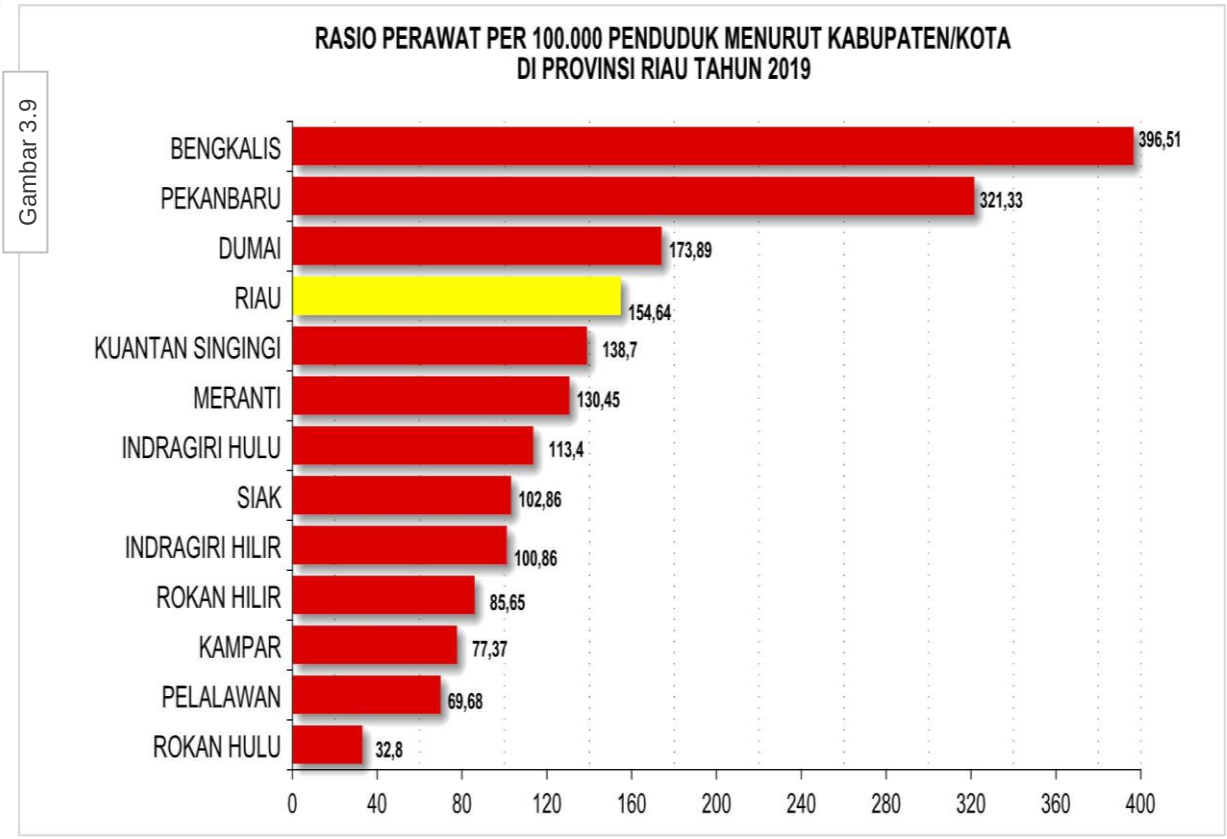
Gambar 3.8



Untuk melihat penyebaran tenaga perawat di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dapat diketahui dari rasio perawat per 100.000 penduduk. Rasio tenaga perawat tertinggi adalah Kota Pekanbaru dengan rasio sebesar 286 per 100.000 penduduk. Rasio perawat di Kota pekanbaru ini satu-satunya rasio perawat yang sudah mencapai bahkan melebihi target rasio tenaga perawat pada tahun 2019 yakni

sebesar 180 per 100.000 penduduk. Selanjutnya rasio perawat di Kota Dumai sebesar 158,3 per 100.000 penduduk dan rasio perawat di Kabupaten Kuantan Sengingi 120 per 100.000 penduduk.

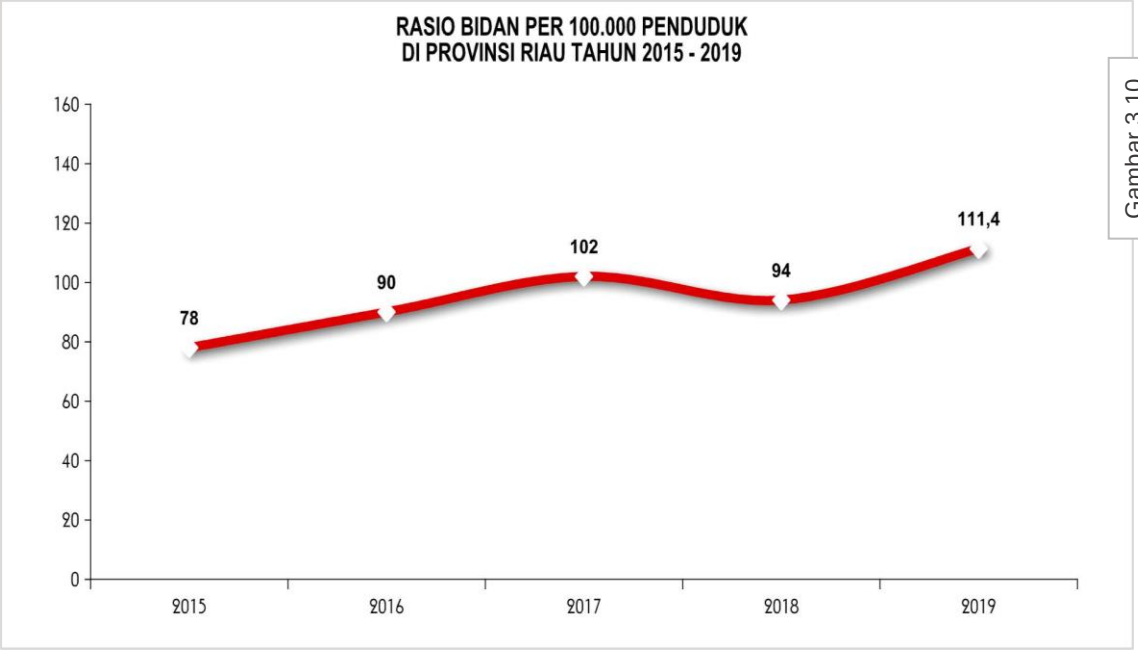
Gambar 3.9



Sedangkan rasio perawat terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 33 per100.000 penduduk, diikuti oleh Kabupaten Pelalawan 70 per100.000 penduduk dan Kabupaten Kampar 86 per100.000 penduduk. Hal ini harus menjadi fokus perhatian dari Pemerintah baik pusat maupun daerah guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan di daerah. Untuk penyebaran tenaga perawat di Provinsi Riau tahun 2019 dapat di dilihat pada gambar diatas.

2. Rasio Tenaga Bidan

Ketersediaan tenaga bidan di Provinsi Riau dapat dilihat dari rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk. Rasio tenaga Bidan per 100.000 penduduk tahun 2019 sebesar 111,4 per 100.000 penduduk, rasio ini meningkat dibandingkan dengan rasio bidan pada tahun 2018 (94 per 100.000 penduduk).



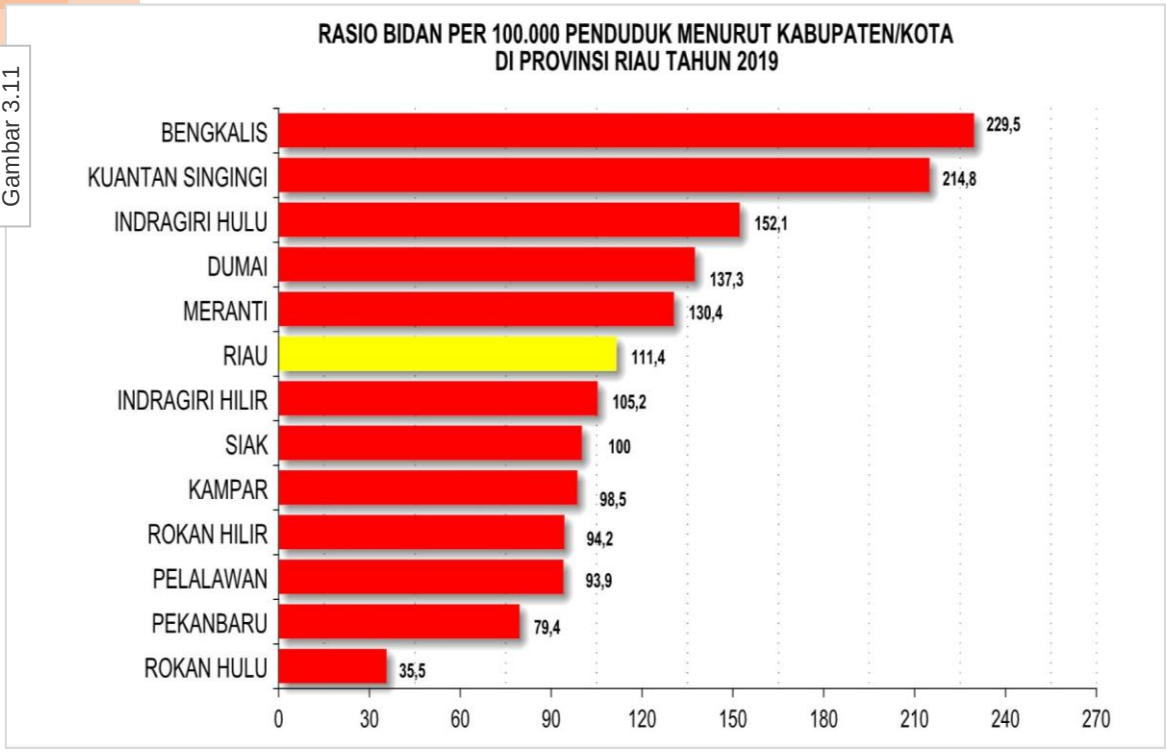
Gambar 3.10

Seperti yang dapat dilihat pada gambar diatas, rasio bidan di Provinsi Riau per100.000 penduduk tahun 2019 ini masih jauh dari target yang akan dicapai pada tahun 2019 yakni sebesar 120 per100.000 penduduk. Hal ini menjadi kendala dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) khususnya terkait dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk Pemerintah Pusat.

Sedangkan untuk penyebaran tenaga bidan di Kabupaten/Kota dapat dilihat dari gambar dibawah ini, dimana untuk Kabupaten/Kota yang rasio bidan tertinggi adalah Kabupaten Bengkalis (230 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Kuantan Sengingi (2015 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten ndragiri Hulu (152 per100.000 penduduk), sedangkan rasio bidan yang terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu (36 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kota Pekanbaru (79,4 per 100.000 penduduk) dan kabupaten Pelalawan (94 per 100.000 penduduk).

Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ada 5 (lima) Kabupaten yang telah mencapai target rasio tenaga bidan tahun 2019 sebesar 120 per 100.000 penduduk, yakni Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kep. Meranti . Lebih jelasnya bagaimana penempatan tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 3.11



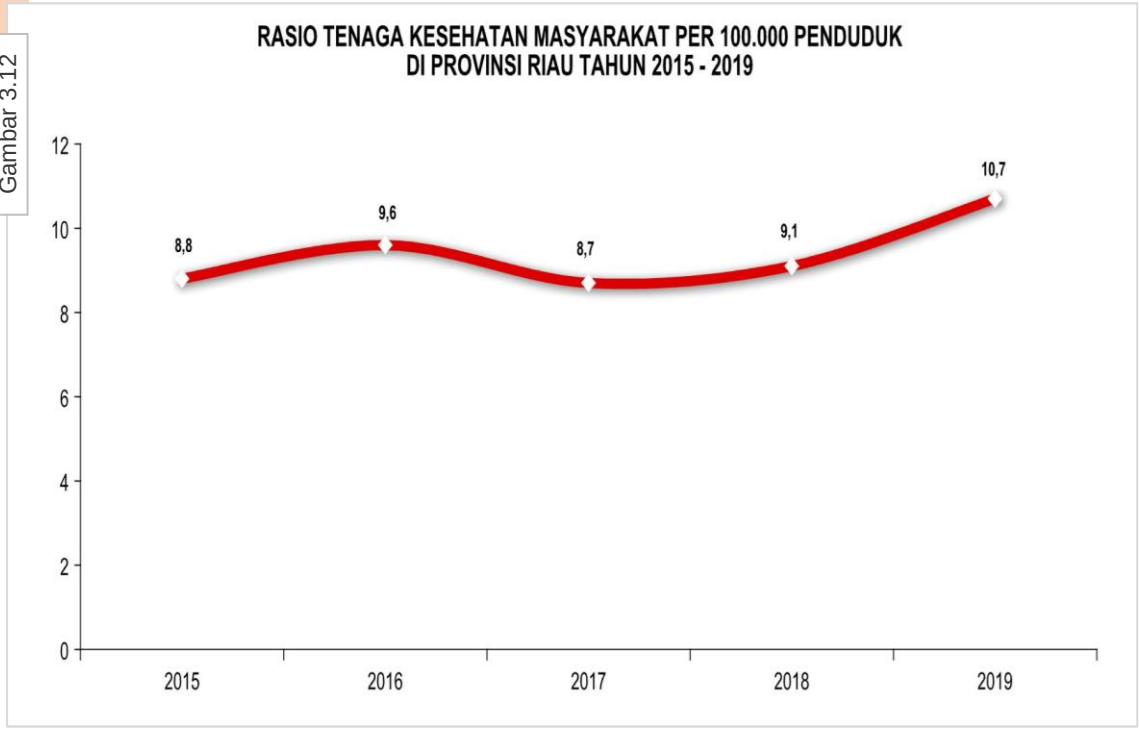
C. Jumlah Dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Dan Gizi Di Sarana Kesehatan

1. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak 747 orang dengan rasio tenaga kesehatan masyarakat sebesar 10,7 per100.000 penduduk, rasio ini meningkat bila dibandingkan dengan rasio tahun 2018 sebesar 9,1 per 100.000 penduduk. Selama 5 (lima) tahun 2014-2018 di

Provinsi Riau belum ada yang mencapai target rasio tenaga masyarakat yakni 15 per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Rasio tenaga kesehatan masyarakat yang masih jauh dari target ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan kepada masyarakat, karena ketersediaan tenaga kesehatan masyarakat sangat dubutuhkan dalam menggerakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Untuk melihat gambaran rasio tenaga kesehatan masyarkat selama 5 tahun (2015 - 2019) dapat dilihat dari gambar berikut ini.

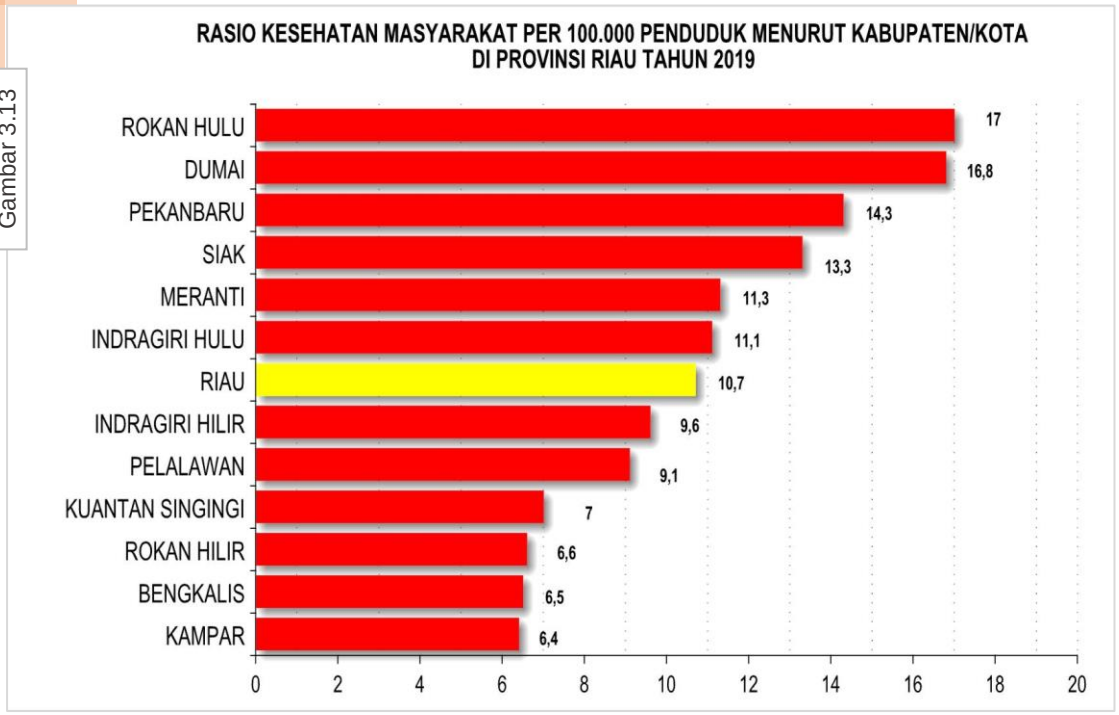
Gambar 3.12



Bila dilihat dari penyebaran tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota maka rasio tertinggi adalah Kabupaten Rokan Hulu (17 per 100.000 penduduk), diikuti dengan Kota Dumai sebesar 16,8 dan Kota Pekanbaru sebesar 114,3 per 100.000 penduduk). Sedangkan rasio terendah tenaga kesehatan masyarakat adalah Kabupaten Kampar (6,4 per 100.000 penduduk), Kabupaten Bengkalis (6,5 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Rokan Hilir (6,6 per 100.000 penduduk).

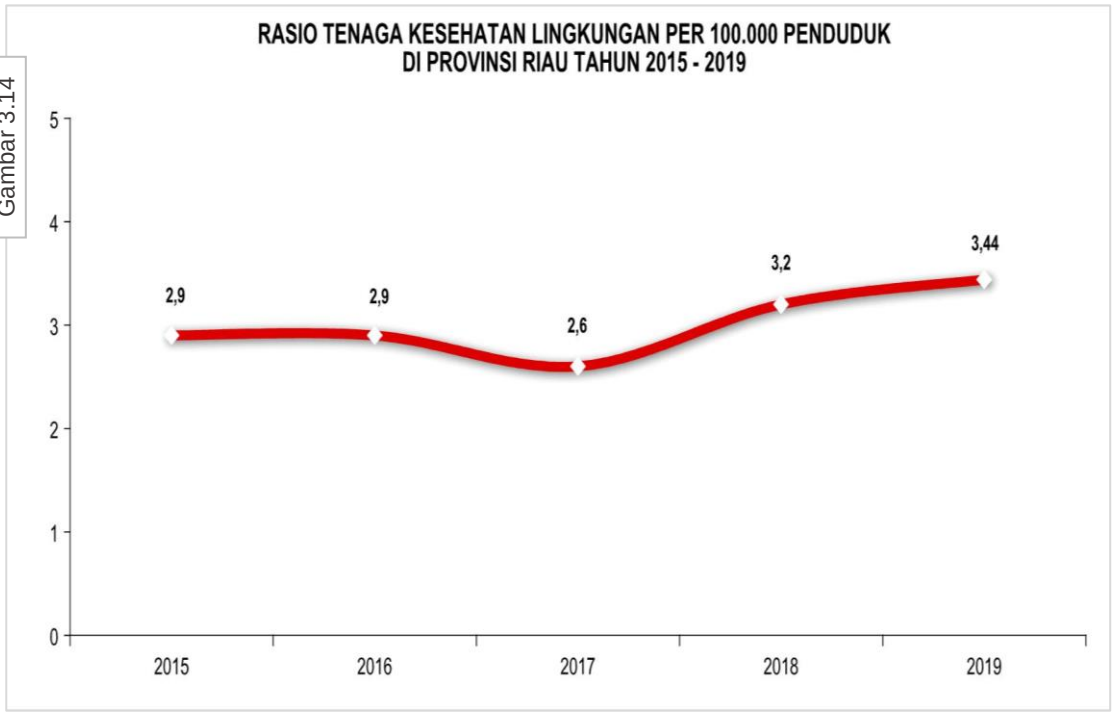
Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hanya Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai yang telah terpenuhi rasio tenaga kesehatan masyarakat bahkan telah mencapai target rasio tenaga kesehatan masyarakat tahun 2019 sebesar 15 per 100.000 penduduk. Kondisi ketersedian tenaga kesehatan masyarakat menuntut komitmen dari Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Dan rasio tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.13



2. Tenaga Kesehatan Lingkungan

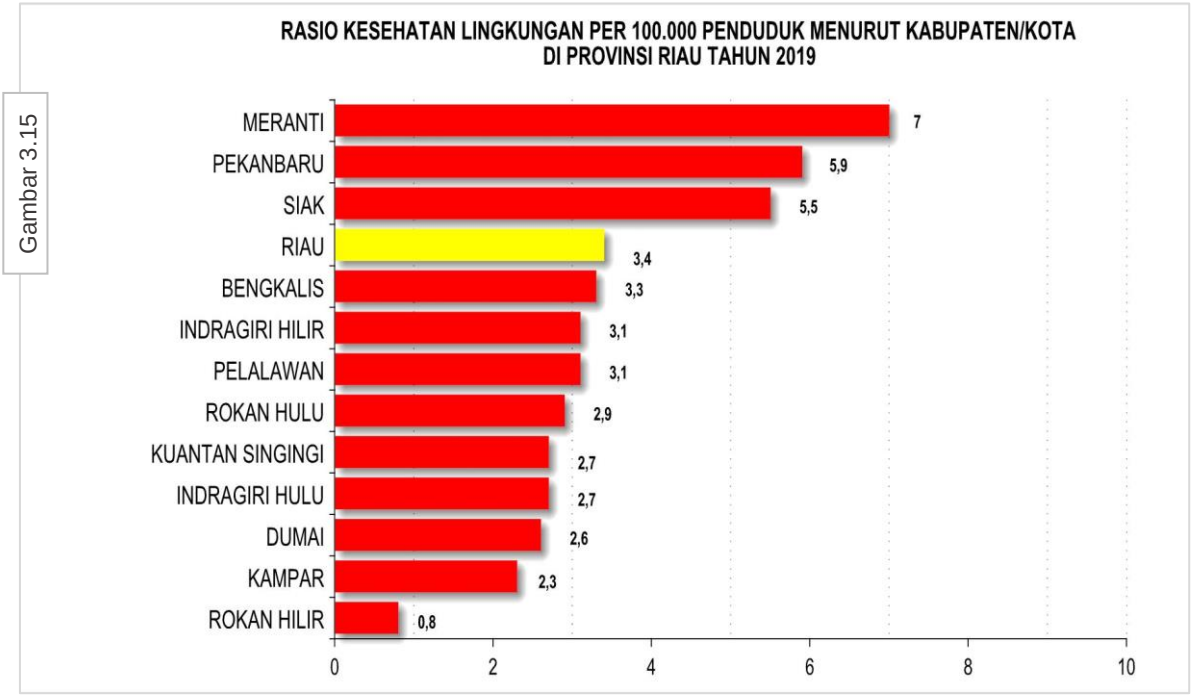
Gambar 3.14



Diatas merupakan gambaran rasio tenaga sanitasi tahun 2015-2019 per 100.000 penduduk. Tenaga sanitasi di Provinsi Riau tahun 2019 adalah 240 orang dengan rasio sebesar 3,44 per100.000 penduduk, rasio ini menurun dibandingkan dengan rasio pada tahun 2018 (3,2 per 100.000 penduduk). Rasio pada tenaga sanitasi tahun 2019 ini masih sangat jauh dari target rasio tenaga sanitasi tahun 2019 sebesar 18 per 100.000 penduduk.

Kemudian bila melihat penyebaran tenaga sanitasi di Kabupaten/Kota maka rasio tertinggi adalah Kabupaten Kep. Meranti (7 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kota Pekanbaru (5,9 per 100.000 penduduk), Kabupaten Siak (5,5 per 100.000 penduduk). Sedangkan yang terendah Kabupaten Rokan Hilir (1 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Kampar (2,3 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kota Dumai (2,6 per 100.000 penduduk) . Untuk rasio tenaga sanitasi di Provinsi Riau pada tahun 2019 ini tidak ada ada satu pun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang mencapai target rasio tenaga sanitasi. Dan rasio saat ini masih sangat jauh dari target rasio tenaga sanitasi tahun 2019 yakni sebesar 18 per 100.000 penduduk.

Gambar 3.15



Gambar diatas menjelaskan Penyebaran rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk. Rendahnya penempatan tenaga sanitasi di daerah harus menjadi perhatian Pemerintah guna menekan angka kesakitan pada masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan, dimana penyebab masalah kesehatan terbesar adalah kondisi lingkungan yang tidak sehat.

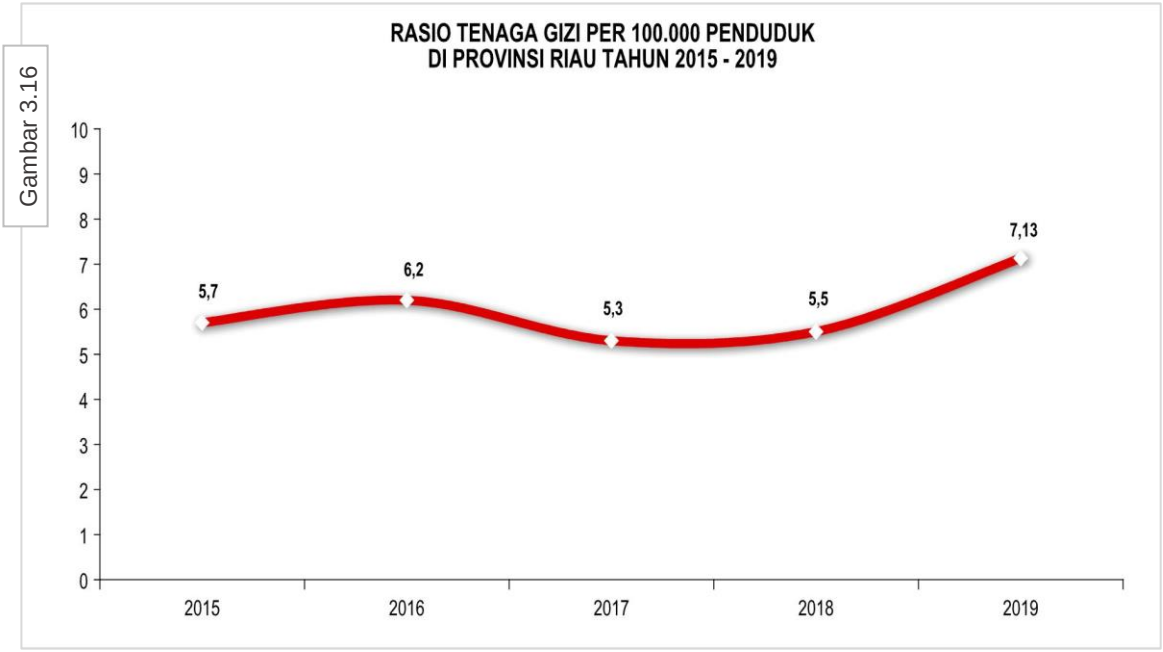
3. Tenaga Gizi

Tenaga gizi terdiri dari Tenaga Nutrisionis dan Dietisien. Jumlah tenaga gizi di Provinsi Riau pada tahun 2019 adalah 497 orang, dengan rasio 7,13 per100.000 penduduk dan rasio ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 (5,5 per 100.000 penduduk). Dalam 5 (lima) tahun (2015 – 2019) rasio tenaga gizi terhadap per 100.000 masih sangat jauh dari target tenaga gizi 2019 (14 per 100.000

penduduk). Kekurangan tenaga gizi ini sangat menghambat pencapaian pembangunan kesehatan, khususnya program gizi karena keberhasilan program gizi di masyarakat sangat ditentukan oleh tenaga kesehatan khususnya tenaga gizi. Apalagi saat ini program Pemerintah penanggulangan stunting merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan kesehatan. Dan gambaran ketersediaan tenaga gizi di Provinsi Riau 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dari dilihat dari gambar berikut ini.

Untuk penyebaran tenaga gizi di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru yang memiliki rasio tertinggi (16,6 per100.000 penduduk) di Provinsi Riau dan satu-satunya Kabupaten/Kota yang sudah mendekati target 2019. Dan diikuti oleh Kabupaten Bengkalis (10,3 per 100.000 penduduk) dan Kota Dumai (9,7 per 100.000 penduduk).

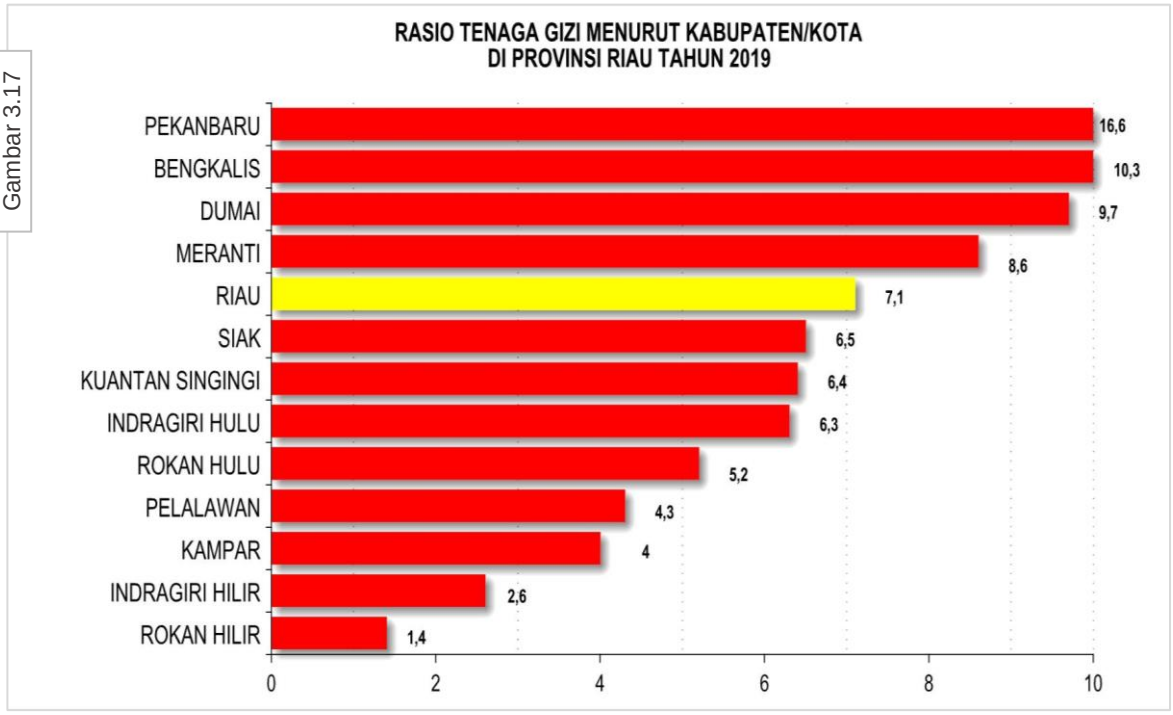
Gambar 3.16



Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten Rokan Hilir (1,4 per 100.000 penduduk), diikuti Kabupaten Indragiri Hilir (2,6 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Kampar (4 per 100.000 penduduk). Ketersediaan tenaga gizi sangat dibutuhkan sekali di daerah, mengingat pentingnya keberadaan tenaga gizi dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Provinsi Riau. Untuk itu ketersediaan tenaga gizi harus menjadi perhatian Pemerintah baik Pusat maupun

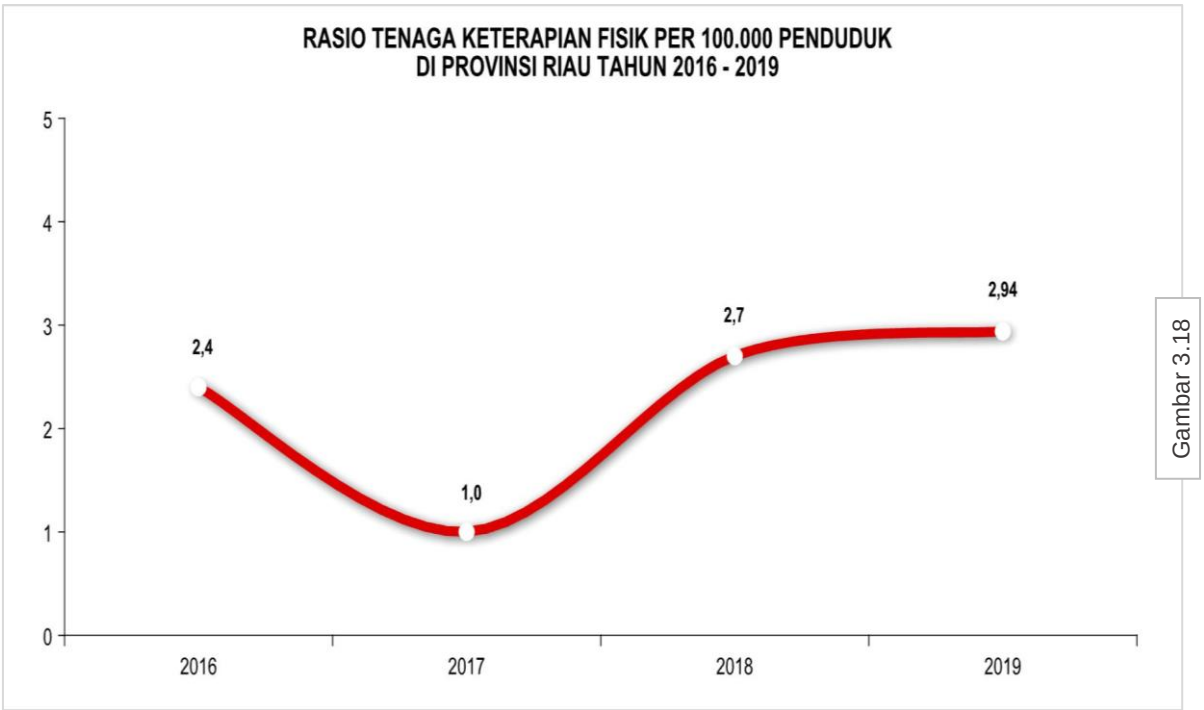
daerah guna perbaikan gizi masyarakat. Untuk mengetahui gambaran rasio tenaga gizi di Provinsi Riau tahun 2019 bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 3.17



D. Jumlah Dan Rasio Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, Dan Keteknisan Medik Di Sarana Kesehatan

1. Tenaga Keterapian Fisik



Gambar 3.18

Tenaga Keterapian Fisik terdiri dari Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara dan Akupuntur. Tenaga keterapian fisik di Provinsi Riau tahun 2019 dengan rasio 2,94 per100.000 penduduk, rasio tenaga keterapian fisik ini meningkat bila dibandingkan dengan rasio pada tahun 2018 (2,7 per100.000 penduduk).

Pada tahun 2019 ini rasio tenaga keterapian fisik di Kabupaten/Kota tertinggi pada Kota Pekanbaru sebesar 10 per100.000 penduduk diikuti oleh

Kabupaten Kunta Sengingi, Kota Dumai, Kabupaten Kep. Meranti masing-masing 4 per100,000 penduduk. Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten Pelalawan 0,2 per 100.000 penduduk, Kabupaten Rokan Hilir 0,4 per100.000 penduduk diikuti Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu masing-masing 1 per100.000 penduduk .

Untuk melihat lebih jelas gambaran rasio tenaga keterapian fisik dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 3.19

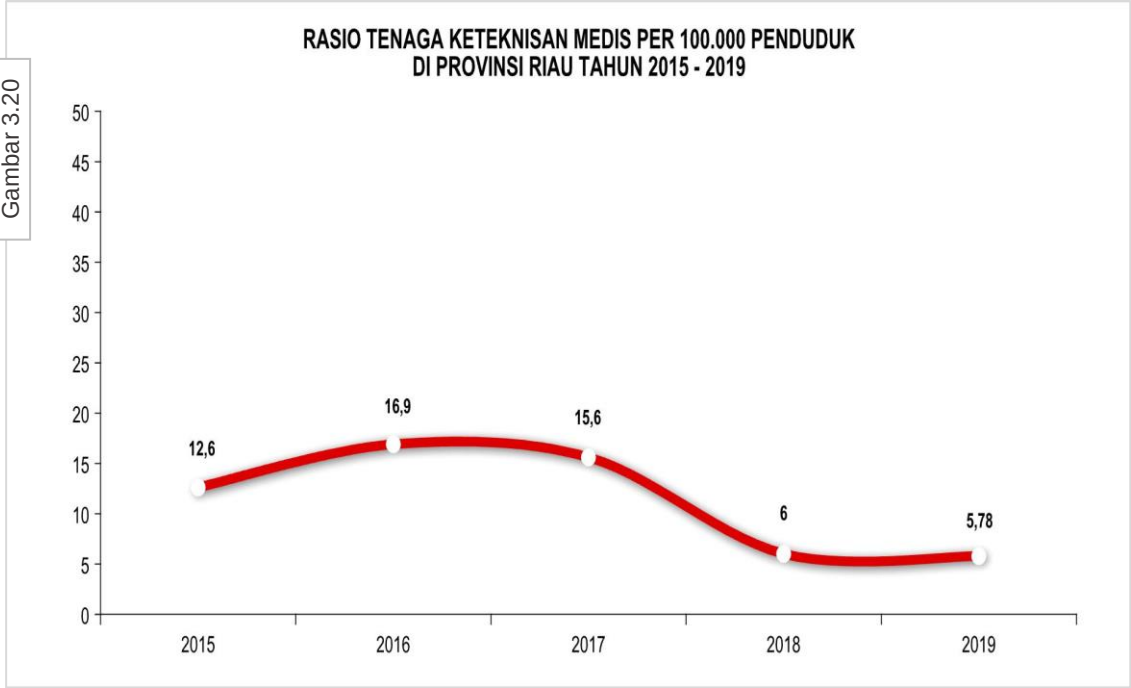


2. Tenaga Keteknisan Medik

Tenaga teknisi medis terdiri dari Radiografer, Radioterapis, Teknis Elektromedis, Teknis Gigi, Analisis Kesehatan, Refraksionis Optisein, Ortetik Prostetik, Rekam medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Tranfusi Darah, Teknisi Kadiovaskuler. Tenaga teknisi medis di Provinsi Riau tahun 2019 memiliki rasio sebesar ,78 per 100.000 penduduk, rasio ini menurun dibandingkan dengan tahun

2018 dengan rasio 6 per 100.000 penduduk. Bila dibanding kan dengan tahun sebelumnya maka rasio tenaga teknis medis ini mengalami penurunan terus, hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk tidak diiringi dengan jumlah penambahan tenaga keteknisan medis, sehingga rasio tenaga keteknisan medis menurun secara drastis. Untuk mengetahui lebih jelas gambaran ketersediaan tenaga keteknisan medis dalam 5 (lima) tahun sejak tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 3.20



Jika dilihat dari penempatan tenaga keteknisan medis di Kabupaten/Kota masih dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Pekanbaru (13,4 per 100.000 penduduk) seperti gambar di bawah ini, Selanjutnya Kabupaten bengkalis (8,7 per 100.000 penduduk) dan diikuti Kota Dumai (8,1 per 100.000 penduduk).

Ketersediaan tenaga keteknisan medis yang terendah (per100.000 penduduk) adalah Kabupaten Kepulauan Meranti diikuti oleh Kabupaten Pelalawan (0,8 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Rokan Hulu dengan rasio tenaga keteknisan medis 1,4 per 100.000 penduduk. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bagaimana rasio tenaga keteknisan medis per 100.000 penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019.

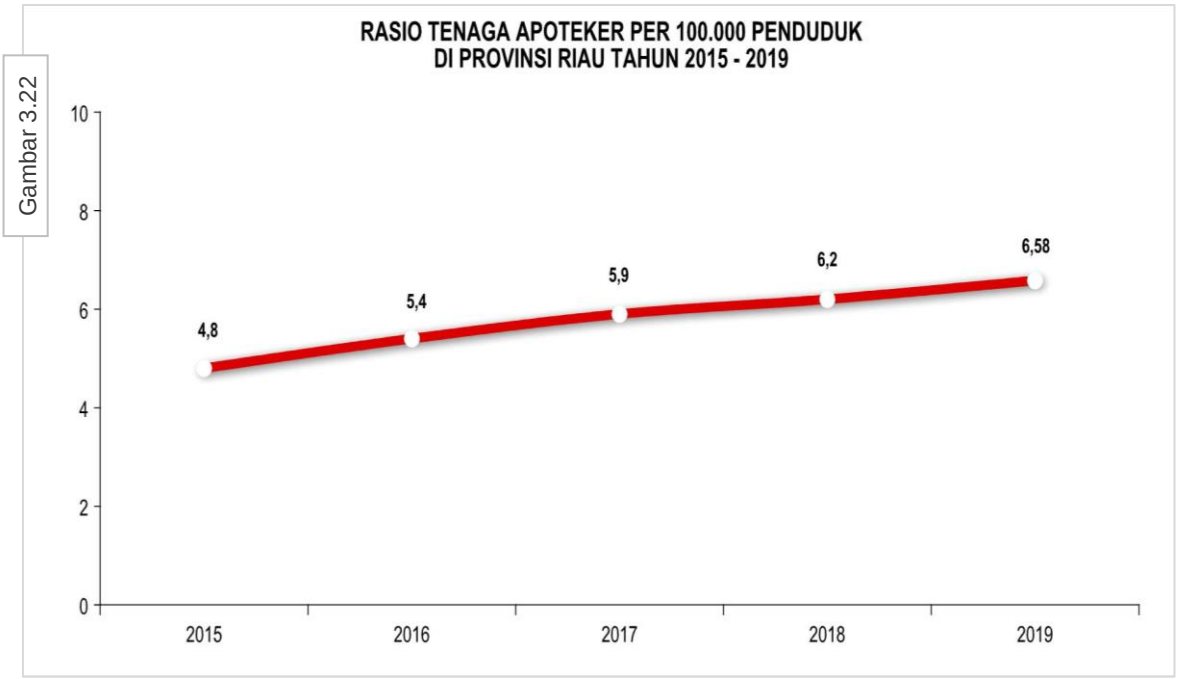
Gambar 3.21



E. Jumlah Dan Rasio Tenaga Kefarmasian (Tenaga Teknis Kefarmasian Dan Apoteker) Di Sarana Kesehatan

1. Apoteker

Gambar 3.22



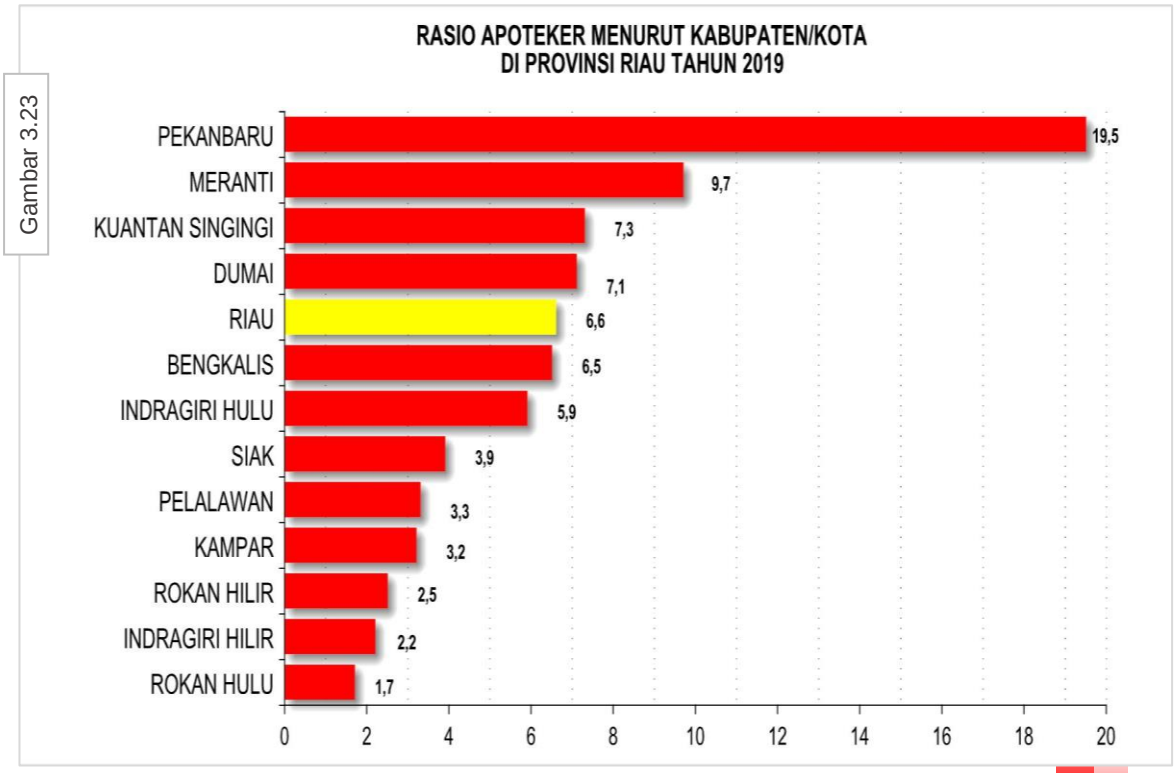
Untuk tenaga apoteker di Provinsi Riau tahun 2019 berjumlah 459 orang dengan rasio tenaga apoteker sebesar 6,58 per 100.000 seperti yang digambarkan pada gambar tren di atas. Rasio ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 dengan rasio 4,8 per 100.000 penduduk. Meskipun ketersediaan tenaga apoteker terus mengalami peningkatan namun dalam 5 (lima) tahun terakhir belum ada yang mencapai target rasio tenaga

apoteker pada tahun 2019 (11 per 100.000 penduduk). Kondisi ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standard kepada masyarakat, dan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat bagaimana memenuhi ketersediaan tenaga apoteker agar agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.

Jika dilihat dari penempatan tenaga apoteker di Kabupaten/Kota masih dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Pekanbaru (19,5 per 100.000 penduduk) seperti gambar di bawah di atas, Untuk Kota Pekanbaru rasio tenaga apoteker ini telah melampaui rasio tenaga apoteker tahun 2019 yang menjadi target sebesar 11 apoteker per 100.000 penduduk. Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Meranti (9,7 per 100.000 penduduk) dan diikuti Kabupaten Kuantan Sengingi (7,3 per 100.000 penduduk).

Ketersediaan tenaga apoteker yang terendah (1,7 per 100.000 penduduk) adalah Kabupaten Rokan Hulu diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir (2,2 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Rokan Hilir dengan rasio tenaga apoteker 2,5 serta Kabupaten Kuantan Sengingi 2,2 per 100.000 penduduk. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bagaimana rasio tenaga apoteker per 100.000 penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2019.

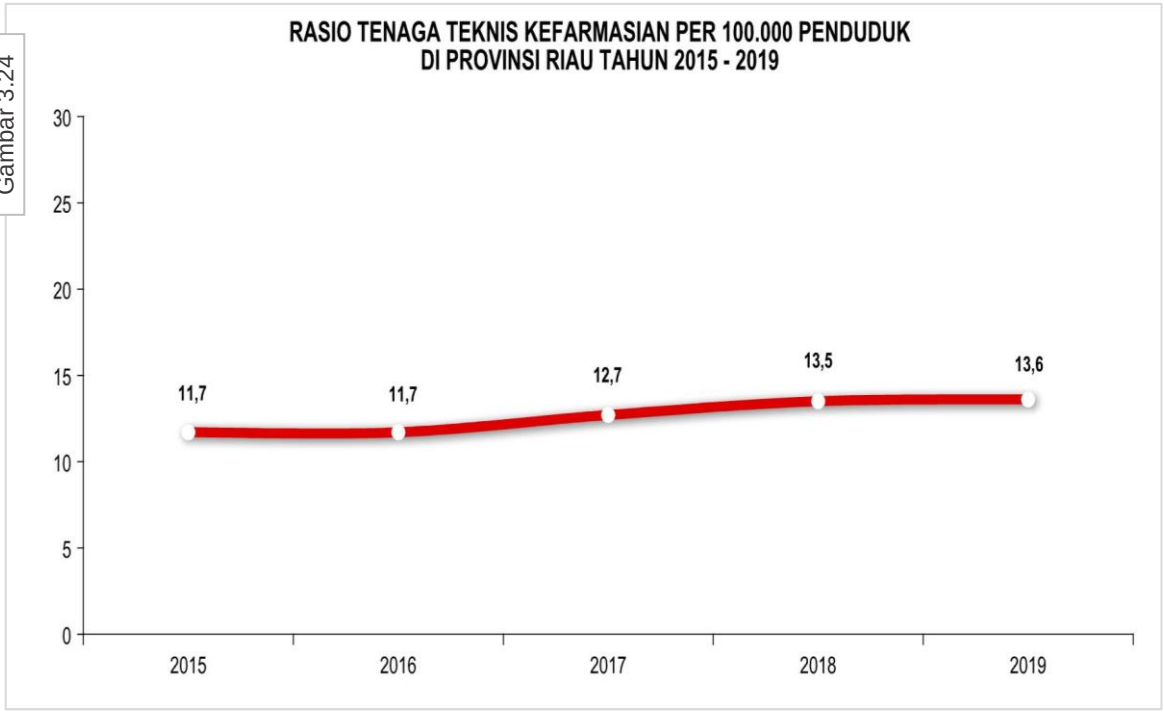
Gambar 3.23



2. Tenaga Teknis Kefarmasian

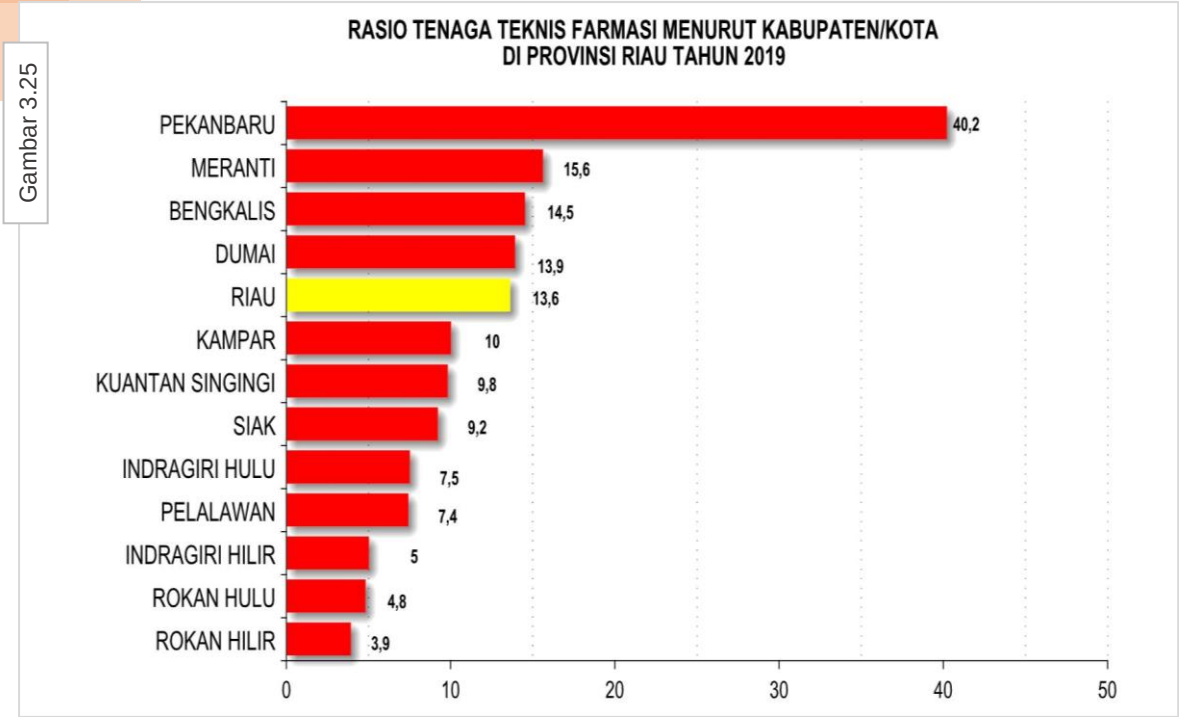
Untuk tenaga teknis kefarmasian terdiri dari S-1 Farmasi, D-III Farmasi, dan Asisten Apoteker. Tenaga teknis kefarmasian di Provinsi Riau pada tahun 2019 ini berjumlah 946, dengan rasio 13,6 per100.000 penduduk. Dan rasio ini meningkat dibandingkan dengan rasio tenaga teknis kefarmasian tahun 2018 (13,5 per 100.000 penduduk) dan 2017 memiliki rasio 12,7 per 100.000 penduduk. Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar rasio tenaga kefarmasian 5 tahun terakhir (2014-2019) dibawah ini.

Gambar 3.24



Sedangkan bila dilihat rasio tenaga teknis kefarmasian berdasarkan Kabupaten / Kota maka rasio tenaga teknis kefarmasian yang tertinggi ada pada Kota Pekanbaru (40,2 per 100.000 penduduk) diikuti Kabupaten Kep. Meranti (15,6 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Bengkalis (14,5 per 100.000 penduduk), kemudian rasio tenaga teknis kefarmasian rasio terendah adalah Kabupaten Rokan Hilir (3,9 per 100.000 penduduk) diikuti Kabupaten Rokan Hulu 4,8 per 100.000 dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 5 per 100.000 penduduk.

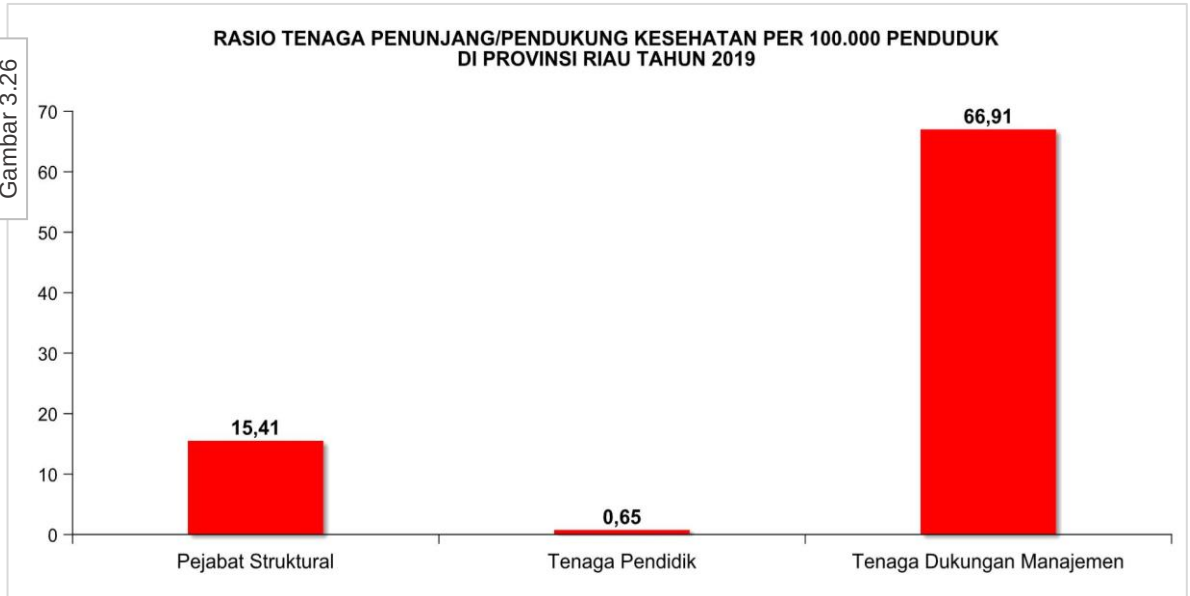
Gambar 3.25



F. Jumlah Dan Rasio Tenaga Penunjang/ Pendukung Kesehatan

Tenaga Penunjang/Pendukung kesehatan terdiri dari pejabat struktural, staf penunjang administrasi, staf penunjang teknologi, staf penunjang perencanaan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu juga ketersediaan tenaga non kesehatan juga tidak kalah pentingnya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerja sarana kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan lainnya dan penunjang kesehatan di Provinsi Riau pada tahun 2019 berjumlah 5.784 orang dengan rasio 72,97 per 100.000 penduduk. Adapun rincian tenaga penunjang ini adalah seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3.26



Jika dilihat dari ketersediaan tenaga Penunjang Kesehatan yang tersebar di kabupaten/kota sebagian besar tersebar di Kota Pekanbaru, diikuti Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Dan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang paling sedikit tenaga penunjangnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari graik dibawah ini.

Gambar 3.27



Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Riau masih belum ter cukupi, namun Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) telah berusaha mencukupi kebutuhan tenaganya melalui pengangkatan tenaga baru seperti CPNS, PTT dan kontrak, yang terpenting saat ini keberadaan tenaga kesehatan tersebut belum merata sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota, masih ditemui penempatan tenaga pada satu daerah sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum semua terjangkau.

Mobilitas tenaga atau distribusi tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah pelayanan kesehatan diupayakan dengan peningkatan sarana-sarana kesehatan yang ada, seperti peningkatan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap dan pemberian insentif. Guna mengatasi masalah ketenagaan maka salah satu langkah awal kedepan adalah pemetaan tenaga kesehatan disertai dengan analisis kebutuhan berdasarkan problema spesifik dan kewilayahan.

***

PEMBIAYAAN KESEHATAN

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

A. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

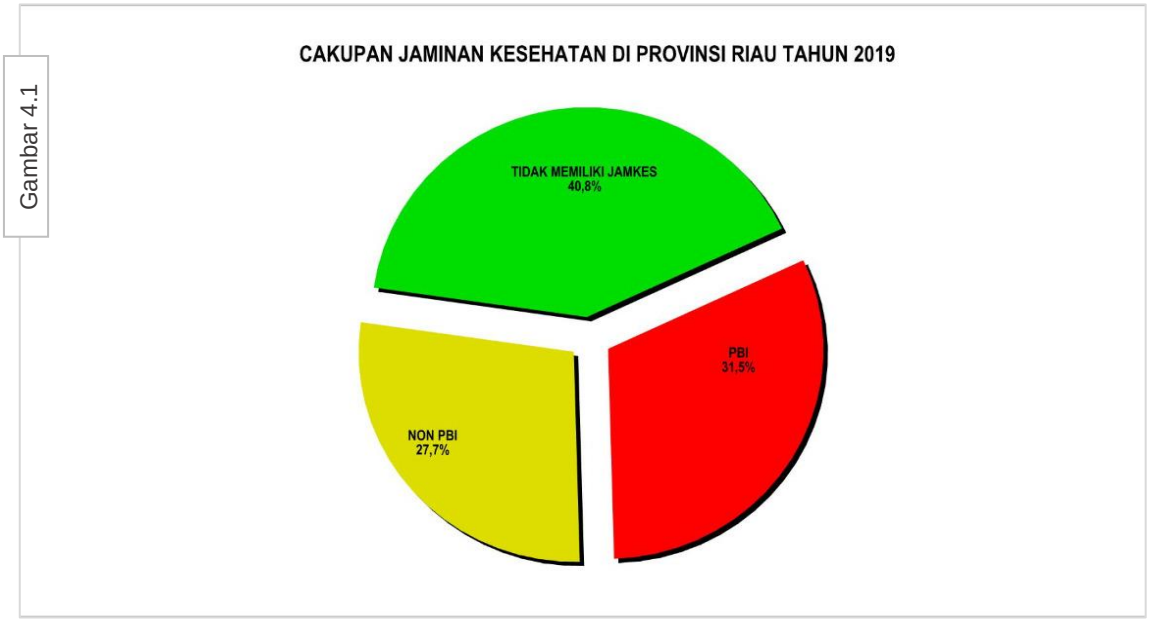
Dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, sebagaimana tujuan pembangun kesehatan, maka Pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2014 telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyatnya secara bertahap hingga 1 Januari 2019. Jaminan kesehatan ini merupakan pola pembiayaan yang bersifat wajib, artinya pada tanggal 1 Januari 2019 seluruh masyarakat Indonesia (tanpa terkecuali) harus telah menjadi peserta. Melalui penerapan Jaminan Kesehatan Nasional ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang tidak berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan di kala sakit karena tidak memiliki biaya.

Pada tahun 2019, peserta jaminan kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 4.125.323 jiwa terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah melalui APBN sebanyak 1.410.040 jiwa.
2. PBI APBD adalah peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah daerah melalui APBD sebanyak 518.840 jiwa.
3. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah peserta jaminan kesehatan yang terdiri dari PNS, TNI, POLRI, pejabat negara, pegawai Pemerintah non PNS, dan pegawai swasta sebanyak 1.278.521 jiwa.
4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri adalah jaminan kesehatan dengan peserta yang berasal dari pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan sebanyak 859.477 jiwa.

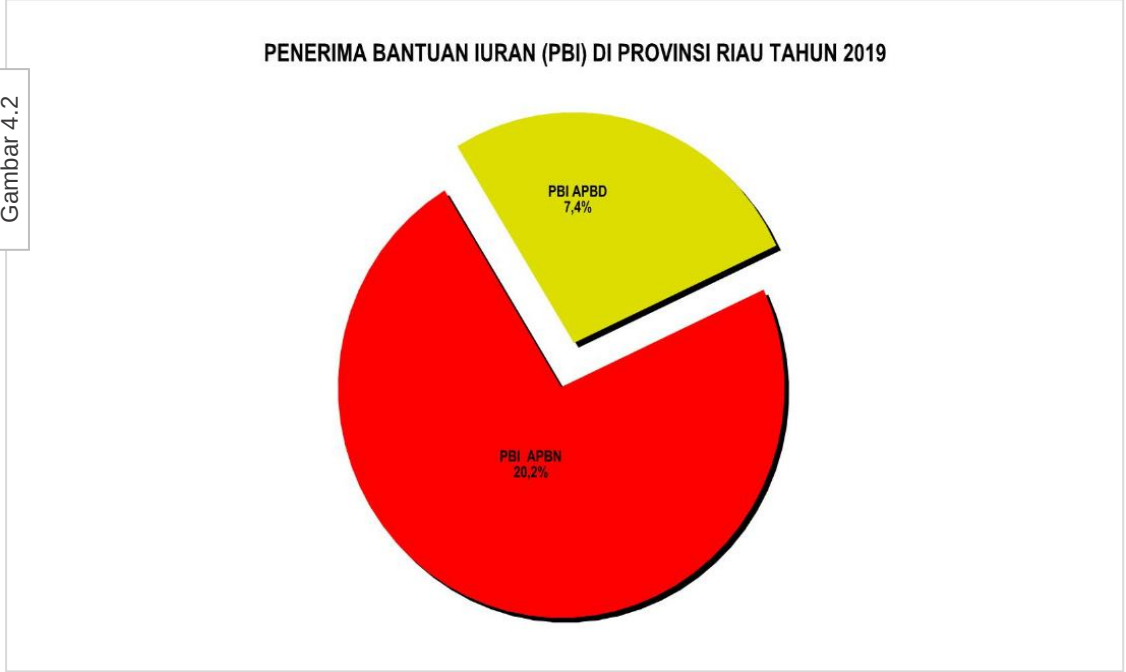
5. Bukan Pekerja (BP) adalah peserta jaminan kesehatan yang terdiri dari investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan sebanyak 8.445 jiwa.

Gambar 4.1

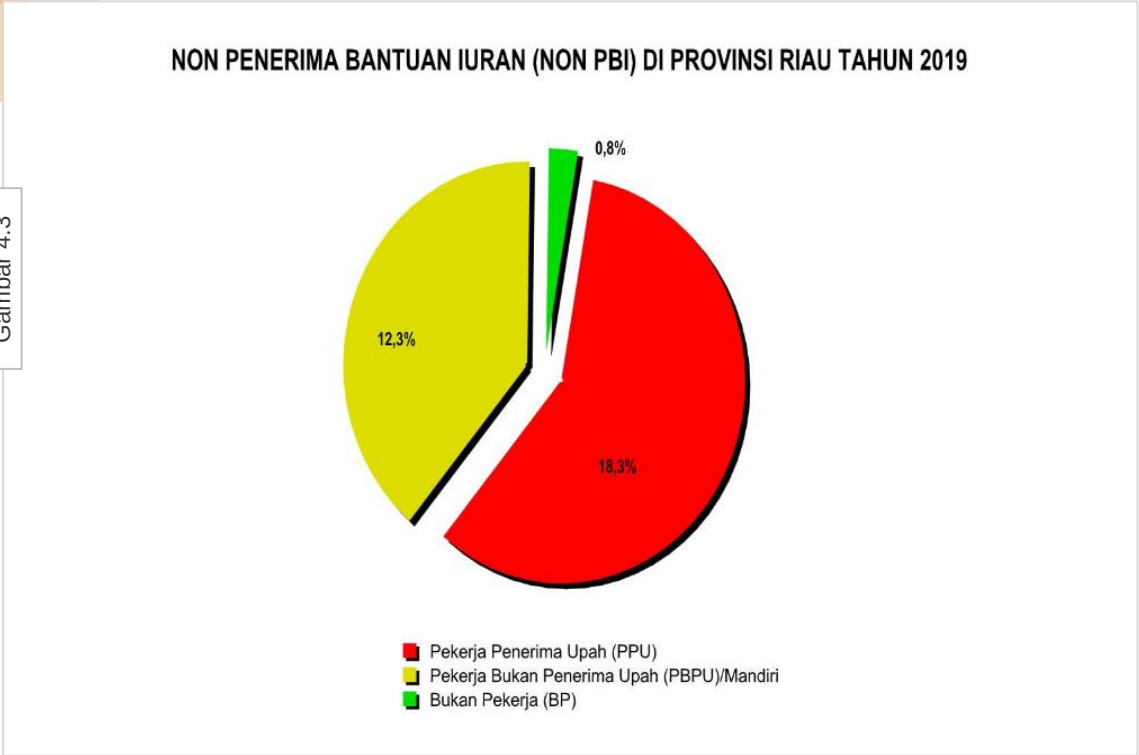


Gambar di atas merupakan gambaran Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019. Dimana pada di tahun 2019 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Provinsi Riau ini adalah sebesar 59,2% atau sekitar 4.125.323 jiwa. Ini artinya ada sekitar 40,8% penduduk Provinsi Riau itu belum memiliki Jaminan Kesehatan. Dari 59,2% penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 27,7% dan Non Penerima bantuan Iuran (Non PBI) 31,5%.

Gambar 4.2



Gambar 4.3



Pada gambar di atas, dijelaskan bahwa Kepesertaan jaminan kesehatan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebesar 27,7% yang terbesar bersumber dari Anggaran APBN(20,2%) dan APBD (7,4%). Sedangkan untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Non PBI sebesar 31,5% dan yang kepesertaan yang terbanyak dari PPU (18,3%), PBPU/mandiri (12,3%) dan Bukan Pekerja sebesar 0,8% sekaligus paling sedikit kepesertaannya.

Karena saat ini masyarakat kita masih ada yang belum memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan sekitar 40,8%, maka perlu adanya pergerakan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam melindungi kesehatannnya dan keluarga dengan menjadi peserta jaminan kesehatan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah.

B. Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hanya 10 Kabupaten/Kota yang memanfaatkan dana desa, karena 2 Kota lagi yakni Kota Dumai dan Pekanbaru tidak memiliki dana desa, hanya ada kelurahan. Sedangkan jumlah desa yang memnfaatkan dana desa untuk kesehatan sebanyak 1.408 desa dari 1605 desa yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota atau 85,8%. Untuk mengetahui secara jelas persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan dana Desa bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 4.4

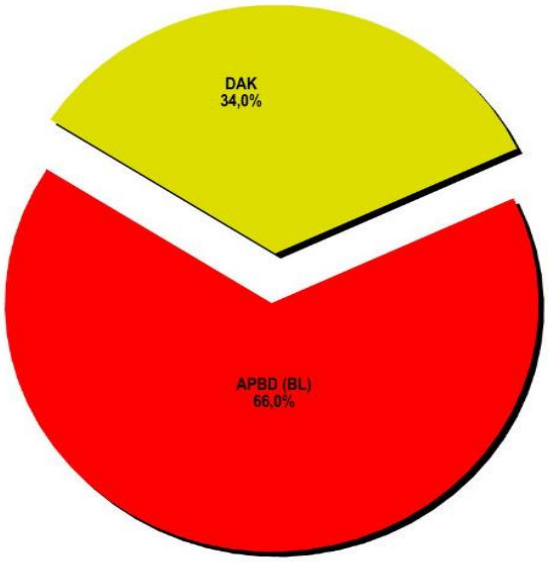


C. Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten / Kota

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Gambar 4.5

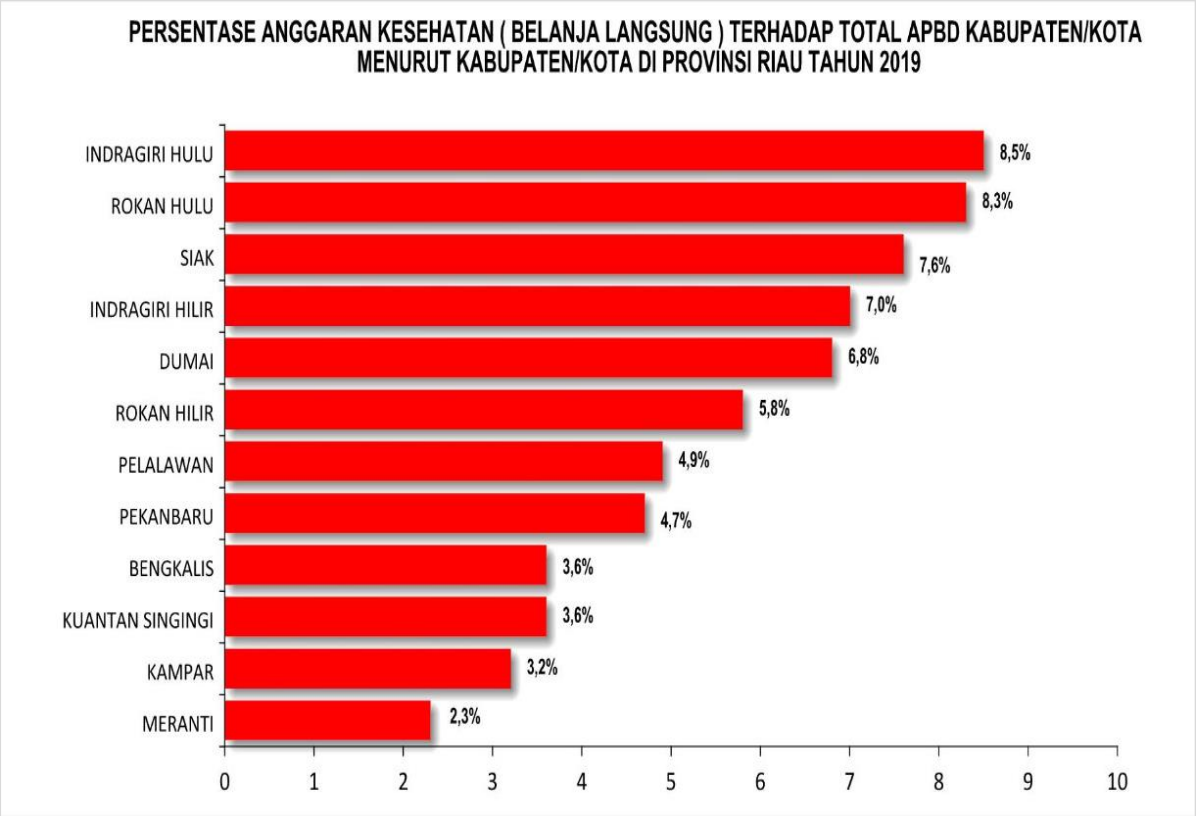
ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SUMBERNYA
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019



Gambar di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2019 jumlah total anggaran kesehatan di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 1.903.203.415.815 sumber anggaran kesehatan terbesar di Kabupaten / Kota berasal dari APBD Kabupaten / Kota sebesar 66,0%, sumber dari DAK 34,00%. Dari gambar dibawah ini terlihat gambaran sumber anggaran kesehatan di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2019.

Anggaran kesehatan Kabupaten/Kota bersumber dari anggaran APBD Kabupaten/Kota, APBN, APBD Provinsi dan Pemerintah lain (pinjaman/hibah luar negeri). Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan besar anggaran kesehatan Pemerintah Daerah baik di Provinsi serta Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Persentase alokasi anggaran kesehatan merupakan gambaran sejauh mana respon Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota.

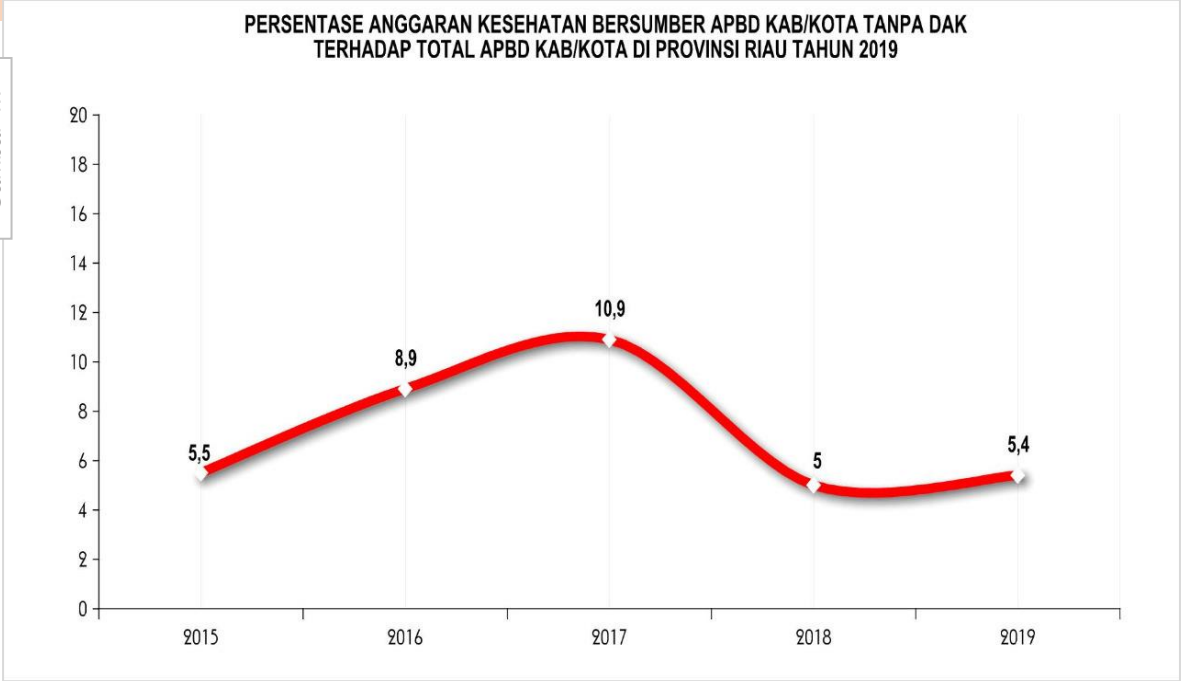


Gambar 4.6

Dari gambaran grafik di atas, untuk persentase anggaran kesehatan bersumber APBD Kabupaten/Kota terhadap APBD Kabupaten/Kota, maka Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Kabupaten yang mempunyai persentase terbesar (8,5%), diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8,3% dan Kabupaten Siak sebesar 7,6%, sedangkan persentase total anggaran kesehatan terhadap total anggaran APBD nya terkecil yaitu Kabupaten Kep. Meranti sebesar 2,3% diikuti oleh sebesar Kabupaten Kampar 3,2% dan Kabupaten Kuantan Sengingi sebesar 3,6%.

Di Provinsi Riau Tahun 2019 belum ada Kabupaten/Kota yang sudah menjalankan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa besar anggaran kesehatan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Berikut ini gambaran persentase anggaran kesehatan terhadap total APBD Kabuapten/kota 5 tahun terakhir.

Gambar 4.7



Besarnya alokasi anggaran kesehatan tersebut sangat penting karena ini merupakan komitmen Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap pembangunan kesehatan di daerahnya. Hal ini mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan. Semakin besar belanja kesehatan yang dikeluarkan Pemerintah diharapkan semakin baik pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Dan saat ini setiap daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban pencapaian Standar Pelayanan Minimal 100%.

D. Anggaran Kesehatan Perkapita

Namun dalam melakukan penganggaran tidak hanya memperhatikan berapa besarnya persentase anggaran tersebut untuk kesehatan, juga harus melihat penduduk dari daerah tersebut. Untuk Alokasi Anggaran kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2019 ini yang dihubungkan dengan besarnya penduduknya atau anggaran kesehatan perkapita seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.8



Untuk anggaran kesehatan perkapita terbesar adalah Kabupaten Siak (349.721), dan selanjutnya adalah Kabupaten Indragiri Hulu (338.606) dan Kota Dumai (315.667). Sedangkan Anggaran kesehatan perkapita terendah adalah Kabupaten Kampar (94.646), diikuti Kota Pekanbaru (110.870) dan Kabupaten Kuantan Sengingi (161.785).

***

KESEHATAN KELUARGA

BAB V KESEHATAN KELUARGA

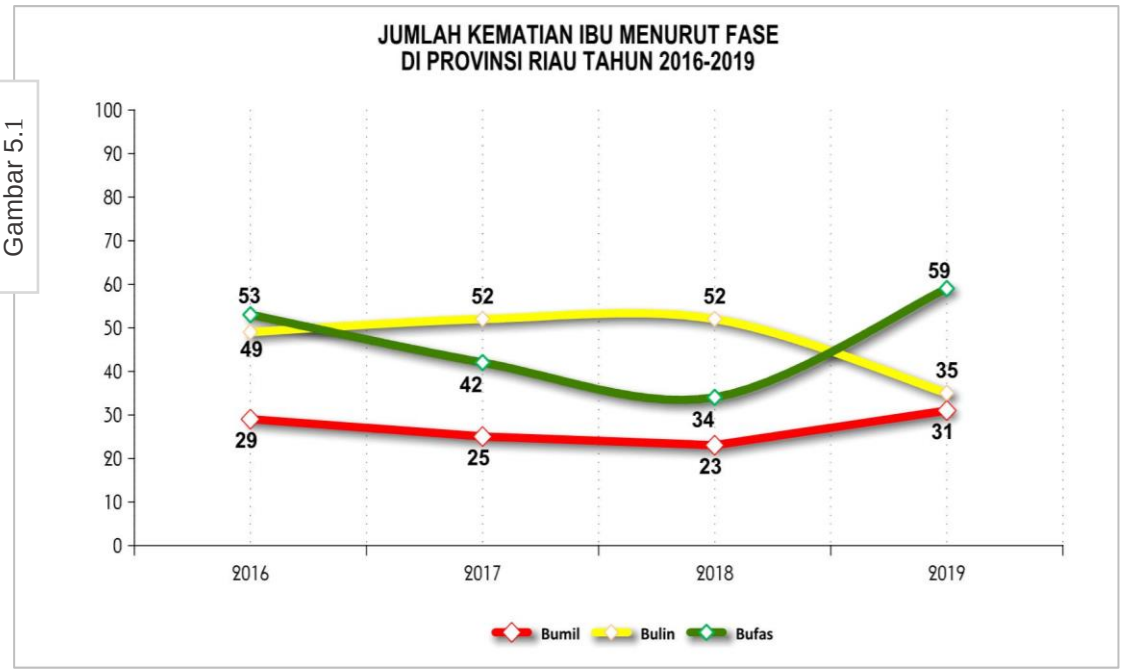
A. Kesehatan Ibu

1. Jumlah Dan Angka Kematian Ibu (Dilaporkan)

Setiap hari, 830 ibu di dunia (di Indonesia 38 ibu, berdasarkan AKI 305) meninggal akibat penyakit/komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Sebagian besar kematian tersebut seharusnya bisa dicegah dan diselamatkan, artinya, bila AKI tinggi, banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal tetapi meninggal karena tidak mendapatkan upaya pencegahan dan penanganan yang seharusnya. Kematian ibu dapat disebabkan karena komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu, sekitar 15% kehamilan/persalinan mengalami komplikasi.

Grafik Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Fase Kehamilan, Melahirkan dan Masa Nifas di Provinsi Riau Tahun 2019.

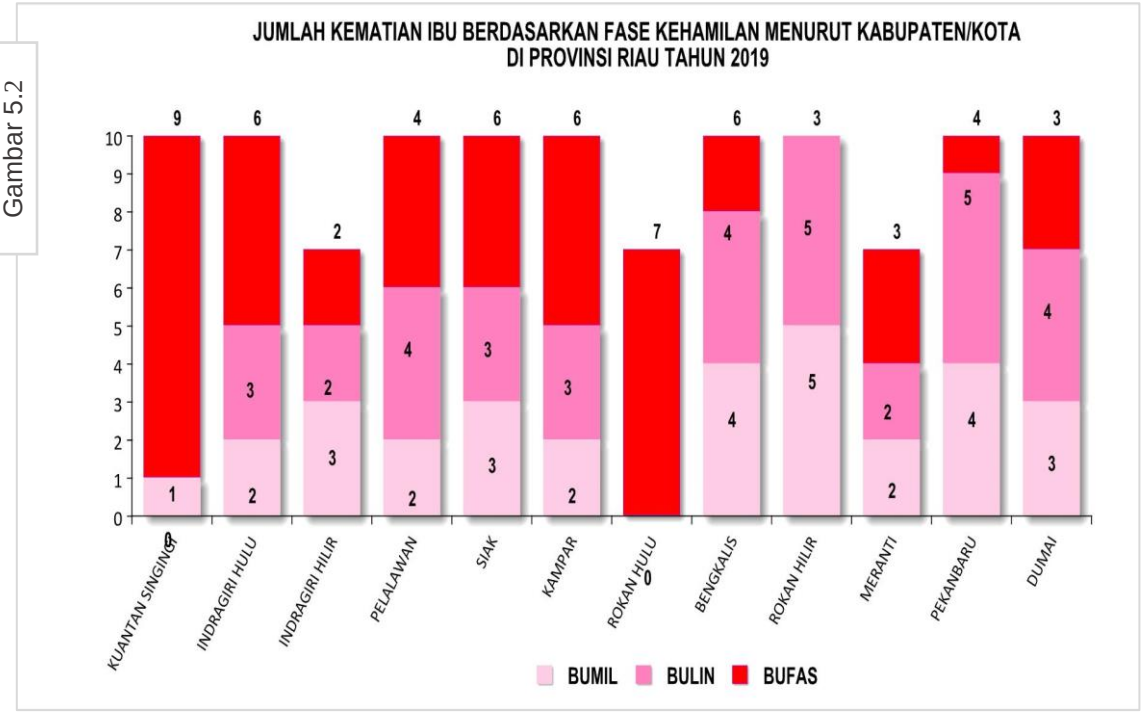
Gambar 5.1



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 125 kematian ibu, dengan rincian kematian ibu hamil sebanyak 31 orang, kematian ibu bersalin 35 orang dan kematian ibu di masa nifas 59 orang. Untuk jumlah kematian ibu bersalin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan jumlah kematian ibu

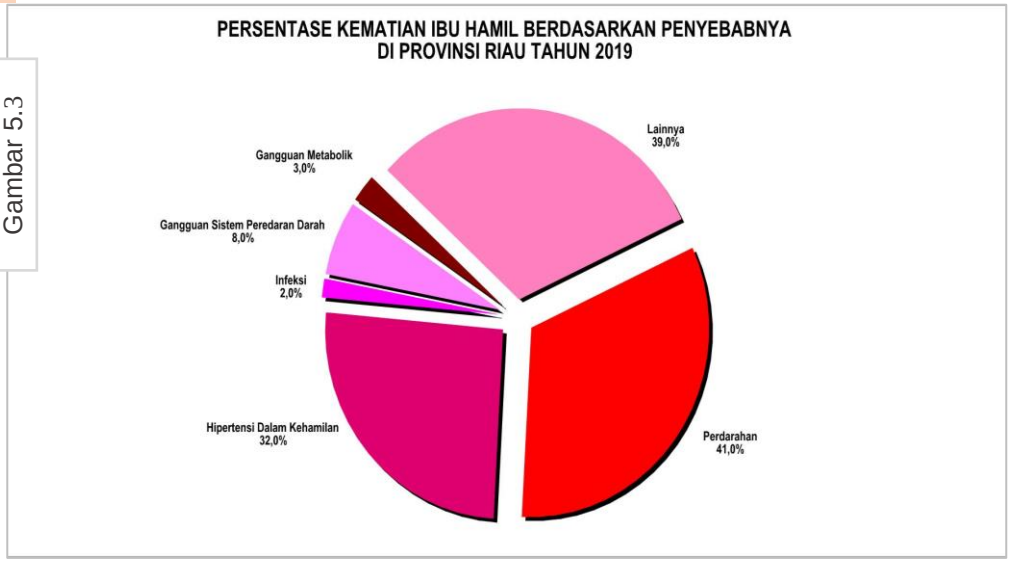
hamil dan ibu di masa nifas tahun ini lebih meningkat dari jumlah tahun sebelumnya. Dari seluruh jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan masa nifas ini dapat dirincikan jumlah kematiannya per kabupaten/kota seperti grafik di bawah ini :

Gambar 5.2



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu hamil tertinggi berada di kabupaten Rokan Hilir sebanyak 5 orang dan kabupaten Rokan Hulu tidak ada memiliki jumlah kematian ibu hamil. Untuk jumlah kematian ibu melahirkan terbanyak yakni sebanyak 5 orang berada di 2 tempat yaitu kabupaten Rokan Hilir dan kota Pekanbaru dan di kabuapten Kuantan Sengingi dan Rokan Hulu tidak ada memiliki jumlah kematian ibu melahirkan. Sedangkan jumlah kematian ibu masa nifas tertinggi ada di kabupaten Kuantan Sengingi sebanyak 9 orang dan jumlah terendah yakni 2 orang ada di kabupaten Indragiri Hilir. Penyebab kematian ibu hamil sebanyak 31 orang tahun 2019 di Provinsi Riau, dapat dirinci sebagai berikut :

Gambar 5.3



Pada diagram dapat dilihat bahwa persentase penyebab kematian ibu hamil terbanyak adalah perdarahan sebanyak 41 % diikuti dengan penyebab lainnya sebanyak 39 %, Hipertensi dalam Kehamilan sebanyak 32%, gangguan sistim peredaran darah sebanyak 8 %, Gangguan Metabolik sebanyak 3 % dan Infeksi 5%.

Sekitar 15% dari kehamilan/persalinan mengalami komplikasi yang keselamatannya tergantung pada ketepatan waktu dan kesiapan pelayanan kesehatan. Kesiapan Pelayanan berkualitas setiap saat atau 24 jam 7 hari (24/7) perlu dioptimalkan agar semua ibu hamil/melahirkan yang mengalami komplikasi setiap saat mempunyai akses ke pelayanan darurat berkualitas dalam waktu cepat karena sebagian komplikasi memerlukan pelayanan kegawat daruratan dalam hitungan jam. Berikut adalah diagram tempat kematian ibu hamil Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2019.

Gambar 5.4



Dari diagram diatas terlihat bahwa kematian ibu paling banyak terjadi di Rumah Sakit sebanyak 82% kematian, diikuti di rumah sebanyak 10% dan Polindes 1%, dan lainnya 7,2%. Tingginya kematian ibu di Rumah Sakit harus lebih dikajian apa yng menjadi penyebanya.

2. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil (Cakupan Kunjungan K-1 Dan K-4)

Kunjungan Antenatal Care (ANC) adalah kontak ibu hamil dengan pemberi perawatan/asuhan dalam hal mengkaji kesehatan dan kesejahteraan bayi serta kesempatan untuk memperoleh informasi dan memberi informasi bagi ibu dari petugas kesehatan. Dalam Kunjungan Antenatal care ini dilakukan Pemeriksaan pada ibu hamil secara fisik dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan, Nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.

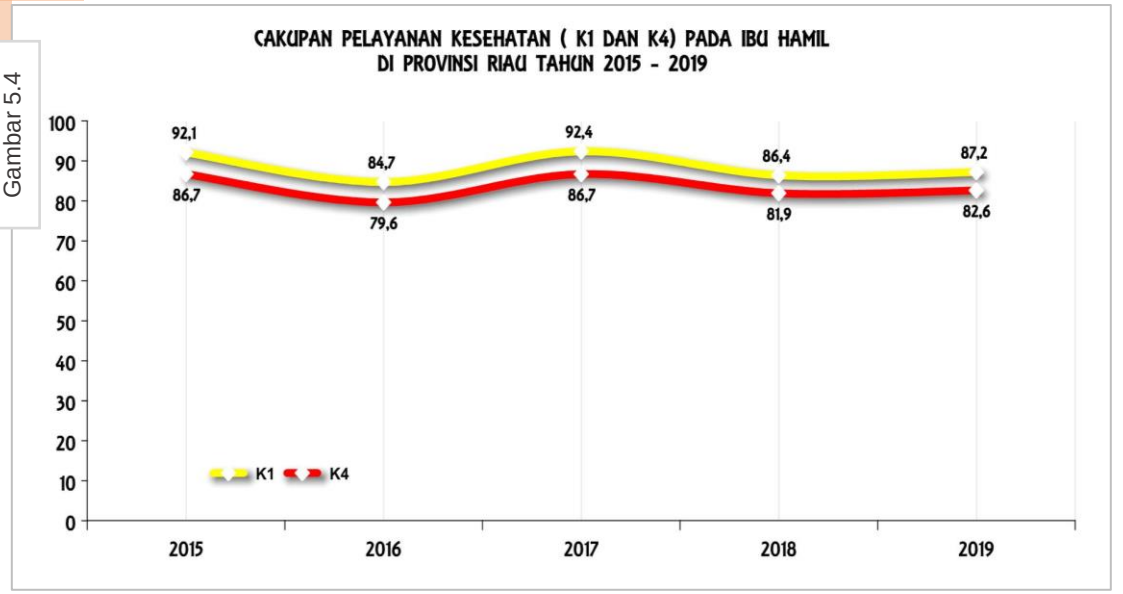
Tujuan Utama dari Pemeriksaan Kehamilan (ANC) adalah memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya dengan membina hubungan saling percaya dengan ibu, mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa, mempersiapkan kelahiran dan memberikan pendidikan kesehatan.

Kunjungan Antenatal Care minimal empat kali selama kehamilan dalam waktu sebagai berikut :

1. Trimester 1 : satu kali kunjungan (sebelum usia kehamilan 14 minggu) = K1
2. Trimester II : satu kali kunjungan (usia kehamilan antara 14-28 minggu) = K2
3. Trimester III : dua kali kunjungan (usia kehamilan antara 28-36 minggu dan sesudah kehamilan 36 minggu) = K3 dan K4

Grafik berikut adalah Cakupan Pelayanan Kesehatan (K1 dan K4) di Provinsi riau dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

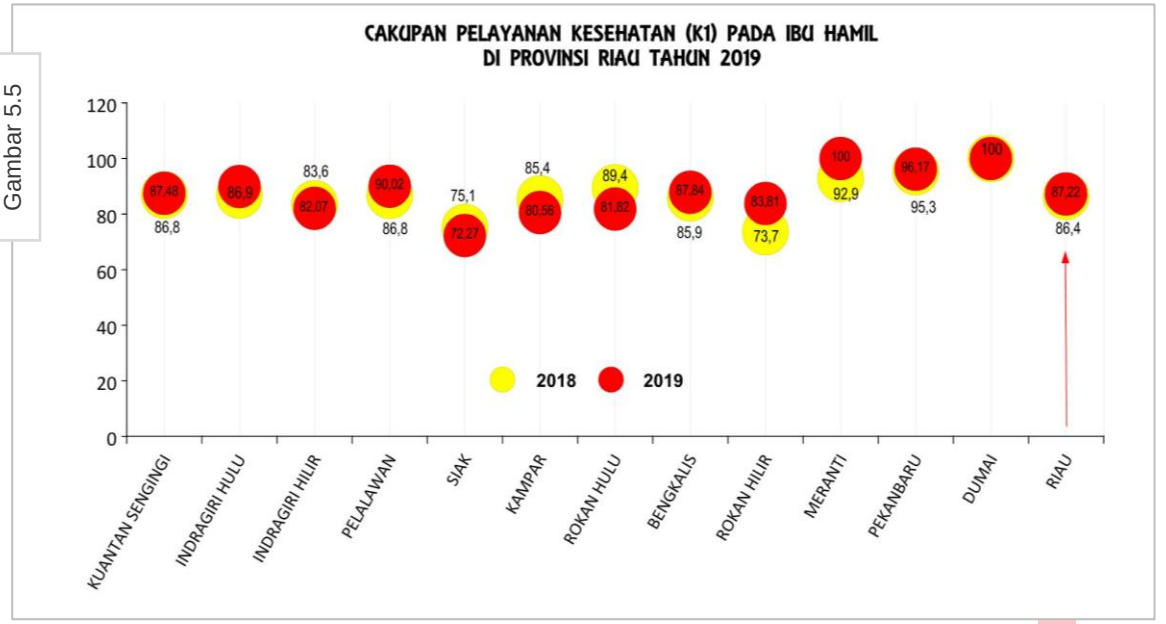
Gambar 5.4



Dari grafik diatas terlihat cakupan pelayanan kesehatan (K1 dan K4) dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terlihat fluktuatif. Tahun 2017 dan 2019 cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil mengalami peningkatan, tetapi ditahun 2016 dan 2018 cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil ini mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran ibu dalam memeriksakan kehamilannya dan masih perlunya optimalisasi promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilannya.

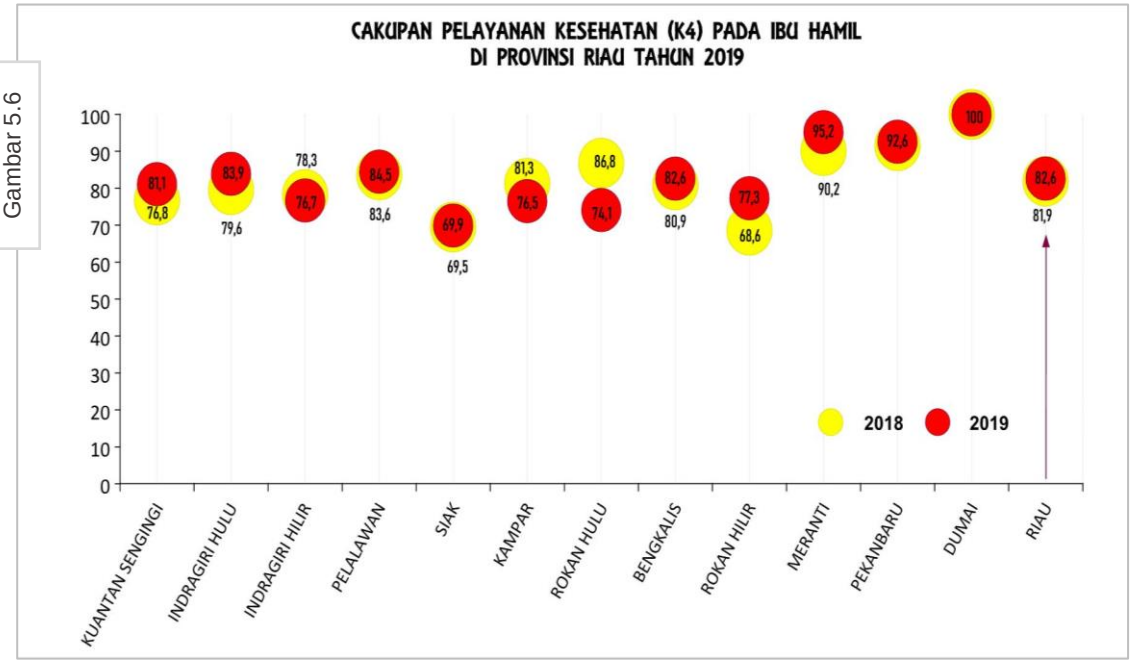
Untuk melihat upaya pencapaian cakupan Pelayanan Kesehatan (K1) pada ibu hamil kabupaten/Kota Provinsi Riau di tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 5.5



Dalam grafik terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan K1 pada ibu hamil di kabupaten/kota Provinsi Riau sebagian besar mengalami peningkatan. Cakupan pelayanan kesehatan K1 pada ibu hamil yang telah mencapai 100 % ada di kabupaten Meranti dan kota Dumai, sedangkan cakupan pelayanan kesehatan K1 pada ibu hamil yang paling rendah di kabupaten Siak sebesar 72,27 %. Untuk capaian cakupan pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil dari Kabupaten/Kota dapat kita lihat dari grafik berikut ini :

Gambar 5.6

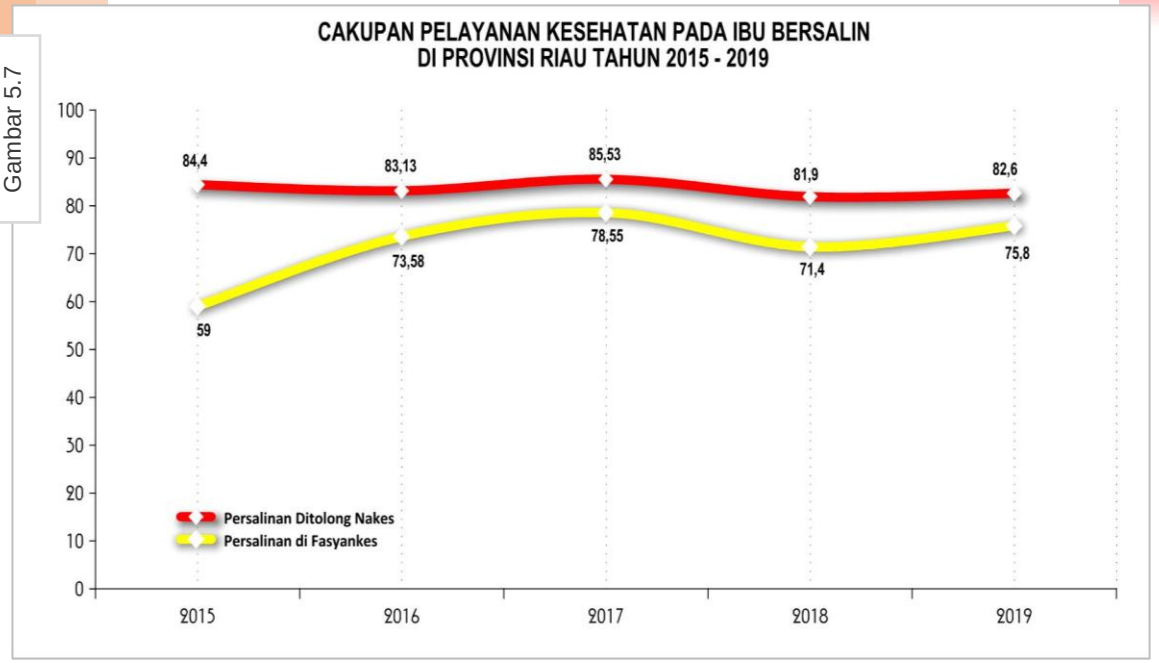


Pada Grafik diatas dapat terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil di kabupaten/kota Provinsi Riau sebagian besar juga mengalami peningkatan. Cakupan pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil yang telah mencapai 100 % hanya ada di kota Dumai, sedangkan cakupan pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil yang paling rendah di kabupaten Siak sebesar 69,9 %.

3. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

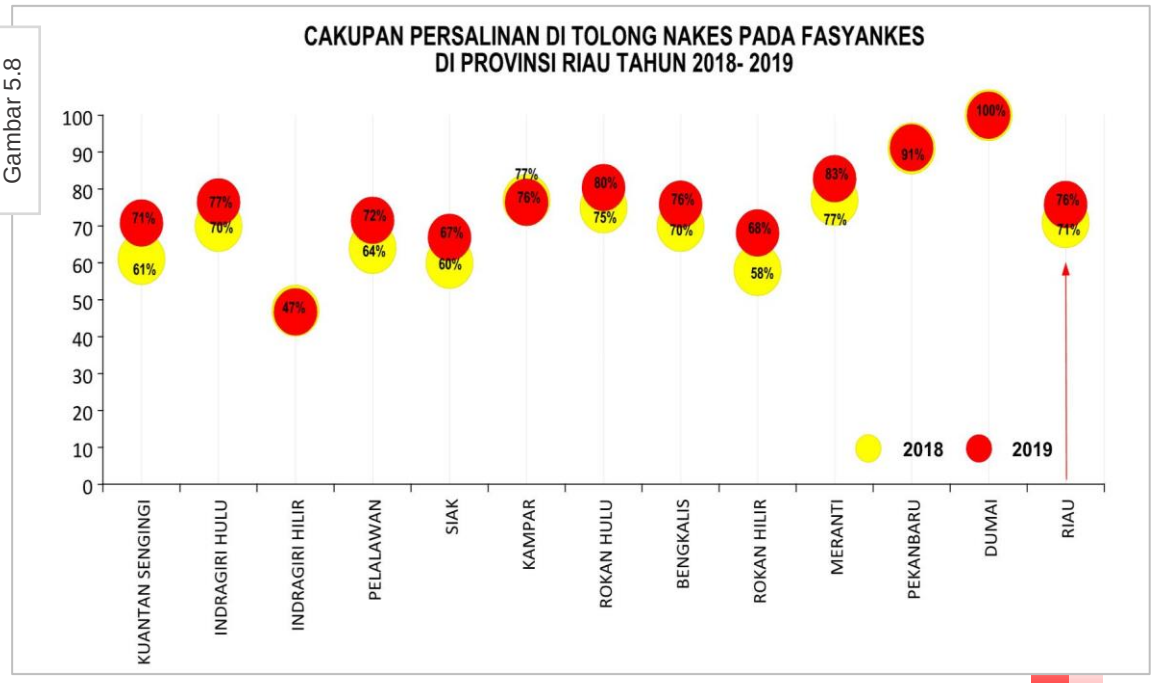
Dengan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi. Berikut adalah Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang ditolong Nakes dan Fasyankes di Provinsi Riau tahun 2015 – 2019.

Gambar 5.7



Dari grafik ini dapat terlihat bahwa cakupan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih perlu mendapat perhatian karena peningkatan cakupan tahun ini kecil dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 capaian mencapai 71,4% dan meningkat sebesar 4,4% di tahun 2019 menjadi 715,8%. Sementara untuk pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan juga mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,9%, pada tahun 2018 cakupan mencapai 81,9% dan 82,6 % di tahun 2019. Pertolongan Persalinan yang dilaksanakan di Fasyankes menjadi factor penentu bagi Keselamatan persalinan, dibawah ini adalah grafik cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan

Gambar 5.8



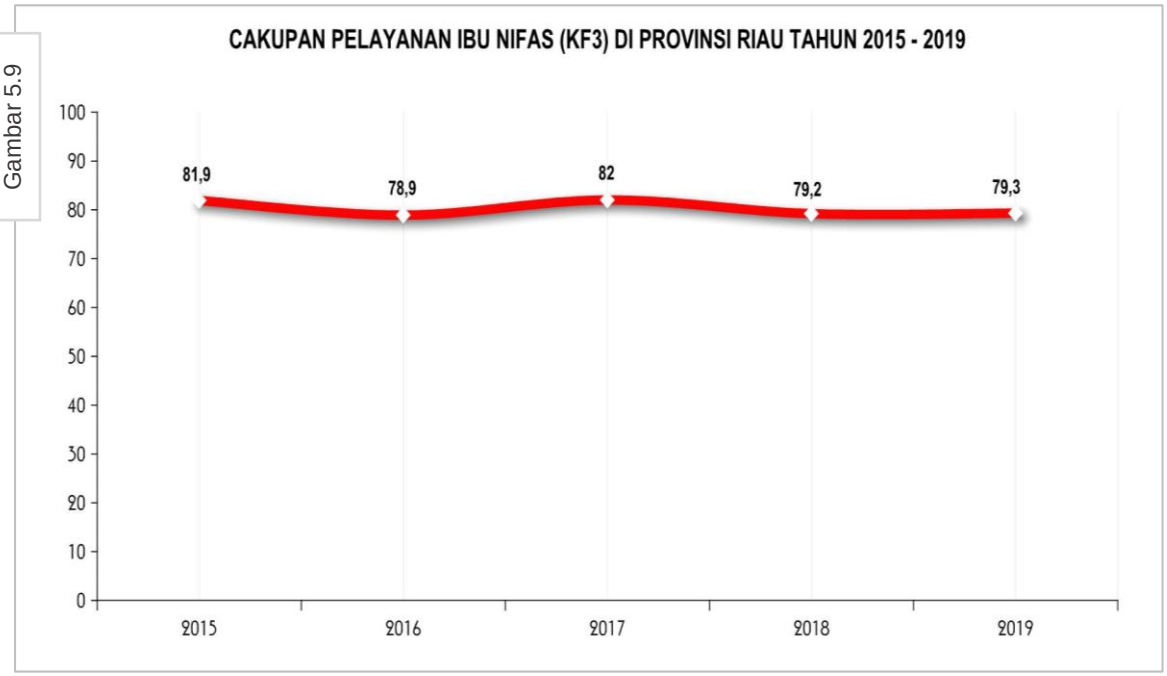
Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa persentase cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Fasyankes Kabupaten/Kota tahun 2019 menunjukan bahwa sebahagian besar mengalami peningkatan dan kabupaten/kota yang mencapai 100 % cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasyankes adalah kota Dumai dan yang terendah adalah kabupaten Indragiri Hilir sebesar 47%. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk ibu hamil masih perlu pembinaan agar capaian dapat lebih ditingkatkan.

4. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan Nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan diperlukan dalam periode nifas ini karena merupakan masa krisis baik ibu maupun bayinya. Diperkirakan bahwa 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama.

Cakupan pelayanan ibu nifas di tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,1%, yaitu tahun 2018 sebanyak 79,2% dan tahun 2019 menjadi 79,3%. Cakupan ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

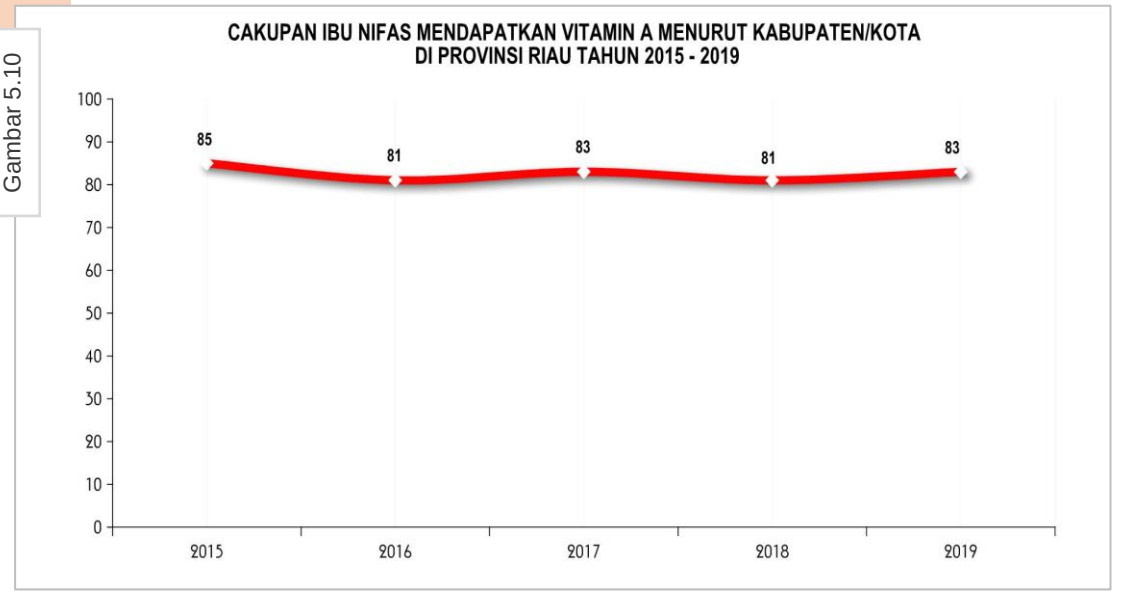
Gambar 5.9



5. Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

Ibu hamil yang kekurangan vitamin A meningkatkan risiko perdarahan dalam persalinan dan risiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Kekurangan vitamin A masa nifas meningkatkan kerentanan terhadap penyakit-penyakit infeksi, ibu nifas memerlukan kapsul vitamin A dosis tinggi.

Gambar 5.10

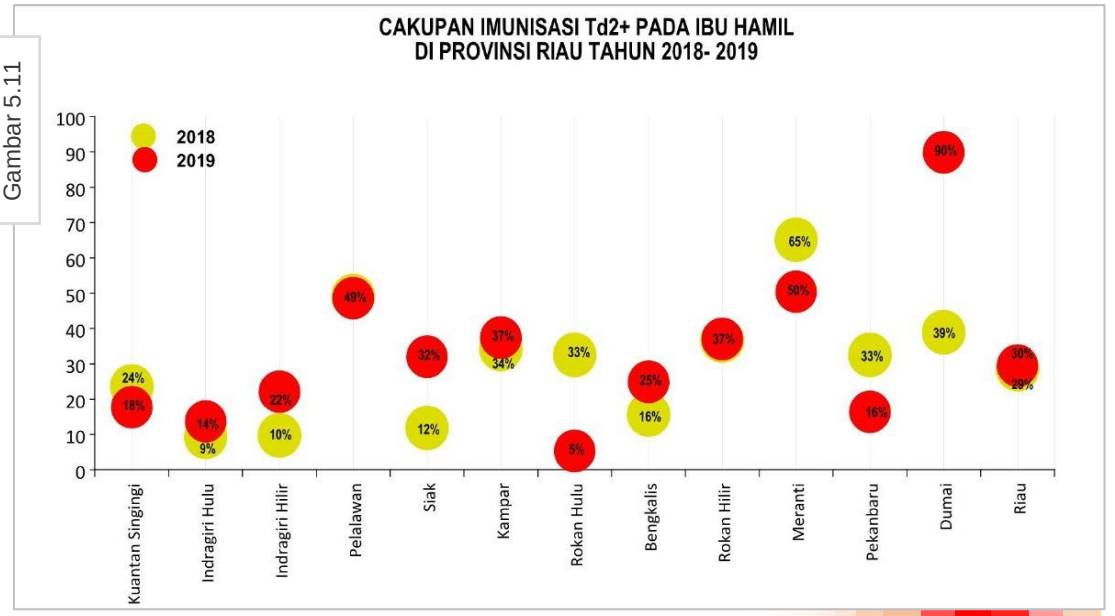


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa cakupan ibu nifas mendapat vitamin A pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan sebesar 2% dari tahun 2018. Tahun 2018 capaian mencapai 81% dan tahun 2018 mencapai 83%.

6. Cakupan Imunisasi Td Ibu Hamil Dan Wanita Usia Subur

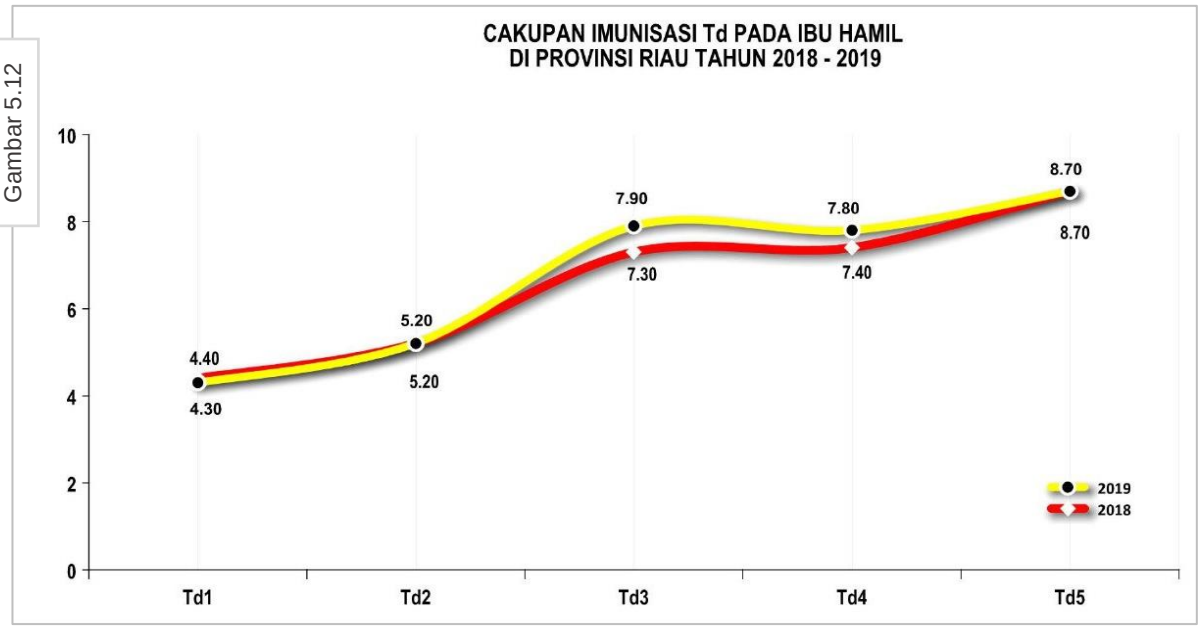
Pemberian Imunisasi Td pada ibu hamil dan wanita usia subur diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit difteri pada bayi baru lahir. Cakupan (jumlah dan persentase) ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td (Tetanus difteri) dengan interval tertentu (yang dimulai saat dan atau sebelum kehamilan) dengan memperhatikan hasil skrining dan status T. Dalam pemberian imunisasi harus memperhatikan bahwa Setiap ibu hamil yang akan diimunisasi Td harus dilakukan skrining terlebih dahulu dengan melihat interval minimal, kemudian hasil skrining akan menentukan pemberian dosis imunisasi Td berikutnya pada ibu hamil.

Gambar 5.11



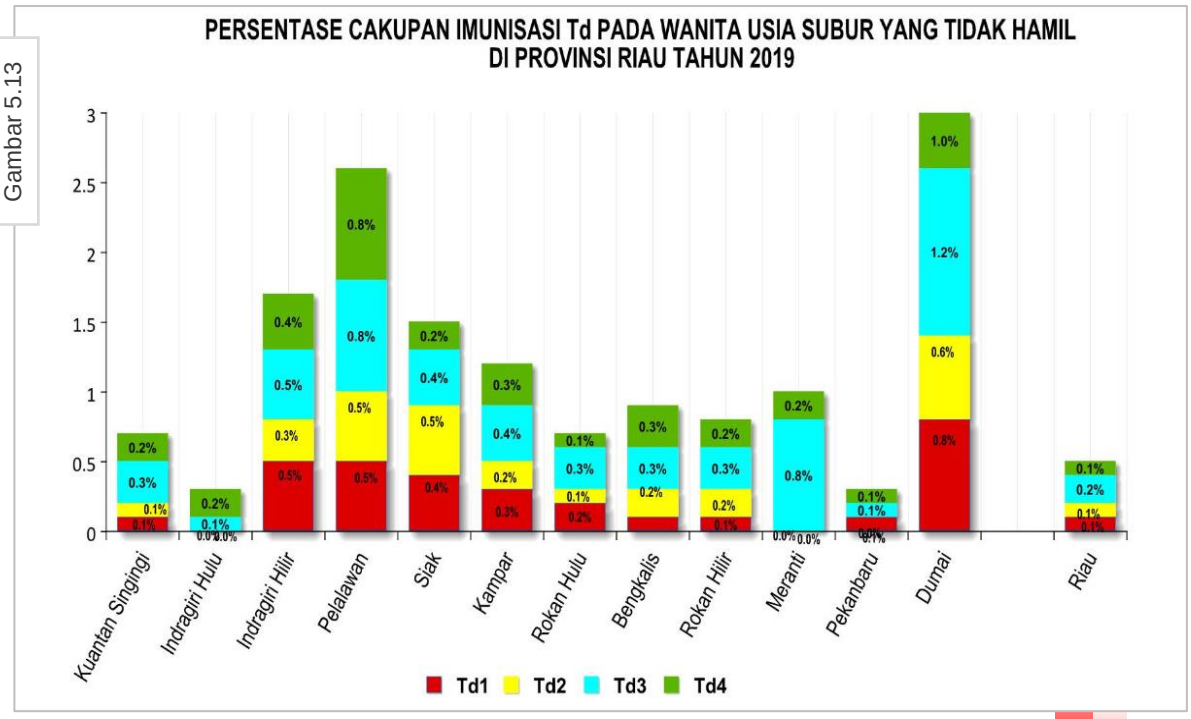
Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil Provinsi Riau Tahun 2019, memperlihatkan Capaian imunisasi 29,5%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana capaian Td+ sebesar 28,5%. Capaian Td+ ini termasuk rendah, hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk imunisasi Td secara keseluruhan.

Gambar 5.12



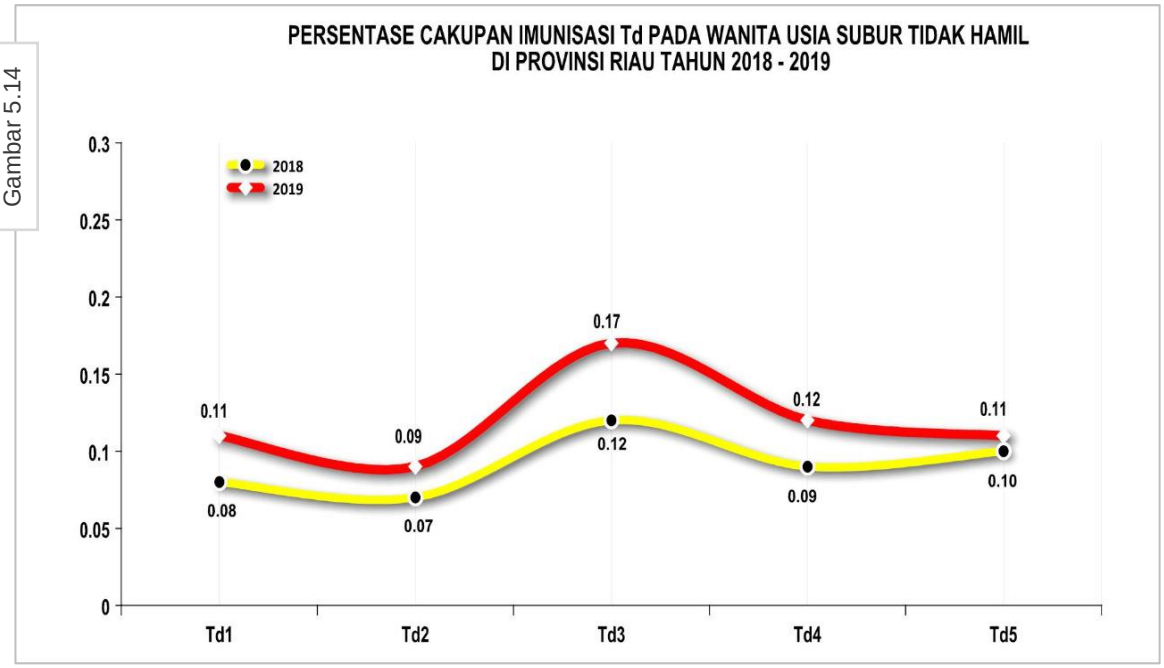
Sementara untuk cakupan imunisasi Td pada wanita usia subur yang tidak hamil di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini.

Gambar 5.13



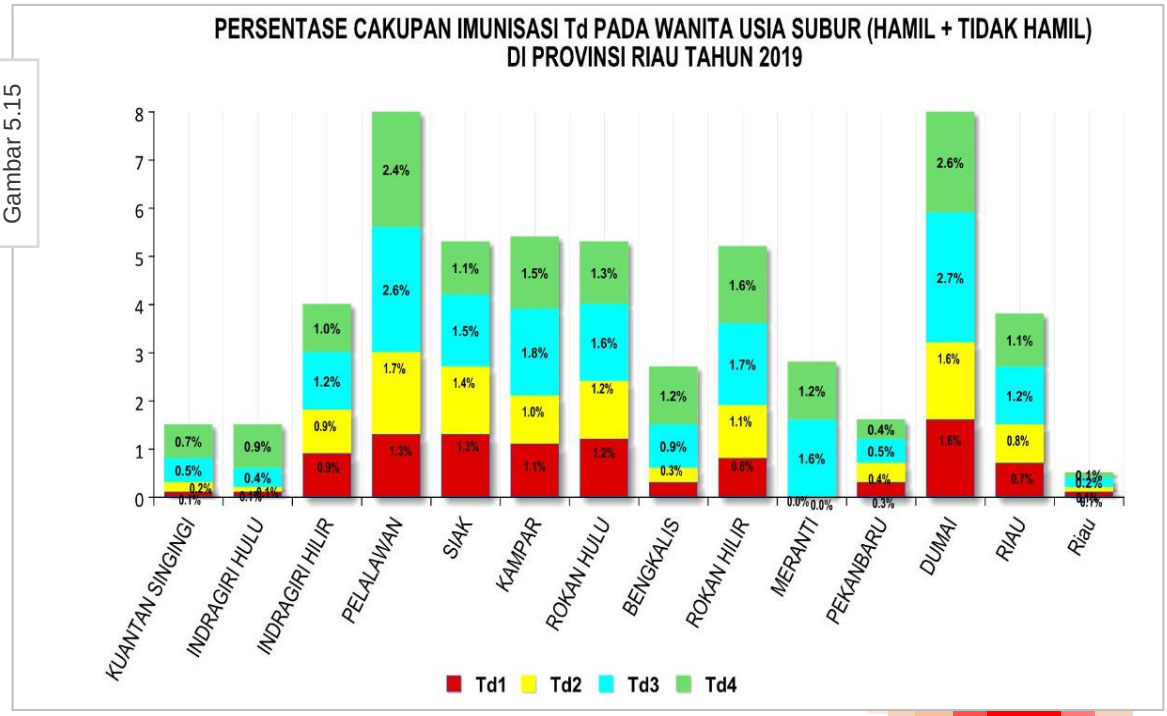
Dari diagram diatas dapat kita lihat yang paling tinggi cakupan imunisasi Td pada wanita hamil usia subur yaitu Kota Dumai, kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kabupaten Kep. Meranti sedangkan yang terendah adalah cakupan di Kota Pekanbaru dan Indragiri Hulu. Untuk cakupan imunisasi Td pada wanita usia subur tidak hamil Provinsi Riau tahun 2019, terlihat fluktuatif, untuk Td 1 sampai dengan 4. Perlu upaya lebih lagi untuk meningkatkan capaian dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran ibu hamil dan wanita usia subur.

Gambar 5.14



Secara keseluruhan cakupan Imunisasi Td pada wanita usia subur (hamil dan tidak hamil) dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.15

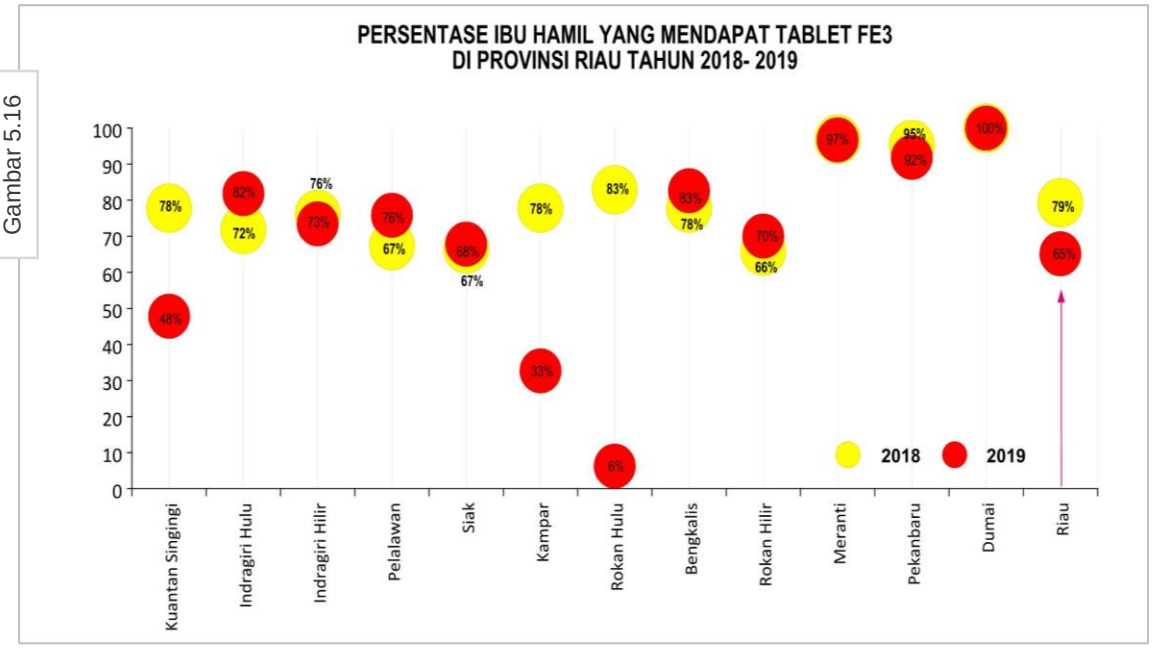


Dari diagram diatas dapat dilihat Kabupaten Meranti, Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawn cakupannya baik, sedangkan untuk cakupan masih tendah yang perlu perhatian Kota Pekanbaru Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah

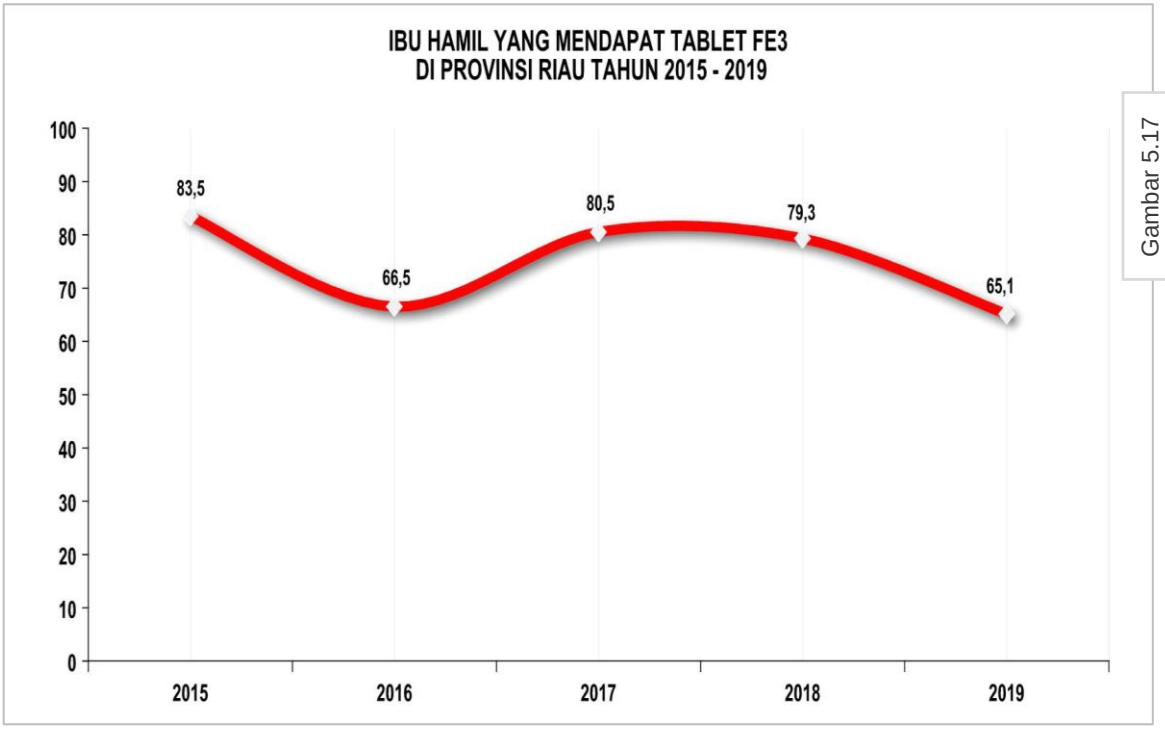
Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, merupakan langkah pencegahan dari terjadinya perdarahan selama kehamilan, persalinan dan nifas. Berikut merupakan Gambar ibu hamil yang mendapat Tablet Fe3 Tahun 2018-2019.

Gambar 5.16



Terlihat dari gambar diatas secara keseluruhan ibu hamil yang mendapat tablet FE3 di Provinsi Riau tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018 yakni tahun 2018 sebanyak 79%, sementara tahun 2019 ibu hamil yang mendapat tablet FE3 sebanyak 65%. Namun gambaran kabupaten/kota terjadi peningkatan peresentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 antara lain kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten Pelalawan, kabupaten Siak, kabupaten Bengkalis, kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten/kota yang mengalami penurunan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 antara lain kabupaten Kuantan Sengingi, kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten Kampar, kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru, sedangkan jumlah persentase yang tetap untuk ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 adalah kabupaten Meranti sebesar 97 % dan Kota Dumai sebesar 100%.

Gambaran ibu hamil yang mendapat tablet FE3 dari tahun 2015 – 2019 bisa dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 5.17

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah persentase untuk ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 di Provinsi Riau tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 14,2%, tahun 2018 mencapai 79,3% dan tahun 2019 mencapai 65,1%. Terjadinya penurunan ibu hamil yang mendapat tablet FE3 ini harus mendapat perhatian mengingat pentingnya konsumsi tablet FE3 mencegah anemia pada ibu hamil dan terjadinya pendarahan pada persalianan, dan untuk Provinsi Riau 40 % lebih kematian ibu disebabkan oleh pendarahan.

8. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi kebidanan menjadi faktor yang berkontribusi dalam kematian ibu dan bayi. Komplikasi kebidanan yang ditangani dengan baik akan memberi dampak pada keselamatan ibu dan bayi. Dibawah ini adalah grafik persentase penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Riau untuk tahun 2016 – 2019.

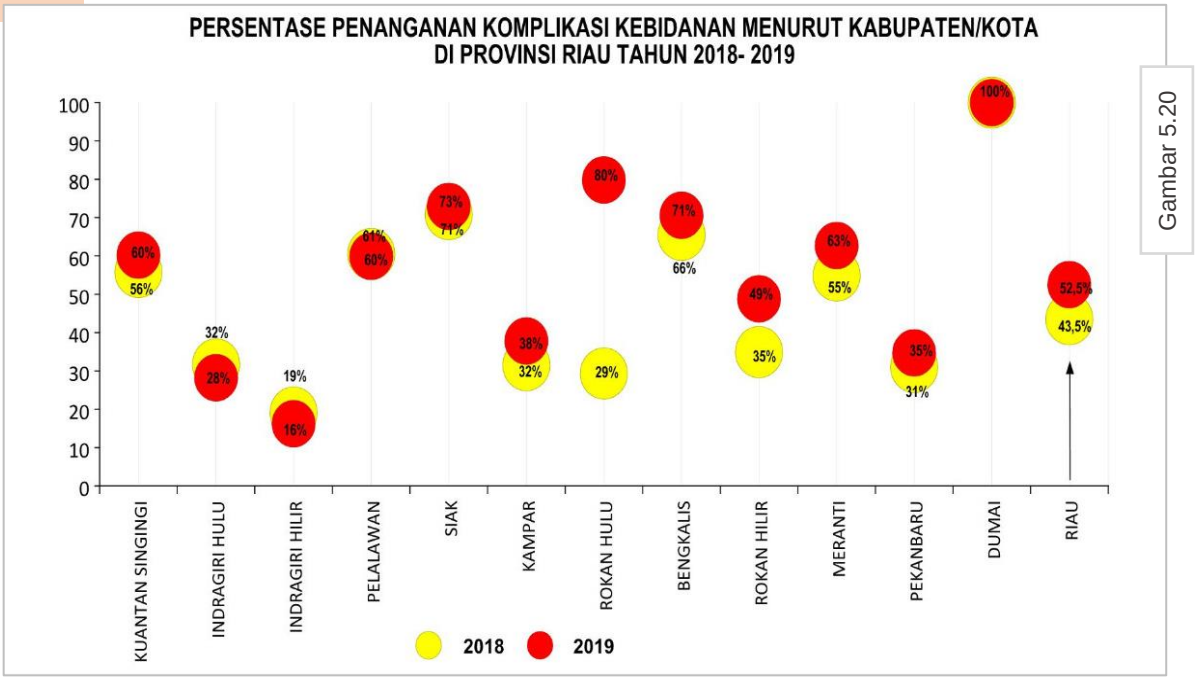


Gambar 5.18

Pada grafik terlihat bahwa persentase penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Riau terjadi sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 0,1 %. Di tahun 2018 persentase penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Riau mencapai 43,5% dan di tahun 2019 mencapai 52,5%.

Dari 12 Kabupaten/Kota ada di provinsi Riau hanya Kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan yang terdapat penurunan penanganan komplikasi kebidanan. Sedangkan 9 Kabupaten/kota lainnya mengalami peningkatan penanganan komplikasi kebidanan meskipun penangnan komplikasi belum tersebut hanya 100%, hanya kota Dumai yang telah mencapai 100%. Penanganan komplikasi kebidanan harus menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program kesehatan ibu, karena untuk menekan jumlah kematian ibu salah satunya melakukan penangan komplikasi kebidanan.

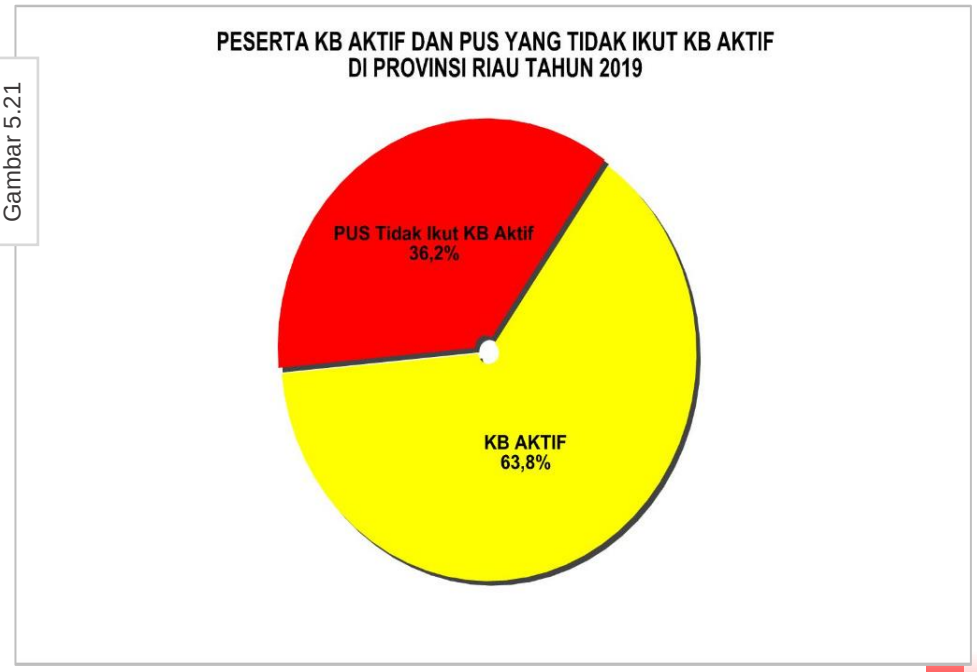
Gambaran peningkatan komplikasi kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5.20

9. Peserta Aktif KB

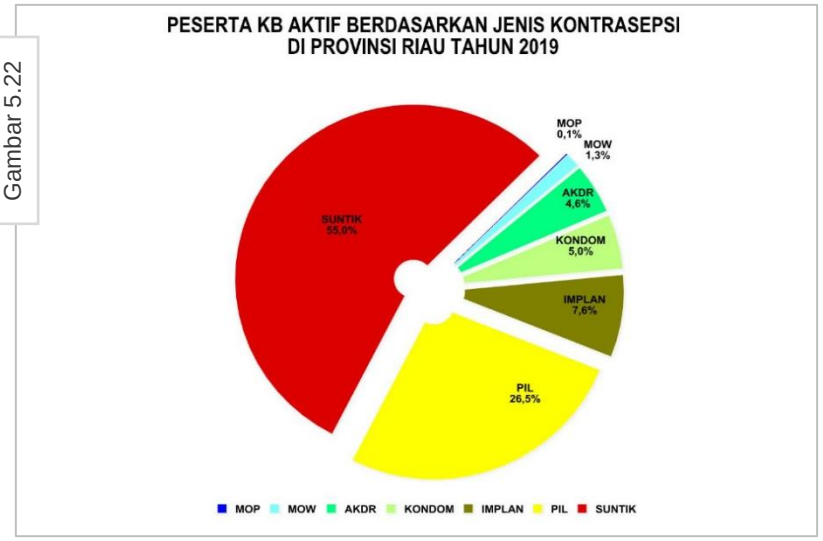
Keluarga Berencana berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, karena dengan keluarga berencana pengaturan jarak kelahiran memberikan waktu pemulihan pada ibu dan fokus dalam mengasuh bayi baru lahir dengan optimal. Peserta Aktif KB merupakan Peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan



Gambar 5.21

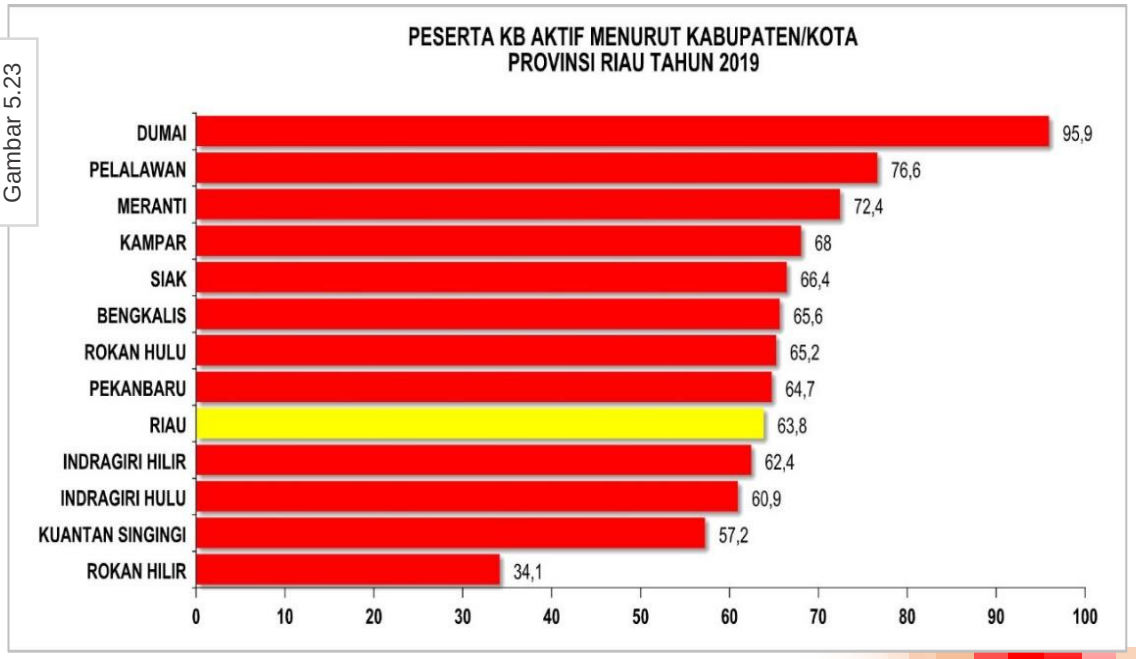
Gambar di atas menjelaskan peserta aktif KB dan PUS yang tidak ikut KB Aktif di Provinsi Riau Tahun 2019. Keluarga Berencana berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, karena dengan keluarga berencana pengaturan jarak kelahiran memberikan waktu pemulihan pada ibu dan fokus dalam mengasuh bayi baru lahir dengan optimal. Dapat dilihat bahwa peserta aktif KB sebanyak 63,8% menurun dibandingkan tahun 2018 (72,4%) dan PUS yang tidak ikut KB aktif sebanyak 36,2% menurun dibandingkan tahun 2017 (27,6%). Berarti dalam hal ini kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB sudah baik.

Gambar 5.22



Dilihat dari gambar diagram diatas memperlihatkan bahwa alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh Peserta aktif KB adalah suntik 55,0% selanjutnya adalah pemakai pil 26,5% kemudian implant 7,6%, kondom 5,0% sisanya adalah AKDR 4,6%, MOW 1,3% dan MOP 0,1.

Gambar 5.23

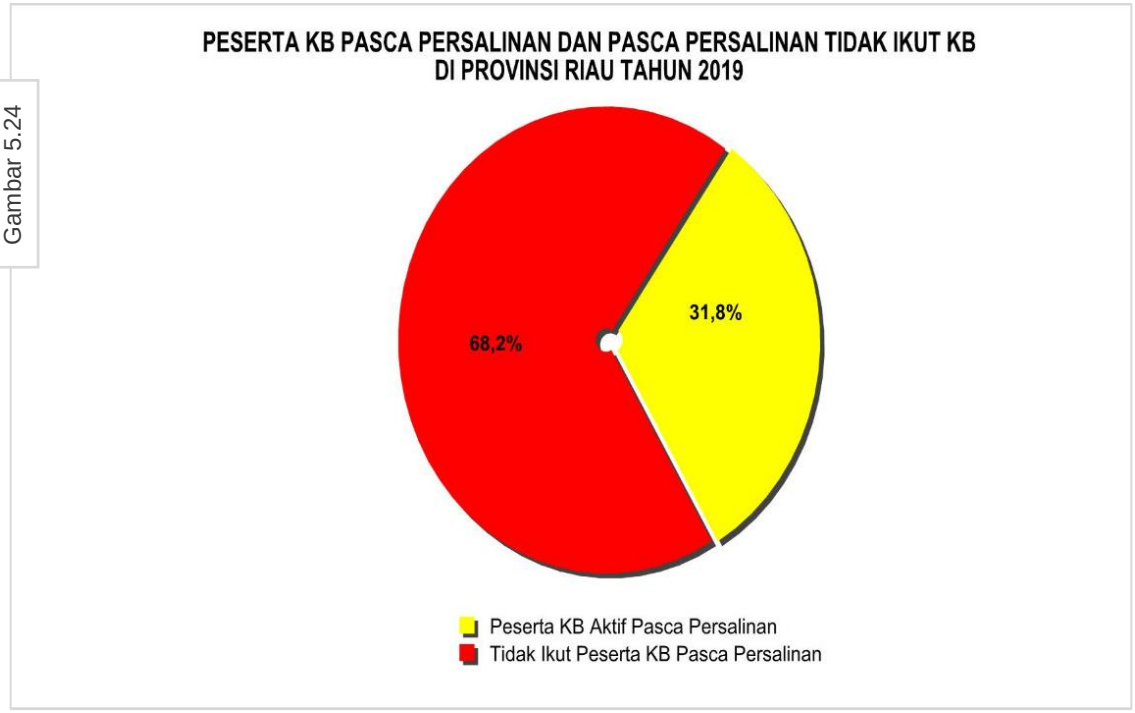


Dari gambar peserta KB aktif diagram dibawah ini menurut Kabupaten/Kota untuk Provinsi Riau sebanyak 63,8%. Peserta KB aktif terbanyak di Kota Dumai yaitu 96,5%, diikuti Kabupaten Pelalawan sebesar 76,6%, kabupaten Kepulauan Meranti 72,4%. Sementara capaian terendah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 34% diikuti Kabupaten Kuantan Sengingi sebesar 57,2% dan Kabupaten Indragiri Hulu 60,9%.

10. Peserta KB Pasca Persalinan

Peserta KB Pasca Persalinan merupakan PUS yang memakaikontrasepsi pada masa pasca persalinan (0-42 hari setelah melahirkan).

Gambar 5.24

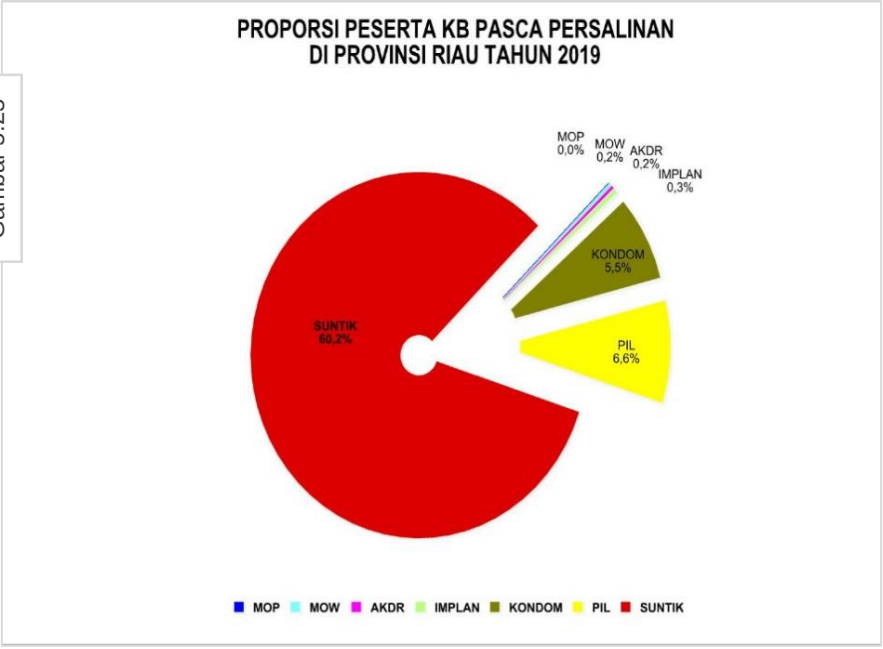


Dari gambar di atas dapat dilihat peserta KB pasca persalinan tahun 2019 lebih sedikit yaitu 31,8% dibanding dari yang tidak ikut KB pasca persalinan yaitu 68,2%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya cakupan ini menurun dimana pada tahun 2018 peserta KB pasca persalinan sebesar 36,2%. Kondisi ini berarti perlu pendidikan kesehatan dari sejak seorang ibu mulai hamil, sehingga setelah bersalin sudah bisa memutuskan alat kontrasepsi atau metode KB yang akan digunakan.

Berikut adalah proporsi Peserta KB Pasca Persalinan di Provinsi Riau, terlihat dari diagram dibawah ini paling banyak menggunakan suntik, yaitu 60,2% diikuti dengan menggunakan Pil sebanyak 6,6%, sisanya menggunakan kondom 5,5%, siasanya implan, AKDR dan MOW dan MOP.

Untuk melihat gambaran proporsi peserta KB pasca persalinan di Provinsi Riau Tahun 2019.

Gambar 5.25



Dari gambar diagram dibawah ini akseptor KB pasca persalinan menurut Kabupaten/Kota untuk Provinsi Riau sebanyak 31,77%. Akseptor KB pasca persalinan terbanyak di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 100%, diikuti Kota Dumai sebesar 83%, kabupaten Indragiri Hilir 68%. Sementara capaian terendah Kabupaten Kampar sebesar 3% diikuti Kabupaten Pelalawan sebesar 7% dan Kabupaten Kuantan Sengingi 10%.

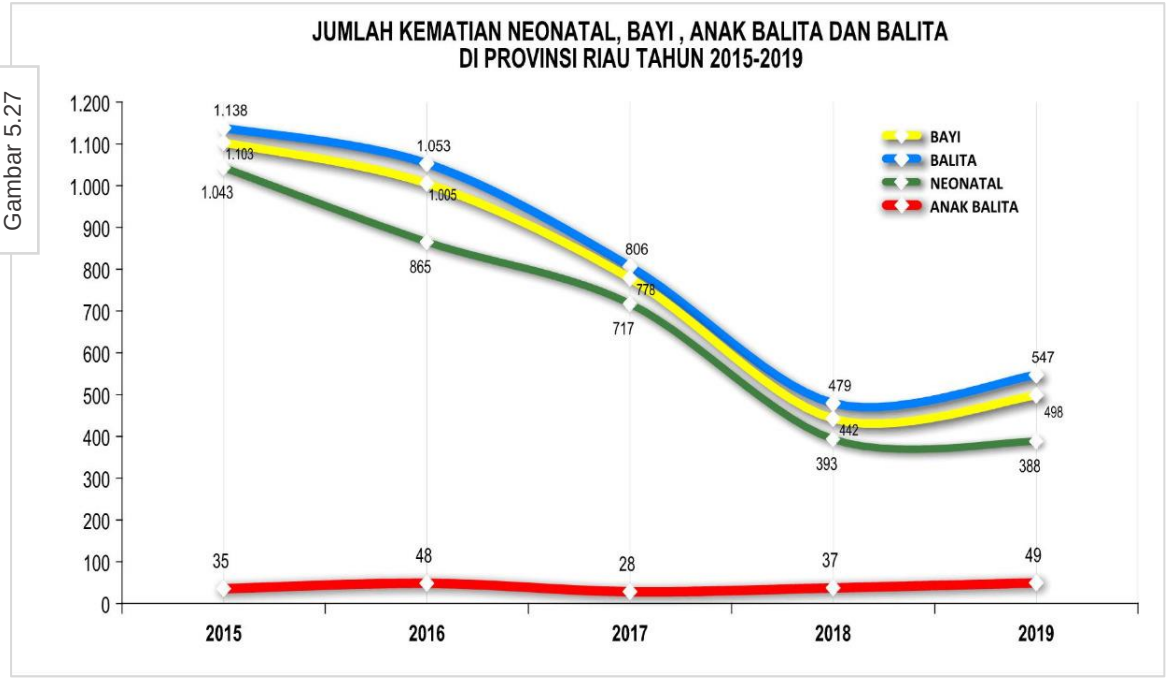


Gambar 5.26

B. Kesehatan Anak

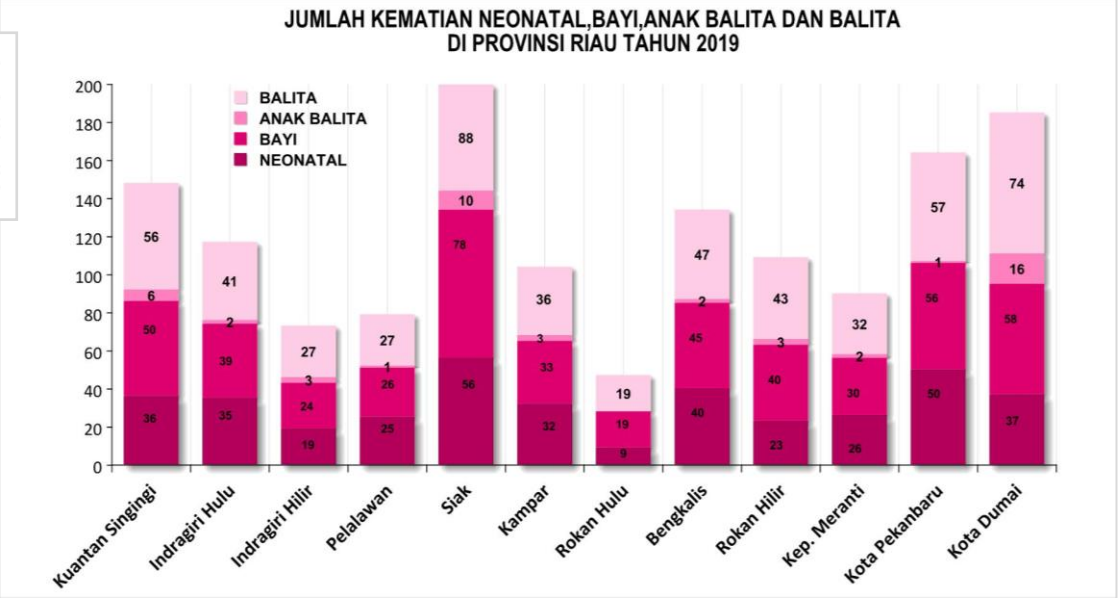
Periode tiga tahun pada masa balita merupakan periode emas pertumbuhan fisik, intelektual, mental dan emosional anak. Gizi yang baik, kebersihan, imunisasi, vitamin A dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kasih sayang dan stimulasi yang memadai pada usia Balita akan meningkatkan kelangsungan hidup dan mengoptimalkan kualitas hidup anak. Kematian balita,bayi, neonatal dan anak balita merupakan merupakan ukuran keberhasilan Pelayanan Kesehatan pada anak. Kematian neonatal, bayi dan balita merupakan indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat.

Gambar 5.27



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 di Provinsi Riau hanya kematian neonatal saja yang mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kematian bayi, anak balita dan balita mengalami meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk Kabupaten/Kota, Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru terbanyak dalam jumlah kematian neonatal, bayi, anak balita dan balita. Dan Kematian paling sedikit adalah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan.

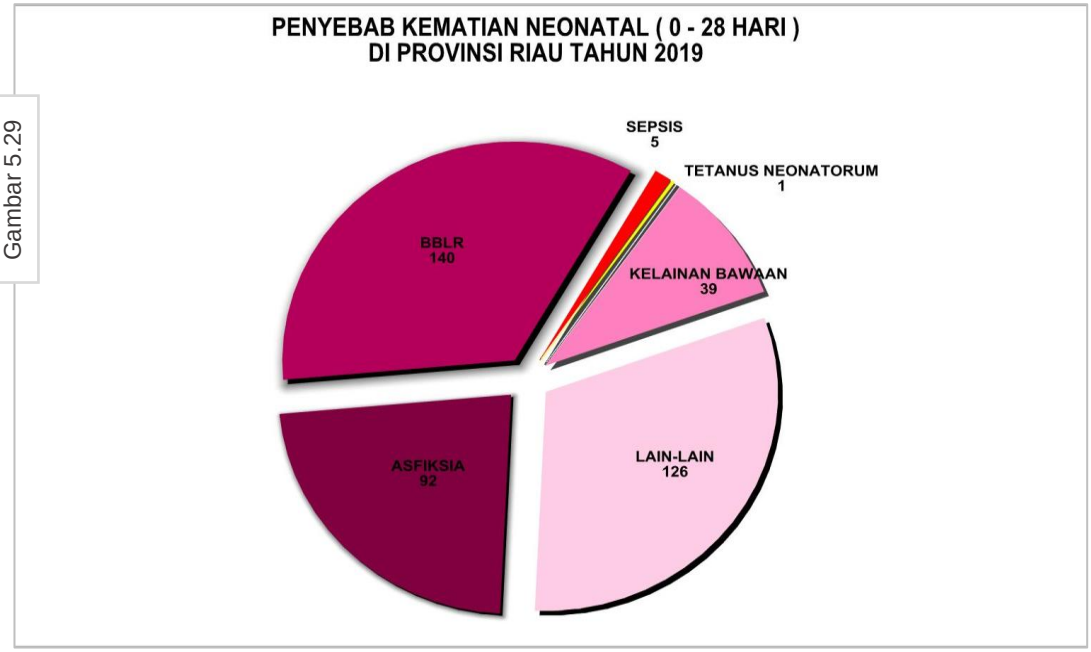
Gambar 5.28



Kematian neonatal, bayi, anak balita dan balita merupakan indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah diagram yang menggambarkan jumlah kematian Neonatal yang dilaporkan per-1000 kelahiran hidup:

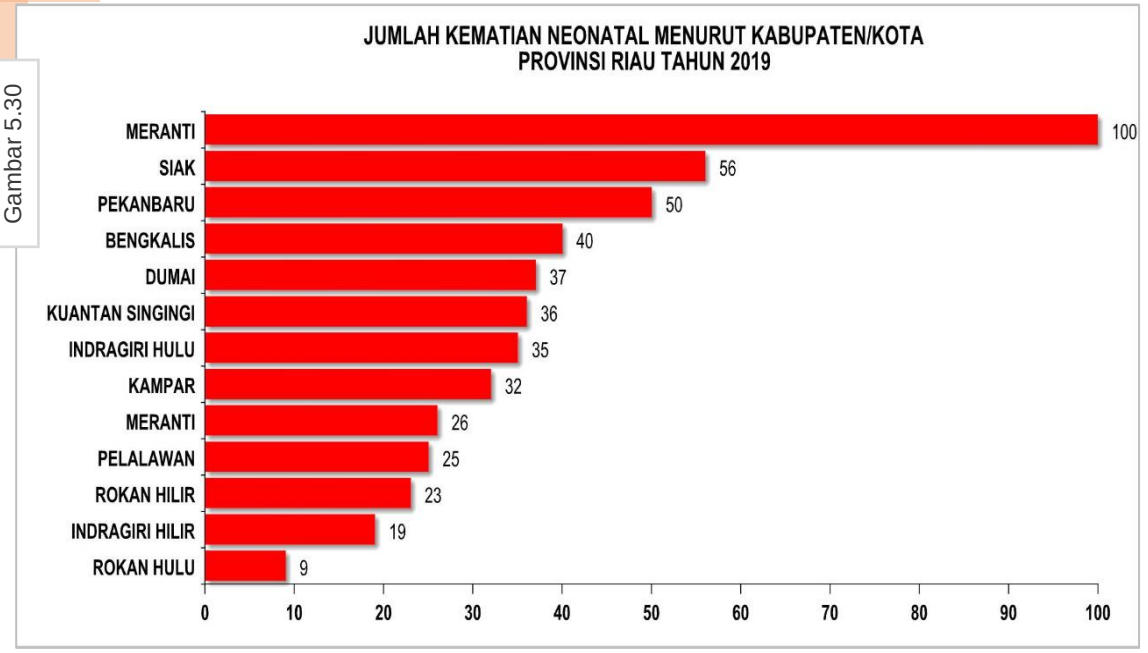
1. Kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup (yang dilaporkan)

Gambar 5.29



Pada gambar diatas dapat kita lihat, penyebab terbanyak dari kematian bayi baru lahir (Neonatal) adalah bayi berat lahir rendah (BBLR). Bayi berat lahir rendah adalah bayi yang dilahirkan memiliki berat badan kurang dari 2500 gram. Berat badan saat lahir merupakan satu-satunya faktor penentu kesehatan seseorang. Selain BBLR penyebab lain kematian neonatal antara lain asfiksia, sepsis, tetanus neonatorum, kelainan bawaan dan lain-lain.

Gambar 5.30



Gambaran kematian neonatal di kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2019 terbanyak terdapat di Kabupaten Siak sebanyak 56 orang diikuti Kota Pekanbaru sebanyak 50 orang dan Kabupaten Bengkalis sebanyak 40 orang. Sedangkan jumlah kematian paling sedikit di Kabupaten Rokan Hulu 9 orang, Kabupaten Indragiri Hilir 19 orang dan Kabupaten Rokan Hilir 23 orang.

2. Kematian Bayi dan Balita per-1.000 Kelahiran Hidup (yang dilaporkan)

Pada gambar dibawah ini akan melihat persentase penyebab kematian neonatal (29 hari – 11 bulan). Dapat dilihat lihat bahwa kematian bayi (29 hari-11 Bulan) disebabkan oleh pneumonia, diare dan saluran cerna. Kalo dilihat dari grafik dibawah bahwa kematian yang disebabkan lainnya hampir 91% dari jumlah kematian.

Gambar 5.31



Angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup di Provinsi Riau dari tahun 2015 ke tahun 2018 menunjukkan penurunan, dari angka 9 menjadi 3. Tetapi angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup di tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan sebesar 0, 8 menjadi 3.8. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan harus lebih ditingkatkan agar dapat menghasilkan kualitas yang optimal, sehingga angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup dapat ditekan serendah mungkin. Angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup di Provinsi Riau ini tergambar pada grafik di bawah ini :

Gambar 5.32



3. Penanganan Komplikasi Pada Neonatal

Penanganan komplikasi neonatal di Provinsi Riau seperti gambar yang akan disajikan dibawah ini menunjukkan upaya pelayanan kesehatan masih belum memperlihatkan konsistensi dan kesinambungan karena terjadi fluktuasi pada penanganan komplikasi neonatal mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Tahun 2017 persentase penanganan komplikasi neonatal mencapai 41%, dan menurun pada tahun 2018 dan 2019 yakni 39% dan 34%.



Gambar 5.33

4. Cakupan Kunjungan Neonatal

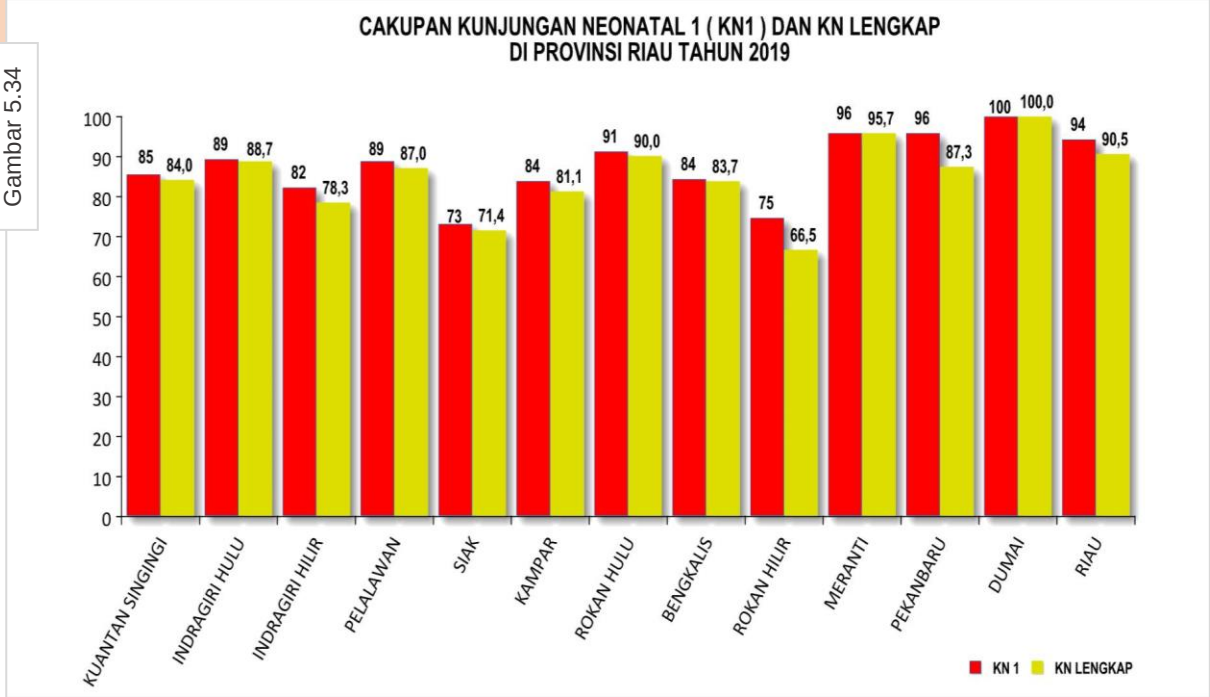
Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar dan mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan atau masalah kesehatan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus adalah sebagai berikut :

a. Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan dalam kurun waktu 6-48 jam setelah bayi lahir.
b. Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke-3 sampai dengan hari ke 7 setelah bayi lahir.
c. Kunjungan Neonatal ke-3 (KN-3) dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah lahir.

Kunjungan neonatal 1 (KN1) dan KN lengkap merupakan indikator penting dalam pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir.

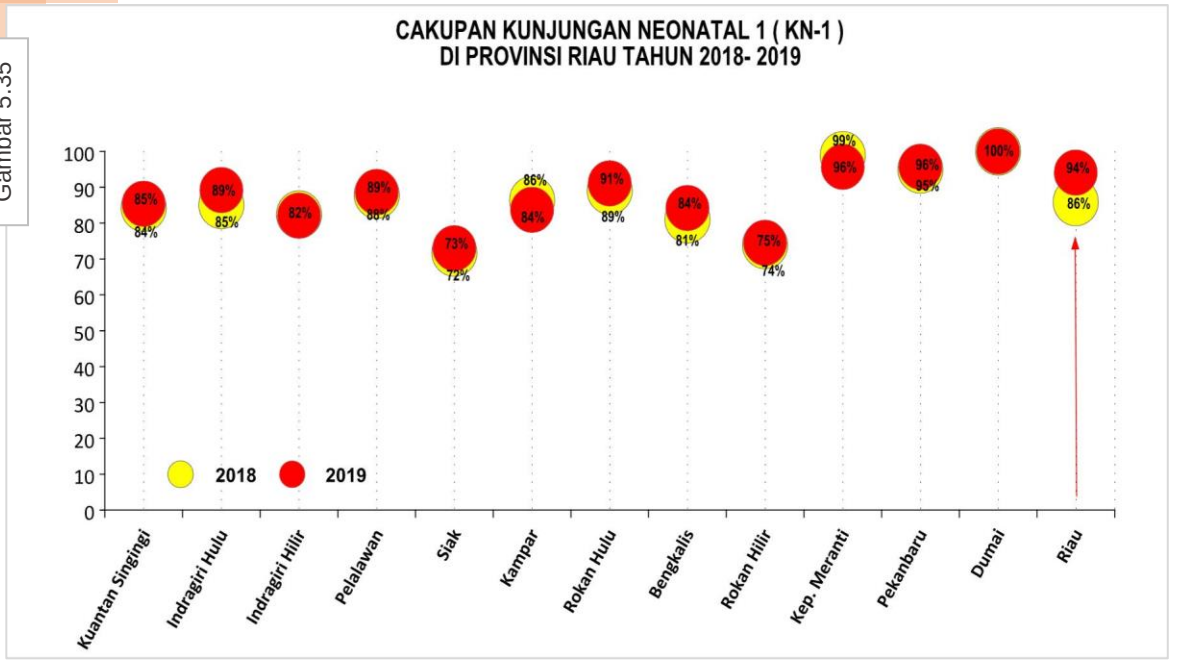
Gambar 5.34



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa cakupan kunjungan neonatal, dilihat dari Kunjungan pertama (KN1) dibanding kunjungan lengkap (KN lengkap) terjadi penurunan hampir disemua Kabupaten/Kota. Kabupaten Siak memiliki cakupan yang terendah untuk kunjungan neonatal (KN1) dan kabupaten Rokan Hilir untuk cakupan terendah kunjungan lengkap (KN lengkap). Perlu upaya peningkatan pengetahuan ibu tentang manfaat pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir.

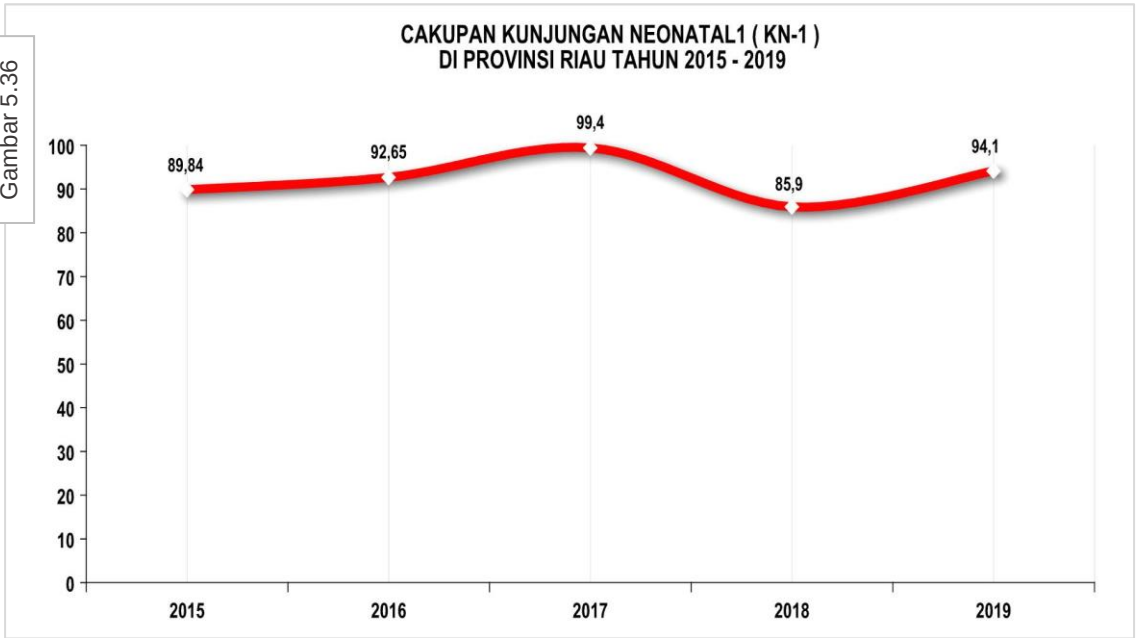
Pada grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa persentase cakupan kunjungan neonatal 1 (KN1) di Provinsi Riau untuk kabupaten Kampar dan Kabupaten Kepulauan Meranti menurun dari tahun sebelumnya. Persentase cakupan kunjungan neonatal 1 (KN1) kabupaten Kampar turun 2 %, yang sebelumnya mencapai 86% ditahun 2018 menjadi 84% ditahun 2019. Begitu juga dengan persentase cakupan kunjungan neonatal 1 (KN1) kabupaten Kepulauan Meranti turun 3 %, yang sebelumnya mencapai 99% ditahun 2018 menjadi 96% ditahun 2019. Sementara untuk kabupaten/kota lainnya persentase cakupan kunjungan neonatal 1 (KN1) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Gambar 5.35

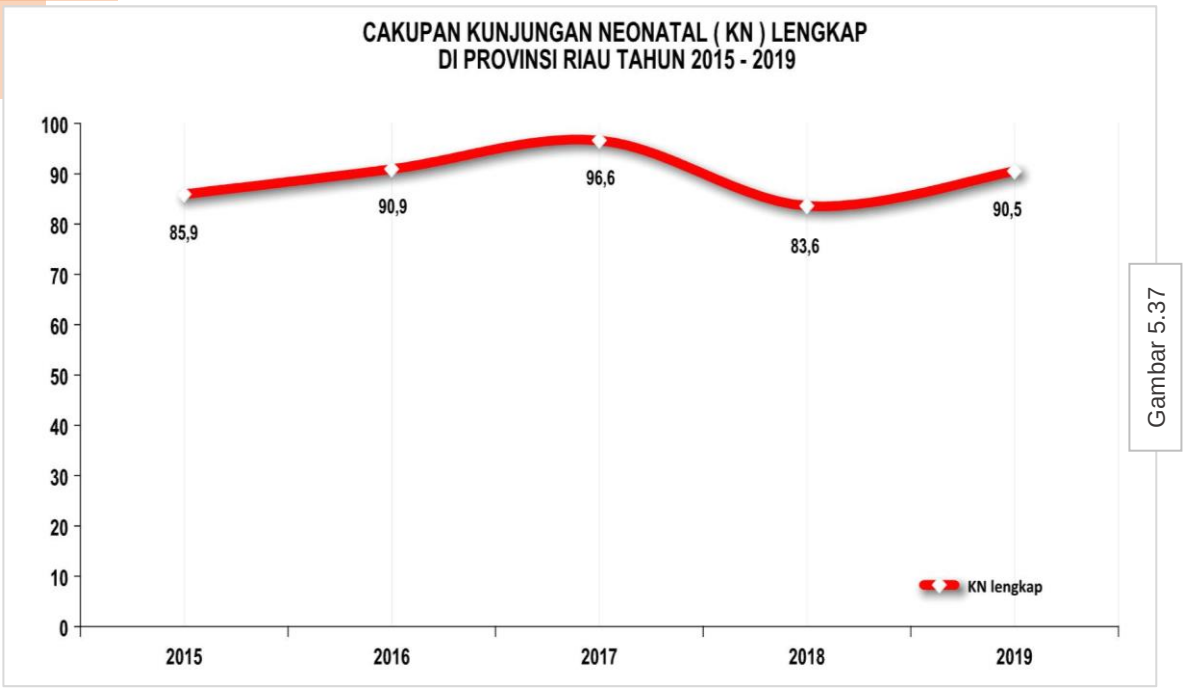


Selama 3 tahun berturut-turut persentase cakupan kunjungan neonatal1 (KN-1) di Provinsi Riau mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan, tetapi persentase cakupan kunjungan neonatal1 (KN-1) di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 13,5% menjadi 85,9%. Persentase ini meningkat lagi di tahun 2019 sebesar 8,2% menjadi 94,1% dan jumlah persentase ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 5.36



Beriringan dengan meningkatnya cakupan kunjungan neonatal1 (KN-1) di Provinsi Riau maka untuk cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap di Provinsi Riau juga turut mengalami peningkatan sebesar 6,9% dimana pada tahun 2018 persentase cakupan mencapai 83,6% dan tahun 2019 menjadi 90,5%. Hasil cakupan kunjungan neonatal1 (KN-1) di Provinsi Riau tahun 2015-2019 dapat terlihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 5.37

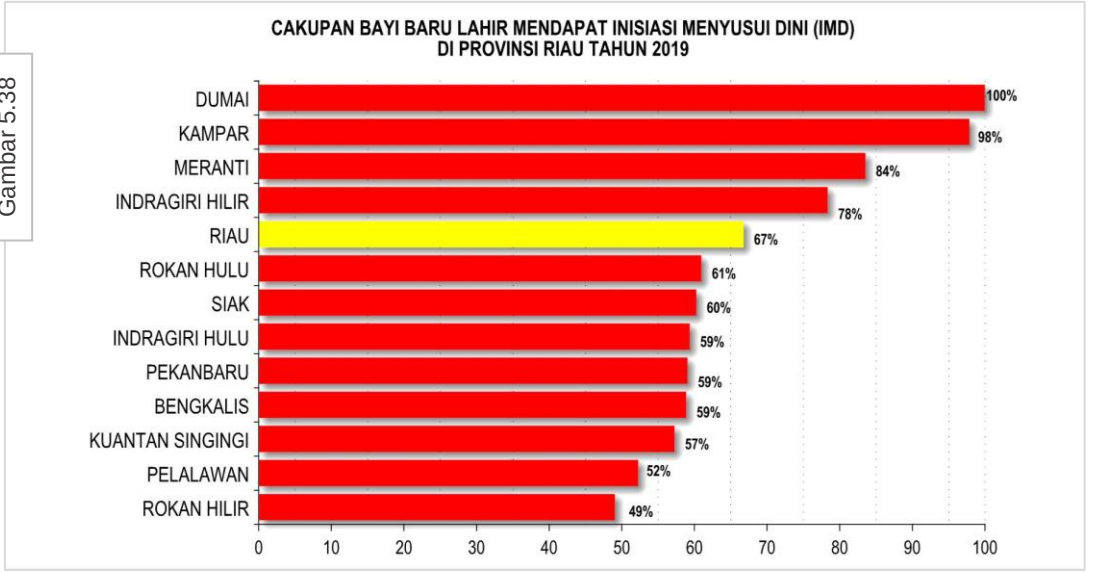
5. Bayi Diberi ASI Eksklusif

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses menyusu dimulai secepatnya segera setelah lahir. IMD dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya segera setelah lahir dan berlangsung minimal 1 jam. Persentase bayi baru lahir dapat IMD adalah proporsi bayi baru lahir yang mendapat IMD terhadap jumlah baru lahir di suatu wilayah pada periode tertentu x 100%. Seyogiannya petugas penolong persalinan yang sudah pernah dilatih tentang pelaksanaan IMD baik dalam Pelatihan Asuhan Persalinan Normal maupun Pelatihan Konseling Menyusui sudah dapat membantu ibu yang melahirkan untuk melaksanakan IMD.

Cakupan inisiasi menyusu dini (IMD) di Provinsi Riau tahun 2019 yaitu 67%, meningkat dibanding tahun 2018 (60%) dan sudah mencapai target (47%). Dengan capaian sempurna di Kota Dumai yaitu 100%, sedangkan capaian terendah di kabupaten Rokan Hilir yaitu 49%.

Gambaran cakupan IDM ini bisa dilihat dari gambar diagram dibawah ini.

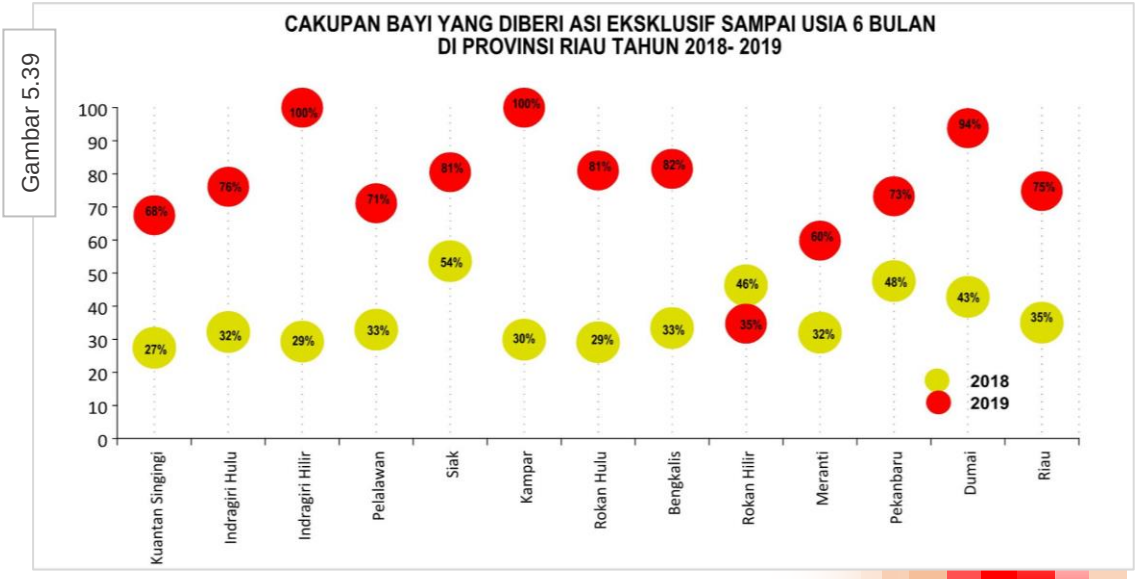
Gambar 5.38



ASI Eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sampai bayi berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman lain, kecuali atas indikasi medis. Bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah bayi 0-6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jam. Untuk menghitung persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah jumlah bayi 0-6 bulan yang diberi ASI saja dibagi dengan jumlah seluruh bayi 0-6 bulan yang datang dan tercatat dalam register pencatatan/KMS di wilayah tertentu kali 100%. Frekuensi pengamatan dilakukan setiap bulan di Posyandu, namun frekuensi laporan dilakukan setiap 6 bulan, yaitu bulan Februari dan Agustus. Selanjutnya cakupan tahunan menggunakan penjumlahan data bulan Februari dan Agustus.

Untuk Cakupan bayi yang diberi ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan di Provinsi Riau tahun 2018-2019, terlihat pada diagram berikut ini :

Gambar 5.39



Dari diagram diatas dapat dilihat, cakupan bayi yang diberi ASI ekslusif sampai usia 6 bulan di Provinsi Riau di tahun 2018 dan 2019 yaitu 35% dan 75%. Cakupan ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 47%. Kabupaten yang belum mencapai target adalah kabupaten Rokan Hilir yakni 35%.

6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Pelayanan kesehatan pada bayi minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB/HiB1-3, Polio 1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP ASI).

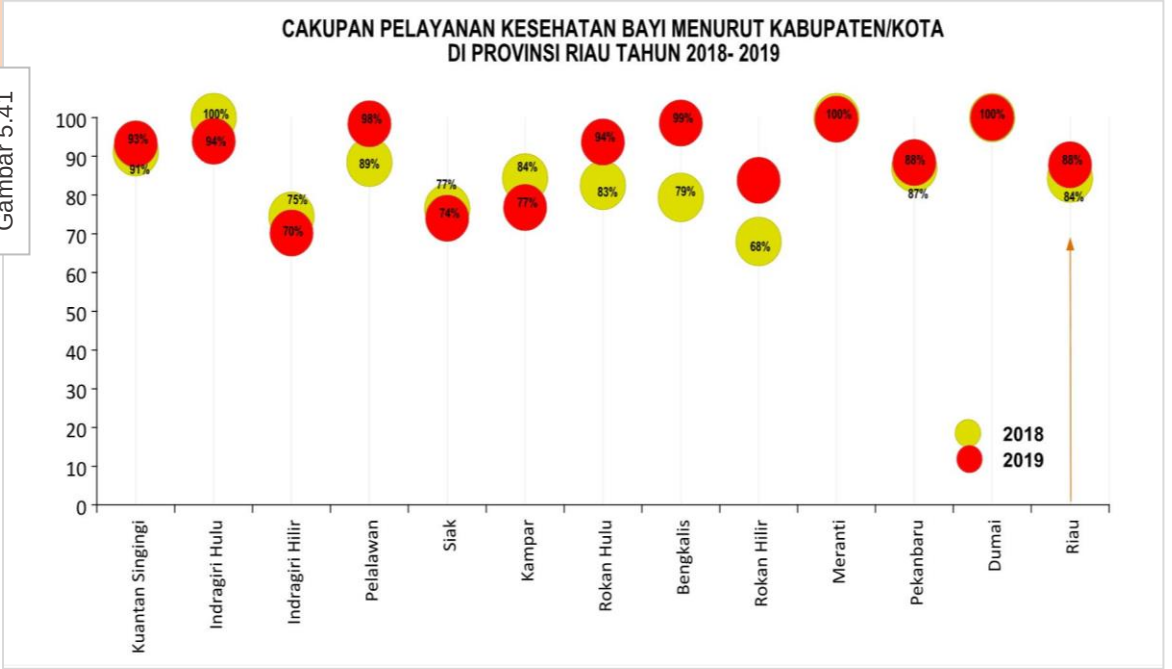
Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Provinsi Riau dari tahun 2015-2019, menunjukkan kondisi fluktuatif. Setelah mengalami penurunan ditahun 2017 (77,7%), terjadi peningkatan di tahun 2018 (84,4%) dan tambah meningkat di tahun 2019 (87,8%) melebihi target Provinsi (78%). Cakupan ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 5.40



Untuk mendapat gambaran cakupan pelayanan kesehatan bayi menurut kabupaten/kota, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 5.41

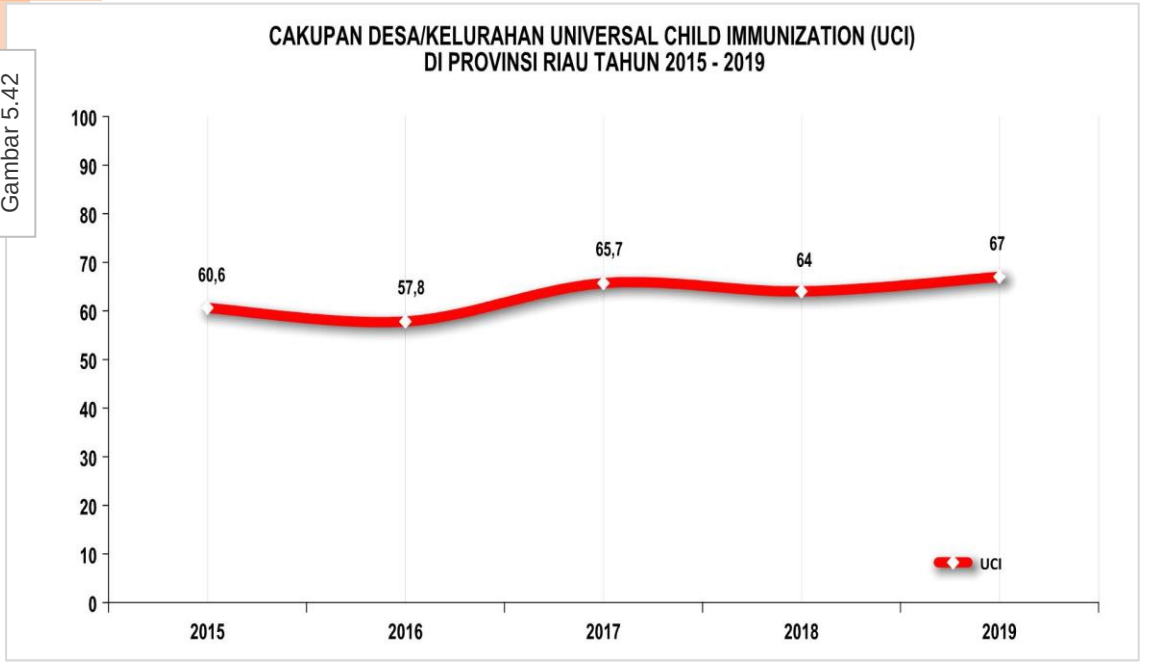


Dari grafik diatas dapat dilihat ada 2 (dua) bahwa di tahun 2019 kabupaten yang sudah mencapai capaian 100% yaitu kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Sementara kabupaten/kota yang menurun persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi dari tahun sebelumnya adalah kabupaten Indragiri Hulu (94%), kabupaten Indragiri Hilir (70%), kabupaten Siak (74%) dan kabupaten Kampar (77%).

7. Persentase Desa/Kelurahan UCI

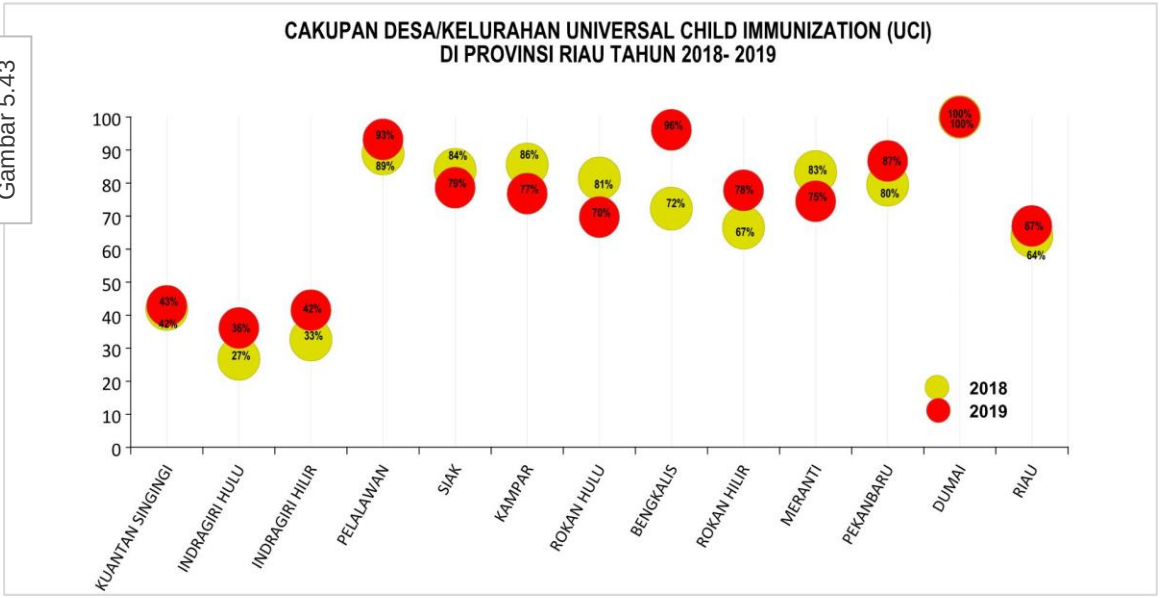
Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Keberhasilan UCI tercapai apabila semua bayi di desa tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap sekitar 90 % atau lebih. Dari grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization di Provinsi Riau Tahun 2015-2019 terlihat fluktuatif. Walaupun di tahun 2018 terjadi penurunan capaian cakupan menjadi 64% tetapi di tahun 2019 terjadi peningkatan capaian cakupan sebesar 3% menjadi 67 %.

Gambar 5.42



Cakupan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Riau Tahun 2018-2019 Pada Kabupaten/Kota, terlihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 5.43

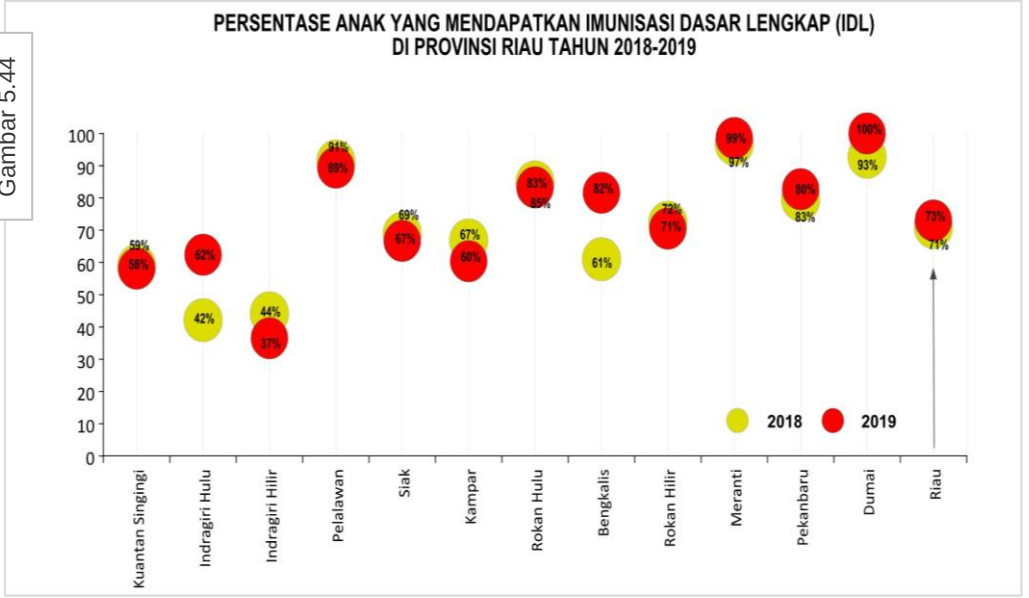


Pada grafik diatas dapat terlihat bahwa kabupaten yang mencapai 100% cakupan desa/kelurahan UCI nya adalah kota Dumai, sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan capaian cakupan dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah kabupatenSiak, kabupaten Kampar, kabupaten Rokan Hulu dan kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian orang tua untuk memberikan imunisasi pada anaknya dan ditambah adanya isu-isu tentang kehalalan vaksin yang beredar di media sosial, yang belum tentu kebenarannya sehingga masyarakat banyak yang kuwatir dan melakukan penolakan imunisasi.

8. Anak Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan indikator dalam program imunisasi, dimana setiap bayi usia 0-11 bulan sudah mendapatkan imunisasi hepatitis 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Bib 3 kali, Polio 4 kali, IPV 1 kali dan Campak/Measles Rubella (MR) satu kali. Dalam grafik dibawah ini dapat terlihat bahwa terdapat 2 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mencapai target (92,5%) cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) yakni kabupaten Kepulauan Meranti (99%) dan kota Dumai (100%), sementara cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) terendah ada di kabupaten Indragiri Hilir (37%).

Gambar 5.44



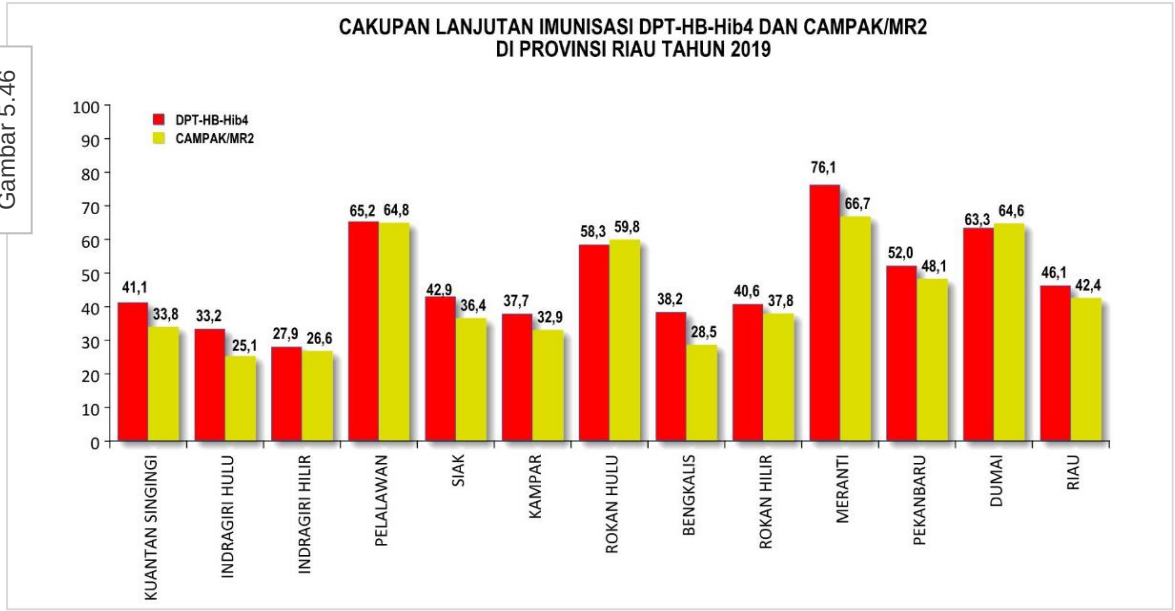
Untuk persentase anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) di Provinsi Riau Tahun 2015-2019, dapat dilihat pada grafik dibawah ini yakni persentase anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2% menjadi 73%, walau hasil ini belum mencapai target sebesar 92,5%.

Gambar 5.45



Dari gambar diatas tren menurun pada persentase anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) Tahun 2015-2019, dimana pada tahun 2016 (83,8%) menurun ditahun 2018 (71%) dan meningkat pada 2019 (73%). Berikut ini dalah gambaran cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib4 dan Campak/MR2 di Provinsi Riau tahun 2019.

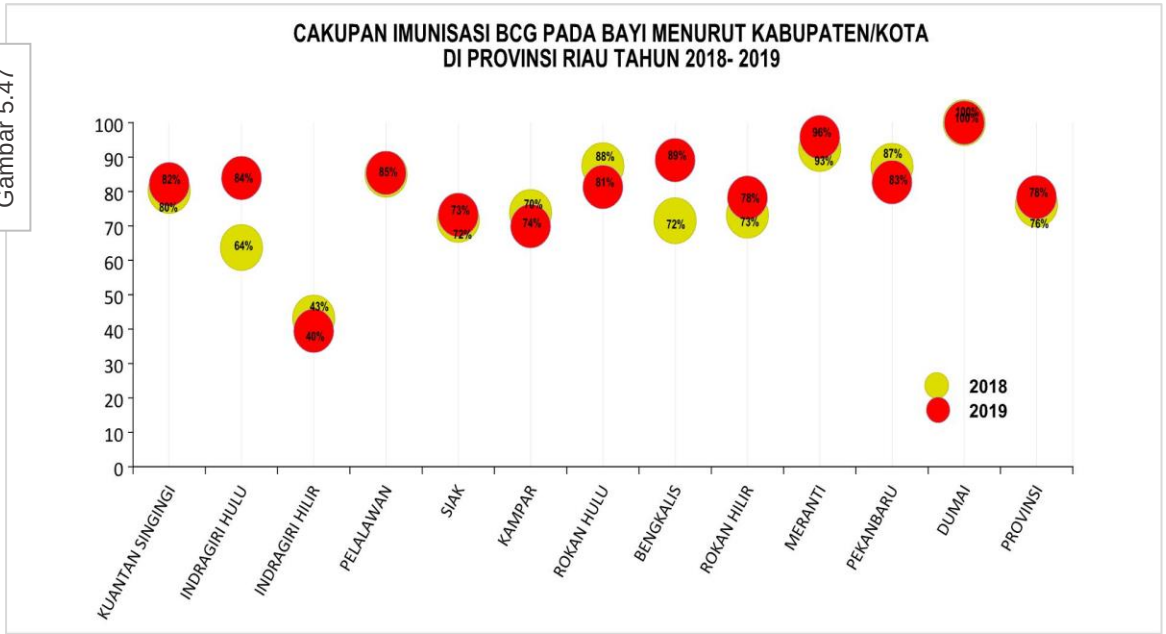
Gambar 5.46



9. Imunisasi BCG Pada Bayi

Imunisasi BCG merupakan imunisasi yang diberikan dalam rangka menurunkan angka kesakitan yang disebabkan oleh bakteri gram (+) Tuberculosis (TBC). Anak yang diberikan imunisasi BCG ini diharapkan memiliki kekebalan terhadap TBC. Cakupan Imunisasi BCG pada bayi menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 5.47

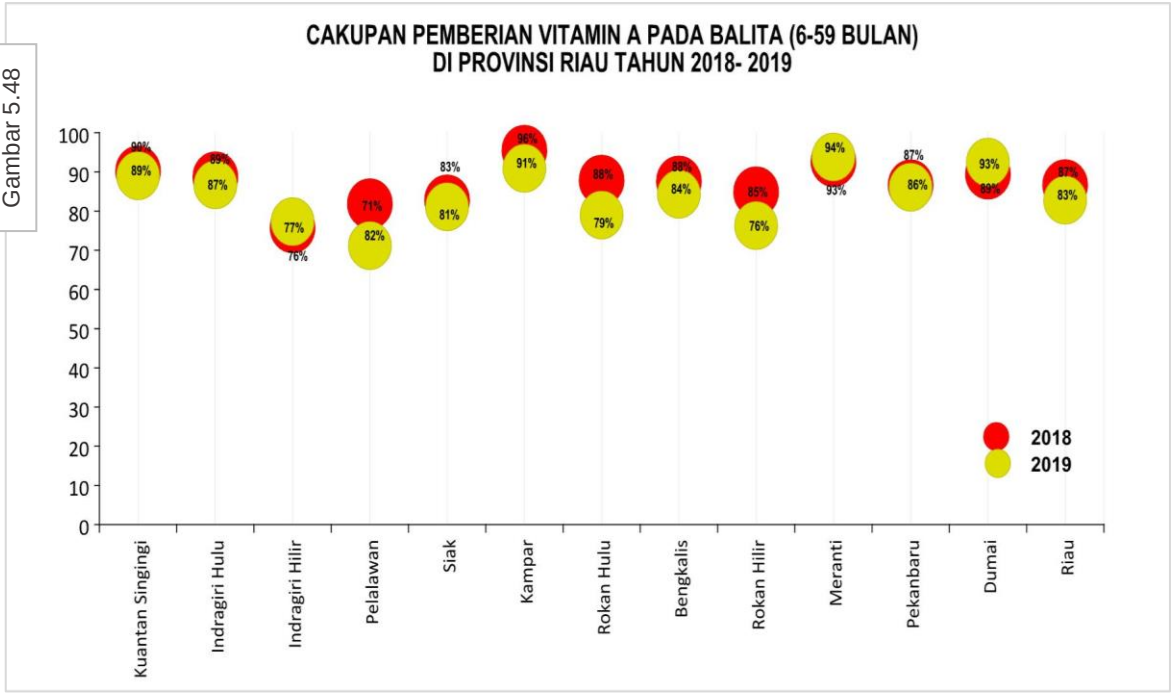


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk Provinsi Riau cakupan imunisasi BCG pada bayi mengalami peningkatan sebesar 2% dibanding tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 ini cakupan mencapai 78%, dan untuk kabupaten/kota yang mencapai capaian cakupan imunisasi BCG pada bayi sebesar 100% adalah kota Dumai.

10. Pemberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak Balita

Cakupan pemberian kapsul vitamin A balita 6-59 bulan dihitung dengan menjumlahkan cakupan bayi 6-11 bulan dengan cakupan anak-balita 12-59 bulan, kemudian diambil rata-ratanya. Dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 5.48



Dalam grafik diatas terlihat bahwa cakupan pemberian vitamin A pada balita (6-59 bulan) di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 4% dimana tahun 2018 jumlah cakupan mencapai 87% menjadi 83% di tahun 2019. dimana di tahun 2019 ini cakupan mencapai 78%, dan untuk kabupaten/kota yang mencapai capaian cakupan imunisasi BCG pada bayi sebesar 100% adalah kota Dumai. Jumlah cakupan pemberian vitamin A pada balita (6-59 bulan) Provinsi Riau tertinggi di kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 94% dan jumlah terendah di kabupaten Rokan Hilir sebesar 76%.

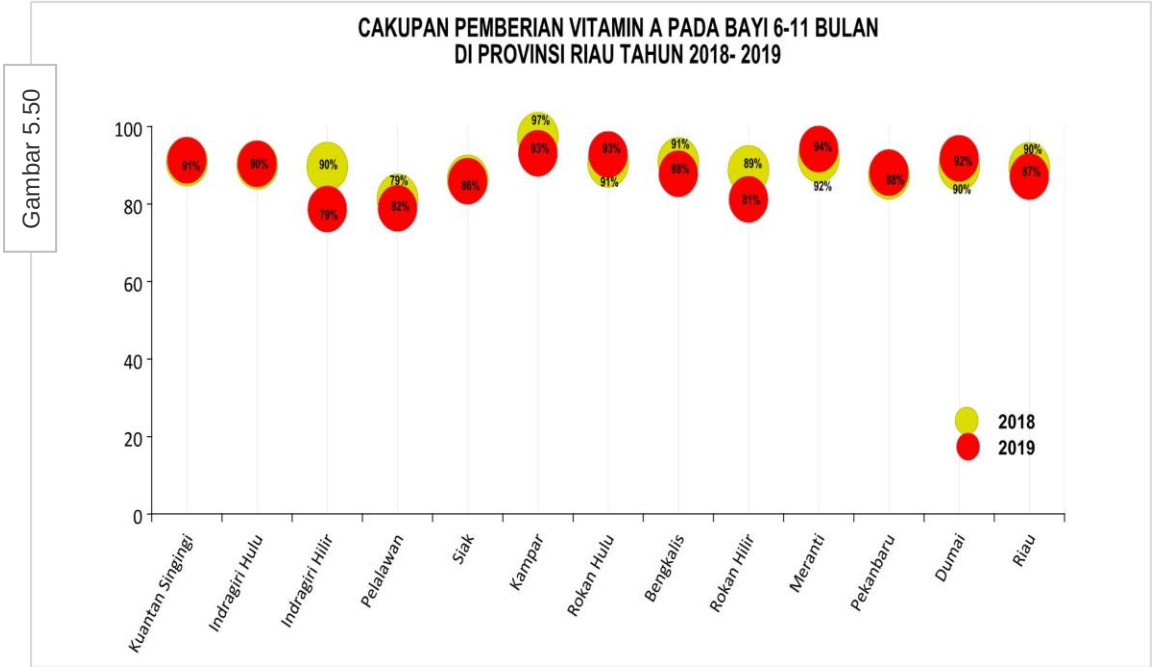
Dari tahun 2015 yang 81,16% meningkat ditahun 2016 (83,65%) meningkat lagi di tahun 2017 (85,77%) dan meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 86,69%. Dan cakupan pemberian vitamin A pad balita mengalami penurunan 83%.



Gambar 5.49

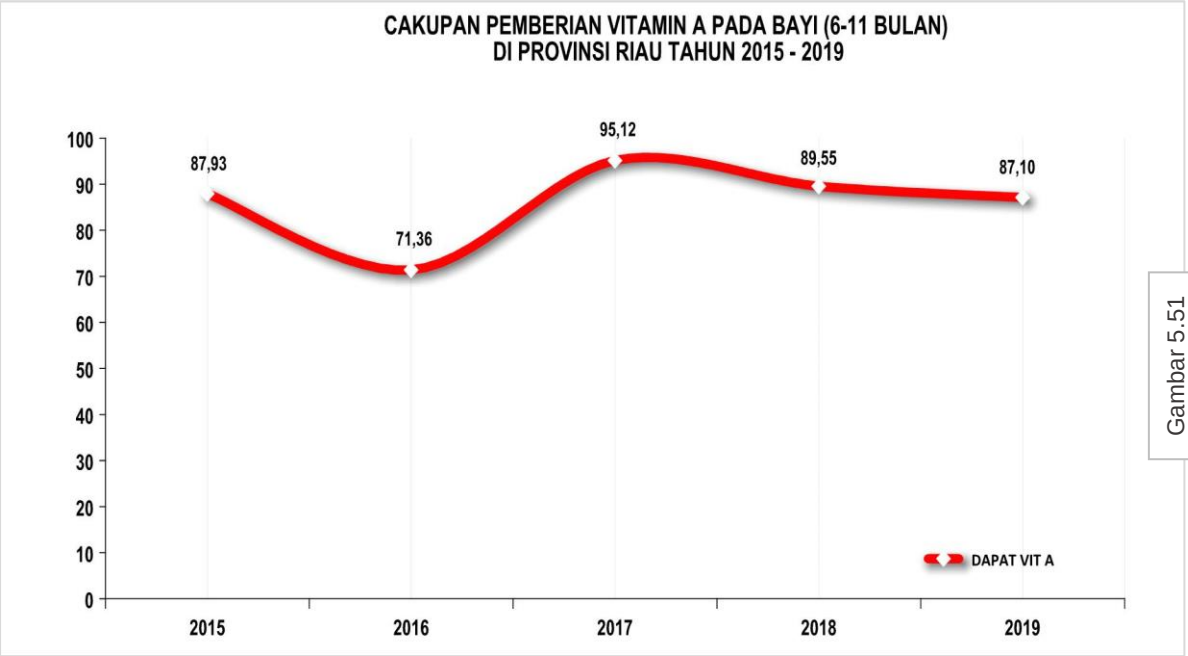
Cakupan pemberian kapsul vitamin A bayi terintegrasi dalam pelayanan kesehatan bayi. Berdasarkan laporan terdapat kesenjangan antara dua indikator ini. Cakupan pelayanan kesehatan bayi lebih rendah daripada cakupan vitamin A bayi. Hal ini kemungkinan disebabkan masih ada beberapa indikator di Pelayanan Kesehatan Bayi yang belum dilaksanakan, seperti deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) dan minimal kunjungan bayi 4 kali setahun. Pemberian vitamin A adalah salah satu indikator saja dalam pelayanan kesehatan bayi.

Gambaran cakupan pemberian vitamin A pada bayu 6-11 bulan bisa di lihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5.50

Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada bayi 6-11 bulan di Provinsi Riau pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Jumlah cakupan di tahun 2019 mencapai 87% dan tahun 2018 mencapai 90% dan capaian cakupan ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 90%. Tahun 2019 kabupaten yang paling tinggi capaian pemberian kapsul vitamin A bayi 6-11 adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (94%) dan capaian terendah di kabupaten Indragiri Hilir (79%). Kabupaten yang sudah mencapai target 90% adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti dan Dumai.



Gambar 5.51

Dalam grafik diatas terlihat bahwa selama 5 tahun yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, cakupan pemberian vitamin A pada bayi (6-11 bulan) di Provinsi Riau yang jumlah cakupannya sesuai dengan target yang ditentukan (90%) terjadi ditahun 2017 (9512%) dan jumlah cakupan terendah di tahun 2016 (71,36%).

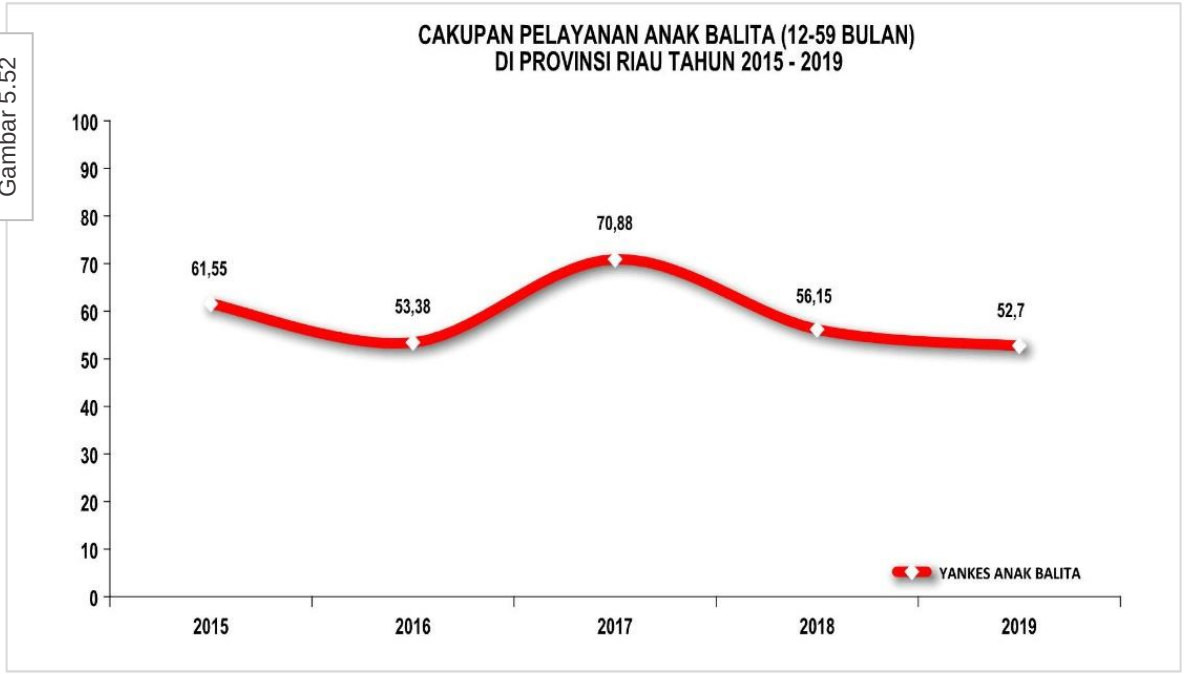
11. Pelayanan Kesehatan Balita

Definisi anak balita adalah anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59 bulan (1 hari sebelum ulang tahunnya yang kelima). Sedangkan definisi operasional kunjungan anak balita adalah anak usia 12 s/d 59 bulan yang memperoleh pelayanan sesuai standard. Untuk menjaring anak balita relatif sulit dibandingkan bayi disebabkan antara lain karena orang tua merasa sudah lengkap imunisasi pada saat umur 9 bulan sehingga hanya membawa anak balita nya ke fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit saja. Padahal anak balita harus tetap dipantau pertumbuhan

(minimal 4 kali dalam setahun) dan perkembangannya (minimal 2 kali dalam setahun) dan mendapatkan kapsul vitamin A (2 kali dalam setahun : Bulan Februari dan Agustus).

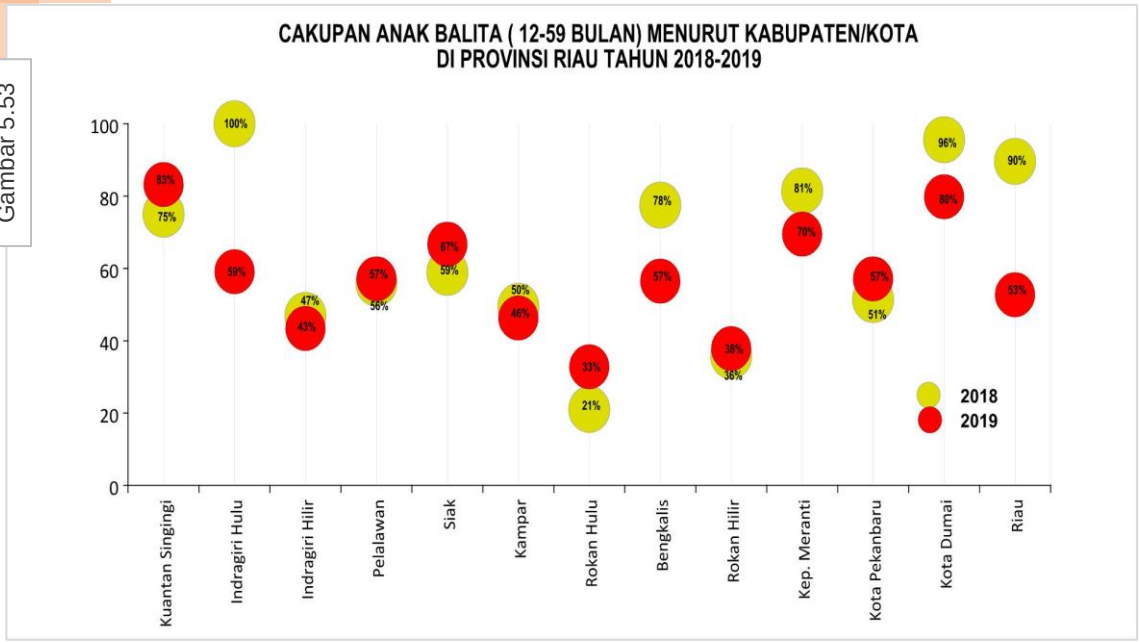
Untuk cakupan pelayanan anak balita (12-59 bulan) di Provinsi Riau Tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang fluktuatif dimana selama 5 tahun hanya sekali terjadi peningkatan cakupan yakni ditahun 2017 sebesar 70,88% dan di tahun 2019 terjadi penurunan cakupan menjadi 52,7%. Untuk gambarannya bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 5.52



Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) di Provinsi Riau menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 37 %, dimana cakupan tahun 2018 yang mencapai 90% menjadi 53% ditahun 2019. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) tertinggi mencapai 83% di kabupaten Kuantan Sengingi dan cakupan terendah 33% di kabupaten Rokan Hulu. Gambaran ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

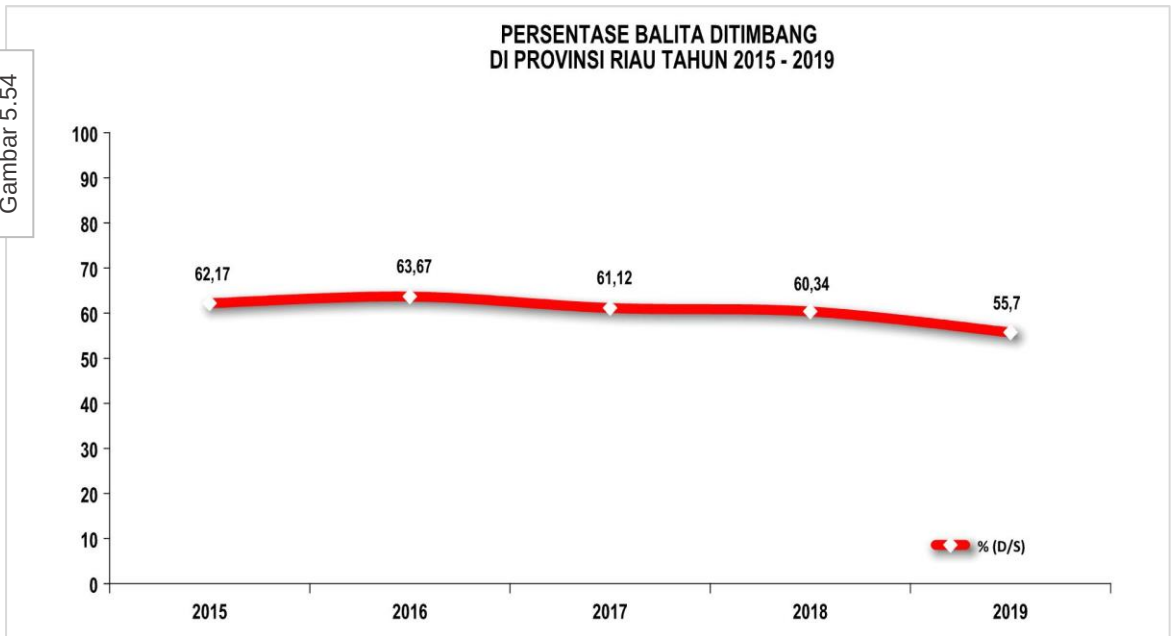
Gambar 5.53



12. Balita Ditimbang

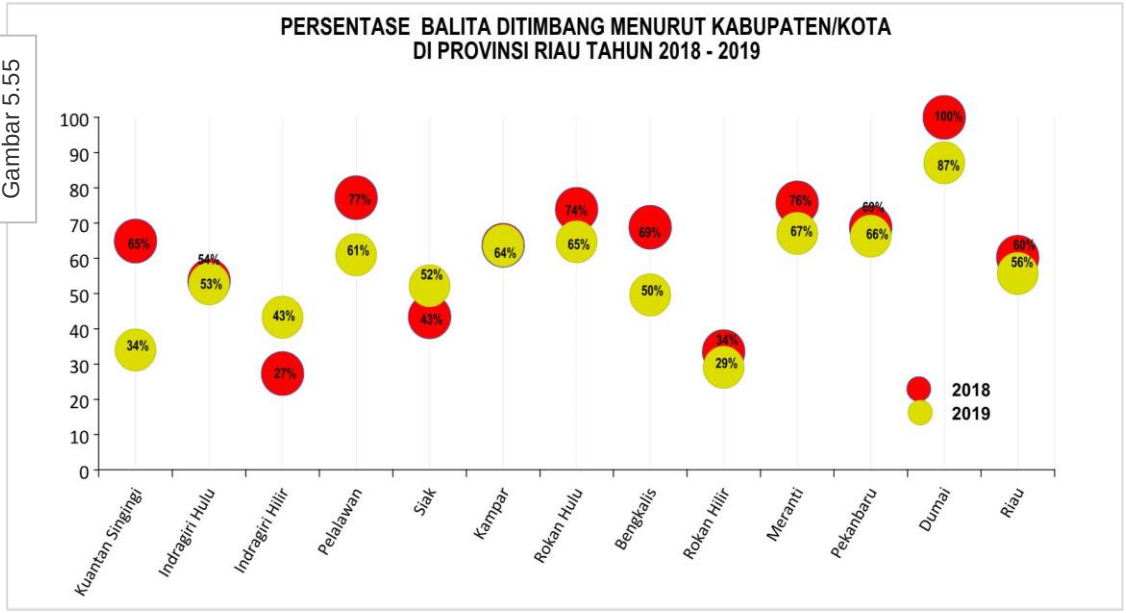
Penimbangan balita merupakan gambaran kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu. Indikatornya berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan imunisasi, pemberian kapsul vitamin A yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap prevalensi gizi kurang pada balita. Asumsinya semakin tinggi cakupan D/S, semakin tinggi cakupan vitamin A, semakin tinggi cakupan imunisasi maka semakin rendah prevalensi gizi kurang. Melihat pada grafik dibawah ini persentase Balita di Provinsi Riau ditimbang pada tahun 2019 sebanyak 55,7%, menurun sebesar 4,64% dibanding tahun sebelumnya 60,34% (2018) hal ini belum mencapai target (80%).

Gambar 5.54



Persentase jumlah balita ditimbang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2019 yang tertinggi di Kabupaten Dumai (87%) dan terendah di kabupaten Rokan Hilir (29%). Sedangkan untuk kabupaten/kota yang persentase jumlah balita ditimbang meningkat dibandingkan tahun lalu adalah kabupaten Indragiri Hilir dari 7% menjadi 43% dan kabupaten Siak dari 52% menjadi 43%. Persentase jumlah balita ditimbang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 5.55

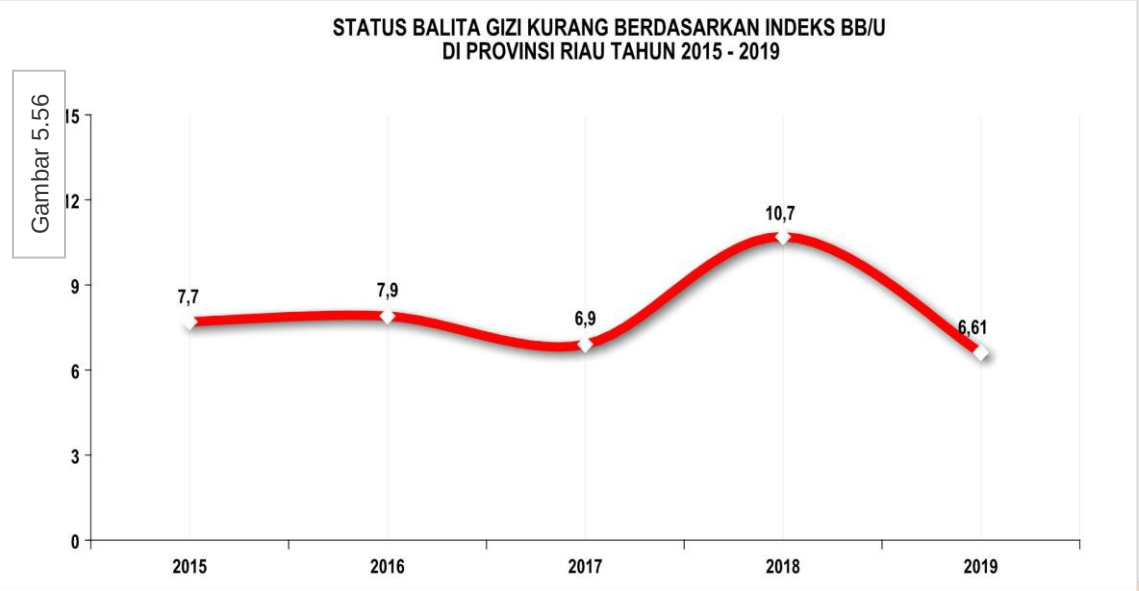


C. STATUS GIZI PADA BALITA

1. Balita Gizi Kurang (BB/Umur), Pendek (TB/Umur), Dan Kurus (BB/TB)

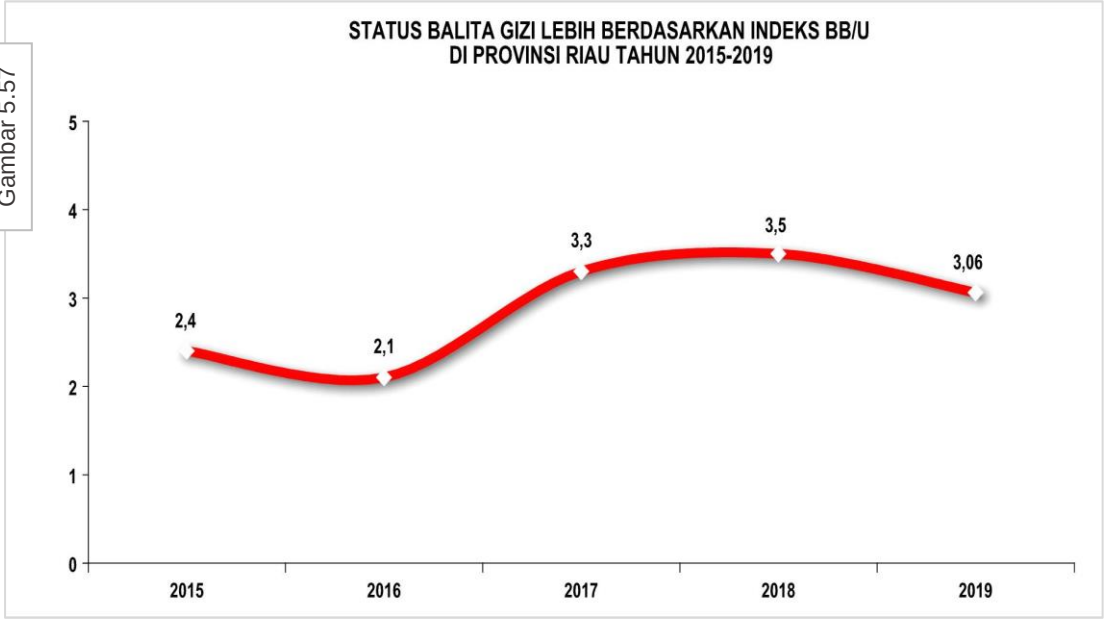
Status balita gizi kurang berdasarkan indeks BB/U di Provinsi Riau Tahun 2015-2019 menunjukkan penurunan di tahun 2109 sebesar 4,09 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 status balita gizi kurang berdasarkan indeks BB/U mencapai 6,61, sementara pada tahun 2018 mencapai 10,7 seperti yang ditunjukan pada grafik dibawah ini :

Gambar 5.56



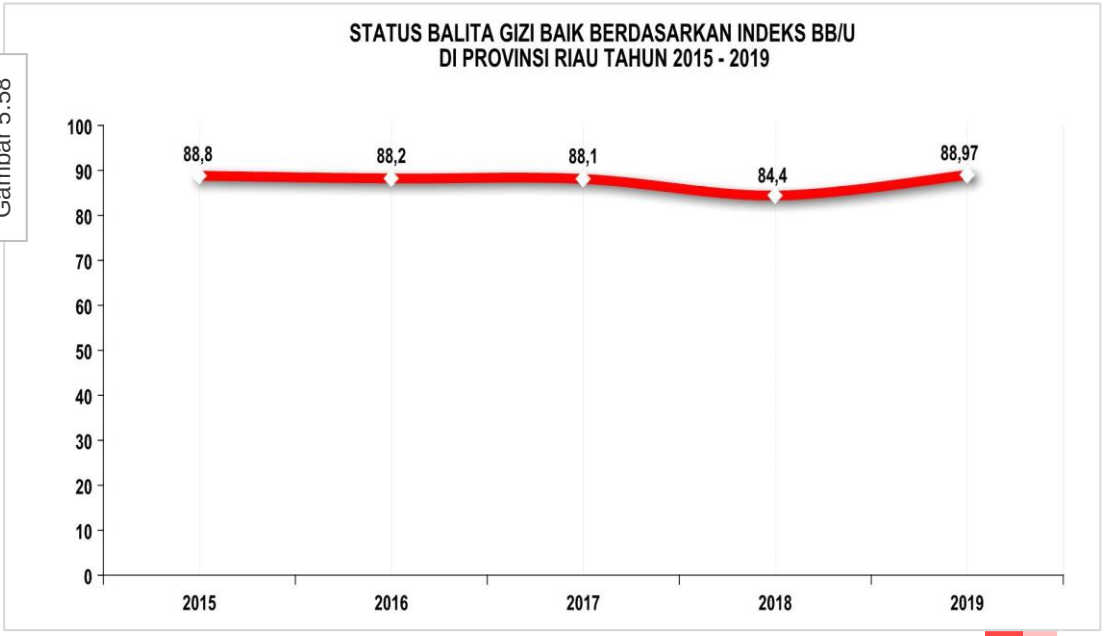
Pada grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa status balita gizi lebih berdasarkan indeks BB/U di provinsi Riau menunjukkan tren meningkat selama tahun 2016 -2018 dan menurun ditahun 2019 (3,06). Capaian tertinggi status balita gizi lebih berdasarkan indeks BB/U di Provinsi Riau selama tahun 2015-2019 berada di tahun 2018 (3,5) dan paling rendah di tahun 2016 (2,1).

Gambar 5.57



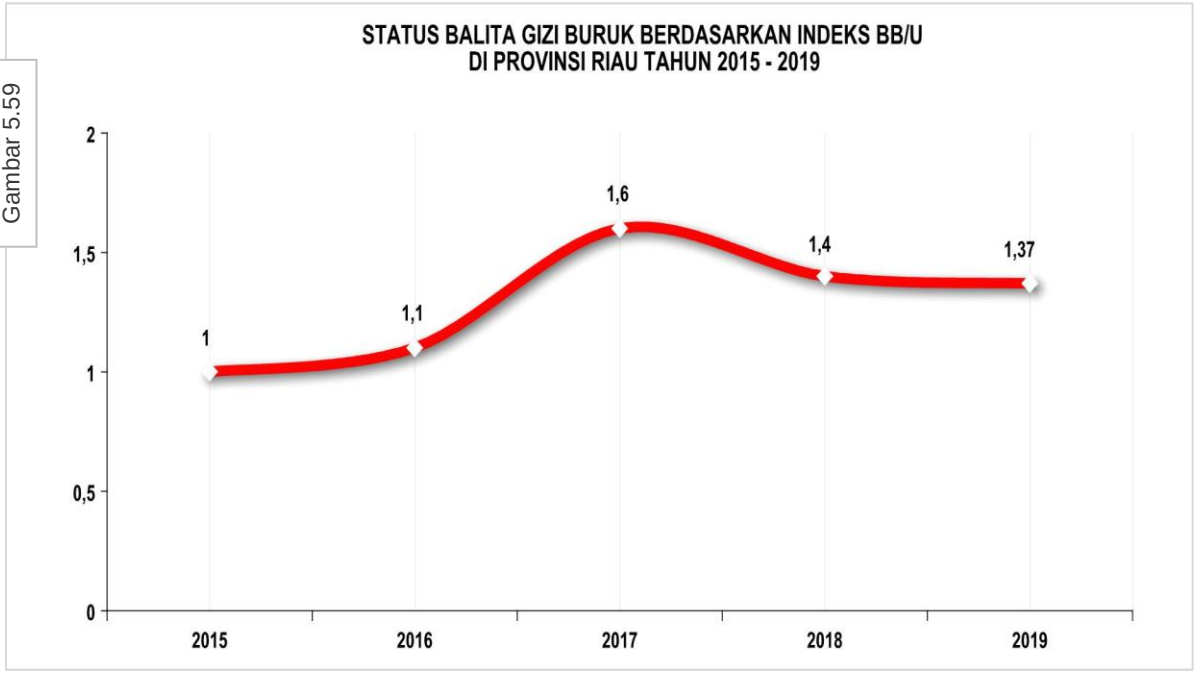
Sementara status balita gizi baik berdasarkan indeks BB/U di Provinsi Riau tahun 2015-2019 menunjukkan tren menurun selama 4 tahun secara berturut-turut dan meningkat di tahun 2019. Dimulai dari tahun 2015 (88,8) menurun jadi 88,2 ditahun 2016, selanjutnya menurun lagi ditahun 2017 (88,1), menurun lagi ditahun 2018 (84,4) dan di tahun 2019 meningkat menjadi 88,97. Capaian tertinggi berada ditahun 2019 dan terendah di tahun 2018 seperti pada grafik berikut ini :

Gambar 5.58



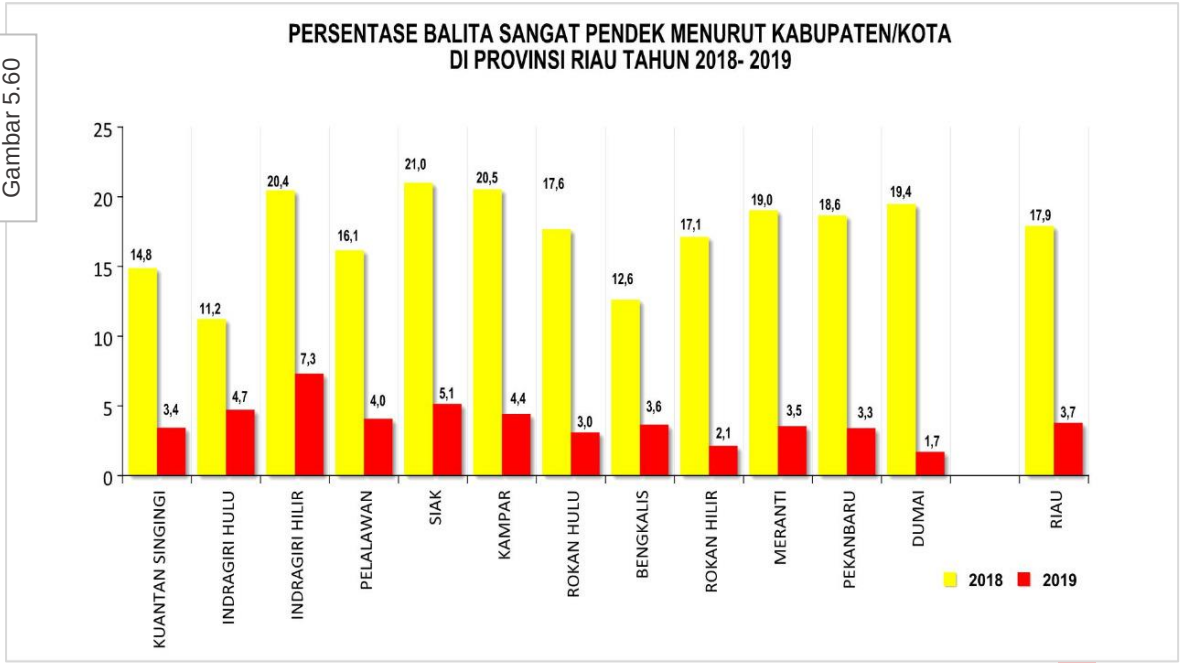
Untuk status balita gizi buruk berdasarkan indeks BB/U di Provinsi Riau tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana capaian tertinggi berada ditahun 2017 (1,6) dan capaian terendah di tahun2015 (1). Untuk tahun 2019 status balita gizi buruk berdasarkan indeks BB/U di Provinsi Riau mencapai 1,37, angka capaian ini menurun dari tahun sebelumnya yakni tahun 2018 yang mencapai 1,4 seperti yang ditunjukan oleh grafik berikut ini :

Gambar 5.59



Persentase balita sangat pendek menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2018-2019 dapat dilihat di diagram berikut.

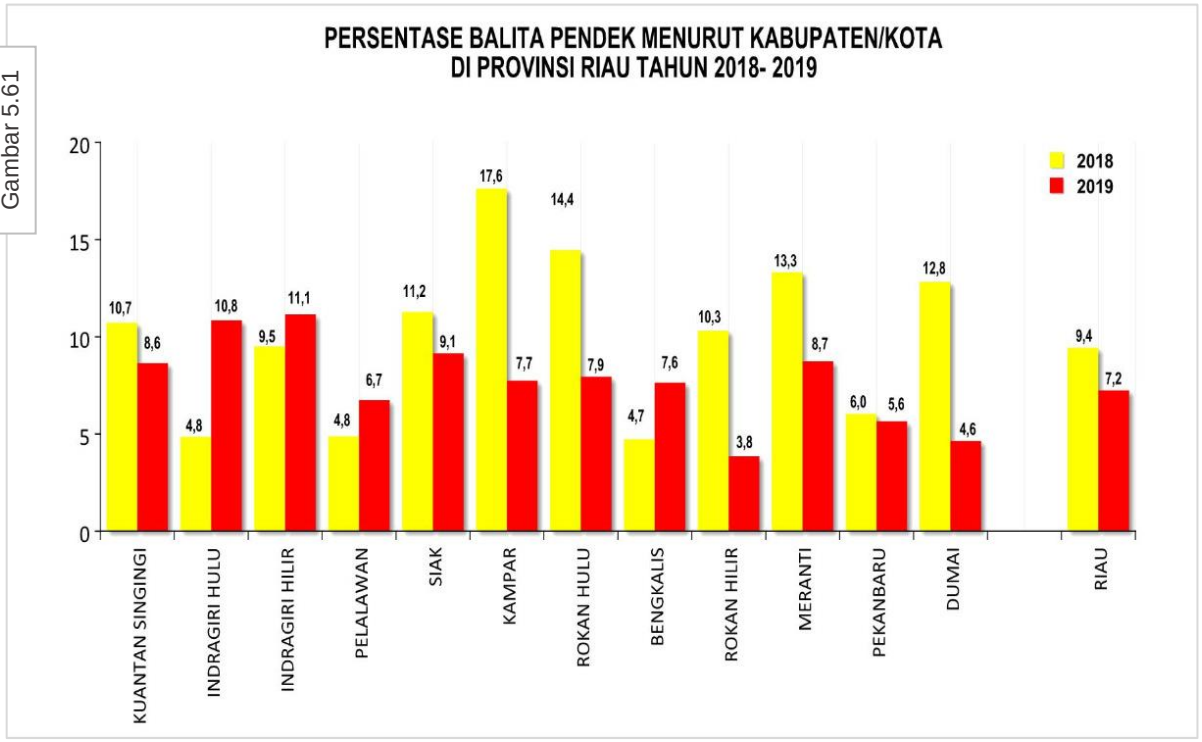
Gambar 5.60



Untuk Provinsi Riau terjadi penurunan persentase Balita sangat pendek di tahun 2018 (3,7%) dibanding tahun 2018 (17,9%). Persentase terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir (7,3%), disusul dengan Kabupaten Siak (5,1%). Sementara yang terendah pada Kota Dumai (1,7%) dan kabupaten Rokan Hilir (2,1%). Untuk Tahun 2019 ini semua kabupaten/kota untuk balita sangat pendek sudah menurun dibandingkan dengan tahun 2018.

Sementara untuk balita pendek untuk 2 tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 5.61

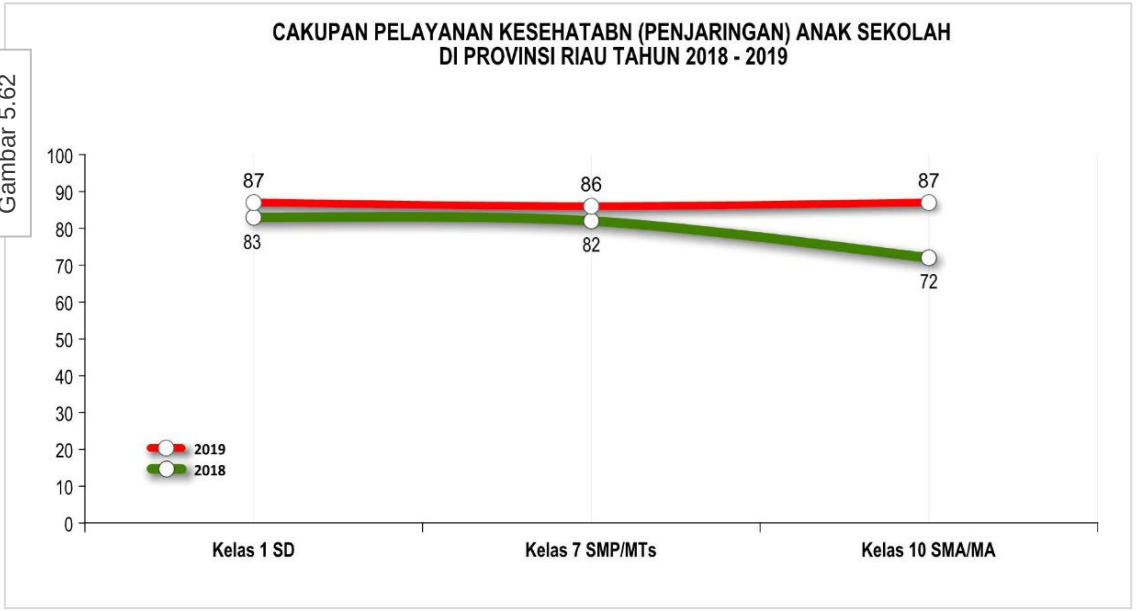


Dari gambar diatas persentase balita pendek menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menunjukan penurunan di tahun 2019 (7,2%) disbanding tahun 2018 (9,4%). Paling banyak balita pendek di temui Kabupaten Indragiri Hilir (11,1%) diikuti dengan kabupaten Indragiri Hulu (10,8%) dan Kabupaten Siak (9,1%). Sementara yang terendah Kabupaten Rokan Hilir (3,8%), diikuti Kota Dumai 4,6% dan Kota pekanbaru (5,6%). Untuk balta pendek yang ditemui pada tahun 2019 terjadi penurunan.

2. Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI, 7 SMP/MTs, dan 10 SMA/MA

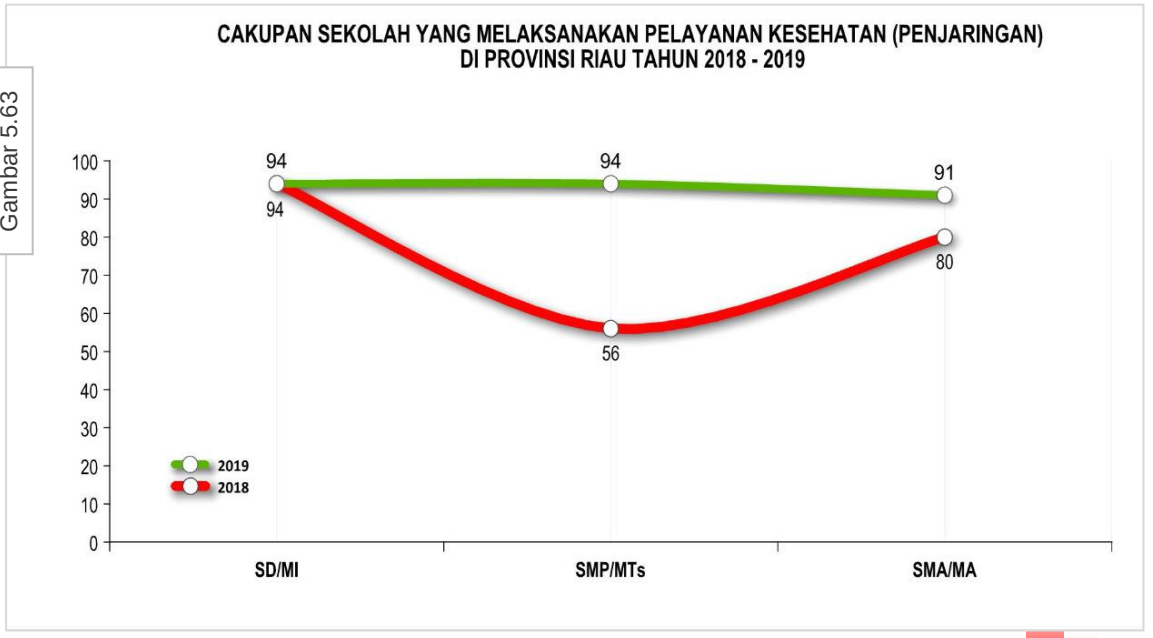
Cakupan pelayanan kesehatan (penjaringan) anak sekolah di Provinsi Riau pada Tahun 2019 meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2018 menunjukan bahwa untuk penjaringan kelas 1 Sekolah Dasar sebanyak 83% sekolah, kelas 7 SMP/MTS sebanyak 82%, kelas 10 SMA/MA sebanyak 72% seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 5.62



Untuk cakupan sekolah yang melaksanakan pelayanan kesehatan (Penjaringan) di Provinsi Riau tahun 2019, tingkat sekolah dasar 94%, tingkat sekolah menengah pertama 97% dan tingkat sekolah menengah pertama 91%, cakupan tahun 2019 ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018.

Gambar 5.63



D. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut

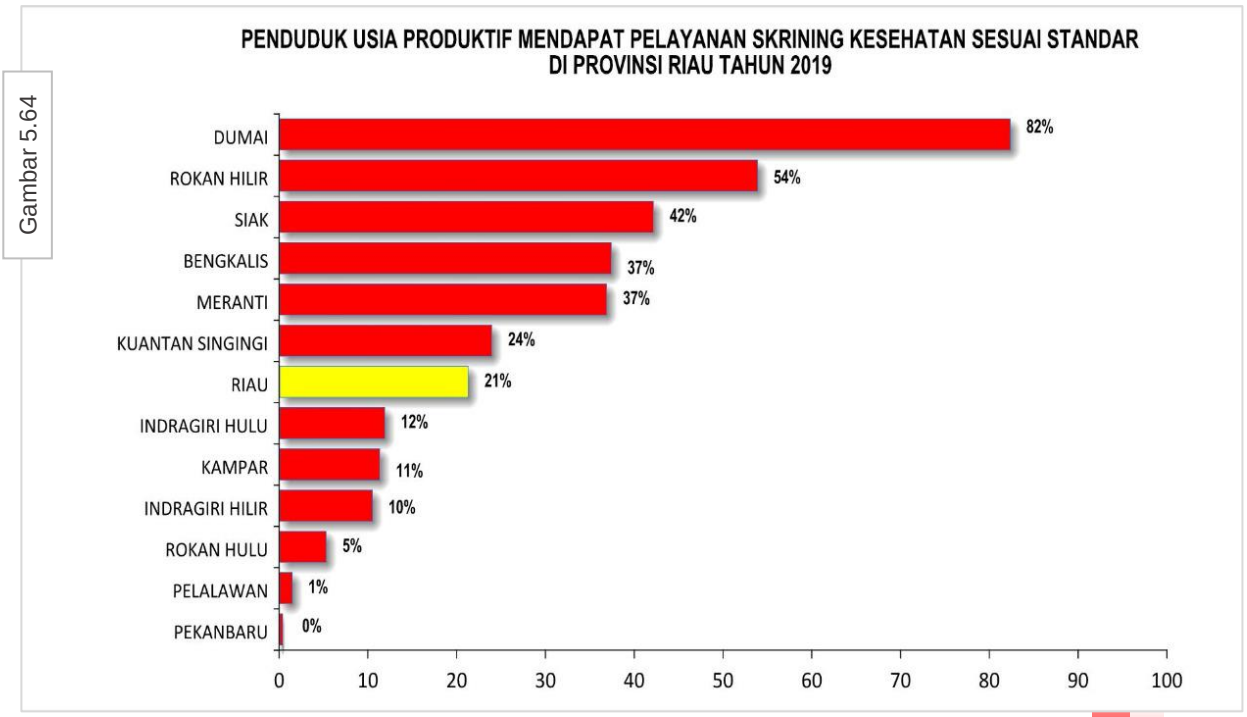
1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Penduduk usia 15-59 tahun mendapat adalah pelayanan skinning kesehatan sesuai standar Penduduk usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skinning kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi:

1) Deteksi kemungkinan Obesitas.
2) Deteksi Hipertensi.
3) Deteksi kemungkinan Diabetes Melitus.
4) Pemeriksaan ketajaman penglihatan.
5) Pemeriksaan ketajaman pendengaran.
6) Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim

Penduduk usia 15-59 tahun berisiko : Penduduk usia 15-59 tahun yang ditemukan faktor risiko PTM. Sedangkan cakupan usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 di Provinsi Riau adalah sebesar 21%. Untuk gambaran di kabupaten/kotanya cakupa tertinggi adalah Kota Dumai sebesar 82%, diikuti dengan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 54% dan kabupaten Siak sebesar 42%. Sedangkan capaian terendah adalah 0,4%, diikuti oleh Kabupaten Pelalawan sebesar 1 % dan kabupaten Rokan Hulu 5%.

Gambar 5.64



2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (60+ tahun)

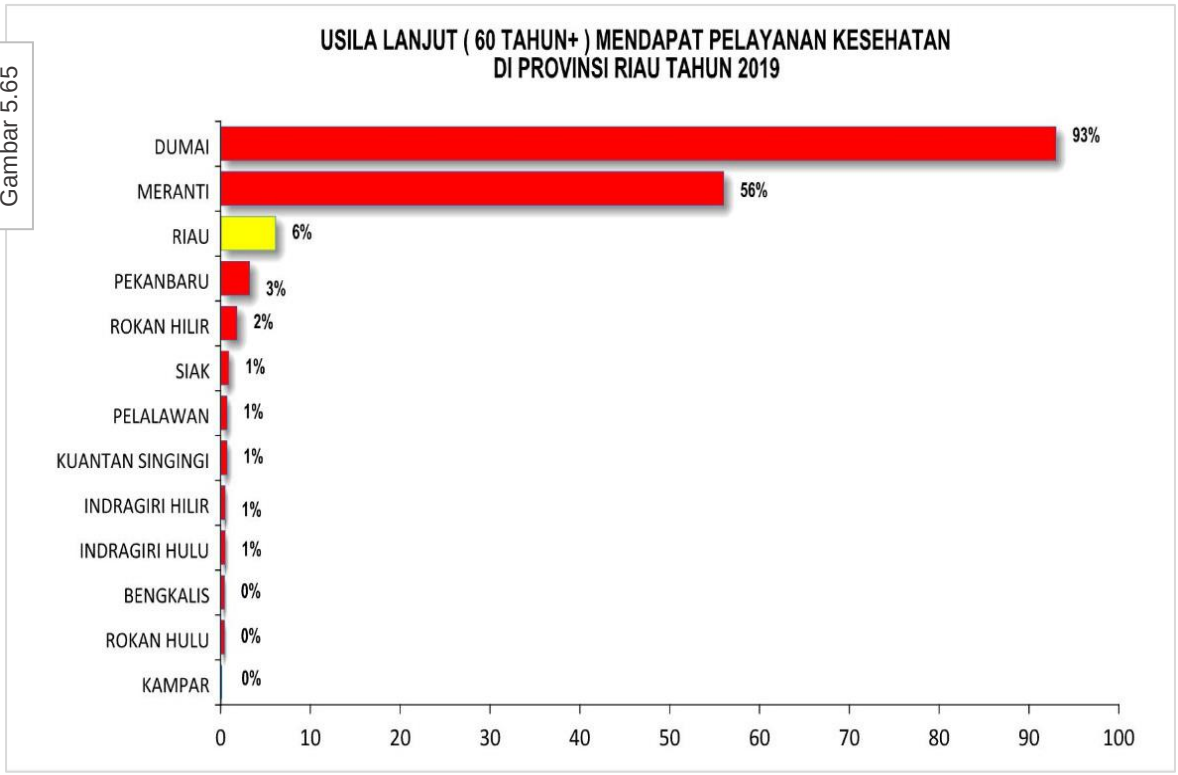
Pelayanan kesehatan usia lanjut adalah Pelayanan kesehatan untuk usia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam setahun pada satu wilayah kerja dan kurun waktu tertentu.

Komponen skrining kesehatan yang dilakukan pada usia lanjut terdiri dari:

a. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah
b. Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah
c. Deteksi kadar kolesterol dalam darah
d. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut

Untuk cakupan usia lanjut (60 tahun+) yang mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2019 di Provinsi Riau sebesar 6 %. Untuk melihat gambaran cakupan usia lanjut (60 tahun+) yang mendapat pelayanan kesehatan di Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 5.65



Untuk cakupan usia lanjut (60 tahun+) yang mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2019 di Kabupaten/kota, yang tertinggi cakupannya adalah Kota Dumai sebesar 93%, diikuti Kabupaten Kep. Meranti sebesar 56% dan Kota pekanbaru 3%. Sedangkan yang capaian terendah adalah Kabupaten Kampar 0,1%, diikuti dengan Kabupaten Rokan Hulu dan kabupaten Bengkalis 0,4%.

PENGENDALIAN PENYAKIT

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insidens, prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian penyakit.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban Tuberkulosis yang tertinggi menduduki posisi ketiga di dunia, sementara posisi pertama dan kedua saat ini adalah India dan Tiongkok (WHO, Desember 2019). Data WHO tahun 2019, menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang 60% dari seluruh kasus TB di dunia.

Beban Tuberkulosis makin besar dengan adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya kasus TB-MDR, TB-HIV, TB dengan DM, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Untuk itu, diperlukan percepatan pencapaian target eliminasi Tuberkulosis pada 2030, dan menuju Indonesia bebas 2050. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, yang tercantum di Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau tahun 2014-2019.

Beban penyakit yang disebabkan oleh Tuberkulosis dapat diukur dengan insidens, prevalensi, dan mortalitas / kematian. Indikator yang digunakan adalah prevalensi berbasis mikroskopis, molekuler dan kultur. Percepatan eliminasi Tuberculosis dengan pokok bahasan, missing casses, compliance dan Tuberkulosis

resistensi (kebal terhadap obat Tuberkulosis lini pertama). Dimana diperlukannya penanganan yang lebih serius untuk menjangkau kasus yang belum terdeteksi. Perjaringan kasus Tuberkulosis sebanyak-banyaknya diperlukan adanya strategi percepatan pencapaian target, dengan melakukan kerjasama lintas program yang terintegrasi dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) dan pemberdayaan masyarakat melalui kader, maka diperlukan perluasan investigasi kasus dalam penemuan kasus pada kelompok-kelompok yang berisiko.

Penularan dan penyebaran penyakit Tuberculosis sangat cepat dikarenakan menular melalui udara atau air borne disease. Makin banyak ditemukan terduga / suspek Tuberkulosis, maka makin tinggi juga kemungkinan penderita Tuberkulosis yang terkonfirmasi positif yang ditemukan, karena 1 (satu) orang yang positif akan menularkan 10 – 15 orang ke orang yang sehat.

Gambar 6.1



Tahun 2019 ditemukan terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 36.154 orang, dari jumlah penduduk Provinsi Riau sebesar 6.971.745 jiwa. Dengan rincian yang mendapatdari pelayanan kesehatan sesuai standar (pemeriksaan bakteriologis dan klinis) sebanyak 34.604 orang dan yang tidak sesuai standar kesehatan sebanyak 1.550 orang (4,28%). Tercatat terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar yang terbanyak ditemukan di Kota Pekanbaru 8.646 orang.

Dari jumlah terduga diatas, ditemukan semua kasus Tuberkulosis dengan klasifikasi Tuberkulosis Paru dan Tuberkulosis ekstra paru serta berdasarkan jenis

Tuberkulosis yang ditemukan di semua layanan kesehatan seperti TB dewasa, TB resistensi (TB - Multi Drug Resistensi), dan TB-HIV di Provinsi Riau sebanyak 9.678 orang.

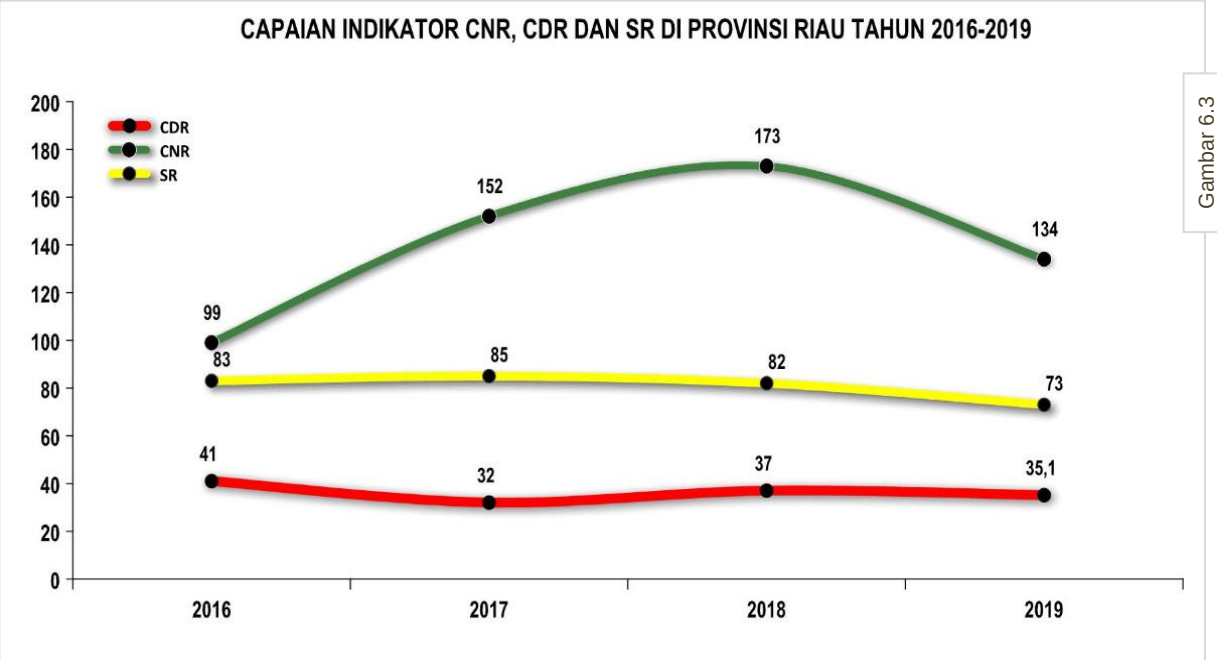
Gambar 6.2



Dari semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan, kasus TB pada anak di Provinsi Riau ditemukan sebanyak 1.020 orang (10,5%) dari jumlah semua kasus Tuberkulosis. Kota Pekanbaru yang paling banyak ditemukan kasus Tuberkulosis pada anak usia 0 sampai 14 tahun (berat badan ≥ 33 Kg) sebanyak 379 orang. Hal ini sangat dibutuhkan observasi lanjutan untuk dapat memastikan sumber penularan dari Tuberkulosis dewasa terkonfirmasi bakteriologis.

Semua fasilitas layanan kesehatan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) di Provinsi Riau milik pemerintah, BUMN, TNI/POLRI, swasta telah melaksanakan strategi DOTS (Direcly Observerd Treatment Shortcouse) dan pemberian Profilaksis Isoniazid (INH) pada anak selama 9 bulan untuk upaya pencegahan terjadinya penularan penyakit Tuberkulosis pada anak terutama anak yang mempunyai kontak serumah dengan pasien Tuberkulosis terkonfirmasi bakteriologis.

Penentuan diagnosa Tuberkulosis pada anak sering menimbulkan keraguan, sehingga sering ditemukan ***over diagnosis*** dan ***under diagnosa*** di layanan FKTP dan FKRTL. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, menjelaskan penegakkan diagnosa Tuberkulosis pada anak menggunakan tools Skoring.



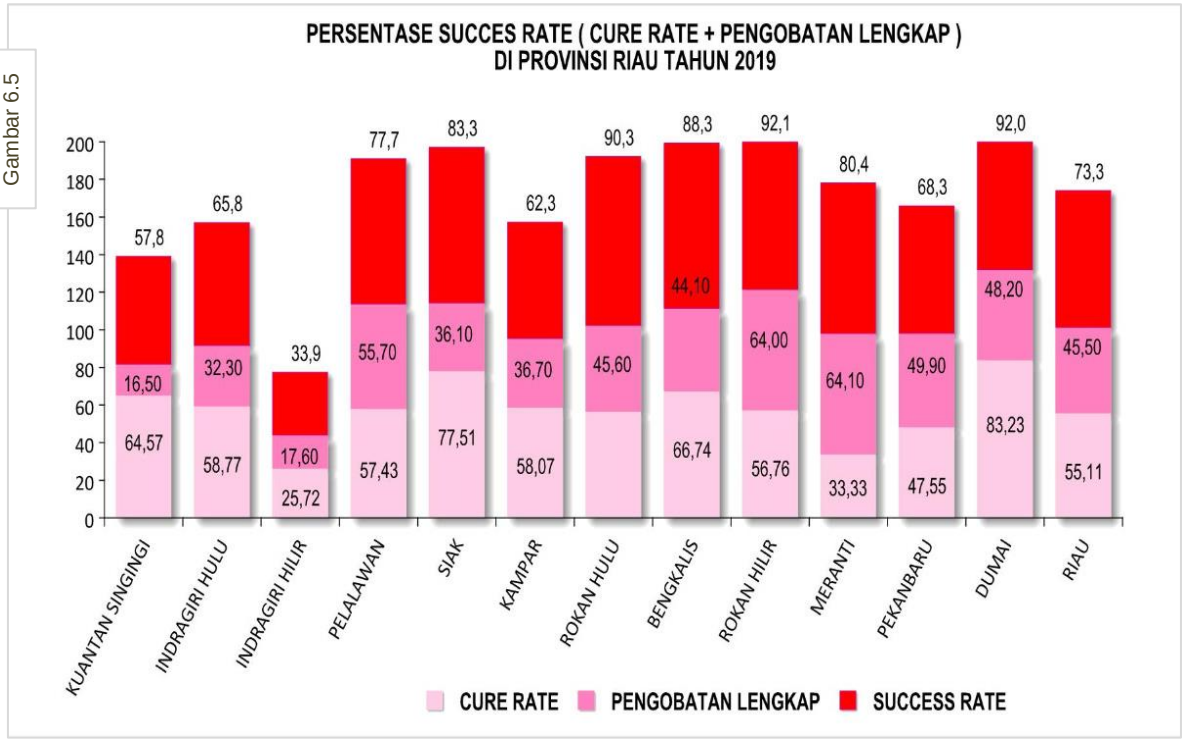
Trend capaian indikator utama Tuberkulosis tahun 2019, CNR (Case Notification Rate) penemuan semua kasus Tuberkulosis mengalami penurunan menjadi 134 per 100.000 penduduk, dari tahun sebelumnya. Sedangkan indikator CDR (Case Detection Rate) penemuan kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan dari perkiraan jumlah semua kasus sebanyak 35,1% dengan angka keberhasilan pengobatan/Sukses Rate (kesembuhan + pengobatan lengkap) masih rendah yaitu 73% (Target nasional = 90%; Renstra = 76%).



Penemuan semua kasus Tuberkulosis di Provinsi Riau berjumlah 11.344 orang dan yang ditemukan kasus Tuberkulosis paling tinggi di Kota Pekanbaru, berjumlah 2.903 orang, dikarenakan selain jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, dan juga sebagai pusat rujukan layanan kesehatan di Provinsi Riau. Kabupaten /kota lainnya yang banyak ditemukan kasus Tuberkulosis yaitu Rokan Hilir, Kampar dan Rokan Hulu. Hal ini sesuai dengan grafik di gambar 6.1 tentang penjaringan terduga Tuberkulosis yang paling banyak di Kota Pekanbaru, dan Rokan Hilir.

Banyaknya jumlah penjaringan terduga Tuberkulosis yang ditemukan, berbanding lurus dengan penemuan kasus Tuberkulosis di suatu wilayah. Penemuan kasus dengan kontak tracing (penelusuran) dan traking (pelacakan) di Puskesmas merupakan upaya preventif dan promotif yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan Tuberkulosis.

Gambar 6.5



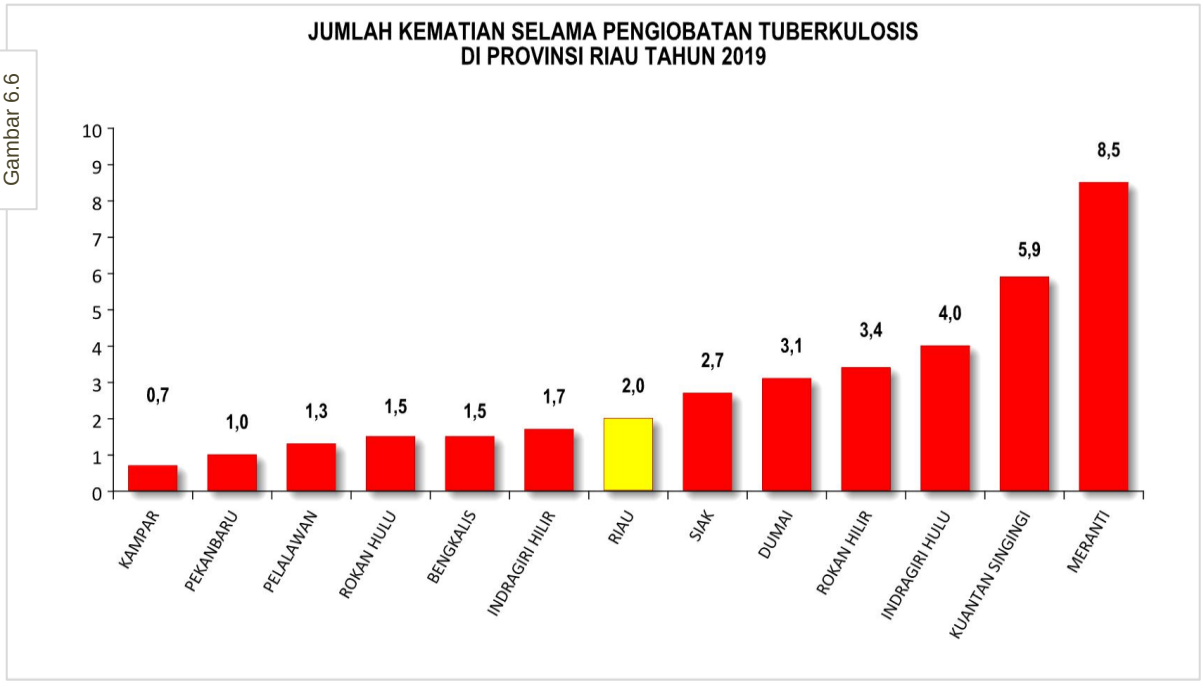
Dari uraian diatas, penemuan kasus Tuberkulosis yang memenuhi standar kesehatan adalah diagnosa melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, sesuai yang tercantum di Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan, dimana keberhasilan pengobatan Provinsi Riau mencapai 73,2% (Sukses Rate target Renstra 2014-2019 = 76%, dan target nasional 90 %).

Dan berdasarkan Pedoman Program Penanggulangan Tuberkulosis tercantum di Permenkes nomor 67 tahun 2016, untuk meminimalisir dan memutus mata rantai

penularan, bahwa persentase penemuan kasus Tuberkulosis dengan pemeriksaan bakteriologis (keberhasilan pengobatan cure rate/sembuh) yang diperbolehkan target ≥ 65% dan penemuan dengan pemeriksaan klinis atau keberhasilan pengobatan lengkap yang diperbolehkan ≤ 35%. Sedangkan capaian keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Riau, capaian angka kesembuhan / cure rate kurang dari target yaitu 55,11 % (target ≥ 65%) dan persentase pengobatan lengkap telah melebihi target yang diperbolehkan yaitu 45,50 % (target ≤ 35%).

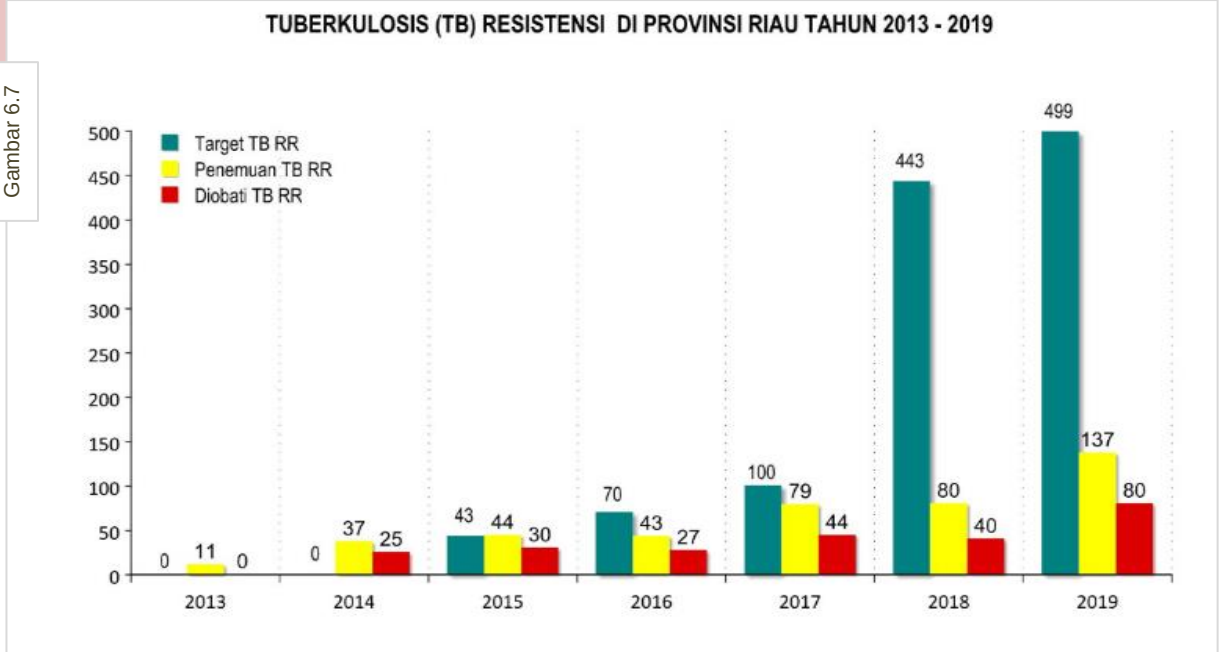
Keberhasilan pengobatan/Sukses Rate (sembuh + pengobatan Lengkap) yang masih rendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (33,3%), Kuantan Singingi (57,8%) dan Kampar (62,3%). kabupaten/kota yang telah memenuhi target Renstra 76% yaitu Kabupaten Rokan Hulu (90,3%), Rokan Hilir (92,1%), dan Kota Dumai (92%)

Gambar 6.6



Persentase angka kematian akibat Tuberkulosis memenuhi target yaitu 2% (target ≤ 4%). Kabupaten yang tinggi persentase angka kematiannya diakibatkan oleh Tuberkulosis yaitu Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi. Angka kematian yang tinggi diakibatkan, antara lain keterlambatan penanganan kasus, kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang penyakit Tuberkulosis, penanganan pasien di layanan kesehatan yang tidak adekuat/ tidak sesuai standar yang telah ditetapkan, dan jauhnya jangkauan layanan kesehatan, serta mempunyai penyakit penyerta/ komorbite dengan Tuberkulosis yang akan makin memperburuk kondisi pasien bahkan dapat menyebabkan kematian, seperti Tuberkulosis dengan diabetes militus (TB-DM), resistensi (TB MDR), Tuberkulosis dengan HIV/AIDS (TB-HIV).

Gambar 6.7



Target penemuan kasus Tuberkulosis Resistensi (TB RO) mulai tahun 2018 empat kali lebih besar dari tahun sebelumnya dan capaian penemuan kasus Tuberkulosis Resistensi Rifampisin (TB RR) dan yang bersedia untuk diobati di tahun 2019 mengalami peningkatan. Permasalahan Tuberkulosis semakin bertambah dengan munculnya pandemi HIV/AIDS didunia karena dengan terjadinya koinfeksi dengan HIV akan meningkatkan risiko kejadian Tuberkulosis secara signifikan. Dan pada saat yang sama, kekebalan ganda kuman Mycobacterium Tuberculosis terhadap obat anti tuberkulosis lini pertama (TB Resisten Obat) semakin sulit diobati. Tahun 2019 penemuan kasus Tuberkulosis resistensi sebanyak 137 orang (target =499 orang) dan yang bersedia untuk diobati hanya 80 orang.

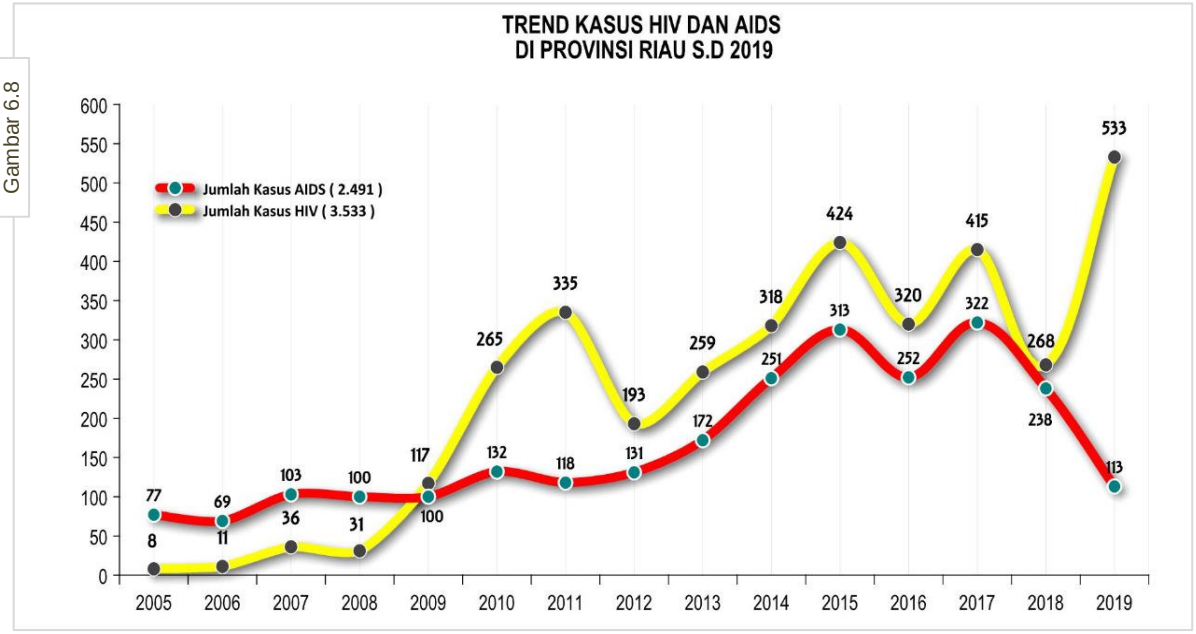
2. HIV dan AIDS

HIV/AIDS (Human Imonudeficiency Virus) merupakan sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah sekelompok gejala penyakit kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Program pengendalian HIV bertujuan untuk: 1.) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2.) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; 3.) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Penderita HIV dapat mempertahankan hidupnya dengan minum obat anti retroviral (ARV) rutin seumur hidup dalam waktu tertentu karena obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Sedangkan penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir.

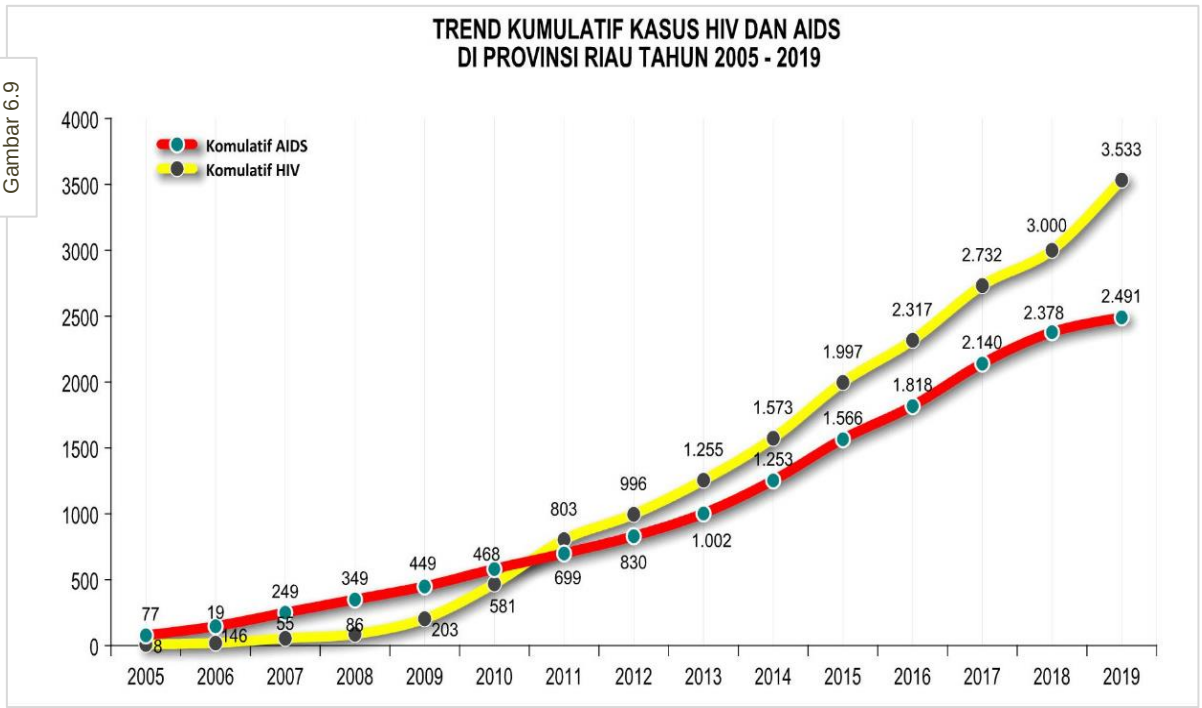
Ketika seseorang sudah menderita AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Satu orang dengan 2 penyakit yaitu TB-HIV semakin bertambah dengan munculnya koinfeksi dengan Tuberkulosis (TB-HIV).

Gambar 6.8



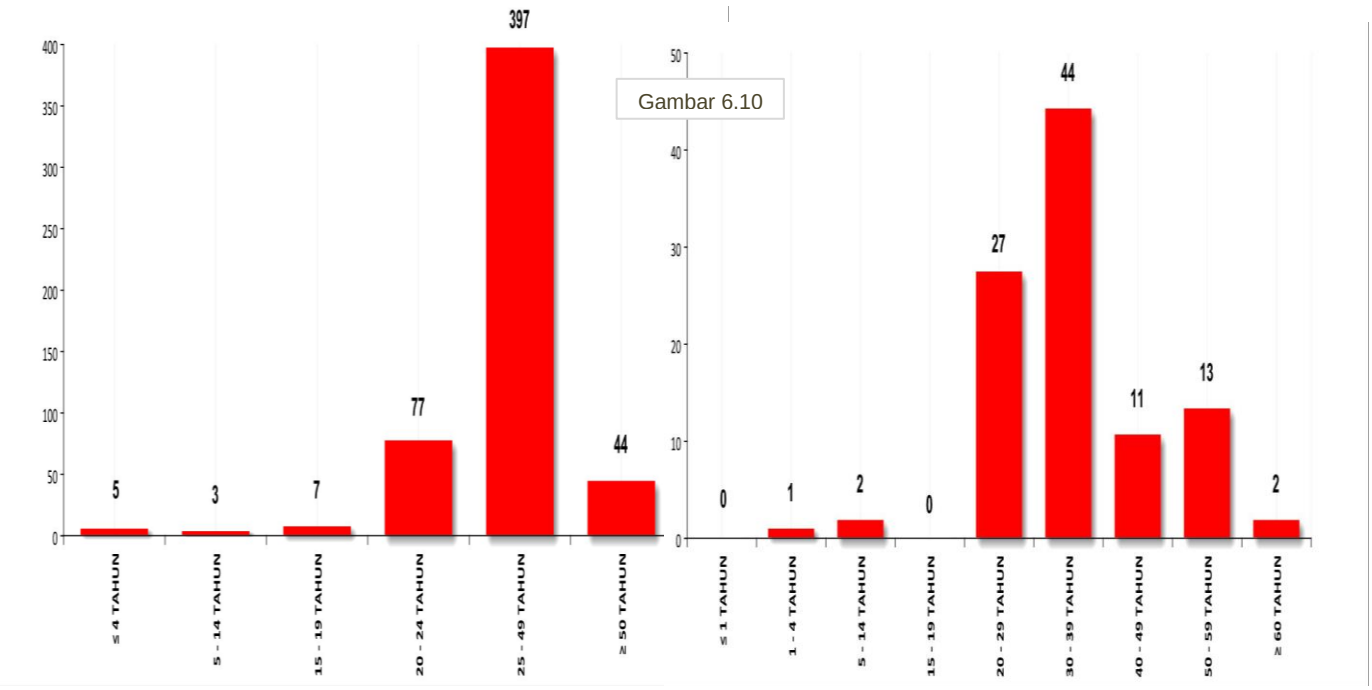
Jumlah penderita HIV tahun 2019 meningkat dua kali lipat dari tahun 2018 sebanyak 268 kasus menjadi 533 kasus. Sedangkan di tahun 2019 jumlah kasus AIDS berbanding terbalik dengan jumlah kasus HIV yang meningkat drastis, dimana tahun 2018 ditemukan 238 kasus turun menjadi 113 kasus. Dengan demikian pengawasan dan pengobatan ARV pada ODHA berjalan dengan baik.

Gambar 6.9



Tetapi, jika dilihat dari trend komulatif jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan secara komulatif dan AIDS dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Jumlah kasus HIV yang dilaporkan secara komulatif dari tahun-tahun sebelumnya, dan di kondisi tahun 2019 menjadi 3.533 kasus dan kasus AIDS sebanyak 2.491 kasus.

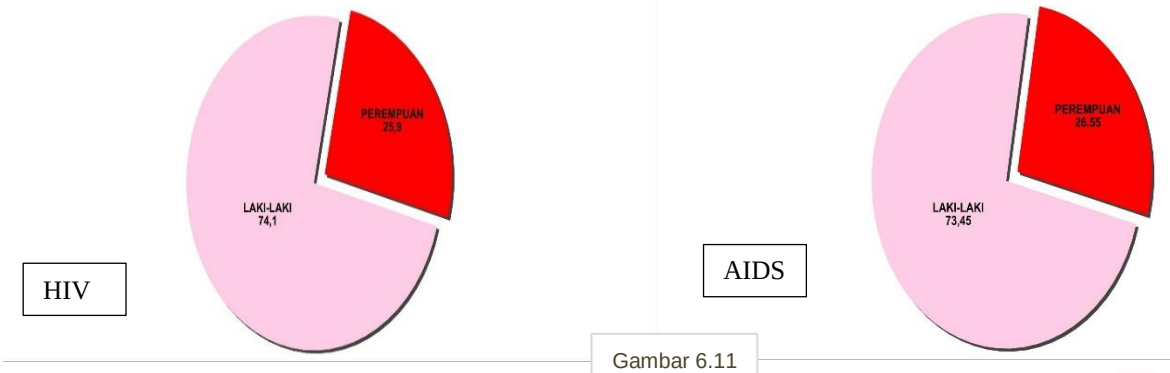
Jumlah kasus Baru HIV dan AIDS di Provinsi Riau



Gambar 6.10

Penderita HIV dari kelompok umur kebanyakan dari usia produktif, umur antara 25 sampai 49 tahun ditemukan sebanyak 74% (397 kasus) dari total semua kelompok umur penderita HIV. Sedangkan penderita AIDS kelompok umur yang paling banyak umur antara 30 sampai 39 tahun sebanyak 44 kasus.

Proporsi HIV dan AIDS Menurut Jenis Kelamin Provinsi Riau Tahun 2019

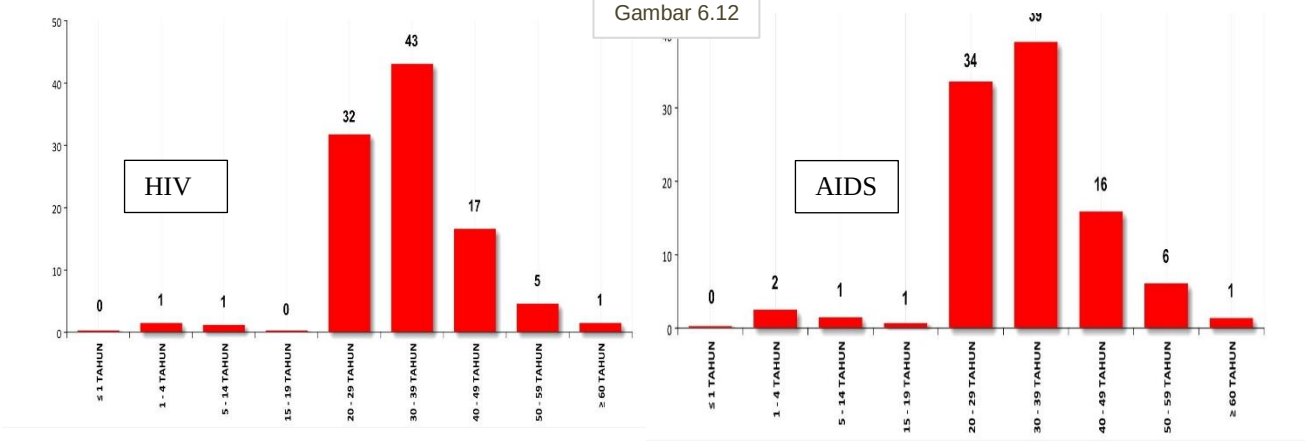


Gambar 6.11

Kasus HIV dan AIDS yang ditemukan dan dilaporkan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki untuk HIV sebanyak 74,1% dan kasus AIDS sebanyak 73,4%

Proporsi Kematian HIV dan AIDS Menurut Kelompok Umur
Provinsi Riau Tahun 2019

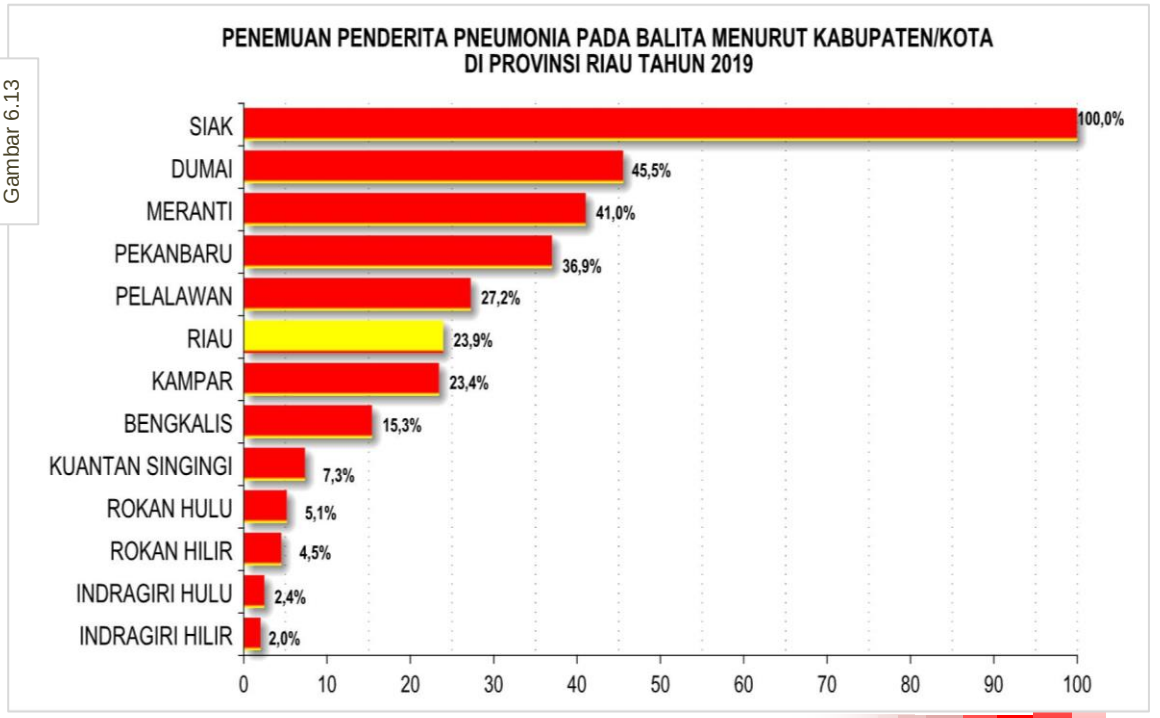
Gambar 6.12



Dilihat dari grafik diatas, pada kondisi tahun 2019 kasus HIV maupun AIDS yang tinggi pada kelompok umur produktif antara 20-49 tahun. Trend jumlah kasus HIV di Provinsi Riau meningkat dari 268 kasus di tahun 2018 menjadi 533 kasus di tahun 2019. Sedangkan kasus AIDS dari tahun 2005-2018 menjadi semakin bertambah karena pasien HIV jika tidak mengikuti anjuran dokter terapi rutin antiretroviral (ARV), maka cenderung mengalami infeksi oportunistik dan terkena AIDS.

3. Pneumonia

Gambar 6.13

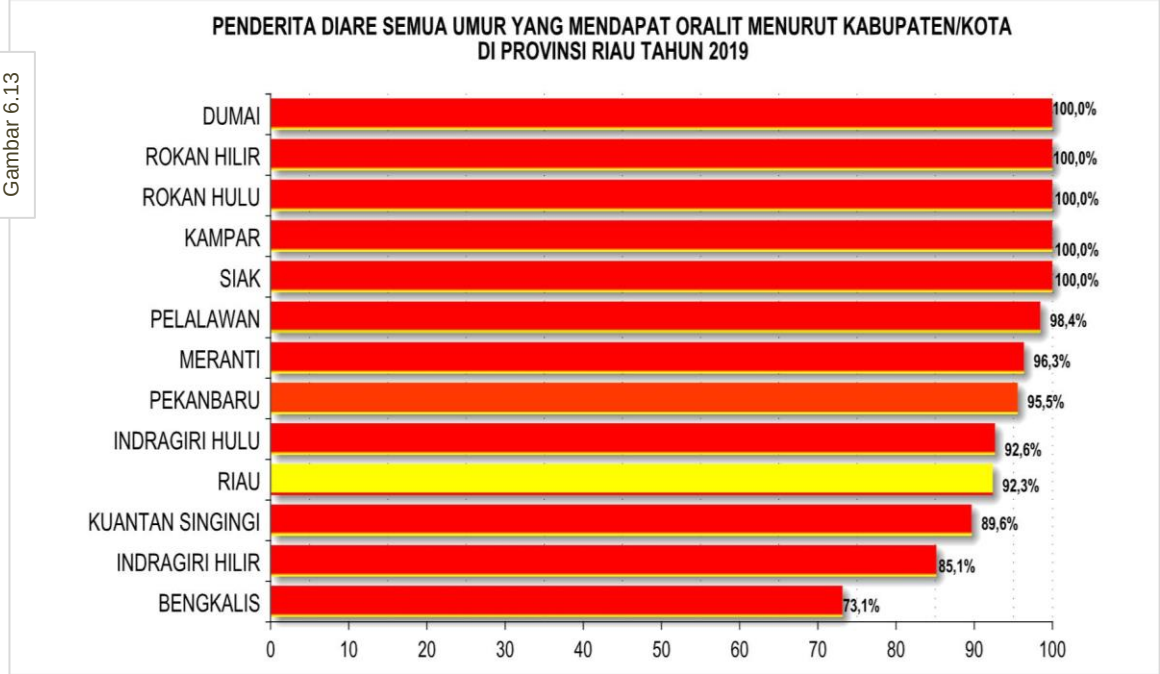


Pneumonia pada balita tahun 2019 di Provinsi Riau sebanyak 23,9%, dan ditemukan >100% di Kabupaten Siak. Pneumonia adalah pembunuh utama pada balita di dunia, data WHO angka kematian pneumonia pada balita berada pada peringkat pertama. Faktor resiko terjadinya pneumonia pada balita antara lain : kurangnya pemberian ASI eksklusif, qizi buruk, dan polusi udara di indoor, Bayi Baru Lahir Rendah, serta kepadatan dan kurangnya imunisasi campak.

4. Diare

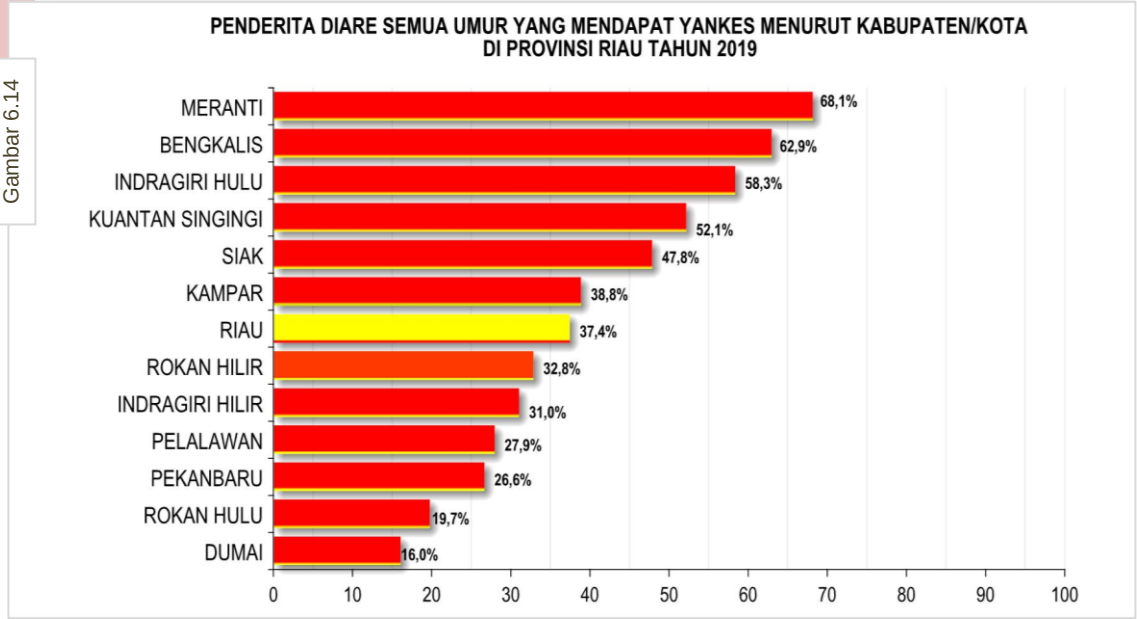
Kasus diare masih tinggi di Provinsi Riau 92,3% karena morbiditas dan mortalitas yang masih tinggi dan pengobatan yg tidak adekuat serta pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam upaya penanggulangan darurat penyakit diare. Target cakupan pelayanan penderita Diare semua umur (SU) yang datang ke sarana kesehatan adalah 10% dari perkiraan jumlah penderita Diare SU (Insidens Diare SU dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Tahun 2018 jumlah penderita diare SU yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 80.498 penderita (42,9%) dan terjadi penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi 70.348 penderita atau 37,4% dari perkiraan diare di sarana kesehatan. Insiden diare semua umur secara nasional adalah 270/1.000 penduduk (Rapid Survey Diare tahun 2015).

Gambar 6.13



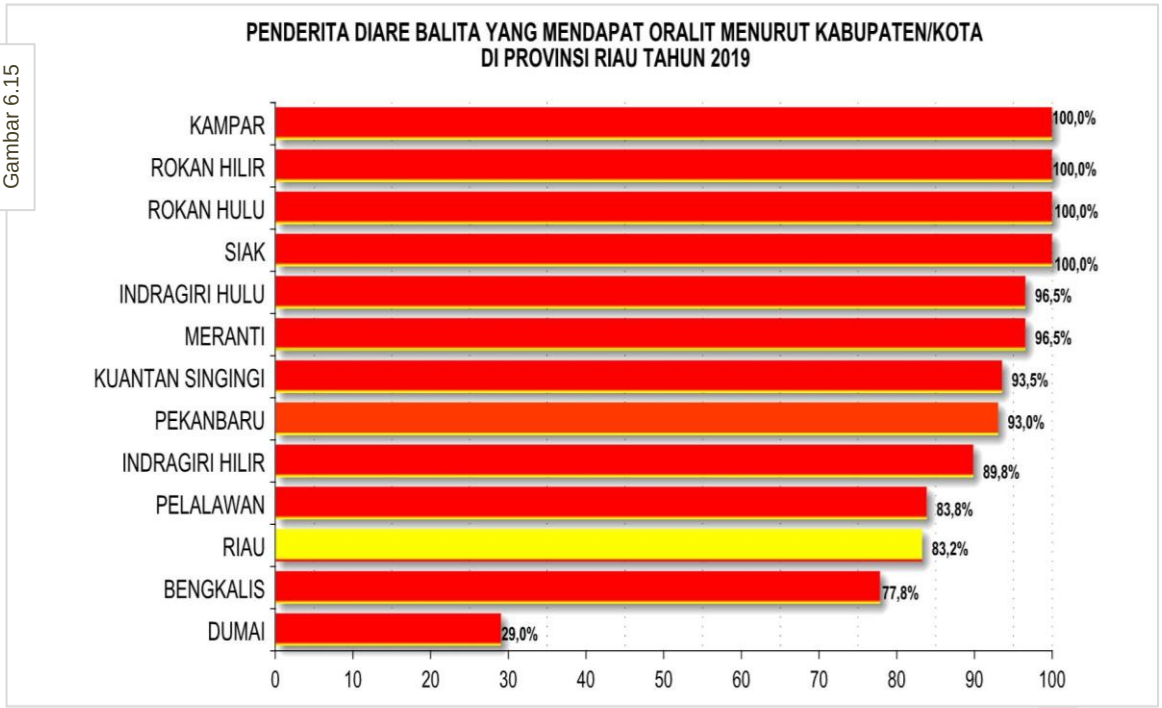
Penderita Diare semua umur mayoritas telah mendapatkan oralit sebanyak 92,3%, bahkan kabupaten/kota yg telah mencapai 100% yaitu Kota Dumai, Rokan hilir, Rokan Hulu, Kampar, Siak, sedangkan Kabupaten yang pemberiannya paling rendah yaitu Kabupaten Bengkalis 73%.

Gambar 6.14



Sedangkan kasus diare semua umur yang mendapatkan layanan kesehatan sekitar 37,4%, yang capaiannya masih rendah yaitu Kota Dumai 16%, Kabupaten Rokan Hulu 19,7% dan Kota Pekanbaru 26,6%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingginya pengetahuan masyarakat tentang penanganan pertolongan pertama penyakit diare, dan masyarakat telah mandiri dapat menanggulangi penyakitnya sendiri Kasus diare pada balita yang mendapatkan layanan kesehatan dengan pemberian mineral seng atau zinc (Zn) di kabupaten/kota rata-rata sudah baik sekitar >80%.

Gambar 6.15



Target cakupan pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan adalah 20% dari perkiraan jumlah penderita diare balita (Insidens diare balita dikali jumlah balita di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Tahun 2019 jumlah penderita diare balita yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 28.466 (4,1%) dari perkiraan diare di sarana kesehatan. Diare pada balita yang mendapatkan oralit di Provinsi Riau rata-rata 83,2%.

Gambar 6.16

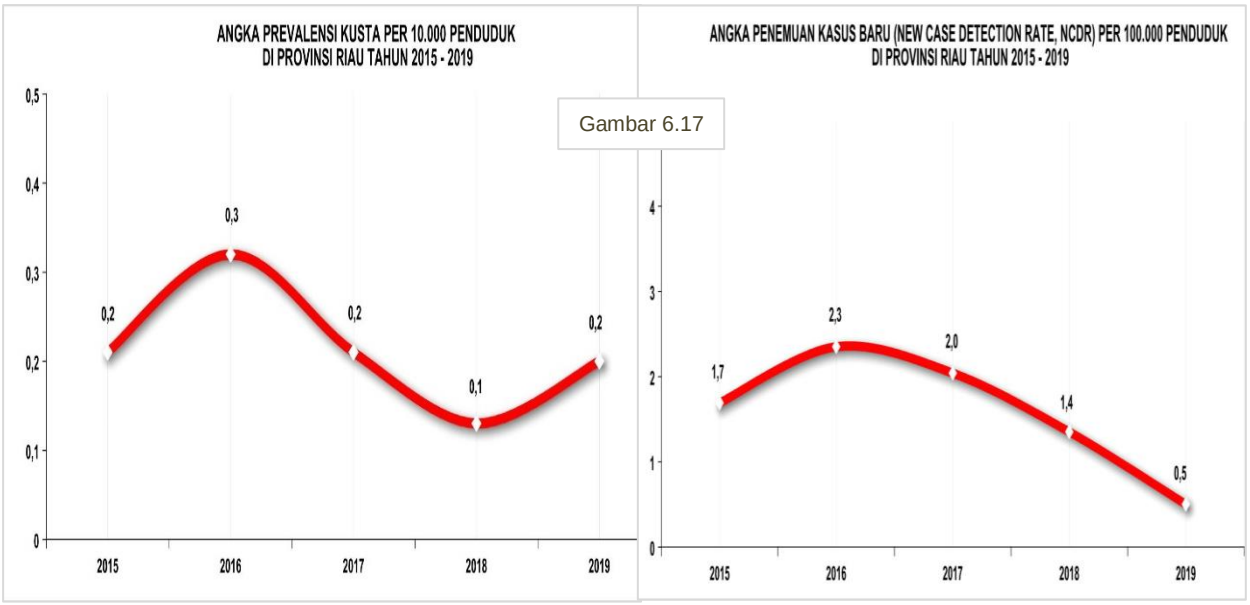


Pemberian oralit saja tidak cukup karena diare pada anak sangat erat kaitannya dengan defisiensi dan kekurangan Zinc dan sering terjadi pada anak kekurangan qizi. Zinc merupakan mikronutrien dalam berbagai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Manfaat penggunaan Zinc agar anak penderita diare kebal terhadap penyakit diare selama 3 bulan berikutnya.

Analisanya bahwa masyarakat telah mengetahui manfaat tablet zinc untuk mencegah kematian akibat diare dan tidak cukup hanya dengan pemberian oralit saja, untuk perbaikan mukosa usus dan mempercepat pemulihan anak pasca diare. Dari data diatas terlihat bahwa penanggulangan penyakit diare dengan pemberian oralit (92,9%) lebih tinggi dibandingkan pemberian Zinc (94,8%).

5. Kusta/Leprae

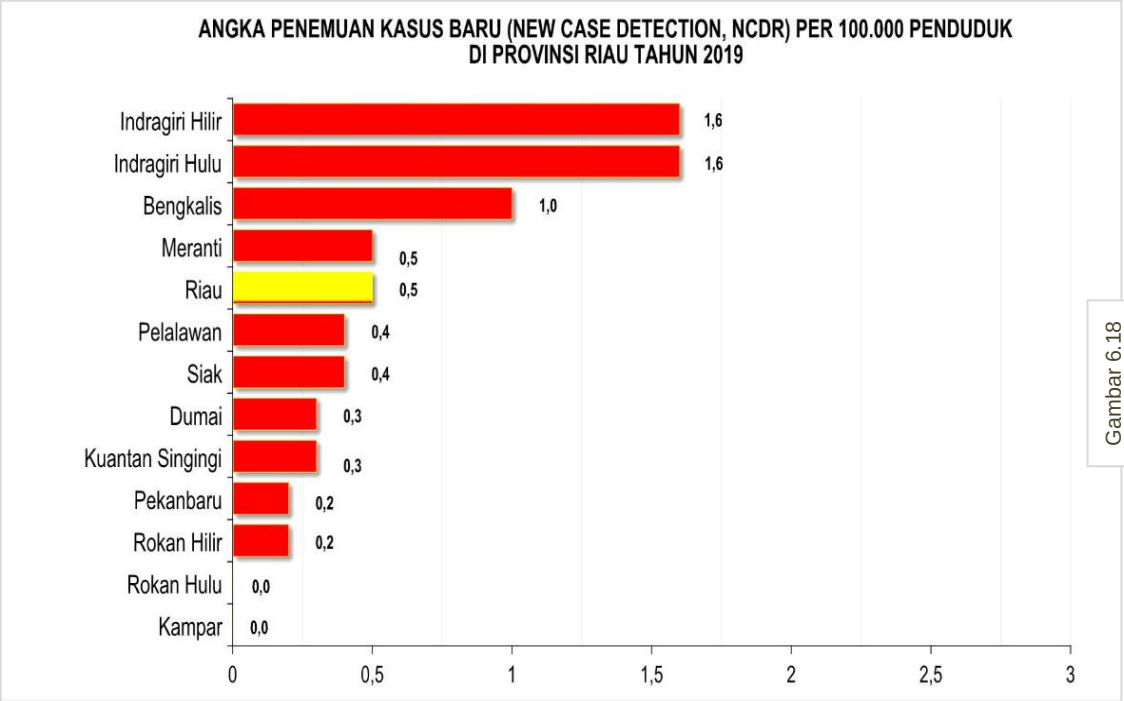
Penyakit ini terjadi di banyak negara terutama negara dengan iklim tropis atau subtropis seperti Indonesia. Penyakit ini dulunya ditakuti sebagai penyakit yang sangat menular dan mematikan, penderita kusta sering di kucilkan oleh masyarakat. Saat ini, lepra sudah bisa diobati dengan efektif dan penularannya pun bisa ditekan. Penyakit kusta disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Leprae* , atau disebut juga lepra atau penyakit Hansen yang menyebabkan borok kulit, kerusakan saraf, dan kelemahan pada otot bahkan dapat menyebabkan cacat parah dan cacat signifikan.



Gambar 6.17

Dilihat dari tabel diatas untuk Prevalensi penyakit kusta di Provinsi Riau tahun 2015 – 2019 trendnya cenderung meningkat menjadi 0,2 per 10.000 atau < 1 per 10.000 penduduk dan penemuan kasus baru New Case Detection Rate (NCDR) ditemukan 0,5 per 100.000 penduduk atau < 1 /100.000 penduduk.

Setelah lima tahun, tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta mulai muncul, seperti kulit mengalami bercak putih, merah, rasa kesemutan bagian anggota tubuh hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen atau cacat pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.



Gambar 6.18

Pada tahun 2018 lalu, Provinsi Riau telah mendapatkan sertifikat eliminasi kusta secara keseluruhan sementara eliminasi kabupaten/kota belum terpenuhi secara menyeluruh, karena masih ditemukan kasus kusta baru di beberapa Kabupaten/kota. Tahun 2019 ditemukan penderita kusta baru sebanyak 35 orang, rata-rata ± 1- 2 orang di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Bengkalis.

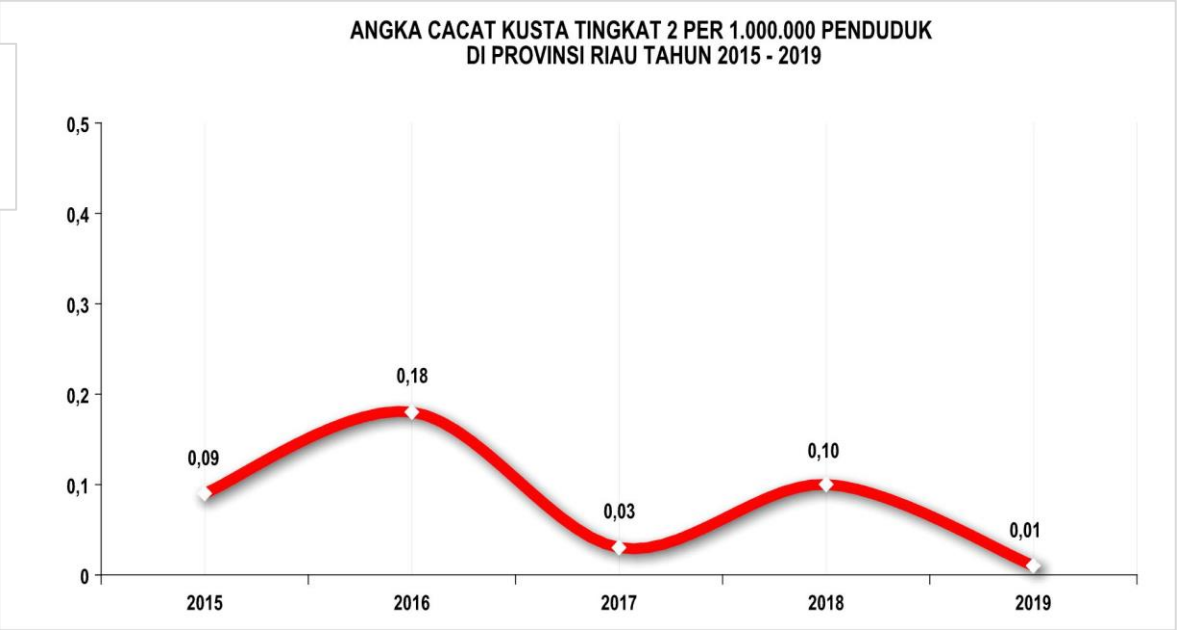


Gambar 6.19

Kebanyakan penderita kusta berasal dari golongan ekonomi lemah, sangat lambat perkembangan penularannya dengan masa inkubasi sekitar 5 tahun dan gejalanya dapat memakan waktu selama 20 tahun. Berdasarkan hasil riset penularan kusta berpengaruh terhadap jenis kelamin. Dan berdasarkan Proporsi penderita baru

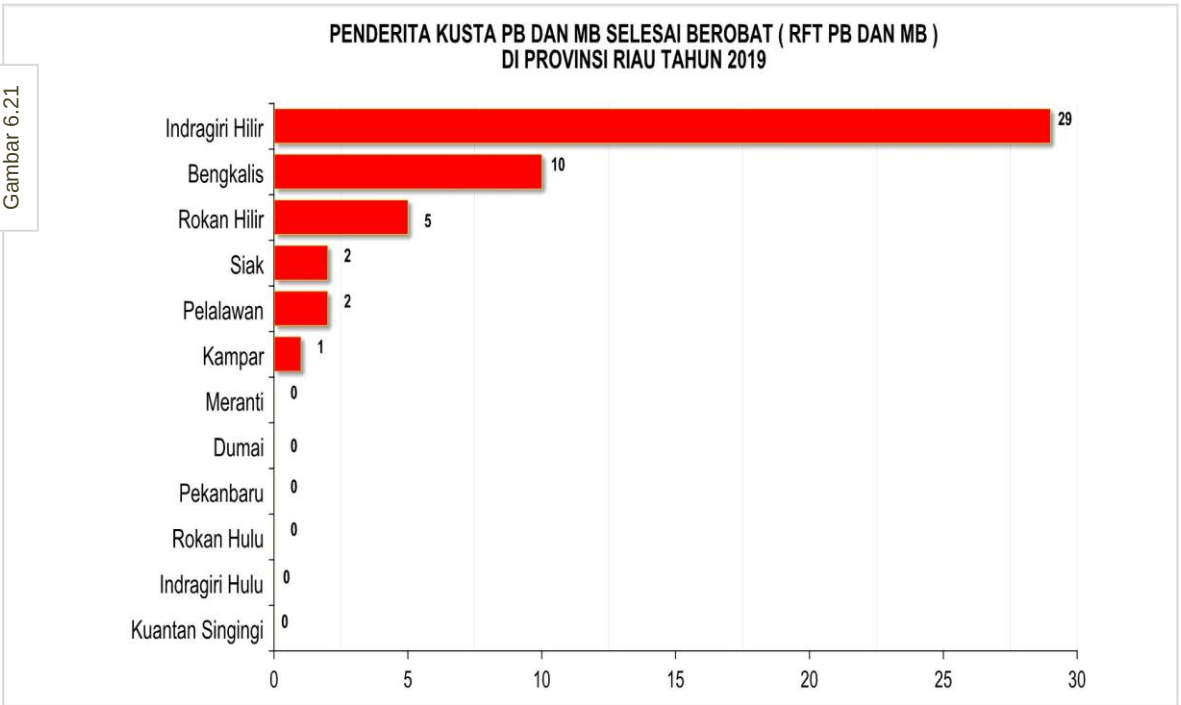
kusta Provinsi Riau tahun 2019, lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki daripada perempuan dengan perbandingan rasio 1 : 2.

Gambar 6.20



Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Riau tergolong dalam *low burden* untuk kasus Kusta karena penemuan kasus baru kusta tahun 2019 (< 10 per 1.000.000 penduduk), yaitu 0,01 per 1.000.000 penduduk dan NCDR per kabupaten/kota tidak melebihi target nasional (< 5 per 100.000 penduduk).

Gambar 6.21

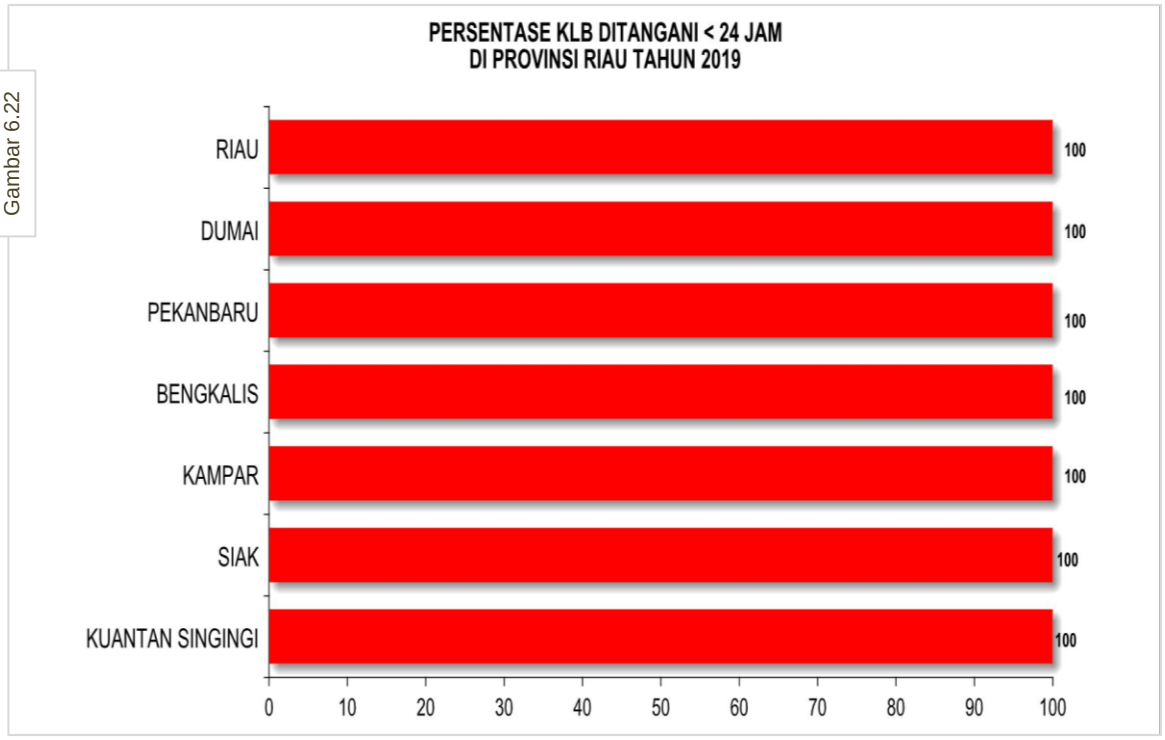


Tahun 2019, ditemukan kasus baru penderita kusta di Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis dan Rokan Hilir. Kabupaten yang paling banyak ditemukan penderita penyakit kusta yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 29 orang. Jumlah penderita kusta di Provinsi Riau ditemukan sebanyak 35 orang yang sedang menjalani pengobatan.

6. Kejadian Luar Biasa

Kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia masih cukup menjadi perhatian dunia kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh tingginya angka KLB menjadi salah satu indikator kesuksesan upaya preventif bidang kesehatan dalam bidang surveillans epidemiologi.

Gambar 6.22



Apabila KLB terjadi di suatu daerah, maka tim surveillans epidemiologi harus cepat melaksanakan penyelidikan epidemiologi (PE) guna untuk mencegah distribusi penyakit. Target propinsi Riau untuk krisis kesehatan termasuk KLB yang dilakukan penanggulangan < 24 jam di Propinsi Riau yaitu 100%. Sedangkan kabupaten/kota yang lain tidak ada kejadian luar biasa.

7. Hepatitis (HbsAg)

HBsAg adalah kepanjangan dari Hepatitis B surface Antigen, yang merupakan antigen permukaan virus hepatitis B. Pemeriksaan HBsAg dilakukan untuk memastikan diagnosis hepatitis B. Jika hasil pemeriksaan HBsAg positif, berarti Anda terinfeksi virus hepatitis B (VHB) dan berisiko menularkan penyakit ini ke orang lain melalui darah atau cairan tubuh. Dan secara Nasional target Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil. untuk tahun 2020 yaitu 95% kabupaten/kota sudah melaksanakan DDHB Infeksi kronik hepatitis B sangat sering (lebih dari 90%) terjadi pada bayi yang terinfeksi dari ibunya. Angka penularan secara vertikal dari ibu pengidap Hepatitis B kepada bayinya cukup tinggi.

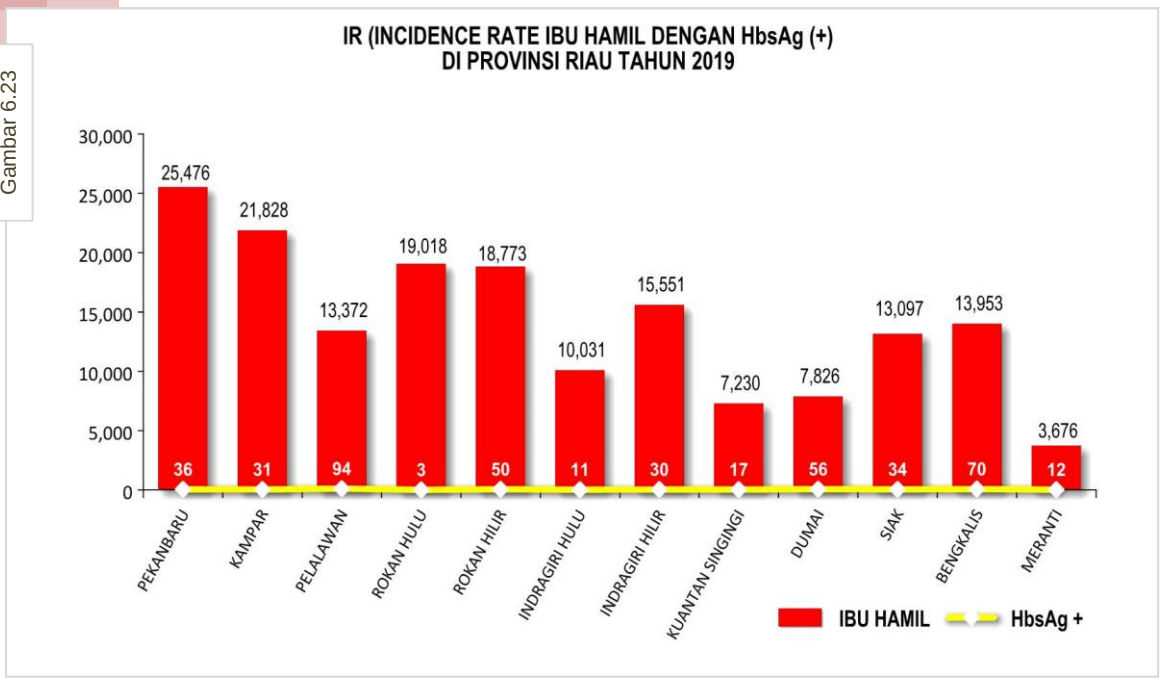
Indonesia sudah melakukan upaya pengendalian Hepatitis B sejak tahun 2014. Percepatan Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis tahun 2022 yang bekerja sama dengan program kesehatan keluarga, dan bertujuan untuk memutuskan rantai penularan secara komprehensif guna mencapai target yaitu 3 (tiga) Zero, yaitu (1). *zero new infection* (menurunnya jumlah kasus baru, serendah mungkin), (2.) *zero death* (menurunnya angka kematian), (3). *zero stigma and discrimination* (menurunnya tingkat diskriminasi serendah mungkin), dan peningkatan kualitas hidup. Data Subdit HISP (Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan) Kementerian Kesehatan RI tahun 2013-2015, menunjukkan bahwa daerah endemis hepatitis B umumnya menular dari ibu ke anak saat persalinan (transmisi perinatal) atau akibat perjalanan darah (transmisi horizontal). Sedangkan penularan pada anak, tidak terinfeksi dalam usia 5 tahun pertama kehidupan.

a) Menurunkan Prevalensi Rate HbsAg

Menurut badan Kesehatan Dunia (WHO) berdasarkan prevalensi HBsAg, endemisitas hepatitis suatu wilayah/Negara dapat dikategorikan Rendah (<2%),Sedang rendah (2-4%),Sedang tinggi (5-7%), dan Tinggi (>8%) .

Upaya pengendalian penyakit Hepatitis telah dilaksanakan di semua kabupaten/kota Propinsi Riau dan tahun 2020 semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota 100% telah dapat melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil.

Gambar 6.23



Dari data di atas terlihat bahwa Incidence Rate (IR) Hepatitis masih di bawah target WHO (*low endemic)*, tetapi harus diwaspadai bahwa belum semua kasus terjaring, mengingat hepatitis sering tidak disadari oleh masyarakat awam. Bagi penderita hepatitis B,C dan D (jarang) ditularkan secara *parenteral,* dapat menjadi kronis dan menimbulkan sirosis / kanker hati. Sedangkan, Hepatitis A dan E sering muncul sebagai kejadian luar biasa, ditularkan secara *fecal oral* dan biasanya berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, bersifat akut dan dapat sembuh dengan baik.

Dalam upaya pengendalian virus hepatitis, telah dilakukan 5 (lima) aksi utama yaitu : (a). peningkatan kesadaran, (b). kemitraan dan mobilisasi sumber daya, (c). pengembangan surveilance Hepatitis untuk mendapatkan data sebagai dasar untuk penyusunan respons penanggulangan, (d). memperkuat hukum dan peraturan, (e). upaya pencegahan secara komprehensif dan deteksi dini, serta tindak lanjutnya yang mencakup akses perawatan, dukungan dan pengobatan.

b) Jumlah Ibu Hamil per Puskesmas dengan HbsAg (+)

Penemuan Penderita Ibu Hamil dengan HbsAg (+) per Puskesmas dan Rumah sakit tahun 2019 seperti tergambar pada tabel di bawah ini :

Jumlah Ibu Hamil dengan HBsAg Per Puskesmas di Provinsi Riau Tahun 2019

No	Nama Puskesmas	Jml Ibu hamil	HBsAg (+)
1	Pekanbaru	25.476	36
2	Kampar	21.828	31
3	Pelalawan	13.372	94
4	Rokan Hulu	19.018	3
5	Rokan Hilir	18.773	50
6	Indragiri Hulu	10.031	11
7	Indragiri Hilir	15.551	30
8	Kuantan Singingi	7.230	17
9	Dumai	7.826	56
10	Siak	13.097	34
11	Bengkalis	13.953	70
12	Meranti	3.676	12
Total		169.831	444 (0,26%)

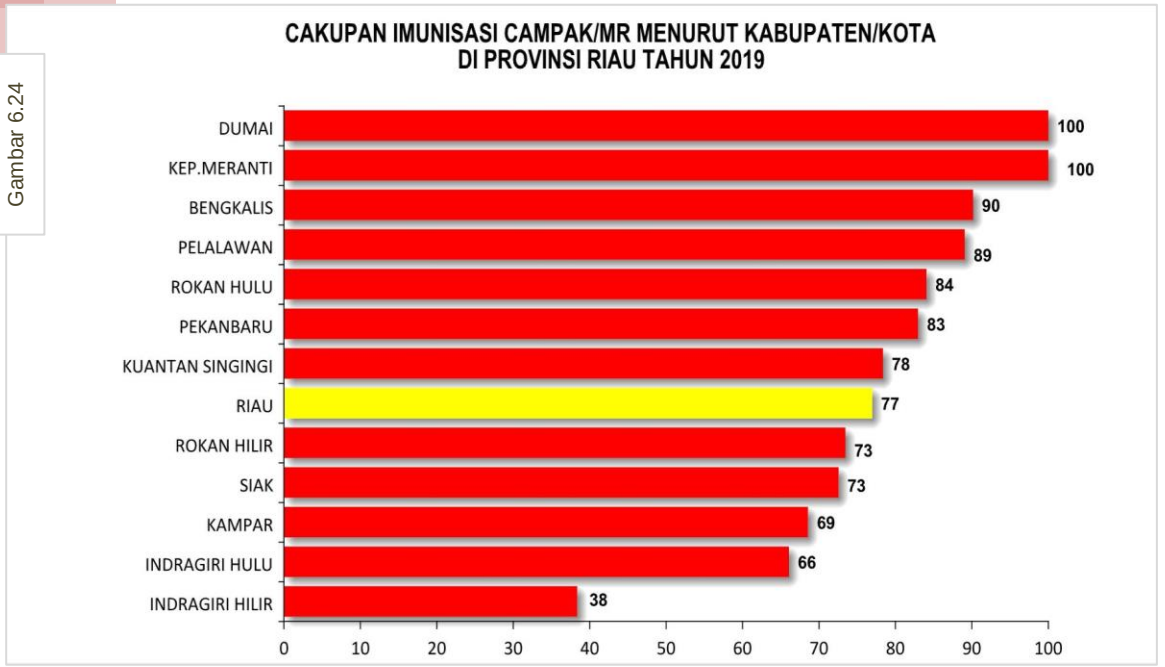
Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pasien Hepatitis (HbsAg (+)), setelah dilakukan deteksi dini ibu hamil dengan Hepatitis B, maka Insiden Rate pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,26 %, yang tahun sebelumnya hanya 0,16%. Dan presentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B dan C pada kelompok berisiko yaitu 90%, sudah memenuhi target.

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

1. Campak Mesles Rubella (MR)

Cakupan imunisasi campak / Measles Rubella (MR) Provinsi Riau tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 79% (target Renstra 95%). Pemberian imunisasi campak rutin untuk bayi usia minimal 9 bulan dan anak sekolah kelas 1 SD, mulai bulan September 2018 sudah diganti dengan imunisasi Measles Rubella (MR) setelah pelaksanaan kampanye imunisasi Measles Rubella (MR). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

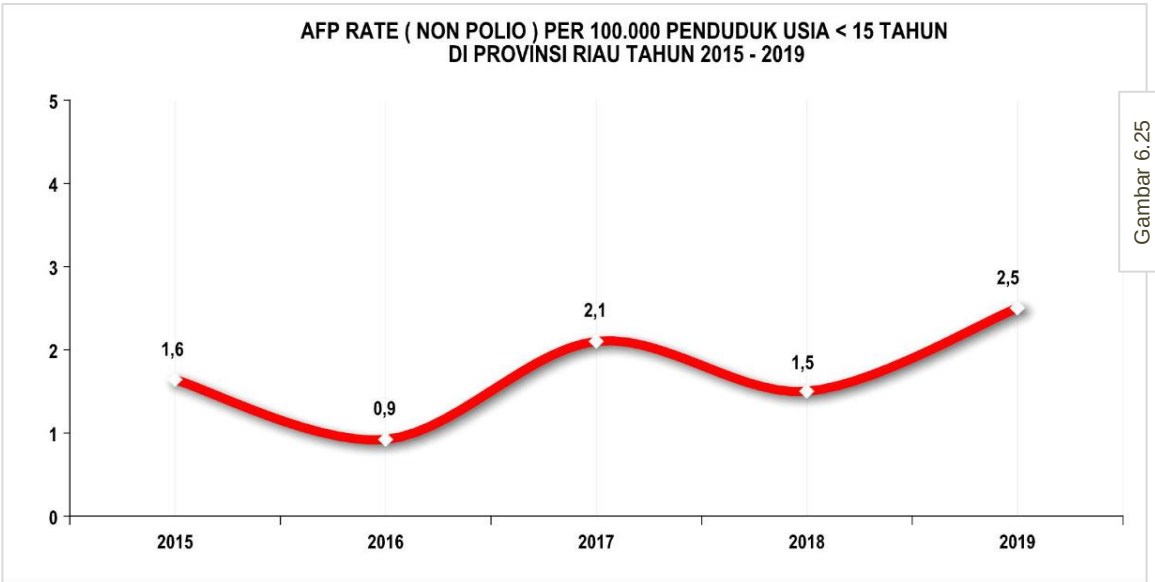
Gambar 6.24



Cakupan imunisasi Campak / Measles Rubella (MR) Provinsi Riau tahun 2019 telah mengalami peningkatan, meski belum mencapai target dengan pencapaian hanya 76,9% (target 95%). Kabupaten / Kota yang mencapai target hanya ada 2 Kabupaten yaitu Kota Dumai 108,7%, dan Kepulauan Meranti 100%. Kabupaten / Kota yang tidak mencapai target ada 10 Kabupaten / Kota dengan cakupan terendah Kabupaten Inhil 38,3%, Inhu 66%, Kampar 68,5%, Siak 72,5%, Rohil 73,4%, Kuansing 78,3%, Pekanbaru 82,9%, Rohul 84%, Pelalawan 89% dan Bengkalis 90,1%.

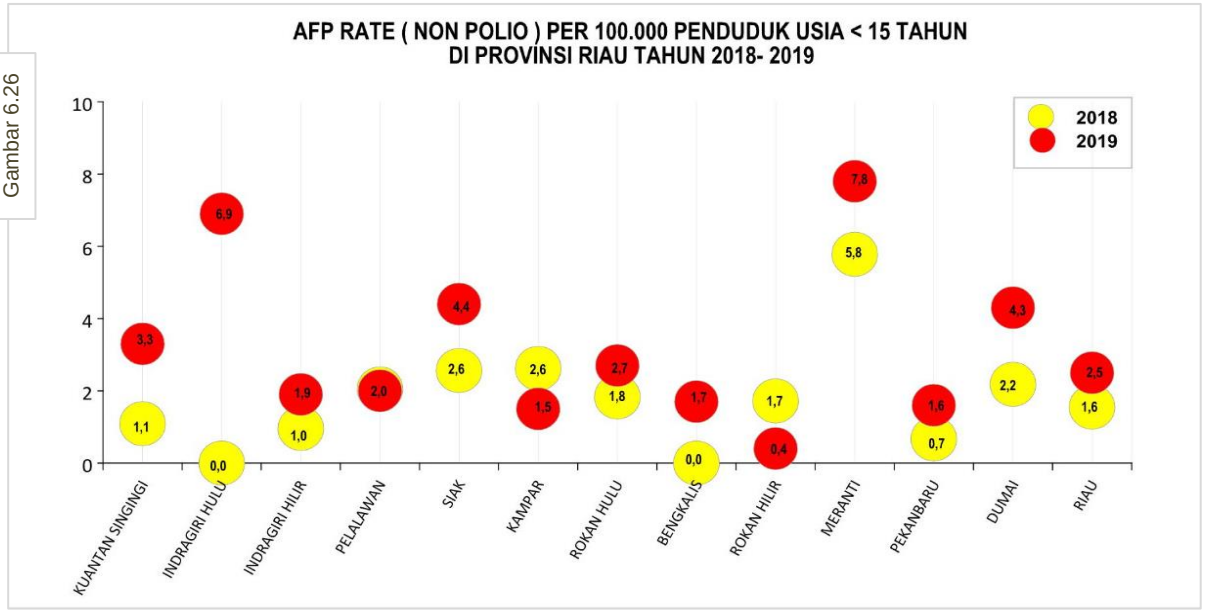
2. Acute Flaccid Paralysis (AFP)

Gambar 6.25



Dilihat dari trend kasus AFP tahun 2015-2019 terjadi peningkatan dan rata-rata ditemukan pertahun sekitar 2-3 orang per 100.000 penduduk dari jumlah penduduk usia < 15 tahun sebanyak 2.095.663.

Gambar 6.26



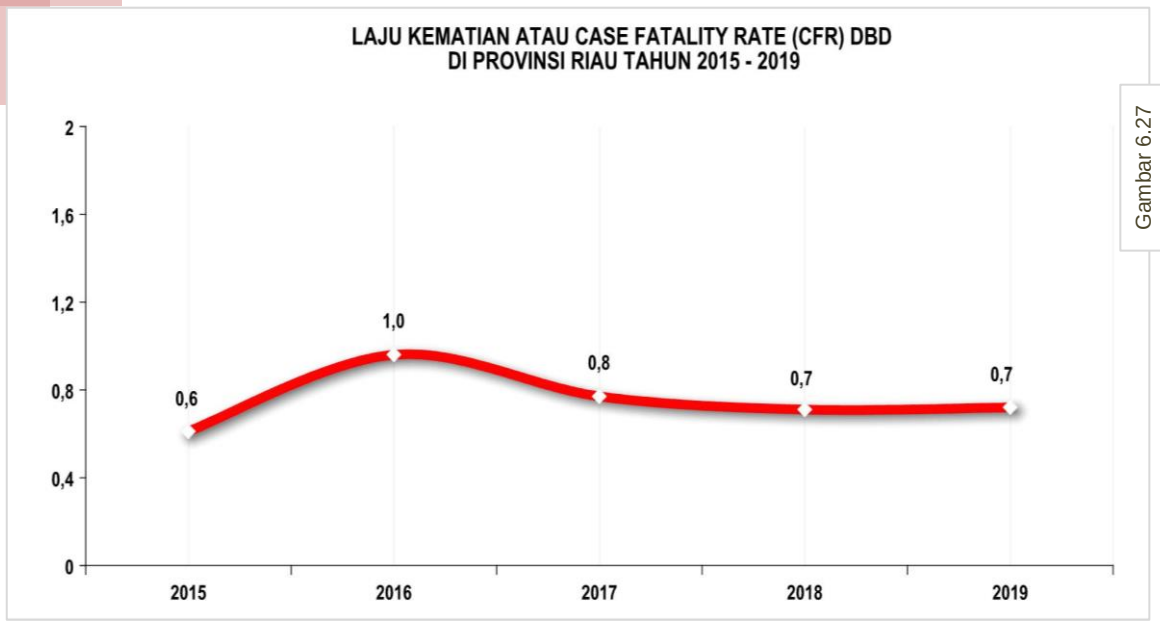
Acute Flaccid Paralysis (lumpuh layu) disebabkan oleh virus dan gejala polio dapat menimbulkan kelumpuhan dan lumpuh layu. Jumlah kasus AFP usia < 15 tahun yang ditemukan di Provinsi Riau sebanyak 53 orang. Peningkatan kasus ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu ditemukan 9 orang (6,9 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Siak ditemukan 7 orang (4,4 per 100.000 penduduk).

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus aedes, terutama Aedes aegypti atau albopictus. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dan berpotensial untuk terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan merupakan ancaman bagi masyarakat luas.

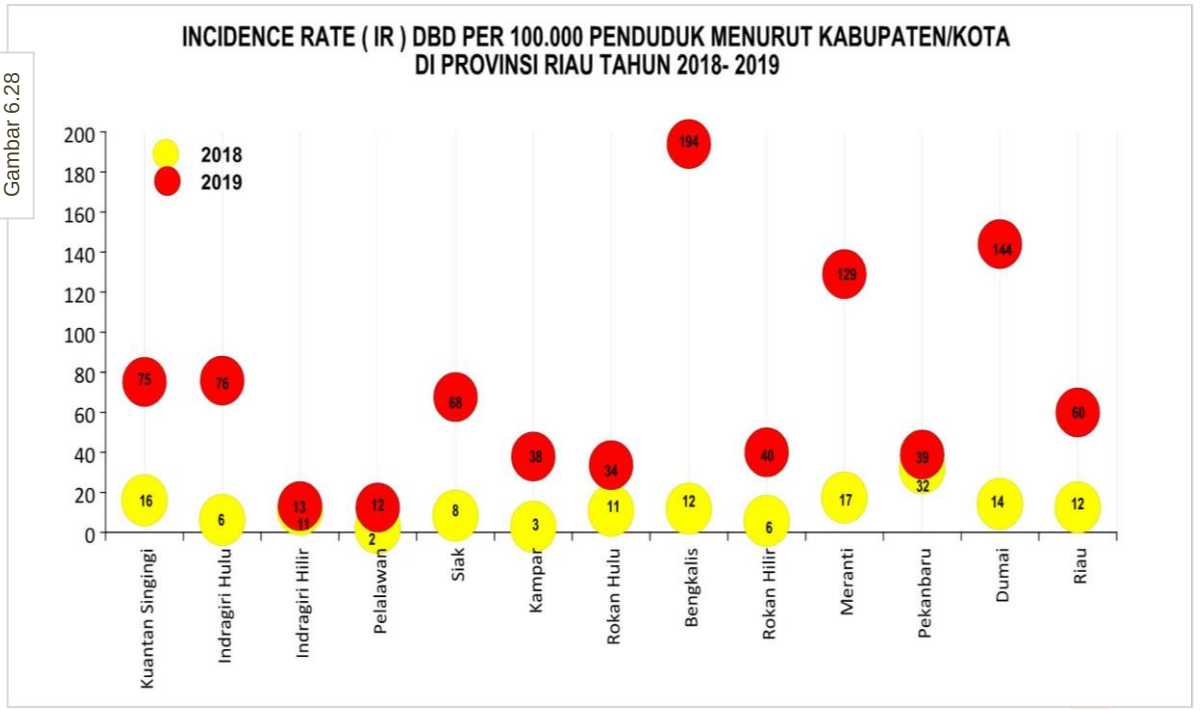
Provinsi Riau jumlah kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2019 sebanyak 4.135 orang dan angka kematian sebanyak 30 orang (IR/Angka kesakitan = 59,9 per 100.000 penduduk dan CFR / Angka kematian = 0,7%). Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan dimana IR / Angka kesakitan sebesar 12,44 per 100.000 penduduk.



Gambar 6.27

Laju kematian CFR Penyakit Demam Berdarah terjadi peningkatan tajam di tahun 2015 (0,6%) tetapi belum terjadi outbreaks dan dimulai tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi penurunan angka kematian akibat DBD. Dan menurut hasil pengamatan penyakit DBD akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi jika CFR >1%, dengan demikan pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kabupaten/kota yang memiliki CFR tinggi yakni Kabupaten Rohul 2,2%, dan Kabupaten Inhil 1%.

Gambar 6.28



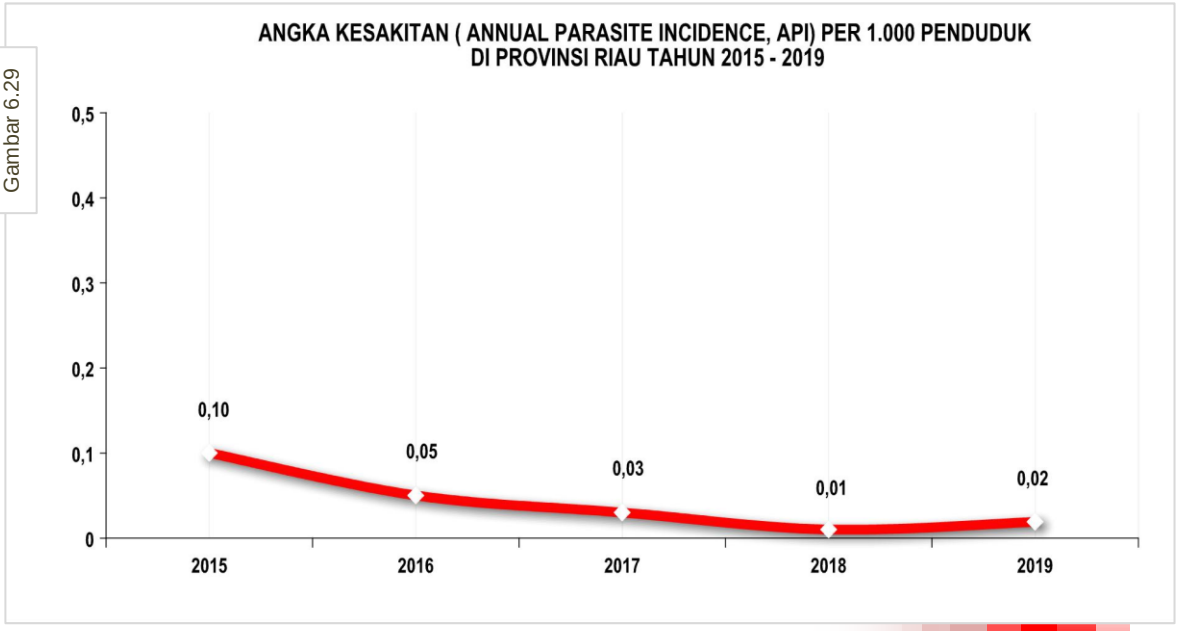
Kasus baru penyakit Demam Berdarah (incidence rate) Provinsi Riau tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari 12 per 100.000 menjadi 59,9 per 100.000 penduduk, dimana target yang telah ditentukan yaitu < 49 per 100.000 penduduk. Demikian juga hampir disemua kabupaten/kota terjadi peningkatan. Kabupaten yang mengalami peningkatan penemuan kasus DBD yang tinggi yaitu kabupaten Bengkalis, dimana tahun 2018 ditemukan 12 orang kasus DBD per 100.000 penduduk meningkat di tahun 2019 menjadi 194 per 100.000 penduduk.

2. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembangbiak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina. Di Provinsi Riau, hampir semua kabupaten/kota telah eliminasi malaria, hanya 2 (dua) kabupaten yang belum yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan secepatnya menuju eliminasi karena secara nasional 2030 Indonesia eliminasi Malaria

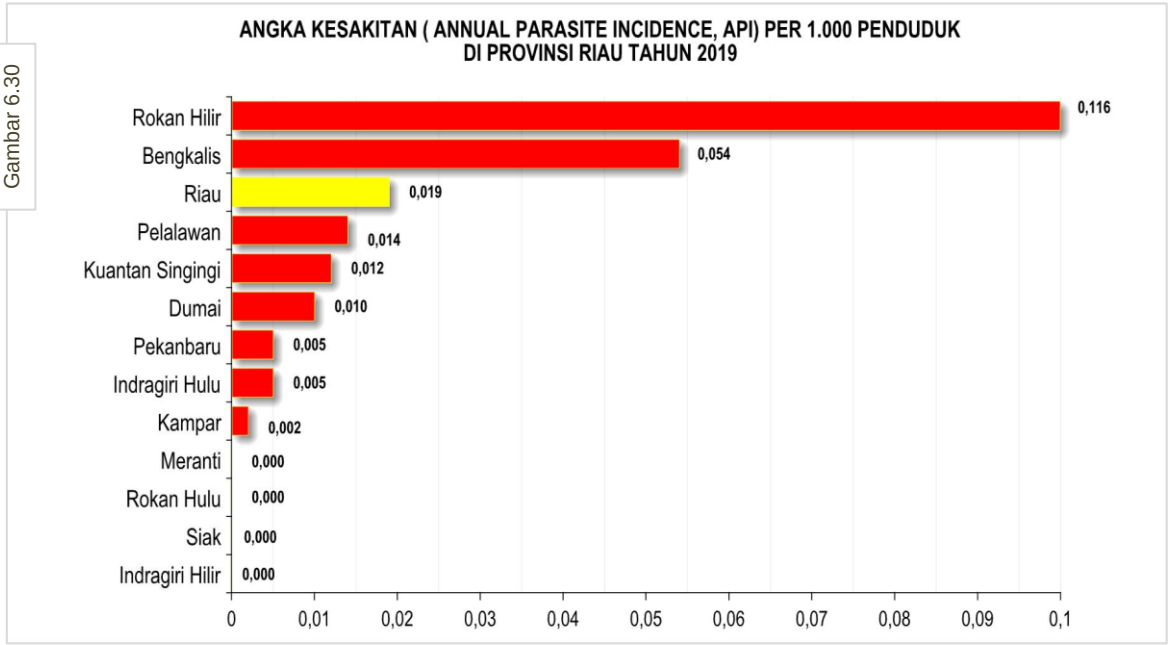
Untuk percepatan pencapaian target, kegiatan operasional program malaria di layanan kesehatan melaksanakan penemuan penderita malaria melalui *Pasif Case Detection, Active Case Detection* berupa *Mass Blood Survey* (MBS) dan *Mass Fever Survey* (MFS). Indikator Utama Program Malaria antara lain : (a). API (Annual Parasite Incidence) dengan penegakkan diagnosa kasus malaria (+) harus melalui pemeriksaan laboratorium sehingga tidak ada lagi kasus malaria (+) berdasarkan pemeriksaan klinis; (b). Slide Positive Rate < 5 % ; (c).tidak ada indigenous /penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut.

Gambar 6.29



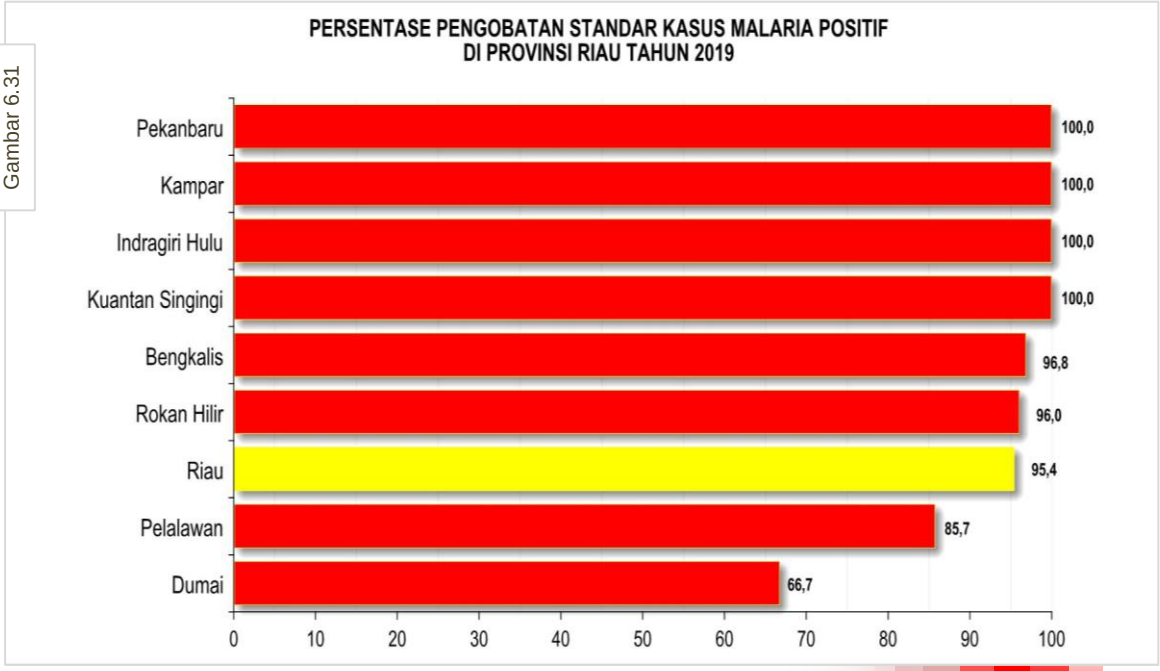
Annual Parasite Incidence (API) dengan konfirmasi laboratorium positif di Provinsi Riau dari Tahun 2015-2019 telah mengalami penurunan drastis dari 0,10 per 1.000 penduduk hingga mencapai 0,02 per 1.000 penduduk (target Renstra dan nasional API < 1 per 1.000 penduduk).

Gambar 6.30



Kasus malaria di Provinsi Riau tahun 2019 dari yang dilakukan pemeriksaan laboratorium sebanyak 4.247 orang, dengan pemeriksaan secara mikroskopis 2.382 orang dan menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) sebanyak 1.865 orang. Dari jumlah tersebut, ternyata yang hasilnya positif ada 130 orang, API tertinggi yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis tetapi masih memenuhi target (API < 1 per 1.000 penduduk).

Gambar 6.31



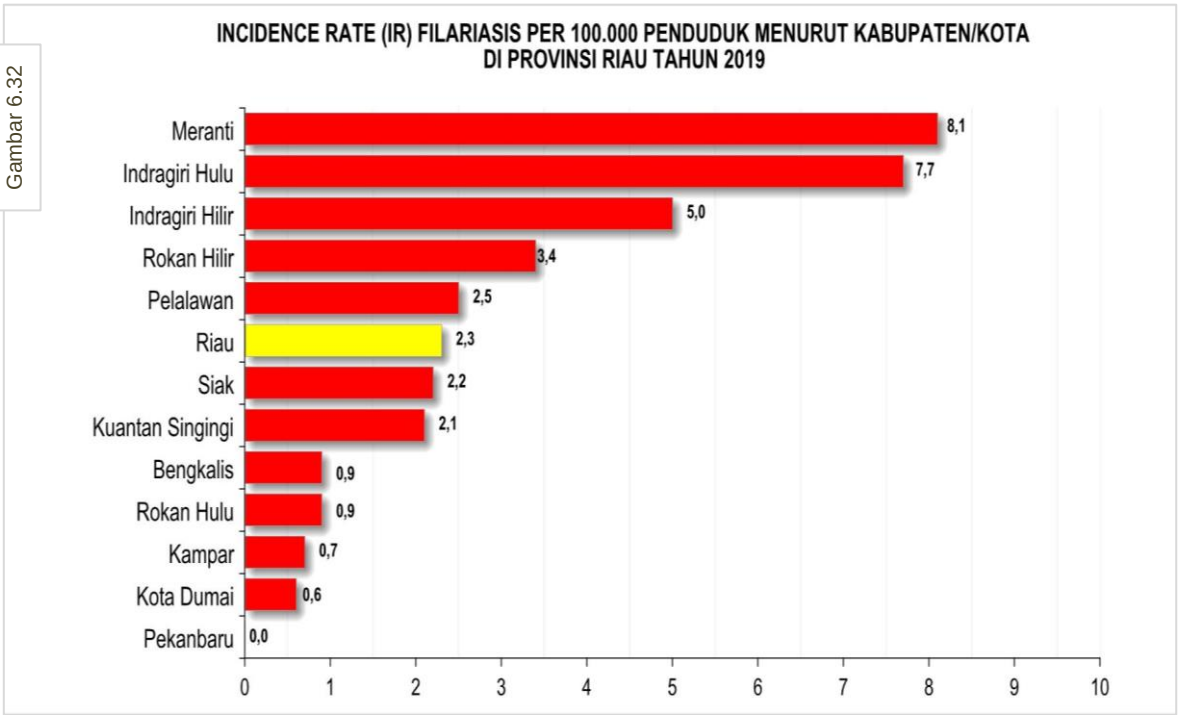
Jumlah kasus malaria di Provinsi Riau yang ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 130 orang dan yang mendapatkan pengobatan yang terstandar 124 orang (95,4%) dari seluruh jumlah suspek 3.965 orang. Kabupaten /kota yang belum dapat memberikan pengobatan yang terstandar bagi pasien malaria yang positif yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai.

3. Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan infeksi cacing filarial yang ditularkan melalui gigitan berbagai jenis nyamuk. Program eliminasi filariasis menjadi prioritas nasional dengan agenda utama melaksanakan kegiatan filariasis untuk memutus rantai penularan. Persentase kabupaten/kota terbanyak yang endemis filariasis tahun 2017 di Indonesia, Provinsi Riau mendapatkan peringkat ke 3 (tiga) yaitu 83,3% dengan 10 (sepuluh) dari 12 kabupaten/kota yang endemis atau belum terbebas kaki gajah. Dengan penentuan kabupaten/kota endemis maka dilakukan pemberian POPM (Pemberian Obat dan Pencegahan Massal) paling sedikit selama 5 tahun berturut-turut dan monitoring evaluasi.

Angka kesakitan filariasis mengalami penurunan, dari tahun-tahun sebelumnya (komulatif dari tahun 2012) jumlah kasus filariasis ditemukan 226 orang dan IR = 3,3 per 100.000 penduduk dan tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 157 orang dengan IR = 2,3 per 100.000 penduduk.

Gambar 6.32



Penderita Filariasis sudah ada di semua kabupaten/kota Provinsi Riau. Grafik angka Incidace Rate Penyakit filariasis (kaki gajah) tahun 2019 diatas merupakan angka komulatif dari tahun 2012. Dari data diatas terlihat bahwa kasus filariasis banyak ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir 37 orang (5 per 100.000 penduduk), Indragiri Hulu 34 orang (7,7 per 100.000 penduduk) dan Rokan Hilir 22 orang (3,4 per 100.000 penduduk) serta Kepulauan Meranti 15 orang (8,1 per 100.000 penduduk).

4. Rabies (Anjing Gila)

Virus penyebab rabies ditularkan oleh anjing melalui gigitan, cakaran, atau air liur. Namun, terdapat pula hewan lain yang dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia, seperti kucing, kera, musang, bahkan kelinci. Pada kasus yang tergolong sangat jarang, penularan virus rabies juga dapat terjadi dari manusia ke manusia, melalui transplantasi organ.

Tabel 6.2

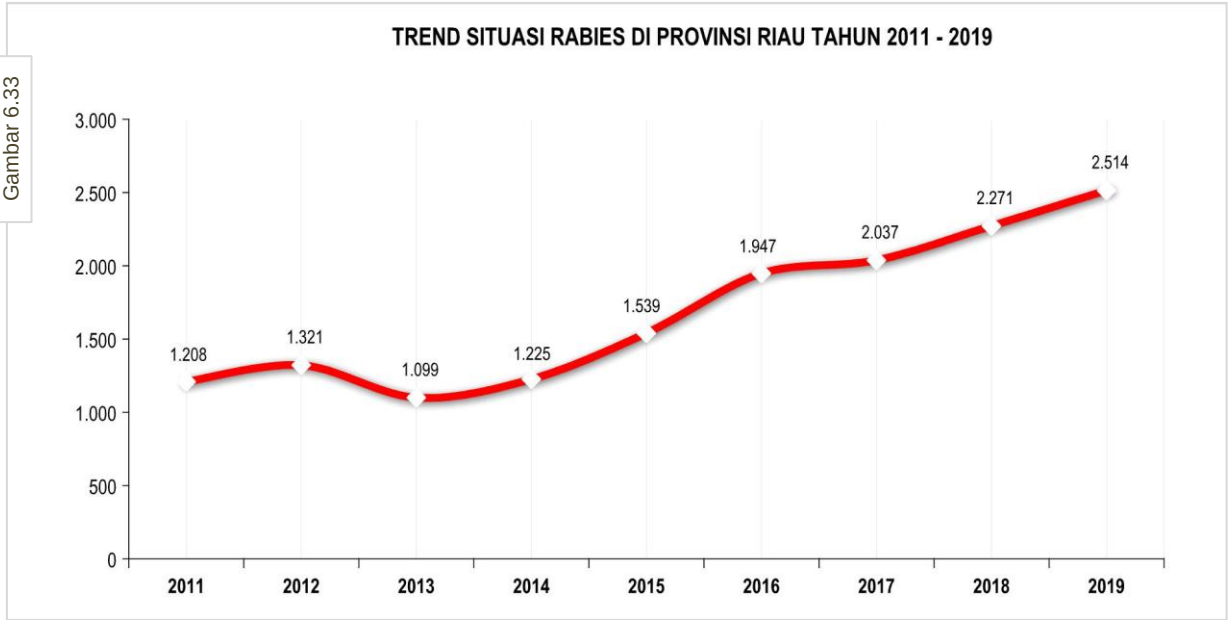
SITUASI KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES (GHPR) TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	KASUS GIGITAN	CUCI LUKA	KASUS DIBERI VAR	KASUS DIBERI SAR	CAKUPAN PEMBERIAN VAR	KASUS LYSSA
1	Pekanbaru	323	322	193	1	59,8%	0
2	Kampar	240	240	223	0	92,9%	0
3	Indragiri Hulu	200	198	182	0	91,0%	0
4	Indragiri Hilir	72	70	66	0	91,7%	0
5	Bengkalis	321	226	307	0	95,6%	0
6	Rokan Hulu	200	199	145	0	72,5%	0
7	Rokan Hilir	235	214	214	0	91,1%	0
8	Siak	276	276	250	0	90,6%	0
9	Kuansing	180	180	169	0	93,9%	1
10	Pelalawan	82	57	54	0	65,9%	0
11	Dumai	317	317	128	0	40,4%	0
12	Meranti	68	65	68	0	100,0%	0
	PROPINSI	**2.514**	**2.364**	**1.999**	**1**	**79,51%**	**1**

Sumber : Data Laporan Bulanan Kab/Kota dan Data dari Seksi Survailans (SKDR)

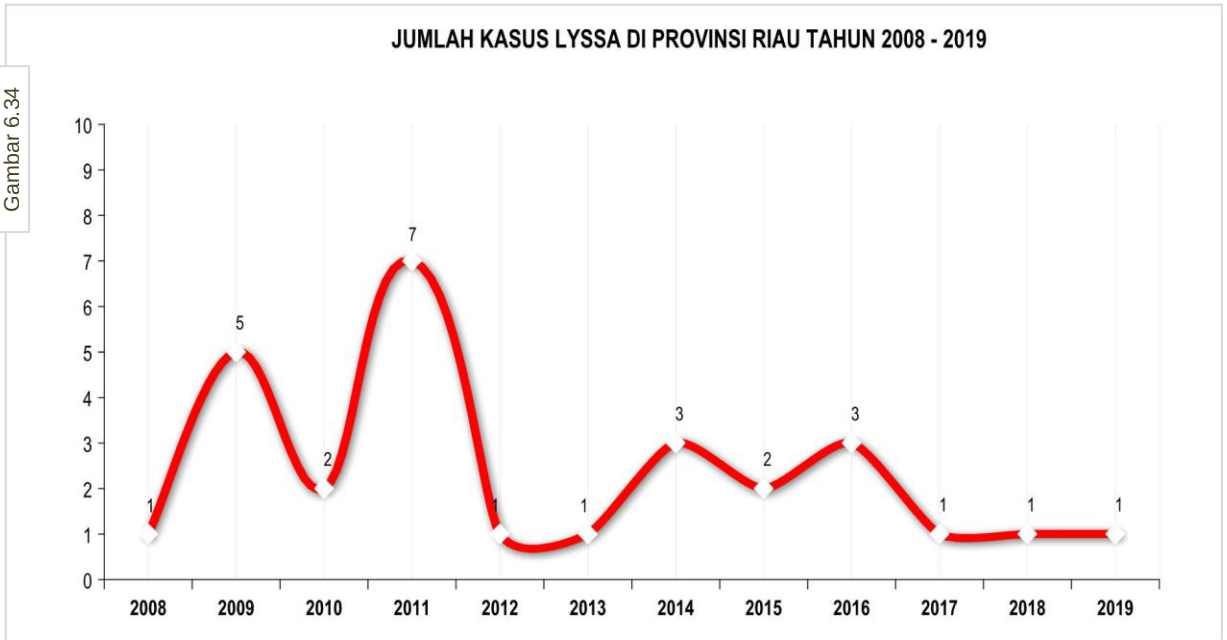
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus GHPR terlaporkan sebanyak 2.514 kasus sedangkan jumlah kasus Lyssa sebanyak 1 orang yaitu di Kabupaten Kuantan Singingi. Data ini meningkat 10% dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 2.271 kasus GHPR. Dan meningkat sebanyak 29% dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 1.947 kasus gigitan.

Gambar 6.33



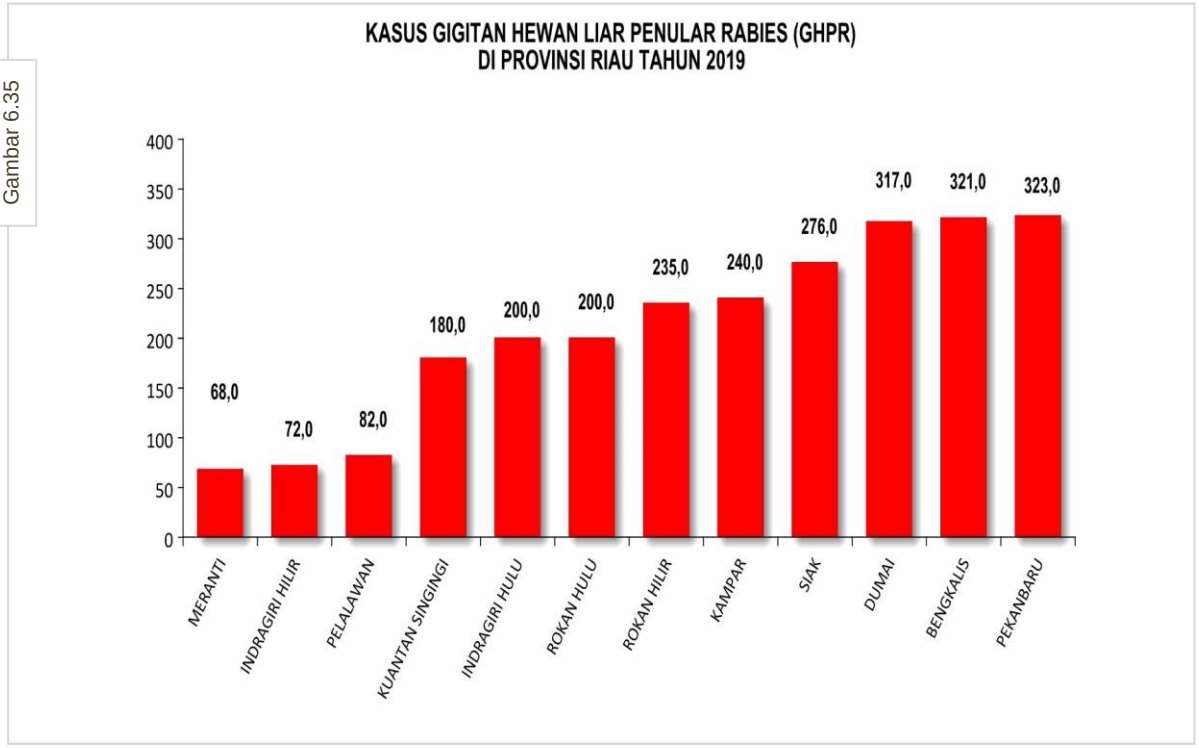
Berdasarkan grafik tersebut diatas, terlihat trend kasus GHPR cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Riau. Peningkatan tersebut sekitar 5 s.d 10% setiap tahunnya. Peningkatan ini seiring dengan pertambahan penduduk dan pertambahan populasi HPR yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 6.34



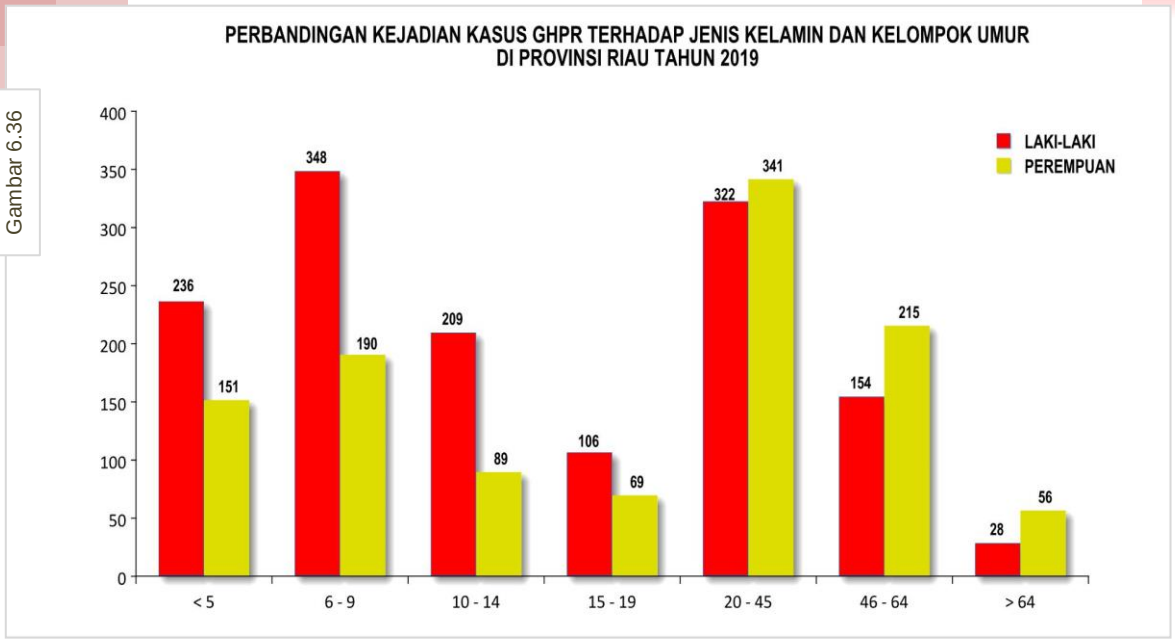
Berdasarkan grafik tersebut diatas, terlihat bahwa masih terjadi kasus Lyssa atau orang yang meninggal akibat rabies di Provinsi Riau yang seharusnya tidak boleh terjadi. Munculnya kasus Lyssa, disebabkan oleh banyak faktor diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies, sehingga menganggap sepele setiap terjadi kasus gigitan, padahal rabies adalah penyakit yang mematikan dengan Case Fatality Rate 100%, artinya setiap penderita rabies selalu berakhir dengan kematian. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk penderita rabies, yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah yaitu dengan pemberian Vaksin Anti Rabies / VAR.

Gambar 6.35



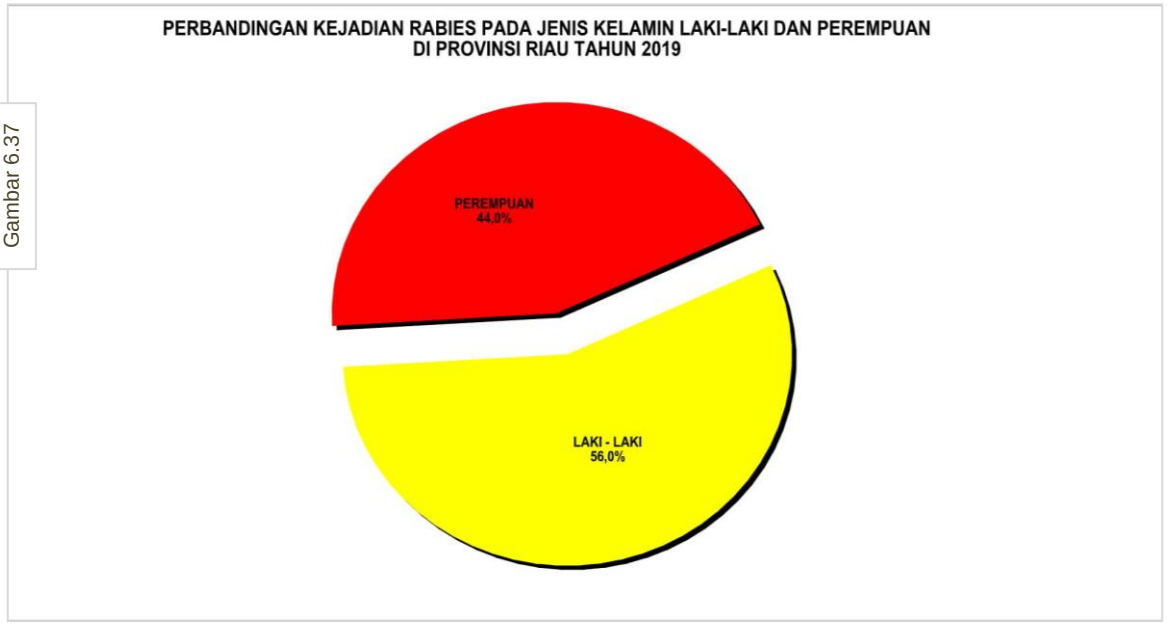
Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan kasus Rabies tertinggi ditemukan yaitu 323 kasus GHPR, selanjutnya Kabupaten Bengkalis dengan 322 kasus GHPR dan disusul Kabupaten Siak dengan 276 kasus GHPR. Kabupaten Meranti meskipun merupakan daerah yang bebas Rabies namun masih terjadi kasus gigitan, oleh karena itu kegiatan pencegahan dan pengendalian tetap dilaksanakan dalam upaya mempertahankan status bebas rabies mengingat tingginya lalu lintas HPR antar wilayah.

Gambar 6.36

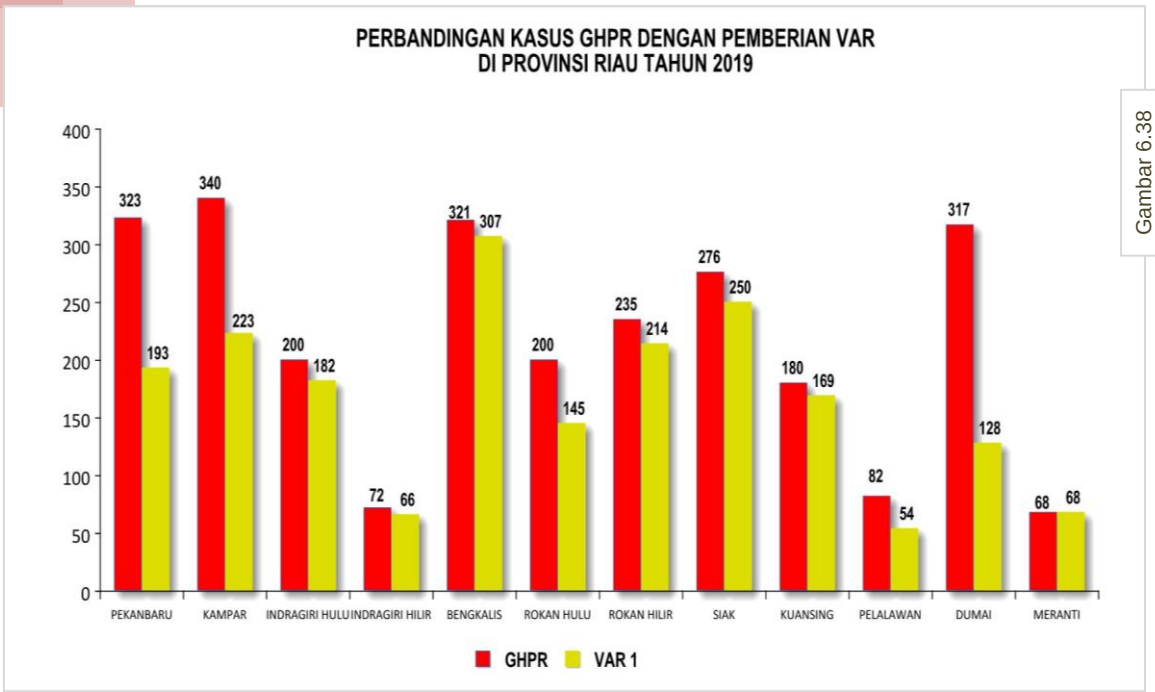


Berdasarkan perbandingan jenis kelamin dan kelompok umur kasus GHPR di atas, bahwa rentang usia laki-laki lebih banyak pada usia anak-anak 6 s.d 9 tahun, sedangkan pada jenis kelamin perempuan lebih banyak pada usia 20 s.d 45 tahun. Ini artinya perlu untuk meningkatkan pemahaman terhadap rabies pada masyarakat usia sekolah dan usia menengah kebawah, disamping juga terhadap seluruh lapisan masyarakat karena rabies bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan dll.

Gambar 6.37



Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa penyakit rabies, lebih banyak diderita oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 1.403 kasus (56%), dibandingkan dengan perempuan 44%



Gambar 6.38

Pemberian VAR bertujuan untuk mencegah penyakit Rabies / menghambat agar virus yang masuk melalui luka gigitan /cakaran HPR tidak sampai ke saraf pusat atau otak, sehingga kematian akibat Rabies dapat dihindari. Pemberian VAR harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kemenkes karena keterlambatan dan kesalahan dalam pemberian VAR dapat berakibat fatal, oleh karena itu petugas atau pengelola program rabies di puskesmas selaku ujung tombak pelayanan kesehatan dilapangan harus memahami tentang tatalaksana kasus GHPR.



Gambar 6.39

Berdasarkan grafik tersebut diatas, terlihat bahwa tidak semua kasus GHPR di berikan VAR. Berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun 1978 (SK Menkes No. 279A, Mentan No. 522, Mendagri no. 143) tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies VAR diberikan pada kasus gigitan hewan yang positif Rabies. Pemberian VAR diberikan jika hasil pengujian laboratorium pada HPR positif, setelah dilakukan observasi. Dan pemberian VAR tidak diberikan, jika HPR hilang / lysis, maka spesimen tidak bisa diperiksa. Pada tahun 2019 terjadi penurunan cakupan pemberian VAR, hal ini disebabkan terjadinya keterlambatan distribusi VAR dari Subdit Zoonosis Kementerian Kesehatan ke Provinsi Riau sehingga terjadi kekosongan VAR selama beberapa bulan.

Tabel Data Rabies Center Tahun 2019

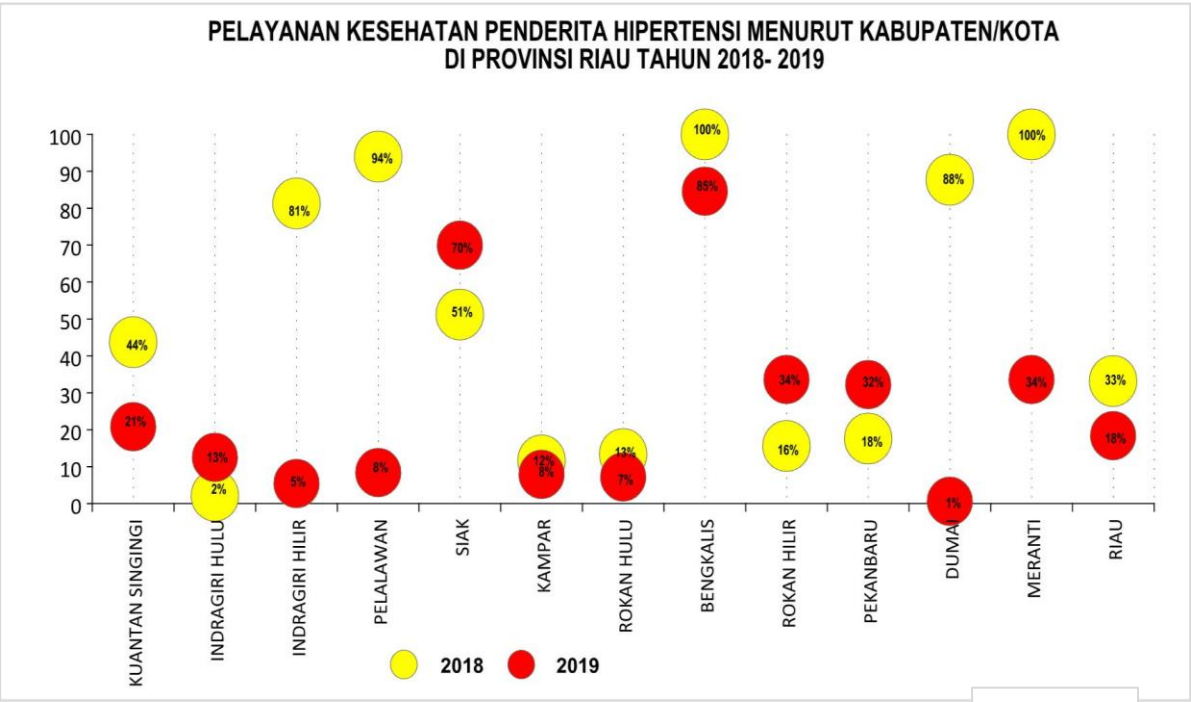
NO	KAB/KOTA	JUMLAH RABIES CENTER	LOKASI
1	KAMPAR	5 UNIT	1. Dinkes Kab.kampar 2. Pusk.Tapung Perawatan 3. Pusk.XIIIKoto Kampar 4. Pusk.Siak Hulu II 5. Pusk. Kampar Kiri
2	ROKAN HULU	2 UNIT	1. RSUD Rokan Hulu 2. Pusk. Ujung Batu
3	INDRAGIRI HULU	5 UNIT	1. Pusk. Pranap 2. Pusk.Air Molek 3. Pusk.Pkl.Kasai 4. Pusk.Siberida 5. Pusk.Sei Lala
4	PELALAWAN	3 UNIT	1. Pusk. Ukui 2. Pusk. Pkl.Kuras 3. Dinkes Kab. Pelalawan
5	KUANSING	4 UNIT	1. Pusk. Benai 2. Pusk. Perh.Luas 3. Pusk.Lubuk Jambi 4. Pusk.Lubuk Ramo
6	BENGKALIS	1 UNIT	1. Puskesmas Rupat
TOTAL		20 UNIT	

D. PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Semakin meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan kini telah menjadi perhatian serius bagi dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya PTM sebagai salah satu target yang harus dicapai dalam *Sustainable Development Goals (SDGs).* Penyakit tidak menular (PTM) juga dikenal sebagai penyakit kronis, memiliki durasi panjang dan umumnya berkembang lambat dan faktor resiko penyakitnya. Empat jenis utama penyakit tidak menular adalah penyakit kardiovaskular (seperti serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit pernapasan kronis (seperti penyakit paru obstruktif kronis dan asma) dan diabetes melitus (DM). Sekitar 80% dari semua kematian PTM terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

1. Hipertensi

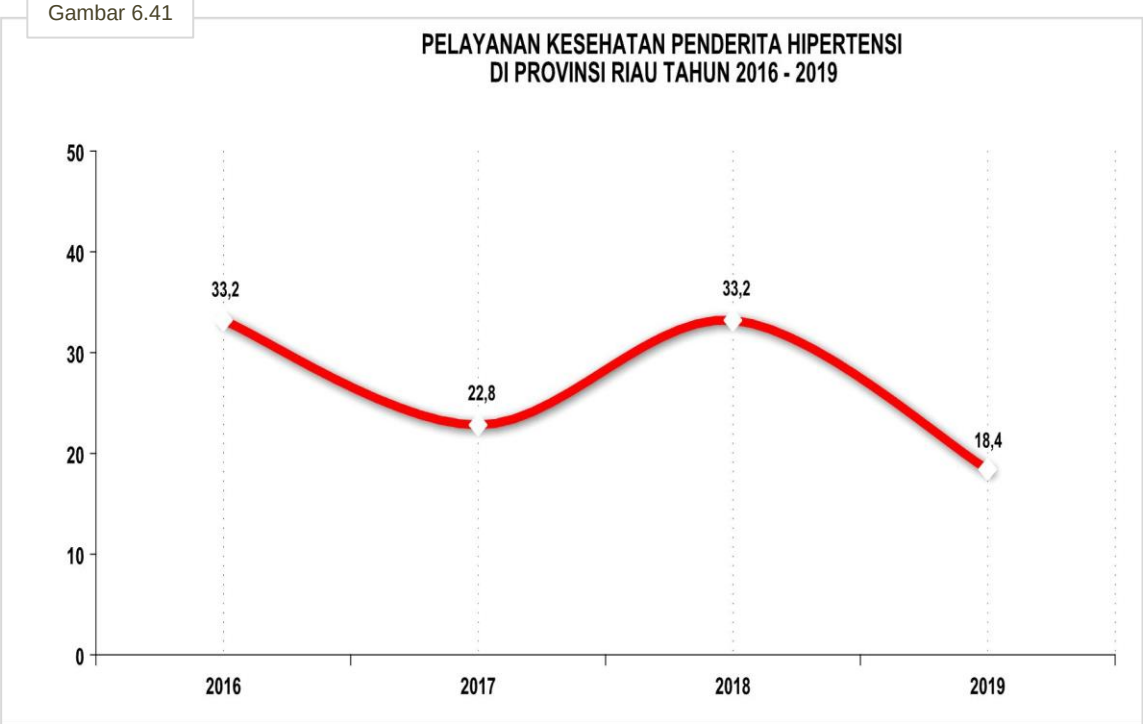
Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi di mana kekuatan aliran dari darah terhadap dinding arteri cukup tinggi. Faktor risiko penyebab hipertensi yang patut diwaspadai adalah obesitas, terlalu banyak minum alkohol, merokok, riwayat keluarga. Salah satu aspek yang paling berbahaya dari hipertensi adalah sering tidak disadari munculnya gejala hipertensi oleh penderitanya, hal ini akibat mengabaikan gaya hidup sehat. Satu-satunya cara upaya pencegahan yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah yang teratur terutama yang mempunyai resiko tinggi.



Gambar 6.40

Penderita hipertensi umur ≥ 15 tahun yang ditemukan dan mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 297.934 orang (18,4%) dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 33% dari jumlah estimate penderita hipertensi.

Gambar 6.41

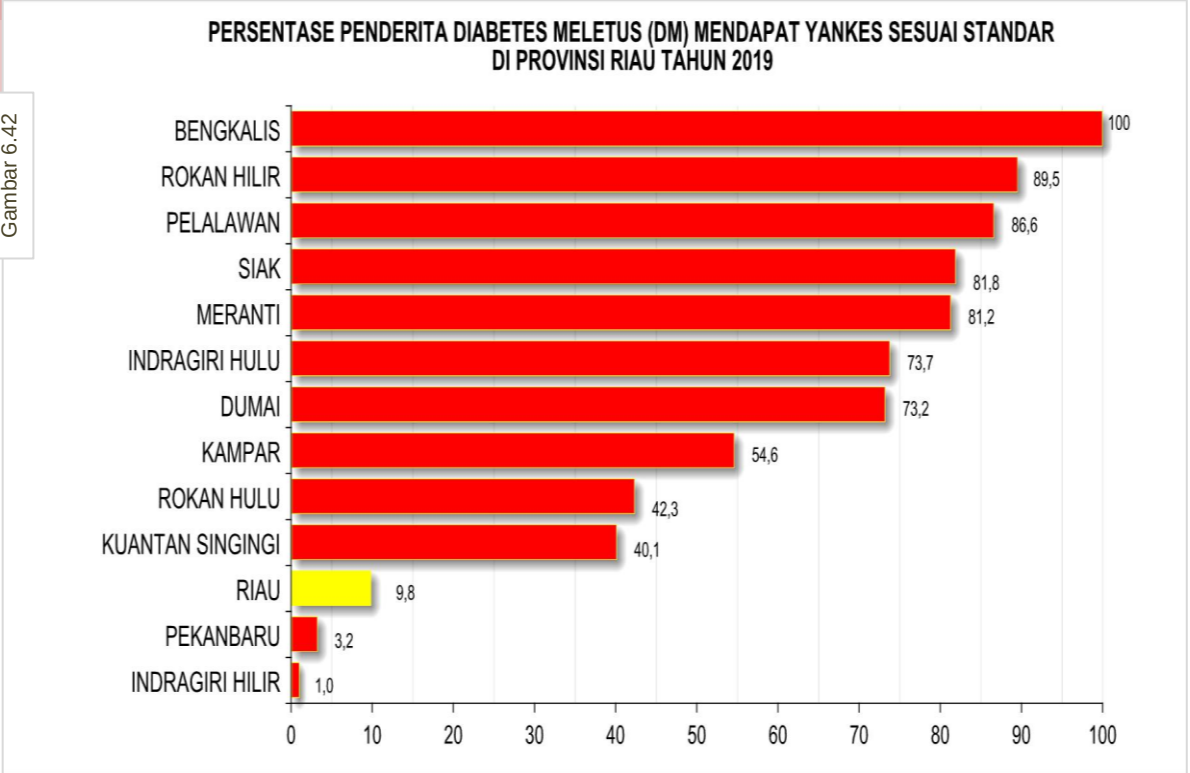


Penderita hipertensi umur ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami penurunan kembali menjadi 18,4%.

2. Diabetes Militus

Diabetes adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar gula (glukosa) darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Glukosa yang menumpuk di dalam darah tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi.

Gambar 6.42

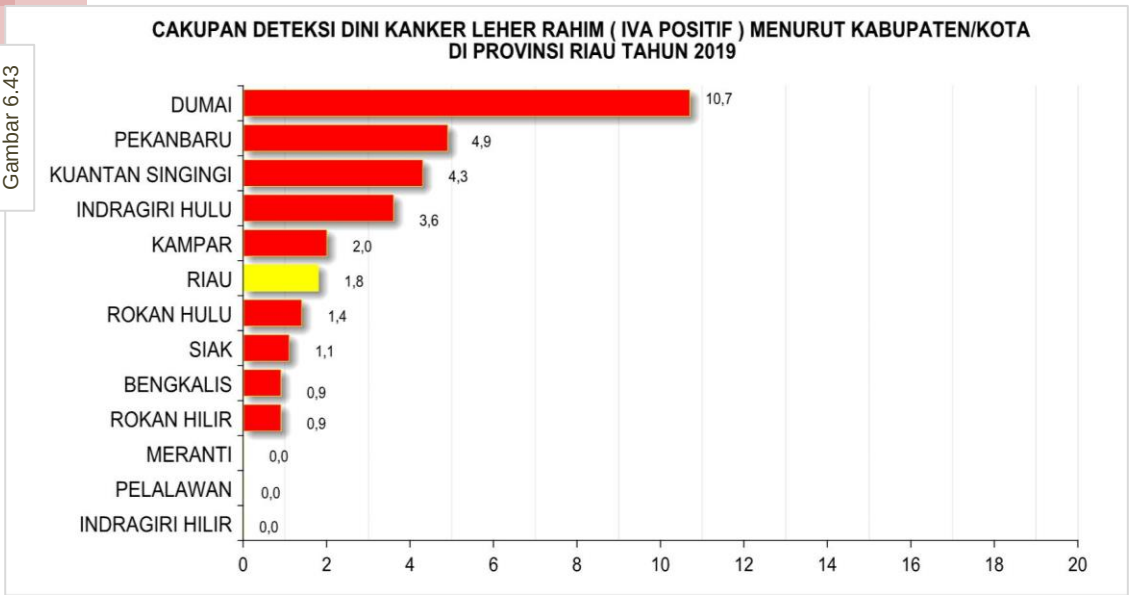


Persentase penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 13,7% di tahun 2018 menurun menjadi 9,8% di tahun 2019. Pengendalian penyakit Diabetes militus masuk didalam indikator program prioritas, SDGs dan standar pelayanan minimal, untuk itu diperlukan adanya intervensi dari program penyakit tidak menular. Salah satunya dengan memaksimalkan integrasi lintas program di Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan melakukan pengendalian faktor risiko PTM.

3. Tumor/ kanker

Tumor/ kanker adalah penyakit berbahaya, stadium awal penyakit ini seringkali tidak bergejala. Seperti yang diketahui jumlah penderita kanker diseluruh Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data GLOBAL 2012, diperkirakan terdapat 14,1 juta kasus kanker baru yang muncul, pada tahun yang sama terdapat 8,2 juta kematian karena kanker. Angka penderita ini diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan mencapai 23,6 juta kasus baru pada tahun 2030.

Gambar 6.43

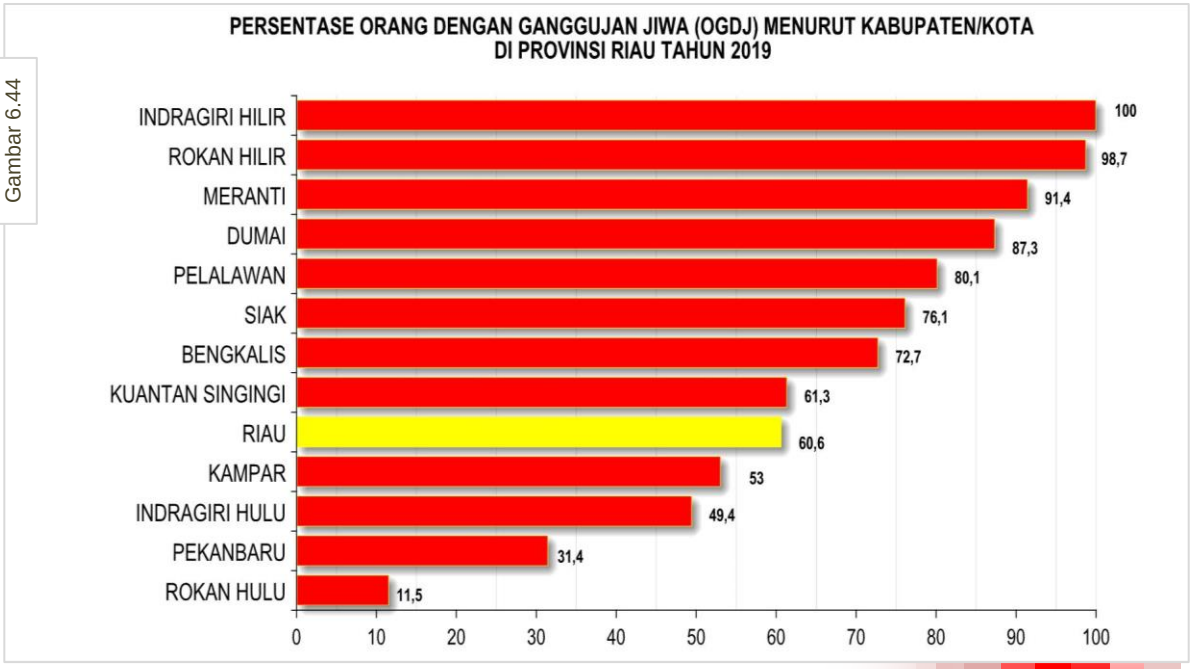


Ditemukan kanker leher rahim dan payudara yang positif sebanyak 471 orang (1,1%) dari 44.248 jumlah perempuan yang dilakukan pemeriksaan deteksi dini dari usia 30–50 tahun untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dan periksa payudarasa secara klinis (SADANIS) minimal sebulan sekali. Kegiatan deteksi dini terhadap penyakit kanker telah rutin dilakukan di semua kabupaten/kota, tetapi cakupan yang tinggi di Kota Dumai , Pekanbaru, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu.

4. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan /atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya.

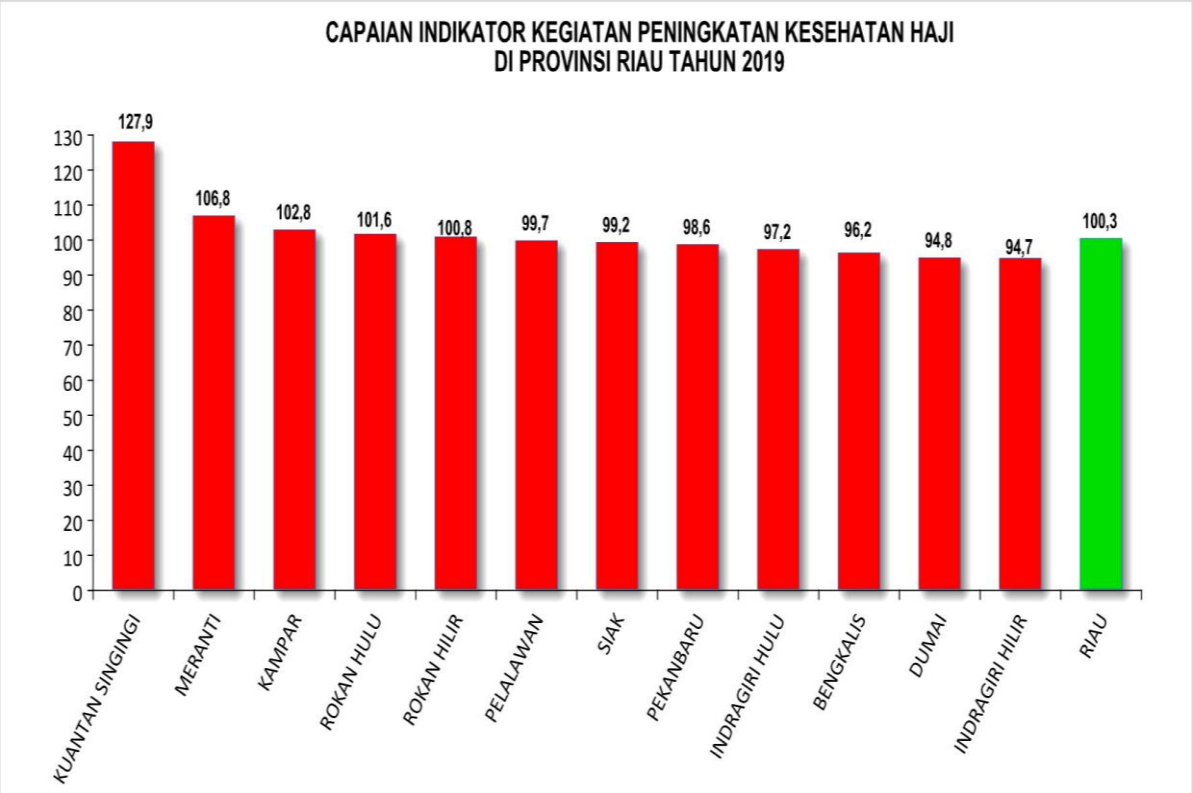
Gambar 6.44



Sasaran orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 9.533 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 5.773 orang (60,6%). Capaian yang masih rendah < 50% yaitu kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru.

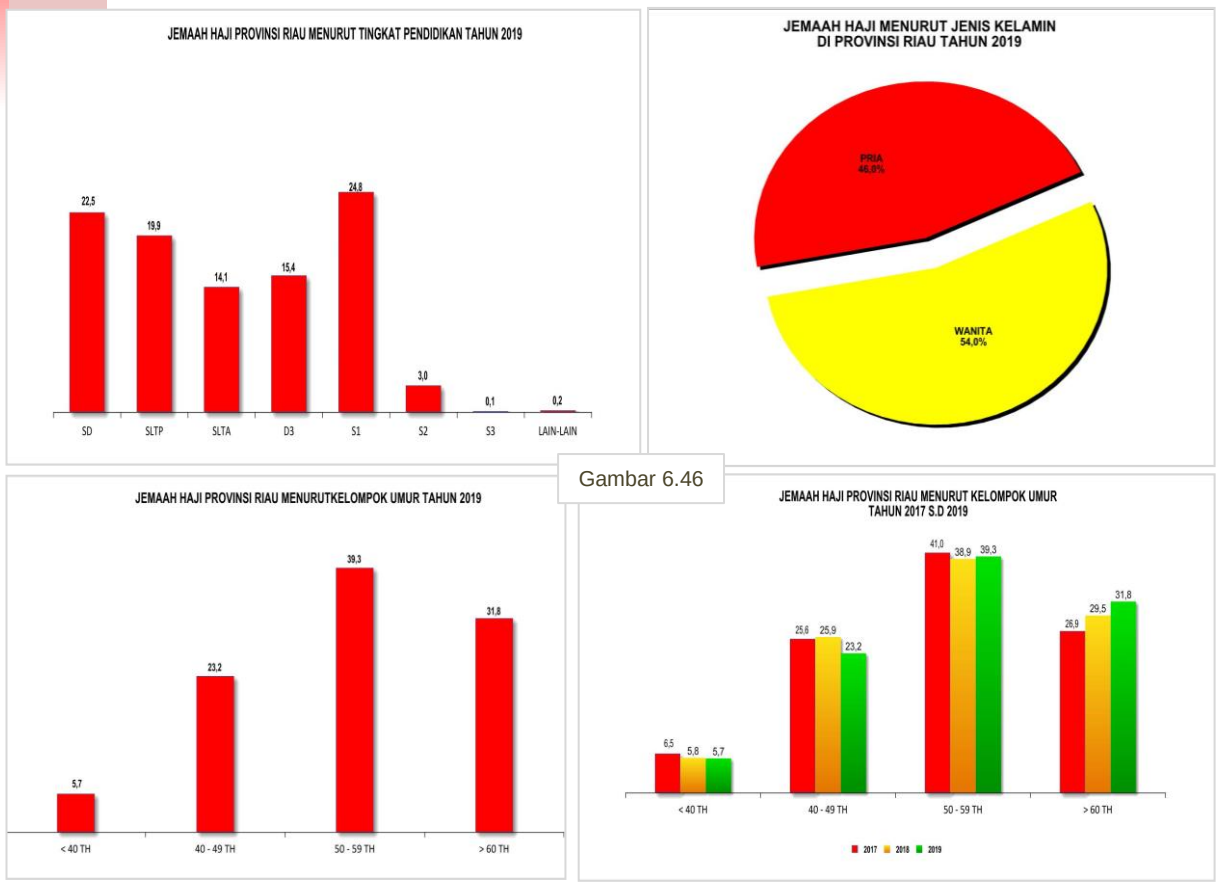
E. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan jutaan manusia yang berpindah dari satu negara ke negara lain dengan melakukan berbagai ritual ibadah fisik dan spiritual. Pada proses ini terjadi kerentanan terhadap kejadian morbiditas maupun mortalitas. Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 5.277 jemaah yang terdiri dari 5.315 jemaah haji dan 38 petugas haji pada kelompok terbang (kloter).



Gambar 6.45

Dilihat pencapaian menurut Kabupaten/Kota ada 2 Kabupaten yang tidak mencapai target yaitu Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir.

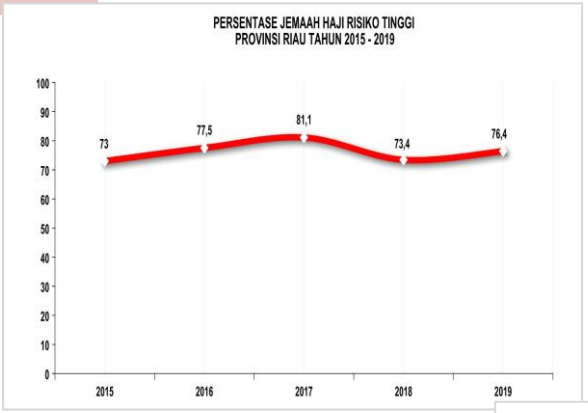


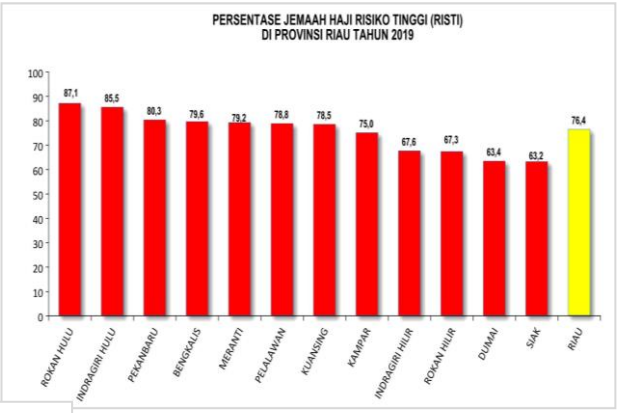
Gambar 6.46

Menurut data diatas, profil jemaah haji menurut tingkat pendidikan yang paling banyak adalah dari pendidikan S1 sebesar 24,8 %. Dan, kalau dilihat dari jenis kelamin lebih banyak wanita jika dibandingkan pria, dimana wanita mencapai 54 % sedangkan pria sebesar 46 %.

Profil jemaah haji Provinsi Riau Menurut umur, semakin tua usia semakin besar persentase jemaah haji, hal ini terlihat bahwa, kelompok usia yang paling banyak adalah kelompok usia 50 – 59 th sebesar 39,3 %, kemudian kelompok usia > 60 th sebesar 31,8 %, selanjutnya kelompok usia 41-49 th sebesar 23,2 %, dan yang paling kecil adalah kelompok usia < 40 th sebesar 5,7 %. Dari data profil jemaah haji pada grafik diatas, dilihat dari sisi umur 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sd 2019 terjadi peningkatan jumlah jemaah haji yang berusia 6 tahun keatas. Dilihat dari kegiatan pelaksanaan ibadah haji, kondisi fisik jemaah haji sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah haji, faktor umur juga sangat mempengaruhi.

Jemaah Haji Risiko Tinggi (Risti) Provinsi Riau
Tahun 1440 H/2019 M





Gambar 6.47



I1	Essential (primary
E7	Disorders of lipoprotein metabolism and other
E1	Non Insulin dependent Diabetes
E78.	Hyperlipidaemia,
E78.	Pure
I51.	Cardiomegal
K3	Dyspepsi
I1	Hypertensive heart
E6	Obesit
E11.	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without

Jemaah haji yang berangkat pada tahun 1440 H/2019 M, sebagian besar adalah jemaah haji Risti, baik risti oleh karena umur maupun risti karena penyakit. Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa jemaah haji risti mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun th 2015 sd 2017 dan turun pada tahun 2018 dan naik lagi pada tahun 2019

Jemaah haji kabupaten/kota yang mempunyai resiko tinggi diatas rata-rata Provinsi adalah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 87,1 %, Indragiri Hulu sebesar 85,5 %, Pekanbaru sebesar 80,3 % Bengkalis sebesar 79,6 %, Meranti sebesar 79,2 %, sedangkan jemaah haji resiko tinggi yang paling sedikit jumlahnya adalah Kota Dumai dan Kabupaten Siak yaitu sebesar 63,2 %. Dan 10 jenis penyakit terbanyak pada jemaah haji adalah penyakit hipertensi 37,6%.

resistensi (kebal terhadap obat Tuberkulosis lini pertama). Dimana diperlukannya penanganan yang lebih serius untuk menjangkau kasus yang belum terdeteksi. Perjaringan kasus Tuberkulosis sebanyak-banyaknya diperlukan adanya strategi percepatan pencapaian target, dengan melakukan kerjasama lintas program yang terintegrasi dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) dan pemberdayaan masyarakat melalui kader, maka diperlukan perluasan investigasi kasus dalam penemuan kasus pada kelompok-kelompok yang berisiko.

Penularan dan penyebaran penyakit Tuberculosis sangat cepat dikarenakan menular melalui udara atau air borne disease. Makin banyak ditemukan terduga / suspek Tuberkulosis, maka makin tinggi juga kemungkinan penderita Tuberkulosis yang terkonfirmasi positif yang ditemukan, karena 1 (satu) orang yang positif akan menularkan 10 – 15 orang ke orang yang sehat.

Gambar 6.1

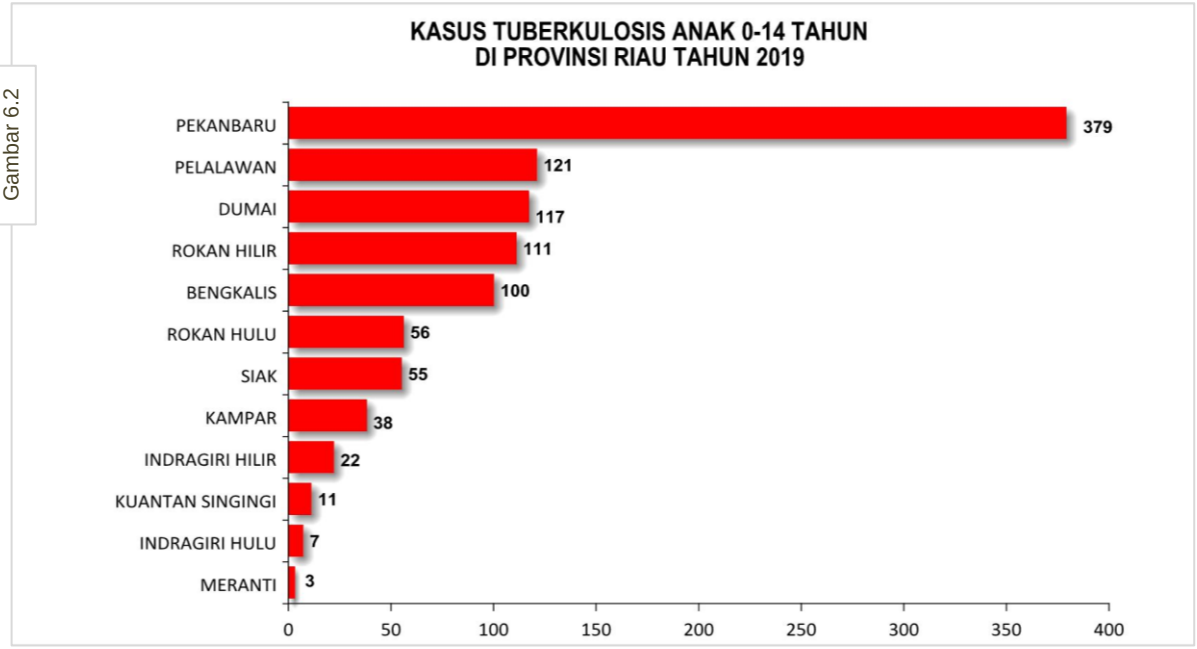


Tahun 2019 ditemukan terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 36.154 orang, dari jumlah penduduk Provinsi Riau sebesar 6.971.745 jiwa. Dengan rincian yang mendapatdari pelayanan kesehatan sesuai standar (pemeriksaan bakteriologis dan klinis) sebanyak 34.604 orang dan yang tidak sesuai standar kesehatan sebanyak 1.550 orang (4,28%). Tercatat terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar yang terbanyak ditemukan di Kota Pekanbaru 8.646 orang.

Dari jumlah terduga diatas, ditemukan semua kasus Tuberkulosis dengan klasifikasi Tuberkulosis Paru dan Tuberkulosis ekstra paru serta berdasarkan jenis

Tuberkulosis yang ditemukan di semua layanan kesehatan seperti TB dewasa, TB resistensi (TB - Multi Drug Resistensi), dan TB-HIV di Provinsi Riau sebanyak 9.678 orang.

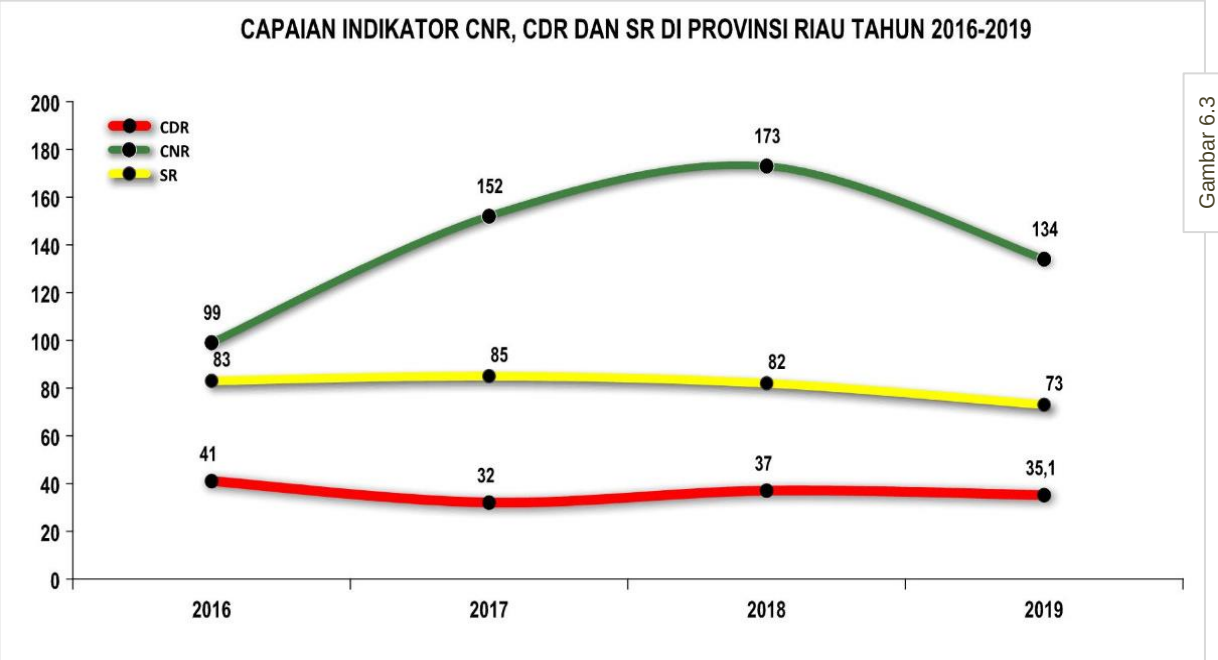
Gambar 6.2



Dari semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan, kasus TB pada anak di Provinsi Riau ditemukan sebanyak 1.020 orang (10,5%) dari jumlah semua kasus Tuberkulosis. Kota Pekanbaru yang paling banyak ditemukan kasus Tuberkulosis pada anak usia 0 sampai 14 tahun (berat badan ≥ 33 Kg) sebanyak 379 orang. Hal ini sangat dibutuhkan observasi lanjutan untuk dapat memastikan sumber penularan dari Tuberkulosis dewasa terkonfirmasi bakteriologis.

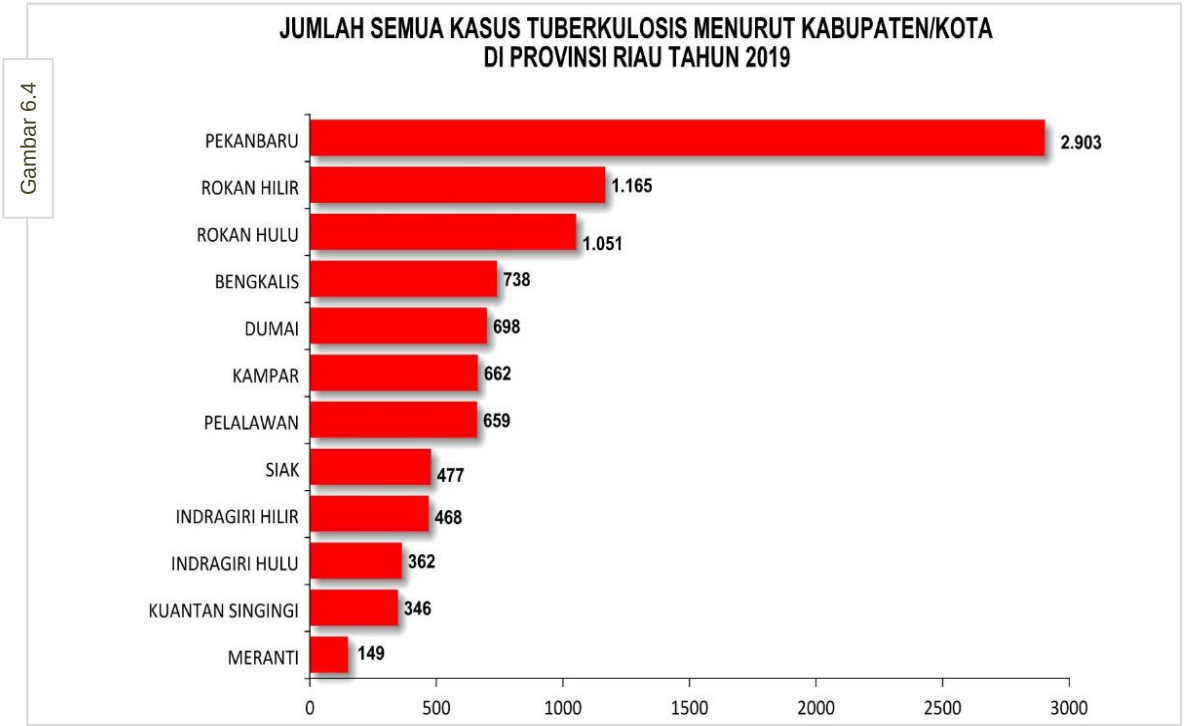
Semua fasilitas layanan kesehatan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) di Provinsi Riau milik pemerintah, BUMN, TNI/POLRI, swasta telah melaksanakan strategi DOTS (Direcly Observerd Treatment Shortcouse) dan pemberian Profilaksis Isoniazid (INH) pada anak selama 9 bulan untuk upaya pencegahan terjadinya penularan penyakit Tuberkulosis pada anak terutama anak yang mempunyai kontak serumah dengan pasien Tuberkulosis terkonfirmasi bakteriologis.

Penentuan diagnosa Tuberkulosis pada anak sering menimbulkan keraguan, sehingga sering ditemukan ***over diagnosis*** dan ***under diagnosa*** di layanan FKTP dan FKRTL. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, menjelaskan penegakkan diagnosa Tuberkulosis pada anak menggunakan tools Skoring.



Gambar 6.3

Trend capaian indikator utama Tuberkulosis tahun 2019, CNR (Case Notification Rate) penemuan semua kasus Tuberkulosis mengalami penurunan menjadi 134 per 100.000 penduduk, dari tahun sebelumnya. Sedangkan indikator CDR (Case Detection Rate) penemuan kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan dari perkiraan jumlah semua kasus sebanyak 35,1% dengan angka keberhasilan pengobatan/Sukses Rate (kesembuhan + pengobatan lengkap) masih rendah yaitu 73% (Target nasional = 90%; Renstra = 76%).

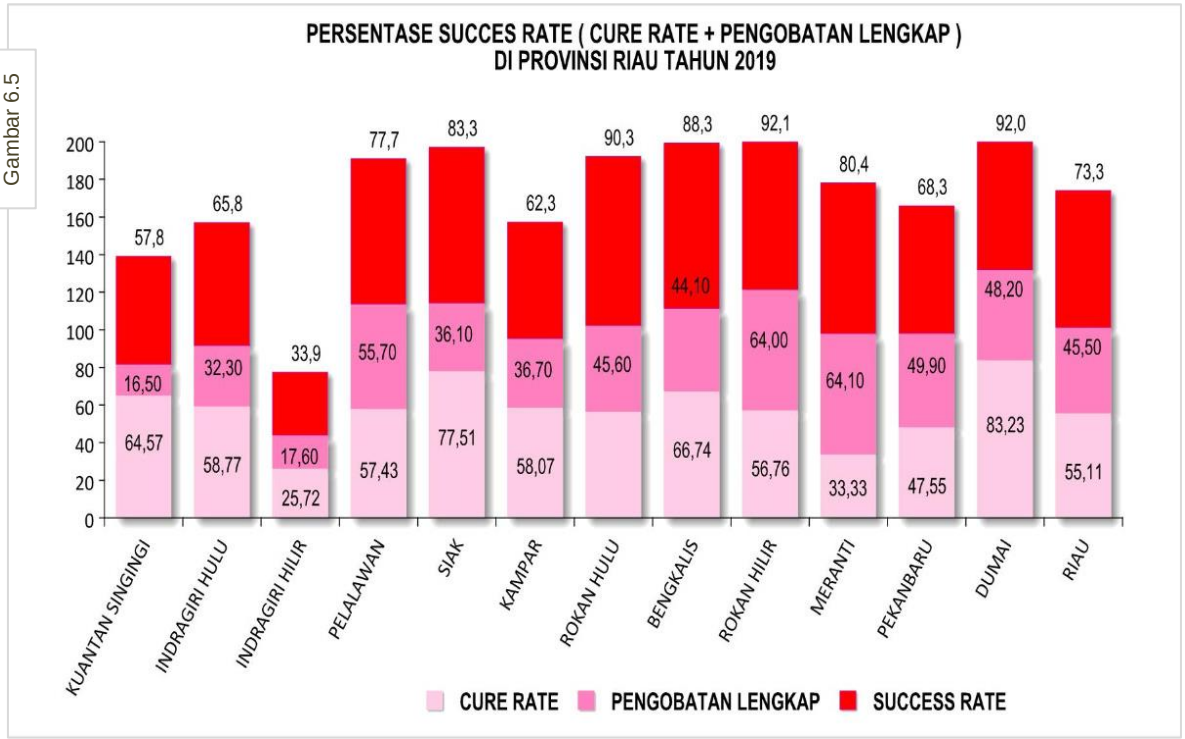


Gambar 6.4

Penemuan semua kasus Tuberkulosis di Provinsi Riau berjumlah 11.344 orang dan yang ditemukan kasus Tuberkulosis paling tinggi di Kota Pekanbaru, berjumlah 2.903 orang, dikarenakan selain jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, dan juga sebagai pusat rujukan layanan kesehatan di Provinsi Riau. Kabupaten /kota lainnya yang banyak ditemukan kasus Tuberkulosis yaitu Rokan Hilir, Kampar dan Rokan Hulu. Hal ini sesuai dengan grafik di gambar 6.1 tentang penjaringan terduga Tuberkulosis yang paling banyak di Kota Pekanbaru, dan Rokan Hilir.

Banyaknya jumlah penjaringan terduga Tuberkulosis yang ditemukan, berbanding lurus dengan penemuan kasus Tuberkulosis di suatu wilayah. Penemuan kasus dengan kontak tracing (penelusuran) dan traking (pelacakan) di Puskesmas merupakan upaya preventif dan promotif yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan Tuberkulosis.

Gambar 6.5



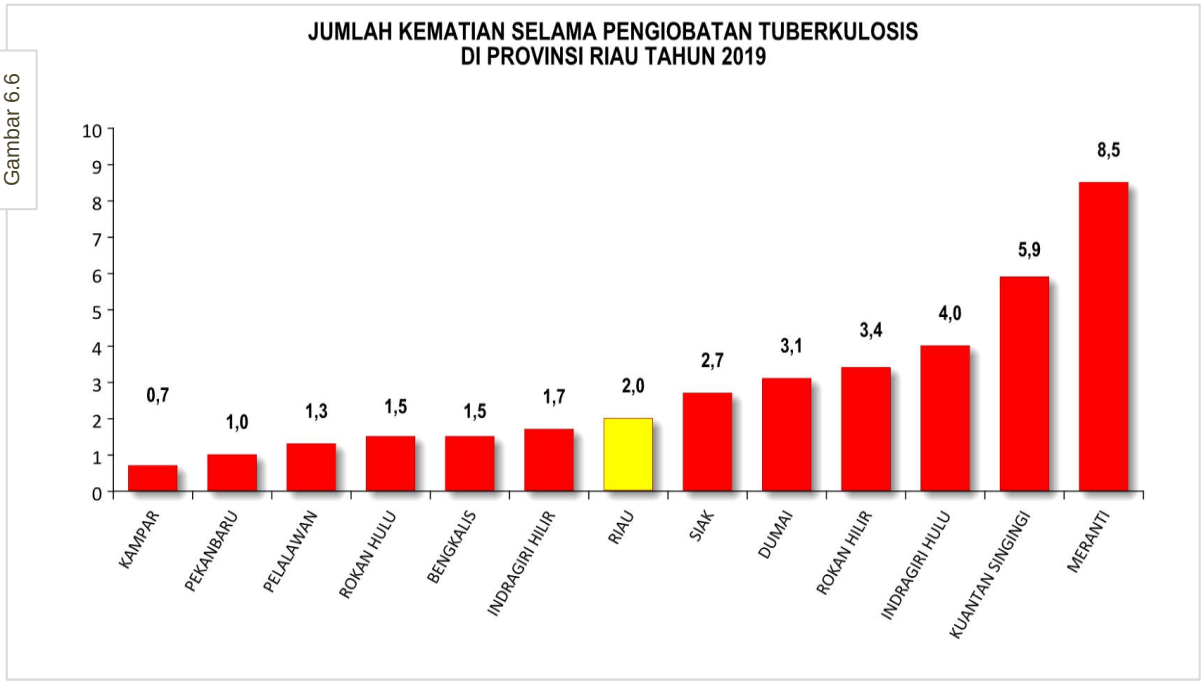
Dari uraian diatas, penemuan kasus Tuberkulosis yang memenuhi standar kesehatan adalah diagnosa melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, sesuai yang tercantum di Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan, dimana keberhasilan pengobatan Provinsi Riau mencapai 73,2% (Sukses Rate target Renstra 2014-2019 = 76%, dan target nasional 90 %).

Dan berdasarkan Pedoman Program Penanggulangan Tuberkulosis tercantum di Permenkes nomor 67 tahun 2016, untuk meminimalisir dan memutus mata rantai

penularan, bahwa persentase penemuan kasus Tuberkulosis dengan pemeriksaan bakteriologis (keberhasilan pengobatan cure rate/sembuh) yang diperbolehkan target ≥ 65% dan penemuan dengan pemeriksaan klinis atau keberhasilan pengobatan lengkap yang diperbolehkan ≤ 35%. Sedangkan capaian keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Riau, capaian angka kesembuhan / cure rate kurang dari target yaitu 55,11 % (target ≥ 65%) dan persentase pengobatan lengkap telah melebihi target yang diperbolehkan yaitu 45,50 % (target ≤ 35%).

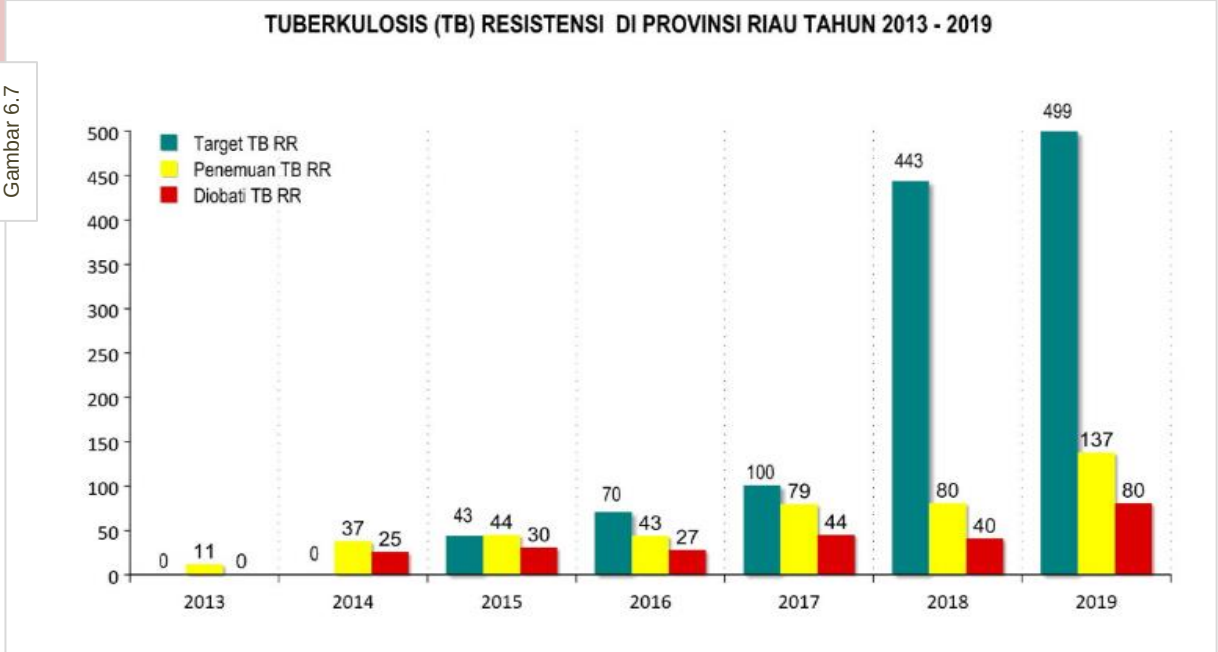
Keberhasilan pengobatan/Sukses Rate (sembuh + pengobatan Lengkap) yang masih rendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (33,3%), Kuantan Singingi (57,8%) dan Kampar (62,3%). kabupaten/kota yang telah memenuhi target Renstra 76% yaitu Kabupaten Rokan Hulu (90,3%), Rokan Hilir (92,1%), dan Kota Dumai (92%)

Gambar 6.6



Persentase angka kematian akibat Tuberkulosis memenuhi target yaitu 2% (target ≤ 4%). Kabupaten yang tinggi persentase angka kematiannya diakibatkan oleh Tuberkulosis yaitu Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi. Angka kematian yang tinggi diakibatkan, antara lain keterlambatan penanganan kasus, kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang penyakit Tuberkulosis, penanganan pasien di layanan kesehatan yang tidak adekuat/ tidak sesuai standar yang telah ditetapkan, dan jauhnya jangkauan layanan kesehatan, serta mempunyai penyakit penyerta/ komorbite dengan Tuberkulosis yang akan makin memperburuk kondisi pasien bahkan dapat menyebabkan kematian, seperti Tuberkulosis dengan diabetes militus (TB-DM), resistensi (TB MDR), Tuberkulosis dengan HIV/AIDS (TB-HIV).

Gambar 6.7



Target penemuan kasus Tuberkulosis Resistensi (TB RO) mulai tahun 2018 empat kali lebih besar dari tahun sebelumnya dan capaian penemuan kasus Tuberkulosis Resistensi Rifampisin (TB RR) dan yang bersedia untuk diobati di tahun 2019 mengalami peningkatan. Permasalahan Tuberkulosis semakin bertambah dengan munculnya pandemi HIV/AIDS didunia karena dengan terjadinya koinfeksi dengan HIV akan meningkatkan risiko kejadian Tuberkulosis secara signifikan. Dan pada saat yang sama, kekebalan ganda kuman Mycobacterium Tuberculosis terhadap obat anti tuberkulosis lini pertama (TB Resisten Obat) semakin sulit diobati. Tahun 2019 penemuan kasus Tuberkulosis resistensi sebanyak 137 orang (target =499 orang) dan yang bersedia untuk diobati hanya 80 orang.

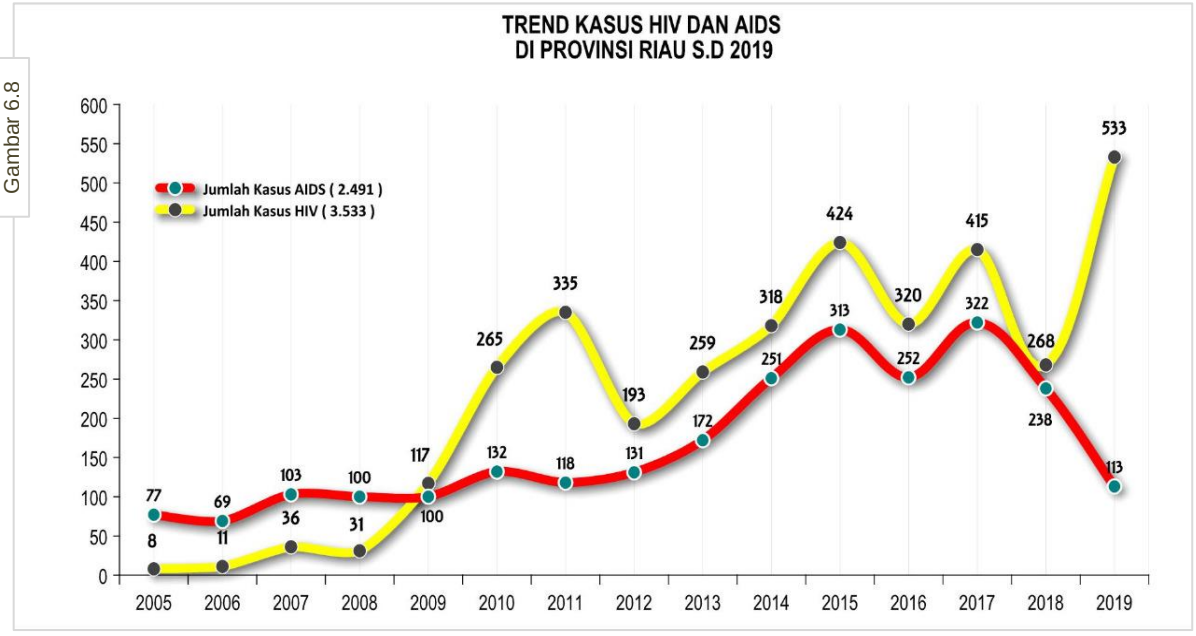
2. HIV dan AIDS

HIV/AIDS (Human Imonudeficiency Virus) merupakan sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah sekelompok gejala penyakit kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Program pengendalian HIV bertujuan untuk: 1.) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2.) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; 3.) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Penderita HIV dapat mempertahankan hidupnya dengan minum obat anti retroviral (ARV) rutin seumur hidup dalam waktu tertentu karena obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Sedangkan penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir.

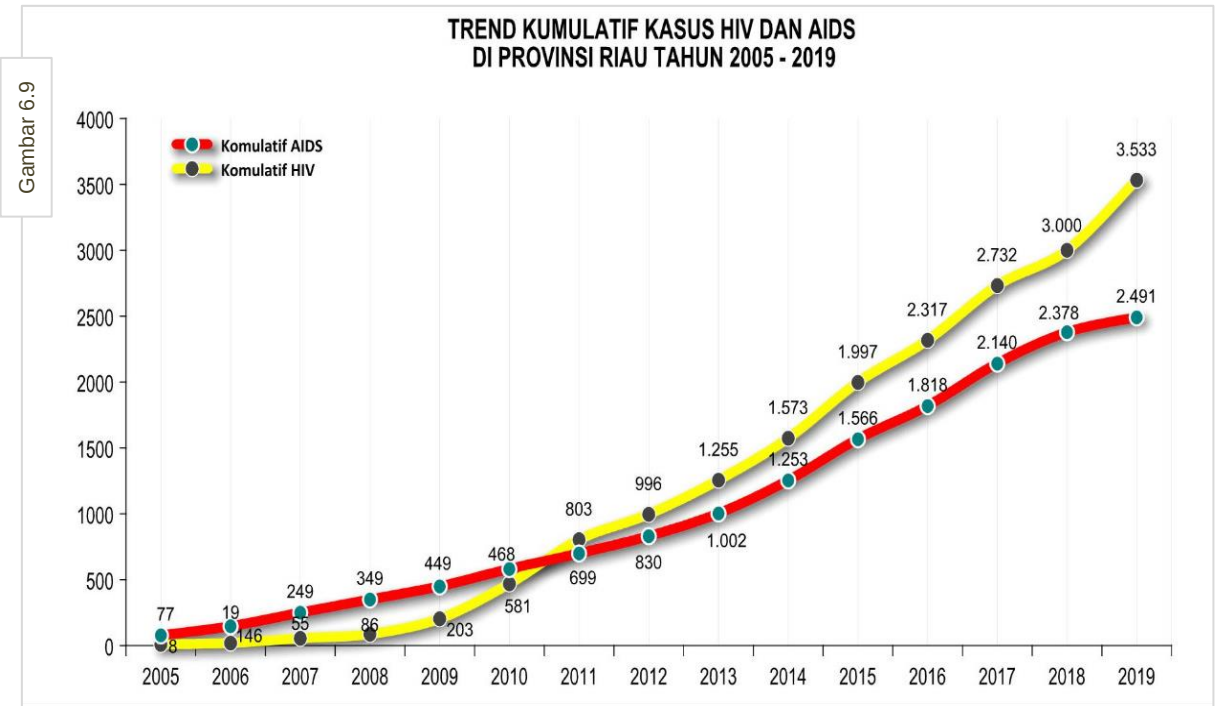
Ketika seseorang sudah menderita AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Satu orang dengan 2 penyakit yaitu TB-HIV semakin bertambah dengan munculnya koinfeksi dengan Tuberkulosis (TB-HIV).

Gambar 6.8



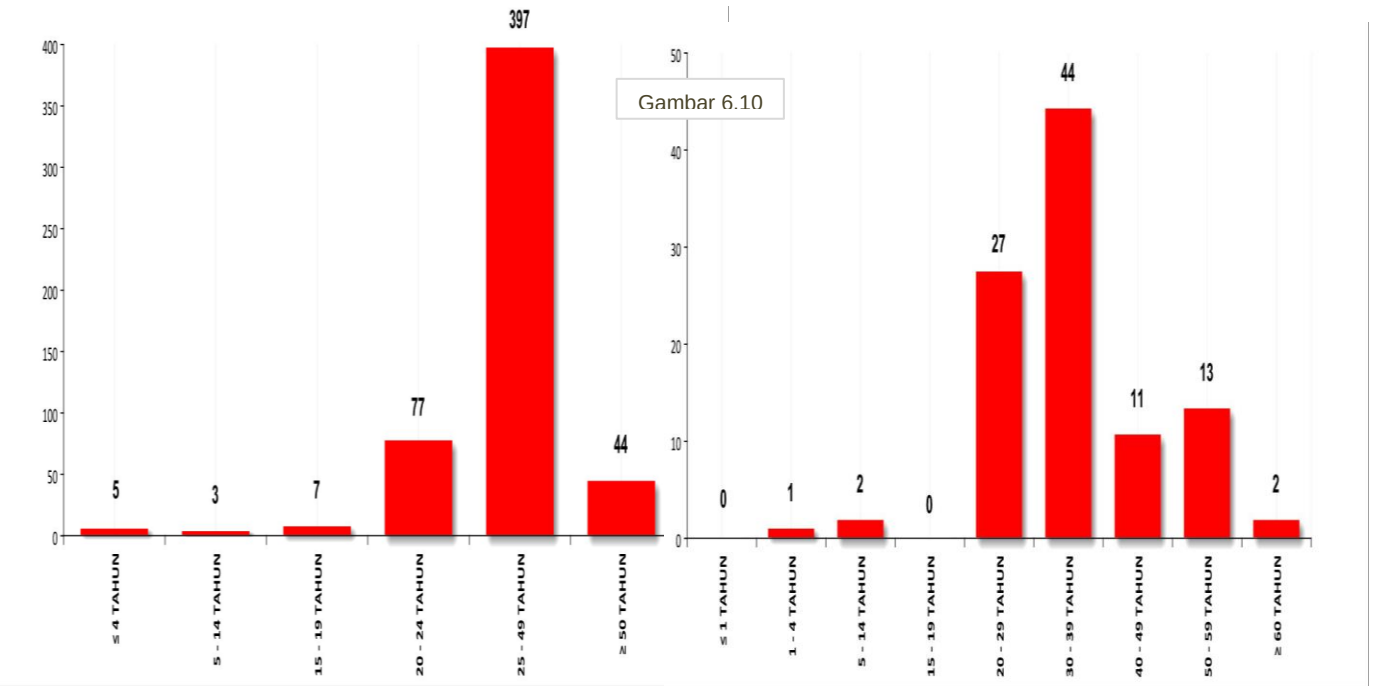
Jumlah penderita HIV tahun 2019 meningkat dua kali lipat dari tahun 2018 sebanyak 268 kasus menjadi 533 kasus. Sedangkan di tahun 2019 jumlah kasus AIDS berbanding terbalik dengan jumlah kasus HIV yang meningkat drastis, dimana tahun 2018 ditemukan 238 kasus turun menjadi 113 kasus. Dengan demikian pengawasan dan pengobatan ARV pada ODHA berjalan dengan baik.

Gambar 6.9



Tetapi, jika dilihat dari trend komulatif jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan secara komulatif dan AIDS dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Jumlah kasus HIV yang dilaporkan secara komulatif dari tahun-tahun sebelumnya, dan di kondisi tahun 2019 menjadi 3.533 kasus dan kasus AIDS sebanyak 2.491 kasus.

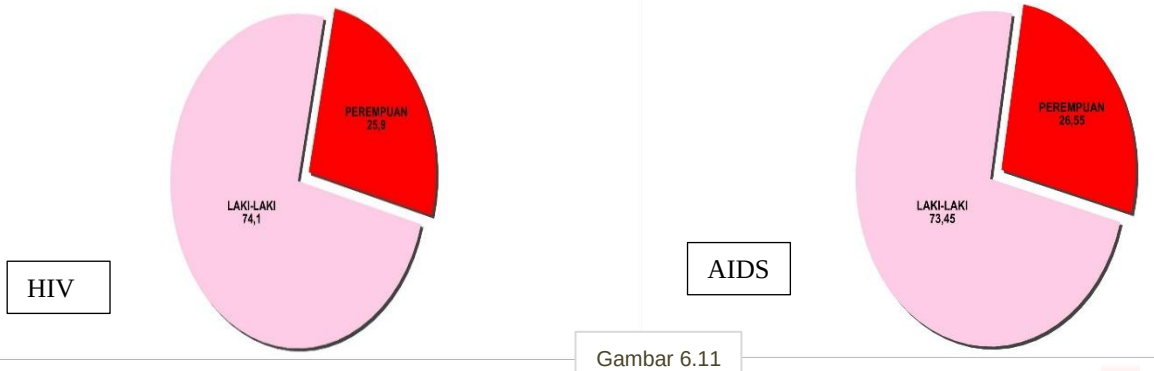
Jumlah kasus Baru HIV dan AIDS di Provinsi Riau



Gambar 6.10

Penderita HIV dari kelompok umur kebanyakan dari usia produktif, umur antara 25 sampai 49 tahun ditemukan sebanyak 74% (397 kasus) dari total semua kelompok umur penderita HIV. Sedangkan penderita AIDS kelompok umur yang paling banyak umur antara 30 sampai 39 tahun sebanyak 44 kasus.

Proporsi HIV dan AIDS Menurut Jenis Kelamin Provinsi Riau Tahun 2019

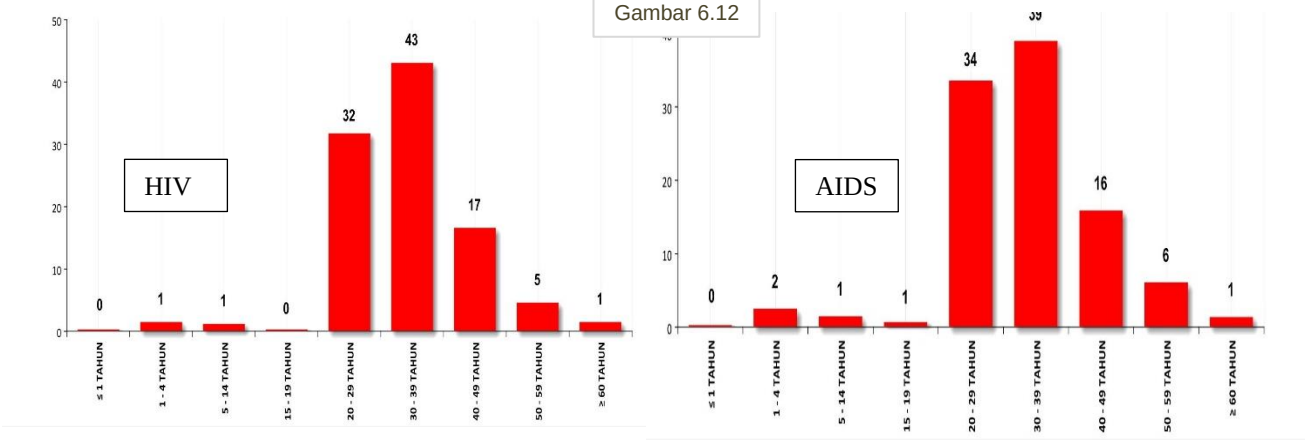


Gambar 6.11

Kasus HIV dan AIDS yang ditemukan dan dilaporkan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki untuk HIV sebanyak 74,1% dan kasus AIDS sebanyak 73,4%

Proporsi Kematian HIV dan AIDS Menurut Kelompok Umur
Provinsi Riau Tahun 2019

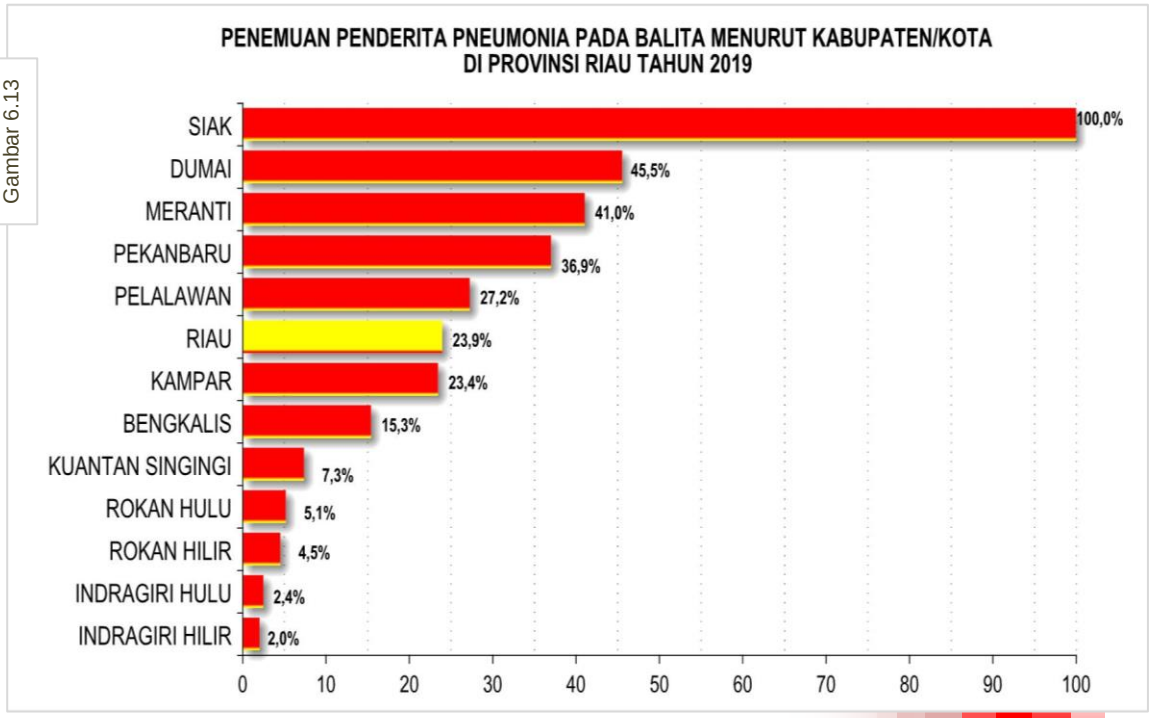
Gambar 6.12



Dilihat dari grafik diatas, pada kondisi tahun 2019 kasus HIV maupun AIDS yang tinggi pada kelompok umur produktif antara 20-49 tahun. Trend jumlah kasus HIV di Provinsi Riau meningkat dari 268 kasus di tahun 2018 menjadi 533 kasus di tahun 2019. Sedangkan kasus AIDS dari tahun 2005-2018 menjadi semakin bertambah karena pasien HIV jika tidak mengikuti anjuran dokter terapi rutin antiretroviral (ARV), maka cenderung mengalami infeksi oportunistik dan terkena AIDS.

3. Pneumonia

Gambar 6.13

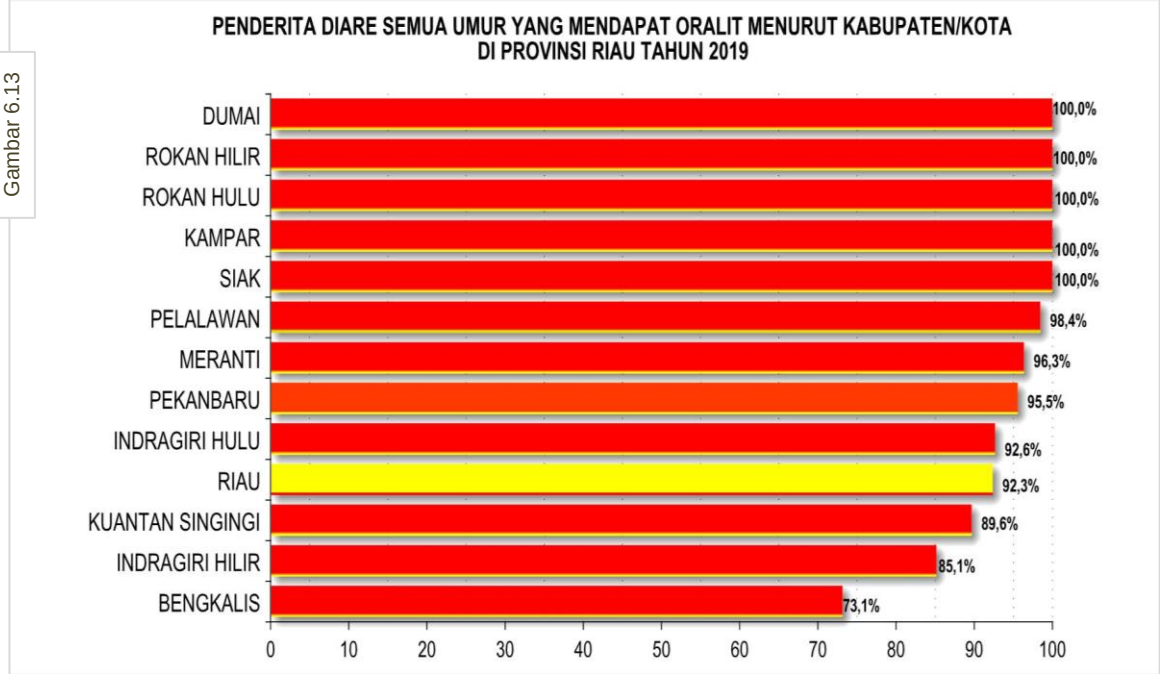


Pneumonia pada balita tahun 2019 di Provinsi Riau sebanyak 23,9%, dan ditemukan >100% di Kabupaten Siak. Pneumonia adalah pembunuh utama pada balita di dunia, data WHO angka kematian pneumonia pada balita berada pada peringkat pertama. Faktor resiko terjadinya pneumonia pada balita antara lain : kurangnya pemberian ASI eksklusif, qizi buruk, dan polusi udara di indoor, Bayi Baru Lahir Rendah, serta kepadatan dan kurangnya imunisasi campak.

4. Diare

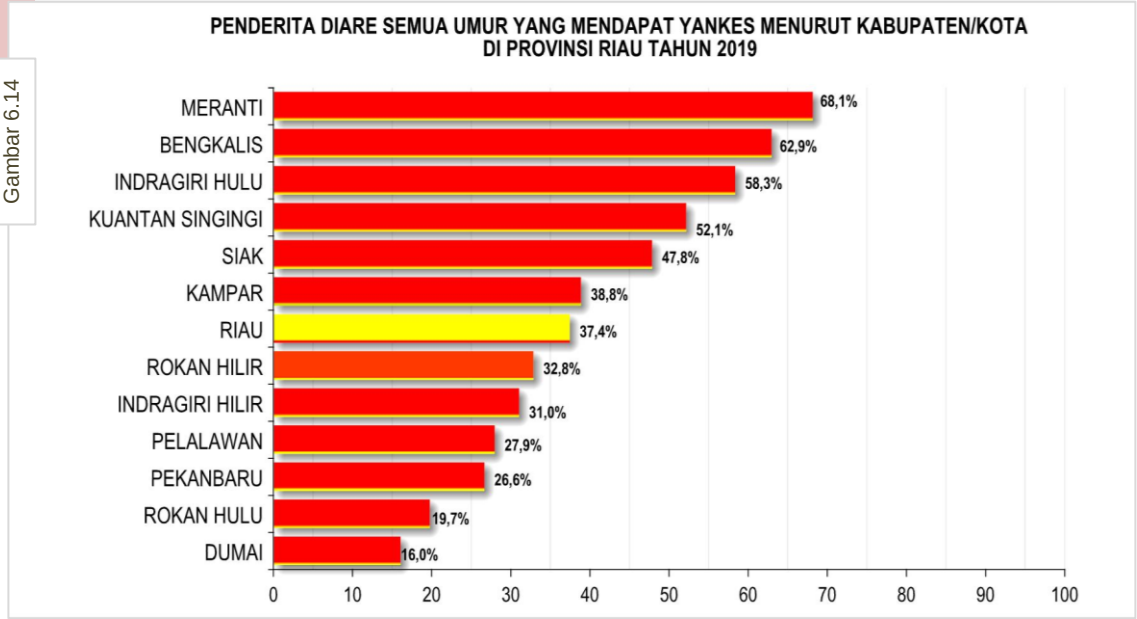
Kasus diare masih tinggi di Provinsi Riau 92,3% karena morbiditas dan mortalitas yang masih tinggi dan pengobatan yg tidak adekuat serta pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam upaya penanggulangan darurat penyakit diare. Target cakupan pelayanan penderita Diare semua umur (SU) yang datang ke sarana kesehatan adalah 10% dari perkiraan jumlah penderita Diare SU (Insidens Diare SU dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Tahun 2018 jumlah penderita diare SU yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 80.498 penderita (42,9%) dan terjadi penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi 70.348 penderita atau 37,4% dari perkiraan diare di sarana kesehatan. Insiden diare semua umur secara nasional adalah 270/1.000 penduduk (Rapid Survey Diare tahun 2015).

Gambar 6.13



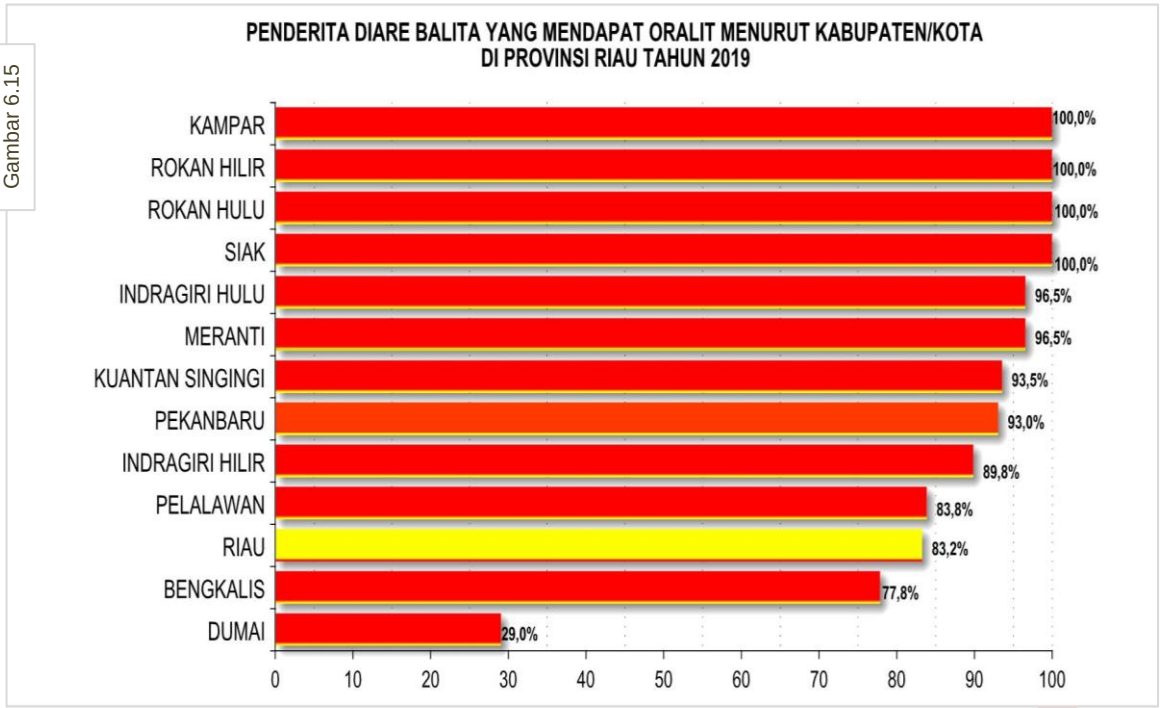
Penderita Diare semua umur mayoritas telah mendapatkan oralit sebanyak 92,3%, bahkan kabupaten/kota yg telah mencapai 100% yaitu Kota Dumai, Rokan hilir, Rokan Hulu, Kampar, Siak, sedangkan Kabupaten yang pemberiannya paling rendah yaitu Kabupaten Bengkalis 73%.

Gambar 6.14



Sedangkan kasus diare semua umur yang mendapatkan layanan kesehatan sekitar 37,4%, yang capaiannya masih rendah yaitu Kota Dumai 16%, Kabupaten Rokan Hulu 19,7% dan Kota Pekanbaru 26,6%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingginya pengetahuan masyarakat tentang penanganan pertolongan pertama penyakit diare, dan masyarakat telah mandiri dapat menanggulangi penyakitnya sendiri Kasus diare pada balita yang mendapatkan layanan kesehatan dengan pemberian mineral seng atau zinc (Zn) di kabupaten/kota rata-rata sudah baik sekitar >80%.

Gambar 6.15



Target cakupan pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan adalah 20% dari perkiraan jumlah penderita diare balita (Insidens diare balita dikali jumlah balita di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Tahun 2019 jumlah penderita diare balita yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 28.466 (4,1%) dari perkiraan diare di sarana kesehatan. Diare pada balita yang mendapatkan oralit di Provinsi Riau rata-rata 83,2%.

Gambar 6.16

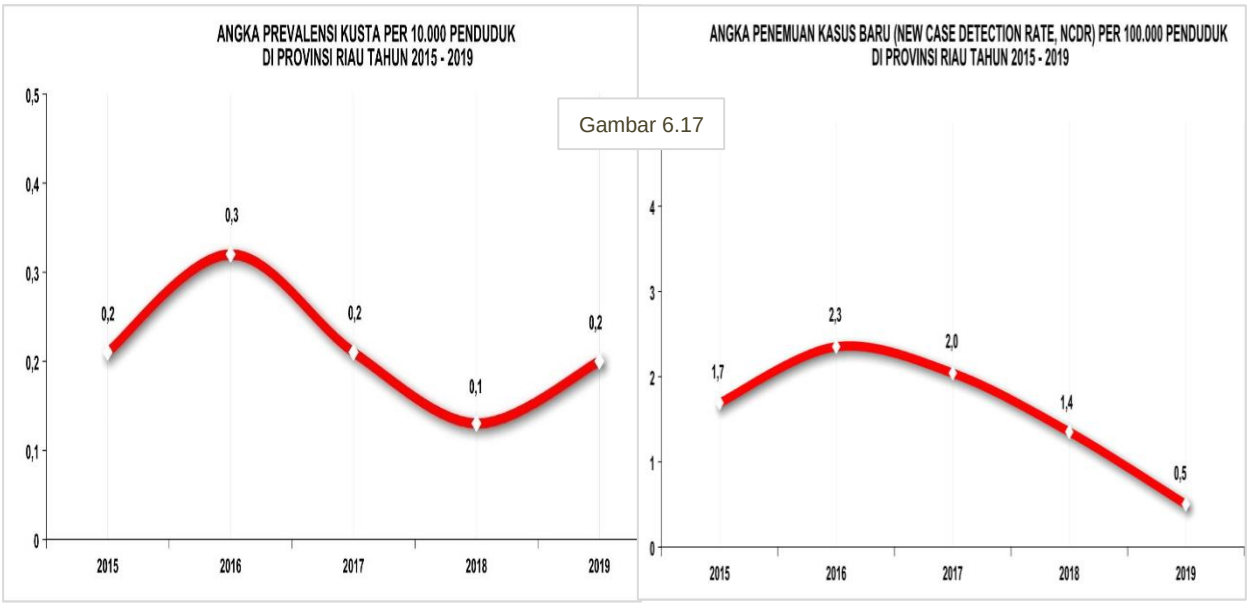


Pemberian oralit saja tidak cukup karena diare pada anak sangat erat kaitannya dengan defisiensi dan kekurangan Zinc dan sering terjadi pada anak kekurangan qizi. Zinc merupakan mikronutrien dalam berbagai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Manfaat penggunaan Zinc agar anak penderita diare kebal terhadap penyakit diare selama 3 bulan berikutnya.

Analisanya bahwa masyarakat telah mengetahui manfaat tablet zinc untuk mencegah kematian akibat diare dan tidak cukup hanya dengan pemberian oralit saja, untuk perbaikan mukosa usus dan mempercepat pemulihan anak pasca diare. Dari data diatas terlihat bahwa penanggulangan penyakit diare dengan pemberian oralit (92,9%) lebih tinggi dibandingkan pemberian Zinc (94,8%).

5. Kusta/Leprae

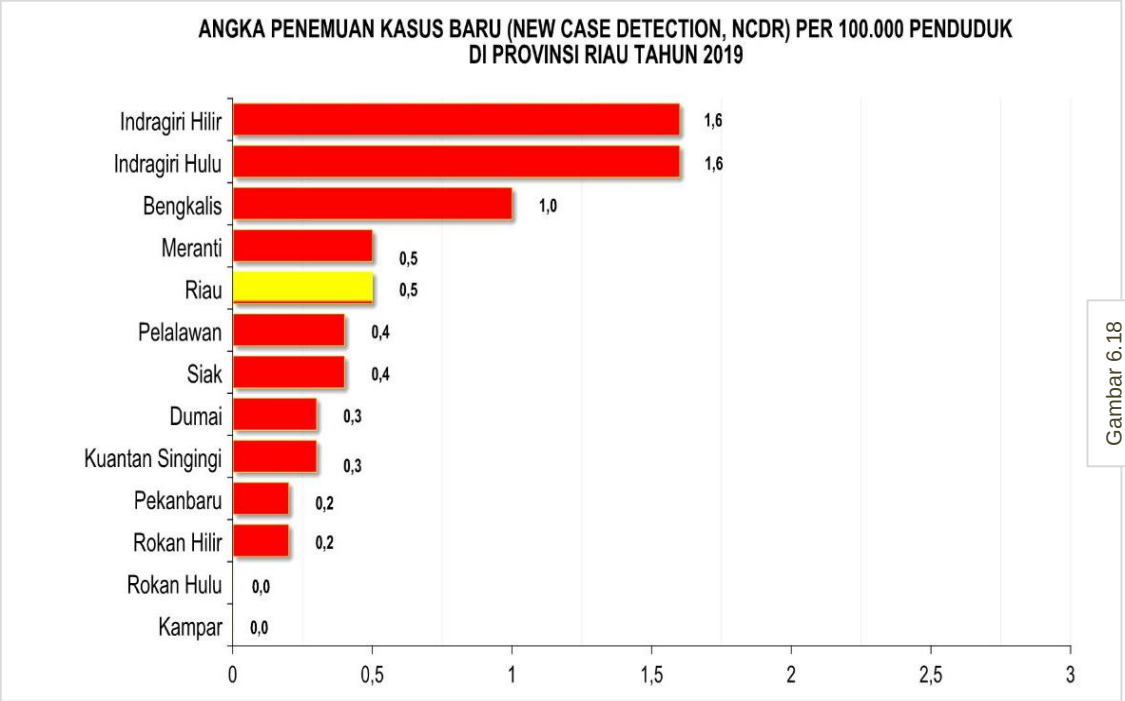
Penyakit ini terjadi di banyak negara terutama negara dengan iklim tropis atau subtropis seperti Indonesia. Penyakit ini dulunya ditakuti sebagai penyakit yang sangat menular dan mematikan, penderita kusta sering di kucilkan oleh masyarakat. Saat ini, lepra sudah bisa diobati dengan efektif dan penularannya pun bisa ditekan. Penyakit kusta disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Leprae* , atau disebut juga lepra atau penyakit Hansen yang menyebabkan borok kulit, kerusakan saraf, dan kelemahan pada otot bahkan dapat menyebabkan cacat parah dan cacat signifikan.



Gambar 6.17

Dilihat dari tabel diatas untuk Prevalensi penyakit kusta di Provinsi Riau tahun 2015 – 2019 trendnya cenderung meningkat menjadi 0,2 per 10.000 atau < 1 per 10.000 penduduk dan penemuan kasus baru New Case Detection Rate (NCDR) ditemukan 0,5 per 100.000 penduduk atau < 1 /100.000 penduduk.

Setelah lima tahun, tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta mulai muncul, seperti kulit mengalami bercak putih, merah, rasa kesemutan bagian anggota tubuh hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen atau cacat pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.



Gambar 6.18

Pada tahun 2018 lalu, Provinsi Riau telah mendapatkan sertifikat eliminasi kusta secara keseluruhan sementara eliminasi kabupaten/kota belum terpenuhi secara menyeluruh, karena masih ditemukan kasus kusta baru di beberapa Kabupaten/kota. Tahun 2019 ditemukan penderita kusta baru sebanyak 35 orang, rata-rata ± 1- 2 orang di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Bengkalis.

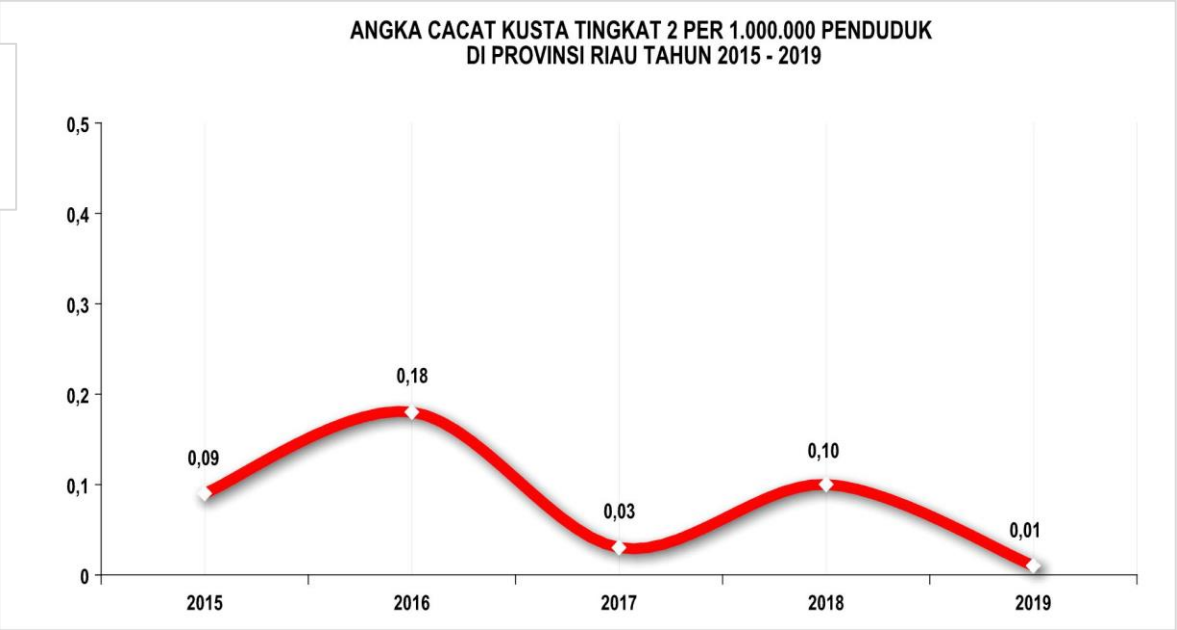


Gambar 6.19

Kebanyakan penderita kusta berasal dari golongan ekonomi lemah, sangat lambat perkembangan penularannya dengan masa inkubasi sekitar 5 tahun dan gejalanya dapat memakan waktu selama 20 tahun. Berdasarkan hasil riset penularan kusta berpengaruh terhadap jenis kelamin. Dan berdasarkan Proporsi penderita baru

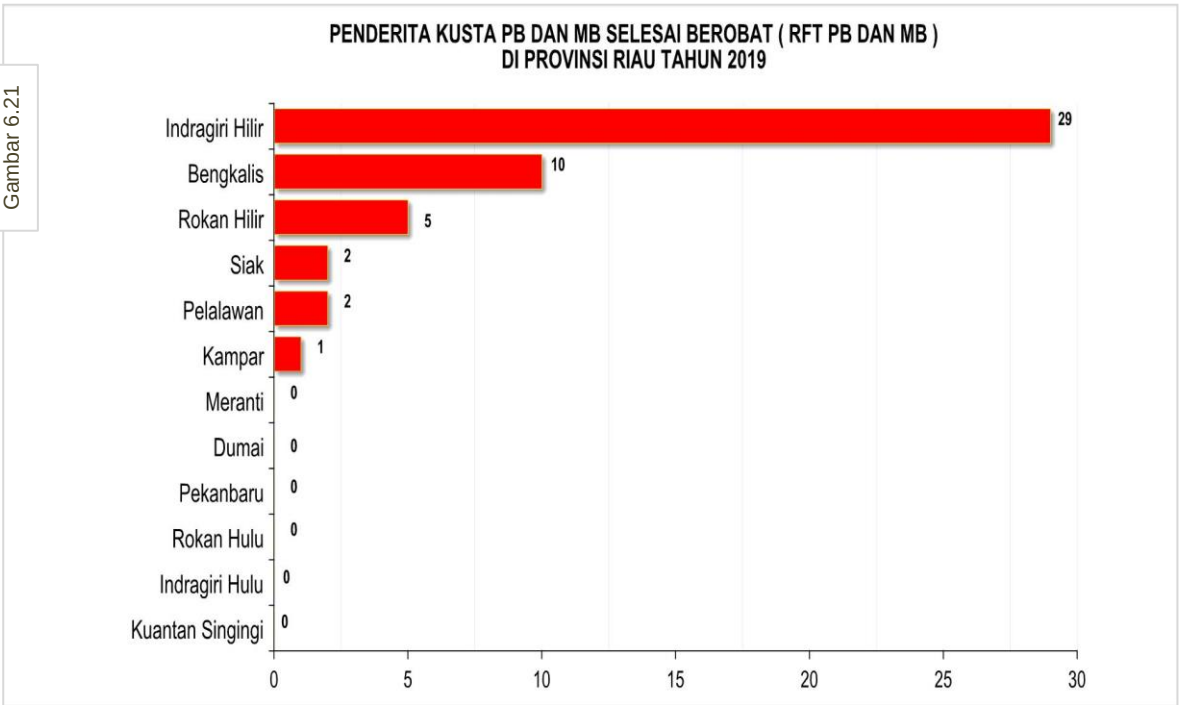
kusta Provinsi Riau tahun 2019, lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki daripada perempuan dengan perbandingan rasio 1 : 2.

Gambar 6.20



Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Riau tergolong dalam *low burden* untuk kasus Kusta karena penemuan kasus baru kusta tahun 2019 (< 10 per 1.000.000 penduduk), yaitu 0,01 per 1.000.000 penduduk dan NCDR per kabupaten/kota tidak melebihi target nasional (< 5 per 100.000 penduduk).

Gambar 6.21

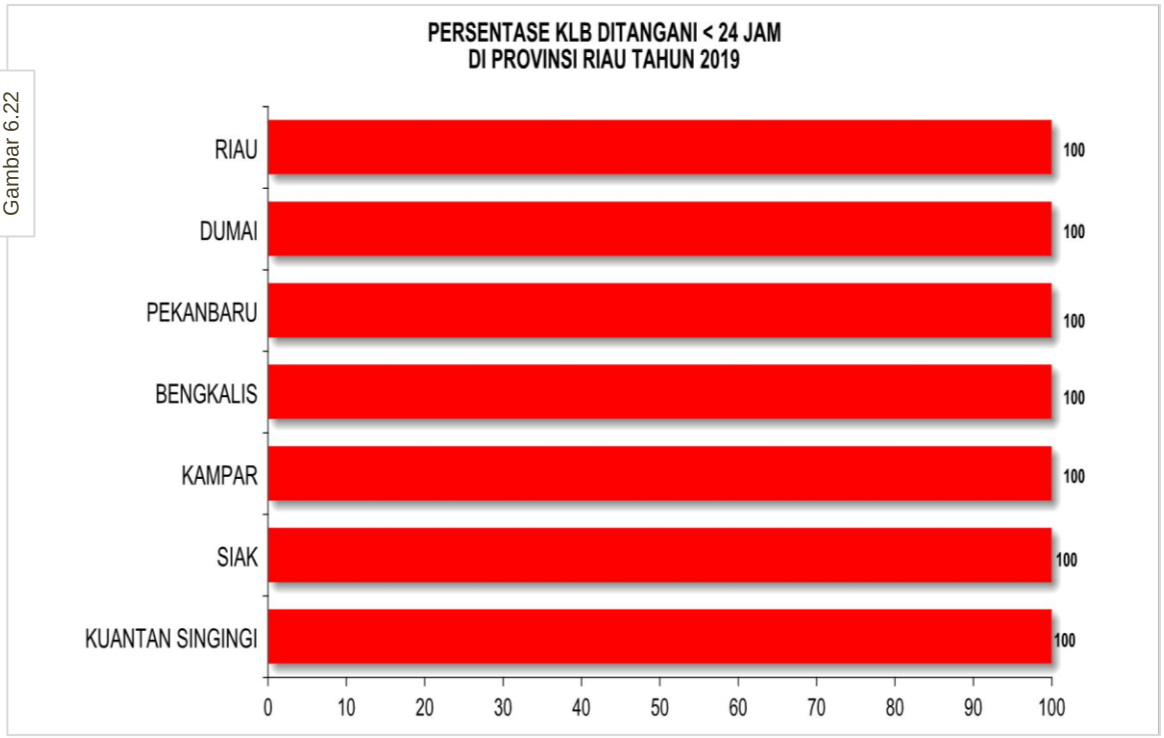


Tahun 2019, ditemukan kasus baru penderita kusta di Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis dan Rokan Hilir. Kabupaten yang paling banyak ditemukan penderita penyakit kusta yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 29 orang. Jumlah penderita kusta di Provinsi Riau ditemukan sebanyak 35 orang yang sedang menjalani pengobatan.

6. Kejadian Luar Biasa

Kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia masih cukup menjadi perhatian dunia kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh tingginya angka KLB menjadi salah satu indikator kesuksesan upaya preventif bidang kesehatan dalam bidang surveillans epidemiologi.

Gambar 6.22



Apabila KLB terjadi di suatu daerah, maka tim surveillans epidemiologi harus cepat melaksanakan penyelidikan epidemiologi (PE) guna untuk mencegah distribusi penyakit. Target propinsi Riau untuk krisis kesehatan termasuk KLB yang dilakukan penanggulangan < 24 jam di Propinsi Riau yaitu 100%. Sedangkan kabupaten/kota yang lain tidak ada kejadian luar biasa.

7. Hepatitis (HbsAg)

HBsAg adalah kepanjangan dari Hepatitis B surface Antigen, yang merupakan antigen permukaan virus hepatitis B. Pemeriksaan HBsAg dilakukan untuk memastikan diagnosis hepatitis B. Jika hasil pemeriksaan HBsAg positif, berarti Anda terinfeksi virus hepatitis B (VHB) dan berisiko menularkan penyakit ini ke orang lain melalui darah atau cairan tubuh. Dan secara Nasional target Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil. untuk tahun 2020 yaitu 95% kabupaten/kota sudah melaksanakan DDHB Infeksi kronik hepatitis B sangat sering (lebih dari 90%) terjadi pada bayi yang terinfeksi dari ibunya. Angka penularan secara vertikal dari ibu pengidap Hepatitis B kepada bayinya cukup tinggi.

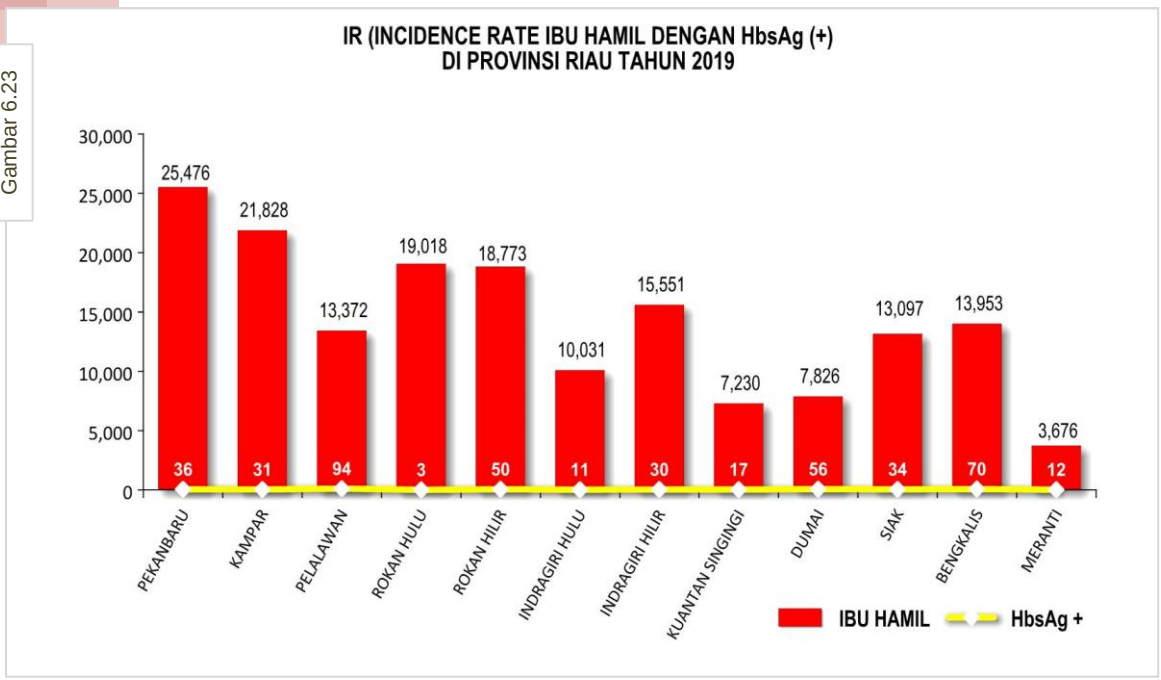
Indonesia sudah melakukan upaya pengendalian Hepatitis B sejak tahun 2014. Percepatan Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis tahun 2022 yang bekerja sama dengan program kesehatan keluarga, dan bertujuan untuk memutuskan rantai penularan secara komprehensif guna mencapai target yaitu 3 (tiga) Zero, yaitu (1). *zero new infection* (menurunnya jumlah kasus baru, serendah mungkin), (2.) *zero death* (menurunnya angka kematian), (3). *zero stigma and discrimination* (menurunnya tingkat diskriminasi serendah mungkin), dan peningkatan kualitas hidup. Data Subdit HISP (Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan) Kementerian Kesehatan RI tahun 2013-2015, menunjukkan bahwa daerah endemis hepatitis B umumnya menular dari ibu ke anak saat persalinan (transmisi perinatal) atau akibat perjalanan darah (transmisi horizontal). Sedangkan penularan pada anak, tidak terinfeksi dalam usia 5 tahun pertama kehidupan.

a) Menurunkan Prevalensi Rate HbsAg

Menurut badan Kesehatan Dunia (WHO) berdasarkan prevalensi HBsAg, endemisitas hepatitis suatu wilayah/Negara dapat dikategorikan Rendah (<2%),Sedang rendah (2-4%),Sedang tinggi (5-7%), dan Tinggi (>8%) .

Upaya pengendalian penyakit Hepatitis telah dilaksanakan di semua kabupaten/kota Propinsi Riau dan tahun 2020 semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota 100% telah dapat melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil.

Gambar 6.23



Dari data di atas terlihat bahwa Incidence Rate (IR) Hepatitis masih di bawah target WHO (*low endemic)*, tetapi harus diwaspadai bahwa belum semua kasus terjaring, mengingat hepatitis sering tidak disadari oleh masyarakat awam. Bagi penderita hepatitis B,C dan D (jarang) ditularkan secara *parenteral,* dapat menjadi kronis dan menimbulkan sirosis / kanker hati. Sedangkan, Hepatitis A dan E sering muncul sebagai kejadian luar biasa, ditularkan secara *fecal oral* dan biasanya berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, bersifat akut dan dapat sembuh dengan baik.

Dalam upaya pengendalian virus hepatitis, telah dilakukan 5 (lima) aksi utama yaitu : (a). peningkatan kesadaran, (b). kemitraan dan mobilisasi sumber daya, (c). pengembangan surveilance Hepatitis untuk mendapatkan data sebagai dasar untuk penyusunan respons penanggulangan, (d). memperkuat hukum dan peraturan, (e). upaya pencegahan secara komprehensif dan deteksi dini, serta tindak lanjutnya yang mencakup akses perawatan, dukungan dan pengobatan.

b) Jumlah Ibu Hamil per Puskesmas dengan HbsAg (+)

Penemuan Penderita Ibu Hamil dengan HbsAg (+) per Puskesmas dan Rumah sakit tahun 2019 seperti tergambar pada tabel di bawah ini :

Jumlah Ibu Hamil dengan HBsAg Per Puskesmas di Provinsi Riau Tahun 2019

No	Nama Puskesmas	Jml Ibu hamil	HBsAg (+)
1	Pekanbaru	25.476	36
2	Kampar	21.828	31
3	Pelalawan	13.372	94
4	Rokan Hulu	19.018	3
5	Rokan Hilir	18.773	50
6	Indragiri Hulu	10.031	11
7	Indragiri Hilir	15.551	30
8	Kuantan Singingi	7.230	17
9	Dumai	7.826	56
10	Siak	13.097	34
11	Bengkalis	13.953	70
12	Meranti	3.676	12
Total		169.831	444 (0,26%)

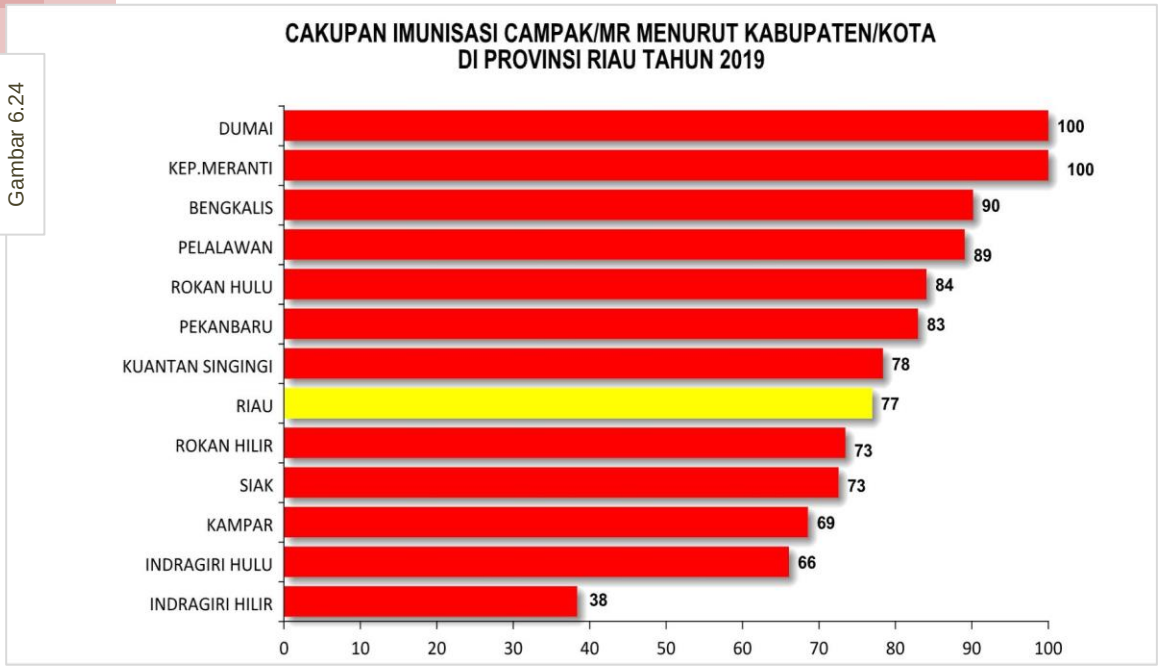
Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pasien Hepatitis (HbsAg (+)), setelah dilakukan deteksi dini ibu hamil dengan Hepatitis B, maka Insiden Rate pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,26 %, yang tahun sebelumnya hanya 0,16%. Dan presentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B dan C pada kelompok berisiko yaitu 90%, sudah memenuhi target.

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

1. Campak Mesles Rubella (MR)

Cakupan imunisasi campak / Measles Rubella (MR) Provinsi Riau tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 79% (target Renstra 95%). Pemberian imunisasi campak rutin untuk bayi usia minimal 9 bulan dan anak sekolah kelas 1 SD, mulai bulan September 2018 sudah diganti dengan imunisasi Measles Rubella (MR) setelah pelaksanaan kampanye imunisasi Measles Rubella (MR). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

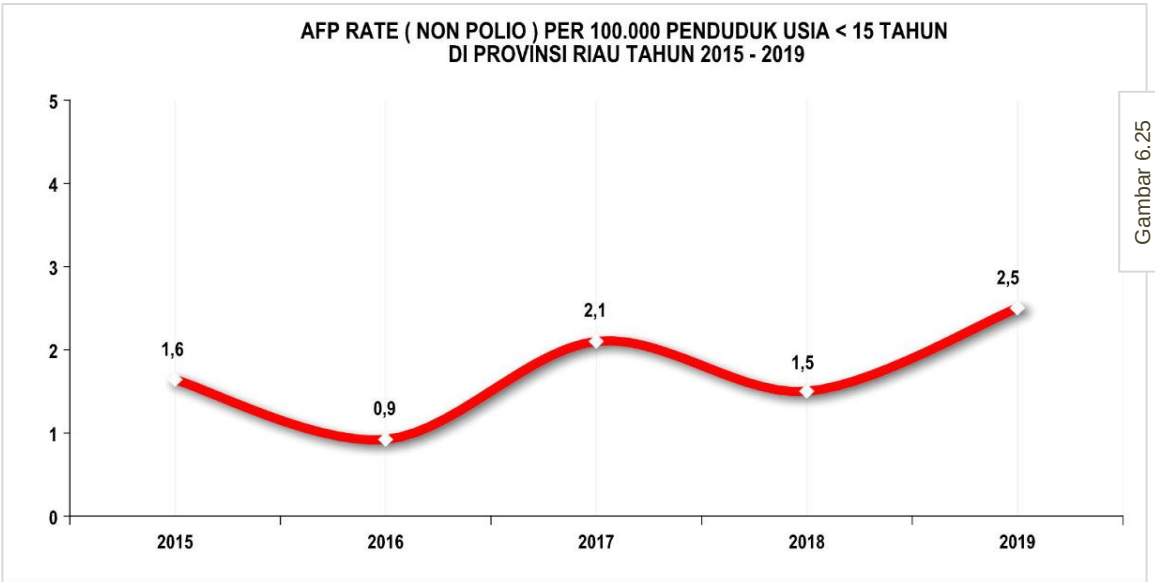
Gambar 6.24



Cakupan imunisasi Campak / Measles Rubella (MR) Provinsi Riau tahun 2019 telah mengalami peningkatan, meski belum mencapai target dengan pencapaian hanya 76,9% (target 95%). Kabupaten / Kota yang mencapai target hanya ada 2 Kabupaten yaitu Kota Dumai 108,7%, dan Kepulauan Meranti 100%. Kabupaten / Kota yang tidak mencapai target ada 10 Kabupaten / Kota dengan cakupan terendah Kabupaten Inhil 38,3%, Inhu 66%, Kampar 68,5%, Siak 72,5%, Rohil 73,4%, Kuansing 78,3%, Pekanbaru 82,9%, Rohul 84%, Pelalawan 89% dan Bengkalis 90,1%.

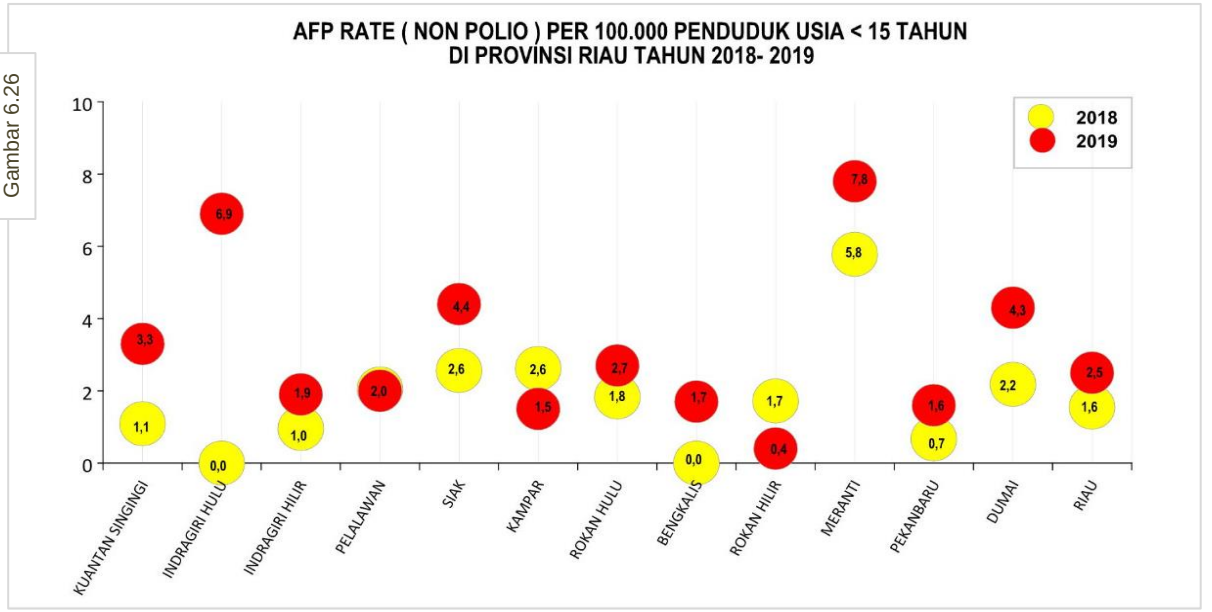
2. Acute Flaccid Paralysis (AFP)

Gambar 6.25



Dilihat dari trend kasus AFP tahun 2015-2019 terjadi peningkatan dan rata-rata ditemukan pertahun sekitar 2-3 orang per 100.000 penduduk dari jumlah penduduk usia < 15 tahun sebanyak 2.095.663.

Gambar 6.26



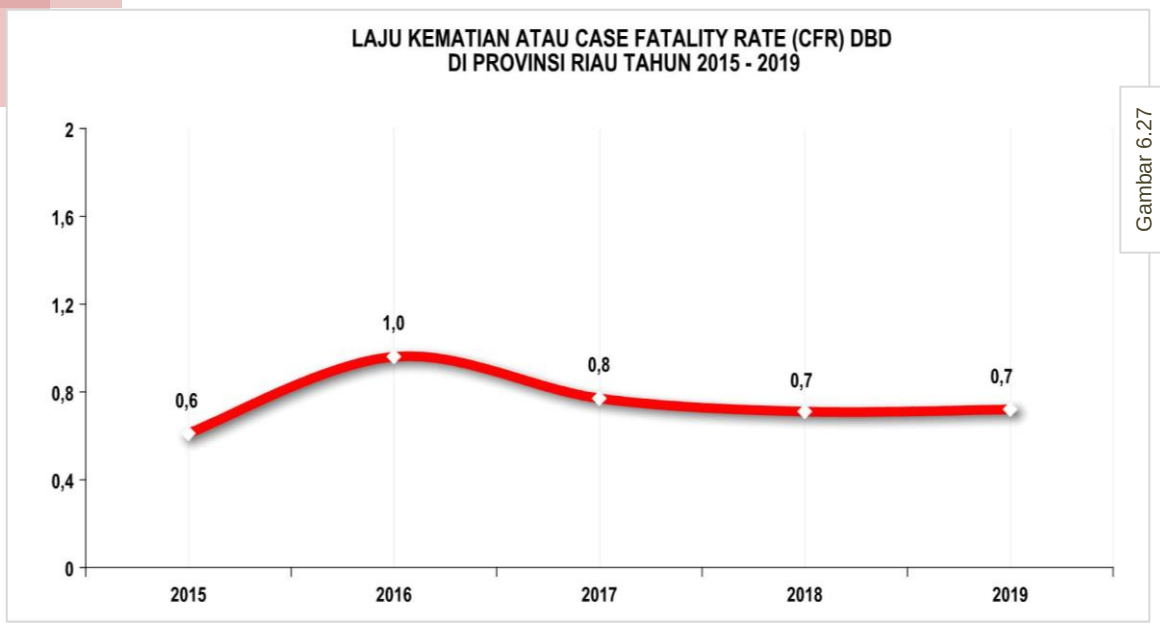
Acute Flaccid Paralysis (lumpuh layu) disebabkan oleh virus dan gejala polio dapat menimbulkan kelumpuhan dan lumpuh layu. Jumlah kasus AFP usia < 15 tahun yang ditemukan di Provinsi Riau sebanyak 53 orang. Peningkatan kasus ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu ditemukan 9 orang (6,9 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Siak ditemukan 7 orang (4,4 per 100.000 penduduk).

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK

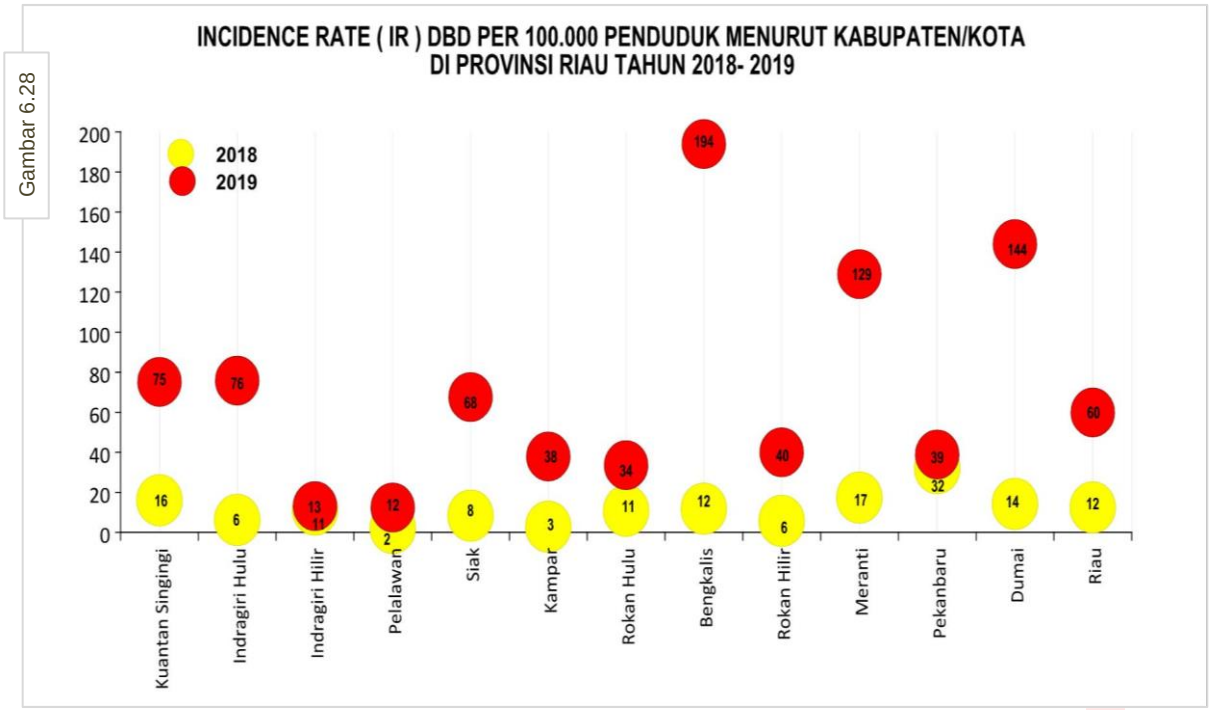
1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus aedes, terutama Aedes aegypti atau albopictus. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dan berpotensial untuk terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan merupakan ancaman bagi masyarakat luas.

Provinsi Riau jumlah kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2019 sebanyak 4.135 orang dan angka kematian sebanyak 30 orang (IR/Angka kesakitan = 59,9 per 100.000 penduduk dan CFR / Angka kematian = 0,7%). Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan dimana IR / Angka kesakitan sebesar 12,44 per 100.000 penduduk.



Laju kematian CFR Penyakit Demam Berdarah terjadi peningkatan tajam di tahun 2015 (0,6%) tetapi belum terjadi outbreaks dan dimulai tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi penurunan angka kematian akibat DBD. Dan menurut hasil pengamatan penyakit DBD akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi jika CFR >1%, dengan demikan pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kabupaten/kota yang memiliki CFR tinggi yakni Kabupaten Rohul 2,2%, dan Kabupaten Inhil 1%.



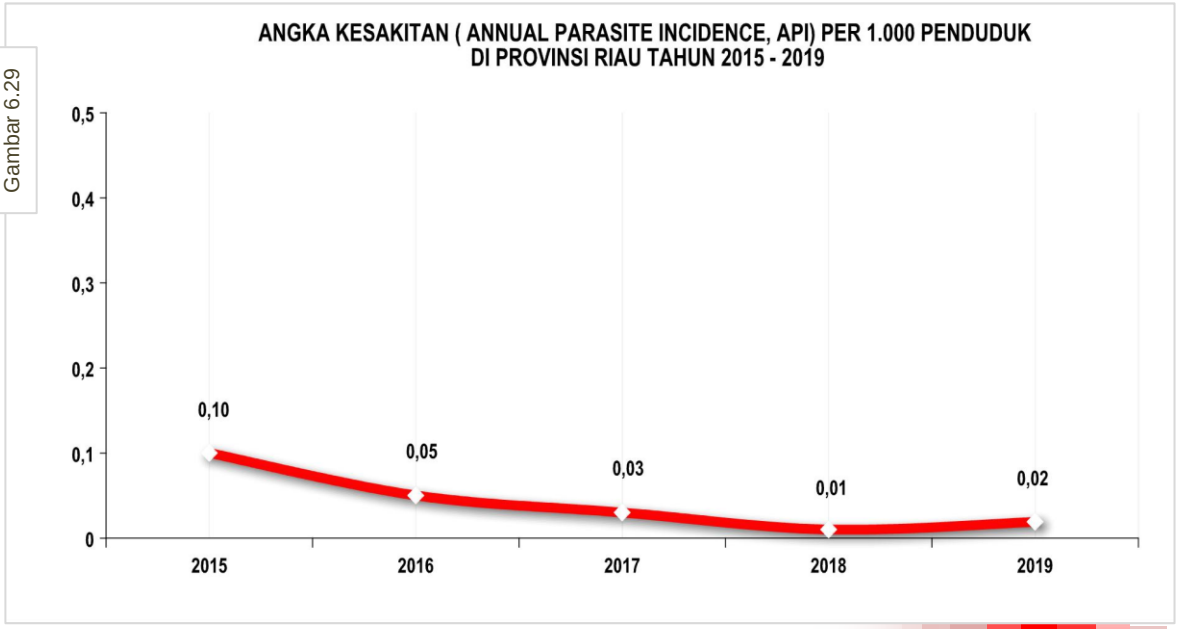
Kasus baru penyakit Demam Berdarah (incidence rate) Provinsi Riau tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari 12 per 100.000 menjadi 59,9 per 100.000 penduduk, dimana target yang telah ditentukan yaitu < 49 per 100.000 penduduk. Demikian juga hampir disemua kabupaten/kota terjadi peningkatan. Kabupaten yang mengalami peningkatan penemuan kasus DBD yang tinggi yaitu kabupaten Bengkalis, dimana tahun 2018 ditemukan 12 orang kasus DBD per 100.000 penduduk meningkat di tahun 2019 menjadi 194 per 100.000 penduduk.

2. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembangbiak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina. Di Provinsi Riau, hampir semua kabupaten/kota telah eliminasi malaria, hanya 2 (dua) kabupaten yang belum yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan secepatnya menuju eliminasi karena secara nasional 2030 Indonesia eliminasi Malaria

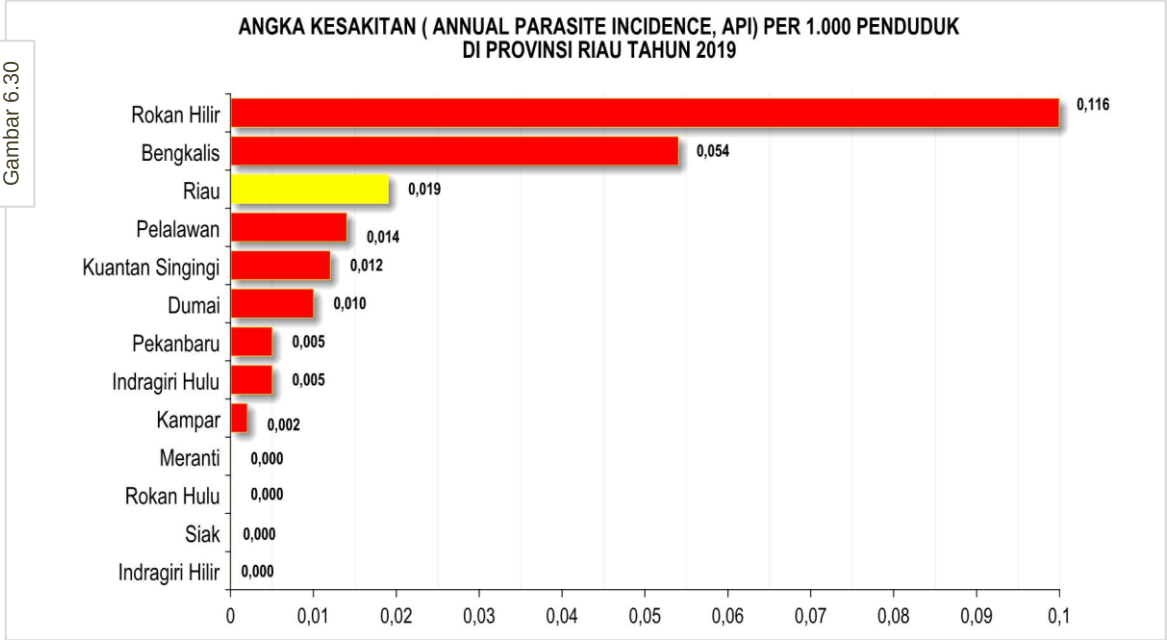
Untuk percepatan pencapaian target, kegiatan operasional program malaria di layanan kesehatan melaksanakan penemuan penderita malaria melalui *Pasif Case Detection, Active Case Detection* berupa *Mass Blood Survey* (MBS) dan *Mass Fever Survey* (MFS). Indikator Utama Program Malaria antara lain : (a). API (Annual Parasite Incidence) dengan penegakkan diagnosa kasus malaria (+) harus melalui pemeriksaan laboratorium sehingga tidak ada lagi kasus malaria (+) berdasarkan pemeriksaan klinis; (b). Slide Positive Rate < 5 % ; (c).tidak ada indigenous /penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut.

Gambar 6.29



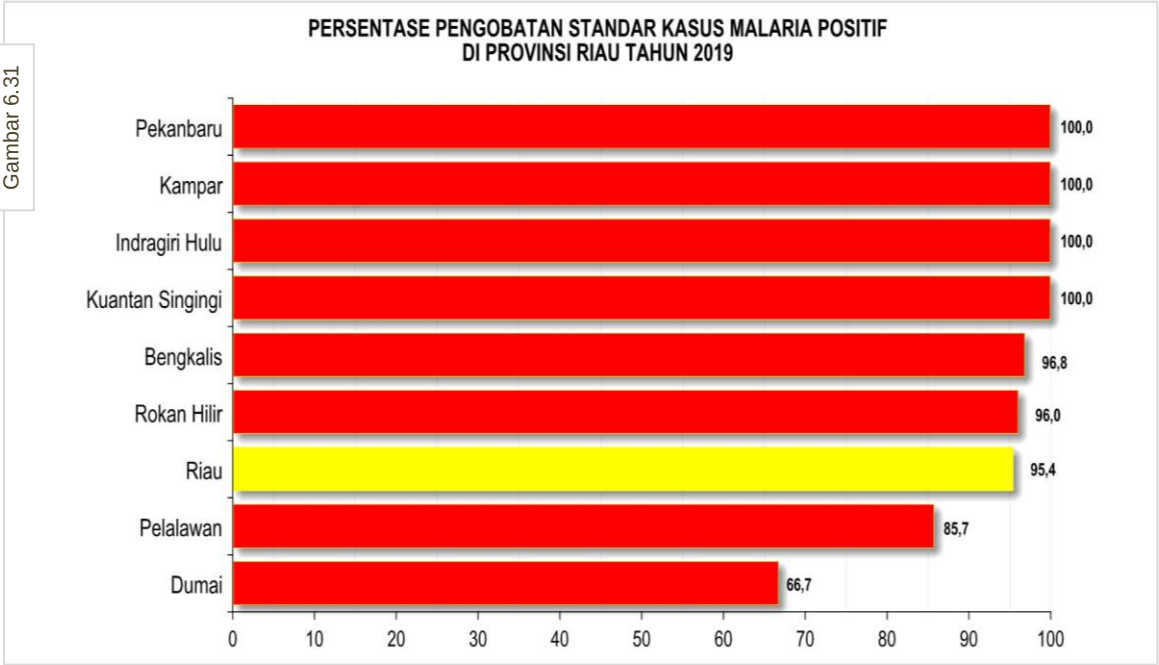
Annual Parasite Incidence (API) dengan konfirmasi laboratorium positif di Provinsi Riau dari Tahun 2015-2019 telah mengalami penurunan drastis dari 0,10 per 1.000 penduduk hingga mencapai 0,02 per 1.000 penduduk (target Renstra dan nasional API < 1 per 1.000 penduduk).

Gambar 6.30



Kasus malaria di Provinsi Riau tahun 2019 dari yang dilakukan pemeriksaan laboratorium sebanyak 4.247 orang, dengan pemeriksaan secara mikroskopis 2.382 orang dan menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) sebanyak 1.865 orang. Dari jumlah tersebut, ternyata yang hasilnya positif ada 130 orang, API tertinggi yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis tetapi masih memenuhi target (API < 1 per 1.000 penduduk).

Gambar 6.31



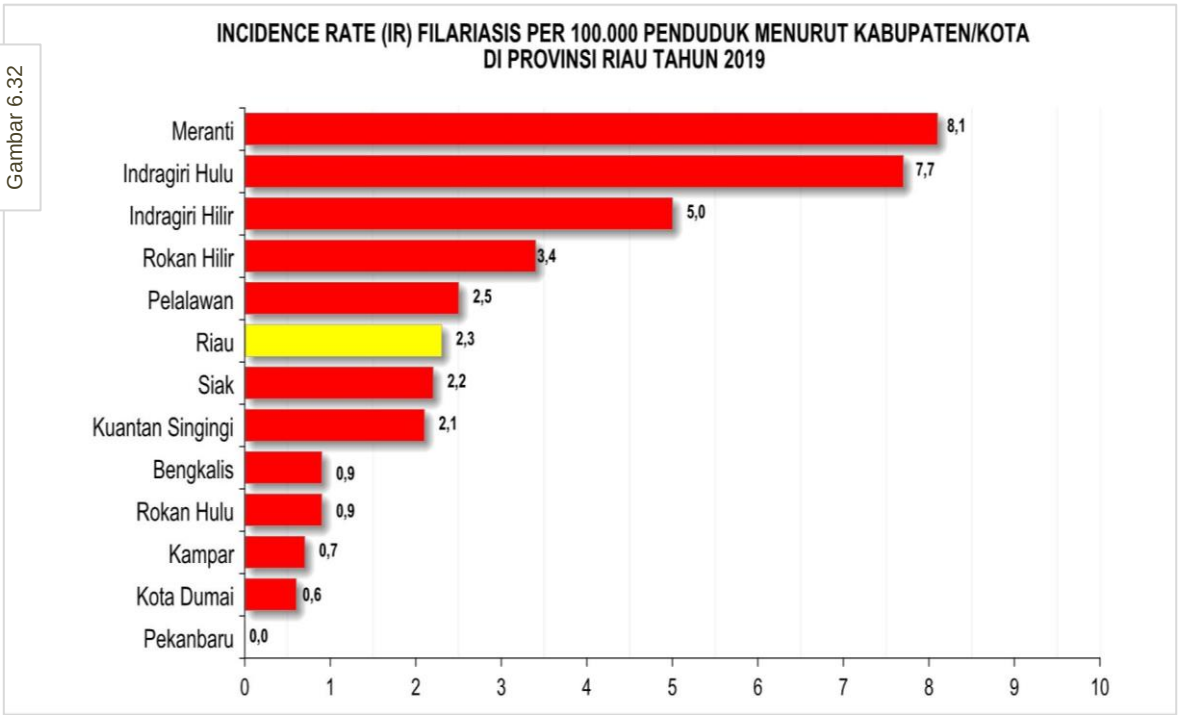
Jumlah kasus malaria di Provinsi Riau yang ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 130 orang dan yang mendapatkan pengobatan yang terstandar 124 orang (95,4%) dari seluruh jumlah suspek 3.965 orang. Kabupaten /kota yang belum dapat memberikan pengobatan yang terstandar bagi pasien malaria yang positif yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai.

3. Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan infeksi cacing filarial yang ditularkan melalui gigitan berbagai jenis nyamuk. Program eliminasi filariasis menjadi prioritas nasional dengan agenda utama melaksanakan kegiatan filariasis untuk memutus rantai penularan. Persentase kabupaten/kota terbanyak yang endemis filariasis tahun 2017 di Indonesia, Provinsi Riau mendapatkan peringkat ke 3 (tiga) yaitu 83,3% dengan 10 (sepuluh) dari 12 kabupaten/kota yang endemis atau belum terbebas kaki gajah. Dengan penentuan kabupaten/kota endemis maka dilakukan pemberian POPM (Pemberian Obat dan Pencegahan Massal) paling sedikit selama 5 tahun berturut-turut dan monitoring evaluasi.

Angka kesakitan filariasis mengalami penurunan, dari tahun-tahun sebelumnya (komulatif dari tahun 2012) jumlah kasus filariasis ditemukan 226 orang dan IR = 3,3 per 100.000 penduduk dan tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 157 orang dengan IR = 2,3 per 100.000 penduduk.

Gambar 6.32



Penderita Filariasis sudah ada di semua kabupaten/kota Provinsi Riau. Grafik angka Incidace Rate Penyakit filariasis (kaki gajah) tahun 2019 diatas merupakan angka komulatif dari tahun 2012. Dari data diatas terlihat bahwa kasus filariasis banyak ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir 37 orang (5 per 100.000 penduduk), Indragiri Hulu 34 orang (7,7 per 100.000 penduduk) dan Rokan Hilir 22 orang (3,4 per 100.000 penduduk) serta Kepulauan Meranti 15 orang (8,1 per 100.000 penduduk).

4. Rabies (Anjing Gila)

Virus penyebab rabies ditularkan oleh anjing melalui gigitan, cakaran, atau air liur. Namun, terdapat pula hewan lain yang dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia, seperti kucing, kera, musang, bahkan kelinci. Pada kasus yang tergolong sangat jarang, penularan virus rabies juga dapat terjadi dari manusia ke manusia, melalui transplantasi organ.

Tabel 6.2

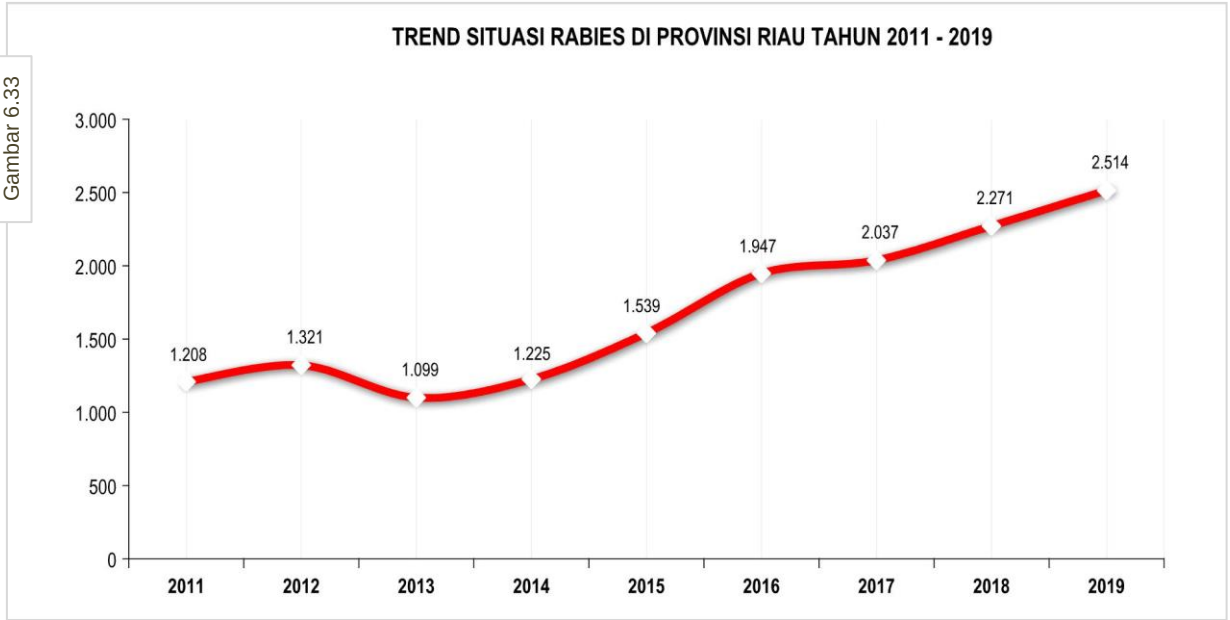
SITUASI KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES (GHPR) TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	KASUS GIGITAN	CUCI LUKA	KASUS DIBERI VAR	KASUS DIBERI SAR	CAKUPAN PEMBERIAN VAR	KASUS LYSSA
1	Pekanbaru	323	322	193	1	59,8%	0
2	Kampar	240	240	223	0	92,9%	0
3	Indragiri Hulu	200	198	182	0	91,0%	0
4	Indragiri Hilir	72	70	66	0	91,7%	0
5	Bengkalis	321	226	307	0	95,6%	0
6	Rokan Hulu	200	199	145	0	72,5%	0
7	Rokan Hilir	235	214	214	0	91,1%	0
8	Siak	276	276	250	0	90,6%	0
9	Kuansing	180	180	169	0	93,9%	1
10	Pelalawan	82	57	54	0	65,9%	0
11	Dumai	317	317	128	0	40,4%	0
12	Meranti	68	65	68	0	100,0%	0
	PROPINSI	**2.514**	**2.364**	**1.999**	**1**	**79,51%**	**1**

Sumber : Data Laporan Bulanan Kab/Kota dan Data dari Seksi Survailans (SKDR)

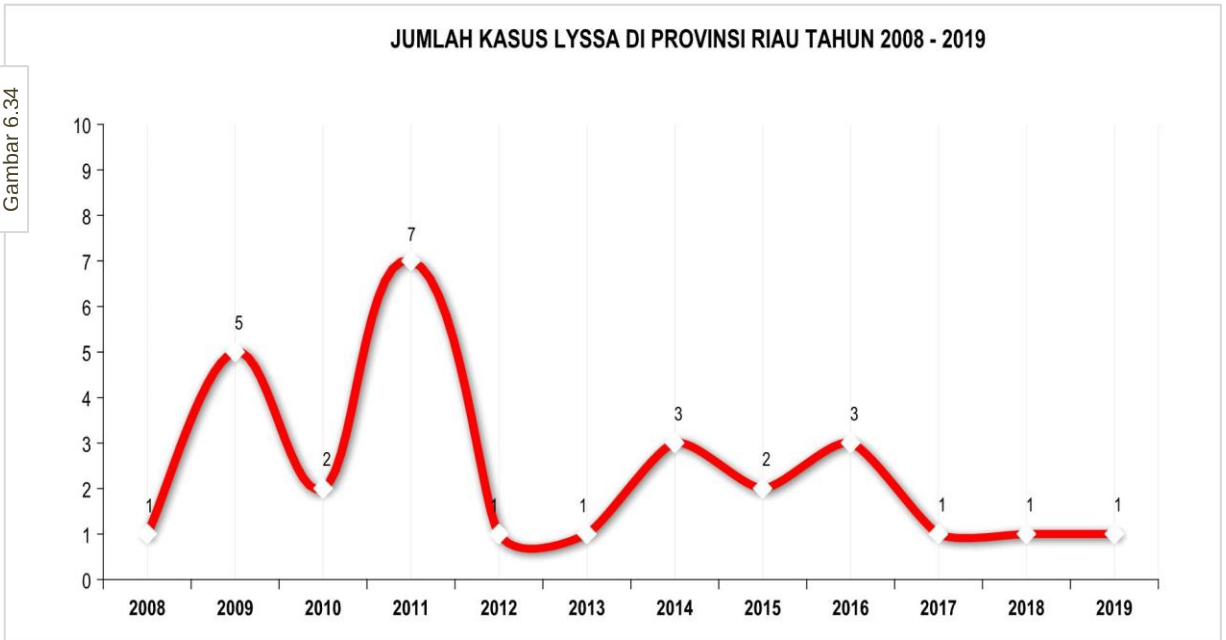
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus GHPR terlaporkan sebanyak 2.514 kasus sedangkan jumlah kasus Lyssa sebanyak 1 orang yaitu di Kabupaten Kuantan Singingi. Data ini meningkat 10% dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 2.271 kasus GHPR. Dan meningkat sebanyak 29% dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 1.947 kasus gigitan.

Gambar 6.33



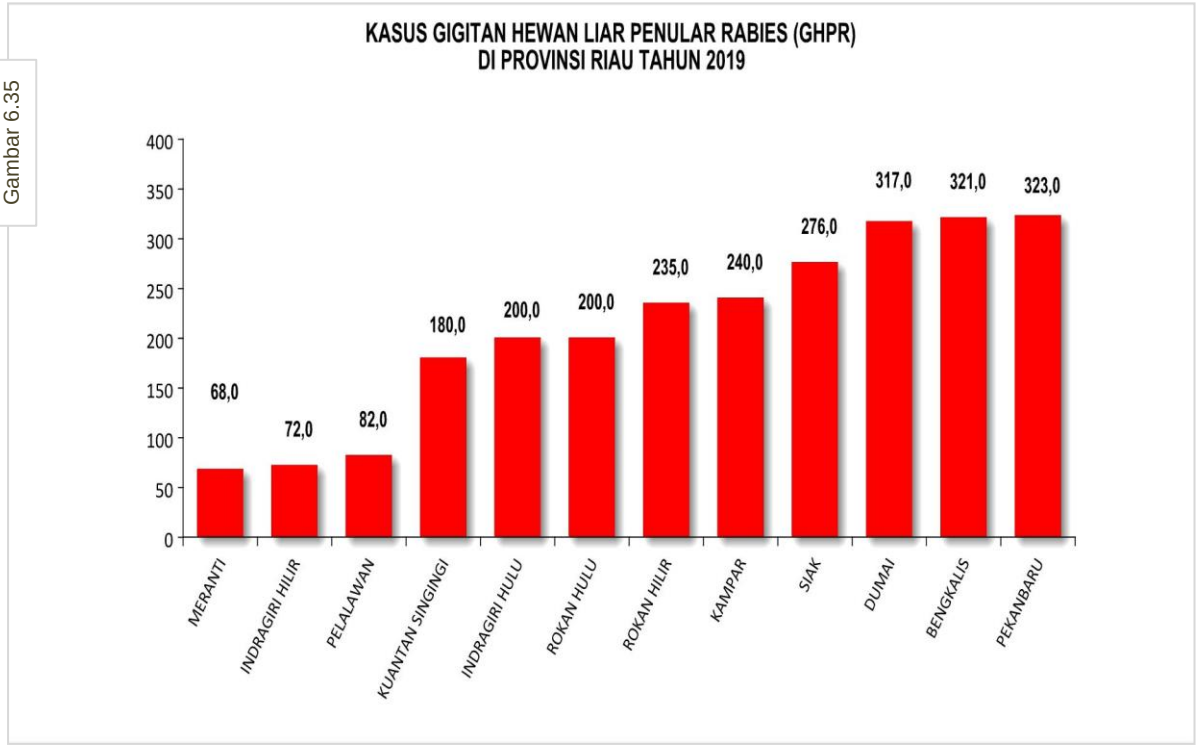
Berdasarkan grafik tersebut diatas, terlihat trend kasus GHPR cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Riau. Peningkatan tersebut sekitar 5 s.d 10% setiap tahunnya. Peningkatan ini seiring dengan pertambahan penduduk dan pertambahan populasi HPR yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 6.34



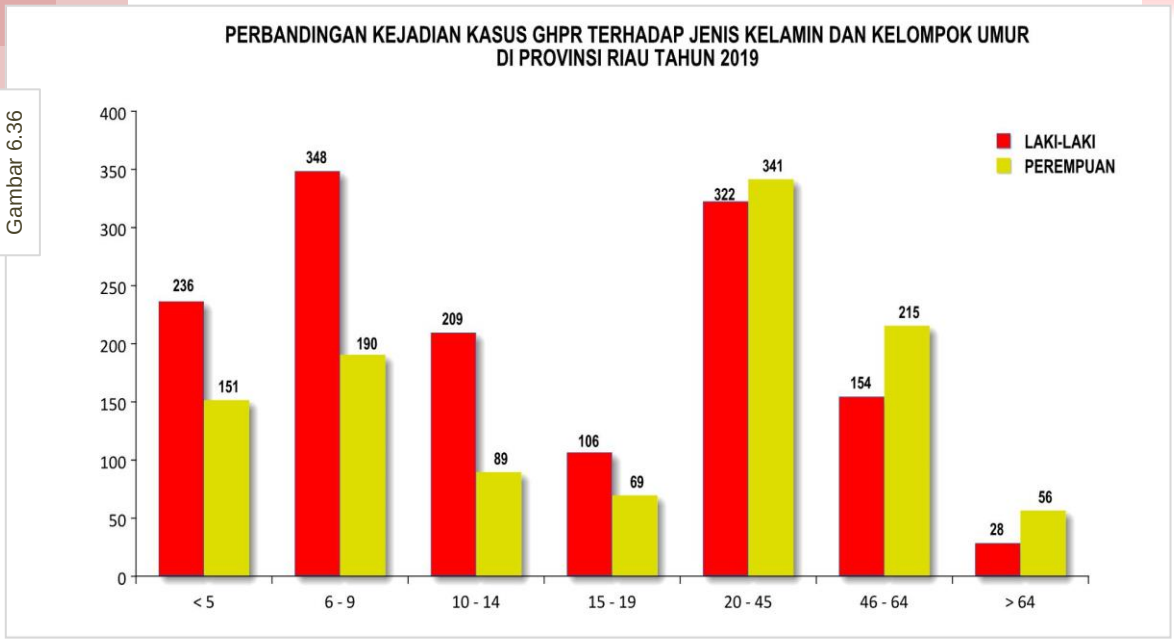
Berdasarkan grafik tersebut diatas, terlihat bahwa masih terjadi kasus Lyssa atau orang yang meninggal akibat rabies di Provinsi Riau yang seharusnya tidak boleh terjadi. Munculnya kasus Lyssa, disebabkan oleh banyak faktor diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies, sehingga menganggap sepele setiap terjadi kasus gigitan, padahal rabies adalah penyakit yang mematikan dengan Case Fatality Rate 100%, artinya setiap penderita rabies selalu berakhir dengan kematian. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk penderita rabies, yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah yaitu dengan pemberian Vaksin Anti Rabies / VAR.

Gambar 6.35



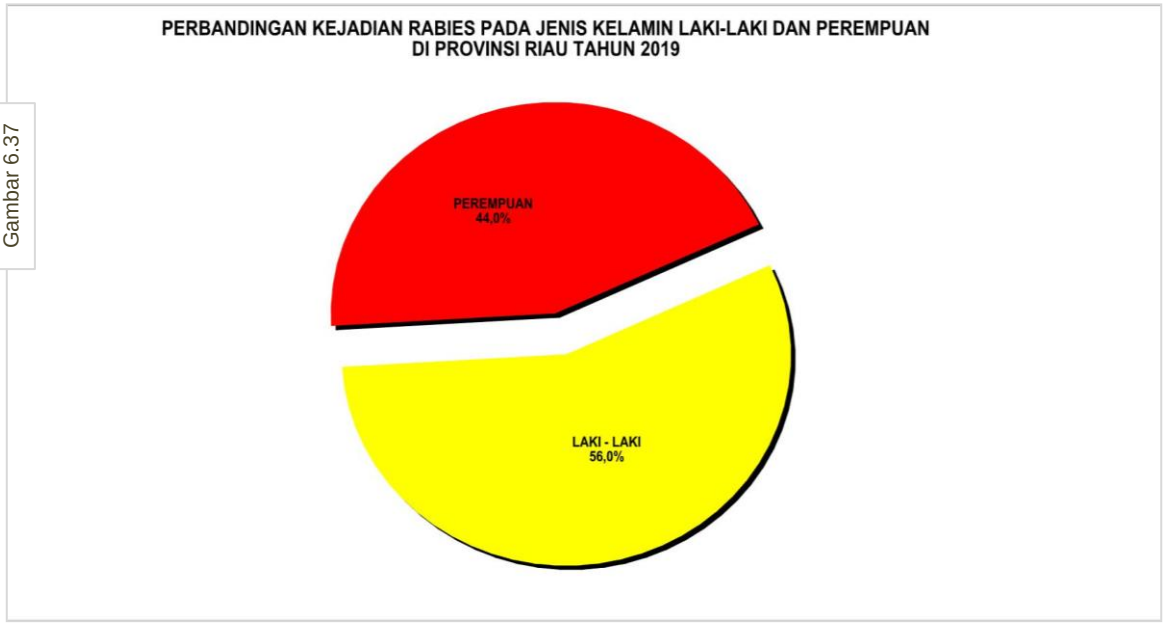
Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan kasus Rabies tertinggi ditemukan yaitu 323 kasus GHPR, selanjutnya Kabupaten Bengkalis dengan 322 kasus GHPR dan disusul Kabupaten Siak dengan 276 kasus GHPR. Kabupaten Meranti meskipun merupakan daerah yang bebas Rabies namun masih terjadi kasus gigitan, oleh karena itu kegiatan pencegahan dan pengendalian tetap dilaksanakan dalam upaya mempertahankan status bebas rabies mengingat tingginya lalu lintas HPR antar wilayah.

Gambar 6.36

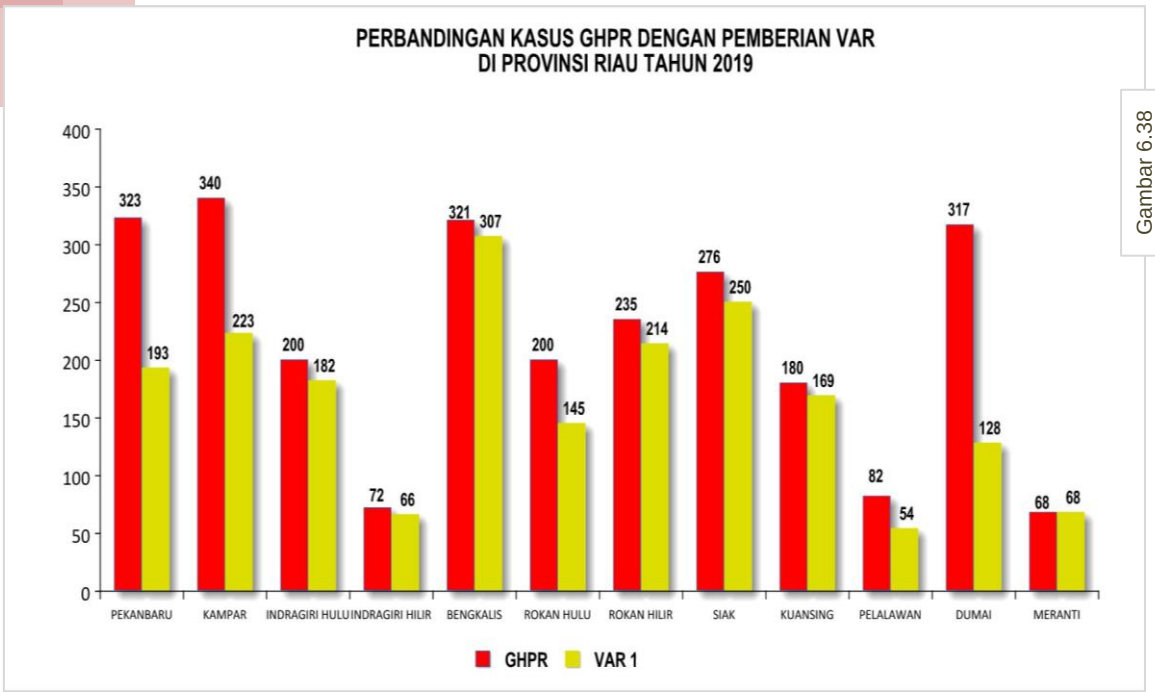


Berdasarkan perbandingan jenis kelamin dan kelompok umur kasus GHPR di atas, bahwa rentang usia laki-laki lebih banyak pada usia anak-anak 6 s.d 9 tahun, sedangkan pada jenis kelamin perempuan lebih banyak pada usia 20 s.d 45 tahun. Ini artinya perlu untuk meningkatkan pemahaman terhadap rabies pada masyarakat usia sekolah dan usia menengah kebawah, disamping juga terhadap seluruh lapisan masyarakat karena rabies bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan dll.

Gambar 6.37



Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa penyakit rabies, lebih banyak diderita oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 1.403 kasus (56%), dibandingkan dengan perempuan 44%



Gambar 6.38

Pemberian VAR bertujuan untuk mencegah penyakit Rabies / menghambat agar virus yang masuk melalui luka gigitan /cakaran HPR tidak sampai ke saraf pusat atau otak, sehingga kematian akibat Rabies dapat dihindari. Pemberian VAR harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kemenkes karena keterlambatan dan kesalahan dalam pemberian VAR dapat berakibat fatal, oleh karena itu petugas atau pengelola program rabies di puskesmas selaku ujung tombak pelayanan kesehatan dilapangan harus memahami tentang tatalaksana kasus GHPR.



Gambar 6.39

Berdasarkan grafik tersebut diatas, terlihat bahwa tidak semua kasus GHPR di berikan VAR. Berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun 1978 (SK Menkes No. 279A, Mentan No. 522, Mendagri no. 143) tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies VAR diberikan pada kasus gigitan hewan yang positif Rabies. Pemberian VAR diberikan jika hasil pengujian laboratorium pada HPR positif, setelah dilakukan observasi. Dan pemberian VAR tidak diberikan, jika HPR hilang / lysis, maka spesimen tidak bisa diperiksa. Pada tahun 2019 terjadi penurunan cakupan pemberian VAR, hal ini disebabkan terjadinya keterlambatan distribusi VAR dari Subdit Zoonosis Kementerian Kesehatan ke Provinsi Riau sehingga terjadi kekosongan VAR selama beberapa bulan.

Tabel Data Rabies Center Tahun 2019

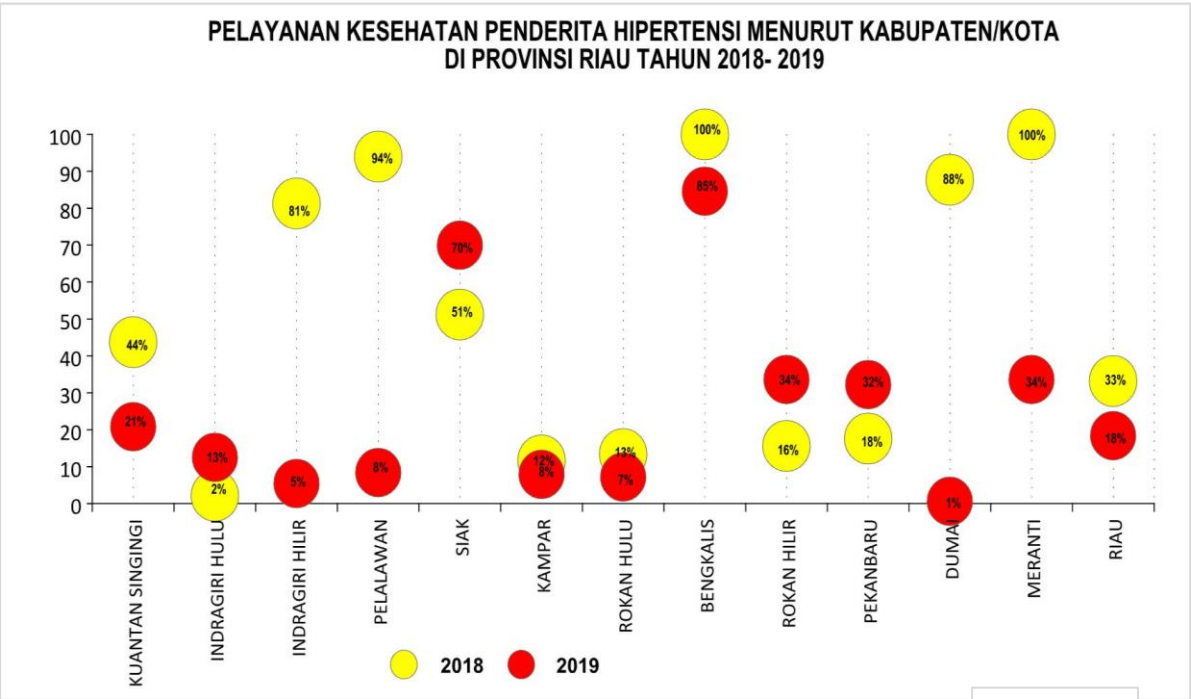
NO	KAB/KOTA	JUMLAH RABIES CENTER	LOKASI
1	KAMPAR	5 UNIT	1. Dinkes Kab.kampar 2. Pusk.Tapung Perawatan 3. Pusk.XIIIKoto Kampar 4. Pusk.Siak Hulu II 5. Pusk. Kampar Kiri
2	ROKAN HULU	2 UNIT	1. RSUD Rokan Hulu 2. Pusk. Ujung Batu
3	INDRAGIRI HULU	5 UNIT	1. Pusk. Pranap 2. Pusk.Air Molek 3. Pusk.Pkl.Kasai 4. Pusk.Siberida 5. Pusk.Sei Lala
4	PELALAWAN	3 UNIT	1. Pusk. Ukui 2. Pusk. Pkl.Kuras 3. Dinkes Kab. Pelalawan
5	KUANSING	4 UNIT	1. Pusk. Benai 2. Pusk. Perh.Luas 3. Pusk.Lubuk Jambi 4. Pusk.Lubuk Ramo
6	BENGKALIS	1 UNIT	1. Puskesmas Rupat
TOTAL		20 UNIT	

D. PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Semakin meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan kini telah menjadi perhatian serius bagi dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya PTM sebagai salah satu target yang harus dicapai dalam *Sustainable Development Goals (SDGs).* Penyakit tidak menular (PTM) juga dikenal sebagai penyakit kronis, memiliki durasi panjang dan umumnya berkembang lambat dan faktor resiko penyakitnya. Empat jenis utama penyakit tidak menular adalah penyakit kardiovaskular (seperti serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit pernapasan kronis (seperti penyakit paru obstruktif kronis dan asma) dan diabetes melitus (DM). Sekitar 80% dari semua kematian PTM terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

1. Hipertensi

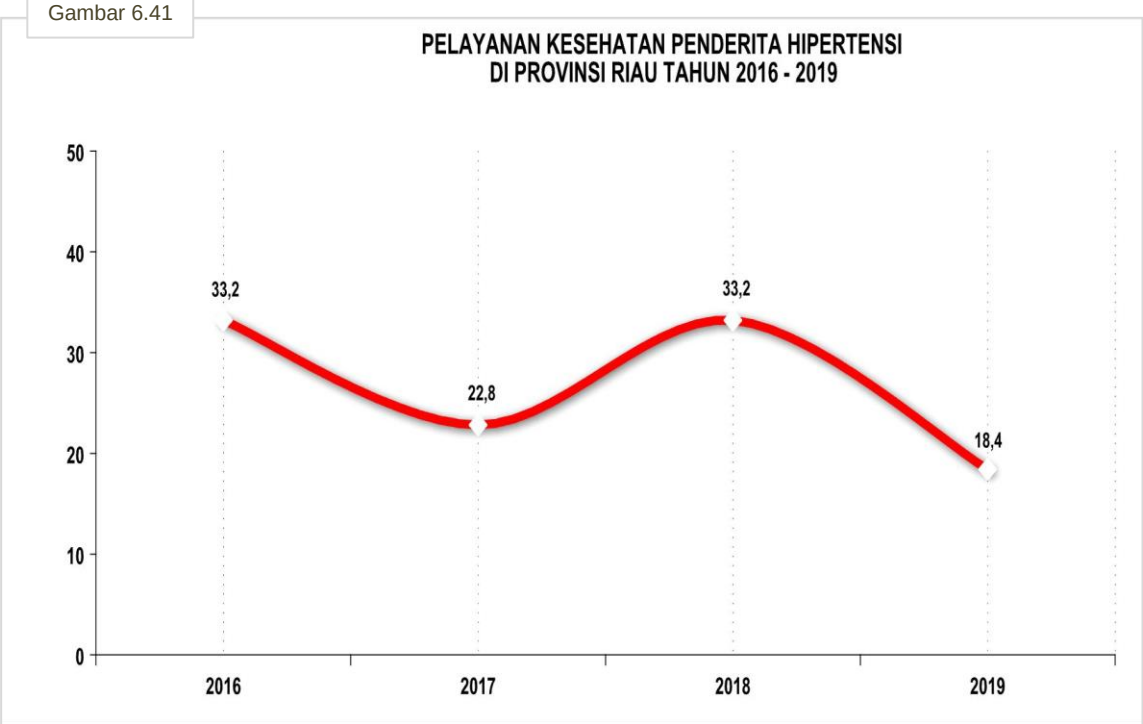
Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi di mana kekuatan aliran dari darah terhadap dinding arteri cukup tinggi. Faktor risiko penyebab hipertensi yang patut diwaspadai adalah obesitas, terlalu banyak minum alkohol, merokok, riwayat keluarga. Salah satu aspek yang paling berbahaya dari hipertensi adalah sering tidak disadari munculnya gejala hipertensi oleh penderitanya, hal ini akibat mengabaikan gaya hidup sehat. Satu-satunya cara upaya pencegahan yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah yang teratur terutama yang mempunyai resiko tinggi.



Gambar 6.40

Penderita hipertensi umur ≥ 15 tahun yang ditemukan dan mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 297.934 orang (18,4%) dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 33% dari jumlah estimate penderita hipertensi.

Gambar 6.41

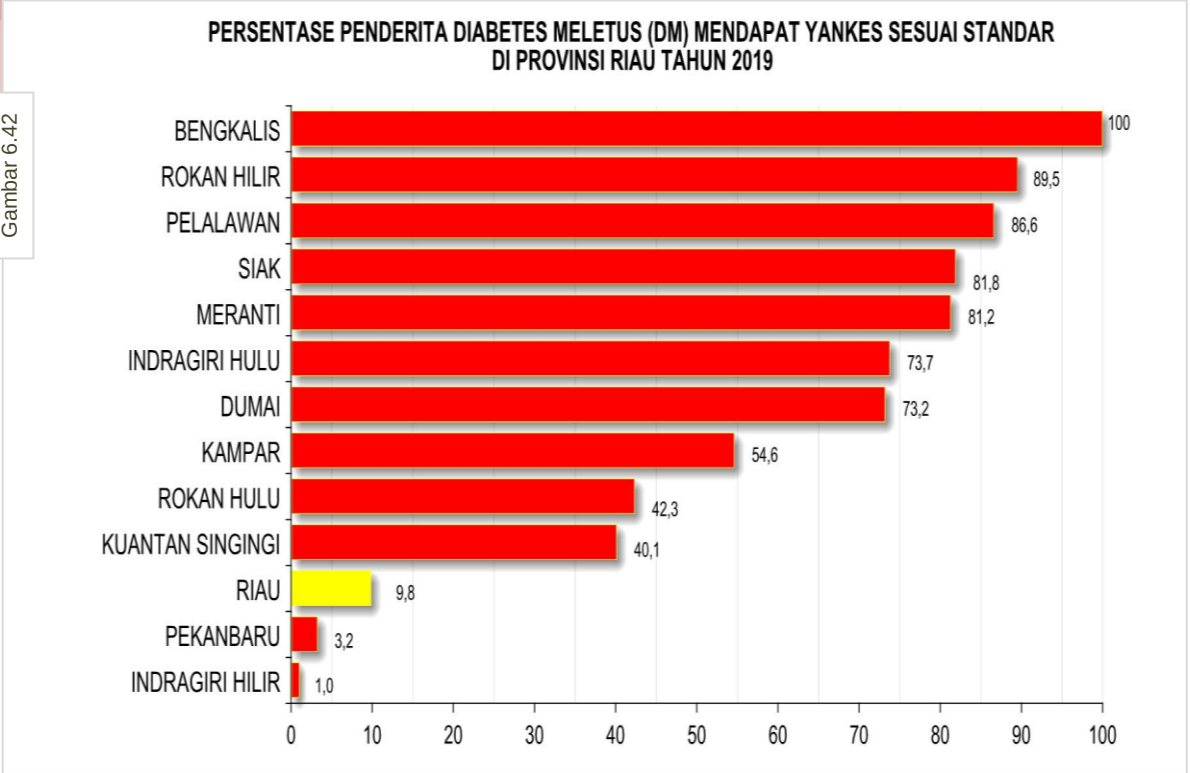


Penderita hipertensi umur ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami penurunan kembali menjadi 18,4%.

2. Diabetes Militus

Diabetes adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar gula (glukosa) darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Glukosa yang menumpuk di dalam darah tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi.

Gambar 6.42

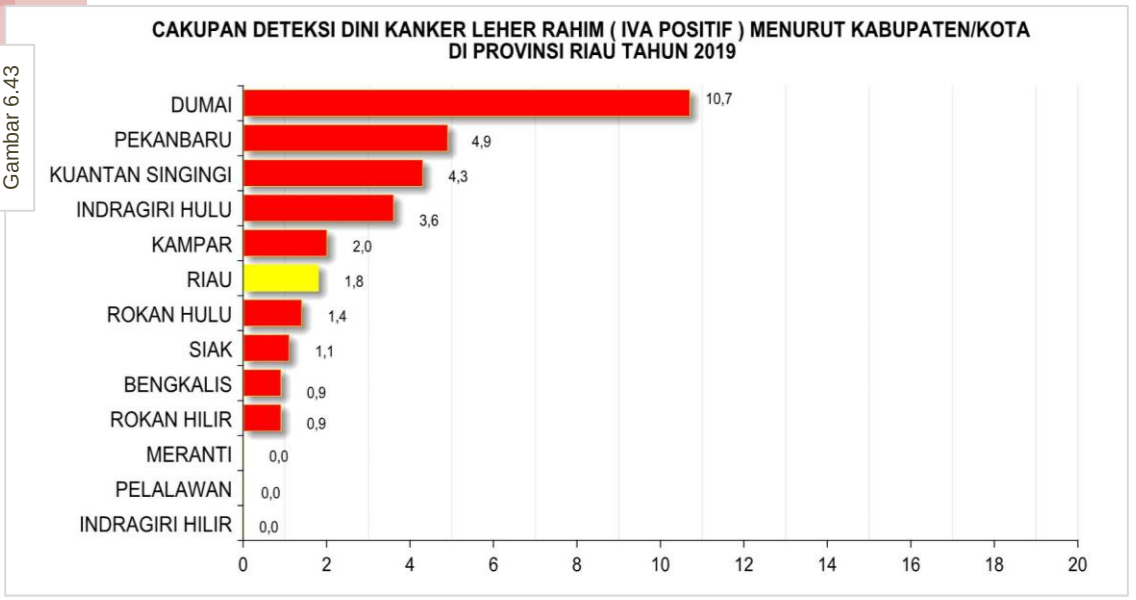


Persentase penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 13,7% di tahun 2018 menurun menjadi 9,8% di tahun 2019. Pengendalian penyakit Diabetes militus masuk didalam indikator program prioritas, SDGs dan standar pelayanan minimal, untuk itu diperlukan adanya intervensi dari program penyakit tidak menular. Salah satunya dengan memaksimalkan integrasi lintas program di Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan melakukan pengendalian faktor risiko PTM.

3. Tumor/ kanker

Tumor/ kanker adalah penyakit berbahaya, stadium awal penyakit ini seringkali tidak bergejala. Seperti yang diketahui jumlah penderita kanker diseluruh Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data GLOBAL 2012, diperkirakan terdapat 14,1 juta kasus kanker baru yang muncul, pada tahun yang sama terdapat 8,2 juta kematian karena kanker. Angka penderita ini diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan mencapai 23,6 juta kasus baru pada tahun 2030.

Gambar 6.43

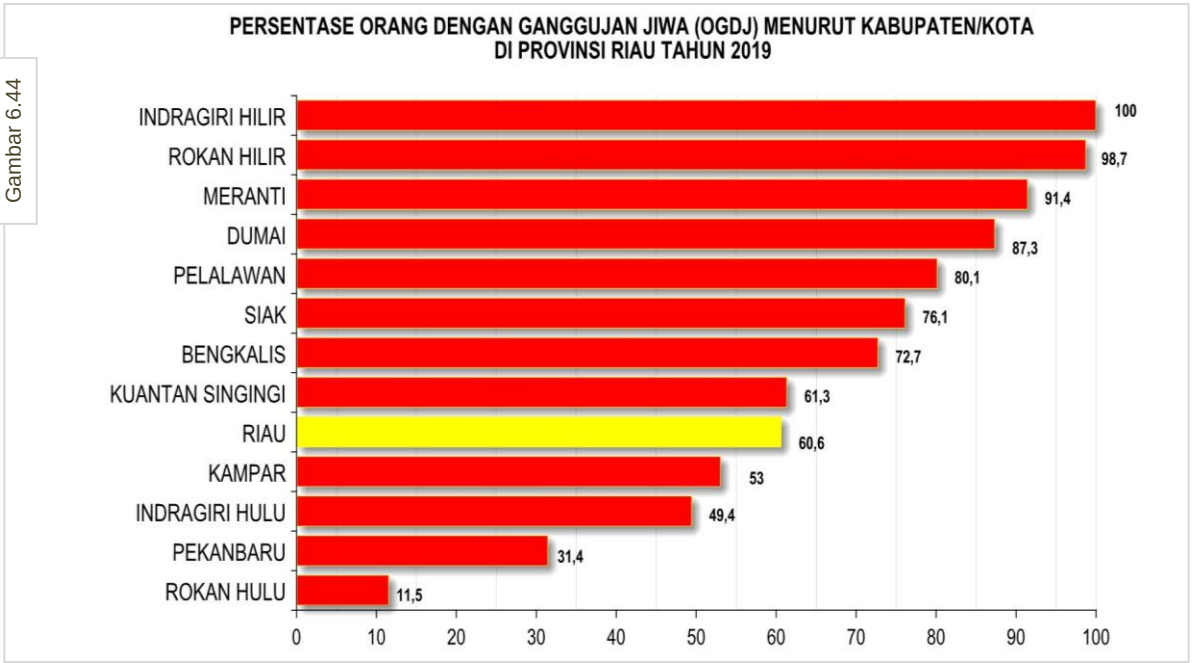


Ditemukan kanker leher rahim dan payudara yang positif sebanyak 471 orang (1,1%) dari 44.248 jumlah perempuan yang dilakukan pemeriksaan deteksi dini dari usia 30–50 tahun untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dan periksa payudarasa secara klinis (SADANIS) minimal sebulan sekali. Kegiatan deteksi dini terhadap penyakit kanker telah rutin dilakukan di semua kabupaten/kota, tetapi cakupan yang tinggi di Kota Dumai , Pekanbaru, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu.

4. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan /atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya.

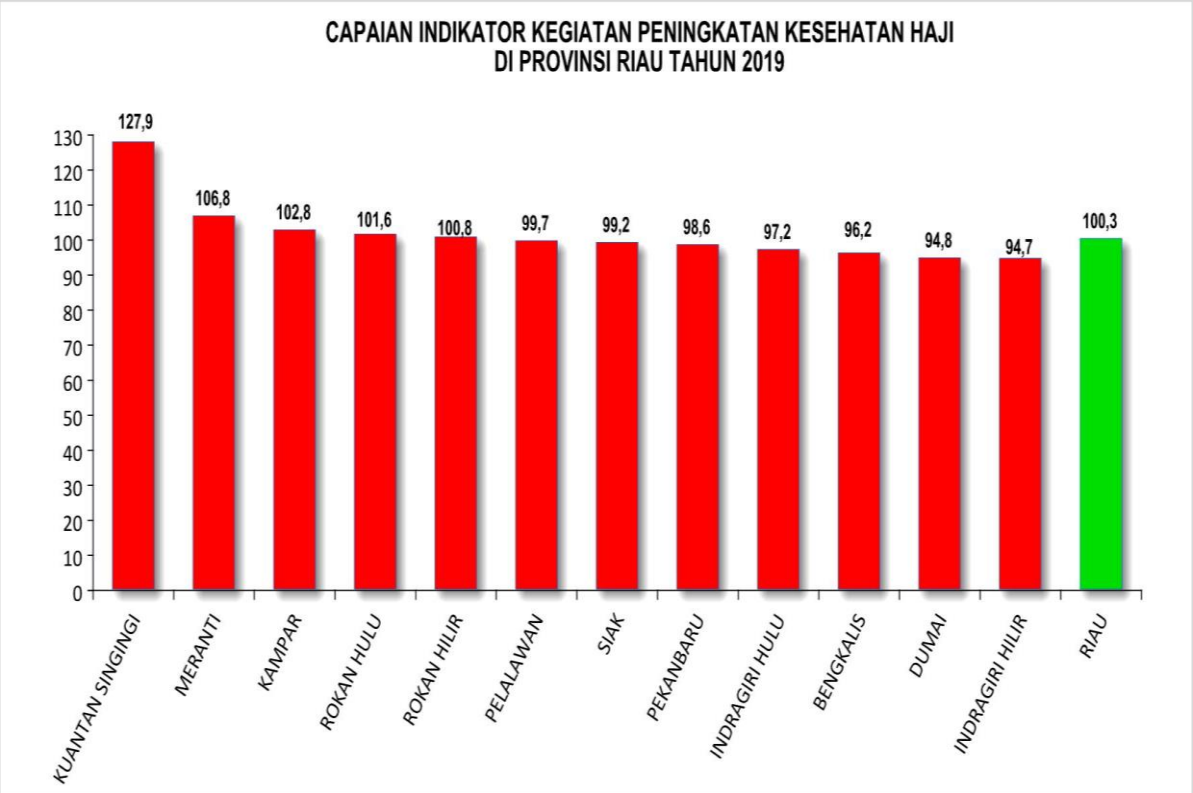
Gambar 6.44



Sasaran orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 9.533 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 5.773 orang (60,6%). Capaian yang masih rendah < 50% yaitu kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru.

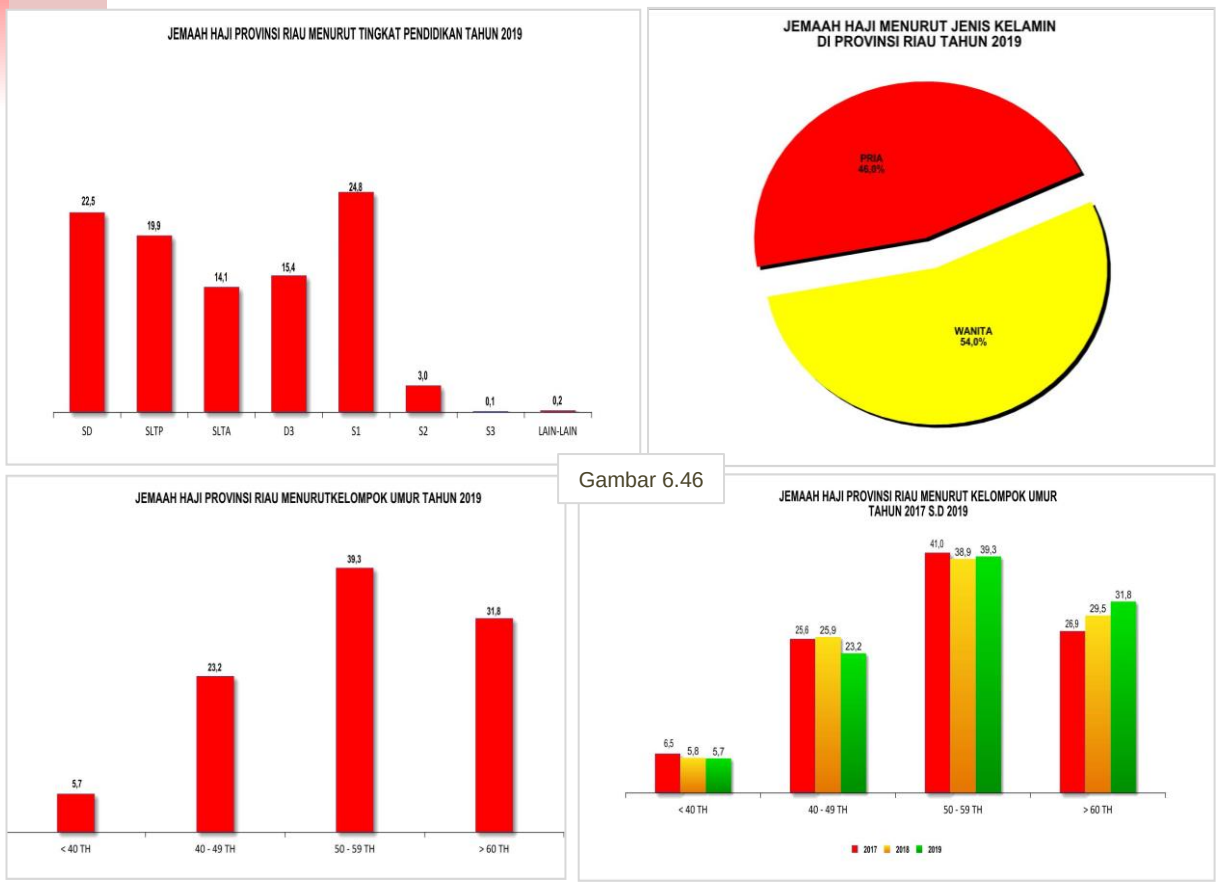
E. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan jutaan manusia yang berpindah dari satu negara ke negara lain dengan melakukan berbagai ritual ibadah fisik dan spiritual. Pada proses ini terjadi kerentanan terhadap kejadian morbiditas maupun mortalitas. Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 5.277 jemaah yang terdiri dari 5.315 jemaah haji dan 38 petugas haji pada kelompok terbang (kloter).



Gambar 6.45

Dilihat pencapaian menurut Kabupaten/Kota ada 2 Kabupaten yang tidak mencapai target yaitu Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir.

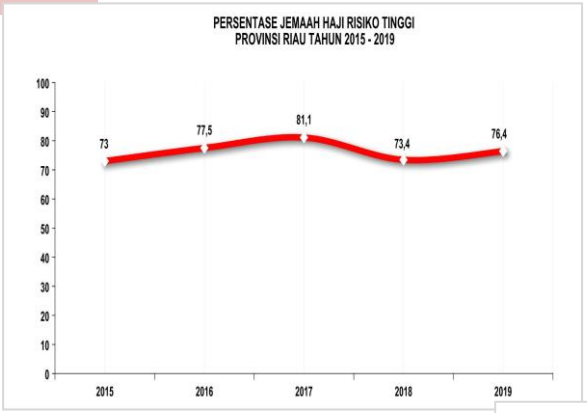


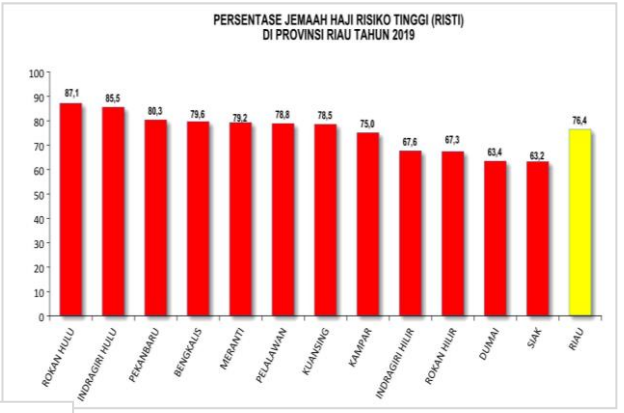
Gambar 6.46

Menurut data diatas, profil jemaah haji menurut tingkat pendidikan yang paling banyak adalah dari pendidikan S1 sebesar 24,8 %. Dan, kalau dilihat dari jenis kelamin lebih banyak wanita jika dibandingkan pria, dimana wanita mencapai 54 % sedangkan pria sebesar 46 %.

Profil jemaah haji Provinsi Riau Menurut umur, semakin tua usia semakin besar persentase jemaah haji, hal ini terlihat bahwa, kelompok usia yang paling banyak adalah kelompok usia 50 – 59 th sebesar 39,3 %, kemudian kelompok usia > 60 th sebesar 31,8 %, selanjutnya kelompok usia 41-49 th sebesar 23,2 %, dan yang paling kecil adalah kelompok usia < 40 th sebesar 5,7 %. Dari data profil jemaah haji pada grafik diatas, dilihat dari sisi umur 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sd 2019 terjadi peningkatan jumlah jemaah haji yang berusia 6 tahun keatas. Dilihat dari kegiatan pelaksanaan ibadah haji, kondisi fisik jemaah haji sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah haji, faktor umur juga sangat mempengaruhi.

Jemaah Haji Risiko Tinggi (Risti) Provinsi Riau
Tahun 1440 H/2019 M





Gambar 6.47



I1	Essential (primary
E7	Disorders of lipoprotein metabolism and other
E1	Non Insulin dependent Diabetes
E78.	Hyperlipidaemia,
E78.	Pure
I51.	Cardiomegal
K3	Dyspepsi
I1	Hypertensive heart
E6	Obesit
E11.	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without

Jemaah haji yang berangkat pada tahun 1440 H/2019 M, sebagian besar adalah jemaah haji Risti, baik risti oleh karena umur maupun risti karena penyakit. Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa jemaah haji risti mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun th 2015 sd 2017 dan turun pada tahun 2018 dan naik lagi pada tahun 2019

Jemaah haji kabupaten/kota yang mempunyai resiko tinggi diatas rata-rata Provinsi adalah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 87,1 %, Indragiri Hulu sebesar 85,5 %, Pekanbaru sebesar 80,3 % Bengkalis sebesar 79,6 %, Meranti sebesar 79,2 %, sedangkan jemaah haji resiko tinggi yang paling sedikit jumlahnya adalah Kota Dumai dan Kabupaten Siak yaitu sebesar 63,2 %. Dan 10 jenis penyakit terbanyak pada jemaah haji adalah penyakit hipertensi 37,6%.

KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mencapai Visi nya yaitu **"*masyarakat Riau yang mandiri untuk hidup sehat Tahun 2020*"** melalui seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan penjabaran dari target Universal Access Tahun 2019. Universal access Tahun 2019 mempunyai Target ***100% masyarakat telah akses terhadap air minum yang layak, 0% masyarakat hidup di pemukiman kumuh serta 100% masyarakat akses terhadap sanitasi dasar yang layak***. Untuk mencapai target- target dimaksud tentu Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan terus berbenah dan menyusun strategi dalam mencapainya, melalui program- program yang terintegrasi dengan baik, salah satunya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sistem kesehatan kewilayahan dalam menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

A. Air Minum

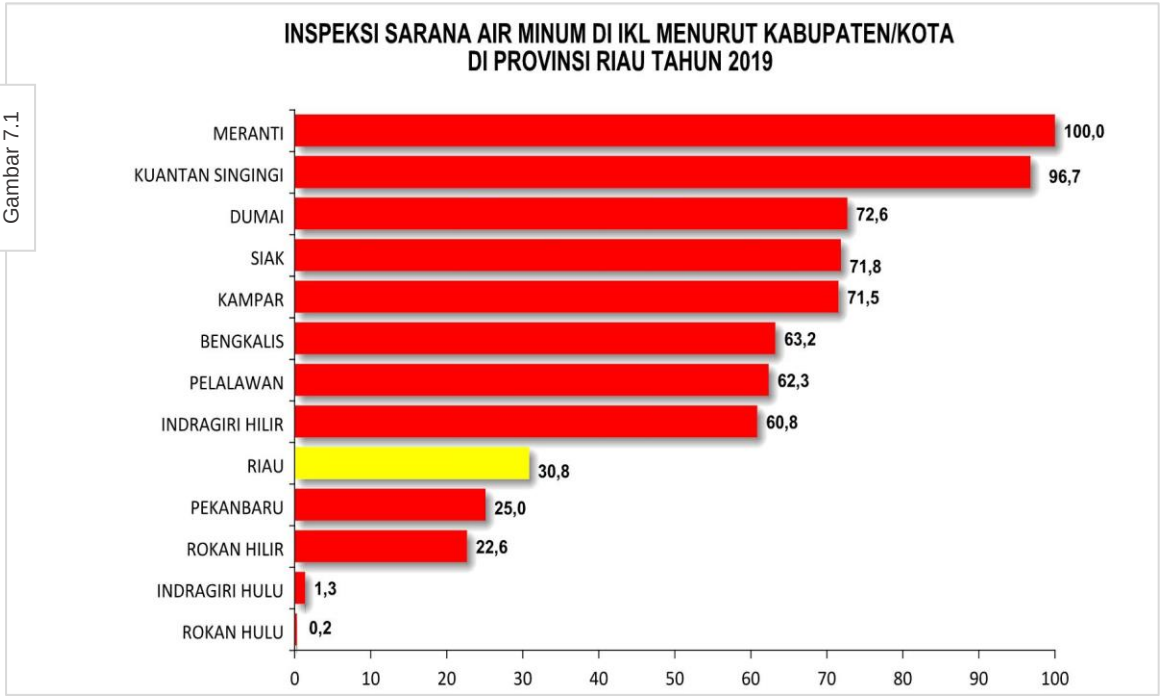
Penyelenggara air minum meliputi (1). PDAM /BPAM/PT yang terdaftar di persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia (PERPAMSI); (2). Sarana air minum perpipaan non PDAM (3). Sarana air minum bukan jaringan perpipaan komunal (Sumur gali, sumur bor dengan pompa, penampungan air hujan, mata air terlindung, terminal air/ tangki air, depot air minum)

Pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum mengacu pada Permenkes No 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dengan melakukan kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). IKL adalah pemeriksaan dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan, perlengkapan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Adapun yang menjadi Tujuan IKL sarana air minum dan sanitasi adalah :

a. Mengetahui informasi risiko pencemaran
b. Tahapan sebelum melakukan pemeriksaan kualitas air minum
c. Informasi untuk melakukan tindak lanjut dan perbaikan sarana air minum dan sanitasi
d. Memberikan rekomendasi tentang keadaan sarana air minum dan sanitasi

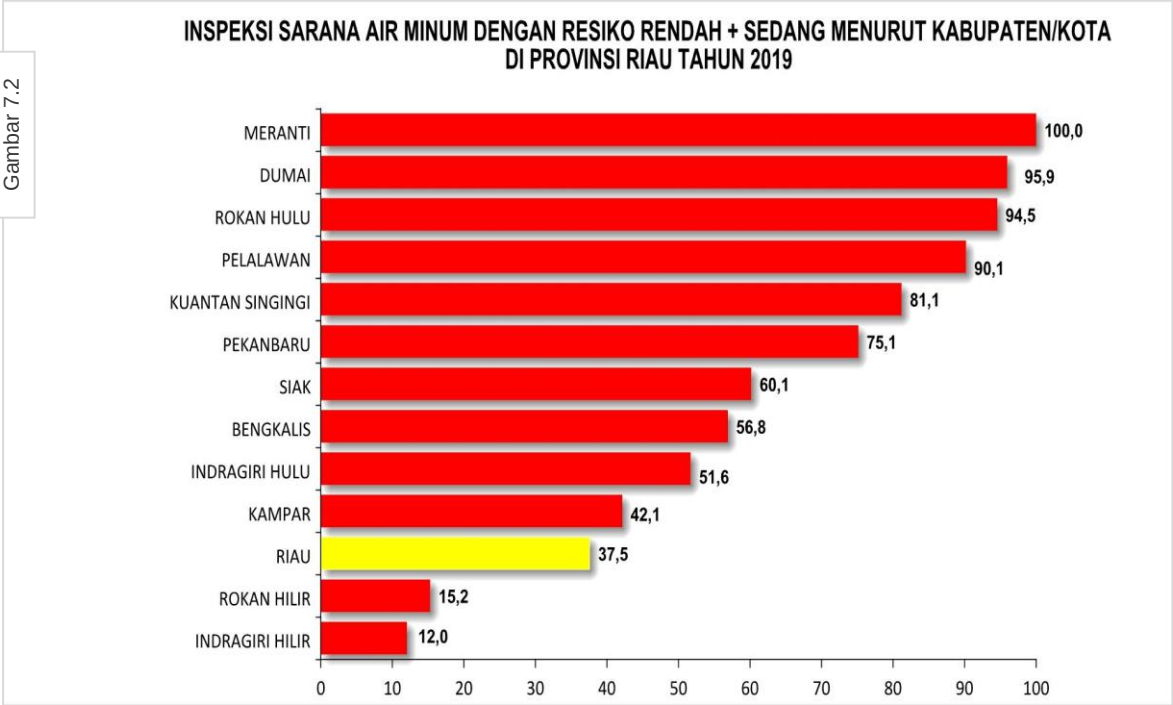
Gambar 7.1



Jumlah sarana air minum yang tersedia di Provinsi Riau 392.425 buah dan yang telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) masih belum memenuhi target Renstra (50%) yaitu 120.753 buah (30,8%). Kabupaten/kota yang

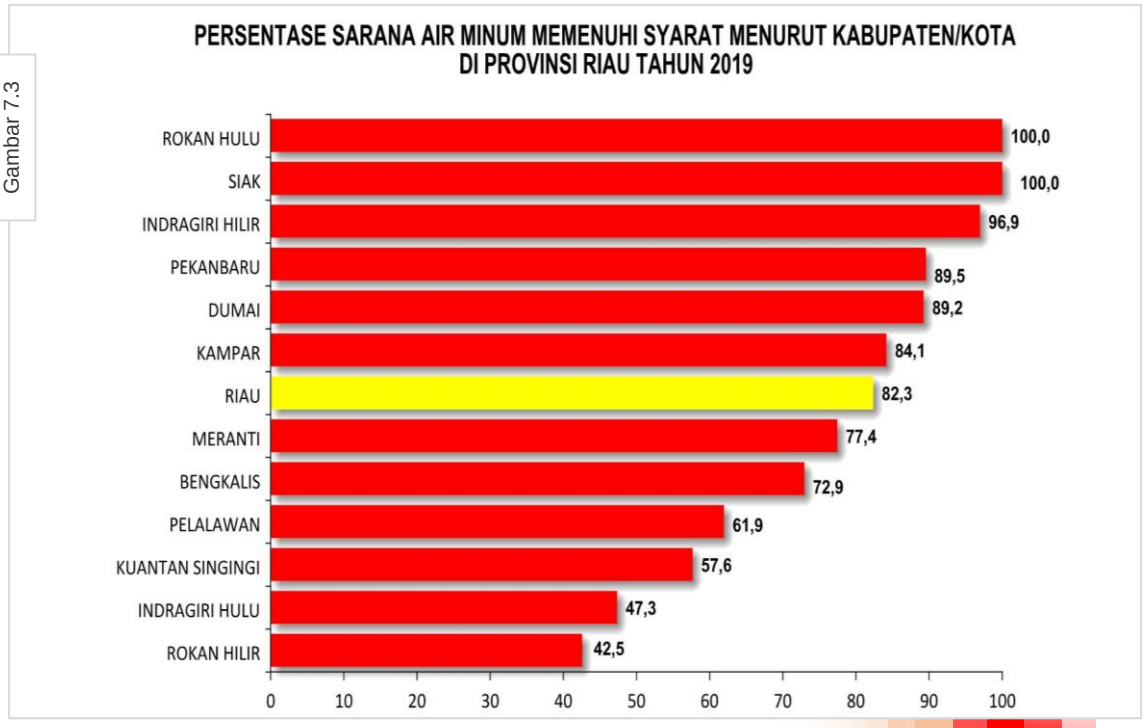
persentasenya masih rendah dalam melakukan pengawasan kualitas air minum yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.

Gambar 7.2



Dari data diatas, terlihat bahwa sarana air minum yang ada dan tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan telah dilakukan pengawasan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 120.753 buah (30,8%). Dan dari jumlah Sarana Air Minum yang ada dan telah dilakukan pengawasan, diambil sampelnya hanya 2.859 buah (0,7%). Dan ternyata hasil penilaian yang beresiko rendah dan sedang di Provinsi Riau sebanyak 37,5%.

Gambar 7.3



Sarana air minum yang dilakukan pengawasan pada penyelenggara air minum melalui inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan (pengujian) kualitas air berdasarkan parameter fisik, kimia, mikrobiologi dan yang memenuhi syarat di Provinsi Riau sebanyak 82,3%. Sarana air minum di Kabupaten Rokan Hulu memenuhi syarat 100% dari jumlah Sarana air minum yang tercatat.

B. Jamban Sehat

Fasilitasi sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septic/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau Bersama. Perilaku buang air besar sembarangan dapat meningkatkan risiko masyarakat terkena penyakit menular. Akses sanitasi layak apabila penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan jenis leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja nya menggunakan tangki septic atau Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL).

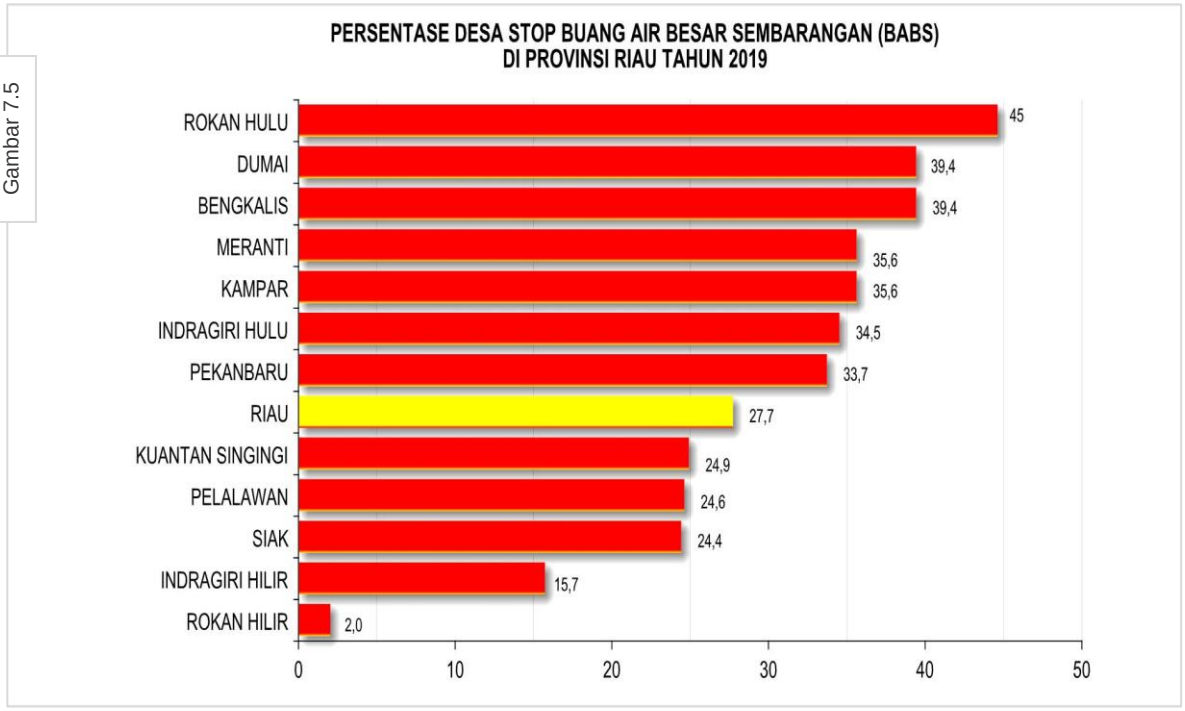
Gambar 7.4



Jumlah desa yang mengimplementasikan STBM di Provinsi Riau tahun 2019, telah memenuhi target Renstra (994 desa). Karena dari jumlah desa yang ada berjumlah 1.875 desa, dan yang melaksanakan STBM sebanyak 1.556 desa (83%), dan desa yang melaksanakan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) berjumlah 519 buah (27,7%). Trend penurunan persentase desa Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) tahun 2015-2019 dimulai tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku sehat.

Macam jamban sehat antara lain Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permaenen (JSSP), dan jamban sharing /komunal (jamban umum) dianjurkan untuk daerah/wilayah yang padat penduduk dan daerah yang sempit atau sulit akses untuk membuat sarana jamban dan septink tank.

Gambar 7.5



Persentase desa yang melaksanakan kegiatan stop buang air besar sembarangan di Provinsi Riau tahun 2019 yang paling aktif yaitu Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 45%, Dumai dan Bengkalis 39%, sedangkan kabupaten yang masih kurang dalam melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Kabupaten Rokan hilir (2%) dan Indragiri hilir (15,7%)

Gambar 7.6

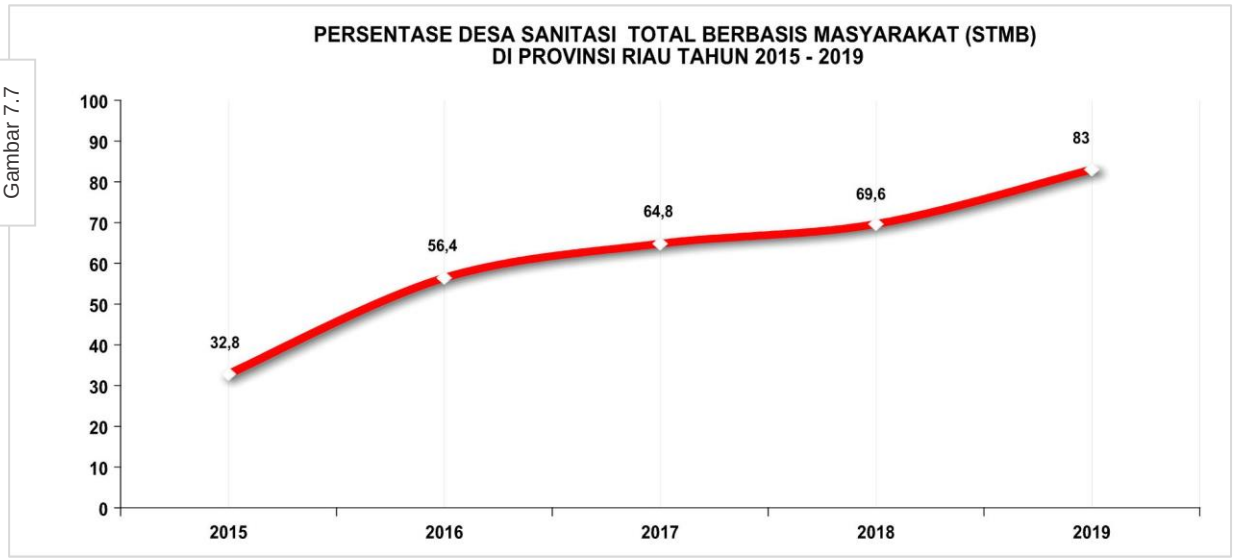


Kepala keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak 82,3%, dengan rincian jumlah sarana jamban sehat sebagai berikut, jamban sehat permanen (JSP) 844.966 buah, jamban sehat semi permanan (JSSP) berjumlah 548.442 buah dan jamban umum/komunal 237.438 buah.

C. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

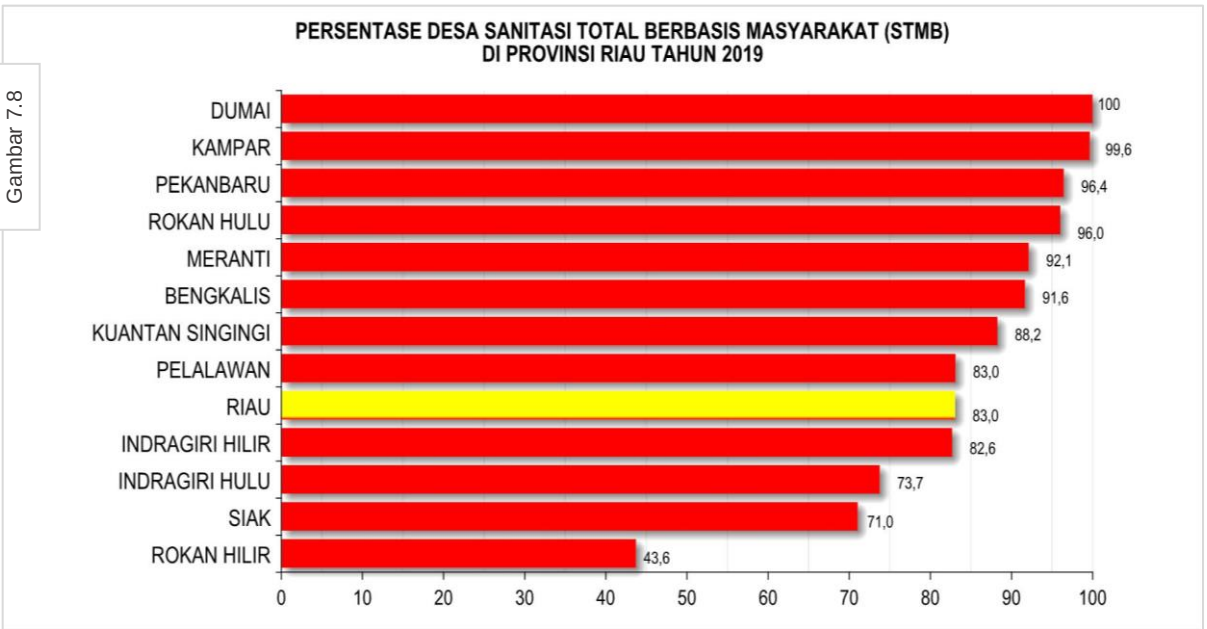
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dengan tujuan untuk menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku

Gambar 7.7



Persentase desa yang melaksanakan STBM dan aktif mulai tahun 2015-2019 mulai meningkat signifikan.

Gambar 7.8



Dan secara provinsi, persentase desa yang aktif melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) cukup tinggi yaitu 83%, dan Kota Dumai telah mencapai 100%, sedangkan kabupaten yang masih rendah yaitu Kabupaten Rokan Hilir 43,6%.

D. Tempat - Tempat Umum

Pelaksanaan pengawasan tempat-tempat umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kegiatan inspeksi sanitasi pada Tempat–Tempat Umum (TTU) dilakukan pada hotel, wisma/ penginapan, pasar/swalayan/supermarket, tempat ibadah, pondok pesantren, kolam renang/ pemandian umum, terminal/bandara/pelabuhan dan TTU lainnya.



Gambar 7.9

Dari gambar dibawah diketahui bahwa persentase tempat–tempat umum yang memenuhi syarat selama 5 (lima) tahun terakhir belum stabil. Hal ini disebabkan masih lemahnya inspeksi sanitasi di tempat–tempat umum terutama pada kolam renang / pemandian umum, terminal / bandara / pelabuhan, pasar / swalayan / supermarket.

Gambar 7.10



Tempat–tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2019 di Provinsi Riau hanya mencapai 51,6% (target Renstra 58%), yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan dinilai masih rendah, dari 12 kabupaten/kota yang di Provinsi Riau ada 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 28,2%, Bengkalis 30,9%, Kep.Meranti 31,3%, Rokan Hilir 39,5%, Rokan Hulu 42,7%, Siak 44,8%, dan Pelalawan 47%.

E. Tempat Pengelolaan Makanan

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk mengolah makanan dari bahan mentah hingga disajikan menjadi makanan jadi yang dilakukan pengawasan, terutama pada TPM di area pelabuhan, dikarenakan banyak masyarakat yang beraktifitas di daerah pelabuhan yang perlu dilindungi kesehatannya. Sasarannya meliputi Jasa boga, Rumah/ Restoran, Depot Air Minum dan Makanan Jajanan.

Pengelolaan makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal, sehingga perlu mendapat perhatian dari segi nilai gizi, segi kemurnian, maupun dari segi kebersihan. Sebab meskipun nilai gizi dan kemurnian baik namun kebersihan lingkungan tidak diawasi dan dipelihara, maka makanan tersebut dapat menimbulkan penyakit akibat terkontaminasi.

Dengan demikian, kualitas makanan yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPM harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam penyelenggaraan TPM antara lain persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan penyajian makanan jadi, dan persyaratan peralatan yang digunakan.

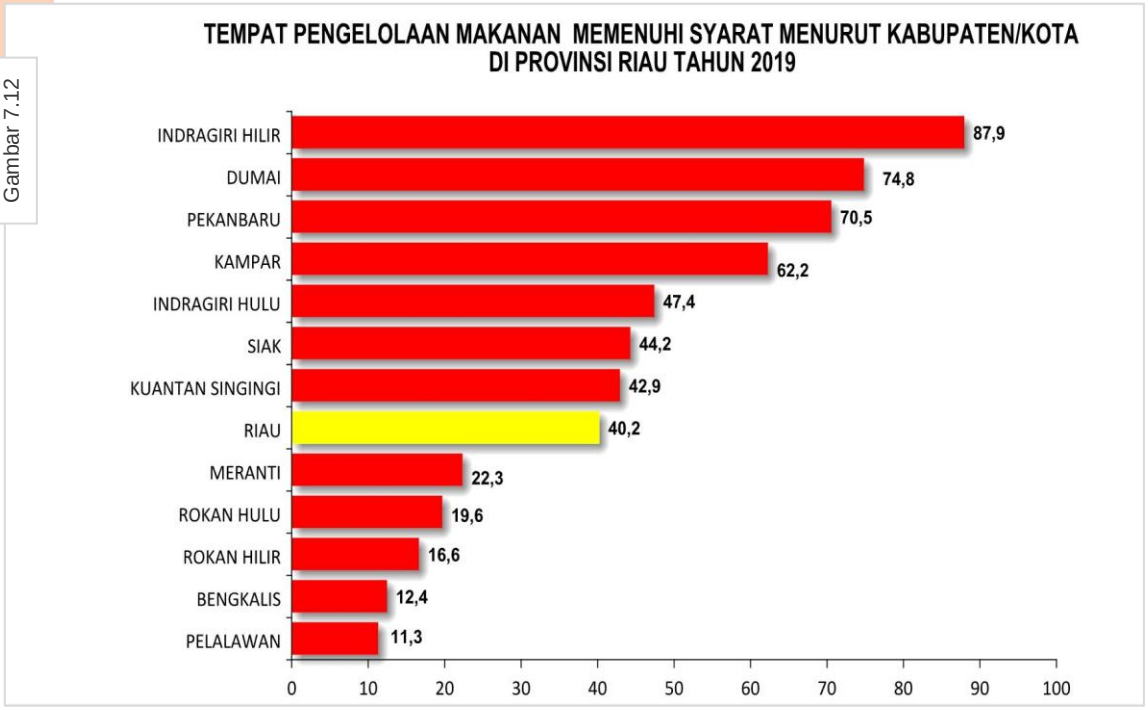
Gambar 7.11



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa, jumlah TPM yang sudah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 40,2%. Angka tersebut telah melampaui target tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu sebesar 26%.

Untuk kabupten/kota yang capaian TPM telah memenuhi syarat kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebesar 83,3% dan yang tertinggi adalah Kabupaten Pelalawan 82,0% diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu sebesar 53,3% dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 45,5%. Sedangkan untuk Kabupaten/kota yang TPMnya memenuhi syarat kesehatan adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 2.8% diikuti oleh Kabupaten Kep.Meranti 11,6% dan kabupaten Kampar 15,6%. Gambaran capaian TPM yang telah memenuhi syarat kesehatan dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 7.12



Namun, dari 18.439 TPM yang ada, tetapi yang memenuhi syarat hanya 7.407 (40%) Meskipun hasil capaian setiap tahunnya telah melampaui target, namun pencapaian TPM yang memenuhi syarat kesehatan selama 5 (lima) tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Untuk itu perlu dilakukan meningkatkan pembinaan yang melibat semua lintas program/sektor tekait, sebagaoman kita ketahui bahwa TPM memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit, bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan evaluasi rutin untuk semua TPM, dan diprioritaskan untuk TPM yang belum memenuhi syarat dan atau TPM yang belum pernah dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan yaitu sebanyak 59,8% (11.032 TPM).

F. Program Pengembangan Kawasan dan Pemukiman Sehat

Target program Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan Sehat adalah kabupaten yang menyelenggarakan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat dengan membentuk Tim Pembina, Forum Kabupaten/Kota dan yang menerapkan minimal 2 tatanan wajib dari 9 tatanan kawasan sehat dan rencana kerja.

Realisasi pelaksanaan program Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat di Provinsi Riau tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 7.13 berikut;

Pencapaian Kab/Kota yang Menyelenggarakan Kab/Kota Sehat di Provinsi Riau Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2019	
		TARGET	PENCAPAIAN
1	KAMPAR	0	0
2	PELALAWAN	0	0
3	SIAK	1	1
4	INDRAGIRI HULU	0	0
5	INDRAGRI HILIR	0	0
6	KUANTAN SINGINGI	0	0
7	ROKAN HULU	1	1
8	ROKAN HILIR	0	0
9	BENGKALIS	1	1
10	MERANTI	0	0
11	DUMAI	0	0
12	PEKANBARU	1	1
	JUMLAH	4	4

Dari data di atas terlihat pencapaian tahun 2019 adalah 100% dari target yang sesuai dengan definisi operasional menyelenggarakan KKS. Target tahun 2019 sebanyak 4 Kabupaten/Kota dan yang tercapai masih 4 Kabupaten/Kota. Ini berhasil dikarenakan Komitmen bersama Kepala Daerah Kabupaten Kota untuk mewujudkan Kabupaten Kota Sehat di daerahnya masing-masing.

Realisasi capaian Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Provinsi Riau tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada Grafik 4.11 berikut;

Gambar 7.13



Grafik di atas terdapat peningkatan capaian pada tahun 2019 yaitu 4 Kabupaten/Kota yang masih sama menyelenggarakan KKS di tahun sebelumnya. Namun pada target ada penurunan ini karena menyesuaikan dengan definisi operasional dan tidak adanya pembaharuan SK dari Kabupaten Kota yaitu Kota Dumai dan Kab. Meranti. Dinas Kesehatan Provinsi dan Bappeda Provinsi bersama turun dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau tahun 2019 kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Wilayah Pemukiman Sehat dengan pagu Rp. 129.287.100,-. Untuk melakukan Pembinaan Kelembagaan KKS di Kab/Kota, Verifikasi KKS Tingkat Pusat pada 4 Kab/Kota, Rapat Tim Pembina KKS Provinsi, Penyelenggaraan KKS Pusat serta Pengambilan Penghargaan dari Kemenkes RI di Pusat.

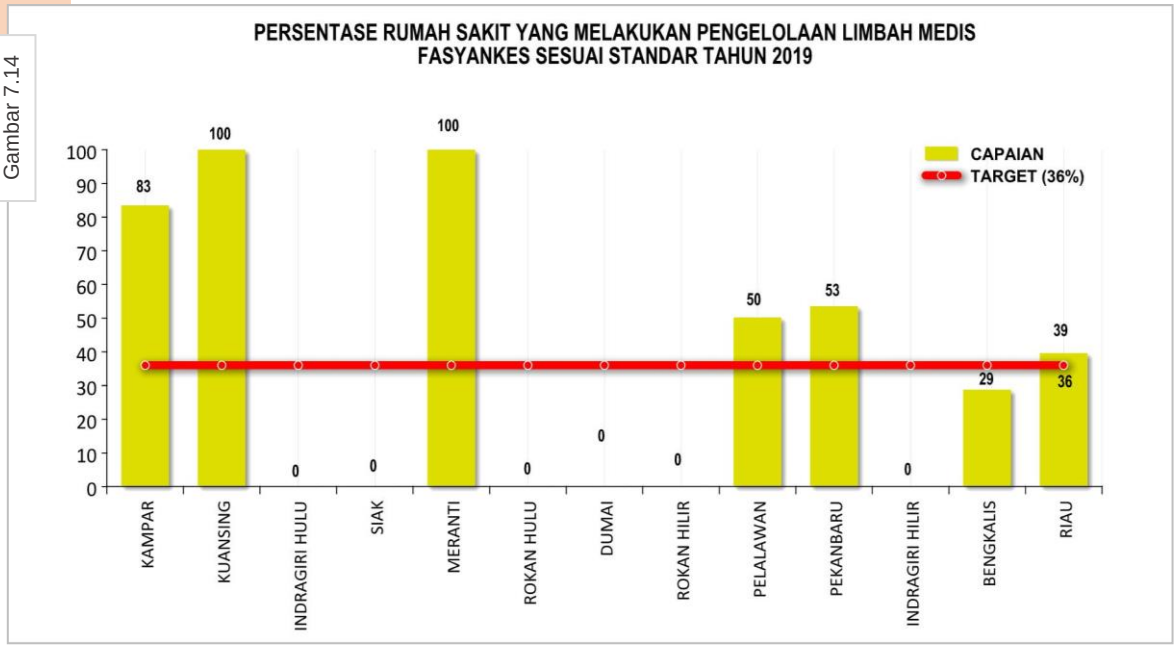
Penyelenggaraan tatanan kawasan sehat tidak seluruh Kabupaten/Kota ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi masalah antara lain:

1. Pemahaman lintas sektor dan program dalam menyelenggarakan Kab/kota sehat masih terbatas.
2. Belum optimalnya kerjasama LS dan LP terkait di tingkat daerah dalam pengembangan KKS.
3. Kurang optimalnya fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota.
4. Pimpinan Daerah yang tidak teradvokasi dan sosialisasi Kab/Kota sehat.
5. Kurangnya Komitmen pengambil keputusan (Komitmen Bupati/Walikota yang kurang mensupport)
6. Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat diindetikkan milik Kesehatan.
7. Kurangnya kerjasama antara Pemerintah, Forum, dan Masyarakat di Daerah.
8. Sering terjadinya mutasi antar pejabat.
9. Kurang tersedianya dana di Kab/kota untuk penyelenggaraan KKS.

H. Program Pengawasan Limbah Fasilitas Sarana Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Limbah Fasyankes adalah persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis meliputi pemilahan dan pengolahan limbah medis sesuai aturan. Pemilahan adalah telah memisahkan antara limbah medis dan non medis. Pengolahan adalah proses pengolahan akhir limbah yang dilakukan secara mandiri atau (*on site)* atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin (*off site*). Rumah sakit adalah rumah sakit pemerintah dan swasta yang terdaftar. Capaian Program Pengawasan Limbah Fasyankes di Provinsi Riau s.d. Triwulan IV Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

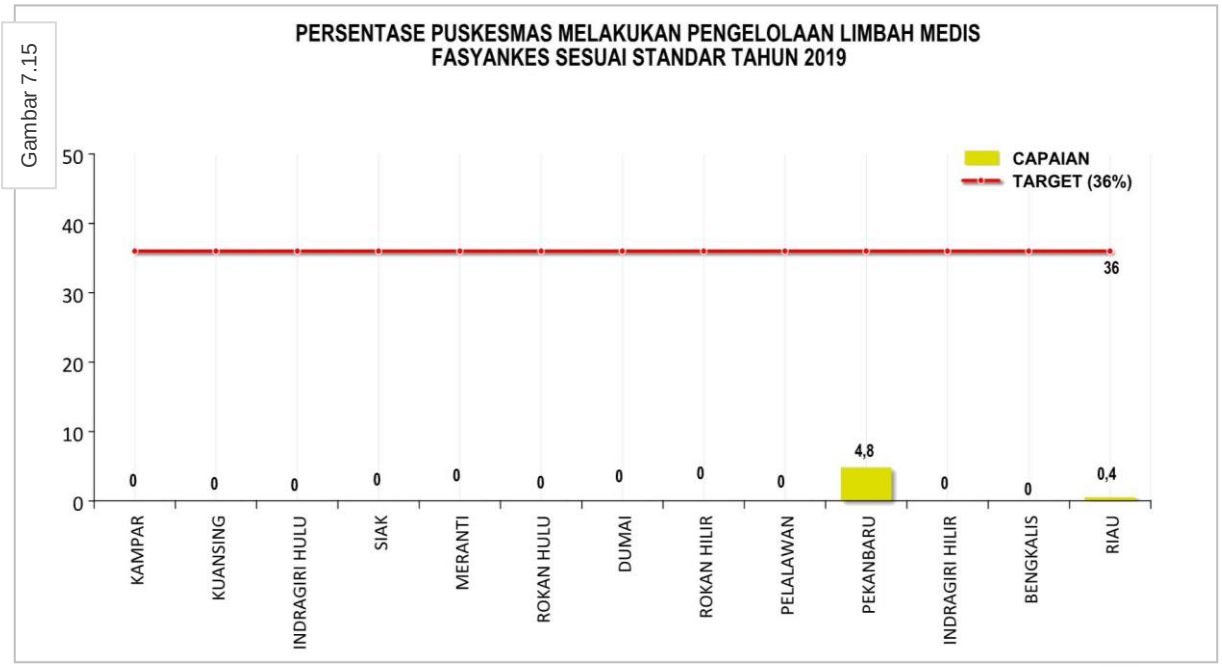
Gambar 7.14



Sumber : Laporan E-monev dan manual Fasyankes

Dari gambar 7.15 diatas dapat dilihat bahwa ada 6 Kabupaten (Kabupaten Kampar, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kuansing, Pelalawan dan Kota Pekanbaru) yang mempunyai wilayah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar (DO = Defenisi Operasional). Kabupaten yang sudah mencapai target yaitu kabupaten Kampar, Kepulauan Meranti, Kuansing, Pelalawan dan Kota Pekanbaru, sementara untuk kabupaten/kota yang lain belum mancapai target yang telah ditentukan.

Gambar 7.15



Sumber : Laporan E-monev dan manual Fasyankes

Dari tabel 7.16 dapat dilihat bahwa untuk Puskesmas hanya satu Puskesmas Harapan raya yang sudah melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar. selain sesuai DO Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan ke Rumah Sakit adalah :

1. Mempunyai Dokumen Izin Lingkungan
2. Mempunyai Tenaga Kesehatan Lingkungan
3. Mempunyai TPS (Tempat Penampungan Sementara) B3 dan ada izin
4. Mempunyai izin incenarasi
5. Bekerjasama dengan pihak swasta berizin
6. Melakukan pemeriksaan limbah 6 bulan sekali

Program Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes di Provinsi Riau belum mencapai target Renstra 2019 yaitu sebesar 36% untuk Puskesmas, dan capaian pengelolaan limbah di Rumah Sakit sudah mencapai target yang telah ditentukan. Kesimpulannya bahwa masih banyak Puskesmas yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan, serta harus di support dengan anggaran.

Dari data diatas dapat dilihat hanya 1 Puskesmas (0,43%) dan 28 Rumah Sakit (39,43%) yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar (DO). Untuk Rumah sakit dan Puskesmas masih perlu pembinaan dan pengawasan lagi baik dari pihak Dinas kesehatan provinsi, Dinas kesehatan Kabupaten/Kota maupun DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) setempat.

Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam pencapaian program ini, diantaranya :

1. Belum adanya dukungan kebijakan Pemda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota khususnya untuk pengelolaan limbah medis fasyankes.
2. Pengelola program di Kabupaten/kota belum melaksanakan tugas dan fugsinya secara optimal.
3. Mahalnya sarana maupun biaya untuk pengelolaan limbah medis fasyankes
4. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor, lintas program, dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis dilapangan
5. Masih banyaknya Rumah Sakit yang tidak mengirimkan laporan (mengisi E-monev).

Diharapkan tahun kedepan Rumah Sakit dan Puskesmas yang belum melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar dan belum mengirimkan laporannya baik secara manual maupun E-monevnya bisa melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar (DO) dan mengirimkan laporannya.

A. Air Minum

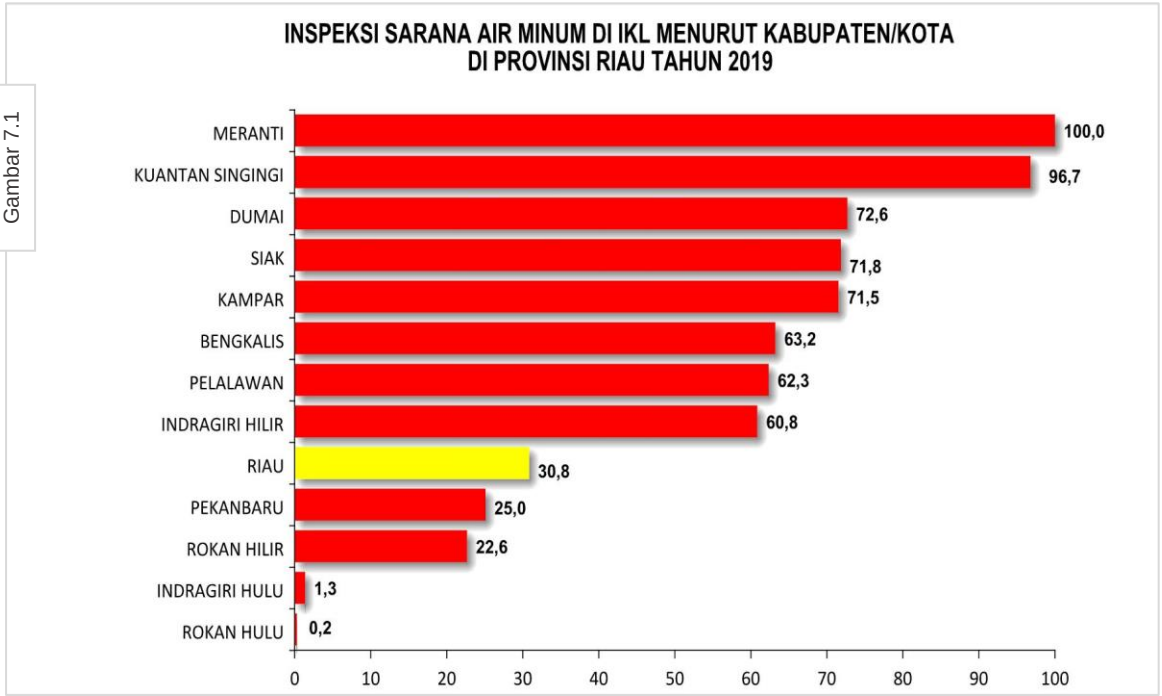
Penyelenggara air minum meliputi (1). PDAM /BPAM/PT yang terdaftar di persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia (PERPAMSI); (2). Sarana air minum perpipaan non PDAM (3). Sarana air minum bukan jaringan perpipaan komunal (Sumur gali, sumur bor dengan pompa, penampungan air hujan, mata air terlindung, terminal air/ tangki air, depot air minum)

Pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum mengacu pada Permenkes No 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dengan melakukan kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). IKL adalah pemeriksaan dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan, perlengkapan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Adapun yang menjadi Tujuan IKL sarana air minum dan sanitasi adalah :

a. Mengetahui informasi risiko pencemaran
b. Tahapan sebelum melakukan pemeriksaan kualitas air minum
c. Informasi untuk melakukan tindak lanjut dan perbaikan sarana air minum dan sanitasi
d. Memberikan rekomendasi tentang keadaan sarana air minum dan sanitasi

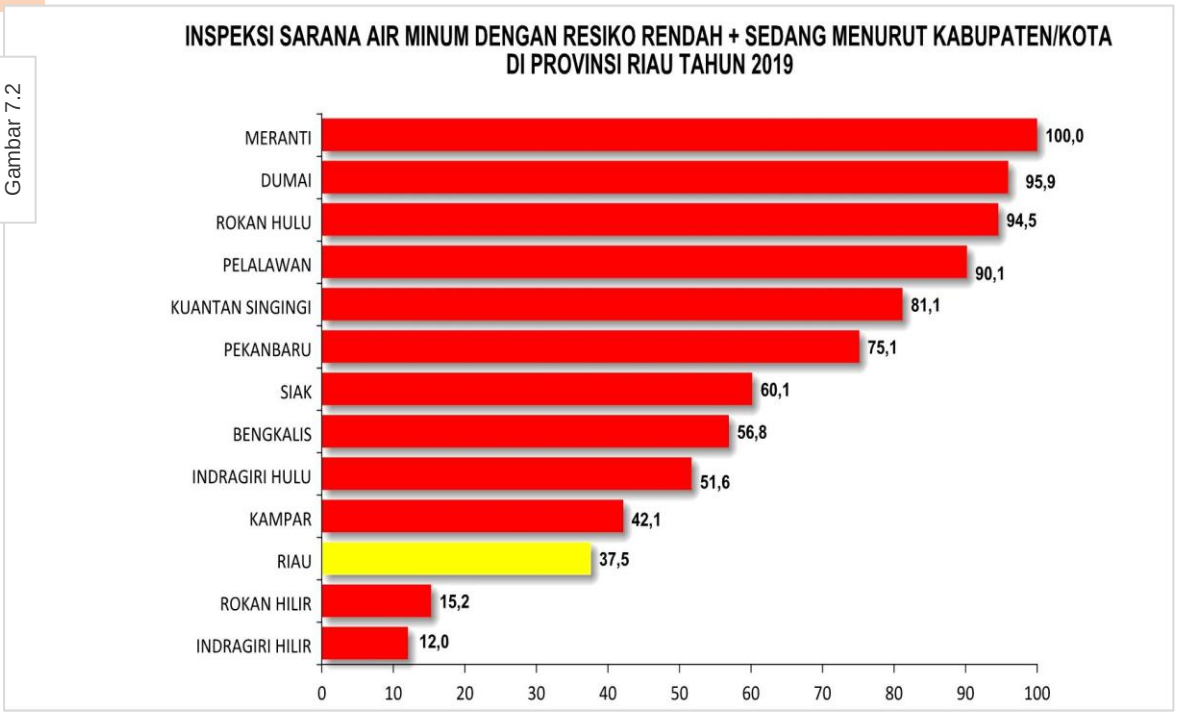
Gambar 7.1



Jumlah sarana air minum yang tersedia di Provinsi Riau 392.425 buah dan yang telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) masih belum memenuhi target Renstra (50%) yaitu 120.753 buah (30,8%). Kabupaten/kota yang

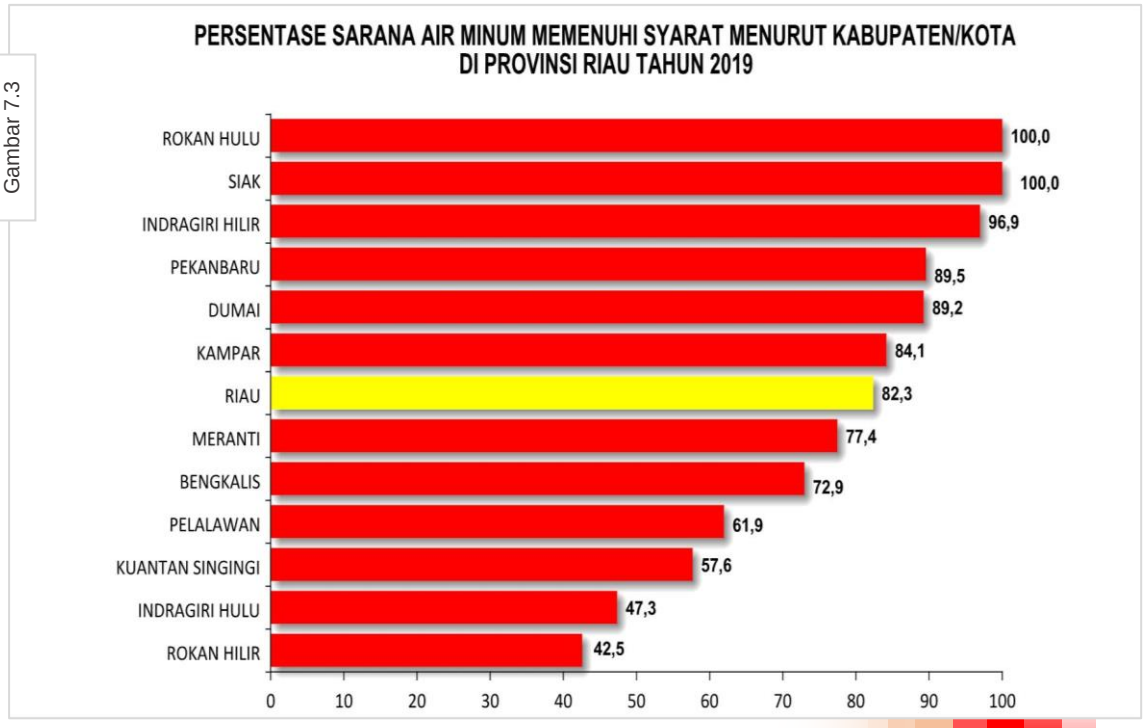
persentasenya masih rendah dalam melakukan pengawasan kualitas air minum yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.

Gambar 7.2



Dari data diatas, terlihat bahwa sarana air minum yang ada dan tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan telah dilakukan pengawasan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 120.753 buah (30,8%). Dan dari jumlah Sarana Air Minum yang ada dan telah dilakukan pengawasan, diambil sampelnya hanya 2.859 buah (0,7%). Dan ternyata hasil penilaian yang beresiko rendah dan sedang di Provinsi Riau sebanyak 37,5%.

Gambar 7.3



Sarana air minum yang dilakukan pengawasan pada penyelenggara air minum melalui inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan (pengujian) kualitas air berdasarkan parameter fisik, kimia, mikrobiologi dan yang memenuhi syarat di Provinsi Riau sebanyak 82,3%. Sarana air minum di Kabupaten Rokan Hulu memenuhi syarat 100% dari jumlah Sarana air minum yang tercatat.

B. Jamban Sehat

Fasilitasi sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septic/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau Bersama. Perilaku buang air besar sembarangan dapat meningkatkan risiko masyarakat terkena penyakit menular. Akses sanitasi layak apabila penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan jenis leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja nya menggunakan tangki septic atau Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Gambar 7.4



Jumlah desa yang mengimplementasikan STBM di Provinsi Riau tahun 2019, telah memenuhi target Renstra (994 desa). Karena dari jumlah desa yang ada berjumlah 1.875 desa, dan yang melaksanakan STBM sebanyak 1.556 desa (83%), dan desa yang melaksanakan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) berjumlah 519 buah (27,7%). Trend penurunan persentase desa Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) tahun 2015-2019 dimulai tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku sehat.

Macam jamban sehat antara lain Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permaenen (JSSP), dan jamban sharing /komunal (jamban umum) dianjurkan untuk daerah/wilayah yang padat penduduk dan daerah yang sempit atau sulit akses untuk membuat sarana jamban dan septink tank.

Gambar 7.5



Persentase desa yang melaksanakan kegiatan stop buang air besar sembarangan di Provinsi Riau tahun 2019 yang paling aktif yaitu Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 45%, Dumai dan Bengkalis 39%, sedangkan kabupaten yang masih kurang dalam melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Kabupaten Rokan hilir (2%) dan Indragiri hilir (15,7%)

Gambar 7.6

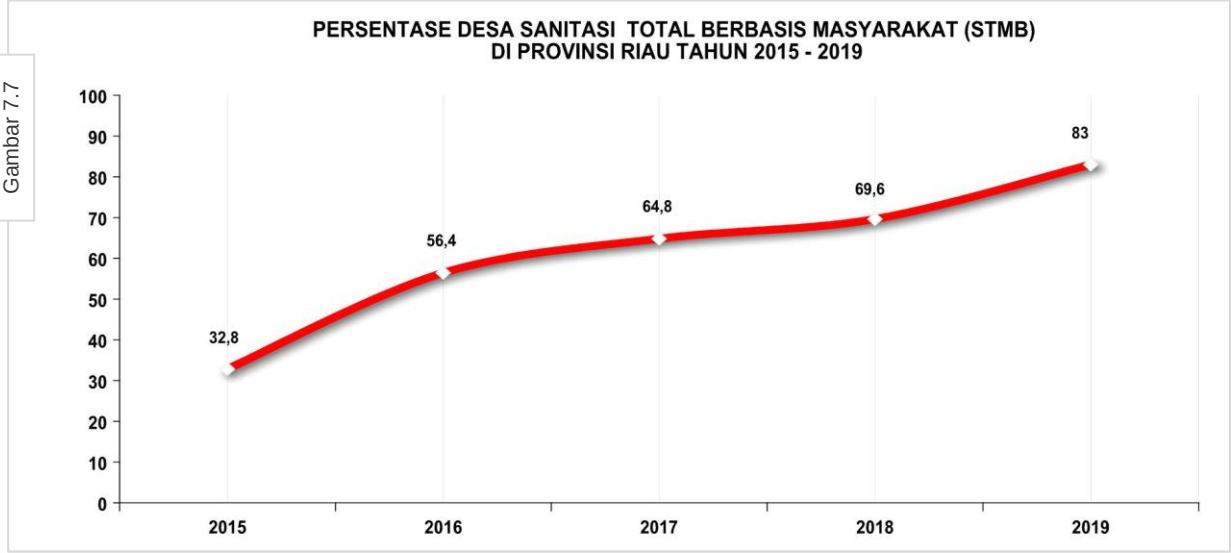


Kepala keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak 82,3%, dengan rincian jumlah sarana jamban sehat sebagai berikut, jamban sehat permanen (JSP) 844.966 buah, jamban sehat semi permanan (JSSP) berjumlah 548.442 buah dan jamban umum/komunal 237.438 buah.

C. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

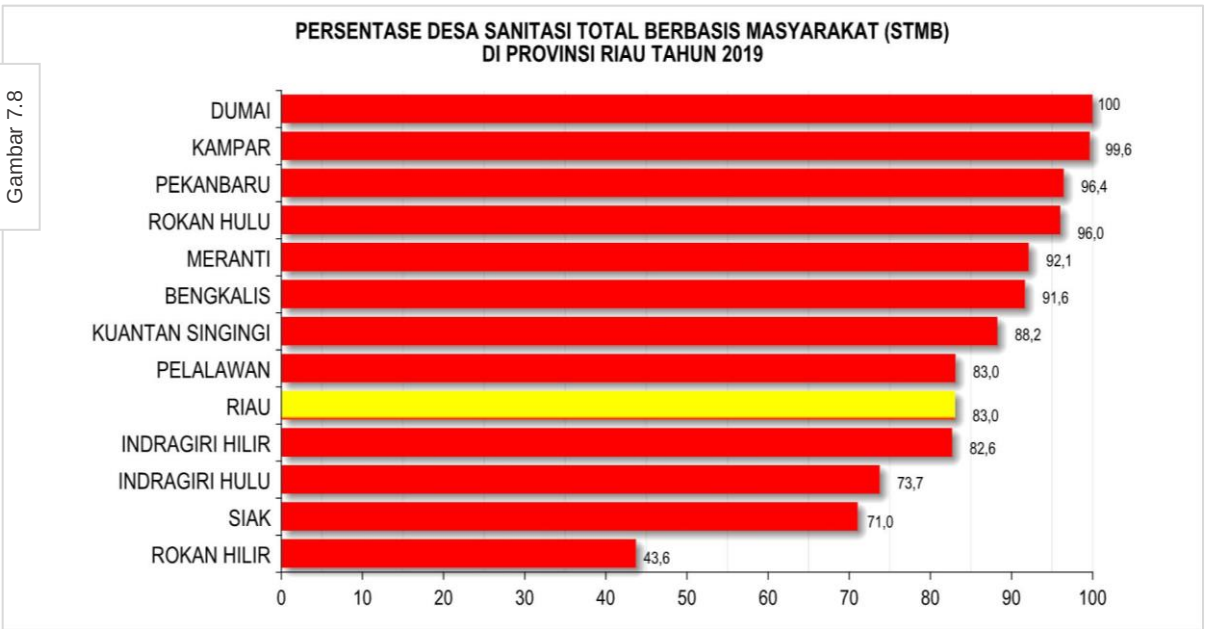
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dengan tujuan untuk menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku

Gambar 7.7



Persentase desa yang melaksanakan STBM dan aktif mulai tahun 2015-2019 mulai meningkat signifikan.

Gambar 7.8



Dan secara provinsi, persentase desa yang aktif melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) cukup tinggi yaitu 83%, dan Kota Dumai telah mencapai 100%, sedangkan kabupaten yang masih rendah yaitu Kabupaten Rokan Hilir 43,6%.

D. Tempat - Tempat Umum

Pelaksanaan pengawasan tempat-tempat umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kegiatan inspeksi sanitasi pada Tempat–Tempat Umum (TTU) dilakukan pada hotel, wisma/ penginapan, pasar/swalayan/supermarket, tempat ibadah, pondok pesantren, kolam renang/ pemandian umum, terminal/bandara/pelabuhan dan TTU lainnya.



Gambar 7.9

Dari gambar dibawah diketahui bahwa persentase tempat–tempat umum yang memenuhi syarat selama 5 (lima) tahun terakhir belum stabil. Hal ini disebabkan masih lemahnya inspeksi sanitasi di tempat–tempat umum terutama pada kolam renang / pemandian umum, terminal / bandara / pelabuhan, pasar / swalayan / supermarket.

Gambar 7.10



Tempat–tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2019 di Provinsi Riau hanya mencapai 51,6% (target Renstra 58%), yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan dinilai masih rendah, dari 12 kabupaten/kota yang di Provinsi Riau ada 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 28,2%, Bengkalis 30,9%, Kep.Meranti 31,3%, Rokan Hilir 39,5%, Rokan Hulu 42,7%, Siak 44,8%, dan Pelalawan 47%.

E. Tempat Pengelolaan Makanan

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk mengolah makanan dari bahan mentah hingga disajikan menjadi makanan jadi yang dilakukan pengawasan, terutama pada TPM di area pelabuhan, dikarenakan banyak masyarakat yang beraktifitas di daerah pelabuhan yang perlu dilindungi kesehatannya. Sasarannya meliputi Jasa boga, Rumah/ Restoran, Depot Air Minum dan Makanan Jajanan.

Pengelolaan makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal, sehingga perlu mendapat perhatian dari segi nilai gizi, segi kemurnian, maupun dari segi kebersihan. Sebab meskipun nilai gizi dan kemurnian baik namun kebersihan lingkungan tidak diawasi dan dipelihara, maka makanan tersebut dapat menimbulkan penyakit akibat terkontaminasi.

Dengan demikian, kualitas makanan yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPM harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam penyelenggaraan TPM antara lain persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan penyajian makanan jadi, dan persyaratan peralatan yang digunakan.

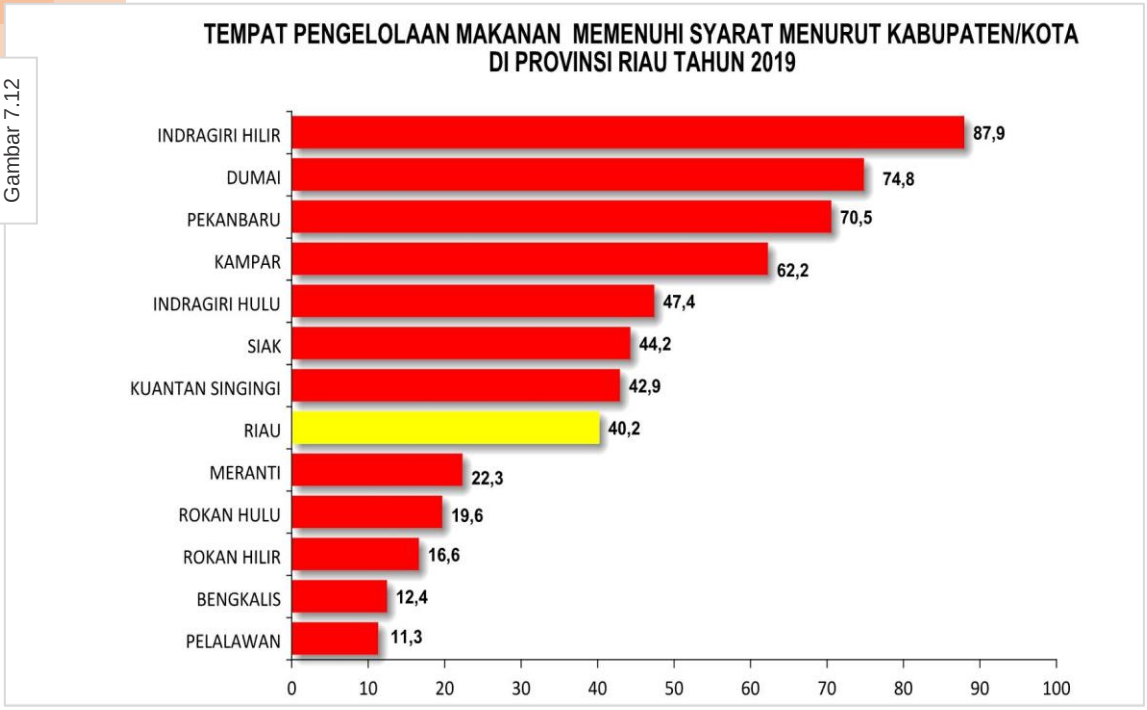
Gambar 7.11



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa, jumlah TPM yang sudah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 40,2%. Angka tersebut telah melampaui target tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu sebesar 26%.

Untuk kabupten/kota yang capaian TPM telah memenuhi syarat kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2018 adalah sebesar 83,3% dan yang tertinggi adalah Kabupaten Pelalawan 82,0% diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu sebesar 53,3% dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 45,5%. Sedangkan untuk Kabupaten/kota yang TPMnya memenuhi syarat kesehatan adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 2.8% diikuti oleh Kabupaten Kep.Meranti 11,6% dan kabupaten Kampar 15,6%. Gambaran capaian TPM yang telah memenuhi syarat kesehatan dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 7.12



Namun, dari 18.439 TPM yang ada, tetapi yang memenuhi syarat hanya 7.407 (40%) Meskipun hasil capaian setiap tahunnya telah melampaui target, namun pencapaian TPM yang memenuhi syarat kesehatan selama 5 (lima) tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Untuk itu perlu dilakukan meningkatkan pembinaan yang melibat semua lintas program/sektor tekait, sebagaoman kita ketahui bahwa TPM memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit, bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan evaluasi rutin untuk semua TPM, dan diprioritaskan untuk TPM yang belum memenuhi syarat dan atau TPM yang belum pernah dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan yaitu sebanyak 59,8% (11.032 TPM).

F. Program Pengembangan Kawasan dan Pemukiman Sehat

Target program Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan Sehat adalah kabupaten yang menyelenggarakan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat dengan membentuk Tim Pembina, Forum Kabupaten/Kota dan yang menerapkan minimal 2 tatanan wajib dari 9 tatanan kawasan sehat dan rencana kerja.

Realisasi pelaksanaan program Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat di Provinsi Riau tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 7.13 berikut;

Pencapaian Kab/Kota yang Menyelenggarakan Kab/Kota Sehat di Provinsi Riau Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2019	
		TARGET	PENCAPAIAN
1	KAMPAR	0	0
2	PELALAWAN	0	0
3	SIAK	1	1
4	INDRAGIRI HULU	0	0
5	INDRAGRI HILIR	0	0
6	KUANTAN SINGINGI	0	0
7	ROKAN HULU	1	1
8	ROKAN HILIR	0	0
9	BENGKALIS	1	1
10	MERANTI	0	0
11	DUMAI	0	0
12	PEKANBARU	1	1
	JUMLAH	4	4

Dari data di atas terlihat pencapaian tahun 2019 adalah 100% dari target yang sesuai dengan definisi operasional menyelenggarakan KKS. Target tahun 2019 sebanyak 4 Kabupaten/Kota dan yang tercapai masih 4 Kabupaten/Kota. Ini berhasil dikarenakan Komitmen bersama Kepala Daerah Kabupaten Kota untuk mewujudkan Kabupaten Kota Sehat di daerahnya masing-masing.

Realisasi capaian Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Provinsi Riau tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada Grafik 4.11 berikut;

Gambar 7.13



Grafik di atas terdapat peningkatan capaian pada tahun 2019 yaitu 4 Kabupaten/Kota yang masih sama menyelenggarakan KKS di tahun sebelumnya. Namun pada target ada penurunan ini karena menyesuaikan dengan definisi operasional dan tidak adanya pembaharuan SK dari Kabupaten Kota yaitu Kota Dumai dan Kab. Meranti. Dinas Kesehatan Provinsi dan Bappeda Provinsi bersama turun dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau tahun 2019 kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Wilayah Pemukiman Sehat dengan pagu Rp. 129.287.100,-. Untuk melakukan Pembinaan Kelembagaan KKS di Kab/Kota, Verifikasi KKS Tingkat Pusat pada 4 Kab/Kota, Rapat Tim Pembina KKS Provinsi, Penyelenggaraan KKS Pusat serta Pengambilan Penghargaan dari Kemenkes RI di Pusat.

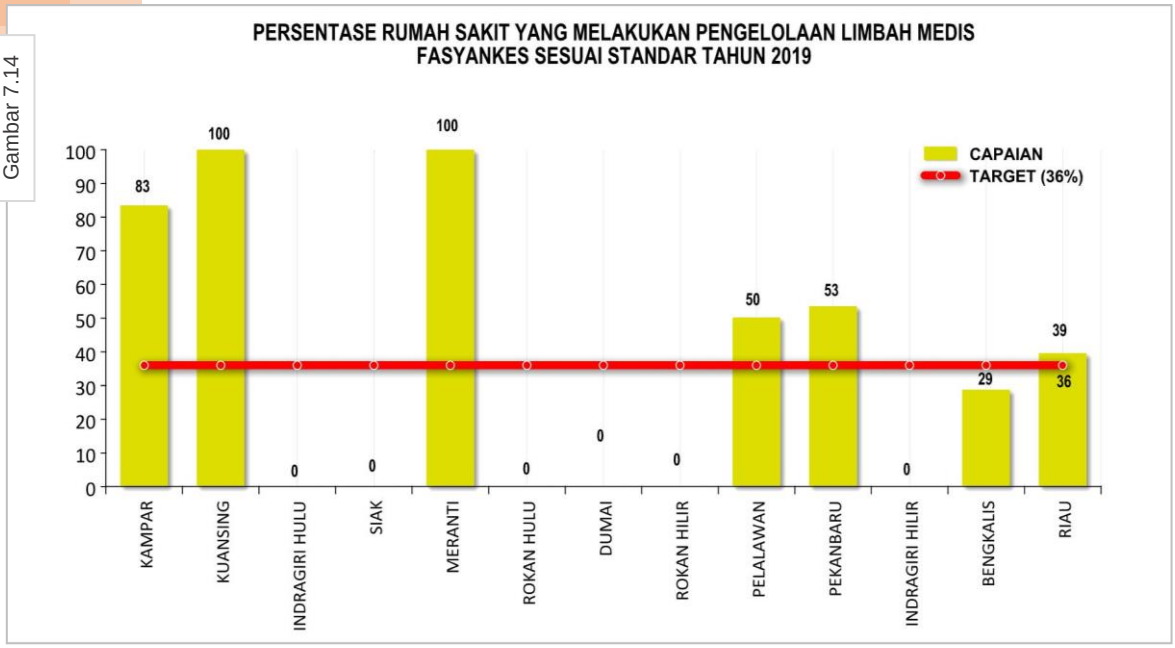
Penyelenggaraan tatanan kawasan sehat tidak seluruh Kabupaten/Kota ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi masalah antara lain:

1. Pemahaman lintas sektor dan program dalam menyelenggarakan Kab/kota sehat masih terbatas.
2. Belum optimalnya kerjasama LS dan LP terkait di tingkat daerah dalam pengembangan KKS.
3. Kurang optimalnya fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota.
4. Pimpinan Daerah yang tidak teradvokasi dan sosialisasi Kab/Kota sehat.
5. Kurangnya Komitmen pengambil keputusan (Komitmen Bupati/Walikota yang kurang mensupport)
6. Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat diindetikkan milik Kesehatan.
7. Kurangnya kerjasama antara Pemerintah, Forum, dan Masyarakat di Daerah.
8. Sering terjadinya mutasi antar pejabat.
9. Kurang tersedianya dana di Kab/kota untuk penyelenggaraan KKS.

H. Program Pengawasan Limbah Fasilitas Sarana Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Limbah Fasyankes adalah persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis meliputi pemilahan dan pengolahan limbah medis sesuai aturan. Pemilahan adalah telah memisahkan antara limbah medis dan non medis. Pengolahan adalah proses pengolahan akhir limbah yang dilakukan secara mandiri atau (*on site)* atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin (*off site*). Rumah sakit adalah rumah sakit pemerintah dan swasta yang terdaftar. Capaian Program Pengawasan Limbah Fasyankes di Provinsi Riau s.d. Triwulan IV Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

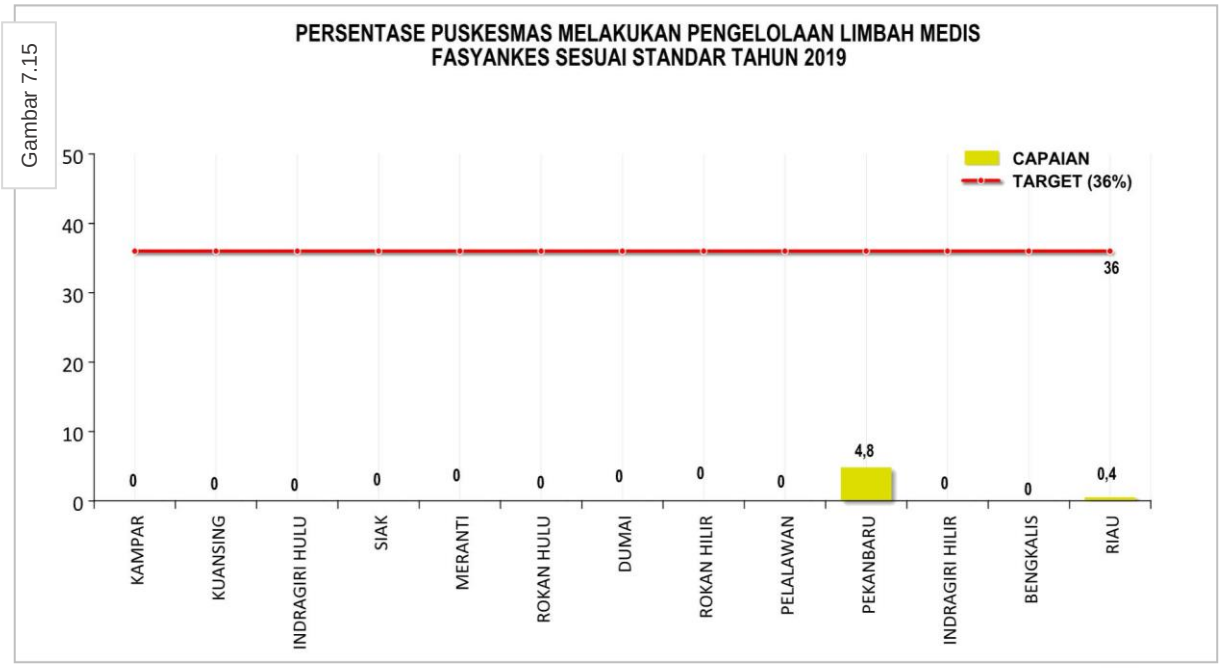
Gambar 7.14



Sumber : Laporan E-monev dan manual Fasyankes

Dari gambar 7.15 diatas dapat dilihat bahwa ada 6 Kabupaten (Kabupaten Kampar, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kuansing, Pelalawan dan Kota Pekanbaru) yang mempunyai wilayah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar (DO = Defenisi Operasional). Kabupaten yang sudah mencapai target yaitu kabupaten Kampar, Kepulauan Meranti, Kuansing, Pelalawan dan Kota Pekanbaru, sementara untuk kabupaten/kota yang lain belum mancapai target yang telah ditentukan.

Gambar 7.15



Sumber : Laporan E-monev dan manual Fasyankes

Dari tabel 7.16 dapat dilihat bahwa untuk Puskesmas hanya satu Puskesmas Harapan raya yang sudah melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar. selain sesuai DO Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan ke Rumah Sakit adalah :

1. Mempunyai Dokumen Izin Lingkungan
2. Mempunyai Tenaga Kesehatan Lingkungan
3. Mempunyai TPS (Tempat Penampungan Sementara) B3 dan ada izin
4. Mempunyai izin incenarasi
5. Bekerjasama dengan pihak swasta berizin
6. Melakukan pemeriksaan limbah 6 bulan sekali

Program Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes di Provinsi Riau belum mencapai target Renstra 2019 yaitu sebesar 36% untuk Puskesmas, dan capaian pengelolaan limbah di Rumah Sakit sudah mencapai target yang telah ditentukan. Kesimpulannya bahwa masih banyak Puskesmas yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan, serta harus di support dengan anggaran.

Dari data diatas dapat dilihat hanya 1 Puskesmas (0,43%) dan 28 Rumah Sakit (39,43%) yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar (DO). Untuk Rumah sakit dan Puskesmas masih perlu pembinaan dan pengawasan lagi baik dari pihak Dinas kesehatan provinsi, Dinas kesehatan Kabupaten/Kota maupun DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) setempat.

Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam pencapaian program ini, diantaranya :

1. Belum adanya dukungan kebijakan Pemda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota khususnya untuk pengelolaan limbah medis fasyankes.
2. Pengelola program di Kabupaten/kota belum melaksanakan tugas dan fugsinya secara optimal.
3. Mahalnya sarana maupun biaya untuk pengelolaan limbah medis fasyankes
4. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor, lintas program, dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis dilapangan
5. Masih banyaknya Rumah Sakit yang tidak mengirimkan laporan (mengisi E-monev).

Diharapkan tahun kedepan Rumah Sakit dan Puskesmas yang belum melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar dan belum mengirimkan laporannya baik secara manual maupun E-monevnya bisa melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar (DO) dan mengirimkan laporannya.

LAMPIRAN

TABEL 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	LUAS WILAYAH (*Km²*)	KECAMATAN	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA	KEPADATAN PENDUDUK *per Km²*
				DESA	KELURAHAN	DESA + KELURAHAN				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	KUANTAN SINGINGI	5.259.36	15	218	11	229	327.316	81.829	4	62
2	INDRAGIRI HULU	7.723.80	14	178	16	194	441.789	108.484	4	57
3	INDRAGIRI HILIR	12.614.78	20	197	39	236	740.598	182.848	4	59
4	PELALAWAN	12.758.45	12	104	14	118	483.622	115.195	4	38
5	SIAK	8.275.18	14	122	9	131	489.996	119.418	4	59
6	KAMPAR	10.983.47	21	242	8	250	871.117	212.959	4	79
7	ROKAN HULU	7.588.13	16	136	9	145	692.120	166.603	4	91
8	BENGKALIS	6.975.41	11	136	19	155	573.003	141.557	4	82
9	ROKAN HILIR	8.881.59	18	160	38	198	714.497	174.305	4	80
10	MERANTI	3.707.84	9	98	5	103	185.516	46.093	4	50
11	PEKANBARU	632.27	12	-	83	83	1.143.359	279.340	4	1808
12	DUMAI	1.623.38	7	-	33	33	308.812	75.823	4	190
JUMLAH (KAB/KOTA)		87.023.66	169	1591	284	1875	6.971.745	1.704.452	4	2657

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten/Kota

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	0 - 4	379.485	364.435	743.920	104.13
2	5 - 9	362.421	348.149	710.570	104.10
3	10 - 14	329.718	311.455	641.173	105.86
4	15 - 19	310.634	296.365	606.999	104.81
5	20 - 24	299.727	289.118	588.845	103.67
6	25 - 29	314.863	305.401	620.264	103.10
7	30 - 34	299.216	287.602	586.818	104.04
8	35 - 39	278.784	271.806	550.590	102.57
9	40 - 44	263.261	246.196	509.457	106.93
10	45 - 49	224.522	201.960	426.482	111.17
11	50 - 54	176.631	157.708	334.339	112.00
12	55 - 59	131.126	118.431	249.557	110.72
13	60 - 64	91.565	82.902	174.467	110.45
14	65 - 69	55.927	51.424	107.351	108.76
15	70 - 74	30.414	31.531	61.945	96.46
16	75+	26.648	32.320	58.968	0.00
JUMLAH		3.574.942	3.396.803	6.971.745	105.24
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN *(DEPENDENCY RATIO)*			50		

Sumber: Kantor Statistik Provinsi Riau

TABEL 3

PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF
DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	VARIABEL	JUMLAH			PERSENTASE		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS	2.503.318	2.372.764	4.876.082			
2	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF	1.064.661	916.836	1.981.497	42.53	38.64	40.64
3	PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN :						
	a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD	257.091	332.899	589.990	10.27	14.03	12.10
	b. SD/MI	578.767	546.448	1.125.215	23.12	23.03	23.08
	c. SMP/ MTs	603.049	576.582	1.179.631	24.09	24.30	24.19
	d. SMA/ MA	693.920	569.938	1.263.858	27.72	24.02	25.92
	e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	155.957	92.775	248.732	6.23	3.91	5.10
	f. DIPLOMA I/DIPLOMA II	10.013	14.948	24.962	0.40	0.63	0.51
	g. AKADEMI/DIPLOMA III	25.534	62.641	88.175	1.02	2.64	1.81
	h. UNIVERSITAS/DIPLOMA IV, S2/S3 (MASTER/DOKTOR)	179.238	176.534	355.771	7.16	7.44	7.30

Sumber: BPS Provinsi Riau

TABEL 4

JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM	1	3	15	4	2	36	61
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	0	1	0	0	0	12	13
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP	0	0	106	0	0	0	106
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR	0	0	594	0	0	0	594
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	0	0	122	0	0	0	122
3	PUSKESMAS KELILING	0	0	191	0	0	0	191
4	PUSKESMAS PEMBANTU	0	0	981	0	0	0	981
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN	0	0	1	0	0	6	7
2	KLINIK PRATAMA	0	0	0	0	0	566	566
3	KLINIK UTAMA	0	0	0	0	0	29	29
4	BALAI PENGOBATAN	0	0	0	0	0	11	11
5	PRAKTIK DOKTER BERSAMA	0	0	0	0	0	6	6
6	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN	0	0	0	0	0	228	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN	0	0	0	0	0	63	63
8	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	0	0	0	0	0	12	12
9	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL	0	0	0	0	0	312	312
10	BANK DARAH RUMAH SAKIT	0	0	2	0	0	3	5
11	UNIT TRANSFUSI DARAH	0	0	8	0	0	1	9
12	LABORATORIUM KESEHATAN	0	0	0	0	0	2	2

SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

1	INDUSTRI FARMASI	0	0	0	0	**0**	0	0
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	2	2
3	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	1	1
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0
5	PEDAGANG BESAR FARMASI	0	0	0	0	4	42	46
6	APOTEK	0	0	0	0	17	682	699
7	APOTEK PRB	0	0	0	0	14	0	14
8	TOKO OBAT	0	0	0	0	0	473	473
9	TOKO ALKES	0	0	0	0	0	3	3
10	PIRT	0	0	0	0	0	1819	1.819
11	KOSMETIK	0	0	0	0	0	2	2
12	PENYALUR ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	3	43	46

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

TABEL 5

JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN					KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP		JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
A	**Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama**									
1	KUANTAN SINGINGI	40.429	38.844	79.273	868	833	1.701	1	0	1
2	INDRAGIRI HULU	62.422	74.444	136.866	1.829	2.556	4.385	257	170	427
3	INDRAGIRI HILIR	7.113	86.902	94.015	619	745	1.364	190	92	282
4	PELALAWAN	142.668	137.073	279.741	418	402	820	0	0	0
5	SIAK	138.919	133.472	272.391	3.132	3.010	6.142	196	189	385
6	KAMPAR	77.046	93.108	170.154	517	601	1.118	329	311	640
7	ROKAN HULU	86.965	82.142	169.107	960	1.078	2.038	3.116	5.154	8.270
8	BENGKALIS	123.514	82.341	205.855	501	334	835	675	452	1.127
9	ROKAN HILIR	125.435	135.367	260.802	2.585	2.619	5.204	247	237	484
10	MERANTI	55.001	98.698	153.699	365	521	886	220	130	350
11	PEKANBARU	194.391	257.759	452.150	238	640	878	984	512	1.496
12	DUMAI	49.897	67.963	117.860	694	1.027	1.721	88	129	217
SUB JUMLAH I		1.103.801	1.288.112	2.391.913	12.726	14.366	27.092	6.303	7.376	13.679
B	**Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut**									
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	INDRAGIRI HILIR	42.262	125.681	167.950	6.506	8.231	14.743	406	194	600
4	PELALAWAN	39.001	38.991	77.992	8.395	11.727	20.122	101	79	180
5	SIAK	23.381	27.819	51.200	2.989	4.579	7.568	0	0	0
6	KAMPAR	44.258	51.666	95.924	5.641	6.740	12.381	0	0	0
7	ROKAN HULU	195.944	237.399	433.343	15.415	19.216	34.631	502	307	809
8	BENGKALIS	195.944	237.399	433.343	15.415	19.216	34.631	502	307	809
9	ROKAN HILIR	23.392	13.174	36.566	3.275	4.992	8.267	461	174	635
10	MERANTI	18.625	27.990	46.615	2.706	4.365	7.071	21	5	26
11	PEKANBARU	908.860	1.204.142	2.113.002	87.024	117.365	204.389	15.838	10.341	26.179
12	DUMAI	70.750	67.328	138.078	7.368	11.425	20.716	1.021	815	1.836
SUB JUMLAH II		1.562.417	2.031.589	3.594.013	154.734	207.856	364.519	18.852	12.222	31.074
JUMLAH (KAB/KOTA)		2.666.218	3.319.701	5.985.926	167.460	222.222	391.611	25.155	19.598	44.753
JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA		3.574.942	3.396.803	6.971.745	3.574.942	3.396.803	6.971.745			
CAKUPAN KUNJUNGAN (%)		74.6	97.7	85.9	4.7	6.5	5.6			

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan

TABEL 6

PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR) LEVEL I
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES)	JUMLAH FASYANKES	MEMPUNYAI KEMAMPUAN YAN. GADAR LEVEL I	
			JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	RUMAH SAKIT UMUM	60	60	100.0
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	14	14	100.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		74	74	100.0

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Tabel 7

ANGKA KEMATIAN KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	NAMA RUMAH SAKIT[a]	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI)			PASIEN KELUAR MATI			PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT			*Gross Death Rate*			*Net Death Rate*		
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	RS Umum Daerah Teluk kuantan	107	2.221	2.201	4.422	154	129	283	49	68	117	69.3	58.6	64.0	22.1	30.9	26.5
2	RS Ibu dan Anak Milano	45	1.192	3.990	5.182	13	20	33	1	4	5	10.91	5.01	6.37	0.84	1.00	0.96
3	RS RS Umum Daerah Indrasari Rengat	154	3.898	4.665	8.563	261	257	518	111	121	232	66.96	55.09	60.49	28.48	25.94	27.09
4	RS umum Kasih Ibu Rengat	53	1.935	4.255	6.190	29	34	63	8	12	20	14.99	7.99	10.18	4.13	2.82	3.23
5	RS Ibu dan Anak Safira	31	675	2.000	2.675	7	15	22	9	12	21	10.37	7.50	8.22	13.33	6.00	7.85
6	RS Umum Daerah Puri Husada	186	5.344	6.369	11.713	383	295	678	186	159	345	71.67	46.32	57.88	34.81	24.96	29.45
7	RS Umum Daerah Raja Musa	39	153	306	459	3	4	7	2	0	2	19.61	13.07	15.25	13.07	0.00	4.36
8	RS umum Daerah Tengku Sulung	32	137	144	281	4	7	11	2	0	2	29.20	48.61	39.15	14.60	0.00	7.12
9	RS Umum 3M Plus	52	322	334	656	5	6	11	4	4	8	15.53	17.96	16.77	12.42	11.98	12.20
10	RS Umum Daerah Selasih Riau	131	1.816	2.613	4.429	56	59	115	28	27	55	30.84	22.58	25.97	15.42	10.33	12.42
11	RS Umum Efarina	238	4.784	6.035	10.819	108	67	175	43	27	70	22.58	11.10	16.18	8.99	4.47	6.47
12	RS Umum Medicare Sorek	60	1.809	2.877	4.686	11	14	25	8	3	11	6.08	4.87	5.34	4.42	1.04	2.35
13	RS Umum Amalia Medika	54	1.610	1.546	3.156	30	37	67	9	5	14	18.64	23.93	21.23	5.59	3.23	4.44
14	RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura	150	3.152	4.815	7.967	150	134	284	71	62	133	47.59	27.83	35.65	22.53	12.88	16.69
15	RS Type D Perawang	20	177	160	337	0	0	0	2	3	5	0.00	0.00	0.00	11.30	18.75	14.84
16	RS umum Daerah Bangkinang	130	2.913	3.297	6.210	2.289	214	2.503	91	85	176	785.79	64.91	403.06	31.24	25.78	28.34
17	RS Umum Tandun	50	797	505	1.302	3	1	4	0	1	1	3.76	1.98	3.07	0.00	1.98	0.77
18	RS Umum Mesra	30	899	897	1.796	0	4	4	0	0	0	0.00	4.46	2.23	0.00	0.00	0.00
19	RS Ibu Anak Husada Bunda	26	16	1.169	1.185	1	1	0	0		0	62.50	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20	RS Ibu Anak Bunda Anisyah	30	746	1.119	1.865	1	2	3	0	0	0	1.34	1.79	1.61	0.00	0.00	0.00
21	RS ibu Anak Norfa Husada	25	1.800	6.384	8.184	0	4	4	0	0	0	0.00	0.63	0.49	0.00	0.00	0.00
22	RS Umum Daerah Rokan Hulu	132	2.980	4.567	7.547	139	145	284	22	28	50	46.64	31.75	37.63	7.38	6.13	6.63
23	RS umum Awal Bros ujung Batu	75	2.899	3.202	6.101	21	35	56	21	35	56	7.24	10.93	9.18	7.24	10.93	9.18
24	RS Umum Azzahra	45	7.162	9.749	16.911	3	4	7	3	4	7	0.42	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41
25	RS Umum Surya Insani	51	1.942	2.398	4.340	16	17	33	16	17	33	8.24	7.09	7.60	8.24	7.09	7.60
26	RS Ibu dan Anak Harapan Medika	25	53	724	777	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	RS Umum Daerah Bengkalis	167	3.561	5.392	8.953	80	122	202	54	67	121	22.47	22.63	22.56	15.16	12.43	13.52
28	RS Umum Daerah Kec. Mandau	199	4.030	4.576	8.606	203	143	346	108	64	172	50.37	31.25	40.20	26.80	13.99	19.99
29	RS umum Mutia Sari	66	1.958	1.597	3.555	2	0	2	0	0	0	1.02	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
30	RS Umum PT. Chevron pacific Indonesia	16	133	210	343	5	6	11	10	11	21	37.59	28.57	32.07	75.19	52.38	61.22
31	RS Umum Thursina	31	2.750	3.609	6.359	6	9	15	2	3	5	2.18	2.49	2.36	0.73	0.83	0.79
32	RS Umum Permata Hati	87	2.493	3.483	5.976	27	23	50	14	18	32	10.83	6.60	8.37	5.62	5.17	5.35
33	RS Umum Aad	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	RS Umum Agung	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	RS Umum Indah	74	1.074	894	1.968	11	4	15	9	4	13	10.24	4.47	7.62	8.38	4.47	6.61
36	RS Umum Cahaya	43	1.153	1.597	2.750	23	27	50	1	6	7	19.95	16.91	18.18	0.87	3.76	2.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	RS Umum Regita Medika	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	RS Ibunda	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo bagan Siapiapi	117	3.378	5.099	8.477	135	130	265	51	62	113	39.96	25.50	31.26	15.10	12.16	13.33
40	RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	139	2.706	4.365	7.071	96	84	180	16	23	39	35.48	19.24	25.46	5.91	5.27	5.52
41	RS Umum Daerah Arifin Achmad	505	12.653	9.045	21.698	1.170	1.056	2.226	605	582	1.187	92.47	116.75	102.59	47.81	64.34	54.71
42	RS TK. IV Pekanbaru	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau	61	812	744	1.556	42	30	72	29	22	51	51.72	40.32	46.27	35.71	29.57	32.78
44	RS Santa Maria Pekanbaru	200	6.887	3.443	10.330	169	102	271	68	34	102	24.54	29.63	26.23	9.87	9.88	9.87
45	RS Umum Eka Hospital pekanbaru	160	4.951	5.732	10.683	73	64	137	58	57	115	14.74	11.17	12.82	11.71	9.94	10.76
46	RS Umum Syafira	189	8.259	10.511	18.770	184	119	303	97	52	149	22.28	11.32	16.14	11.74	4.95	7.94
47	RS Umum Daerah Petala Bumi	72	1.153	1.650	2.803	32	27	59	11	15	26	27.75	16.36	21.05	9.54	9.09	9.28
48	RS Umum Islam Ibnu Sina	147	3.011	3.500	6.511	117	201	318	91	102	193	38.86	57.43	48.84	30.22	29.14	29.64
49	RS Prof. Dr. Tabrani	49	1.042	1.544	2.586	16	22	38	11	12	23	15.36	14.25	14.69	10.56	7.77	8.89
50	RS Umum Bina Kasih	54	1.298	2.607	3.905	32	22	54	13	9	22	24.65	8.44	13.83	10.02	3.45	5.63
51	RSU RNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin	27	739	526	1.265	1	0	1	0	0	0	1.35	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
52	RS Umum Awal Bros Pekanbaru	250	6.497	6.233	12.730	163	101	264	111	73	184	25.09	16.20	20.74	17.08	11.71	14.45
53	RS Umum Lancang Kuning	52	230	551	781	8	10	18	5	5	10	34.78	18.15	23.05	21.74	9.07	12.80
54	RS Umum Pekanbaru Medical Center	96	1.492	2.328	3.820	43	29	72	19	24	43	28.82	12.46	18.85	12.73	10.31	11.26
55	RS Umum Sansani	91	4.842	7.964	12.806	152	195	347	52	100	152	31.39	24.49	27.10	10.74	12.56	11.87
56	RS Awal Bros A. Yani	137	3.386	4.306	7.692	104	78	182	54	46	100	30.71	18.11	23.66	15.95	10.68	13.00
57	RS JMB Pekanbaru	32	73	110	183	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RS Awal Bros Panam	165	4.630	8.462	13.092	119	99	218	58	85	143	25.70	11.70	16.65	12.53	10.04	10.92
59	RS Universitas Riau	52	6	14	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	RS Umum Aulia Hospital	160	4.578	5.039	9.617	101	131	232	71	50	121	22.06	26.00	24.12	15.51	9.92	12.58
61	RS Umum Prima Pekanbaru	165	9.349	5.669	15.018	140	89	229	96	40	136	14.97	15.70	15.25	10.27	7.06	9.06
62	RS Daerah Madani Kota Pekanbaru	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	RS Hermina Pekanbaru	50	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	RS Jiwa Tampan	230	1.484	445	1.929	0	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.52
65	RS Ibu dan Anak Eria Bunda	88	491	3.216	3.707	2	5	7	1	4	5	4.07	1.55	1.89	2.04	1.24	1.35
66	RS Ibu Dan Anak Andini	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	RS Ibu dan Anak Annisa	26	154	1.415	1.569	0	1	1	0	0	0	0.00	0.71	0.64	0.00	0.00	0.00
68	RS Ibu dan Anak Zainab	92	2.566	6.316	8.882	1	0	1	0	0	0	0.39	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
69	RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center	25	72	58	130	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru	20	326	280	606	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	RS Ibu dan Anak Budhi Mulia	36	170	1.537	1.707	6	3	9	5	3	8	35.29	1.95	5.27	29.41	1.95	4.69
72	RS Umum Daerah Kota Dumai	332	7.265	10.233	17.498	402	289	691	181	154	335	55.33	28.24	39.49	24.91	15.05	19.15
73	RS Pertamina Dumai	36	499	715	1.214	2	5	7	3	2	5	4.01	6.99	5.77	6.01	2.80	4.12
74	RS Bhayangkara Dumai	20	4	12	16	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KABUPATEN/KOTA		6.790	163.589	211.352	374.941	7.354	4.731	12.083	2.591	2.406	4.997	45.0	22.4	32.2	15.8	11.4	13.3

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan: [a] termasuk rumah sakit swasta

Tabel 8

INDIKATOR KINERJA PELAYAN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	NAMA RUMAH SAKIT[a]	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	RS Umum Daerah Teluk kuantan	107	4.422	16.819	17.399	43.1	41.3	5.0	3.9
2	RS Ibu dan Anak Milano	45	5.182	16.012	15.664	97.5	115.2	0.1	3.0
3	RS RS Umum Daerah Indrasari Rengat	154	8.563	30.857	29.353	54.90	55.60	2.96	3.43
4	RS umum Kasih Ibu Rengat	53	619	14.956	1.557	77.31	11.68	7.09	2.52
5	RS Ibu dan Anak Safira	31	2.675	3.081	3.813	27.23	86.29	3.08	1.43
6	RS Umum Daerah Puri Husada	186	11.713	52.250	47.630	77.0	63.0	1.3	4.1
7	RS Umum Daerah Raja Musa	39	459	4.137	4.137	29.1	11.8	22.0	9.0
8	RS umum Daerah Tengku Sulung	32	287	1.008	1.329	8.6	9.0	37.2	4.6
9	RS Umum 3M Plus	52	645	12	1.890	0.1	12.4	29.4	2.9
10	RS Umum Daerah Selasih Riau	131	4.429	17.543	17.543	36.7	33.8	6.8	4.0
11	RS Umum Efarina	238	10.819	3.486	4.815	4.0	45.5	7.7	0.4
12	RS Umum Medicare Sorek	60	4.686	14.058	16.571	64.2	78.1	1.7	3.5
13	RS Umum Amalia Medika	54	3.156	7.284	9.789	37.0	58.4	3.9	3.1
14	RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura	150	7.967	29.434	21.593	53.8	53.1	3.2	2.7
15	RS Type D Perawang	20	337	892	337	12.2	16.9	19.0	1.0
16	RS umum Daerah Bangkinang	130	6.210	31.807	21.012	67.03	47.77	2.52	3.38
17	RS Umum Tandun	50	1.702	7.858	6.156	43.06	34.04	6.11	3.62
18	RS Umum Mesra	30	1.786	3.700	3.849	33.79	59.53	4.06	2.16
19	RS Ibu Anak Husada Bunda	26	1.185	3.926	2.917	41.370	45.577	4.695	2.462
20	RS Ibu Anak Bunda Anisyah	30	1.865	3.360	3.174	30.68	62.17	4.07	1.70
21	RS ibu Anak Norfa Husada	25	8.184	32.736	23.736	358.75	327.36	-2.89	2.90
22	RS Umum Daerah Rokan Hulu	132	7.547	29.494	38.964	61.22	57.17	2.48	5.16
23	RS umum Awal Bros ujung Batu	75	6.101	19.107	24.055	69.80	81.35	1.36	3.94

NO	NAMA RUMAH SAKIT[a]	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
24	RS Umum Azzahra	45	16.911	2.630	1.880	16.0	375.8	0.8	0.1
25	RS Umum Surya Insani	51	4.340	12.168	16.559	65.37	85.10	1.49	3.82
26	RS Ibu dan Anak Harapan Medika	25	777	1.544	2.345	16.92	31.08	9.76	3.02
27	RS Umum Daerah Bengkalis	167	8.953	34.795	32.795	57.08	53.61	2.92	3.66
28	RS Umum Daerah Kec. Mandau	199	8.606	59.130	29.529	81.41	43.25	1.57	3.43
29	RS umum Mutia Sari	66	3.555	11.584	11.284	48.09	53.86	3.52	3.17
30	RS Umum PT. Chevron pacific Indonesia	16	343	1.178	1.167	20.17	21.44	13.59	3.40
31	RS Umum Thursina	31	6.374	7.294	9.254	64.46	205.61	0.63	1.45
32	RS Umum Permata Hati	87	7.445	15.747	5.512	49.59	85.57	2.15	0.74
33	RS Umum Aad	10	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	RS Umum Agung	12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	RS Umum Indah	74	1.968	9.765	12.775	36.2	26.6	8.8	6.5
36	RS Umum Cahaya	43	2.750	863	22.680	5.5	64.0	5.4	8.2
37	RS Umum Regita Medika	59	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	RS Ibunda	55	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo bagan Si	117	8.477	22.282	27.411	52.2	72.5	2.4	3.2
40	RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mer	139	7.071	14.324	14.453	28.2	50.9	5.1	2.0
41	RS Umum Daerah Arifin Achmad	505	21.698	12.409	105.736	6.7	43.0	7.9	4.9
42	RS TK. IV Pekanbaru	52	758	2.384		12.6	14.6	21.9	0.0
43	RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau	61	1.556	6.513	4.957	29.3	25.5	10.1	3.2
44	RS Santa Maria Pekanbaru	200	10.330	44.171	43.823	60.5	51.7	2.8	4.2
45	RS Umum Eka Hospital pekanbaru	160	10.683	39.207	38.945	67.1	66.8	1.8	3.6
46	RS Umum Syafira	189	18.770	46.565	53.472	67.5	99.3	1.2	2.8
47	RS Umum Daerah Petala Bumi	72	2.803	8.191	8.194	31.2	38.9	6.5	2.9
48	RS Umum Islam Ibnu Sina	147	6.511	23.681	21.822	44.1	44.3	4.6	3.4
49	RS Prof. Dr. Tabrani	49	2.586	8.273	7.937	46.3	52.8	3.7	3.1
50	RS Umum Bina Kasih	54	3.905	6.038	12.403	30.6	72.3	3.5	3.2
51	RSU RNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin	27	203	680	680	6.9	7.5	45.2	3.3

NO	NAMA RUMAH SAKIT[a]	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
52	RS Umum Awal Bros Pekanbaru	250	12.080	45.553	53.534	49.9	48.3	3.8	4.4
53	RS Umum Lancang Kuning	52	781	4.498	4.512	23.7	15.0	18.5	5.8
54	RS Umum Pekanbaru Medical Center	96	3.819	15.152	9.931	43.2	39.8	5.2	2.6
55	RS Umum Sansani	91	12.806	28.498	33.349	85.8	140.7	0.4	2.6
56	RS Awal Bros A. Yani	137	7.692	23.816	29.557	47.6	56.1	3.4	3.8
57	RS JMB Pekanbaru	32	110	349	276	3.0	3.4	103.0	2.5
58	RS Awal Bros Panam	165	13.092	39.539	51.639	65.7	79.3	1.6	3.9
59	RS Universitas Riau	52	20	46	41	0.2	0.4	946.7	2.1
60	RS Umum Aulia Hospital	160	9.617	38.489	38.385	65.9	60.1	2.1	4.0
61	RS Umum Prima Pekanbaru	165	15.018	36.423	39.482	60.5	91.0	1.6	2.6
62	RS Daerah Madani Kota Pekanbaru	38	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	RS Hermina Pekanbaru	50	6	19	21	0.1	0.1	3038.5	3.5
64	RS Jiwa Tampan	230	1.929	97.073	95.144	115.6	8.4	-6.8	49.3
65	RS Ibu dan Anak Eria Bunda	88	3.617	8.043	7.574	25.0	41.1	6.7	2.1
66	RS Ibu Dan Anak Andini	35	2.395	5.402	5.413	42.3	68.4	3.1	2.3
67	RS Ibu dan Anak Annisa	26	1.582	3.993	4.637	42.1	60.8	3.5	2.9
68	RS Ibu dan Anak Zainab	92	8.882	16.592	15.526	49.4	96.5	1.9	1.7
69	RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center	25	130	190	190	2.1	5.2	68.7	1.5
70	RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru	20	606	606	665	8.3	30.3	11.0	1.1
71	RS Ibu dan Anak Budhi Mulia	36	1.707	5.818	4.190	44.3	47.4	4.3	2.5
72	RS Umum Daerah Kota Dumai	332	17.498	92.794	75.911	76.6	52.7	1.6	4.3
73	RS Pertamina Dumai	36	1.214	4.477	4.274	34.1	33.7	7.1	3.5
74	RS Bhayangkara Dumai	20	16	84	69	1.2	0.8	451.0	4.3
KABUPATEN/KOTA		6.790	372.529	1.202.687	1.277.216	48.5	54.9	3.4	3.4

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan: termasuk rumah sakit swasta

TABEL 9

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL	
			memiliki obat dan vaksin esensial ≥80%	memiliki obat dan vaksin esensial <80%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KUANTAN SINGINGI	23	23	0
2	INDRAGIRI HULU	18	18	0
3	INDRAGIRI HILIR	26	25	1
4	PELALAWAN	14	14	0
5	SIAK	15	15	0
6	KAMPAR	31	31	0
7	ROKAN HULU	21	21	0
8	BENGKALIS	18	17	1
9	ROKAN HILIR	17	17	0
10	MERANTI	9	9	0
11	PEKANBARU	21	21	0
12	DUMAI	10	10	0
JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 80% OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL		223	221	2
JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAPOR				223
% PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL				99.1

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan: *) beri tanda "V" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial ≥80%

*) beri tanda "X" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial <80%

*) jika puskesmas tersebut tidak melapor, mohon dikosongkan atau tidak memberi tanda "V" maupun "X"

TABEL 10

JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM* MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	STRATA POSYANDU								JUMLAH	POSYANDU AKTIF (PURI)*		JUMLAH POSBINDU PTM**
		PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI					
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	KUANTAN SINGINGI	12	3.2	140	37.7	182	49.1	37	10.0	371	219	59.0	92
2	INDRAGIRI HULU	108	27.6	176	45.0	92	23.5	15	3.8	391	107	27.4	166
3	INDRAGIRI HILIR	147	24.6	200	33.5	172	28.8	78	13.1	597	250	41.9	72
4	PELALAWAN	31	8.6	160	44.3	116	32.1	54	15.0	361	170	47.1	98
5	SIAK	1	0.2	150	37.2	201	49.9	51	12.7	403	252	62.5	53
6	KAMPAR	24	3.7	182	28.0	312	47.9	133	20.4	651	445	68.4	172
7	ROKAN HULU	12	2.0	138	22.9	309	51.3	143	23.8	602	452	75.1	145
8	BENGKALIS	63	12.5	291	57.7	146	29.0	4	0.8	504	150	29.8	27
9	ROKAN HILIR	84	15.5	225	41.4	150	27.6	84	15.5	543	234	43.1	37
10	MERANTI	1	0.4	111	43.7	130	51.2	12	4.7	254	142	55.9	74
11	PEKANBARU	25	3.9	148	22.9	350	54.1	124	19.2	647	474	73.3	60
12	DUMAI	0	0.0	0	0.0	4	2.1	191	97.9	195	195	100.0	30
JUMLAH (KAB/KOTA)		508	9.2	1.921	34.8	2164	39.2	926	16.8	5.519	3.090	56.0	1.026
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA										0.7			

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

*PURI: Purnama Mandiri

**PTM: Penyakit Tidak Menular

TABEL 11

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	DR SPESIALIS	DOKTER UMUM	TOTAL	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI SPESIALIS	TOTAL
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	PUSKESMAS	3	786	789	315	0	293
1	KUANTAN SINGINGI	0	24	24	13	0	13
2	INDRAGIRI HULU	0	69	69	18	0	18
3	INDRAGIRI HILIR	0	44	44	22	0	0
4	PELALAWAN	0	56	56	27	0	27
5	SIAK	0	65	65	19	0	19
6	KAMPAR	0	102	102	57	0	57
7	ROKAN HULU	0	26	26	16	0	16
8	BENGKALIS	0	94	94	34	0	34
9	ROKAN HILIR	3	92	95	20	0	20
10	PEKANBARU	0	115	115	63	0	63
11	DUMAI	0	58	58	15	0	15
12	MERANTI	0	41	41	11	0	11
B	RUMAH SAKIT	874	738	1.623	150	20	260
1	KUANTAN SINGINGI	20	25	45	4	0	4
2	INDRAGIRI HULU	31	27	58	21	3	24
3	INDRAGIRI HILIR	34	31	65	5	0	0
4	PELALAWAN	21	23	44	4	0	4
5	SIAK	25	25	50	8	0	8
6	KAMPAR	51	40	91	7	0	7
7	ROKAN HULU	44	34	78	2	0	2
8	BENGKALIS	102	60	162	15	0	15
9	ROKAN HILIR	13	19	32	1	0	1
10	PEKANBARU	480	396	887	73	15	88
11	DUMAI	39	42	81	7	2	9
12	MERANTI	14	16	30	3	0	3
JUMLAH (KAB/KOTA)[b]		877	1.524	2.412	465	20	553
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK[b]		12.6	21.9	34.6	6.7	0.3	7.9

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3; b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 12

JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	PERAWAT[a]			BIDAN
		L	P	L+P	
1		*3*	*4*	*5*	*6*
A	Puskesmas	981	2.597	3.575	5.026
1	KUANTAN SINGINGI	106	230	336	630
2	INDRAGIRI HULU	108	213	321	602
3	INDRAGIRI HILIR	190	275	462	649
4	PELALAWAN	68	141	209	312
5	SIAK	66	267	333	390
6	KAMPAR	130	381	511	759
7	ROKAN HULU	34	78	112	246
8	BENGKALIS	52	176	228	217
9	ROKAN HILIR	145	342	487	602
10	PEKANBARU	15	230	245	159
11	DUMAI	30	161	191	270
12	MERANTI	37	103	140	190
B	RUMAH SAKIT	1.759	5.446	7.206	2.738
1	KUANTAN SINGINGI	21	97	118	73
2	INDRAGIRI HULU	56	124	180	70
3	INDRAGIRI HILIR	68	217	285	130
4	PELALAWAN	40	88	128	142
5	SIAK	47	124	171	100
6	KAMPAR	48	115	163	99
7	ROKAN HULU	25	90	115	0
8	BENGKALIS	521	1.523	2.044	1.098
9	ROKAN HILIR	33	92	125	71
10	PEKANBARU	709	2.719	3.429	749
11	DUMAI	160	186	346	154
12	MERANTI	31	71	102	52
JUMLAH (KAB/KOTA)[b]		2.740	8.043	10.781	7.764
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK[b]		39	115	155	111

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3; b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 13

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN			GIZI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
A	Puskesmas	118	277	425	42	107	154	14	203	225
1	KUANTAN SINGINGI	8	15	23	1	5	6	1	17	18
2	INDRAGIRI HULU	14	34	48	2	8	10	1	18	19
3	INDRAGIRI HILIR	13	3	46	4	6	16	1	6	16
4	PELALAWAN	12	28	40	4	9	13	1	15	16
5	SIAK	8	41	49	10	14	24	1	22	23
6	KAMPAR	22	27	49	7	10	17	1	23	24
7	ROKAN HULU	20	25	45	1	6	7	1	11	12
8	BENGKALIS	8	18	26	1	11	12	1	20	21
9	ROKAN HILIR	4	21	25	4	2	6	2	4	6
10	PEKANBARU	1	35	36	3	22	24	2	40	42
11	DUMAI	3	23	26	1	7	8	1	15	16
12	MERANTI	5	7	12	4	7	11	1	12	12
B	RUMAH SAKIT	97	211	322	23	59	86	11	249	272
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	1	2	3	0	3	3
2	INDRAGIRI HULU	0	1	1	0	2	2	1	8	9
3	INDRAGIRI HILIR	10	15	25	1	6	7	0	3	3
4	PELALAWAN	1	3	4	1	1	2	0	5	5
5	SIAK	2	14	16	1	2	3	0	9	9
6	KAMPAR	4	3	7	1	2	3	1	10	11
7	ROKAN HULU	34	39	73	3	10	13	3	21	24
8	BENGKALIS	4	7	11	2	5	7	1	37	38
9	ROKAN HILIR	10	12	22	0	0	0	0	4	4
10	PEKANBARU	24	90	128	12	28	44	5	131	148
11	DUMAI	4	22	26	0	0	0	0	14	14
12	MERANTI	4	5	9	1	1	2	0	4	4
JUMLAH (KAB/KOTA)[a]		215	488	747	65	166	240	25	452	497
RASIO TERHADAP 100.000 PDDK		3.08	7.00	10.71	0.93	2.38	3.44	0.36	6.48	7.13

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
Keterangan : a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 14

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	AHLI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISIAN MEDIS		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
A	Puskesmas	22	186	208	0	36	56	1	8	11	14	132	161
1	KUANTAN SINGINGI	0	10	10	0	10	10	0	4	4	4	13	17
2	INDRAGIRI HULU	0	9	9	0	0	0	0	0	0	1	18	19
3	INDRAGIRI HILIR		2	2	0	0	20	1	0	1	0	0	15
4	PELALAWAN	4	26	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SIAK	3	14	17	0	18	18	0	0	0	1	13	14
6	KAMPAR	1	25	26	0	7	7	0	0	0	4	25	29
7	ROKAN HULU	0	18	18	0	0	0	0	1	3	0	10	10
8	BENGKALIS	4	26	30	0	0	0	0	0	0	0	7	7
9	ROKAN HILIR	2	3	5	0	1	1	0	1	1	1	5	6
10	PEKANBARU	1	32	33	0	0	0	0	0	0	2	36	38
11	DUMAI	2	12	14	0	0	0	0	2	2	1	5	6
12	MERANTI	5	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	RUMAH Sakit	90	416	506	68	78	146	56	138	194	93	149	242
1	KUANTAN SINGINGI	0	8	8	5	3	8	1	7	8	0	3	3
2	INDRAGIRI HULU	1	8	9	0	1	1	1	2	3	3	3	6
3	INDRAGIRI HILIR	7	19	26	0	0	0	1	13	14	6	6	12
4	PELALAWAN	4	10	14	0	0	0	0	1	1	2	2	4
5	SIAK	3	6	9	6	10	16	4	7	11	7	9	16
6	KAMPAR	3	28	31	0	1	1	0	6	6	3	15	18
7	ROKAN HULU	3	10	13	4	3	7	0	3	3	0	0	0
8	BENGKALIS	22	67	89	0	0	0	5	11	16	16	27	43
9	ROKAN HILIR	1	2	3	1	0	1	1	1	2	2	4	6
10	PEKANBARU	44	228	272	48	49	97	36	76	112	50	65	115
11	DUMAI	2	30	32	4	11	15	5	6	11	4	15	19
12	MERANTI	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)[a]		112	602	714	68	114	202	57	146	205	107	281	403
RASIO TERHADAP 100.000 PDDK		1.6	8.6	10.2	1.0	1.6	2.9	0.8	2.1	2.9	1.5	4.0	5.8

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan : a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 15

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN[a]			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
A	Puskesmas	32	238	278	26	106	131	58	343	401
1	KUANTAN SINGINGI	6	19	25	3	14	17	9	33	42
2	INDRAGIRI HULU	2	14	16	5	14	19	7	28	35
3	INDRAGIRI HILIR	1	8	16	0	1	1	1	9	10
4	PELALAWAN	4	3	7	1	9	10	5	12	17
5	SIAK	3	29	32	2	7	9	5	36	41
6	KAMPAR	3	41	44	2	9	11	5	50	55
7	ROKAN HULU	1	11	13	0	0	0	1	11	12
8	BENGKALIS	4	26	30	1	11	12	5	37	42
9	ROKAN HILIR	0	18	18	3	9	12	3	27	30
10	PEKANBARU	4	41	45	8	18	26	12	59	71
11	DUMAI	1	13	14	0	5	5	1	18	19
12	MERANTI	3	15	18	1	9	9	4	23	27
B	RUMAH SAKIT	84	584	668	34	294	328	118	881	999
1	KUANTAN SINGINGI	1	6	7	1	6	7	2	12	14
2	INDRAGIRI HULU	4	13	17	2	5	7	6	18	24
3	INDRAGIRI HILIR	7	14	21	2	13	15	9	27	36
4	PELALAWAN	7	22	29	1	5	6	8	27	35
5	SIAK	1	12	13	0	10	10	1	22	23
6	KAMPAR	3	40	43	1	16	17	4	56	60
7	ROKAN HULU	2	18	20	3	9	12	5	27	32
8	BENGKALIS	4	49	53	1	24	25	5	73	78
9	ROKAN HILIR	2	8	10	0	6	6	2	14	16
10	PEKANBARU	48	367	415	18	179	197	66	549	615
11	DUMAI	4	25	29	2	15	17	6	40	46
12	MERANTI	1	10	11	3	6	9	4	16	20
JUMLAH (KAB/KOTA)[b]		116	822	946	60	400	459	176	1.224	1.400
RASIO TERHADAP 100.000 PDDK		1.66	11.79	13.57	0.86	5.74	6.58	2.52	17.56	20.08

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan :
a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;
b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 16

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN									TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			TENAGA PENDIDIK			TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
A	Puskesmas	101	98	199	7	26	33	464	489	953	572	613	1.185
1	KUANTAN SINGINGI	10	14	24	1	0	1	29	22	51	40	36	76
2	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	58	81	139	58	81	139
3	INDRAGIRI HILIR	33	19	52	0	0	0	11	13	24	44	32	76
4	PELALAWAN	4	4	8	6	11	17	19	55	74	29	70	99
5	SIAK	5	8	13	0	0	0	90	46	136	95	54	149
6	KAMPAR	17	20	37	0	15	15	81	36	117	98	71	169
7	ROKAN HULU	11	9	20	0	0	0	0	0	0	11	9	20
8	BENGKALIS	6	4	10	0	0	0	86	30	116	92	34	126
9	ROKAN HILIR	15	20	35	0	0	0	58	101	159	73	121	194
10	PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	19	71	90	19	71	90
11	DUMAI	0	0	0	0	0	0	13	34	47	13	34	47
12	MERANTI												
B	RUMAH SAKIT	330	545	875	2	10	12	1.636	2.152	3.712	1.968	2.707	4.675
1	KUANTAN SINGINGI	5	5	10	0	0		0	63	92	5	68	73
2	INDRAGIRI HULU	9	5	14	0	0	0	56	71	127	65	76	141
3	INDRAGIRI HILIR	11	9	20	2	0	2	128	144	167	141	153	294
4	PELALAWAN	8	15	23	0	0	0	15	36	51	23	51	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	SIAK	7	9	16	0	0	0	156	128	284	163	137	300
6	KAMPAR	9	6	15	0	5	5	93	78	171	102	89	191
7	ROKAN HULU	9	7	16	0	0	0	3	12	15	12	19	31
8	BENGKALIS	23	51	74	0	0	0	288	342	630	311	393	704
9	ROKAN HILIR	6	8	14	0	0	0	48	53	101	54	61	115
10	PEKANBARU	230	421	651	0	5	5	738	1.097	1.835	968	1.523	2.491
11	DUMAI	13	9	22	0	0	0	111	128	239	124	137	261
12	MERANTI												
JUMLAH (KAB/KOTA)[a]		431	643	1.074	9	36	45	2.100	2.641	4.665	2.540	3.320	5.860

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan : a) Tenaga penunjang/pendukung kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 17

CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT JENIS JAMINAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	1.410.040	20
2	PBI APBD	518.840	7
SUB JUMLAH PBI		1.928.880	28
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	1.278.521	18
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	859.477	12
3	Bukan Pekerja (BP)	58.445	1
SUB JUMLAH NON PBI		2.196.443	32
JUMLAH (KAB/KOTA)		4.125.323	59

Sumber: Bidang Yankes - Dinkes Prov. Riau

TABEL 18

PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	DESA		
		JUMLAH	YG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KUANTAN SINGINGI	218	218	100.0
2	INDRAGIRI HULU	194	68	35.1
3	INDRAGIRI HILIR	197	197	100.0
4	PELALAWAN	118	104	88.1
5	SIAK	122	122	100.0
6	KAMPAR	250	250	100.0
7	ROKAN HULU	145	145	100.0
8	BENGKALIS	140	47	33.6
9	ROKAN HILIR	159	159	100.0
10	MERANTI	98	98	100.0
11	PEKANBARU	-	-	0.0
12	DUMAI	-	-	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		1.641	1.408	85.8

Sumber : Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 19

ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
1	*2*	*3*	*4*
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBD KAB/KOTA	Rp 3.557.811.873.471	93.85
	a. Belanja Langsung	Rp 1.984.187.966.238	
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp 1.138.054.970.413	
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 435.568.936.820	
	- DAK fisik	Rp 201.204.626.620	
	1. Reguler	Rp 145.657.016.314	
	2. Penugasan	Rp 55.243.010.306	
	3. Afirmasi	Rp 304.600.000	
	- DAK non fisik	Rp 234.364.310.200	
	1. BOK	Rp 151.573.396.000	
	2. Akreditasi	Rp 19.649.600.200	
	3. Jampersal	Rp 63.141.314.000	
2	APBD PROVINSI	Rp 208.930.379.806	5.51
	a. Belanja Langsung	Rp 172.796.063.409	
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp 34.309.057.397	
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK) : BOK	Rp 1.825.259.000	
3	APBN :	Rp 24.108.276.000	0.64
	a. Dana Dekonsentrasi	Rp 24.108.276.000	
	b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi	Rp 0	
4	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)		0.00
5	SUMBER PEMERINTAH LAIN*		0.00
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN		Rp 3.790.850.529.276	
TOTAL APBD KAB/KOTA		Rp 14.946.220.251.830	
% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA			91.99
ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA		Rp 543.745	

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

TABEL 20

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN								
		LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
		HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Kuantan Singingi	3.352	14	3.366	3.221	13	3.234	6.573	27	6.600
2	Indragiri Hulu	4.872	17	4.889	4.681	16	4.697	9.553	33	9.586
3	Indragiri Hilir	7.210	31	7.241	6.927	30	6.957	14.137	61	14.198
4	Pelalawan	6.197	20	6.216	5.954	19	5.973	12150	39	12.189
5	Siak	6.072	31	6.103	5.834	29	5.863	11.906	60	11.966
6	Kampar	10.120	26	10.146	9.724	25	9.749	19.844	51	19.895
7	Rokan Hulu	8.817	10	8.827	8.472	9	8.481	17.289	19	17.308
8	Bengkalis	5.376	26	5.402	5.308	23	5.331	10.684	49	10.733
9	Rokan Hilir	5.122	17	5.139	6.814	13	6.827	17.060	18	17.078
10	Kep. Meranti	1.704	15	1.720	1.638	15	1.652	3.342	30	3.372
11	Kota Pekanbaru	11.188	27	11.215	11.048	23	11.071	23.231	30	23.261
12	Kota Dumai	4.112	33	4.145	3.917	25	3.942	8.029	58	8.087
JUMLAH (KAB/KOTA)		74.143	266	74.409	73.536	241	73.777	141.648	475	154.273
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)			3.6			3.3			3.1	

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

TABEL 21

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KELOMPOK UMUR, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU															
			JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU			
			< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Kuantan Singingi	6.664	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	3	9	0	7	3	10
2	Indragiri Hulu	9.580	1	0	1	2	0	3	0	3	0	4	2	6	1	7	3	11
3	Indragiri Hilir	14.270	0	1	2	3	0	2	1	3	1	0	0	1	1	3	3	7
4	Pelalawan	11.797	0	1	1	2	0	4	0	4	0	1	3	4	0	6	4	10
5	Siak	11.828	0	1	2	3	0	1	2	3	0	3	3	6	0	5	7	12
6	Kampar	19.800	0	2	0	2	0	1	5	6	0	1	2	3	0	4	7	11
7	Rokan Hulu	16.977	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	5	6	0	1	6	7
8	Bengkalis	12.800	0	1	3	4	0	1	2	3	0	5	2	7	0	7	7	14
9	Rokan Hilir	16.987	2	1	2	5	0	4	3	7	1	0	0	1	3	5	5	13
10	Kep. Meranti	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	6	1	7
11	Kota Pekanbaru	23.160	0	5	1	6	0	0	1	1	0	3	3	6	0	8	5	13
12	Kota Dumai	7.115	0	3	0	3	0	1	3	4	0	0	3	3	0	4	6	10
JUMLAH (KAB/KOTA)		154.379	3	16	13	32	0	17	17	34	2	30	27	59	5	63	57	125
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)																		81

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

- Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas
- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

125

7

TABEL 22

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	PENYEBAB KEMATIAN IBU					
			PERDARAHAN	HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN	INFEKSI	GANGGUAN SISTEM PEREDARAN DARAH *	GANGGUAN METABOLIK**	LAIN-LAIN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Kuantan Singingi	10	4	4	0	2	0	0
2	Indragiri Hulu	11	3	4	0	0	1	3
3	Indragiri Hilir	7	4	0	0	0	0	3
4	Pelalawan	10	2	2	0	0	0	6
5	Siak	12	3	2	2	3	0	2
6	Kampar	11	3	3	0	0	0	5
7	Rokan Hulu	7	3	2	0	0	1	1
8	Bengkalis	14	4	6	0	1	0	3
9	Rokan Hilir	13	5	4	0	0	0	4
10	Kep. Meranti	7	4	0	0	0	1	2
11	Kota Pekanbaru	13	3	0	0	0	0	10
12	Kota Dumai	10	3	5	0	2	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		125	41	32	2	8	3	39

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes

TABEL 23

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	IBU HAMIL					IBU BERSALIN/NIFAS											
		JUMLAH	K1		K4		JUMLAH	PERSALINAN DITOLONG NAKES		PERSALINAN DI FASYANKES		KF1		KF2		KF3		IBU NIFAS MENDAPAT VIT A
			JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Kuantan Singingi	7.230	6.325	87.5	5.860	81.1	6.902	5.514	79.9	4.884	70.8	5.647	81.8	5.613	81.3	5.489	79.5	1.702	24.7
2	Indragiri Hulu	10.508	9.449	89.9	8.813	83.9	10.031	8.499	84.7	7.670	76.5	8.556	85.3	8.545	85.2	8.468	84.4	8.435	84.1
3	Indragiri Hilir	15.551	12.762	82.1	11.931	76.7	14.844	10.901	73.4	6.930	46.7	11.477	77.3	10.984	74.0	10.075	67.9	11.546	77.8
4	Pelalawan	13.372	12.037	90.0	11.299	84.5	12.764	10.653	83.5	9.131	71.5	10.808	84.7	10.756	84.3	10.559	82.7	10.841	84.9
5	Siak	13.097	9.858	75.3	9.156	69.9	12.501	8.812	70.5	8.357	66.9	8.793	70.3	8.779	70.2	8.647	69.2	8.767	70.1
6	Kampar	21.828	17.585	80.6	16.697	76.5	20.836	16.703	80.2	15.915	76.4	17.039	81.8	17.005	81.6	16.713	80.2	136.248	653.9
7	Rokan Hulu	19.018	15.561	81.8	14.094	74.1	18.153	14.723	81.1	14.602	80.4	14.723	81.1	14.723	81.1	14.723	81.1	14.723	81.1
8	Bengkalis	13.953	12.257	87.8	11.528	82.6	13.319	10.631	79.8	10.104	75.9	10.712	80.4	10.713	80.4	10.681	80.2	10.715	80.4
9	Rokan Hilir	18.773	15.733	83.8	14.503	77.3	17.919	14.149	79.0	12.201	68.1	14.122	78.8	13.598	75.9	12.127	67.7	14.019	78.2
10	Kep. Meranti	3.676	3.683	100.2	3.501	95.2	3.509	3.155	89.9	2.905	82.8	3.198	91.1	2.849	81.2	2.851	81.2	3.198	91.1
11	Kota Pekanbaru	25.554	24.575	96.2	23.670	92.6	24.393	22.238	91.2	22.235	91.2	22.233	91.1	21.909	89.8	20.556	84.3	22.233	91.1
12	Kota Dumai	7.806	8.769	112.3	8.552	109.6	7.451	8.291	111.3	8.273	111.0	8.289	111.2	8.161	109.5	7.995	107.3	8.289	111.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		170.366	148.594	87.2	139.604	81.9	162.622	134.269	82.6	123.207	75.8	135.597	83.4	133.635	82.2	128.884	79.3	250.716	154.2

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 24

CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH IBU HAMIL	IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	KUANTAN SINGINGI	7.330	21	0.3	26	0.4	104	1.4	301	4.1	869	11.9	1.300	17.7
2	INDRAGIRI HULU	10.538	62	0.6	113	1.1	276	2.6	580	5.5	472	4.5	1.441	13.7
3	INDRAGIRI HILIR	15.697	737	4.7	993	6.3	941	6.0	895	5.7	646	4.1	3.475	22.1
4	PELALAWAN	12.977	868	6.7	1.190	9.2	1.825	14.1	1.668	12.9	1.624	12.5	6.307	48.6
5	SIAK	13.011	920	7.1	973	7.5	1.175	9.0	989	7.6	1.025	7.9	4.162	32.0
6	KAMPAR	21.780	1.390	6.4	1.393	6.4	2.356	10.8	2.088	9.6	2.307	10.6	8.144	37.4
7	ROKAN HULU	18.136	1.223	1.2	1.465	1.2	1.808	1.2	1.471	1.4	1.410	1.5	961	5.3
8	BENGKALIS	14.080	172	1.2	218	1.5	695	4.9	1.126	8.0	1.471	10.4	3.510	24.9
9	ROKAN HILIR	18.686	942	5.0	1.264	6.8	2.016	10.8	2.037	10.9	1.590	8.5	6.907	37.0
10	MERANTI	3.741	0	0.0	6	0.2	278	7.4	368	9.8	1.234	33.0	1.886	50.4
11	PEKANBARU	25.476	665	2.6	831	3.3	1.135	4.5	907	3.6	1.313	5.2	4.186	16.4
12	DUMAI	8.832	296	10.0	388	14.6	779	21.4	791	22.3	894	31.6	7.944	89.9
JUMLAH (KAB/KOTA)		170.284	7.296	4.3	8.860	5.2	13.388	7.9	13.221	7.8	14.855	8.7	50.223	29.5

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 25

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN)	IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	KUANTAN SINGINGI	62.563	55	0.1	92	0.1	184	0.3	111	0.2	312	0.5
2	INDRAGIRI HULU	90.090	18	0.0	18	0.0	88	0.1	189	0.2	13	0.0
3	INDRAGIRI HILIR	151.140	686	0.5	425	0.3	808	0.5	647	0.4	180	0.1
4	PELALAWAN	102.440	509	0.5	544	0.5	862	0.8	800	0.8	787	0.8
5	SIAK	101.706	403	0.4	471	0.5	376	0.4	179	0.2	106	0.1
6	KAMPAR	175.551	508	0.3	287	0.2	737	0.4	502	0.3	570	0.3
7	ROKAN HULU	163.983	265	0.2	180	0.1	361	0.3	229	0.1	106	0.1
8	BENGKALIS	114.533	144	0.1	179	0.2	385	0.3	302	0.3	489	0.4
9	ROKAN HILIR	140.976	169	0.1	226	0.2	386	0.3	284	0.2	185	0.1
10	MERANTI	35.036	16	0.0	5	0.0	290	0.8	56	0.2	257	0.7
11	PEKANBARU	257.125	132	0.1	99	0.0	215	0.1	179	0.1	115	0.0
12	DUMAI	77.635	155	0.8	22	0.6	169	1.2	89	1.0	82	1.3
JUMLAH (KAB/KOTA)		2.861.708	3.060	0.1	2.548	0.1	4.861	0.2	3.567	0.1	3.202	0.1

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 26

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL)
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH WUS (15-39 TAHUN)	IMUNISASI Td PADA WUS									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	KUANTAN SINGINGI	62.563	76	0.1	118	0.2	288	0.5	412	0.7	1.181	1.9
2	INDRAGIRI HULU	90.090	80	0.1	131	0.1	364	0.4	769	0.9	485	0.5
3	INDRAGIRI HILIR	151.140	1.423	0.9	1.418	0.9	1.749	1.2	1.542	1.0	826	0.5
4	PELALAWAN	102.440	1.377	1.3	1.734	1.7	2.687	2.6	2.468	2.4	2.411	2.4
5	SIAK	101.706	1.323	1.3	1.444	1.4	1.551	1.5	1.168	1.1	1.131	1.1
6	KAMPAR	175.551	1.898	1.1	1.680	1.0	3.093	1.8	2.590	1.5	2.877	1.6
7	ROKAN HULU	163.983	1.488	1.2	1.645	1.2	2.169	1.6	1.700	1.3	1.516	1.1
8	BENGKALIS	114.533	316	0.3	397	0.3	1.080	0.9	1.428	1.2	1.960	1.7
9	ROKAN HILIR	140.976	1.111	0.8	1.490	1.1	2.402	1.7	2.321	1.6	1.775	1.3
10	MERANTI	35.036	16	0.0	11	0.0	568	1.6	424	1.2	1.491	4.3
11	PEKANBARU	257.125	797	0.3	930	0.4	1.350	0.5	1.086	0.4	1.428	0.6
12	DUMAI	86.467	451	1.6	410	1.6	948	2.7	880	2.6	976	3.5
PROVINSI		1.481.610	10.356	0.7	11.408	0.8	18.249	1.2	16.788	1.1	18.057	1.2

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 27

JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	TTD (90 TABLET)	
			JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kuantan Singingi	7.230	3.457	47.8
2	Indragiri Hulu	10.508	8.599	81.8
3	Indragiri Hilir	15.551	11.420	73.4
4	Pelalawan	13.372	10.139	75.8
5	Siak	13.097	8.882	67.8
6	Kampar	21.828	7.127	32.7
7	Rokan Hulu	19.018	1.189	6.3
8	Bengkalis	13.953	11.528	82.6
9	Rokan Hilir	18.773	13.152	70.1
10	Kep. Meranti	3.676	3.556	96.7
11	Kota Pekanbaru	25.554	23.478	91.9
12	Kota Dumai	7.806	8.438	108.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		170.366	110.965	65.1

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 28

PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	PESERTA KB AKTIF															
			KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	IMPLAN	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	KUANTAN SINGINGI	55.644	812	2.6	16384	51.5	5326	16.7	4484	14.1	244	0.8	421	1.3	4149	13.0	31.820	57.2
2	INDRAGIRI HULU	75.104	1.875	4.1	24629	53.8	11196	24.5	2578	5.6	87	0.2	300	0.7	5094	11.1	45.759	60.9
3	INDRAGIRI HILIR	125.902	1.574	2.0	49103	62.5	26383	33.6	264	0.3	19	0.0	114	0.1	1134	1.4	78.591	62.4
4	PELALAWAN	82.216	4.726	7.5	27.188	43.2	18.829	29.9	5676	9.0	46	0.1	380	0.6	6154	9.8	62.999	76.6
5	SIAK	83.299	2.062	3.7	34862	63.0	12336	22.3	1284	2.3	21	0.0	1063	1.9	3712	6.7	55.340	66.4
6	KAMPAR	148.090	3.299	3.3	62951	62.5	22817	22.7	1932	1.9	0	0.0	1471	1.5	8260	8.2	100.730	68.0
7	ROKAN HULU	104.845	5.300	7.8	31.165	45.6	19.625	28.7	2099	3.1	22	0.0	1798	2.6	8367	12.2	68.376	65.2
8	BENGKALIS	97.411	2.047	3.2	43129	67.5	13762	21.5	973	1.5	114	0.2	895	1.4	3017	4.7	63.937	65.6
9	ROKAN HILIR	121.464	3.220	7.8	23.860	57.6	12.204	29.4	125	0.3	6	0.0	298	0.7	1.731	4.2	41.444	34.1
10	MERANTI	31.538	794	3.5	15076	66.0	4508	19.7	558	2.4	109	0.5	227	1.0	1569	6.9	22.841	72.4
11	PEKANBARU	194.371	8.275	6.6	61.160	48.6	29.782	23.7	12.523	10.0	362	0.3	2382	1.9	11335	9.0	125.819	64.7
12	DUMAI	52.498	3.221	6.4	21747	43.2	21253	42.2	2088	4.1	13	0.0	10	0.0	2022	4.0	50.354	95.9
JUMLAH (KAB/KOTA)		1.172.382	37.205	5.0	411.254	55.0	198.021	26.5	34.584	4.6	1.043	0.1	9.359	1.3	56.544	7.6	748.010	63.8

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

TABEL 29

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KAUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU BERSALIN	PESERTA KB PASCA PERSALINAN															
			KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	IM PLAN	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	KUANTAN SINGINGI	6.902	25	3.5	415	58.1	119	16.7	83	11.6	0	0.0	14	2.0	58	8.1	714	10.3
2	INDRAGIRI HULU	10.031	73	1.5	3405	71.7	905	19.0	66	1.4	0	0.0	16	0.3	287	6.0	4.752	47.4
3	INDRAGIRI HILIR	14.844	154	1.5	6679	65.7	3170	31.2	39	0.4	2	0.0	2	0.0	119	1.2	10.165	68.5
4	PELALAWAN	12.764	157	18.1	347	40.0	241	27.8	54	6.2	4	0.5	2	0.2	62	7.2	867	6.8
5	SIAK	12.501	253	8.2	1758	57.0	903	29.3	39	1.3	0	0.0	53	1.7	79	2.6	3.085	24.7
6	KAMPAR	18.351	15	2.4	454	71.3	126	19.8	9	1.4	0	0.0	11	1.7	22	3.5	637	3.5
7	ROKAN HULU	17.682	434	5.0	4654	53.7	3280	37.8	77	0.9	2	0.0	84	1.0	141	1.6	8.672	49.0
8	BENGKALIS	13.319	76	2.4	1911	61.5	622	20.0	114	3.7	0	0.0	107	3.4	277	8.9	3.107	23.3
9	ROKAN HILIR	17.919	508	13.5	1944	51.5	974	25.8	16	0.4	9	0.2	33	0.9	290	7.7	3.774	21.1
10	MERANTI	3.509	149	3.0	3637	73.4	460	9.3	113	2.3	0	0.0	140	2.8	453	9.1	4.952	141.1
11	PEKANBARU	24.393	392	8.2	2699	56.8	910	19.1	298	6.3	1	0.0	60	1.3	394	8.3	4.754	19.5
12	DUMAI	7.451	620	0.0	3210	0.0	1948	0.0	142	0.0	0	0.0	9	0.0	255	0.0	6.184	83.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		159.666	2.856	7.6	31.113	82.5	3.406	9.0	86	0.2	2	0.0	95	0.3	163	0.4	37.721	23.6

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 30

JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN		JUMLAH LAHIR HIDUP			PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI			PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL					
												L		P		L + P	
				S	%	L	P	L + P	L	P	L + P	S	%	S	%	S	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	KUANTAN SINGINGI	7.230	1.446	870	60.2	0	0	6.573	0	0	990		0.0		0.0	361	36.5
2	INDRAGIRI HULU	10.508	2.102	592	28.2	0	0	9.553	0	0	1.497		0.0		0.0	220	14.7
3	INDRAGIRI HILIR	15.551	3.110	505	16.2	0	0	14.137	0	0	2.087		0.0		0.0	1.163	55.7
4	PELALAWAN	13.372	2.674	1.602	59.9	0	0	12150	0	0	1.823		0.0		0.0	1.059	58.1
5	SIAK	13.097	2.619	1.910	72.9	0	0	11.906	0	0	1.415		0.0		0.0	838	59.2
6	KAMPAR	21.828	4.366	1.650	37.8	0	0	19.844	0	0	2.566		0.0		0.0	366	14.3
7	ROKAN HULU	19.018	3.804	3.035	79.8	0	0	17.289	0	0	2.448		0.0		0.0	382	15.6
8	BENGKALIS	13.953	2.791	1.971	70.6	0	0	12.685	0	0	1.840		0.0		0.0	585	31.8
9	ROKAN HILIR	18.773	3.755	1.832	48.8	0	0	17.060	0	0	2.462		0.0		0.0	367	14.9
10	MERANTI	3.676	735	461	62.7	0	0	3.342	0	0	604		0.0		0.0	207	34.3
11	PEKANBARU	25.554	5.111	1.773	34.7	0	0	23.231	0	0	3.618		0.0		0.0	828	22.9
12	DUMAI	7.806	1.561	1.686	108.0	0	0	7.096	0	0	1.204		0.0		0.0	1.196	99.3
JUMLAH (KAB/KOTA)		170.366	34.073	17.887	52.5	0	0	142.716	0	0	22.554	0	0.0	0	0.0	7.572	33.6

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 31

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEMATIAN											
		LAKI - LAKI				PEREMPUAN				LAKI - LAKI + PEREMPUAN			
		NEONATAL	BALITA			NEONATAL	BALITA			NEONATAL	BALITA		
			BAYI[a]	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL		BAYI[a]	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL		BAYI[a]	ANAK BALITA	BALITA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kuantan Singingi	18	26	3	29	18	24	3	27	36	50	6	56
2	Indragiri Hulu	18	20	1	21	17	19	1	20	35	39	2	41
3	Indragiri Hilir	10	12	2	14	9	12	1	13	19	24	3	27
4	Pelalawan	13	13	1	14	12	13	0	13	25	26	1	27
5	Siak	29	40	5	45	27	38	5	43	56	78	10	88
6	Kampar	16	17	2	18	16	16	1	18	32	33	3	36
7	Rokan Hulu	5	10	0	10	4	9	0	9	9	19	0	19
8	Bengkalis	20	23	1	24	20	22	1	23	40	45	2	47
9	Rokan Hilir	12	20	2	22	11	20	1	21	23	40	3	43
10	Kep. Meranti	13	15	1	16	13	15	1	16	26	30	2	32
11	Kota Pekanbaru	26	29	1	29	25	27	0	28	50	56	1	57
12	Kota Dumai	19	30	8	38	18	28	8	36	37	58	16	74
JUMLAH (KAB/KOTA)		198	255	25	280	190	243	24	267	388	498	49	547
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)										3.0	3.9	0.4	4.3

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

- a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

TABEL 32

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)						PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN)							PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN)						
		BBLR	ASFIKSIA	TETANUS NEONATORUM	SEPSIS	KELAINAN BAWAAN	LAIN-LAIN	PNEUMONIA	DIARE	SALURAN CERNA	TETANUS	KELAINAN SARAF	MALARIA	LAIN-LAIN	DAIRE	PNEUMONIA	MALARIA	CAMPAK	DEMAM	DIFTERI	LAIN-LAIN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
1	KUANTAN SINGINGI	14	7	0	0	5	11	1	1	3	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	5
2	INDRAGIRI HULU	15	7	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1
3	INDRAGIRI HILIR	19	4	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2
4	PELALAWAN	12	8	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	SIAK	7	17	0	2	13	14	2	1	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	10
6	KAMPAR	7	5	0	0	5	16	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
7	ROKAN HULU	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
8	BENGKALIS	23	7	1	2	1	6	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2
9	ROKAN HILIR	16	4	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3
10	MERANTI	9	7	0	0	6	4	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
11	PEKANBARU	8	9	0	0	2	31	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1
12	DUMAI	5	13	0	0	4	15	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	15
JUMLAH (KAB/KOTA)		140	92	1	5	39	126	7	6	4	0	0	0	91	4	1	0	0	1	0	42

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 33

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI BARU LAHIR DITIMBANG						BBLR					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	KUANTAN SINGINGI	3.352	3.221	6.573	2.952	88	2.803	87.0	5.755	87.6	66	2.24	47	1.7	98	1.7
2	INDRAGIRI HULU	4.872	4.681	9.553	4.384	90	4.163	88.9	8.547	89.5	34	0.78	39	0.9	73	0.9
3	INDRAGIRI HILIR	7.210	6.927	14.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PELALAWAN	6.197	5.954	12150	5.523	89	5.287	88.8	10.810	89.0	61	1.10	45	0.9	106	1.0
5	SIAK	6.072	5.834	11.906	4.332	71	4.363	74.8	8.695	73.0	112	2.59	116	2.7	228	2.6
6	KAMPAR	10.120	9.724	19.844	8.442	83	8.212	84.5	16.654	83.9	90	1.07	79	1.0	169	1.0
7	ROKAN HULU	8.817	8.472	17.289	7.024	80	7.669	90.5	14.693	85.0	44	0.63	39	0.5	83	0.6
8	BENGKALIS	6.469	6.216	12.685	5.375	83	5.305	85.3	10.680	84.2	47	0.87	33	0.6	80	0.7
9	ROKAN HILIR	8.701	8.359	17.060	7.900	91	7.590	90.8	15.490	81.6	73	0.92	70	0.9	143	0.9
10	Kep. MERANTI	1.704	1.638	3.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PEKANBARU	11.848	11.383	23.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DUMAI	3.619	3.477	7.096	4.001	111	3.928	113.0	7.929	111.7	79	1.97	72	1.8	151	1.9
JUMLAH (KAB/KOTA)		78.982	75.884	154.866	49.933	63	49.320	65.0	99.253	64.1	606	1.21	540	1.1	1.131	1.1

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 34

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH LAHIR HIDUP			KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1)						KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Kuantan Singingi	3.352	3.221	6.573	2.964	88.4	2.652	82.3	5.616	85.4	2.816	84.0	2.705	84.0	5.521	84.0
2	Indragiri Hulu	4.872	4.681	9.553	4.394	90.2	4.123	88.1	8.517	89.2	4.321	88.7	4.151	88.7	8.472	88.7
3	Indragiri Hilir	7.210	6.927	14.137	6.071	84.2	5.539	80.0	11.610	82.1	5.649	78.4	5.428	78.4	11.077	78.4
4	Pelalawan	6.197	5.954	12150	5.578	90.0	5.202	87.4	10.780	88.7	5.389	87.0	5.177	87.0	10.566	87.0
5	Siak	6.072	5.834	11.906	4.544	74.8	4.151	71.1	8.695	73.0	4.336	71.4	4.165	71.4	8.501	71.4
6	Kampar	10.120	9.724	19.844	8.541	84.4	8.069	83.0	16.610	83.7	8.213	81.1	7.890	81.1	16.103	81.1
7	Rokan Hulu	8.817	8.472	17.289	8.040	91.2	7.706	91.0	15.746	91.1	7.938	90.0	7.626	90.0	15.564	90.0
8	Bengkalis	6.469	6.216	12.685	5.482	84.7	5.198	83.6	10.680	84.2	5.414	83.7	5.201	83.7	10.615	83.7
9	Rokan Hilir	8.701	8.359	17.060	6.573	75.5	6.138	73.4	12.711	74.5	5.789	66.5	5.562	66.5	11.350	66.5
10	Kep. Meranti	1.704	1.638	3.342	1.691	99.2	1.507	92.0	3.198	95.7	1.631	95.7	1.567	95.7	3.198	95.7
11	Kota Pekanbaru	11.848	11.383	23.231	11.373	96.0	10.848	95.3	22.221	95.7	10.345	87.3	9.939	87.3	20.284	87.3
12	Kota Dumai	3.619	3.477	7.096	4.074	112.6	3.855	110.9	7.929	111.7	4.129	114.1	3.671	105.6	7.900	111.3
JUMLAH (KAB/KOTA)		78.982	75.884	142.716	69.325	87.8	64.988	48.4	134.313	94.1	65.967	51.1	63.084	48.8	129.151	90.5

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 35

BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA < 6 BULAN		
		JUMLAH	MENDAPAT IMD		JUMLAH	DIBERI ASI EKSKLUSIF	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kuantan Singingi	6.301	3.606	57.2	5.783	3.906	67.5
2	Indragiri Hulu	9.335	5.531	59.3	5.353	4.076	76.1
3	Indragiri Hilir	13.192	10.333	78.3	6.799	6.856	100.8
4	Pelalawan	12.111	6.322	52.2	8.602	6.120	71.1
5	Siak	11.310	6.810	60.2	5.962	4.800	80.5
6	Kampar	19.309	18.885	97.8	11.518	12.264	106.5
7	Rokan Hulu	16.779	10.211	60.9	10.441	8.455	81.0
8	Bengkalis	12.160	7.149	58.8	7.105	5.788	81.5
9	Rokan Hilir	16.607	8.140	49.0	16.336	5.676	34.7
10	Kep. Meranti	3.080	2.572	83.5	2.218	1.326	59.8
11	Kota Pekanbaru	24.123	14.228	59.0	16.841	12.325	73.2
12	Kota Dumai	7.174	7.311	101.9	4.969	4.661	93.8
JUMLAH (KAB/KOTA)		151.481	101.098	66.7	101.927	76.253	74.8

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini

TABEL 36

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH BAYI			PELAYANAN KESEHATAN BAYI					
					L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	KUANTAN SINGINGI	3.251	3.050	6.301	2.995	92.1	2.878	94.4	5.873	93.2
2	INDRAGIRI HULU	4.772	4.563	9.335	4.468	93.6	4.293	94.1	8.761	93.9
3	INDRAGIRI HILIR	6.772	6.420	13.192	4.724	69.8	4.538	70.7	9.262	70.2
4	PELALAWAN	6.047	6.064	12.111	6.080	100.5	5.842	96.3	11.922	98.4
5	SIAK	5.666	5644	11.310	4.266	75.3	4.098	72.6	8.364	74.0
6	KAMPAR	9.907	9.402	19.309	7.560	76.3	7.264	77.3	14.824	76.8
7	ROKAN HULU	8.546	8.233	16.779	8.020	93.8	7.705	93.6	15.725	93.7
8	BENGKALIS	6.151	6.009	12.160	6.114	99.4	5.875	97.8	11.989	98.6
9	ROKAN HILIR	8.508	8.099	16.607	7.098	83.4	6.820	84.2	13.918	83.8
10	PEKANBARU	1.584	1.496	3.080	1.565	98.8	1.504	100.5	3.069	99.6
11	DUMAI	12.479	11.644	24.123	10.870	87.1	10.444	89.7	21.314	88.4
12	MERANTI	3.662	3.512	7.174	4.089	111.7	3.929	111.9	8.018	111.8
JUMLAH (KAB/KOTA)		77.345	68.492	151.481	67.850	87.7	65.189	95.2	133.039	87.8

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 37

CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU

2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN UCI	% DESA/KELURAHAN UCI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KUANTAN SINGINGI	229	98	42.8
2	INDRAGIRI HULU	194	70	36.1
3	INDRAGIRI HILIR	234	97	41.5
4	PELALAWAN	118	110	93.2
5	SIAK	131	103	78.6
6	KAMPAR	250	192	76.8
7	ROKAN HULU	145	101	69.7
8	BENGKALIS	155	149	96.1
9	ROKAN HILIR	198	154	77.8
10	MERANTI	102	76	74.5
11	PEKANBARU	83	72	86.7
12	DUMAI	33	33	100.0
PROVINSI		1.872	1.255	67.0

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 38

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI DIIMUNISASI																	
					HB0												BCG					
					< 24 Jam						1 - 7 Hari											
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	KUANTAN SINGINGI	3.352	3.221	6.573	1.465	43.7	1.407	43.7	2.872	43.7	876	26.14	842	26.1	1.718	26	2.853	85.1	2.445	75.9	5.398	82.1
2	INDRAGIRI HULU	4.872	4.681	9.553	3.250	66.7	3.123	66.7	6.373	66.7	769	15.78	738	15.8	1.507	16	4.142	85.0	3.817	81.5	8.014	83.9
3	INDRAGIRI HILIR	7.210	6.927	14.137	2.223	30.8	2.136	30.8	4.359	30.8	552	7.66	531	7.7	1.083	8	2.920	40.5	2.583	37.3	5.578	39.5
4	PELALAWAN	6.197	5.954	12.156	4.725	76.3	4.540	76.3	9.265	76.2	338	5.45	324	5.4	662	5	5.373	86.7	4.926	82.7	10.379	85.4
5	SIAK	6.072	5.834	11.906	3.527	58.1	3.389	58.1	6.916	58.1	427	7.03	410	7.0	837	7	4.470	73.6	4.220	72.3	8.715	73.2
6	KAMPAR	10.120	9.724	19.844	5.071	50.1	4.873	50.1	9.944	50.1	1.843	18.21	1.771	18.2	3.614	18	7.077	69.9	6.799	69.9	13.876	69.9
7	ROKAN HULU	8.817	8.472	17.289	7.059	80.1	6.783	80.1	13.842	80.1	247	2.81	238	2.8	485	3	7.167	81.3	6.885	81.3	14.052	81.3
8	BENGKALIS	6.469	6.216	12.685	4.308	66.6	4.139	66.6	8.447	66.6	487	7.53	468	7.5	955	8	5.765	89.1	5.539	89.1	11.304	89.1
9	ROKAN HILIR	8.701	8.359	17.066	5.107	58.7	4.906	58.7	10.013	58.7	1.550	17.82	1.490	17.8	3.040	18	6.810	78.3	6.542	78.3	13.352	78.2
10	MERANTI	1.704	1.638	3.342	1.461	85.7	1.404	85.7	2.865	85.7	112	6.55	107	6.6	219	7	1.693	99.3	1.448	88.5	3.201	95.8
11	PEKANBARU	11.848	11.383	23.231	9.532	80.5	9.159	80.5	18.691	80.5	134	1.13	129	1.1	263	1	9.877	83.4	9.268	81.4	19.220	82.7
12	DUMAI	3.619	3.477	7.096	4.106	113.4	3.945	113.4	8.050	113.4	35	0.96	33	1.0	68	1	4.190	115.8	3.877	111.5	8.117	114.4
PROVINSI		78.982	75.884	154.878	51.835	65.6	49.802	65.6	101.637	65.6	7.370	9.33	7.081	9.3	14.451	9	62.335	78.9	58.351	76.9	121.206	78.3

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 39

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH BAYI *(SURVIVING INFANT)*			BAYI DIIMUNISASI																							
					DPT-HB-Hib3						POLIO 4*						CAMPAK/MR						IMUNISASI DASAR LENGKAP					
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
1	KUANTAN SINGINGI	3.251	3.050	6.301	2.671	82.2	2.567	84.2	5.238	83.1	2.643	81.3	2.540	83.3	5.183	82.3	2.515	77	2.416	79	4.931	78.3	1.968	60.5	1.695	55.6	3.663	58.1
2	INDRAGIRI HULU	4.772	4.563	9.335	3.449	72.3	3.314	72.6	6.763	72.4	3.423	71.7	3.288	72.1	6.711	71.9	3.142	66	3.018	66	6.160	66.0	3.025	63.4	2.799	61.3	5.824	62.4
3	INDRAGIRI HILIR	6.772	6.420	13.192	2.737	40.4	2.630	41.0	5.367	40.7	2.752	40.6	2.645	41.2	5.397	40.9	2.579	38	2.478	39	5.057	38.3	2.531	37.4	2.284	35.6	4.815	36.5
4	PELALAWAN	6.047	6.064	12.111	5.332	88.2	5.122	84.5	10.454	86.3	5.336	88.2	5.127	84.5	10.463	86.4	5.499	91	5.284	87	10.783	89.0	5.604	92.7	5.227	86.2	10.831	89.4
5	SIAK	5.666	5644	11.310	4.271	75.4	4.104	72.7	8.375	74.0	4.127	72.8	3.966	70.3	8.093	71.6	4.183	74	4.019	71	8.202	72.5	3.872	68.3	3.671	65.0	7.543	66.7
6	KAMPAR	9.907	9.402	19.309	6.810	68.7	6.542	69.6	13.352	69.1	6.796	68.6	6.530	69.5	13.326	69.0	6.743	68	6.478	69	13.221	68.5	5.950	60.1	5.717	60.8	11.667	60.4
7	ROKAN HULU	8.546	8.233	16.779	7.393	86.5	7.104	86.3	14.497	86.4	7.349	86.0	7.061	85.8	14.410	85.9	7.186	84	6.904	84	14.090	84.0	7.130	83.4	6.850	83.2	13.980	83.3
8	BENGKALIS	6.151	6.009	12.160	5.438	88.4	5.225	87.0	10.663	87.7	5.406	87.9	5.194	86.4	10.600	87.2	5.586	91	5.366	89	10.952	90.1	5.062	82.3	4.863	80.9	9.925	81.6
9	ROKAN HILIR	8.508	8.099	16.607	6.413	75.4	6.161	76.1	12.574	75.7	6.402	75.2	6.150	75.9	12.552	75.6	6.215	73	5.972	74	12.187	73.4	5.967	70.1	5.733	70.8	11.700	70.5
10	KEP.MERANTI	1.584	1.496	3.080	1.649	104.1	1.585	105.9	3.234	105.0	1.649	104.1	1.585	105.9	3.234	105.0	1.571	99	1.509	101	3.080	100.0	1.608	101.5	1.428	95.4	3.036	98.6
11	PEKANBARU	12.479	11.644	24.123	10.175	81.5	9.776	84.0	19.951	82.7	10.129	81.2	9.731	83.6	19.860	82.3	10.205	82	9.805	84	20.010	82.9	10.254	82.2	9.704	83.3	19.958	82.7
12	DUMAI	3.662	3.512	7.174	4.074	111.3	3.915	111.5	7.989	111.4	4.074	111.2	3.914	111.4	7.988	111.3	3.977	109	3.822	109	7.799	108.7	3.964	108.3	3.711	105.7	7.675	107.0
PROVINSI		77.345	68.492	151.481	60.413	78.1	58.044	84.7	118.457	78.2	60.087	77.7	57.730	84.3	117.817	77.8	59.401	77	57.071	83	116.472	76.9	56.935	73.6	53.682	78.4	110.617	73.0

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 40

CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH BADUTA			BADUTA DIIMUNISASI											
					DPT-HB-Hib4						CAMPAK/MR2					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	KUANTAN SINGINGI	3.257	3.129	6.386	1.366	41.9	1.260	40.3	2.626	41.1	1.123	34.5	1.037	33.1	2.160	33.8
2	INDRAGIRI HULU	4.771	4.583	9.354	1.679	35.2	1.430	31.2	3.109	33.2	1.266	26.5	1.078	23.5	2.344	25.1
3	INDRAGIRI HILIR	6.790	6.524	13.314	2.115	31.2	1.596	24.5	3.711	27.9	2.016	29.7	1.520	23.3	3.536	26.6
4	PELALAWAN	5.987	5.752	11.739	4.288	71.6	3.369	58.6	7.657	65.2	4.261	71.2	3.348	58.2	7.609	64.8
5	SIAK	5.730	5.505	11.235	2.650	46.2	2.168	39.4	4.818	42.9	2.246	39.2	1.838	33.4	4.084	36.4
6	KAMPAR	9.819	9.433	19.252	4.499	45.8	2.758	29.2	7.257	37.7	3.922	39.9	2.404	25.5	6.326	32.9
7	ROKAN HULU	8.398	8.069	16.467	5.762	68.6	3.842	47.6	9.604	58.3	5.906	70.3	3.938	48.8	9.844	59.8
8	BENGKALIS	6.257	6.012	12.269	2.768	44.2	1.924	32.0	4.692	38.2	2.066	33.0	1.435	23.9	3.501	28.5
9	ROKAN HILIR	8.426	8.095	16.521	4.229	50.2	2.483	30.7	6.712	40.6	3.936	46.7	2.312	28.6	6.248	37.8
10	MERANTI	1.598	1.536	3.134	1.492	93.3	894	58.2	2.386	76.1	1.307	81.8	783	51.0	2.090	66.7
11	PEKANBARU	12.226	11.747	23.973	7.421	60.7	5.040	42.9	12.461	52.0	6.866	56.2	4.663	39.7	11.529	48.1
12	DUMAI	3.662	3.519	7.181	2.343	64.0	2.202	62.6	4.545	63.3	2.390	65.3	2.247	63.8	4.637	64.6
	PROVINSI	76.921	73.904	150.825	40.611	52.8	28.967	39.2	69.578	46.1	37.305	48.5	26.603	36.0	63.908	42.4

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 41

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	BAYI 6-11 BULAN			ANAK BALITA (12-59 BULAN)			BALITA (6-59 BULAN)		
		JUMLAH BAYI	MENDAPAT VIT A		JUMLAH	MENDAPAT VIT A		JUMLAH	MENDAPAT VIT A	
			S	%		S	%		S	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Kuantan Singingi	7.480	6.827	91.3	25.139	22.215	88.4	32.619	29.042	89.0
2	Indragiri Hulu	9.183	8.299	90.4	34.351	29.450	85.7	43.534	37.749	86.7
3	Indragiri Hilir	15.471	12.174	78.7	51.968	39.985	76.9	67.439	52.159	77.3
4	Pelalawan	12.344	9.735	78.9	52.396	36.352	69.4	64.740	46.087	71.2
5	Siak	9.352	8.035	85.9	36.956	29.513	79.9	46.308	37.548	81.1
6	Kampar	17.630	16.418	93.1	69.575	62.816	90.3	87.205	79.234	90.9
7	Rokan Hulu	16.424	15.244	92.8	81.255	61.874	76.1	97.679	77.118	79.0
8	Bengkalis	11.692	10.266	87.8	55.109	46.063	83.6	66.801	56.329	84.3
9	Rokan Hilir	18.983	15.421	81.2	65.535	49.078	74.9	84.518	64.499	76.3
10	Kep. Meranti	3.325	3.132	94.2	13.549	12.690	93.7	16.874	15.822	93.8
11	Kota Pekanbaru	24.922	21.944	88.1	86.497	74.022	85.6	111.419	95.966	86.1
12	Kota Dumai	8.028	7.370	91.8	33.352	30.897	92.6	41.380	38.267	92.5
JUMLAH (KAB/KOTA)		154.834	134.865	87.1	605.680	494.952	81.7	760.514	629.817	82.8

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.

Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

TABEL 42

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH BALITA			PELAYANAN KESEHATAN BALITA					
					L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	KUANTAN SINGINGI	16.778	16.377	33.155	15.179	90.5	12.420	75.8	27.599	83.2
2	INDRAGIRI HULU	24.124	23.055	47.179	14.211	58.9	13.653	59.2	27.864	59.1
3	INDRAGIRI HILIR	34.921	34.093	69.014	19.482	55.8	10.490	30.8	29.972	43.4
4	PELALAWAN	33.200	31.563	64.763	16.646	50.1	20.346	64.5	36.992	57.1
5	SIAK	23.945	22.350	46.295	18.526	77.4	12.351	55.3	30.877	66.7
6	KAMPAR	44.899	44.211	89.110	23.955	53.4	17.347	39.2	41.302	46.3
7	ROKAN HULU	49.487	48.177	97.664	16.019	32.4	16.019	33.3	32.038	32.8
8	BENGKALIS	39.987	37.412	77.399	23.184	58.0	20.560	55.0	43.744	56.5
9	ROKAN HILIR	39.312	44.641	83.953	19.681	50.1	12.062	27.0	31.743	37.8
10	MERANTI	8.788	8.871	17.658	7.733	88.0	4.541	51.2	12.274	69.5
11	PEKANBARU	56.701	52.367	109.068	36.728	64.8	25.523	48.7	62.251	57.1
12	DUMAI	21.208	20.173	41.381	20.471	96.5	12.547	62.2	33.018	79.8
JUMLAH (KAB/KOTA)		393.350	383.289	776.639	231.816	58.9	177.859	46.40	409.674	52.7

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 43

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	BALITA								
		JUMLAH SASARAN BALITA (S)			DITIMBANG					
					JUMLAH (D)			% (D/S)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Kuantan Singingi	16.778	16.377	33.155	5.726	5.551	11.277	34.1	33.9	34.0
2	Indragiri Hulu	24.124	23.055	47.179	12.452	12.444	24.895	51.6	54.0	52.8
3	Indragiri Hilir	34.921	34.093	69.014	15.081	14.769	29.850	43.2	43.3	43.3
4	Pelalawan	33.200	31.563	64.763	19.902	19.572	39.474	59.9	62.0	61.0
5	Siak	23.945	22.350	46.295	12.332	11.816	24.149	51.5	52.9	52.2
6	Kampar	44.899	44.211	89.110	28.460	28.170	56.630	63.4	63.7	63.6
7	Rokan Hulu	49.487	48.177	97.664	31.724	31.445	63.169	64.1	65.3	64.7
8	Bengkalis	39.987	37.412	77.399	19.629	18.727	38.356	49.1	50.1	49.6
9	Rokan Hilir	39.312	44.641	83.953	12.297	12.138	24.434	31.3	27.2	29.1
10	Kepulauan Meranti	8.788	8.871	17.658	5.919	5.930	11.849	67.4	66.8	67.1
11	Kota Pekanbaru	56.701	52.367	109.068	37.254	35.034	72.287	65.7	66.9	66.3
12	Kota Dumai	21.208	20.173	41.381	18.481	17.576	36.057	87.1	87.1	87.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		393.350	383.289	776.639	219.257	213.171	432.428	55.7	55.6	55.7

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 44

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR	BALITA KURUS (BB/TB)	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	KUANTAN SINGINGI	5.420	464	8.6	5420	650	12.0	5.420	330	6.1
2	INDRAGIRI HULU	5.356	505	9.4	5356	831	15.5	5.356	352	6.6
3	INDRAGIRI HILIR	11.017	1.219	11.1	11017	2.021	18.3	11.017	635	5.8
4	PELALAWAN	16.258	1.056	6.5	16258	1.742	10.7	16.258	1.073	6.6
5	SIAK	3.202	332	10.4	3202	455	14.2	3.202	184	5.7
6	KAMPAR	25.849	2.217	8.6	25849	3.128	12.1	25.849	2.131	8.2
7	ROKAN HULU	8.022	825	10.3	8022	878	10.9	8.022	513	6.4
8	BENGKALIS	16.235	1.510	9.3	16235	1.813	11.2	16.235	1.413	8.7
9	ROKAN HILIR	25.084	1.116	4.4	25084	1.474	5.9	25.084	1.160	4.6
10	KEP. MERANTI	14.301	1.421	9.9	14301	1.745	12.2	14.301	1.172	8.2
11	PEKANBARU	13.863	900	6.5	13863	1.248	9.0	13.863	765	5.5
12	DUMAI	4.673	343	7.3	4673	290	6.2	4.673	107	2.3
JUMLAH (KAB/KOTA)		149.280	11.908	8.0	149.280	16.275	10.9	149.280	9.835	6.6

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 45

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN) PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	PESERTA DIDIK SEKOLAH									SEKOLAH								
		KELAS 1 SD/MI			KELAS 7 SMP/MTS			KELAS 10 SMA/MA			SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	KUANTAN SINGINGI	5.805	4.478	77.1	3.764	2.839	75.4	3.254	2.224	68.3	245	194	79.2	97	56	57.7	32	23	71.9
2	INDRAGIRI HULU	10.281	9.750	94.8	8.030	7.401	92.2	6.772	6.142	90.7	337	332	98.5	99	98	99.0	65	62	95.4
3	INDRAGIRI HILIR	13.475	13.089	97.1	11.701	11.344	96.9	9.867	9.462	95.9	491	463	94.3	271	270	99.6	112	102	91.1
4	PELALAWAN	10.628	8.672	81.6	5.494	4.975	90.6	5.447	4.280	78.6	239	237	99.2	87	87	100.0	60	60	100.0
5	SIAK	10.854	10.504	96.8	7.700	7.579	98.4	3.531	3.493	98.9	247	247	100.0	129	129	100.0	45	45	100.0
6	KAMPAR	17.075	16.798	98.4	14.158	12.595	89.0	10.725	8.836	82.4	247	247	100.0	129	129	100.0	129	125	96.9
7	ROKAN HULU	24.649	15.582	63.2	17.883	9.492	53.1	8.796	6.099	69.3	387	387	100.0	147	140	95.2	90	84	93.3
8	BENGKALIS	15.100	13.764	91.2	9.069	8.814	97.2	9.377	8.552	91.2	380	378	99.5	155	155	100.0	97	97	100.0
9	ROKAN HILIR	9.681	9.120	94.2	7.738	7.229	93.4	5.696	5.077	89.1	441	308	69.8	195	144	73.8	118	71	60.2
10	MERANTI	3.796	3.796	100.0	3.093	3.093	100.0	2.934	2.934	100.0	193	193	100.0	84	84	100.0	48	43	
11	PEKANBARU	23.545	20.262	86.1	3.093	3.093	100.0	2.934	2.934	100.0	325	324	99.7	156	156	100.0	114	113	99.1
12	DUMAI	6.143	5.878	95.7	5.047	4.902	97.1	4.497	4.342	96.6	113	113	100.0	35	35	100.0	51	51	100.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		151.032	131.693	87.2	96.770	83.356	86.1	73.830	64.375	87.2	3.645	3.423	93.9	1.584	1.483	93.6	961	876	91.2

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 46

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT					
		TUMPATAN GIGI TETAP	PENCABUTAN GIGI TETAP	RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN	JUMLAH KASUS GIGI	JUMLAH KASUS DIRUJUK	% KASUS DIRUJUK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	KUANTAN SINGINGI	-	-	-	-	-	-
2	INDRAGIRI HULU	77	989	0.1	8.305	0	0.0
3	INDRAGIRI HILIR	557	3.961	0.1	8.177	122	0.0
4	PELALAWAN	12	1.894	0.0	5.467	348	0.1
5	SIAK	347	1.198	0.3	1.545	130	0.1
6	KAMPAR	368	5.154	0.1	22.767	0	0.0
7	ROKAN HULU	58	2.636	0.0	6.833	130	0.0
8	BENGKALIS	2	6.593	0.0	25.850	53	0.0
9	ROKAN HILIR	204	3.445	0.1	9.749	95	0.01
10	PEKANBARU	4.458	4.475	1.0	1.836	0	0.0
11	DUMAI	6.086	30.349	0.2	90.535	885	0.0
12	MERANTI	31	2.090	0.0	9.176	775	0.1
JUMLAH (KAB/ KOTA)		12.200	62.784	0.2	190.240	2.538	0.0

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
Keterangan: pelayanan kesehatan gigi meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas

TABEL 47

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH																						
		JUMLAH SD/MI	JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL	%	JUMLAH SD/MI MENDAPAT YAN. GIGI	%	JUMLAH MURID SD/MI			MURID SD/MI DIPERIKSA						PERLU PERAWATAN			MENDAPAT PERAWATAN					
							L	P	L + P	L	%	P	%	L + P	%	L	P	L + P	L	%	P	%	L + P	%
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*
1	KUANTAN SINGINGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INDRAGIRI HULU	337	337	100.0	337	100.0	5.363	4.880	10.243	1.151	21.5	1.269	26.0	2.420	23.6	634	769	1.403	470	74.1	543	70.6	1.013	72.2
3	INDRAGIRI HILIR	668	455	68.1	511	76.5	37.849	37.107	74.956	15.037	39.7	14.662	39.5	29.699	39.6	5.607	5.367	10.974	2.086	37.2	2.050	38.2	4.136	37.7
4	PELALAWAN	236	221	93.6	204	86.4	19.955	19.715	39.670	10.354	51.9	8.777	44.5	19.131	48.2	2.572	2.649	5.221	1.475	57.3	1.634	61.7	3.109	59.5
5	SIAK	1.374	1.296	94.3	1.721	125.3	39.154	40.609	79.763	3.580	9.1	3.856	9.5	7.436	9.3	1.067	1.066	2.133	376	35.2	377	35.4	753	35.3
6	KAMPAR	523	398	76.1	378	72.3	43.717	43.987	87.704	14.091	32.2	17.509	39.8	31.600	36.0	10.041	10.784	20.825	5.226	52.0	6.400	59.3	11.626	55.8
7	ROKAN HULU	395	312	79.0	314	79.5	17.558	17.012	34.570	12.066	68.7	11.745	69.0	23.811	68.9	6.322	6.111	12.433	2.000	31.6	2.091	34.2	4.091	32.9
8	BENGKALIS	300	0	0.0	235	78.3	8.951	5.968	14.919	0	0.0	0	0.0	13.764	92.3	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	ROKAN HILIR	434	382	88.0	467	107.6	39.265	36.697	75.962	0	0.0	0	0.0	8.175	47.4	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	MERANTI	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	PEKANBARU	331	288	87.0	330	99.7	40.193	38.105	78.298	14.477	36.0	13.677	35.9	28.154	36.0	6.123	5.534	11.657	2.144	35.0	2.004	36.2	4.148	35.6
12	DUMAI	4.602	3.694	80.3	4.504	97.9	252.014	244.090	496.104	70.768	28.1	71.509	29.3	164.206	33.1	32.384	32.299	64.666	13.798	42.6	15.122	46.8	28.901	44.7
JUMLAH (KAB/ KOTA)		9.200	7.383	80.3	9.001	97.8	504.019	488.170	992.189	141.524	28.1	143.004	29.3	328.396	33.1	64.750	64.579	129.312	27.575	42.6	30.221	46.8	57.777	44.7

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

TABEL 48

PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2018

NO	KABUPATEN	PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN														
		JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR						BERISIKO					
					LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	KUANTAN SINGINGI	107.824	100.587	208.411	13.853	12.8	23.375	23.2	37.228	17.9	3.202	23.1	6.306	27.0	9.508	25.5
2	INDRAGIRI HULU	146.522	138.310	284.832	14.277	9.7	29.150	21.1	32.356	11.4	4.257	29.8	8.623	29.6	12.880	39.8
3	INDRAGIRI HILIR	244.396	232.540	476.936	19.605	8.0	18.836	8.1	38.441	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	PELALAWAN	162.066	150.582	312.648	11.301	7.0	10.857	7.2	22.158	7.1	6.203	54.9	5.959	54.9	12.162	54.9
5	SIAK	160.703	150.125	310.828	83.170	51.8	95.365	63.5	178.535	57.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6	KAMPAR	284.254	267.659	551.913	23.782	8.4	35.673	13.3	59.455	10.8	19.026	80.0	28.538	80.0	47.564	80.0
7	ROKAN HULU	220.858	208.628	429.486	20.134	9.1	34.272	16.4	54.406	12.7	5.150	25.6	9.307	27.2	14.457	26.6
8	BENGKALIS	186.213	176.618	362.831	38.830	20.9	96.784	54.8	135.614	37.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	ROKAN HILIR	160.059	214.080	374.139	90.163	54.9	146.877	53.3	237.040	63.4	13.286	8.1	11.856	8.1	25.141	5.7
12	MERANTI	60.150	57.164	117.314	21.013	34.9	41.474	72.6	62.487	53.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	PEKANBARU	392.312	381.272	773.584	92.879	23.7	112.708	29.6	205.587	26.6	20.219	21.8	19.789	17.6	40.008	19.5
11	DUMAI	101.407	97.022	198.429	62.643	61.8	96.028	99.0	158.671	80.0	11.446	18.3	24.602	25.6	36.048	22.7
JUMLAH (KAB/KOTA)		2.226.764	2.174.587	4.401.351	152.806	6.9	242.905	11.2	1.221.978	27.8	82.788	54.2	114.981	47.3	197.768	16.2

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 49

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	USIA LANJUT (60TAHUN+)								
		JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
		L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	KUANTAN SINGINGI	5.582	5.761	11.343	31	0.6	52	0.9	83	0.7
2	INDRAGIRI HULU	14.254	13.292	27.546	51	0.4	99	0.7	149	0.5
3	INDRAGIRI HILIR	13.018	13.023	26.041	61	0.5	68	0.5	129	0.5
4	PELALAWAN	4.541	4.492	9.033	23	0.5	38	0.8	60	0.7
5	SIAK	9.407	8.776	18.183	79	0.8	94	1.1	173	0.9
6	KAMPAR	12.758	12.743	25.501	6	0.1	12	0.1	18	0.1
7	ROKAN HULU	14.555	13.106	27.661	34	0.2	77	0.6	111	0.4
8	BENGKALIS	12.762	11.049	23.811	30	0.2	74	0.7	104	0.4
9	ROKAN HILIR	2.730	2.679	5.409	46	1.7	52	1.9	98	1.8
10	MERANTI	2.761	5.234	7.995	1.832	66.4	2.645	50.5	4.477	56.0
11	PEKANBARU	30.133	60.668	90.801	1.282	4.3	1.666	2.7	2.948	3.2
12	DUMAI	4.938	4.697	9.635	4.564	92.4	4.394	93.5	8.958	93.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		127.439	155.520	282.959	8.038	6.3	9.270	6.0	17.308	6.1

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 50

PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSKESMAS					
			MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL	MELAKSANAKAN ORIENTASI P4K	MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN REMAJA	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 7 DAN 10	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1, 7, 10
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	KUANTAN SINGINGI	23	10	25	20	18	14	12
2	INDRAGIRI HULU	18	17	18	18	18	18	15
3	INDRAGIRI HILIR	26	28	27	27	26	26	13
4	PELALAWAN	14	9	14	12	10	10	10
5	SIAK	15	0	15	15	15	13	8
6	KAMPAR	31	31	31	17	31	31	29
7	ROKAN HULU	21	21	21	10	21	20	18
8	BENGKALIS	18	18	11	11	18	18	18
9	ROKAN HILIR	19	4	20	7	19	19	17
10	MERANTI	10	10	10	10	10	10	10
11	PEKANBARU	21	20	20	21	21	19	18
12	DUMAI	10	10	10	10	10	10	9
JUMLAH (KAB/KOTA)		226	178	222	178	217	208	177
PERSENTASE			78.8	98.2	78.8	96.0	92.0	78.3

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

catatan: diisi dengan tanda "V"

TABEL 51

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS ,KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK
DAN CASE DETECTION RATE (CDR) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN			JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS					KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN
		SESUAI STANDAR	TIDAK SESUAI STANDAR	SESUAI STANDAR + TIDAK SESUAI STANDAR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Kuantan Singingi	725	0	725	235	67.9	111	32.1	346	11
2	Indragiri Hulu	1.471	118	1.589	208	57.5	154	42.5	362	7
3	Indragiri Hilir	1.920	0	1.920	302	64.5	166	35.5	468	22
4	Pelalawan	2.084	139	2.223	404	61.3	255	38.7	659	121
5	Siak	2.590	0	2.590	308	64.6	169	35.4	477	55
6	Kampar	4.046	294	4.340	423	63.9	239	36.1	662	38
7	Rokan Hulu	2.657	709	3.366	688	65.5	363	34.5	1.051	56
8	Bengkalis	2.562	0	2.562	479	64.9	259	35.1	738	100
9	Rokan Hilir	4.893	46	4.939	745	63.9	420	36.1	1.165	111
10	Kep. Meranti	402	0	402	88	59.1	61	40.9	149	3
11	Kota Pekanbaru	8.402	244	8.646	1.754	60.4	1.149	39.6	2.903	379
12	Kota Dumai	2.852	0	2.852	468	67.0	230	33.0	698	117
JUMLAH (KAB/KOTA)		34.604	1.550	36.154	6.102	63.1	3.576	36.9	9.678	1.020
JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS		99.463								
PERSENTASE ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR						34.8				
CNR SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK									134	
PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT) BERDASARKAN MODELING TAHUN									27.602	
CASE DETECTION RATE (%)									35.1	
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)										30.8

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

TABEL 52

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG TERDAFTAR DAN DIOBATI*)			JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS TERDAFTAR DAN DIOBATI*)			ANGKA KESEMBUHAN *(CURE RATE)* TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS						ANGKA PENGOBATAN LENGKAP *(COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS*						ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKUKLOSIS						JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS	
								LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN			
		L	P	L + P	L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	Kuantan Singingi	181	90	271	284	140	424	114	63.0	61	67.8	175	64.6	48	16.9	22	15.7	70	16.5	162	57.0	83	59.3	245	57.8	25	5.9
2	Indragiri Hulu	140	88	228	258	142	400	83	59.3	51	58.0	134	58.8	87	33.7	42	29.6	129	32.3	170	65.9	93	65.5	263	65.8	16	4.0
3	Indragiri Hilir	271	180	451	420	291	711	63	23.2	53	29.4	116	25.7	77	18.3	48	16.5	125	17.6	140	33.3	101	34.7	241	33.9	12	1.7
4	Pelalawan	204	92	296	494	281	775	116	56.9	54	58.7	170	57.4	264	53.4	168	59.8	432	55.7	380	76.9	222	79.0	602	77.7	10	1.3
5	Siak	199	99	298	322	168	490	150	75.4	81	81.8	231	77.5	114	35.4	63	37.5	177	36.1	264	82.0	144	85.7	408	83.3	13	2.7
6	Kampar	333	144	477	696	384	1.080	207	62.2	70	48.6	277	58.1	240	34.5	156	40.6	396	36.7	447	64.2	226	58.9	673	62.3	8	0.7
7	Rokan Hulu	528	251	779	650	328	978	297	56.3	140	55.8	437	56.1	293	45.1	153	46.6	446	45.6	590	90.8	293	89.3	883	90.3	15	1.5
8	Bengkalis	293	137	430	434	215	649	192	65.5	95	69.3	287	66.7	188	43.3	98	45.6	286	44.1	380	87.6	193	89.8	573	88.3	10	1.5
9	Rokan Hilir	361	180	541	677	416	1.093	211	58.4	96	53.3	307	56.7	416	61.4	284	68.3	700	64.0	627	92.6	380	91.3	1007	92.1	37	3.4
10	Kep. Meranti	95	43	138	179	102	281	30	31.6	16	37.2	46	33.3	105	58.7	75	73.5	180	64.1	135	75.4	91	89.2	226	80.4	24	8.5
11	Kota Pekanbaru	967	528	1.495	2.321	1.553	3.874	464	48.0	247	46.8	711	47.6	1.149	49.5	786	50.6	1.935	49.9	1613	69.5	1033	66.5	2646	68.3	37	1.0
12	Kota Dumai	215	95	310	400	189	589	179	83.3	79	83.2	258	83.2	184	46.0	100	52.9	284	48.2	363	90.8	179	94.7	542	92.0	18	3.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		3.787	1.927	5.714	7.135	4.209	11.344	2.106	55.6	1.043	54.1	3.149	55.1	3.165	44.4	1.995	47.4	5.160	45.5	5.271	73.9	3.038	72.2	8.309	73.2	225	2.0

Sumber:SITT 10.04

Keterangan:

*) Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

TABEL 53

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH BALITA	BALITA BATUK ATAU KESUKARAN BERNAPAS			PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA	REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA								BATUK BUKAN PNEUMONIA		
			JUMLAH KUNJUNGAN	DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR (DIHITUNG NAPAS / LIHAT TDDK*)	PERSENTASE YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR		PNEUMONIA		PNEUMONIA BERAT		JUMLAH			%			
							L	P	L	P	L	P	L + P		L	P	L + P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Kuantan Singingi	48.362	9.331	4.195	45.0	878	34	26	2	2	36	28	64	7.3	4.607	4.660	9.267
2	Indragiri Hulu	66.641	12.502	11.912	95.3	1.033	13	11	1	0	14	11	25	2.4	6.386	6.324	12.710
3	Indragiri Hilir	38.701	6.224	2.153	34.6	1.683	19	13	1	0	20	13	33	2.0	3.530	3.529	7.059
4	Pelalawan	32.886	10.621	8.791	82.8	1.291	204	146	1	0	205	146	351	27.2	3.492	3.318	6.810
5	Siak	63.050	28.939	27.639	95.5	1.108	607	496	30	17	637	513	1.150	103.8	14.076	13.842	27.918
6	Kampar	57.133	7.523	6.944	92.3	2.122	256	209	15	16	271	225	496	23.4	12.964	13.071	26.035
7	Rokan Hulu	30.881	7.449	4.971	66.7	1.779	59	25	3	4	62	29	91	5.1	3.729	3.629	7.358
8	Bengkalis	41.513	6.779	4.469	65.9	1.525	133	83	9	9	142	92	234	15.3	11.272	11.295	22.567
9	Rokan Hilir	71.450	28.558	17.638	61.8	1.908	42	27	2	14	44	41	85	4.5	10.326	9.734	20.060
10	Kep. Meranti	18.552	7.512	6.144	81.8	495	103	87	7	6	110	93	203	41.0	4.228	4.046	8.274
11	Kota Pekanbaru	111.736	29.146	13.771	47.2	2.983	601	493	4	4	605	497	1.102	36.9	8.667	8.165	16.832
12	Kota Dumai	660.373	9.888	8.794	88.9	825	219	156	0	0	219	156	375	45.5	7.664	7.523	15.187
JUMLAH (KAB/KOTA)		1.241.277	164.472	117.421	71.4	17.632	2.290	1.772	75	72	2.365	1.844	4.209	23.9	90.941	89.136	180.077
Prevalensi pneumonia pada b		2.67%															
Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana Standar minimal 60%					9												
Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60					75.0%												

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas

TABEL 54

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KELOMPOK UMUR	H I V			
		L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	≤ 4 TAHUN	1	4	5	0.9
2	5 - 14 TAHUN	1	2	3	0.6
3	15 - 19 TAHUN	4	3	7	1.3
4	20 - 24 TAHUN	59	18	77	14.4
5	25 - 49 TAHUN	295	102	397	74.5
6	≥ 50 TAHUN	35	9	44	8.3
JUMLAH (KAB/KOTA)		395	138	533	
PROPORSI JENIS KELAMIN		74.1	25.9		
Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV					
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					#DIV/0!

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 55

JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KELOMPOK UMUR	KASUS BARU AIDS				KASUS KUMULATIF AIDS				JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS			
		L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR	L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR	L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	14
1	≤ 1 TAHUN	0	0	0	0.0	1	3	4	0.2	0	1	1	0.2
2	1 - 4 TAHUN	0	1	1	0.9	32	31	63	2.4	1	5	6	1.4
3	5 - 14 TAHUN	0	2	2	1.8	20	17	37	1.4	1	4	5	1.1
4	15 - 19 TAHUN	0	0	0	0.0	9	7	16	0.6	0	1	1	0.2
5	20 - 29 TAHUN	25	6	31	27.4	619	264	883	33.5	93	47	140	31.7
6	30 - 39 TAHUN	38	12	50	44.2	748	278	1026	38.9	142	48	190	43.0
7	40 - 49 TAHUN	9	3	12	10.6	320	97	417	15.8	58	15	73	16.5
8	50 - 59 TAHUN	10	5	15	13.3	120	38	158	6.0	14	6	20	4.5
9	≥ 60 TAHUN	1	1	2	1.8	30	3	33	1.3	5	1	6	1.4
10	TIDAK DIKETAHUI	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		83	30	113		1.899	738	2.637		314	128	442	
PROPORSI JENIS KELAMIN		73.45	26.55	100.00		72.01	27.99			71.04	28.96	100.00	

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru ditemukan yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 56

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TARGET PENEMUAN		DIARE									
					DILAYANI				MENDAPAT ORALIT				MENDAPAT ZINC	
					BALITA		SEMUA UMUR		BALITA		SEMUA UMUR		BALITA	
			BALITA	SEMUA UMUR	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Kuantan Singingi	328.855	32.886	8.879	1.675	5.1	4.626	52.1	1.566	93.5	4.143	89.6	1.606	95.9
2	Indragiri Hulu	441.789	44.179	11.928	2.550	5.8	6.957	58.3	2.461	96.5	6.441	92.6	2.445	95.9
3	Indragiri Hilir	740.590	74.060	19.996	1.411	1.9	6.207	31.0	1.267	89.8	5.280	85.1	1.434	101.6
4	Pelalawan	483.022	48.302	13.042	1.287	2.7	3.641	27.9	1.078	83.8	3.582	98.4	1.566	121.7
5	Siak	489.990	48.999	13.230	2.149	4.4	6.318	47.8	2.149	100.0	6.318	100.0	3.360	156.4
6	Kampar	871.117	87.112	23.520	3.748	4.3	9.133	38.8	3.749	100.0	9.133	100.0	3.749	100.0
7	Rokan Hulu	641.208	64.121	17.313	1.422	2.2	3.418	19.7	1.422	100.0	3.418	100.0	1.407	98.9
8	Bengkalis	645.513	64.551	17.429	3.808	5.9	10.967	62.9	2.963	77.8	8.013	73.1	1.848	48.5
9	Rokan Hilir	714.497	71.456	19.291	2.149	3.0	6.318	32.8	2.149	100.0	6.318	100.0	4.699	218.7
10	Kep. Meranti	185.516	18.552	5.009	1.253	6.8	3.412	68.1	1.209	96.5	3.285	96.3	1.212	96.7
11	Kota Pekanbaru	1.117.361	111.736	30.169	2.546	2.3	8.020	26.6	2.367	93.0	7.659	95.5	2.366	92.9
12	Kota Dumai	308.812	30.883	8.338	4.468	14.5	1.331	16.0	1.295	29.0	1.331	100.0	1.287	28.8
JUMLAH (KAB/KOTA)		6.639.415	696.837	188.143	28.466	4.1	70.348	37.4	23.675	83.2	64.921	92.3	26.979	94.8
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK				270	4.3		10.6		3.6		9.8		0.4	

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita

TABEL 57

KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	KASUS BARU								
		Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Kuantan Singingi	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	Indragiri Hulu	0	0	0	6	1	7	6	1	7
3	Indragiri Hilir	0	0	0	5	7	12	5	7	12
4	Pelalawan	0	0	0	1	1	2	1	1	2
5	Siak	0	0	0	1	1	2	1	1	2
6	Kampar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rokan Hulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bengkalis	0	0	0	5	1	6	5	1	6
9	Rokan Hilir	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10	Kep. Meranti	0	0	0	1	0	1	1	0	1
11	Kota Pekanbaru	1	0	1	1	0	1	2	0	2
12	Kota Dumai	0	0	0	1	0	1	1	0	1
JUMLAH (KAB/KOTA)		1	0	1	23	11	34	24	11	35
PROPORSI JENIS KELAMIN		100.0	0.0		67.6	32.4		68.6	31.4	
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/*NEW CASE DETECTION RATE*) PER 100.000 PENDUDUK								0.7	0.3	0.5

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 58

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN,
PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2 MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	KASUS BARU							
		PENDERITA KUSTA	CACAT TINGKAT 0		CACAT TINGKAT 2		PENDERITA KUSTA ANAK <15 TAHUN		PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Kuantan Singingi	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1
2	Indragiri Hulu	7	11	157.1	0	0.0	2	28.6	0
3	Indragiri Hilir	12	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0
4	Pelalawan	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0
5	Siak	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
6	Kampar	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
7	Rokan Hulu	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
8	Bengkalis	6	5	83.3	0	0.0	0	0.0	0
9	Rokan Hilir	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
10	Kep. Meranti	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0
11	Kota Pekanbaru	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0
12	Kota Dumai	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	
JUMLAH (KAB/KOTA)		35	24	68.6	1	2.9	2	5.7	1
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK					0.01				

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 59

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	KASUS TERDAFTAR								
		Pausi Basiler/Kusta kering			Multi Basiler/Kusta Basah			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Kuantan Singingi	1	0	1	2	1	3	3	1	4
2	Indragiri Hulu	0	0	0	5	0	5	5	0	5
3	Indragiri Hilir	3	1	4	24	20	44	27	21	48
4	Pelalawan	0	0	0	12	14	26	12	14	26
5	Siak	0	0	0	1	1	2	1	1	2
6	Kampar	0	0	0	2	9	11	2	9	11
7	Rokan Hulu	0	0	0	3	0	3	3	0	3
8	Bengkalis	0	0	0	7	6	13	7	6	13
9	Rokan Hilir	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10	Kep. Meranti	0	0	0	4	2	6	4	2	6
11	Kota Pekanbaru	2	0	2	4	8	12	6	8	14
12	Kota Dumai	0	1	1	5	1	6	5	2	7
JUMLAH (KAB/KOTA)		6	2	8	72	62	134	78	64	142
ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK										0.20

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 60

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	KUSTA (PB)									KUSTA (MB)								
		TAHUN -1									TAHUN -2								
		PENDERITA PB[a]			RFT PB						PENDERITA MB[b]			RFT MB					
					L		P		L + P					L		P		L + P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Kuantan Singingi	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	Indragiri Hulu	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	7	25	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Indragiri Hilir	5	2	7	2	40.0	2	100.0	4	57.1	22	24	46	18	81.8	7	29.2	25	54.3
4	Pelalawan	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	2	2	100.0	0	0.0	2	100.0
5	Siak	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	2	2	100.0	0	0.0	2	100.0
6	Kampar	1	0	1	1	100.0	0	0.0	1	100.0	2	0	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	Rokan Hulu	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	Bengkalis	2	0	2	2	100.0	2	0.0	4	200.0	3	0	3	4	133.3	2	0.0	6	200.0
9	Rokan Hilir	1	0	1	1	100.0	0	0.0	1	100.0	10	4	14	3	30.0	1	25.0	4	28.6
10	Kep. Meranti	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	Kota Pekanbaru	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2	4	2	100.0	0	0.0		0.0
12	Kota Dumai	1	2	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		10	4	14	6	60.0	4	100.0	10	71.4	69	37	106	31	44.9	10	27.0	39	36.8

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan :

a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b= Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2016 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

TABEL 61

JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK <15 TAHUN	JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO)
1	*2*	*3*	*4*
1	KUANTAN SINGINGI	91.741	3
2	INDRAGIRI HULU	130.048	9
3	INDRAGIRI HILIR	207.975	4
4	PELALAWAN	152.197	3
5	SIAK	158.887	7
6	KAMPAR	270.861	4
7	ROKAN HULU	225.247	6
8	BENGKALIS	174.776	3
9	ROKAN HILIR	236.663	1
12	MERANTI	51.543	4
10	PEKANBARU	303.109	5
11	DUMAI	92.616	4
JUMLAH (KAB/KOTA)		2.095.663	53
AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN			2.5

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 62

JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH KASUS PD3I																
		DIFTERI				PERTUSIS			TETANUS NEONATORUM				HEPATITIS B			SUSPEK CAMPAK		
		JUMLAH KASUS			MENINGGAL				JUMLAH KASUS			MENINGGAL	JUMLAH KASUS					
		L	P	L+P		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	INDRAGIRI HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	SIAK	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
6	KAMPAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	ROKAN HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BENGKALIS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9	ROKAN HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DUMAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
12	MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
JUMLAH (KAB/KOTA)		0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	89
CASE FATALITY RATE (%)					0							0						
INSIDENS RATE SUSPEK CAMPAK																0.0	0.0	148.3

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 63

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	KLB DI DESA/KELURAHAN		
		JUMLAH	DITANGANI <24 JAM	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KUANTAN SINGINGI	5	5	100
2	INDRAGIRI HULU	0	0	0
3	INDRAGIRI HILIR	0	0	0
4	PELALAWAN	0	0	0
5	SIAK	3	3	100
6	KAMPAR	1	1	100
7	ROKAN HULU	0	0	0
8	BENGKALIS	2	2	100
9	ROKAN HILIR	0	0	0
12	MERANTI	0	0	0
10	PEKANBARU	2	2	100
11	DUMAI	1	1	100
JUMLAH (KAB/KOTA)		14	14	100.0

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Laporan STP KLB Pkm Se Prov Riau

TABEL 64

JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	JENIS KEJADIAN LUAR BIASA	YANG TERSERANG		WAKTU KEJADIAN (TANGGAL)			JUMLAH PENDERITA			KELOMPOK UMUR PENDERITA												JUMLAH KEMATIAN			JUMLAH PENDUDUK TERANCAM			*ATTACK RATE (%)*			CFR (%)		
		JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	DIKETAHUI	DITANGGULANGI	AKHIR	L	P	L+P	0-7 HARI	8-28 HARI	1-11 BLN	1-4 THN	5-9 THN	10-14 THN	15-19 THN	20-44 THN	45-54 THN	55-59 THN	60-69 THN	70+ THN	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*
1	Keracunan Pangan	1	1	19/01/2019	19/01/2019	19/01/2019	2	4	6	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	4	6	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
2	Keracunan Pangan	1	1	14/03/2019	14/03/2019	16/03/2019	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	6	21	100.0	0.0	71.4	0.0	#DIV/0!	0.0
3	Keracunan Pangan	1	1	03/06/2019	01/06/2019	02/06/2019	3	2	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	5	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
4	Keracunan Pangan	1	1	16/06/2019	16/06/2019	17/06/2019	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	20	32	52	5.0	9.4	7.7	0.0	0.0	0.0
5	Keracunan Pangan	1	1	01/07/2019	01/07/2019	03/07/2019	20	21	41	0	0	0	0	0	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	50	49	99	40.0	42.9	41.4	0.0	0.0	0.0
6	Keracunan Pangan	1	1	02/10/2019	02/10/2019	04/10/2019	0	12	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	#DIV/0!	100.0	100.0	#DIV/0!	0.0	0.0
7	Keracunan Pangan	1	1	18/08/2019	18/08/2019	20/08/2019	0	4	4	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	27	31	58	0.0	12.9	6.9	#DIV/0!	0.0	0.0
8	Keracunan Pangan	1	1	27/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	23	34	57	0	0	0	0	30	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	99	301	11.4	34.3	18.9	0.0	0.0	0.0
9	DBD	1	1	35/08/2019	02/08/2019	20/08/2019	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50	65	115	0.0	3.1	1.7	#DIV/0!	50.0	50.0
10	DBD	1	1	29/06/2019	29/06/2019	12/07/2019	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	29	50	4.8	0.0	2.0	0.0	#DIV/0!	100.0
11	TN	1	1	03/08/2019	03/08/2019	10/08/2019	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	42	42	#DIV/0!	0.0	2.4	100.0	#DIV/0!	100.0
12	TN	1	1	03/08/2019	03/08/2019	13/08/2019	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	#DIV/0!	1.9	1.9	#DIV/0!	0.0	0.0
13	Susp. Klb campak	1	1	18/04/2019	18/04/2019	10/05/2019	4	3	7	0	0	0	4	3	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	7474	7095	14.569	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Rabies	1	1	29/01/2019	29/01/2019	03/02/2019	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	199	181	380	0.0	0.6	0.3	#DIV/0!	100.0	100.0

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 65

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)								
		JUMLAH KASUS			MENINGGAL			*CFR* (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Kuantan Singingi	120	131	251	0	1	1	0.0	0.8	0.4
2	Indragiri Hulu	158	179	337	1	1	2	0.6	0.6	0.6
3	Indragiri Hilir	49	35	84	0	1	1	0.0	2.9	1.0
4	Pelalawan	31	29	60	0	1	1	0.0	3.4	1.7
5	Siak	169	153	322	1	1	2	0.6	0.7	0.6
6	Kampar	178	168	346	2	1	3	1.1	0.6	0.3
7	Rokan Hulu	112	118	230	2	3	5	1.8	2.5	2.2
8	Bengkalis	644	472	1.116	3	5	8	0.5	1.1	0.7
9	Rokan Hilir	122	139	261	1	1	2	0.8	0.7	0.8
10	Kep. Meranti	124	116	240	1	0	1	0.8	0.0	0.4
11	Kota Pekanbaru	226	216	442	3	1	4	1.3	0.5	0.9
12	Kota Dumai	532	460	992	1	2	3	0.2	0.4	0.3
JUMLAH (KAB/KOTA)		2.465	2.216	4.681	15	18	33	0.6	0.8	0.7
INCIDENCE RATE PER 100.0		68.9	65.2	67.1						

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 66

KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	MALARIA															
		SUSPEK	KONFIRMASI LABORATORIUM			% KONFIRMASI LABORATORIUM	POSITIF			PENGOBATAN STANDAR	% PENGOBATAN STANDAR	MENINGGAL			*CFR*		
			MIKROSKOPIS	*RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT)*	TOTAL		L	P	L+P			L	P	L+P	L	P	L+P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Kuantan Singingi	122	103	19	122	100.0	4	0	4	4	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	Indragiri Hulu	141	1	140	141	100.0	1	1	2	2	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3	Indragiri Hilir	425	149	276	425	100.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4	Pelalawan	919	984	190	1.174	127.7	2	5	7	6	85.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Siak	68	0	92	92	135.3	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
6	Kampar	2	2	0	2	100.0	2	0	2	2	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7	Rokan Hulu	4	0	4	4	100.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
8	Bengkalis	377	67	310	377	100.0	20	11	31	30	96.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
9	Rokan Hilir	1.232	403	807	1.210	98.2	57	18	75	72	96.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10	Kep. Meranti	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
11	Kota Pekanbaru	8	3	27	30	375.0	6	0	6	6	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
12	Kota Dumai	667	670	0	670	100.4	2	1	3	2	66.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		3.965	2.382	1.865	4.247	107.1	94	36	130	124	95.4	0	0	0	0.0	0.0	0.0
ANGKA KESAKITAN (*ANNUAL PARASITE INCIDENCE*) PER 1.000 PENDUDUK							0.013	0.005	0.019								

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 67

PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	PENDERITA KRONIS FILARIASIS													
		KASUS KRONIS TAHUN SEBELUMNYA			KASUS KRONIS BARU DITEMUKAN			KASUS KRONIS PINDAH			KASUS KRONIS MENINGGAL			JUMLAH SELURUH KRONIS	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Kuantan Singingi	6	5	11	0	0	0	2	2	4	0	0	0	4	3
2	Indragiri Hulu	26	17	43	0	0	0	3	1	4	3	2	5	20	14
3	Indragiri Hilir	50	13	63	0	0	0	12	2	14	11	1	12	27	10
4	Pelalawan	13	4	17	0	0	0	2	1	3	1	1	2	10	2
5	Siak	10	9	19	0	0	0	3	1	4	4	0	4	3	8
6	Kampar	3	3	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	3
7	Rokan Hulu	3	3	6	2	1	3	1	1	2	0	1	1	4	2
8	Bengkalis	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
9	Rokan Hilir	23	8	31	0	0	0	5	0	5	3	1	4	15	7
10	Kep. Meranti	13	7	20	0	0	0	2	0	2	2	1	3	9	6
11	Kota Pekanbaru	1	3	4	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0
12	Kota Dumai	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH (KAB/KOTA)		151	75	226	4	1	5	32	11	43	24	7	31	99	58

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 68

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
					LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	KUANTAN SINGINGI	120.379	115.196	235.575	7.638	6.3	7.338	6.4	14.976	6.4
2	INDRAGIRI HULU	160.133	151.608	311.741	3.521	2.2	6.797	4.5	10.318	3.3
3	INDRAGIRI HILIR	274.283	258.340	427.051	8.323	3.0	9.645	3.7	22.995	5.4
4	PELALAWAN	171.733	159.692	95.021	4.068	2.4	3.908	2.4	7.976	8.4
5	SIAK	171.249	159.860	66.196	21.012	12.3	25.345	15.9	46.357	70.0
6	KAMPAR	307.403	292.853	176.213	7.653	2.5	6.262	2.1	13.915	7.9
7	ROKAN HULU	240.291	226.582	126.046	4.597	1.9	4.417	1.9	9.014	7.2
8	BENGKALIS	204.320	193.907	114.534	49.395	24.2	47.458	24.5	96.853	84.6
9	ROKAN HILIR	179.482	232.352	115.610	19.835	11.1	19.057	8.2	38.892	33.6
10	MERANTI	68.592	65.381	39.757	6.535	9.5	6.279	9.6	12.814	32.2
11	PEKANBARU	422.443	411.807	236.992	686	0.2	660	0.2	1.346	0.6
12	DUMAI	111.010	105.186	216.196	8.080	7.3	14.398	13.7	22.478	10.4
JUMLAH (KAB/KOTA)		2.431.318	2.372.764	2.160.932	141.343	5.8	151.564	6.4	297.934	13.8

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 69

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH PENDERITA DM	PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	
			JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KUANTAN SINGINGI	2.429	973.0	40.1
2	INDRAGIRI HULU	2.562	1889.0	73.7
3	INDRAGIRI HILIR	427.051	4135.0	1.0
4	PELALAWAN	1.964	1700.0	86.6
5	SIAK	16.109	13185.0	81.8
6	KAMPAR	6.505	3550.0	54.6
7	ROKAN HULU	7.878	3331.0	42.3
8	BENGKALIS	8.064	9883.0	122.6
9	ROKAN HILIR	5.938	5314.0	89.5
12	MERANTI	2.511	2040.0	81.2
10	PEKANBARU	17.393	554.0	3.2
11	DUMAI	3.517	2573.0	73.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		501.921	49.127	9.8

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 70

CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS)

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN DETEKSI DINI IVA & SADANIS*	PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN	PEMERIKSAAN LEHER RAHIM DAN PAYUDARA		IVA POSITIF		CURIGA KANKER		TUMOR/BENJOLAN	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	KUANTAN SINGINGI	25	44.341	1.524	3.4	12	0.8	0	0.0	0	0.0
2	INDRAGIRI HULU	20	57.771	1.801	3.1	95	5.3	0	0.0	0	0.0
3	INDRAGIRI HILIR	27	99.302	2.037	2.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0
4	PELALAWAN	14	56.039	5.317	9.5	9	0.2	0	0.0	0	0.0
5	SIAK	15	62.214	589	0.9	4	0.7	3	0.5	0	0.0
6	KAMPAR	31	111.875	1.286	1.1	17	1.3	0	0.0	0	0.0
7	ROKAN HULU	21	83.586	1.651	2.0	6	0.4	0	0.0	0	0.0
8	BENGKALIS	18	76.772	24.927	32.5	93	0.4	0	0.0	0	0.0
9	ROKAN HILIR	20	90.959	1.672	1.8	27	1.6	0	0.0	0	0.0
12	MERANTI	10	25.543	399	1.6	5	1.3	0	0.0	0	0.0
10	PEKANBARU	21	146.421	900	0.6	0	0.0	4	0.4	0	0.0
11	DUMAI	10	40.361	2.145	5.3	200	9.3	0	0.0	0	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		232	895.184	44.248	4.9	470	1.1	7	0.0	0	0.0

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: IVA: Inspeksi Visual dengan Asam asetat

* diisi dengan checklist (V)

TABEL 71

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KAB/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT		
		SASARAN ODGJ BERAT	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	
			JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KUANTAN SINGINGI	491	301	61.3
2	INDRAGIRI HULU	625	309	49.4
3	INDRAGIRI HILIR	910	910	100.0
4	PELALAWAN	725	581	80.1
5	SIAK	506	385	76.1
6	KAMPAR	1.208	640	53.0
7	ROKAN HULU	1.038	119	11.5
8	BENGKALIS	857	623	72.7
9	ROKAN HILIR	717	708	98.7
12	MERANTI	278	254	91.4
10	PEKANBARU	1.715	539	31.4
11	DUMAI	463	404	87.3
JUMLAH (KAB/KOTA)		9.533	5.773	60.6

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 72

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH SARANA AIR MINUM	INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (IKL)				PEMERIKSAAN			
			JUMLAH SARANA AIR MINUM DI IKL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DGN RESIKO RENDAH+ SEDANG	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	KUANTAN SINGINGI	274	265	96.72	215	81.1	224	81.8	129	57.6
2	INDRAGIRI HULU	28.095	366	1.30	189	51.6	165	0.6	78	47.3
3	INDRAGIRI HILIR	3.012	1.831	60.79	219	12.0	668	22.2	647	96.9
4	PELALAWAN	228	142	62.28	128	90.1	105	46.1	65	61.9
5	SIAK	248	178	71.77	107	60.1	17	6.9	17	100.0
6	KAMPAR	133.509	95.415	71.47	40.138	42.1	492	0.4	414	84.1
7	ROKAN HULU	130.155	291	0.22	275	94.5	217	0.2	217	100.0
8	BENGKALIS	209	132	63.16	75	56.8	59	28.2	43	72.9
9	ROKAN HILIR	93.903	21.221	22.60	3.231	15.2	146	0.2	62	42.5
10	MERANTI	50	50	100.00	50	100.0	31	62.0	24	77.4
11	PEKANBARU	2.373	594	25.03	446	75.1	467	19.7	418	89.5
12	DUMAI	369	268	72.63	257	95.9	268	72.6	239	89.2
JUMLAH		392.425	120.753	30.77	45.330	37.5	2.859	0.7	2.353	82.3

Sumber: Profil Kesehatan Kab/kota

TABEL 73

JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	SHARING/KOMUNAL		JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)		JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)		KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	KUANTAN SINGINGI	85.470	1.727	5.182	2.745	8.236	20.813	62.439	75.857	89
2	INDRAGIRI HULU	109.230	2.319	1.552	17.708	16.415	87.197	71.859	89.826	82
3	INDRAGIRI HILIR	184.187	2.049	2.022	190.876	41.700	62.625	62.598	106.320	58
4	PELALAWAN	93.152	58.554	58.554	23.514	23.514	3.682	3.682	85.750	92
5	SIAK	108.057	3.628	3.628	15.867	15.867	84.275	84.275	103.770	96
6	KAMPAR	201.350	23.902	18.672	23.371	17.104	143.201	143.608	179.384	89
7	ROKAN HULU	124.773	120.897	4.052	108.750	18.940	40.998	92.243	115.235	92
8	BENGKALIS	144.905	3.152	8.573	23.519	35.018	49.538	26.857	70.448	49
9	ROKAN HILIR	181.692	11.907	34.270	97.871	61.972	98.802	70.331	166.572	92
10	MERANTI	185.516	1.462	4.594	25.847	92.667	17.602	76.187	173.448	93
11	PEKANBARU	240.059	6.779	392	13.359	15.260	188.510	184.327	199.979	83
12	DUMAI	84.338	1.062	2.847	5.015	5.549	47.723	59.182	67.578	80
JUMLAH		1.742.729	237.438	144.337	548.442	352.243	844.966	937.587	1.434.167	82

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 74

DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
			DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STOP BABS (SBS)		DESA STBM	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	KUANTAN SINGINGI	229	202	88.2	57	24.9	202	88.2
2	INDRAGIRI HULU	194	143	73.7	67	34.5	143	73.7
3	INDRAGIRI HILIR	236	195	82.6	37	15.7	195	82.6
4	PELALAWAN	118	98	83.1	29	24.6	98	83.1
5	SIAK	131	93	71.0	32	24.4	93	71.0
6	KAMPAR	250	249	99.6	89	35.6	249	99.6
7	ROKAN HULU	148	142	95.9	66	44.6	142	95.9
8	BENGKALIS	155	142	91.6	61	39.4	142	91.6
9	ROKAN HILIR	197	86	43.7	4	2.0	86	43.7
10	MERANTI	101	93	92.1	36	35.6	93	92.1
11	PEKANBARU	83	80	96.4	28	33.7	80	96.4
12	DUMAI	33	33	100.0	13	39.4	33	100.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		1.875	1.556	83.0	519	27.7	1.556	83.0

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

TABEL 75

PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	TTU YANG ADA								TTU MEMENUHI SYARAT KESEHATAN															
		SARANA PENDIDIKAN			SARANA KESEHATAN		TEMPAT IBADAH	PASAR	JUMLAH TTU YANG ADA	SARANA PENDIDIKAN						SARANA KESEHATAN				TEMPAT IBADAH		PASAR		JUMLAH TOTAL	
										SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		PUSKESMAS		RUMAH SAKIT UMUM							
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	PUSKESMAS	RUMAH SAKIT UMUM				∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*
1	KUANTAN SINGINGI	264	102	46	25	2	928	72	1.439	197	74.6	58	56.9	36	78.3	12	48	2	100	702	75.6	6	8.3	1.013	70.4
2	INDRAGIRI HULU	332	99	65	20	1	772	41	1.289	245	73.8	70	70.7	41	63.1	20	100	1	100	512	66.3	28	68.3	917	71.1
3	INDRAGIRI HILIR	237	277	103	27	4	600	30	1.278	59	24.9	69	24.9	26	25.2	27	100	27	675	150	25.0	2	6.7	360	28.2
4	PELALAWAN	229	90	42	14	4	691	96	805	116	50.7	38	42.2	19	45.2	14	100	3	75	170	24.6	18	18.8	378	47.0
5	SIAK	250	142	75	15	2	548	130	1.162	159	63.6	77	54.2	41	54.7	15	100	1	50	199	36.3	29	22.3	521	44.8
6	KAMPAR	523	214	134	31	6	1.623	130	2.661	335	64.1	139	65.0	70	52.2	27	87	6	100	1.202	74.1	38	29.2	1.817	68.3
7	ROKAN HULU	387	147	90	21	1	1.213	164	2.023	125	32.3	45	30.6	30	33.3	21	100	1	100	585	48.2	57	34.8	864	42.7
8	BENGKALIS	372	144	98	18	7	1.281	85	2.005	216	58.1	71	49.3	48	49.0	14	78	0	0	251	19.6	19	22.4	619	30.9
9	ROKAN HILIR	371	167	97	20	6	1.224	96	1.981	217	58.5	96	57.5	43	44.3	10	50	3	50	373	30.5	40	41.7	782	39.5
10	MERANTI	192	84	47	10	1	488	1	823	76	39.6	26	31.0	6	12.8	10	100	1	100	139	28.5	0	0.0	258	31.3
11	PEKANBARU	326	154	120	21	31	733	21	1.406	251	77.0	131	85.1	94	78.3	24	114	19	61	499	68.1	10	47.6	1.028	73.1
12	DUMAI	114	53	34	10	3	326	10	550	106	93.0	43	81.1	34	100.0	10	100	3	100	245	75.2	0	0.0	441	80.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		3.597	1.673	951	232	68	10.427	876	17.422	2.102	58.4	863	51.6	488	51.3	204	88	67	99	5027	48.2	247	28.2	8998	51.6

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes

TABEL 76

TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	TPM YANG ADA					TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN									
		JASA BOGA	RUMAH MAKAN/RESTORAN	DEPOT AIR MINUM (DAM)	MAKANAN JAJANAN/ KANTIN/ SENTRA MAKANAN JAJANAN	JUMLAH TPM YANG ADA	JASA BOGA		RUMAH MAKAN/ RESTORAN		DEPOT AIR MINUM (DAM)		MAKANAN JAJANAN/KANTIN/SENTRA MAKANAN JAJANAN		JUMLAH TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN	
							JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	TOTAL	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	KUANTAN SINGINGI	254	220	274	561	1.309	139	54.7	97	44.1	121	44.2	204	36.4	561	42.9
2	INDRAGIRI HULU	97	342	332	663	1.434	40	41.2	163	47.7	195	58.7	281	42.4	679	47.4
3	INDRAGIRI HILIR	132	261	60	388	520	110	83.3	148	56.7	41	68.3	156	40.2	457	87.9
4	PELALAWAN	38	384	214	931	1.333	7	18.4	61	15.9	80	37.4	2	0.2	150	11.3
5	SIAK	17	215	242	236	710	6	35.3	99	46.0	151	62.4	58	24.6	314	44.2
6	KAMPAR	258	614	454	2.077	3.403	216	83.7	353	57.5	338	74.4	1.210	58.3	2.117	62.2
7	ROKAN HULU	33	362	224	981	1.600	13	39.4	64	17.7	126	56.3	111	11.3	314	19.6
8	BENGKALIS	63	365	306	970	1.704	39	61.9	27	7.4	73	23.9	72	7.4	211	12.4
9	ROKAN HILIR	146	345	262	2.530	3.283	34	23.3	93	27.0	51	19.5	366	14.5	544	16.6
10	MERANTI	51	37	43	273	404	15	29.4	5	13.5	38	88.4	32	11.7	90	22.3
11	PEKANBARU	122	698	698	309	1.827	82	67.2	482	69.1	519	74.4	205	66.3	1.288	70.5
12	DUMAI	13	156	306	437	912	10	76.9	108	69.2	266	86.9	298	68.2	682	74.8
JUMLAH		1.224	3.999	3.415	10.356	18.439	711	58.1	1.700	42.5	1.999	58.5	2.995	28.9	7.407	40.2

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

REKAP STATUS GIZI BALITA MENURUT INDIKATOR BB/U

BERDASARKAN EPPGBM

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Sasaran Riil	Jumlah Balita Ditimbang	%	Jumlah Balita Underweight	%	INDIKATOR BB/U							
							Gizi Buruk	%	Gizi Kurang	%	Gizi Baik	%	Gizi Lebih	%
1	KAB KUANTAN SINGINGI	29947	5420	18.10	464	8.56	78	1.44	386	7.12	4822	88.97	134	2.47
2	KAB INDRAGIRI HULU	37838	5356	14.16	505	9.43	121	2.26	384	7.17	4719	88.11	132	2.46
3	KAB INDRAGIRI HILIR	68316	11017	16.13	1219	11.06	213	1.93	1006	9.13	9423	85.53	375	3.40
4	KAB PELALAWAN	40897	16258	39.75	1056	6.50	217	1.33	839	5.16	14683	90.31	519	3.19
5	KAB S I A K	41728	3202	7.67	332	10.37	69	2.15	263	8.21	2795	87.29	75	2.34
6	KAB KAMPAR	78619	25849	32.88	2217	8.58	379	1.47	1838	7.11	23013	89.03	619	2.39
7	KAB ROKAN HULU	59618	8022	13.46	825	10.28	121	1.51	704	8.78	7023	87.55	174	2.17
8	KAB BENGKALIS	57817	16235	28.08	1510	9.30	207	1.28	1303	8.03	14099	86.84	626	3.86
9	KAB ROKAN HILIR	58755	25084	42.69	1116	4.45	206	0.82	910	3.63	23031	91.82	937	3.74
10	KAB KEPULAUAN MERANTI	16489	14301	86.73	1421	9.94	209	1.46	1212	8.47	12378	86.55	502	3.51
11	KOTA PEKANBARU	70335	13863	19.71	900	6.49	192	1.38	708	5.11	12593	90.84	370	2.67
12	KOTA D U M A I	40641	4673	11.50	343	7.34	33	0.71	310	6.63	4229	90.50	101	2.16
JUMLAH		601000	149280	24.84	11908	7.98	2045	1.37	9863	6.61	132808	88.97	4564	3.06

Sumber data : ePPGBM tanggal 13 Januari 2020

REKAP STATUS GIZI BALITA MENURUT INDIKATOR TB/U

BERDASARKAN EPPGBM

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Sasaran Riil	Jumlah Balita Diukur	%	Jumlah Balita Stunting	%	TB/U					
							Sangat Pendek	%	Pendek	%	Normal	%
1	KAB KUANTAN SINGINGI	29947	5420	18.10	650	11.99	184	3.39	466	8.60	4770	88.01
2	KAB INDRAGIRI HULU	37838	5356	14.16	831	15.52	250	4.67	581	10.85	4525	84.48
3	KAB INDRAGIRI HILIR	68316	11017	16.13	2021	18.34	799	7.25	1222	11.09	8996	81.66
4	KAB PELALAWAN	40897	16258	39.75	1742	10.71	654	4.02	1088	6.69	14516	89.29
5	KAB S I A K	41728	3202	7.67	455	14.21	163	5.09	292	9.12	2747	85.79
6	KAB KAMPAR	78619	25849	32.88	3128	12.10	1126	4.36	2002	7.74	22721	87.90
7	KAB ROKAN HULU	59618	8022	13.46	878	10.94	245	3.05	633	7.89	7144	89.06
8	KAB BENGKALIS	57817	16235	28.08	1813	11.17	585	3.60	1228	7.56	14422	88.83
9	KAB ROKAN HILIR	58755	25084	42.69	1474	5.88	522	2.08	952	3.80	23610	94.12
10	KAB KEPULAUAN MERANTI	16489	14301	86.73	1745	12.20	501	3.50	1244	8.70	12556	87.80
11	KOTA PEKANBARU	70335	13863	19.71	1248	9.00	465	3.35	783	5.65	12615	91.00
12	KOTA D U M A I	40641	4673	11.50	290	6.21	77	1.65	213	4.56	4383	93.79
JUMLAH		601000	149280	24.84	16275	10.90	5571	3.73	10704	7.17	133005	89.10

Sumber data : ePPGBM tanggal 13 Januari 2020

REKAP STATUS GIZI BALITA MENURUT INDIKATOR BB/TB

BERDASARKAN EPPGBM

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Sasaran Riil	Jumlah Balita Ditimbang dan Diukur	%	Jumlah Balita Wasting	%	INDIKATOR BB/TB							
							Sangat Kurus	%	Kurus	%	Normal	%	Gemuk	%
1	KAB KUANTAN SINGINGI	29947	5420	18.10	330	6.09	89	1.64	241	4.45	4904	90.48	186	3.43
2	KAB INDRAGIRI HULU	37838	5356	14.16	352	6.57	118	2.20	234	4.37	4736	88.42	268	5.00
3	KAB INDRAGIRI HILIR	68316	11017	16.13	635	5.76	238	2.16	397	3.60	9681	87.87	701	6.36
4	KAB PELALAWAN	40897	16258	39.75	1073	6.60	367	2.26	706	4.34	14515	89.28	670	4.12
5	KAB S I A K	41728	3202	7.67	184	5.75	39	1.22	145	4.53	2891	90.29	127	3.97
6	KAB KAMPAR	78619	25849	32.88	2131	8.24	662	2.56	1469	5.68	22702	87.83	1016	3.93
7	KAB ROKAN HULU	59618	8022	13.46	513	6.39	160	1.99	353	4.40	7249	90.36	260	3.24
8	KAB BENGKALIS	57817	16235	28.08	1413	8.70	479	2.95	934	5.75	13879	85.49	943	5.81
9	KAB ROKAN HILIR	58755	25084	42.69	1160	4.62	324	1.29	836	3.33	23001	91.70	923	3.68
10	KAB KEPULAUAN MERANTI	16489	14301	86.73	1172	8.20	302	2.11	870	6.08	12588	88.02	541	3.78
11	KOTA PEKANBARU	70335	13863	19.71	765	5.52	287	2.07	478	3.45	12556	90.57	542	3.91
12	KOTA D U M A I	40641	4673	11.50	107	2.29	17	0.36	90	1.93	4439	94.99	127	2.72
JUMLAH		601000	149280	24.84	9835	6.59	3082	2.06	6753	4.52	133141	89.19	6304	4.22

Sumber data : ePPGBM tanggal 13 Januari 2020

TABEL 68

KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES (GHPR) DAN ORANG MENINGGAL AKIBAT RABIES (LYSSA)

PROVINSI RIAU

TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH KASUS		JUMLAH KASUS GHPR	PENGOBATAN					Persentase Pemberian VAR (I)	Persentase Cuci Luka Gigitan	ORANG MENINGGAL (LYSSA RABIES POSITIF)	JENIS HEWAN PENGGIGIT				SPESIMEN HEWAN YG DIPERIKSA	SPESIMEN HEWAN YG POSITIF	KET
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN		CUCI LUKA	VAR I	VAR II	VAR III	SAR				ANJING	KUCING	KERA	LAIN-LAIN			
						2 DS	1 DS	1 DS											
1	Pekanbaru	151	172	323	322	193	166	110	1	59.8%	99.7%	0	164	135	16	2	0	0	
2	Kampar	148	92	240	240	223	211	181	0	92.9%	100.0%	0	121	80	25	7	0	0	
3	Indragiri Hulu	94	106	200	198	182	167	158	0	91.0%	99.0%	0	97	89	10	0	0	0	
4	Indragiri Hilir	43	29	72	70	66	60	59	0	91.7%	97.2%	0	57	4	0	0	0	0	
5	Bengkalis	216	105	321	226	307	286	194	0	95.6%	70.4%	0	220	81	18	4	2	0	
6	Rokan Hulu	114	86	200	199	145	69	40	0	72.5%	99.5%	0	121	67	17	0	1	2	
7	Rokan Hilir	137	98	235	214	214	100	84	0	91.1%	91.1%	0	128	29	13	0	0	0	
8	Siak	160	116	276	276	250	,	24	0	90.6%	100.0%	0	170	81	19	0	0	0	
9	Kuansing	103	77	180	180	169	166	159	0	93.9%	100.0%	1	102	62	17	1	0	0	
10	Pelalawan	51	31	82	57	54	41	41	0	65.9%	69.5%	0	42	13	1	0	0	0	
11	Dumai	152	165	317	317	128	32	11	0	40.4%	100.0%	0	143	143	15	0	0	0	
12	Meranti	34	34	68	65	68	34	13	0	100.0%	95.6%	0	36	15	4	1	0	0	
PROVINSI		1403	1111	2514	2364	1999	1332	1074	1	82.10%	93.50%	1	1401	799	155	15	3	2	

Sumber: Laporan Bulanan Kabupaten / Kota dan Laporan SKDR

RUMAH SAKIT MENURUT KABUPATEN/ KOTA

DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

NO	KAB/KOTA	Rumah Sakit									Rumah Sakit					Kepemilikan							Status Akreditasi					Rating				
		Swasta				Pemerintah				Jumlah	Swasta		Pemerintah		Jumlah																	
		A	B	C	D	A	B	C	D		Umum	Khusus	Umum	Khusus		Kemenkes	Pemprov	Pem kab/kot a	TNI/Polri	BUMN	Swasta	Jumlah	Paripurna	Utama	Madya	Dasar	Perdana	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1
1	Kuantan Singingi	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
2	Indragiri Hulu	0	0	1	1	0	0	1	0	3	1	1	1	0	3	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
3	Indragiri Hilir	0	0	0	1	0	0	1	2	4	1	0	3	0	4	0	0	3	0	0	1	4	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
4	Pelalawan	0	0	1	2	0	0	1	0	4	3	0	1	0	4	0	0	1	0	0	3	4	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2
5	Siak	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	Kampar	0	0	3	1	0	0	1	1	6	1	3	2	0	6	0	0	1	0	1	4	6	0	0	0	1	5	0	0	0	1	5
7	Rokan Hulu	0	0	2	2	0	0	1	0	5	4	0	1	0	5	0	0	1	0	0	4	5	0	0	1	0	3	0	0	1	0	3
8	Bengkalis	0	0	1	4	0	1	1	0	7	5	0	2	0	7	0	0	2	0	0	5	7	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3
9	Rokan Hilir	0	0	1	4	0	0	1	0	6	5	0	1	0	6	0	0	1	0	0	5	6	0	0	2	0	1	0	0	2	0	1
10	Kep. Meranti	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11	Kota Pekanbaru	0	4	18	1	1	1	4	2	31	16	7	7	1	31	1	3	1	3	0	23	31	8	2	2	1	12	8	2	2	1	12
12	Kota Dumai	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	3	0	3	0	0	1	1	1	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
PROVINSI		0	4	28	16	1	3	13	9	74	36	12	25	1	74	1	3	16	4	2	48	74	13	4	7	4	32	13	4	7	4	32

SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

PROVINSI RIAU TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	PEDAGANG BESAR FARMASI	APOTEK	APOTEK PRB	TOKO OBAT	TOKO ALKES	PIRT	KOSMETIK	PENYALUR ALAT KESEHATAN
1	KUANTAN SINGINGI	0	28	-	-	-	-	-	-
2	INDRAGIRI HULU	0	41	0	17	0	0	0	0
3	INDRAGIRI HILIR	0	25	-	-	-	-	-	-
4	PELALAWAN	0	34	0	49	0	0	0	0
5	SIAK	0	34	-	-	-	-	-	-
6	KAMPAR	1	67	0	52	0	0	0	0
7	ROKAN HULU	0	51	-	-	-	-	-	-
8	BENGKALIS	0	50	0	42	0	0	0	0
9	ROKAN HILIR	0	38	-	-	-	-	-	-
10	MERANTI	0	17	-	-	-	-	-	-
11	PEKANBARU	43	270	0	36	11	-	-	-
12	DUMAI	1	42	2	104	0	0	0	0
JUMLAH		45	697	2	300	11	0	0	0

JUMLAH SARANA KESEHATAN DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS REGISTRASI			JUMLAH TEMPAT TIDUR	PUSKESMAS OPERASIONAL	PUSKESMAS PEMBANTU	PUSKESMAS KELILING	RUMAH SAKIT		RUMAH BERSALIN	KLINIK		BALAI PENGOBATAN	PRAKTIK DOKTER				PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL	BANK DARAH RUMAH SAKIT	UNIT TRANSFUSI DARAH	LABORATORIUM KESEHATAN	LABOR
		NON RAWAT INAP	RAWAT INAP	TOTAL					KHUSUS	UMUM		PRATAMA	UTAMA		BERSAMA	UMUM PERORANGAN	GIGI PERORANGAN	SPESIALIS PERORANGAN					
1	KUANTAN SINGINGI	10	13	23		25	60	17	1	1		37	2			10	5					0	
2	INDRAGIRI HULU	12	8	20	104	20	130	30	1	2	0	31	2	4	0	34	14	0	1	1	1	0	
3	INDRAGIRI HILIR	3	23	26		28	175	9	0	4		17	4			84	22					1	- Upt. Labkesda INHIL
4	PELALAWAN	6	8	14		14	36	18	0	4	0	48	1	0	1	182	25	2	312	1	1	0	
5	SIAK	8	7	15		15	92	15	0	2		30	2			40	42					1	- UPT. Labkes Siak
6	KAMPAR	23	8	31	60	31	177	21	3	3	0	87	1	0	0	105	17	3	0	0	1	1	- UPT. Labkes Kampar
7	ROKAN HULU	13	8	21		21	89	26	0	5	136	51	4	0	1	54	18	0	0	0	0	1	- Upt. Labkesda Rohul
8	BENGKALIS	11	7	18	50	18	54	10	0	7	0	23	0	0	0	64	23	0				0	
9	ROKAN HILIR	9	10	19	98	20	80	8	0	6	0	20	2	0	0	24	5	0	0	0	0	0	
10	MERANTI	5	5	10		10	34	20	0	1	0	5	0	0	0	34	11	5	0	0	0	0	
11	PEKANBARU	15	6	21	0	21	13	17	8	23		186	11	0	0	158	122	12				1	- Labkesda Provinsi Riau
12	DUMAI	7	3	10	48	10	41	11	0	3	0	40	0	0	0	175	46	43	19	0	1	6	- Upt. Labkesda Dumai
JUMLAH		122	106	228	360	233	981	202	13	61	136	575	29	4	2	964	350	65	332	2	4	11	

LAPORAN 10 PENYAKIT TERBANYAK PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

1	KODE PENYAKIT	JENIS PENYAKIT	JUMLAH	%
1	J.00.J.01, J.05-06	Infeksi saluran nafas bagian atas akut lainnya	378.307	33.9179
2	M.79	Gangguan jaringan lunak lainnya (Reumatik)	38.265	3.430728
3	I.10	Hipertensi esensial (Primer)	198.543	17.80078
4	J.10-J.11	Influenza	84.401	7.567146
5	K.30	Dispepsia	108.631	9.739537
6	K.29	Gastritis dan Duodenitis	91.522	8.205594
7	L.20 - L.30	Dermatitis dan Eksim	68.500	6.141509
8	A.09.1	Diare dan Gastroenteritis oleh penyebab infeksi	61.526	5.516241
9	E.11	Diabetes Melitus tidak bergantung insulin	56.782	5.090908
10	L.00-L.08	Infeksi kulit dan jaringan subkutan	28.884	2.589655

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kestrad